BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR / TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah laporan keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,dan setelah memperoleh hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing–masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
12. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2...

Hy

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

a. pelaporan keuangan; dan
b. ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

a. LRA;
b. LPSAL;
c. LO;
d. LPE;
e. Neraca;
f. LAK; dan
g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
   a. realisasi pendapatan sebesar Rp1.518.838.398.066,36 (satu triliun lima ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah tiga puluh enam sen);
   b. realisasi belanja sebesar Rp1.566.007.011.626,50 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh juta sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen);
   c. realisasi defisit sebesar Rp47.168.613.560,14 (empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh rupiah empat belas sen) yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen);
   e. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   f. pembiayaan netto sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen) yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
   g. SiLPA sebesar Rp32.986.928.332,12 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua belas sen) yang merupakan jumlah antara realisasi defisit sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan realisasi pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada huruf f.

(2) Uraian...

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan yang merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.704.309.743.178,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
   2. realisasi pendapatan sebesar Rp1.518.838.398.066,36 (satu triliun lima ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah tiga puluh enam sen),

   sehingga menjadi selisih sebesar Rp(185.471.345.111,64) (minus seratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus sebelas rupiah enam puluh empat sen);

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja yang merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.784.465.285.070,26 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah dua puluh enam sen); dan
   2. realisasi belanja sebesar Rp1.566.007.011.626,50 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh juta sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen),

   sehingga menjadi selisih sebesar Rp(218.458.273.443,76) (minus dua ratus delapan belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen);

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit yang merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen); dan
   2. realisasi defisit sebesar Rp47.168.613.560,14 (empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh rupiah empat belas sen),

   sehingga menjadi selisih sebesar Rp32.986.928.332,12 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua belas sen);

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan yang merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen); dan
   2. realisasi sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen),

   sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran ...

HY

1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),

sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen); dan
   2. realisasi sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen),

   sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
g. selisih anggaran dengan realisasi SiLPA merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran SiLPA setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. realisasi sebesar Rp32.986.928.332,12 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua belas sen),

   sehingga menjadi selisih sebesar Rp32.986.928.332,12 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua belas sen).

(3) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
LPSAL

Pasal 5

(1) LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
   a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen);
   b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp80.155.541.892,26 (delapan puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh enam sen);
   c. SiLPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp32.986.928.332,12 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua belas sen);
   d. perhitungan selisih antara huruf a dan huruf b, tambah huruf c sebesar Rp32.986.928.332,12 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua belas sen);
   e. terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

f. saldo...

KY

f. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp32.986.928.332,12 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua belas sen).

(2) LPSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
LO

Pasal 6

(1) LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:
   a. pendapatan LO sebesar Rp1.334.734.087.035,09 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah nol sembilan sen);
   b. beban LO sebesar Rp1.414.321.935.776,55 (satu triliun empat ratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh lima sen);
   c. defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp79.587.848.741,46 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat puluh enam sen) yang merupakan selisih antara pendapatan LO sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan beban LO sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   e. defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp79.587.848.741,46 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat puluh enam sen) yang merupakan jumlah antara defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   f. pos luar biasa sebesar Rp(1.070.675.400,00) (minus satu miliar tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah); dan
   g. defisit LO sebesar Rp(80.658.524.141,46) (minus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah empat puluh enam sen) yang merupakan jumlah defisit sebelum pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan defisit pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf f.

(2) LO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
LPE

Pasal 7...

Pasal 7

(1) LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:
   a. ekuitas awal sebesar Rp2.432.885.928.524,15 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima belas sen);
   b. defisit LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sebesar Rp80.658.524.141,46 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah empat puluh enam sen);
   c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(160.781.807,85) (minus seratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah delapan puluh lima sen); dan
   d. ekuitas akhir sebesar Rp2.352.066.622.574,84 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar enam puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh empat sen).

(2) LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Neraca

Pasal 8

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e per 31 Desember 2025 terdiri dari:
   a. jumlah aset sebesar Rp2.380.923.456.857,01 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah nol satu sen);
   b. jumlah kewajiban sebesar Rp28.856.834.282,17 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah tujuh belas sen);
   c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.352.066.622.574,84 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar enam puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) yang merupakan selisih jumlah aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
   d. jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp2.380.923.456.857,01 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah nol satu sen) yang merupakan jumlah antara jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c.

(2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
LAK

Pasal 9 ...

Ny

Pasal 9

(1) LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 terdiri dari:
   a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp83.949.521.800,52 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah lima puluh dua sen);
   b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp79.086.323.037,86 (tujuh puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen);
   c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(126.254.936.598,00) (minus seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
   d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.572.969.477,20 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh sen);
   e. koreksi saldo awal kas sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   f. saldo akhir sebesar Rp38.353.877.717,58 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen).

(2) LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
CaLK

Pasal 10

(1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2025 terdiri dari:
   a. kualitatif atas pos laporan keuangan; dan
   b. informasi kuantitatif.

(2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Pelaporan Keuangan Lainnya

Pasal 11

Selain pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga termasuk pelaporan keuangan yang meliputi:

a. daftar rekapitulasi piutang Daerah, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
b. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
c. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

d. daftar...

d. daftar penyertaan modal investasi Daerah, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
e. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
f. daftar rekapitulasi aset tetap, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
g. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
h. daftar rekapitulasi aset lainnya, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
i. daftar dana cadangan Daerah, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
j. daftar kewajiban jangka pendek, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
k. daftar kewajiban jangka panjang, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
l. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ikhtisar Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 12

(1) Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit memuat:
   a. surat pernyataan direksi;
   b. laporan auditor independen;
   c. laporan posisi keuangan;
   d. laporan penghasilan komprehensif lainnya;
   e. LPE;
   f. LAK; dan
   g. CaLK.
(2) Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ...

MJ

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

EDWARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE
pada tanggal 10 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

YUSTINUS EDISON SIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 1-28/2026.

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian hukum	

Paraf Hierarki Pengundangan	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang mana memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan, pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pasti akan berhasil apabila didukung dengan program dan kegiatan yang dapat di implementasikan secara baik dengan dukungan partisipasi dari masyarakat dan dukungan anggaran yang memadai serta dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas.

Terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan realisasi dari program dan kegiatan maka anggaran yang disusun dan dilaksanakan sangat mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mewajibkan Bupati untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Mengacu pada Pasal 194 sampai dengan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat ketentuan terkait penyusunan sampai dengan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR ./.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR / TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING			ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
1			2	3
			LAMPIRAN I - Laporan Realisasi Anggaran Yang Terdiri Dari:	1
			LAMPIRAN I.1 - Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Realisasi Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi	2
			LAMPIRAN I.2 - Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan	3
			LAMPIRAN I.3 - Rincian APBD Menurut Realisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan	4
1	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	02	01	Dinas Kesehatan	
1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah	
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	04	01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	06	01	Dinas Sosial	
2	07	01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
2	08	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	09	01	Dinas Ketahanan Pangan	
2	11	01	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	13	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	14	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	15	01	Dinas Perhubungan	
2	16	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	18	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	19	01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	23	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3	25	01	Dinas Perikanan	
3	26	1	Dinas Pariwisata	
3	27	01	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
3	27	02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	30	01	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	
4	01	01	Sekretariat Daerah	
4	02	01	Sekretariat DPRD	

KODE REKENING			ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
1			2	3
5	01	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	02	01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	Badan Pendapatan Daerah	
5	04	01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	05	01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6	01	01	Inpektorat Daerah	
7	01	10	Kecamatan Mollo Utara	
7	01	11	Kecamatan Fatumnasi	
7	01	12	Kecamatan Tobu	
7	01	13	Kecamatan Nunbena	
7	01	14	Kecamatan Mollo Selatan	
7	01	15	Kecamatan Polen	
7	01	16	Kecamatan Mollo Barat	
7	01	17	Kecamatan Mollo Tengah	
7	01	18	Kecamatan Kota SoE	
7	01	19	Kecamatan Amanuban Barat	
7	01	20	Kecamatan Batuputih	
7	01	21	Kecamatan Kuatnana	
7	01	22	Kecamatan Amanuban Selatan	
7	01	23	Kecamatan Noebeba	
7	01	24	Kecamatan Kuanfatu	
7	01	25	Kecamatan Kualin	
7	01	26	Kecamatan Amanuban Tengah	
7	01	27	Kecamatan Kolbano	
7	01	28	Kecamatan Oenino	
7	01	29	Kecamatan Amanuban Timur	
7	01	30	Kecamatan Fautmolo	
7	01	31	Kecamatan Fatukopa	
7	01	32	Kecamatan KiE	
7	01	33	Kecamatan Kot'olin	
7	01	34	Kecamatan Amanatun Selatan	
7	01	35	Kecamatan Boking	
7	01	36	Kecamatan Nunkolo	
7	01	37	Kecamatan Noebana	
7	01	38	Kecamatan Santian	
7	01	39	Kecamatan Amanatun Utara	
7	01	40	Kecamatan Tolanas	
7	01	41	Kecamatan Kokbaun	
8	01	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			LAMPIRAN I.4 - Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Realisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	5
			LAMPIRAN II - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	6
			LAMPIRAN III - Laporan Operasional	7

KODE REKENING	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
1	2	3
	LAMPIRAN IV - Laporan Perubahan Ekuitas	8
	LAMPIRAN V - Neraca	9
	LAMPIRAN VI - Laporan Arus Kas	10
	LAMPIRAN VII - Catatan Atas Laporan Keuangan	11
	LAMPIRAN VIII - Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	12
	LAMPIRAN IX - Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	13
	LAMPIRAN X - Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	14
	LAMPIRAN XI - Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	15
	LAMPIRAN XII - Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	16
	LAMPIRAN XIII - Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	17
	LAMPIRAN XIV - Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	18
	LAMPIRAN XV - Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	19
	LAMPIRAN XVI - Daftar Dana Cadangan Daerah	20
	LAMPIRAN XVII - Daftar Kewajiban Jangka Pendek	21
	LAMPIRAN XVIII - Daftar Kewajiban Jangka Panjang	22
	LAMPIRAN XIX - Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya	23
	LAMPIRAN XX - Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	
	LAMPIRAN XX.1 - Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	
	LAMPIRAN XX.2 - Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/ Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	89,11	1.484.750.536.177,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18
4.1.01	Pajak Daerah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,57	14.919.206.165,33
4.1.02	Retribusi Daerah	8.599.964.934,00	35.564.196.626,00	413,53	7.153.486.499,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02	4.651.232.092,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,00	27.533.973.002,94
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74	1.342.136.980.808,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.230.318.000,00	5.219.767.538,00	99,79	5.406.451.753,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	915.592.981.000,00	873.657.067.032,00	95,41	834.715.979.702,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	375.314.669.000,00	311.439.188.891,00	82,98	221.495.560.083,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.296.137.968.000,00	1.190.316.023.461,00	91,83	1.061.617.991.538,00
4.2.01.05	Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63	238.354.154.749,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	250.178.892.000,00	198.278.615.684,00	79,25	238.354.154.749,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	42.164.834.521,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	40.961.700.521,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	42.164.834.521,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74	1.342.136.980.808,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	89,11	1.484.750.536.177,18
5	BELANJA DAERAH	1.784.465.285.070,26	1.566.007.011.626,50	87,75	1.564.899.056.682,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54	1.072.026.698.327,00
5.1.01	Belanja Pegawai	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37	648.876.618.174,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10	354.452.271.225,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27	68.167.808.928,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	91,67	530.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54	1.072.026.698.327,00
5.2	BELANJA MODAL	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00	88,77	166.227.066.280,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,95	28.284.032.581,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28	34.295.572.710,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,18	103.200.934.739,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00	88,77	166.227.066.280,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
5.4	BELANJA TRANSFER	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	84,52	325.616.669.367,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,70	886.875.098,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,65	258.351.154.749,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.173.850.400,00	91.895.940.400,00	99,69	86.375.639.520,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	84,52	325.616.669.267,00
	JUMLAH BELANJA	1.784.465.285.070,26	1.566.007.011.626,50	87,75	1.564.899.036.682,00
	SURPLUS/DEFISIT	(80.155.541.892,26)	(47.169.613.560,14)	58,84	(80.148.520.504,32)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
	PEMBIAYAAN NETTO	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	32.985.928.332,12	0,00	80.155.541.892,26

SOE, 10 AGUSTUS 2026
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran L1 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	(185.471.345.111,64)	89,12
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.240.313.286,00	32.577.090.567,90	6.336.777.281,90	124,15
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	23.961.295.992,00	29.936.662.040,90	5.975.366.048,90	124,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,55
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	4.890.454.148,90	122,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	4.890.454.148,90	122,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	4.890.454.148,90	122,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	26.180.125.295,00	26.180.125.295,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.411.295.992,00	121.624.845,90	(21.289.671.146,10)	0,57
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.279.017.294,00	2.640.428.527,00	361.411.233,00	115,86
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,88
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,88
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,88
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	4.1.01	Pajak Daerah	1.557.297.832,00	1.874.984.818,00	317.686.986,00	120,40
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	361.075.000,00	(238.925.000,00)	60,18
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	5.434.859,00	4.934.859,00	1.086,97
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.682.776.898,00	1.389.352.961,00	(293.423.937,00)	82,56
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,29
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,29
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,29
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,29
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	854.049.474,00	633.229.211,00	(220.820.263,00)	74,14

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	550.000.000,00	416.530.000,00	(133.470.000,00)	75,73
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		Dinas Perhubungan	550.000.000,00	416.530.000,00	(133.470.000,00)	75,73
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	416.530.000,00	(133.470.000,00)	75,73
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000,00	416.530.000,00	(133.470.000,00)	75,73
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	465.000.000,00	400.530.000,00	(64.470.000,00)	86,14
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.000.000,00	16.000.000,00	(69.000.000,00)	18,82
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.554.132.000,00	2.033.495.500,00	(520.636.500,00)	79,62
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,96
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.768.550.000,00	1.562.650.000,00	(205.900.000,00)	88,36
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,73
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,73

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,73
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,73
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	61.840.000,00	104,82
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	61.840.000,00	104,82
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	61.840.000,00	104,82
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.228.710.000,00	1.342.240.000,00	113.530.000,00	109,24
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.440.000,00	3.750.000,00	(51.690.000,00)	6,76
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	47.732.500,00	47.732.500,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	0,00	47.732.500,00	47.732.500,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	47.732.500,00	47.732.500,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	47.732.500,00	47.732.500,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	47.732.500,00	47.732.500,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	47.732.500,00	47.732.500,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.673.813.502.994,00	1.482.790.726.537,46	(191.022.776.456,54)	88,59
5.02			KEUANGAN	1.673.813.502.994,00	1.482.790.726.537,46	(191.022.776.456,54)	88,59
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.634.712.535.375,00	1.458.742.771.748,46	(175.969.763.626,54)	89,24
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.634.712.535.375,00	1.458.742.771.748,46	(175.969.763.626,54)	89,24
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.202.792.197,00	18.856.983.873,46	(14.345.808.323,54)	56,79
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	(2.350.171.365,00)	76,03
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.399.322.171,00	11.403.685.212,46	(11.995.636.958,54)	48,74
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	(162.446.341.133,00)	89,74
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.316.860.000,00	1.388.594.639.145,00	(157.722.220.855,00)	89,80
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	(4.724.120.278,00)	87,30
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	822.385.830,00	104,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	822.385.830,00	104,57
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pendapatan Daerah	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	(15.053.012.830,00)	61,50
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	(15.053.012.830,00)	61,50
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	(15.053.012.830,00)	61,50
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.01	Pajak Daerah	37.763.500.777,00	22.337.201.134,00	(15.426.299.643,00)	59,15
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.239.321.574,00	1.554.383.370,00	315.061.796,00	125,42
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.145.268,00	156.370.285,00	58.225.017,00	159,33
				19.018.000,00	0,00	(19.018.000,00)	0,00
	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	19.018.000,00	0,00	(19.018.000,00)	0,00
	4.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	19.018.000,00	0,00	(19.018.000,00)	0,00
	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.018.000,00	0,00	(19.018.000,00)	0,00
	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	19.018.000,00	0,00	(19.018.000,00)	0,00
		5	Belanja	1.784.465.285.070,26	1.566.007.011.626,50	(218.458.273.443,76)	87,76

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.044.079.615.118,36	938.848.570.349,00	(105.231.044.769,36)	89,92
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	655.426.618.298,52	577.471.397.823,00	(77.955.220.475,52)	88,11
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	655.426.618.298,52	577.471.397.823,00	(77.955.220.475,52)	88,11
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	655.426.618.298,52	577.471.397.823,00	(77.955.220.475,52)	88,11
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	610.877.829.555,52	542.635.083.421,00	(68.242.746.134,52)	88,83
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	(31.749.060.690,00)	93,55
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.109.311.088,52	81.615.625.644,00	(36.493.685.444,52)	69,10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	529.236.000,00	529.236.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	44.548.788.743,00	34.836.314.402,00	(9.712.474.341,00)	78,20
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.683.454.568,00	16.434.283.502,00	(2.249.171.066,00)	87,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.721.896.175,00	18.313.408.500,00	(7.408.487.675,00)	71,20
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	143.438.000,00	88.622.400,00	(54.815.600,00)	61,78
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	291.158.212.186,84	271.162.062.493,00	(19.996.149.693,84)	93,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	230.742.107.884,00	211.570.276.171,00	(19.171.831.713,00)	91,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	230.742.107.884,00	211.570.276.171,00	(19.171.831.713,00)	91,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	181.572.860.601,00	163.391.098.442,00	(18.181.762.159,00)	89,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	65.642.903.130,00	64.476.263.723,00	(1.166.639.407,00)	98,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.929.957.471,00	98.914.834.719,00	(17.015.122.752,00)	85,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	49.169.247.283,00	48.179.177.729,00	(990.069.554,00)	97,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.037.898.517,00	8.295.958.326,00	(741.940.191,00)	91,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.208.348.766,00	38.984.219.403,00	(224.129.363,00)	99,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	923.000.000,00	899.000.000,00	(24.000.000,00)	97,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah	60.416.104.302,84	59.591.786.322,00	(824.317.980,84)	98,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	60.416.104.302,84	59.591.786.322,00	(824.317.980,84)	98,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	54.765.404.302,84	54.100.852.902,00	(664.551.400,84)	98,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	(354.875.676,80)	99,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.353.340.114,04	15.043.664.390,00	(309.675.724,04)	97,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.650.700.000,00	5.490.933.420,00	(159.766.580,00)	97,17
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.000.000,00	1.098.000.000,00	(2.000.000,00)	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	(2.970.400,00)	99,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	(3.150.800,00)	99,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	(151.645.380,00)	79,78
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.017.147.257,00	56.985.013.962,00	(5.032.133.295,00)	91,89
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.972.130.098,00	27.009.127.237,00	(2.963.002.861,00)	90,11
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	29.972.130.098,00	27.009.127.237,00	(2.963.002.861,00)	90,11
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.871.404.522,00	10.207.889.194,00	(663.515.328,00)	93,90
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	(147.690.576,00)	96,78
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.279.208.457,00	5.763.383.705,00	(515.824.752,00)	91,79
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.100.725.576,00	16.801.238.043,00	(2.299.487.533,00)	87,96
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.000.000,00	103.226.892,00	(75.773.108,00)	57,67

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.921.725.576,00	16.698.011.151,00	(2.223.714.425,00)	88,25
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.045.017.159,00	29.975.886.725,00	(2.069.130.434,00)	93,54
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	5	BELANJA DAERAH	32.045.017.159,00	29.975.886.725,00	(2.069.130.434,00)	93,54
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.387.233.159,00	21.636.572.924,00	(1.750.660.235,00)	92,51
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.387.233.159,00	21.636.572.924,00	(1.750.660.235,00)	92,51
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.657.784.000,00	8.339.313.801,00	(318.470.199,00)	96,32
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.407.784.000,00	8.339.313.801,00	(68.470.199,00)	99,19
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.430.805.135,00	8.917.356.959,00	(1.513.448.176,00)	85,49
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.430.805.135,00	8.917.356.959,00	(1.513.448.176,00)	85,49
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	5	BELANJA DAERAH	10.430.805.135,00	8.917.356.959,00	(1.513.448.176,00)	85,49
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.138.783.335,00	7.585.822.057,00	(552.961.278,00)	93,21
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	(97.672.946,00)	97,87
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.552.599.137,00	3.097.310.805,00	(455.288.332,00)	87,18
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.292.021.800,00	1.331.534.902,00	(960.486.898,00)	58,09
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.879.738.000,00	1.050.424.762,00	(829.313.238,00)	55,88
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	412.283.800,00	281.110.140,00	(131.173.660,00)	68,18
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.106.954.565,00	10.722.772.793,00	(384.181.772,00)	96,54
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	7.873.930.366,00	7.768.995.803,00	(104.934.563,00)	98,67
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.873.930.366,00	7.768.995.803,00	(104.934.563,00)	98,67
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.792.930.366,00	7.689.184.774,00	(103.745.592,00)	98,67
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	(63.788.827,00)	98,03
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.549.662.772,00	4.509.706.007,00	(39.956.765,00)	99,12
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	81.000.000,00	79.811.029,00	(1.188.971,00)	98,53
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.000.000,00	79.811.029,00	(1.188.971,00)	98,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.233.024.199,00	2.953.776.990,00	(279.247.209,00)	91,36
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.233.024.199,00	2.953.776.990,00	(279.247.209,00)	91,36
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.022.224.199,00	2.761.564.250,00	(260.659.949,00)	91,38
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	(30.899.554,00)	98,01
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.466.373.538,00	1.236.613.143,00	(229.760.395,00)	84,33
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	210.800.000,00	192.212.740,00	(18.587.260,00)	91,18
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.800.000,00	192.212.740,00	(18.587.260,00)	91,18
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.939.877.676,00	13.589.966.319,00	(349.911.357,00)	97,49
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	13.939.877.676,00	13.589.966.319,00	(349.911.357,00)	97,49
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.939.877.676,00	13.589.966.319,00	(349.911.357,00)	97,49
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.886.877.676,00	13.536.966.319,00	(349.911.357,00)	97,48
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	(132.215.031,00)	93,27
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.923.425.361,00	11.705.729.035,00	(217.696.326,00)	98,17
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	70.341.604.566,86	65.735.230.009,00	(4.606.374.557,86)	93,45
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.253.268.577,00	5.180.005.644,00	(73.262.933,00)	98,61
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.253.268.577,00	5.180.005.644,00	(73.262.933,00)	98,61
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.253.268.577,00	5.180.005.644,00	(73.262.933,00)	98,61
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.218.192.577,00	5.145.595.644,00	(72.596.933,00)	98,61
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	(41.186.599,00)	97,38
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.646.068.368,00	3.614.658.034,00	(31.410.334,00)	99,14
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.076.000,00	34.410.000,00	(666.000,00)	98,10
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.076.000,00	34.410.000,00	(666.000,00)	98,10
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.275.202.351,86	3.970.042.100,00	(305.160.251,86)	92,86
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.275.202.351,86	3.970.042.100,00	(305.160.251,86)	92,86
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.275.202.351,86	3.970.042.100,00	(305.160.251,86)	92,86
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.272.702.351,86	3.967.542.100,00	(305.160.251,86)	92,86
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	(38.642.062,25)	97,67
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.611.079.522,61	2.344.561.333,00	(266.518.189,61)	89,79
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.731.636.140,00	5.408.483.079,00	(323.153.061,00)	94,36
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan	5.731.636.140,00	5.408.483.079,00	(323.153.061,00)	94,36
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.731.636.140,00	5.408.483.079,00	(323.153.061,00)	94,36
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.638.136.140,00	5.314.983.154,00	(323.152.986,00)	94,27
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	(58.132.145,00)	96,48
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.985.114.180,00	3.720.093.339,00	(265.020.841,00)	93,35
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	93.500.000,00	93.499.925,00	(75,00)	100,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.500.000,00	93.499.925,00	(75,00)	100,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	5	BELANJA DAERAH	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	154.429.912,00	154.284.812,00	(145.100,00)	99,91
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.429.912,00	154.284.812,00	(145.100,00)	99,91
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.870.000,00	(130.000,00)	99,28
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	17.870.000,00	(130.000,00)	99,28
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.593.878.659,00	3.533.011.061,00	(60.867.598,00)	98,31
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,84
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,84
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,84
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,84
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	3.584.803.659,00	3.524.223.061,00	(60.580.598,00)	98,31
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.584.803.659,00	3.524.223.061,00	(60.580.598,00)	98,31

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.582.903.659,00	3.522.323.061,00	(60.580.598,00)	98,31
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	(26.488.804,00)	98,09
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.198.276.746,00	2.164.184.952,00	(34.091.794,00)	98,45
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.449.172.430,00	5.045.974.501,00	(403.197.929,00)	92,60
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.449.172.430,00	5.045.974.501,00	(403.197.929,00)	92,60
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.449.172.430,00	5.045.974.501,00	(403.197.929,00)	92,60
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.620.292.430,00	4.306.460.018,00	(313.832.412,00)	93,21
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	(184.817.201,00)	93,54
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.758.770.500,00	1.629.755.289,00	(129.015.211,00)	92,66
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	828.880.000,00	739.514.483,00	(89.365.517,00)	89,22
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	828.880.000,00	739.514.483,00	(89.365.517,00)	89,22
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.397.515.388,00	6.928.421.851,00	(469.093.537,00)	93,66
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.397.515.388,00	6.928.421.851,00	(469.093.537,00)	93,66
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.397.515.388,00	6.928.421.851,00	(469.093.537,00)	93,66
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.293.048.388,00	6.823.954.851,00	(469.093.537,00)	93,57
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.005.285.688,00	2.975.283.276,00	(30.002.412,00)	99,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.762.700,00	3.848.671.575,00	(439.091.125,00)	89,76
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	104.467.000,00	104.467.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.467.000,00	104.467.000,00	0,00	100,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	(461.234.198,00)	95,53
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	(461.234.198,00)	95,53
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	(461.234.198,00)	95,53
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	(461.234.198,00)	95,53
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	(13.312.324,00)	99,22
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.605.533.664,00	8.157.611.790,00	(447.921.874,00)	94,79
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.148.208.103,00	4.224.850.057,00	(923.358.046,00)	82,06
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		Dinas Perhubungan	5.148.208.103,00	4.224.850.057,00	(923.358.046,00)	82,06
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	5.148.208.103,00	4.224.850.057,00	(923.358.046,00)	82,06
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.769.001.903,00	3.696.269.871,00	(72.732.032,00)	98,07
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	(27.660.095,00)	98,88
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.111.345,00	1.258.039.408,00	(45.071.937,00)	96,54
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.379.206.200,00	528.580.186,00	(850.626.014,00)	38,32
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.006.200,00	245.307.850,00	(18.698.350,00)	92,92
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	283.272.336,00	(116.727.664,00)	70,82
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	715.200.000,00	0,00	(715.200.000,00)	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.299.784.937,00	3.263.265.532,00	(36.519.405,00)	98,89
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	3.299.784.937,00	3.263.265.532,00	(36.519.405,00)	98,89
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5	BELANJA DAERAH	3.299.784.937,00	3.263.265.532,00	(36.519.405,00)	98,89

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.048.134.937,00	3.011.939.232,00	(36.195.705,00)	98,81
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.291.463.713,00	1.267.148.710,00	(24.315.003,00)	98,12
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.756.671.224,00	1.744.790.522,00	(11.880.702,00)	99,32
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	251.650.000,00	251.326.300,00	(323.700,00)	99,87
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.650.000,00	251.326.300,00	(323.700,00)	99,87
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	(361.234.195,00)	92,21
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	(361.234.195,00)	92,21
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	(361.234.195,00)	92,21
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	(361.234.195,00)	92,21
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	(175.186.238,00)	93,08
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.104.342.151,00	1.918.294.194,00	(186.047.957,00)	91,16
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	(219.065.102,00)	90,55
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	(219.065.102,00)	90,55
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	(219.065.102,00)	90,55
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	(219.065.102,00)	90,55
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	(20.283.423,00)	98,74
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.719.700,00	511.938.021,00	(198.781.679,00)	72,03
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.608.734.370,00	7.068.258.644,00	(540.475.726,00)	92,90
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.608.734.370,00	7.068.258.644,00	(540.475.726,00)	92,90
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.608.734.370,00	7.068.258.644,00	(540.475.726,00)	92,90
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.688.019.370,00	6.381.884.197,00	(306.135.173,00)	95,42
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	(57.090.903,00)	96,50
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.025.804.103,00	4.806.759.833,00	(219.044.270,00)	95,64
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	920.715.000,00	686.374.447,00	(234.340.553,00)	74,55
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	916.215.000,00	681.874.447,00	(234.340.553,00)	74,42
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5	BELANJA DAERAH	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5	BELANJA DAERAH	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.930.670.100,00	1.629.449.250,00	(301.220.850,00)	84,40
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.930.670.100,00	1.629.449.250,00	(301.220.850,00)	84,40

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.930.670.100,00	1.629.449.250,00	(301.220.850,00)	84,40
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.661.170.100,00	1.461.949.250,00	(199.220.850,00)	88,01
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.661.170.100,00	1.461.949.250,00	(199.220.850,00)	88,01
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	269.500.000,00	167.500.000,00	(102.000.000,00)	62,15
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.000.000,00	160.000.000,00	(102.000.000,00)	61,07
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.036.168.184,00	2.914.261.525,00	(121.906.659,00)	95,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.036.168.184,00	2.914.261.525,00	(121.906.659,00)	95,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.036.168.184,00	2.914.261.525,00	(121.906.659,00)	95,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.651.911.484,00	2.530.554.525,00	(121.356.959,00)	95,42
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	(107.291.863,00)	93,90
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.505.784,00	878.440.688,00	(14.065.096,00)	98,42
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	384.256.700,00	383.707.000,00	(549.700,00)	99,86
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.500.000,00	273.237.000,00	(263.000,00)	99,90
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.756.700,00	110.470.000,00	(286.700,00)	99,74
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	124.157.950,00	117.807.983,00	(6.349.967,00)	94,89
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	124.157.950,00	117.807.983,00	(6.349.967,00)	94,89
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	124.157.950,00	117.807.983,00	(6.349.967,00)	94,89
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	88.657.950,00	82.307.983,00	(6.349.967,00)	92,84
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.657.950,00	82.307.983,00	(6.349.967,00)	92,84
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	51.761.720.727,00	48.755.994.164,00	(3.005.726.563,00)	94,19
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.417.848.198,00	5.271.376.639,00	(146.471.559,00)	97,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	5.417.848.198,00	5.271.376.639,00	(146.471.559,00)	97,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.417.848.198,00	5.271.376.639,00	(146.471.559,00)	97,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.129.548.198,00	4.993.463.989,00	(136.084.209,00)	97,35
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.041.331.566,00	1.986.273.998,00	(55.057.568,00)	97,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.088.216.632,00	3.007.189.991,00	(81.026.641,00)	97,38
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	288.300.000,00	277.912.650,00	(10.387.350,00)	96,40
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.300.000,00	90.300.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	187.612.650,00	(10.387.350,00)	94,75
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.587.197.251,00	3.411.946.121,00	(175.251.130,00)	95,11
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	3.587.197.251,00	3.411.946.121,00	(175.251.130,00)	95,11
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.587.197.251,00	3.411.946.121,00	(175.251.130,00)	95,11
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.229.773.251,00	3.056.166.421,00	(173.606.830,00)	94,62
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	(32.587.874,00)	98,03
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.577.354.148,00	1.436.335.192,00	(141.018.956,00)	91,06
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	357.424.000,00	355.779.700,00	(1.644.300,00)	99,54
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	357.424.000,00	355.779.700,00	(1.644.300,00)	99,54
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.991.099.778,00	36.359.121.144,00	(2.631.978.634,00)	93,25
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22.667.259.783,00	21.593.528.387,00	(1.073.731.396,00)	95,26
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.667.259.783,00	21.593.528.387,00	(1.073.731.396,00)	95,26

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.415.259.783,00	21.411.813.714,00	(1.003.446.069,00)	95,52
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	(277.158.868,00)	97,83
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.659.055.040,00	8.932.767.839,00	(726.287.201,00)	92,48
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	252.000.000,00	181.714.673,00	(70.285.327,00)	72,11
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000,00	40.500.000,00	(3.500.000,00)	92,05
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	208.000.000,00	141.214.673,00	(66.785.327,00)	67,89
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.323.839.995,00	14.765.592.757,00	(1.558.247.238,00)	90,45
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	16.323.839.995,00	14.765.592.757,00	(1.558.247.238,00)	90,45
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.010.639.995,00	14.535.635.507,00	(1.475.004.488,00)	90,79
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.344.150.999,00	5.273.073.729,00	(71.077.270,00)	98,67
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.666.488.996,00	9.262.561.778,00	(1.403.927.218,00)	86,84
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	313.200.000,00	229.957.250,00	(83.242.750,00)	73,42
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.950.000,00	82.341.500,00	(5.608.500,00)	93,62
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.250.000,00	147.615.750,00	(77.634.250,00)	65,53
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.536.448.050,00	1.532.610.400,00	(3.837.650,00)	99,75
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	1.536.448.050,00	1.532.610.400,00	(3.837.650,00)	99,75
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.536.448.050,00	1.532.610.400,00	(3.837.650,00)	99,75
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.517.245.050,00	1.513.824.400,00	(3.420.650,00)	99,77
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.517.245.050,00	1.513.824.400,00	(3.420.650,00)	99,77
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.203.000,00	18.786.000,00	(417.000,00)	97,83
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.203.000,00	18.786.000,00	(417.000,00)	97,83
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.041.297.950,00	1.993.521.360,00	(47.776.590,00)	97,66
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.041.297.950,00	1.993.521.360,00	(47.776.590,00)	97,66
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.041.297.950,00	1.993.521.360,00	(47.776.590,00)	97,66
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.017.797.950,00	1.975.068.360,00	(42.729.590,00)	97,88
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.017.797.950,00	1.975.068.360,00	(42.729.590,00)	97,88
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.500.000,00	18.453.000,00	(5.047.000,00)	78,52
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.453.000,00	(47.000,00)	99,75
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	187.829.500,00	187.418.500,00	(411.000,00)	99,78
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Transnigrasi	187.829.500,00	187.418.500,00	(411.000,00)	99,78
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	187.829.500,00	187.418.500,00	(411.000,00)	99,78
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	148.829.500,00	148.666.500,00	(163.000,00)	99,89
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.829.500,00	148.666.500,00	(163.000,00)	99,89
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	39.000.000,00	38.752.000,00	(248.000,00)	99,36
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	38.752.000,00	(248.000,00)	99,36
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.147.110.326,00	76.209.616.422,00	(2.937.493.904,00)	96,29
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	33.051.728.277,00	31.428.463.411,00	(1.623.264.866,00)	95,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Umum	20.823.360.127,00	20.200.372.495,00	(622.987.632,00)	97,01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	20.823.360.127,00	20.200.372.495,00	(622.987.632,00)	97,01

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.089.281.927,00	19.504.223.795,00	(585.058.132,00)	97,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	10.561.595.648,00	10.205.833.594,00	(355.762.054,00)	96,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.527.686.279,00	9.298.390.201,00	(229.296.078,00)	97,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	734.078.200,00	696.148.700,00	(37.929.500,00)	94,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	638.943.100,00	601.148.700,00	(37.794.400,00)	94,08
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.135.100,00	95.000.000,00	(135.100,00)	99,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		Bagian Hukum	366.625.250,00	363.592.296,00	(3.032.954,00)	99,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	366.625.250,00	363.592.296,00	(3.032.954,00)	99,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	349.325.250,00	346.292.296,00	(3.032.954,00)	99,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.325.250,00	346.292.296,00	(3.032.954,00)	99,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	586.321.000,00	585.381.264,00	(939.736,00)	99,84
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	586.321.000,00	585.381.264,00	(939.736,00)	99,84
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	298.321.000,00	298.022.564,00	(298.436,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.321.000,00	298.022.564,00	(298.436,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	288.000.000,00	287.358.700,00	(641.300,00)	99,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.000.000,00	287.358.700,00	(641.300,00)	99,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		Bagian Pemerintahan	859.120.500,00	858.403.736,00	(716.764,00)	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	859.120.500,00	858.403.736,00	(716.764,00)	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	859.120.500,00	858.403.736,00	(716.764,00)	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.120.500,00	858.403.736,00	(716.764,00)	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	351.514.400,00	319.467.226,00	(32.047.174,00)	90,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	351.514.400,00	319.467.226,00	(32.047.174,00)	90,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	324.014.400,00	291.994.726,00	(32.019.674,00)	90,12
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.014.400,00	291.994.726,00	(32.019.674,00)	90,12
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	27.500.000,00	27.472.500,00	(27.500,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	27.472.500,00	(27.500,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		Bagian Administrasi Pembangunan	256.567.000,00	255.967.407,00	(599.593,00)	99,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	256.567.000,00	255.967.407,00	(599.593,00)	99,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	241.567.000,00	240.982.407,00	(584.593,00)	99,76
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.567.000,00	240.982.407,00	(584.593,00)	99,76
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	488.054.000,00	469.552.572,00	(18.501.428,00)	96,21
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	488.054.000,00	469.552.572,00	(18.501.428,00)	96,21
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	451.270.300,00	432.933.672,00	(18.336.628,00)	95,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.270.300,00	432.933.672,00	(18.336.628,00)	95,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	36.783.700,00	36.618.900,00	(164.800,00)	99,55
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.783.700,00	36.618.900,00	(164.800,00)	99,55
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015		Bagian Organisasi	389.042.000,00	387.102.415,00	(1.939.585,00)	99,50
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	389.042.000,00	387.102.415,00	(1.939.585,00)	99,50
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	338.042.000,00	336.708.415,00	(1.333.585,00)	99,61
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.042.000,00	336.708.415,00	(1.333.585,00)	99,61
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	51.000.000,00	50.394.000,00	(606.000,00)	98,81
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.000.000,00	50.394.000,00	(606.000,00)	98,81
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.931.124.000,00	7.988.624.000,00	(942.500.000,00)	89,45
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	8.931.124.000,00	7.988.624.000,00	(942.500.000,00)	89,45
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.921.424.000,00	7.978.924.000,00	(942.500.000,00)	89,44
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.424.000,00	410.424.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	(883.000.000,00)	88,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	(59.500.000,00)	91,68
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	46.095.382.049,00	44.781.153.011,00	(1.314.229.038,00)	97,15
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	46.095.382.049,00	44.781.153.011,00	(1.314.229.038,00)	97,15
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	46.095.382.049,00	44.781.153.011,00	(1.314.229.038,00)	97,15
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.521.057.049,00	44.227.112.861,00	(1.293.944.188,00)	97,16
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	(547.707.816,00)	97,51
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.555.100.233,00	22.808.863.861,00	(746.236.372,00)	96,83
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	574.325.000,00	554.040.150,00	(20.284.850,00)	96,47
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	524.325.000,00	504.302.150,00	(20.022.850,00)	96,18
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.738.000,00	(262.000,00)	99,48
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	475.585.490.730,20	375.496.934.591,00	(100.088.556.139,20)	78,95
5.01			PERENCANAAN	5.746.532.276,00	5.531.299.028,00	(215.233.248,00)	96,25
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.746.532.276,00	5.531.299.028,00	(215.233.248,00)	96,25
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.746.532.276,00	5.531.299.028,00	(215.233.248,00)	96,25
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.661.089.720,00	5.445.863.528,00	(215.226.192,00)	96,20
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	(54.563.287,00)	98,14
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.724.051.356,00	2.563.388.451,00	(160.662.905,00)	94,10
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	85.442.556,00	85.435.500,00	(7.056,00)	99,99
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.442.556,00	85.435.500,00	(7.056,00)	99,99
5.02			KEUANGAN	459.620.448.890,20	360.826.180.625,00	(98.794.268.265,20)	78,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	452.345.493.124,20	353.738.215.949,00	(98.607.277.175,20)	78,20
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	452.345.493.124,20	353.738.215.949,00	(98.607.277.175,20)	78,20
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	110.930.501.026,20	65.568.698.767,00	(45.361.802.259,20)	59,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	103.515.572.299,20	58.855.091.594,00	(44.660.480.705,20)	56,86
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.414.928.727,00	6.713.607.173,00	(701.321.554,00)	90,54
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.980.889.500,00	1.974.310.300,00	(6.579.200,00)	99,67
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.783.389.500,00	1.777.123.400,00	(6.266.100,00)	99,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.500.000,00	197.186.900,00	(313.100,00)	99,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	(1.054.324.600,00)	50,38
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	(1.054.324.600,00)	50,38
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	(52.184.571.116,00)	84,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	(6.384.800,00)	99,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	(52.178.186.316,00)	84,43
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pendapatan Daerah	7.274.955.766,00	7.087.964.676,00	(186.991.090,00)	97,43
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	7.274.955.766,00	7.087.964.676,00	(186.991.090,00)	97,43
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.964.843.066,00	6.779.495.676,00	(185.347.390,00)	97,34
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.062.373.021,00	2.966.625.628,00	(95.747.393,00)	96,87
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.902.470.045,00	3.812.870.048,00	(89.599.997,00)	97,70
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	310.112.700,00	308.469.000,00	(1.643.700,00)	99,47
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.112.700,00	308.469.000,00	(1.643.700,00)	99,47
5.03			KEPEGAWAIAN	5.571.809.035,00	4.759.024.795,00	(812.784.240,00)	85,41
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.571.809.035,00	4.759.024.795,00	(812.784.240,00)	85,41
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.571.809.035,00	4.759.024.795,00	(812.784.240,00)	85,41
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.493.309.035,00	4.680.524.795,00	(812.784.240,00)	85,20

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	(40.741.103,00)	98,69
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.376.406.672,00	1.604.363.535,00	(772.043.137,00)	67,51
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	100,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	(150.356.968,00)	89,75
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	(150.356.968,00)	89,75
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	151.500.000,00	149.749.999,00	(1.750.001,00)	98,84
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.500.000,00	149.749.999,00	(1.750.001,00)	98,84
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.028.490.029,00	2.914.326.612,00	(114.163.417,00)	96,23
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.028.490.029,00	2.914.326.612,00	(114.163.417,00)	96,23
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.028.490.029,00	2.914.326.612,00	(114.163.417,00)	96,23
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.970.290.029,00	2.859.215.222,00	(111.074.807,00)	96,26
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	(98.677.137,00)	94,98
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.030.480,00	991.632.810,00	(12.397.670,00)	98,77
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	58.200.000,00	55.111.390,00	(3.088.610,00)	94,69
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.200.000,00	55.111.390,00	(3.088.610,00)	94,69
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7.338.579.971,00	7.189.319.552,00	(149.260.419,00)	97,97
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	7.338.579.971,00	7.189.319.552,00	(149.260.419,00)	97,97
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Daerah	7.338.579.971,00	7.189.319.552,00	(149.260.419,00)	97,97
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.338.579.971,00	7.189.319.552,00	(149.260.419,00)	97,97
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.486.136.071,00	6.369.061.552,00	(117.074.519,00)	98,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	(36.857.584,00)	98,86
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.246.213.830,00	3.165.996.895,00	(80.216.935,00)	97,53
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	852.443.900,00	820.258.000,00	(32.185.900,00)	96,22
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	852.443.900,00	820.258.000,00	(32.185.900,00)	96,22
7			UNSUR KEWILAYAHAN	51.040.557.476,84	49.664.984.420,50	(1.375.573.056,34)	97,30
7.01			KECAMATAN	51.040.557.476,84	49.664.984.420,50	(1.375.573.056,34)	97,30
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		Kecamatan Amanuban Timur	1.668.522.181,00	1.616.277.251,00	(52.244.930,00)	96,87
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5	BELANJA DAERAH	1.668.522.181,00	1.616.277.251,00	(52.244.930,00)	96,87
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.668.522.181,00	1.616.277.251,00	(52.244.930,00)	96,87
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	(34.116.464,00)	97,68
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.487.778,00	177.359.312,00	(18.128.466,00)	90,73
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		Kecamatan Fautmolo	1.245.628.254,00	1.226.309.651,00	(19.318.603,00)	98,45
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5	BELANJA DAERAH	1.245.628.254,00	1.226.309.651,00	(19.318.603,00)	98,45
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.238.128.254,00	1.218.809.651,00	(19.318.603,00)	98,44
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	(18.966.208,00)	98,22
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.120.957,00	169.768.562,00	(352.395,00)	99,79
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		Kecamatan Amanatun Selatan	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	(53.805.501,00)	95,95
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5	BELANJA DAERAH	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	(53.805.501,00)	95,95
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	(53.805.501,00)	95,95
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	(14.743.014,00)	98,69
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.615.551,00	166.553.064,00	(39.062.487,00)	81,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		Kecamatan KIE	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	(14.459.638,00)	98,90

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5	BELANJA DAERAH	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	(14.459.638,00)	98,90
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	(14.459.638,00)	98,90
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	(14.459.638,00)	98,72
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.709.179,00	185.709.179,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000		Kecamatan Amanuban Tengah	2.248.221.278,00	2.207.392.211,00	(40.829.067,00)	98,18
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	2.248.221.278,00	2.207.392.211,00	(40.829.067,00)	98,18
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.041.721.278,00	2.000.892.211,00	(40.829.067,00)	98,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	(35.830.487,00)	98,06
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.489.178,00	188.490.598,00	(4.998.580,00)	97,42
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000		Kecamatan Kualin	1.294.689.826,00	1.276.074.579,00	(18.615.247,00)	98,56
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	1.294.689.826,00	1.276.074.579,00	(18.615.247,00)	98,56
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.286.664.069,00	1.268.048.822,00	(18.615.247,00)	98,55
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	(17.765.247,00)	98,41
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.015.860,00	170.165.860,00	(850.000,00)	99,50
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000		Kecamatan Mollo Tengah	1.277.387.225,00	1.269.735.058,00	(7.652.167,00)	99,40
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	1.277.387.225,00	1.269.735.058,00	(7.652.167,00)	99,40
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.277.387.225,00	1.269.735.058,00	(7.652.167,00)	99,40
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	(7.443.063,00)	99,32
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.213.000,00	182.003.896,00	(209.104,00)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000		Kecamatan Kota SoE	10.727.205.193,00	10.568.814.154,00	(158.391.039,00)	98,52
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	10.727.205.193,00	10.568.814.154,00	(158.391.039,00)	98,52
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.253.031.083,00	9.094.645.882,00	(158.385.201,00)	98,29
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	(154.432.916,00)	98,12
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.705.110,00	1.047.752.825,00	(3.952.285,00)	99,62
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.474.174.110,00	1.474.168.272,00	(5.838,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.334.174.110,00	1.334.168.272,00	(5.838,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000		Kecamatan Amanuban Barat	1.459.065.858,00	1.437.602.531,00	(21.463.327,00)	98,53
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	1.459.065.858,00	1.437.602.531,00	(21.463.327,00)	98,53
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.448.065.858,00	1.426.602.531,00	(21.463.327,00)	98,52
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	(21.313.327,00)	98,31
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.425.172,00	183.275.172,00	(150.000,00)	99,92
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000		Kecamatan Batuputih	1.578.898.020,42	1.512.936.586,00	(65.961.434,42)	95,82
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	1.578.898.020,42	1.512.936.586,00	(65.961.434,42)	95,82
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.564.898.020,42	1.498.936.586,00	(65.961.434,42)	95,78
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	(62.985.145,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.248.245,42	169.271.956,00	(2.976.289,42)	98,27
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		Kecamatan Kokbaun	1.172.487.035,00	1.080.800.507,00	(91.686.528,00)	92,18
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5	BELANJA DAERAH	1.172.487.035,00	1.080.800.507,00	(91.686.528,00)	92,18
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.172.487.035,00	1.080.800.507,00	(91.686.528,00)	92,18
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	953.312.618,00	895.997.666,00	(57.314.952,00)	93,99
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.174.417,00	184.802.841,00	(34.371.576,00)	84,32
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		Kecamatan Kot"olin	1.278.292.625,00	1.230.946.236,00	(47.346.389,00)	96,30

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5	BELANJA DAERAH	1.278.292.625,00	1.230.946.236,00	(47.346.389,00)	96,30
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.342.625,00	1.202.996.236,00	(47.346.389,00)	96,21
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.098.950.625,00	1.065.262.762,00	(33.687.863,00)	96,93
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.392.000,00	137.733.474,00	(13.658.526,00)	90,98
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000		Kecamatan Kuatnana	1.441.238.652,00	1.397.611.577,00	(43.627.075,00)	96,97
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	1.441.238.652,00	1.397.611.577,00	(43.627.075,00)	96,97
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.427.438.652,00	1.383.811.577,00	(43.627.075,00)	96,94
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	(42.575.903,00)	96,60
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.336.238,00	173.285.066,00	(1.051.172,00)	99,40
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		Kecamatan Amanuban Selatan	1.222.787.572,00	1.203.923.751,00	(18.863.821,00)	98,46
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	1.221.807.322,00	1.202.943.501,00	(18.863.821,00)	98,46
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.186.307.322,00	1.167.443.501,00	(18.863.821,00)	98,41
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	(17.800.062,00)	98,27
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.263.866,00	154.200.107,00	(1.063.759,00)	99,31
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000		Kecamatan Noebeba	1.098.080.305,00	1.040.437.136,00	(57.643.169,00)	94,75
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	1.098.080.305,00	1.040.437.136,00	(57.643.169,00)	94,75
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.085.080.305,00	1.027.437.136,00	(57.643.169,00)	94,69
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	923.190.423,00	865.886.528,00	(57.303.895,00)	93,79
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.889.882,00	161.550.608,00	(339.274,00)	99,79
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000		Kecamatan Oenino	1.094.295.127,00	1.066.722.745,00	(27.572.382,00)	97,48
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	1.094.295.127,00	1.066.722.745,00	(27.572.382,00)	97,48
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.094.295.127,00	1.066.722.745,00	(27.572.382,00)	97,48
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	917.904.171,00	890.333.789,00	(27.570.382,00)	97,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.390.956,00	176.388.956,00	(2.000,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000		Kecamatan Kuanfatu	1.394.482.853,00	1.330.452.939,00	(64.029.914,00)	95,41
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	1.394.482.853,00	1.330.452.939,00	(64.029.914,00)	95,41
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.378.482.853,00	1.314.452.939,00	(64.029.914,00)	95,36
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	(60.994.064,00)	95,03
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.244.414,00	149.208.564,00	(3.035.850,00)	98,01
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		Kecamatan Toianas	1.132.041.150,00	1.068.938.103,00	(63.103.047,00)	94,43
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5	BELANJA DAERAH	1.132.041.150,00	1.068.938.103,00	(63.103.047,00)	94,43
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.132.041.150,00	1.068.938.103,00	(63.103.047,00)	94,43
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	940.799.238,00	892.606.394,00	(48.192.844,00)	94,88
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.241.912,00	176.331.709,00	(14.910.203,00)	92,20
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		Kecamatan Amanatun Utara	1.284.324.752,92	1.237.716.827,00	(46.607.925,92)	96,37
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5	BELANJA DAERAH	1.284.324.752,92	1.237.716.827,00	(46.607.925,92)	96,37
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.271.824.752,92	1.225.216.827,00	(46.607.925,92)	96,34
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	(43.431.606,00)	96,09
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.579.605,92	158.403.286,00	(3.176.319,92)	98,03
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		Kecamatan Boking	1.240.737.847,00	1.227.224.160,00	(13.513.687,00)	98,91
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5	BELANJA DAERAH	1.240.737.847,00	1.227.224.160,00	(13.513.687,00)	98,91

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.240.737.847,00	1.227.224.160,00	(13.513.687,00)	98,91
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.797.675,00	1.037.036.589,00	(11.761.086,00)	98,88
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.940.172,00	190.187.571,00	(1.752.601,00)	99,09
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		Kecamatan Noebana	1.037.915.184,50	1.001.431.444,50	(36.483.740,00)	96,48
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5	BELANJA DAERAH	1.037.915.184,50	1.001.431.444,50	(36.483.740,00)	96,48
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.019.198.808,50	982.731.444,50	(36.467.364,00)	96,42
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	844.627.960,00	814.693.370,00	(29.934.590,00)	96,46
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.570.848,50	168.038.074,50	(6.532.774,00)	96,26
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.716.376,00	18.700.000,00	(16.376,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.219.876,00	15.203.500,00	(16.376,00)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Mollo Utara	1.566.269.127,00	1.538.892.665,00	(27.376.462,00)	98,25
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.566.269.127,00	1.538.892.665,00	(27.376.462,00)	98,25
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.553.269.127,00	1.526.127.665,00	(27.141.462,00)	98,25
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	(26.957.322,00)	98,05
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.539.216,00	172.355.076,00	(184.140,00)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.765.000,00	(235.000,00)	98,19
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	12.765.000,00	(235.000,00)	98,19
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Fatumnasi	1.159.939.032,00	1.131.818.820,00	(28.120.212,00)	97,58
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.159.939.032,00	1.131.818.820,00	(28.120.212,00)	97,58
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.141.439.032,00	1.113.318.820,00	(28.120.212,00)	97,54
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	971.334.902,00	943.231.781,00	(28.103.121,00)	97,11
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.104.130,00	170.087.039,00	(17.091,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Tobu	1.060.839.047,00	1.007.703.771,00	(53.135.276,00)	94,99
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	1.060.839.047,00	1.007.703.771,00	(53.135.276,00)	94,99
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.055.839.047,00	1.002.703.771,00	(53.135.276,00)	94,97
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	894.007.619,00	841.236.963,00	(52.770.656,00)	94,10
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.831.428,00	161.466.808,00	(364.620,00)	99,77
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Nunbena	1.086.568.301,00	1.069.534.094,00	(17.034.207,00)	98,43
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	1.086.568.301,00	1.069.534.094,00	(17.034.207,00)	98,43
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.082.318.301,00	1.065.284.094,00	(17.034.207,00)	98,43
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	910.721.389,00	893.956.608,00	(16.764.781,00)	98,16
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.596.912,00	171.327.486,00	(269.426,00)	99,84
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		Kecamatan Nunkolo	1.231.126.893,00	1.204.205.853,00	(26.921.040,00)	97,81
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5	BELANJA DAERAH	1.231.126.893,00	1.204.205.853,00	(26.921.040,00)	97,81
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.220.126.893,00	1.193.205.853,00	(26.921.040,00)	97,79
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	(22.479.398,00)	97,86
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.749.424,00	167.307.782,00	(4.441.642,00)	97,41
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000		Kecamatan Kolbano	1.334.234.718,00	1.299.846.938,00	(34.387.780,00)	97,42
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	1.334.234.718,00	1.299.846.938,00	(34.387.780,00)	97,42
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.299.379.718,00	1.268.909.438,00	(30.470.280,00)	97,66
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	(24.040.989,00)	97,89
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.404.146,00	153.974.855,00	(6.429.291,00)	95,99
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	34.855.000,00	30.937.500,00	(3.917.500,00)	88,76
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.855.000,00	30.937.500,00	(3.917.500,00)	88,76

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		Kecamatan Fatukopa	1.115.863.324,00	1.093.381.727,00	(22.481.597,00)	97,99
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5	BELANJA DAERAH	1.115.863.324,00	1.093.381.727,00	(22.481.597,00)	97,99
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.105.863.324,00	1.083.381.727,00	(22.481.597,00)	97,97
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	935.070.716,00	912.589.119,00	(22.481.597,00)	97,60
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.792.608,00	170.792.608,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Mollo Selatan	1.292.960.014,00	1.230.123.952,00	(62.836.062,00)	95,14
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	1.292.960.014,00	1.230.123.952,00	(62.836.062,00)	95,14
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.281.960.014,00	1.219.123.952,00	(62.836.062,00)	95,10
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	(35.398.177,00)	96,74
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.542.955,00	168.105.070,00	(27.437.885,00)	85,97
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		Kecamatan Santian	1.213.025.405,00	1.186.294.242,00	(26.731.163,00)	97,80
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5	BELANJA DAERAH	1.213.025.405,00	1.186.294.242,00	(26.731.163,00)	97,80
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.725.405,00	1.173.994.242,00	(26.731.163,00)	97,77
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	(25.322.516,00)	97,59
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.894.488,00	148.485.841,00	(1.408.647,00)	99,06
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		Kecamatan Mollo Barat	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	(35.382.664,00)	97,30
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	(35.382.664,00)	97,30
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	(35.382.664,00)	97,30
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	(35.090.796,00)	96,96
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.806.608,00	155.514.740,00	(291.868,00)	99,81
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Polen	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	(77.947.962,00)	93,09
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	(77.947.962,00)	93,09
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	(77.947.962,00)	93,09
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	990.061.867,00	915.022.323,00	(75.039.544,00)	92,42
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.005.608,00	135.097.190,00	(2.908.418,00)	97,89
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		Kecamatan Amanuban Selatan	1.222.787.572,00	1.203.923.751,00	(18.863.821,00)	98,46
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.170.606.154,00	4.106.362.119,00	(1.064.244.035,00)	79,42
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.170.606.154,00	4.106.362.119,00	(1.064.244.035,00)	79,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.170.606.154,00	4.106.362.119,00	(1.064.244.035,00)	79,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.170.606.154,00	4.106.362.119,00	(1.064.244.035,00)	79,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.150.606.154,00	4.086.382.119,00	(1.064.224.035,00)	79,34

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	(219.889.244,00)	85,09
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.254.673,00	2.226.562.955,00	(23.691.718,00)	98,95
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.425.081.000,00	604.437.927,00	(820.643.073,00)	42,41
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90
			Jumlah	(80.155.541.892,26)	(47.168.613.560,14)	32.986.928.332,12	58,85

SOE, 10 AGUSTUS 2026

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDGARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.704.309.743.178,00**	**1.518.838.398.066,36**	**89,11**	**1.484.750.536.177,18**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**102.800.000.000,00**	**78.952.610.191,36**	**76,80**	**54.257.897.760,18**
4.1.01	Pajak Daerah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,57	14.919.206.165,33
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	227.013.299,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	226.573.299,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	226.573.299,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	440.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	440.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.190.929.188,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.029.341.683,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.029.341.683,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	161.587.505,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	161.587.505,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	503.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	503.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	503.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	757.290.810,00	662.983.692,00	87,54	736.981.574,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	489.803.410,00	232.605.742,00	47,48	160.250.974,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	489.803.410,00	232.605.742,00	47,48	160.250.974,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	266.589.300,00	428.172.350,00	160,61	575.505.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	266.589.300,00	428.172.350,00	160,61	575.505.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000,00	950.000,00	190,00	700.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000,00	950.000,00	190,00	700.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	398.100,00	1.255.600,00	315,39	525.600,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	398.100,00	1.255.600,00	315,39	525.600,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	5.073.862.274,33
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	5.073.862.274,33
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	5.073.862.274,33
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	56.481.657,00	188,27	36.420.970,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	56.481.657,00	188,27	36.420.970,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	56.481.657,00	188,27	36.420.970,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.527.297.832,00	1.818.503.161,00	119,06	2.945.986.876,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	927.297.832,00	803.956.366,00	86,69	2.050.576.367,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	927.297.832,00	803.956.366,00	86,69	2.050.576.367,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000,00	1.014.546.795,00	169,09	895.410.509,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000,00	1.014.546.795,00	169,09	895.410.509,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.521.790.688,00	4.641.835.179,00	102,65	4.419.887.034,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.521.790.688,00	4.641.835.179,00	102,65	4.419.887.034,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.521.790.688,00	4.641.835.179,00	102,65	4.419.887.034,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	290.822.984,00	460.214.895,00	158,24	287.621.950,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	290.822.984,00	460.214.895,00	158,24	287.621.950,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	290.822.984,00	460.214.895,00	158,24	287.621.950,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.632.885.362,00	6.557.275.178,00	116,41	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.113.663.629,00	1.381.252.768,00	124,02	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.113.663.629,00	1.381.252.768,00	124,02	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	4.345.541.307,00	4.989.930.770,00	114,82	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.345.541.307,00	4.989.930.770,00	114,82	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	173.470.426,00	185.876.490,00	107,15	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	173.470.426,00	185.876.490,00	107,15	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	210.000,00	215.150,00	102,45	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	210.000,00	215.150,00	102,45	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.268.575.703,00	5.539.212.664,00	45,14	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	12.268.575.703,00	5.539.212.664,00	45,14	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	12.268.575.703,00	5.539.212.664,00	45,14	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.292.135.230,00	4.475.679.526,00	31,31	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	14.292.135.230,00	4.475.679.526,00	31,31	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	14.292.135.230,00	4.475.679.526,00	31,31	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.599.964.934,00	35.564.196.626,00	413,53	7.153.486.499,91
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.974.013.236,00	31.312.217.606,00	787,92	3.550.703.647,91
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.550.000.000,00	29.815.037.195,00	1.169,21	2.242.311.200,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	142,54	2.242.311.200,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	26.180.125.295,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	36.219.462,00	16.637.000,00	45,93	28.667.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	36.219.462,00	16.637.000,00	45,93	28.667.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	465.000.000,00	400.530.000,00	86,13	194.862.053,91
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	465.000.000,00	400.530.000,00	86,13	194.862.053,91
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	922.793.774,00	1.080.013.411,00	117,03	1.084.863.394,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	221.300.000,00	205.714.000,00	92,95	235.400.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	179.800.000,00	116.032.000,00	64,53	128.827.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	521.693.774,00	758.267.411,00	145,34	720.636.394,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.540.951.698,00	3.869.682.170,00	85,21	3.466.279.852,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.307.731.800,00	963.451.459,00	73,67	1.612.773.400,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	200.000.000,00	283.432.400,00	141,71	0,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	214.164.900,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	73.113.800,00	128.951.559,00	176,37	123.752.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	200.000.000,00	115.075.000,00	57,53	371.200.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	431.200.000,00	251.200.000,00	58,25	653.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	403.418.000,00	184.792.500,00	45,80	250.656.500,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.000.000,00	40.466.000,00	161,86	33.482.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	25.000.000,00	40.466.000,00	161,86	33.482.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.414.000,00	21.520.000,00	116,86	27.659.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	18.414.000,00	21.520.000,00	116,86	27.659.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	53.132.000,00	40.725.000,00	76,64	87.550.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	53.132.000,00	40.725.000,00	76,64	87.550.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.046.720.000,00	1.208.100.000,00	115,41	844.175.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1.046.720.000,00	1.208.100.000,00	115,41	844.175.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.700.000,00	415.490.000,00	118,47	426.975.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.700.000,00	415.490.000,00	118,47	426.975.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.734.253.898,00	1.176.689.711,00	67,84	433.665.452,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	276.990.000,00	210.500.000,00	75,99	0,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.457.263.898,00	966.189.711,00	66,30	418.615.452,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.000.000,00	3.240.000,00	64,80	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.000.000,00	3.240.000,00	64,80	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	85.000.000,00	382.296.850,00	449,76	136.503.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	85.000.000,00	382.296.850,00	449,76	136.383.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	85.000.000,00	382.296.850,00	449,76	136.383.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02	4.651.232.092,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02	4.651.232.092,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02	4.651.232.092,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02	4.651.232.092,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,00	27.533.973.002,94
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	660.284.834,00	377.332.750,00	57,14	468.022.050,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	70.940.000,00	19.116.750,00	26,94	102.437.250,00
4.1.04.01.05.0019	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	15.500.000,00	15.366.750,00	99,14	18.171.250,00
4.1.04.01.05.0049	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
4.1.04.01.05.0052	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Lainnya	55.440.000,00	3.750.000,00	6,76	0,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	71.266.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	589.344.834,00	358.216.000,00	60,78	365.584.800,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	589.344.834,00	358.216.000,00	60,78	365.584.800,00
4.1.04.05	Jasa Giro	18.177.211.559,78	1.107.010.552,97	6,09	1.409.370.558,85
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	17.997.729.117,78	944.345.650,97	5,24	1.204.538.670,85

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	17.997.729.117,78	944.345.650,97	5,24	1.204.538.670,85
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	179.482.442,00	162.664.902,00	90,62	204.831.888,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	179.482.442,00	162.664.902,00	90,62	204.831.888,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.437.494.063,00	1.730.615.805,03	120,39	2.569.603.891,96
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.437.494.063,00	1.730.615.805,03	120,39	2.569.603.891,96
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.437.494.063,00	1.730.615.805,03	120,39	2.569.603.891,96
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.501.199.889,62	100,07	1.901.191.677,66
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000,00	1.501.199.889,62	100,07	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000,00	1.501.199.889,62	100,07	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	1.901.191.677,66
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	1.901.191.677,66
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	838.564.750,22	110.163.618,64	13,13	1.129.571.079,70
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	838.564.750,22	110.163.618,64	13,13	1.129.571.079,70
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	838.564.750,22	110.163.618,64	13,13	1.129.571.079,70
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.179.577,00	89.298.270,00	161,83	47.775.328,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.029.475,00	2.716.284,00	263,85	1.719.962,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.024.875,00	2.716.284,00	265,03	1.715.362,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6.581.631,00	12.522.790,00	190,26	12.584.127,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.186.430,00	9.170.854,00	176,82	11.560.112,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	1.395.201,00	3.351.936,00	240,24	1.024.015,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	321.339,00	1.701.764,00	529,58	1.773.651,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	321.339,00	1.701.764,00	529,58	1.773.651,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	50.000,00	68.366,00	136,73	0,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	50.000,00	68.366,00	136,73	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000,00	5.366.493,00	1.341,62	375.980,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	100.000,00	1.613.930,00	1.613,93	375.980,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000,00	3.752.563,00	1.250,85	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.188.339,00	37.552.934,00	155,25	31.321.608,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	24.188.339,00	37.552.934,00	155,25	31.321.608,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.425.848,00	23.746.639,00	128,87	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	18.425.848,00	23.746.639,00	128,87	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.182.945,00	5.623.000,00	134,42	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	4.182.945,00	5.623.000,00	134,42	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	129.028.691,00	89.203.874,00	69,13	50.730.031,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	29.356.115,00	59.647.252,00	203,18	48.620.705,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	28.793.115,00	58.950.252,00	204,73	47.376.705,00
4.1.04.13.01.0042	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	563.000,00	697.000,00	123,80	1.244.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	99.672.576,00	29.556.622,00	29,65	2.109.326,00
4.1.04.13.02.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	5.914.280,00	279.450,00	4,72	434.700,00
4.1.04.13.02.0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	8.708.296,00	13.277.172,00	152,46	1.674.626,00
4.1.04.13.02.0015	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0017	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor	85.025.000,00	16.000.000,00	18,81	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	446.091.103,00	0,00	0,00	460.266.303,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	446.091.103,00	0,00	0,00	460.266.303,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	446.091.103,00	0,00	0,00	460.266.303,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	410.615.861,00	6.596.479.346,20	1.606,48	255.540.854,20
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	255.794.500,00	59.879.464,20	23,40	76.208.273,20
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	255.794.500,00	59.879.464,20	23,40	76.208.273,20
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	154.821.361,00	192.280.412,00	124,19	179.332.581,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	154.821.361,00	192.280.412,00	124,19	179.332.581,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	6.344.319.470,00	0,00	0,00
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	6.344.319.470,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.411.295.992,00	121.624.845,90	0,56	19.240.841.228,57
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.411.295.992,00	121.624.845,90	0,56	19.240.841.228,57
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.411.295.992,00	121.624.845,90	0,56	19.240.841.228,57
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**102.800.000.000,00**	**78.952.610.191,36**	**76,80**	**54.257.897.760,18**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.583.522.488.423,00**	**1.421.076.147.290,00**	**89,74**	**1.342.136.980.808,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.316.860.000,00	1.388.594.639.145,00	89,80	1.299.972.146.287,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.230.318.000,00	5.219.767.538,00	99,79	5.406.451.753,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.07.01	DBH Pajak	3.952.923.000,00	3.923.859.538,00	99,26	4.900.101.753,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.172.137.000,00	1.390.097.638,00	118,59	1.248.745.753,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.602.475.000,00	2.282.425.400,00	87,70	3.434.851.800,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	65.263.500,00	0,00	18.574.200,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	178.311.000,00	186.073.000,00	104,35	197.930.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.277.395.000,00	1.295.908.000,00	101,44	506.350.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	37.387.000,00	45.753.000,00	122,37	24.454.350,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	3.571.000,00	13.571.000,00	380,03	5.761.450,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	30.798.000,00	30.945.000,00	100,47	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.205.639.000,00	1.205.639.000,00	100,00	476.134.200,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	915.592.981.000,00	873.657.067.032,00	95,41	834.715.979.702,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	658.663.615.000,00	658.358.015.150,00	99,95	619.733.920.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	658.663.615.000,00	658.358.015.150,00	99,95	619.733.920.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	256.929.366.000,00	215.299.051.882,00	83,79	214.982.059.702,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	89.464.029.000,00	47.833.714.882,00	53,46	27.033.300.702,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	115.428.075.000,00	115.428.075.000,00	100,00	103.083.857.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	49.637.262.000,00	49.637.262.000,00	100,00	59.087.595.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	23.377.307.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	375.314.669.000,00	311.439.188.891,00	82,98	221.495.560.083,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	77.733.870.000,00	77.268.430.445,00	99,40	116.255.142.430,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	832.144.000,00	831.589.760,00	99,93	560.691.915,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.113.453.000,00	1.075.390.000,00	96,58	8.691.893.700,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	543.855.000,00	538.549.000,00	99,02	3.968.752.000,00
4.2.01.09.01.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regaler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	18.371.026.450,00
4.2.01.09.01.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	373.125.000,00
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.035.204.100,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	16.979.107.000,00
4.2.01.09.01.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	0,00	0,00	0,00	40.592.454.800,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	9.022.504.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	15.843.776.000,00	15.742.404.800,00	99,36	10.284.951.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.375.432.465,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	46.242.691.000,00	44.661.200.397,00	96,58	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.893.900.000,00	3.354.379.488,00	177,11	0,00
4.2.01.09.01.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	11.264.051.000,00	11.064.917.000,00	98,23	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	297.580.799.000,00	234.170.758.446,00	78,69	105.240.417.653,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	83.933.694.000,00	65.103.323.740,00	77,56	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.892.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	111.273.746.000,00	106.515.590.400,00	95,72	45.053.096.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.254.758.000,00	0,00	0,00	4.602.750.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	19.959.101.000,00	10.081.533.000,00	50,51	16.469.719.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.350.742.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	233.458.000,00	233.458.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	29.380.715.121,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	9.056.209.129,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	289.533.303,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	401.875.075,00	79,47	297.191.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.996.000.000,00	10.631.412.000,00	106,35	91.204.100,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	851.130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	16.715.602.000,00	13.537.340.337,00	80,98	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	34.167.465.000,00	23.358.362.284,00	68,36	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.402.413.000,00	4.307.863.610,00	79,73	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.296.137.968.000,00**	**1.190.316.023.461,00**	**91,83**	**1.061.617.991.538,00**
4.2.01.05	Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63	238.354.154.749,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63	238.354.154.749,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63	238.354.154.749,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**250.178.892.000,00**	**198.278.615.684,00**	**79,25**	**238.354.154.749,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	42.164.834.521,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	40.961.700.521,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	40.961.700.521,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.875.654.130,00	2.214.084.364,00	76,99	9.018.711.609,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.618.597.737,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.860.158.136,00	7.579.919.457,00	69,79	5.126.042.520,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	9.781.635,00	8.472.502,00	86,61	6.795.599,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.460.034.522,00	22.679.031.822,00	96,67	22.191.553.056,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**37.205.628.423,00**	**32.481.508.145,00**	**87,30**	**42.164.834.521,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.583.522.488.423,00**	**1.421.076.147.290,00**	**89,74**	**1.342.136.980.808,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.987.254.755,00**	**18.809.640.585,00**	**104,57**	**88.355.657.609,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	66.914.151.321,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	66.914.151.321,00
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	66.914.151.321,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tinglat Pertama (FKTP)	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	21.441.506.288,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	21.441.506.288,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	21.441.506.288,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**17.987.254.755,00**	**18.809.640.585,00**	**104,57**	**88.355.657.609,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.704.309.743.178,00**	**1.518.838.398.066,36**	**89,11**	**1.484.750.536.177,18**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.784.465.285.070,26**	**1.566.007.011.626,50**	**87,75**	**1.564.899.056.682,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.302.379.990.371,26**	**1.153.179.535.396,50**	**88,54**	**1.072.026.698.327,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37	648.876.618.174,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	665.027.136.181,45	604.104.904.462,00	90,83	549.399.586.183,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	497.723.251.664,81	459.249.490.771,00	92,27	416.596.676.997,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	275.441.121.496,25	270.814.354.849,00	98,32	280.690.266.407,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	222.282.130.168,56	188.435.135.922,00	84,77	135.906.410.590,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.044.656.867,48	37.091.627.107,00	86,17	34.395.948.187,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.906.973.073,96	24.009.119.256,00	96,39	25.186.679.035,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.137.683.793,52	13.082.507.851,00	72,12	9.209.269.152,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.055.273.723,50	7.680.242.800,00	95,34	8.185.764.700,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.055.273.723,50	7.680.242.800,00	95,34	8.185.764.700,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.176.459.167,00	16.307.535.940,00	94,94	15.965.486.350,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.597.436.717,00	16.042.199.940,00	96,65	15.785.976.450,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	579.022.450,00	265.336.000,00	45,82	179.509.900,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.148.864.868,70	14.671.329.446,00	85,55	11.986.875.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.419.526.894,10	3.813.945.000,00	86,29	4.223.340.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.729.337.974,60	10.857.384.446,00	85,29	7.763.535.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.673.562.410,63	43.455.641.166,00	95,14	38.103.747.777,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.374.182.971,23	25.512.963.660,00	93,20	26.420.520.660,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	18.299.379.439,40	17.942.677.506,00	98,05	11.683.227.117,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.728.475.250,73	2.579.887.864,00	94,55	460.023.609,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.728.475.250,73	2.579.887.864,00	94,55	460.017.806,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	5.803,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.607.809,41	5.869.067,00	22,05	5.668.165,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.869.871,41	3.685.868,00	33,90	4.226.465,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.737.938,00	2.183.199,00	13,87	1.441.700,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.351.225.741,90	19.224.837.431,00	67,80	20.266.205.583,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.018.477.054,14	11.666.776.096,00	61,34	14.981.544.461,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.332.748.687,76	7.558.061.335,00	80,98	5.284.661.122,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.274.658.367,66	959.673.086,00	75,28	858.010.502,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	726.406.918,06	557.880.595,00	76,80	576.450.304,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	548.251.449,60	401.792.491,00	73,28	281.560.198,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.824.100.309,63	2.878.769.784,00	75,27	2.575.179.313,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.123.554.855,23	1.673.508.075,00	78,80	1.730.457.949,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.700.545.454,40	1.205.261.709,00	70,87	844.721.364,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	157.692.121.533,00	137.121.288.544,00	86,95	2.209.200.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.638.600.000,00	11.808.747.101,00	86,58	79.200.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.933.450.000,00	11.143.976.851,00	86,16	79.200.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	705.150.000,00	664.770.250,00	94,27	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.359.400.000,00	1.296.050.000,00	95,33	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.269.200.000,00	1.205.850.000,00	95,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	90.200.000,00	90.200.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.288.000.000,00	3.280.500.000,00	99,77	2.130.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.288.000.000,00	3.280.500.000,00	99,77	2.130.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	139.406.121.533,00	120.735.991.443,00	86,60	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	11.037.500,00	11.037.000,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	51.897.500,00	51.897.000,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	30.004.783,00	30.004.000,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	202.000.000,00	202.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	68.048.595,00	67.990.000,00	99,91	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	38.905.490,00	38.900.000,00	99,98	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	16.051.875,00	16.000.000,00	99,67	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	109.337.536.990,00	110.141.530.443,00	100,73	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	24.300.780.800,00	10.081.533.000,00	41,48	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.254.758.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	67.471.653.670,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	434.038.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	11.037.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	51.897.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	30.004.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	124.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	202.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100.890.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	51.990.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	48.900.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	43.334.441.769,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	43.334.441.769,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	18.200.620.400,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	18.200.620.400,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.249.825.501,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.249.825.501,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	3.151.838.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.920.435.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	1.231.402.500,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.440.122.467,00	18.009.046.054,00	97,66	15.844.500.050,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	964.522.819,00	876.540.000,00	90,87	884.520.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	964.522.819,00	876.540.000,00	90,87	884.520.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	100.093.468,00	92.477.700,00	92,39	79.665.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	100.093.468,00	92.477.700,00	92,39	79.665.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	124.055.460,00	124.055.460,00	100,00	98.491.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	124.055.460,00	124.055.460,00	100,00	98.491.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	92.229.000,00	75.222.000,00	81,56	75.705.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	92.229.000,00	75.222.000,00	81,56	75.705.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.270.983.000,00	98,23	1.282.554.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.270.983.000,00	98,23	1.282.554.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	163.656.570,00	123.748.800,00	75,61	95.552.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	163.656.570,00	123.748.800,00	75,61	95.552.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.956.000.000,00	4.956.000.000,00	100,00	2.998.800.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.956.000.000,00	4.956.000.000,00	100,00	2.998.800.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.239.000.000,00	1.239.000.000,00	100,00	497.700.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.239.000.000,00	1.239.000.000,00	100,00	497.700.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	10.106.874,00	9.335.818,00	92,37	459.002,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	10.106.874,00	9.335.818,00	92,37	459.002,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.548.902.776,00	4.444.108.276,00	97,69	4.544.218.148,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	99.477.193,00	76.886.964,00	77,29	76.950.468,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.355.646,00	1.805.328,00	76,63	1.816.920,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.069.937,00	5.415.984,00	76,60	5.450.760,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.440.000.000,00	4.360.000.000,00	98,19	4.460.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.884.000.000,00	4.796.000.000,00	98,19	4.906.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.884.000.000,00	4.796.000.000,00	98,19	4.906.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.735.000,00	1.575.000,00	2,47	380.835.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.735.000,00	1.575.000,00	2,47	380.835.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.565.046,00	132.880.015,00	76,12	24.185.711,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.367.669,00	42.900.000,00	83,51	7.800.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.367.669,00	42.900.000,00	83,51	7.800.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.616.200,00	2.310.000,00	63,87	462.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.616.200,00	2.310.000,00	63,87	462.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.820.000,00	77.220.000,00	77,35	14.040.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.820.000,00	77.220.000,00	77,35	14.040.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.233.066,00	4.160.310,00	66,74	804.860,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.233.066,00	4.160.310,00	66,74	804.860,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.575.790,00	1.463.215,00	56,80	111.811,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.575.790,00	1.463.215,00	56,80	111.811,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.333,00	90,00	3,85	80,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.333,00	90,00	3,85	80,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.412.728,00	4.452.000,00	69,42	892.080,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.412.728,00	4.452.000,00	69,42	892.080,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	93.600,00	69,68	18.720,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	93.600,00	69,68	18.720,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	4.402.944,00	280.800,00	6,37	56.160,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	4.402.944,00	280.800,00	6,37	56.160,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	488.960.000,00	81,27	231.360.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	287.360.000,00	71,84	138.960.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	287.360.000,00	71,84	138.960.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00	98,48	13.696.132.560,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00	98,48	13.696.132.560,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00	98,48	13.696.132.560,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10	354.452.271.225,00
5.1.02.01	Belanja Barang	158.147.051.137,63	129.809.764.160,52	82,08	114.227.380.674,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	154.926.308.255,63	127.016.797.958,52	81,98	111.827.022.011,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	490.653.843,00	414.199.518,00	84,41	457.401.720,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.775.973.367,00	1.770.930.571,00	99,71	269.348.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.749.494.925,52	6.586.780.524,00	97,58	7.387.769.421,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.627.670.714,00	2.514.793.000,00	23,66	635.168.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	535.944.800,00	518.390.800,00	96,72	377.777.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.242.405.000,00	2.864.517.500,00	88,34	838.380.880,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.173.680.174,00	6.932.070.262,00	96,63	5.600.245.373,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.591.702.603,00	2.488.175.230,00	96,00	3.775.531.945,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	290.981.810,00	289.483.682,00	99,48	208.638.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	95.920.000,00	2.000.000,00	2,08	25.500.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	54.100.000,00	54.100.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	50.200.000,00	48.716.150,00	97,04	24.603.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.010.819.690,00	3.847.351.193,02	95,92	4.391.212.974,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.365.423.506,22	4.120.509.301,50	94,38	4.044.664.805,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	259.407.640,00	251.842.500,00	97,08	254.612.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.000.000,00	3.918.200,00	97,95	99.900.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	365.086.662,00	352.205.560,00	96,47	418.228.691,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	59.242.700,00	56.250.000,00	94,94	46.896.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	78.919.000,00	78.747.000,00	99,78	206.857.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	558.100.000,00	557.910.000,00	99,96	570.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	41.314.620.091,00	27.828.719.194,00	67,35	31.901.388.605,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.140.940.334,00	4.103.525.617,00	99,09	5.972.515.157,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.009.773.600,00	1.984.182.746,00	98,72	231.668.200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	41.790.249.626,00	39.824.642.989,00	95,29	26.427.294.145,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.603.760.000,00	3.507.271.900,00	76,18	2.864.503.195,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.400.000,00	3.199.500,00	94,10	5.501.400,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	87.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.017.172.217,89	790.461.020,00	77,71	701.695.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.111.441.432,00	10.769.044.943,00	88,91	9.251.783.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.600.815.520,00	2.557.510.888,00	98,33	1.940.841.200,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	424.000.000,00	423.988.300,00	99,99	824.368.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	42.777.000,00	42.533.000,00	99,42	29.147.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.475.000,00	19.475.000,00	100,00	647.051.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	262.100.000,00	249.235.515,00	95,09	796.349.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	68.000.000,00	67.875.000,00	99,81	29.571.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	31.570.000,00	31.570.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	176.500.000,00	176.459.925,00	99,97	121.981.250,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	199.100.000,00	157.690.500,00	79,20	129.643.750,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	135.707.000,00	135.707.000,00	100,00	19.755.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.830.000,00	7.830.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	100.000,00	86.580,00	86,58	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	482.250.000,00	477.897.350,00	99,09	206.529.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.899.916.442,00	1.880.187.819,00	98,96	649.119.980,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.668.196.502,00	1.662.491.402,00	99,65	519.529.980,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	169.300.000,00	169.185.645,00	99,93	100.000.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	58.949.940,00	45.051.400,00	76,42	29.590.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	3.470.000,00	3.459.372,00	99,69	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.320.826.440,00	912.778.383,00	69,10	1.751.238.683,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	54.835.104,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.550.000,00	6.319.000,00	83,69	6.327.500,00
5.1.02.01.04.0062	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	43.531.701,00
5.1.02.01.04.0077	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	425.000,00	425.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.705.000,00	10.705.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	212.969.240,00	212.946.283,00	99,98	107.852.370,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	33.895.000,00	33.895.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	96.957.100,00	96.955.000,00	99,99	210.575.000,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	23.180.100,00	23.180.100,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	700.000,00	700.000,00	100,00	104.838.000,00
5.1.02.01.04.0139	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	222.071.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	130.000.000,00	129.981.000,00	99,98	242.796.082,00
5.1.02.01.04.0322	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0347	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	19.150.000,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	62.000.000,00	56.000.000,00	90,32	0,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	65.765.126,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.552.000,00	6.552.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	4.250.000,00	4.247.000,00	99,92	32.278.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	490.000,00	0,00	0,00	131.810.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	253.800.000,00
5.1.02.01.04.0544	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	50.000.000,00	49.903.000,00	99,80	0,00
5.1.02.01.04.0572	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	60.000.000,00	46.620.000,00	77,70	0,00
5.1.02.01.04.0621	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	199.792.000,00
5.1.02.01.04.0622	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	100.000.000,00	98.650.000,00	98,65	0,00
5.1.02.01.04.0641	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0648	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0652	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.816.800,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	385.453.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	115.000.432.315,65	112.589.795.554,00	97,90	102.532.542.224,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.645.742.743,15	71.292.510.412,00	100,91	67.394.556.404,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.321.949.000,00	2.585.825.000,00	77,84	2.813.332.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.521.158.550,00	4.807.055.500,00	87,06	7.818.044.350,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Bemcara	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	588.000.000,00	561.500.000,00	95,49	342.928.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.200.000,00	2.900.000,00	55,76	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	72.925.000,00	97,23	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	402.000.000,00	401.900.000,00	99,97	221.250.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.245.781.354,52	500.000,00	0,02	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.491.131.001,00	27.006.828.123,00	131,79	19.667.070.351,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	124.314.000,00	121.742.502,00	97,93	40.057.465,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	190.801.128,00	189.609.101,00	99,37	182.507.366,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.780.000.000,00	2.779.200.000,00	99,97	3.475.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	275.350.000,00	230.265.000,00	83,62	153.880.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	53.125.000,00	53.125.000,00	100,00	44.950.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	30.240.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.048.604.488,42	8.757.584.434,00	96,78	14.912.225.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	101.207.897,00	97.994.788,00	96,82	355.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.391.244.431,00	5.956.678.500,00	93,20	5.105.798.587,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.870.245.400,00	2.567.497.400,00	89,45	1.626.583.600,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.561.071.313,92	1.434.310.323,00	91,87	1.372.032.500,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.456.650.881,00	1.417.529.977,00	97,31	790.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.302.552.954,37	1.265.848.690,00	97,18	1.364.725.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	663.946.511,00	604.668.690,00	91,07	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00	1.100.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	29.650.000,00	27.574.500,00	93,00	44.374.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	239.792.000,00	229.656.667,00	95,77	352.908.926,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	660.000,00	27,50	400.589.610,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	188.430.000,00	138.936.200,00	73,73	187.384.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	77.250.000,00	75.477.676,00	97,70	62.968.841,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	759.763.139,00	705.606.150,00	92,87	963.119.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.547.337.043,92	1.427.080.719,00	92,22	1.866.689.096,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	21.400.000,00	8.270.000,00	38,64	20.580.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	959.068.500,00	920.833.473,00	96,01	1.009.393.336,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	73.240.000,00	12.820.450,00	17,50	6.193.760,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	534.590.150,00	404.410.799,00	75,64	414.452.741,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.637.778.000,00	2.540.167.000,00	96,29	1.420.002.625,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	300.000.000,00	267.325.000,00	89,10	252.875.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	155.000.000,00	152.000.000,00	98,06	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.659.800.000,00	2.554.868.750,00	96,05	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	893.710.000,00	814.135.000,00	91,09	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.205.971.544,50	27.661.829.369,00	98,07	25.302.244.805,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.600.000.000,00	2.168.338.150,00	83,39	2.045.719.050,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	0,00	0,00	58.595.700,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.642.148.586,00	23.571.212.500,00	99,69	22.190.450.900,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.919.150.414,00	1.885.494.800,00	98,24	947.142.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.678.750,00	13.174.419,00	84,02	12.173.640,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.127.898,00	11.399.693,00	75,35	19.035.088,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.865.896,50	12.209.807,00	88,05	29.128.427,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	26.400.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	26.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.160.111.712,00	1.923.945.112,00	89,06	1.657.182.112,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	17.000.000,00	13.500.000,00	79,41	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	591.250.000,00	485.850.000,00	82,17	490.350.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.148.112,00	27.148.112,00	100,00	9.176.112,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	162.750.000,00	162.750.000,00	100,00	39.250.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	48.380.000,00	48.380.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.04.0081	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.659.750,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	238.613.600,00	232.612.000,00	97,48	21.410.250,00
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.04.0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	31.370.000,00	26.150.000,00	83,35	17.236.000,00
5.1.02.02.04.0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	900.000.000,00	889.905.000,00	98,87	1.059.300.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	20.800.000,00	20.150.000,00	96,87	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	818.800.000,00	625.618.500,00	76,40	349.954.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	77.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	507.350.000,00	396.268.500,00	78,10	272.454.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	239.450.000,00	157.350.000,00	65,71	0,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.1.02.02.06.0119	Belanja Sewa Jaringan Pembawa	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	150.750.000,00	139.475.000,00	92,52	18.335.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	150.750.000,00	139.475.000,00	92,52	15.530.000,00
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.620.490.316,00	5.929.462.788,00	77,80	5.038.031.146,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	30.000.000,00	14.839.650,00	49,46	7.500.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.015.300.000,00	1.885.451.776,00	93,55	931.722.990,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	29.000.000,00	28.831.700,00	99,41	104.015.055,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.322.458.015,00	923.334.544,00	69,81	729.050.626,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	13.902.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	143.284.500,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.368.798.060,00	1.612.326.963,00	68,06	895.887.921,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.145.885.760,00	1.013.225.355,00	88,42	236.253.973,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	409.048.481,00	251.202.800,00	61,41	1.463.423.669,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	300.000.000,00	200.250.000,00	66,75	512.990.412,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	509.400.000,00	437.800.000,00	85,94	365.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	270.000.000,00	225.000.000,00	83,33	95.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	239.400.000,00	212.800.000,00	88,88	270.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.780.746.000,00	4.470.734.373,00	93,51	2.346.838.757,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.828.472.000,00	2.585.753.773,00	91,41	1.083.173.400,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.133.774.000,00	1.078.200.600,00	95,09	1.066.265.357,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	818.500.000,00	806.780.000,00	98,56	167.400.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	88.920.000,00	88.920.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	88.920.000,00	88.920.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.722.849.610,58	6.169.056.908,00	91,76	5.217.405.191,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	988.387.296,00	899.376.979,00	90,99	1.422.959.758,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	60.000.000,00	58.075.000,00	96,79	0,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	550.000,00	550.000,00	100,00	1.100.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	380.198.900,00	314.233.883,00	82,64	281.663.688,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.280.000,00	13.378.096,00	50,90	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	22.220.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	261.324.500,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.708.000,00	19.708.000,00	100,00	26.950.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	292.862.400,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	95.800.000,00	94.232.000,00	98,36	106.654.850,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	133.450.000,00	131.570.000,00	98,59	123.562.500,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	154.050.396,00	149.280.000,00	96,90	174.926.820,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	44.195.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.784.212.314,58	4.330.349.929,00	90,51	2.919.827.788,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.740.287.197,58	1.631.739.355,00	93,76	2.158.760.788,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.330.000.000,00	1.316.542.813,00	98,98	29.998.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.150.000.000,00	864.702.900,00	75,19	656.333.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	39.400.000,00	9.400.000,00	23,85	0,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	324.525.117,00	308.298.861,00	94,99	74.736.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00	199.666.000,00	99,83	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	950.250.000,00	939.330.000,00	98,85	874.617.645,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	700.000.000,00	691.333.000,00	98,76	0,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	127.103.724,00
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	150.000.000,00	147.995.000,00	98,66	737.513.921,00
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	65.000.000,00	64.752.000,00	99,61	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.236.451.132,11	36.288.840.010,00	90,18	49.000.748.872,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.236.451.132,11	36.288.840.010,00	90,18	46.049.859.932,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.510.727.132,11	35.604.216.010,00	90,11	44.944.604.844,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	179.000.000,00	178.000.000,00	99,44	436.705.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.424.000,00	8.424.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	538.300.000,00	498.200.000,00	92,55	513.500.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	155.050.088,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	2.950.888.940,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri	0,00	0,00	0,00	2.950.888.940,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.024.140.396,00	13.129.557.207,98	93,62	7.368.439.871,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.595.759.700,00	3.145.141.599,98	87,46	2.451.447.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.172.003.100,00	1.149.984.999,98	98,12	676.447.500,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	270.156.600,00	270.156.600,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	428.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	1.775.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.428.380.696,00	9.984.415.608,00	95,74	4.916.992.371,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.428.380.696,00	9.984.415.608,00	95,74	4.811.992.371,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	94.072.566.000,00	65.305.694.001,00	69,42	66.099.001.895,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	93.221.436.000,00	65.305.694.001,00	70,05	66.099.001.895,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	90.269.436.000,00	65.305.694.001,00	72,34	66.099.001.895,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.952.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	851.130.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	851.130.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50	10.006.752.498,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50	10.006.752.498,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50	10.006.752.498,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27	68.167.808.928,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	64.207.971.024,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	64.207.971.024,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	64.207.971.024,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.355.236.000,00	7.442.236.000,00	89,07	3.055.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	369.236.000,00	369.236.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	369.236.000,00	369.236.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	88,67	2.835.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	88,67	2.835.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	531.837.904,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	531.837.904,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	531.837.904,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	91,67	530.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	665.000.000,00	620.000.000,00	93,23	475.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	665.000.000,00	620.000.000,00	93,23	475.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	665.000.000,00	620.000.000,00	93,23	475.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	35.500.000,00	71,00	25.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	35.500.000,00	71,00	25.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	35.500.000,00	71,00	25.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.302.379.990.371,26**	**1.153.179.535.396,50**	**88,54**	**1.072.026.698.327,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**142.651.192.101,00**	**126.632.269.348,00**	**88,77**	**166.227.066.280,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
5.2.01.01.02.0002	Belanja Modal Tanah Kering	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,95	28.284.032.581,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.194.190.000,00	2.166.136.500,00	98,72	1.347.335.900,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.194.190.000,00	2.166.136.500,00	98,72	1.347.335.900,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	2.050.000.000,00	2.031.000.000,00	99,07	1.241.950.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	144.190.000,00	135.136.500,00	93,72	105.385.900,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.258.009.000,00	7.223.476.700,00	99,52	9.640.700.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.258.009.000,00	7.223.476.700,00	99,52	9.640.700.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.607.800.000,00	1.607.800.000,00	100,00	2.007.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000,00	523.444.000,00	95,17	974.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	34.965.000,00	87,41	199.600.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	565.500.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.060.209.000,00	5.057.267.700,00	99,94	5.894.600.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	135.772.500,00	60.594.900,00	44,62	7.000.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	60.772.500,00	60.594.900,00	99,70	7.000.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	54.112.500,00	54.045.900,00	99,87	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	6.660.000,00	6.549.000,00	98,33	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	85.500.000,00	84.989.925,00	99,40	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	85.500.000,00	84.989.925,00	99,40	0,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	75.000.000,00	74.999.925,00	99,99	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	10.500.000,00	9.990.000,00	95,14	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.090.664.900,00	4.628.351.070,00	90,91	2.859.056.102,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	467.917.000,00	401.474.879,00	85,80	260.284.990,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	123.697.500,00	109.887.000,00	88,83	50.170.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	344.219.500,00	291.587.879,00	84,70	208.014.990,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.529.137.500,00	4.135.557.391,00	91,31	2.590.823.512,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.295.809.000,00	3.211.372.341,00	97,43	2.127.743.800,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	304.371.300,00	216.869.250,00	71,25	3.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	928.957.200,00	707.315.800,00	76,14	458.779.712,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	93.610.400,00	91.318.800,00	97,55	7.947.600,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	19.100.000,00	19.100.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	57.010.400,00	56.810.000,00	99,64	7.947.600,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	7.908.800,00	79,08	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	981.569.264,00	863.217.250,00	87,94	304.941.850,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	900.519.864,00	836.176.250,00	92,85	304.941.850,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	468.699.568,00	460.439.850,00	98,23	144.592.600,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	367.614.600,00	367.236.400,00	99,89	151.899.250,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	64.205.696,00	8.500.000,00	13,23	8.450.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	81.049.400,00	27.041.000,00	33,36	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	62.649.400,00	18.649.400,00	29,76	0,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	8.400.000,00	8.391.600,00	99,90	0,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.622.283.117,00	1.835.394.326,00	113,13	6.430.172.531,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	236.823.598,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	65.411.198,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	171.412.400,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.622.283.117,00	1.835.394.326,00	113,13	6.193.348.933,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.622.283.117,00	1.835.394.326,00	113,13	6.193.348.933,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.622.544.000,00	1.139.170.081,00	70,20	561.635.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	440.000.000,00	0,00	0,00	226.800.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	440.000.000,00	0,00	0,00	226.800.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.162.144.000,00	1.119.870.081,00	96,36	194.835.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.162.144.000,00	1.119.870.081,00	96,36	194.835.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.300.000,00	19.300.000,00	100,00	100.000.000,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	19.300.000,00	19.300.000,00	100,00	100.000.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.09.0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.315.043.593,00	17.055.961.954,00	83,95	5.775.541.885,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.294.261.493,00	4.266.005.143,00	67,77	5.437.383.670,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	49.839.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	980.130.213,00	964.066.094,00	98,36	1.158.766.516,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.314.131.280,00	3.301.939.049,00	62,13	4.228.778.154,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.020.782.100,00	12.789.956.811,00	91,22	338.158.215,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	11.500.000,00	76,66	6.977.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.092.143.000,00	1.249.118.962,00	59,70	255.930.800,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.913.639.100,00	11.529.337.849,00	96,77	75.250.415,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	48.186.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	48.186.000,00
5.2.02.11.02.0001	Belanja Modal Mekanik	0,00	0,00	0,00	48.186.000,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	140.000.000,00	138.639.000,00	99,02	0,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	140.000.000,00	138.639.000,00	99,02	0,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	140.000.000,00	138.639.000,00	99,02	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	99,17	389.399.550,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	389.399.550,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	79.858.579,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	309.540.971,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	99,17	0,00
5.2.02.13.03.0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	99,17	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.000.000,00	5.999.300,00	99,98	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	6.000.000,00	5.999.300,00	99,98	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	6.000.000,00	5.999.300,00	99,98	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	920.063.763,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	920.063.763,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	920.063.763,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28	34.295.572.710,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	68.671.434.116,00	60.730.711.784,00	88,43	33.639.921.035,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.671.434.116,00	60.730.711.784,00	88,43	33.639.921.035,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	257.232.500,00	140.000.000,00	54,42	8.105.825.856,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	41.230.340.441,00	41.121.016.178,00	99,73	4.601.660.113,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.181.896.175,00	17.968.793.500,00	71,35	20.632.635.066,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	916.215.000,00	681.874.447,00	74,42	99.800.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	197.500.000,00	197.186.900,00	99,84	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	438.250.000,00	288.830.423,00	65,90	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	450.000.000,00	333.010.336,00	74,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	865.424.825,00	659.109.475,00	76,16	655.651.675,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	865.424.825,00	659.109.475,00	76,16	655.651.675,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	865.424.825,00	659.109.475,00	76,16	655.651.675,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,18	103.200.934.739,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.994.207.686,00	17.770.487.423,00	88,87	77.089.068.774,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	12.871.073.686,00	11.057.719.454,00	85,91	77.089.068.774,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	11.798.591.576,00	9.985.243.182,00	84,63	75.368.531.589,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	38.308.000,00	38.308.000,00	100,00	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.034.174.110,00	1.034.168.272,00	99,99	1.720.537.185,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.123.134.000,00	6.712.767.969,00	94,23	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.123.134.000,00	6.712.767.969,00	94,23	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	665.000.000,00	542.802.140,00	81,62	13.970.925.525,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	665.000.000,00	542.802.140,00	81,62	6.193.065.525,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	5.924.488.500,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	365.000.000,00	242.802.140,00	66,52	268.577.025,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	199.700.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	199.700.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	7.578.160.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.578.160.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.615.200.000,00	899.000.000,00	55,65	5.023.299.950,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	148.300.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	148.300.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.615.200.000,00	899.000.000,00	55,65	4.874.999.950,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.615.200.000,00	899.000.000,00	55,65	4.825.000.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.999.950,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.961.026.800,00	1.675.900.200,00	85,46	7.117.640.490,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	250.000.000,00	0,00	0,00	6.416.849.120,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	250.000.000,00	0,00	0,00	6.416.849.120,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.711.026.800,00	1.675.900.200,00	97,94	700.791.370,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.711.026.800,00	1.675.900.200,00	97,94	700.791.370,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	158.168.000,00	103.800.000,00	65,62	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	21.500.000,00	21.411.600,00	99,58	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	7.800.000,00	7.798.800,00	99,98	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	20.650.000,00	20.634.000,00	99,92	0,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	7.950.000,00	7.948.700,00	99,98	0,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	100.268.000,00	46.006.900,00	45,88	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	212.658.300,00	211.788.900,00	99,59	247.769.250,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	212.658.300,00	211.788.900,00	99,59	247.769.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**142.651.192.101,00**	**126.632.269.348,00**	**88,77**	**166.227.066.280,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.125.000.000,00**	**1.070.675.400,00**	**50,38**	**1.028.622.708,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.125.000.000,00**	**1.070.675.400,00**	**50,38**	**1.028.622.708,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**337.309.102.598,00**	**285.124.531.482,00**	**84,52**	**325.616.669.367,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,70	886.875.098,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,70	886.875.098,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,70	886.875.098,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,70	886.875.098,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43	324.729.794.269,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63	238.354.154.749,00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63	238.354.154.749,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63	238.354.154.749,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.173.850.400,00	91.895.940.400,00	99,69	86.375.639.520,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.173.850.400,00	91.895.940.400,00	99,69	86.375.639.520,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	92.173.850.400,00	91.895.940.400,00	99,69	86.375.639.520,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**337.309.102.598,00**	**285.124.531.482,00**	**84,52**	**325.616.669.367,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.784.465.285.070,26**	**1.566.007.011.626,50**	**87,75**	**1.564.899.056.682,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(80.155.541.892,26)**	**(47.168.613.560,14)**	**58,84**	**(80.148.520.504,82)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**80.155.541.892,26**	**80.155.541.892,26**	**100,00**	**160.304.062.397,08**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**80.155.541.892,26**	**80.155.541.892,26**	**100,00**	**160.304.062.397,08**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.051.757.397,08
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.051.757.397,08
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.051.757.397,08
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	252.305.000,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	252.305.000,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	252.305.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
	PEMBIAYAAN NETTO	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	32.936.928.322,12	0,00	80.155.541.892,26

SOE, 10 AGUSTUS 2026

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran L3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	655.426.618.298,52	577.471.397.823,00	(77.955.220.475,52)	88,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	493.380.602.811,00	461.498.996.117,00	(31.881.606.694,00)	93,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	29.680.180,00	(319.820,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	29.680.180,00	(319.820,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.680.180,00	(319.820,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.680.180,00	(319.820,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	492.895.602.811,00	461.141.862.417,00	(31.753.740.394,00)	93,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	(31.749.060.690,00)	93,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	(31.749.060.690,00)	93,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	(31.749.060.690,00)	93,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	641.320.344,00	639.106.840,00	(2.213.504,00)	99,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	641.320.344,00	639.106.840,00	(2.213.504,00)	99,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.320.344,00	639.106.840,00	(2.213.504,00)	99,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	15.000.000,00	12.533.800,00	(2.466.200,00)	83,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.533.800,00	(2.466.200,00)	83,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.533.800,00	(2.466.200,00)	83,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	29.940.000,00	(60.000,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	30.000.000,00	29.940.000,00	(60.000,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.940.000,00	(60.000,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.940.000,00	(60.000,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	96.377.575,00	95.654.120,00	(723.455,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.412.000,00	15.328.300,00	(83.700,00)	99,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.412.000,00	15.328.300,00	(83.700,00)	99,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.412.000,00	15.328.300,00	(83.700,00)	99,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.600.000,00	2.550.000,00	(50.000,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.550.000,00	(50.000,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.550.000,00	(50.000,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	64.579.975,00	64.379.820,00	(200.155,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	64.579.975,00	64.379.820,00	(200.155,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.579.975,00	64.379.820,00	(200.155,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	13.785.600,00	13.396.000,00	(389.600,00)	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	13.785.600,00	13.396.000,00	(389.600,00)	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.785.600,00	13.396.000,00	(389.600,00)	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	278.007.992,00	151.258.400,00	(126.749.592,00)	54,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.007.992,00	27.334.650,00	(673.342,00)	97,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.007.992,00	27.334.650,00	(673.342,00)	97,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.007.992,00	27.334.650,00	(673.342,00)	97,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	250.000.000,00	123.923.750,00	(126.076.250,00)	49,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	169.330.000,00	43.865.000,00	(125.465.000,00)	25,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.330.000,00	43.865.000,00	(125.465.000,00)	25,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	80.670.000,00	80.058.750,00	(611.250,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.881.750,00	(118.250,00)	99,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.670.000,00	45.177.000,00	(493.000,00)	98,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.614.433,00	50.601.000,00	(13.433,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	50.614.433,00	50.601.000,00	(13.433,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.614.433,00	50.601.000,00	(13.433,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.614.433,00	50.601.000,00	(13.433,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	162.046.015.487,52	115.972.401.706,00	(46.073.613.781,52)	71,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	80.099.029.899,00	58.171.308.129,00	(21.927.721.770,00)	72,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	540.000.000,00	344.615.000,00	(195.385.000,00)	63,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	540.000.000,00	344.615.000,00	(195.385.000,00)	63,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	540.000.000,00	344.615.000,00	(195.385.000,00)	63,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	995.000.000,00	938.280.100,00	(56.719.900,00)	94,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	995.000.000,00	938.280.100,00	(56.719.900,00)	94,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	995.000.000,00	938.280.100,00	(56.719.900,00)	94,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	6.929.011.000,00	5.329.491.000,00	(1.599.520.000,00)	76,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	501.011.000,00	54.504.000,00	(446.507.000,00)	10,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.011.000,00	54.504.000,00	(446.507.000,00)	10,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	6.428.000.000,00	5.274.987.000,00	(1.153.013.000,00)	82,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.428.000.000,00	5.274.987.000,00	(1.153.013.000,00)	82,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	860.313.000,00	786.752.990,00	(73.560.010,00)	91,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	748.813.000,00	711.827.990,00	(36.985.010,00)	95,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.813.000,00	711.827.990,00	(36.985.010,00)	95,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	111.500.000,00	74.925.000,00	(36.575.000,00)	67,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.500.000,00	59.940.000,00	(36.560.000,00)	62,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	446.160.000,00	413.200.000,00	(32.960.000,00)	92,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	429.160.000,00	413.200.000,00	(15.960.000,00)	96,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.160.000,00	413.200.000,00	(15.960.000,00)	96,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	54.996.965.854,00	39.298.310.085,00	(15.698.655.769,00)	71,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	54.996.965.854,00	39.298.310.085,00	(15.698.655.769,00)	71,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.996.965.854,00	39.298.310.085,00	(15.698.655.769,00)	71,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	573.940.000,00	393.741.000,00	(180.199.000,00)	68,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	573.940.000,00	393.741.000,00	(180.199.000,00)	68,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.940.000,00	393.741.000,00	(180.199.000,00)	68,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	449.218.700,00	427.033.460,00	(22.185.240,00)	95,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	449.218.700,00	427.033.460,00	(22.185.240,00)	95,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.218.700,00	427.033.460,00	(22.185.240,00)	95,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	222.040.000,00	208.845.000,00	(13.195.000,00)	94,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	222.040.000,00	208.845.000,00	(13.195.000,00)	94,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.040.000,00	208.845.000,00	(13.195.000,00)	94,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	12.823.581.345,00	9.633.963.314,00	(3.189.618.031,00)	75,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	1.214.617.600,00	871.304.219,00	(343.313.381,00)	71,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.214.617.600,00	871.304.219,00	(343.313.381,00)	71,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	11.608.963.745,00	8.762.659.095,00	(2.846.304.650,00)	75,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.608.963.745,00	8.762.659.095,00	(2.846.304.650,00)	75,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	1.262.800.000,00	397.076.180,00	(865.723.820,00)	31,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	1.132.632.000,00	333.542.000,00	(799.090.000,00)	29,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.632.000,00	333.542.000,00	(799.090.000,00)	29,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.2	BELANJA MODAL	130.168.000,00	63.534.180,00	(66.633.820,00)	48,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.400.000,00	54.942.780,00	(12.457.220,00)	81,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.768.000,00	8.591.400,00	(54.176.600,00)	13,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	58.485.088.108,52	44.522.715.816,00	(13.962.372.292,52)	76,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	722.500.000,00	634.186.150,00	(88.313.850,00)	87,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	722.500.000,00	634.186.150,00	(88.313.850,00)	87,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.500.000,00	634.186.150,00	(88.313.850,00)	87,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.472.092.400,00	1.455.958.651,00	(16.133.749,00)	98,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	27.572.400,00	16.292.000,00	(11.280.400,00)	59,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.572.400,00	16.292.000,00	(11.280.400,00)	59,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	1.444.520.000,00	1.439.666.651,00	(4.853.349,00)	99,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.444.520.000,00	1.439.666.651,00	(4.853.349,00)	99,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	7.532.188.290,00	6.596.543.259,00	(935.645.031,00)	87,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	203.333.290,00	110.217.259,00	(93.116.031,00)	54,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.333.290,00	110.217.259,00	(93.116.031,00)	54,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	7.328.855.000,00	6.486.326.000,00	(842.529.000,00)	88,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.328.855.000,00	6.486.326.000,00	(842.529.000,00)	88,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.034.893.950,00	848.877.400,00	(186.016.550,00)	82,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	948.143.950,00	764.850.400,00	(183.293.550,00)	80,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.143.950,00	764.850.400,00	(183.293.550,00)	80,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.2	BELANJA MODAL	86.750.000,00	84.027.000,00	(2.723.000,00)	96,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.750.000,00	64.158.000,00	(2.592.000,00)	96,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	19.869.000,00	(131.000,00)	99,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	309.575.000,00	268.647.040,00	(40.927.960,00)	86,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	309.575.000,00	268.647.040,00	(40.927.960,00)	86,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.575.000,00	268.647.040,00	(40.927.960,00)	86,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	33.922.509.500,52	25.700.151.916,00	(8.222.357.584,52)	75,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	33.922.509.500,52	25.700.151.916,00	(8.222.357.584,52)	75,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.922.509.500,52	25.700.151.916,00	(8.222.357.584,52)	75,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	160.599.000,00	117.000.000,00	(43.599.000,00)	72,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	160.599.000,00	117.000.000,00	(43.599.000,00)	72,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.599.000,00	117.000.000,00	(43.599.000,00)	72,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	211.763.568,00	211.145.900,00	(617.668,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	35.425.000,00	35.333.000,00	(92.000,00)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.425.000,00	35.333.000,00	(92.000,00)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.2	BELANJA MODAL	176.338.568,00	175.812.900,00	(525.668,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.338.568,00	175.812.900,00	(525.668,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	169.400.000,00	138.650.000,00	(30.750.000,00)	81,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	169.400.000,00	138.650.000,00	(30.750.000,00)	81,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.400.000,00	138.650.000,00	(30.750.000,00)	81,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	985.861.650,00	875.645.735,00	(110.215.915,00)	88,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	898.164.650,00	788.421.935,00	(109.742.715,00)	87,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.164.650,00	788.421.935,00	(109.742.715,00)	87,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.2	BELANJA MODAL	87.697.000,00	87.223.800,00	(473.200,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.697.000,00	87.223.800,00	(473.200,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	453.158.000,00	290.940.000,00	(162.218.000,00)	64,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1	BELANJA OPERASI	453.158.000,00	290.940.000,00	(162.218.000,00)	64,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.158.000,00	290.940.000,00	(162.218.000,00)	64,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	425.667.000,00	256.073.000,00	(169.594.000,00)	60,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	425.667.000,00	256.073.000,00	(169.594.000,00)	60,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.667.000,00	256.073.000,00	(169.594.000,00)	60,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	11.084.879.750,00	7.128.896.765,00	(3.955.982.985,00)	64,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	1.299.486.100,00	849.744.940,00	(449.741.160,00)	65,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.486.100,00	849.744.940,00	(449.741.160,00)	65,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	9.785.393.650,00	6.279.151.825,00	(3.506.241.825,00)	64,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.250.000,00	33.022.500,00	(227.500,00)	99,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.752.143.650,00	6.246.129.325,00	(3.506.014.325,00)	64,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	21.722.566.480,00	12.531.631.841,00	(9.190.934.639,00)	57,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	4.806.693.000,00	3.928.803.680,00	(877.889.320,00)	81,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.486.693.000,00	2.043.539.880,00	(443.153.120,00)	82,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.486.693.000,00	2.043.539.880,00	(443.153.120,00)	82,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.320.000.000,00	1.865.263.800,00	(434.736.200,00)	81,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.320.000.000,00	1.885.263.800,00	(434.736.200,00)	81,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	1.294.520.000,00	956.979.400,00	(337.540.600,00)	73,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.284.520.000,00	956.979.400,00	(327.540.600,00)	74,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.520.000,00	956.979.400,00	(327.540.600,00)	74,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	733.620.000,00	549.195.000,00	(184.425.000,00)	74,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	733.620.000,00	549.195.000,00	(184.425.000,00)	74,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.620.000,00	549.195.000,00	(184.425.000,00)	74,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	1.345.407.000,00	1.201.004.800,00	(144.402.200,00)	89,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	995.407.000,00	859.124.800,00	(136.282.200,00)	86,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.171.000,00	429.888.800,00	(136.282.200,00)	75,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.05	Belanja Hibah	429.236.000,00	429.236.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	341.880.000,00	(8.120.000,00)	97,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	341.880.000,00	(8.120.000,00)	97,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	6.350.742.000,00	307.232.000,00	(6.043.510.000,00)	4,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	6.350.742.000,00	307.232.000,00	(6.043.510.000,00)	4,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.350.742.000,00	307.232.000,00	(6.043.510.000,00)	4,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	441.300.000,00	362.055.000,00	(79.245.000,00)	82,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	441.300.000,00	362.055.000,00	(79.245.000,00)	82,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.300.000,00	362.055.000,00	(79.245.000,00)	82,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	2.208.993.700,00	1.349.390.360,00	(859.603.340,00)	61,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.459.993.700,00	961.353.180,00	(498.640.520,00)	65,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.993.700,00	961.353.180,00	(498.640.520,00)	65,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	5.2	BELANJA MODAL	749.000.000,00	388.037.180,00	(360.962.820,00)	51,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.000.000,00	57.506.880,00	(1.493.120,00)	97,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	690.000.000,00	330.530.300,00	(359.469.700,00)	47,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	2.786.963.280,00	2.332.907.925,00	(454.055.355,00)	83,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	1.898.174.500,00	1.512.621.985,00	(385.552.515,00)	79,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.898.174.500,00	1.512.621.985,00	(385.552.515,00)	79,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2	BELANJA MODAL	888.788.780,00	820.285.940,00	(68.502.840,00)	92,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	76.074.960,00	(1.925.040,00)	97,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	810.788.780,00	744.210.980,00	(66.577.800,00)	91,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	1.604.327.500,00	1.544.063.676,00	(60.263.824,00)	96,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	252.183.500,00	234.483.495,00	(17.700.005,00)	92,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.183.500,00	234.483.495,00	(17.700.005,00)	92,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2	BELANJA MODAL	1.352.144.000,00	1.309.580.181,00	(42.563.819,00)	96,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.352.144.000,00	1.309.580.181,00	(42.563.819,00)	96,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.739.331.000,00	746.745.920,00	(992.585.080,00)	42,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	843.201.000,00	746.745.920,00	(96.455.080,00)	88,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	785.201.000,00	746.745.920,00	(38.455.080,00)	95,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.201.000,00	646.745.920,00	(38.455.080,00)	94,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.2	BELANJA MODAL	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	896.130.000,00	0,00	(896.130.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	896.130.000,00	0,00	(896.130.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.130.000,00	0,00	(896.130.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	655.426.618.298,52	577.471.397.823,00	(77.955.220.475,52)	88,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(655.426.618.298,52)	(577.471.397.823,00)	77.955.220.475,52	88,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(655.426.618.298,52)	(577.471.397.823,00)	77.955.220.475,52	88,10	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**
Organisasi : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.930.670.100,00	1.629.449.250,00	(301.220.850,00)	84,39	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.699.375.850,00	1.415.904.810,00	(283.471.040,00)	83,31	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	315.450.860,00	246.560.410,00	(68.890.450,00)	78,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	315.450.860,00	246.560.410,00	(68.890.450,00)	78,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	315.450.860,00	246.560.410,00	(68.890.450,00)	78,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.450.860,00	246.560.410,00	(68.890.450,00)	78,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.383.924.990,00	1.169.344.400,00	(214.580.590,00)	84,49	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	1.383.924.990,00	1.169.344.400,00	(214.580.590,00)	84,49	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.424.990,00	1.001.844.400,00	(112.580.590,00)	89,89	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.424.990,00	1.001.844.400,00	(112.580.590,00)	89,89	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	269.500.000,00	167.500.000,00	(102.000.000,00)	62,15	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.000.000,00	160.000.000,00	(102.000.000,00)	61,06	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	231.294.250,00	213.544.440,00	(17.749.810,00)	92,32	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	224.837.750,00	207.087.940,00	(17.749.810,00)	92,10	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	224.837.750,00	207.087.940,00	(17.749.810,00)	92,10	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	224.837.750,00	207.087.940,00	(17.749.810,00)	92,10	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.837.750,00	207.087.940,00	(17.749.810,00)	92,10	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	6.456.500,00	6.456.500,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	6.456.500,00	6.456.500,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.456.500,00	6.456.500,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.456.500,00	6.456.500,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.930.670.100,00	1.629.449.250,00	(301.220.850,00)	84,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.930.670.100,00)	(1.629.449.250,00)	301.220.850,00	84,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.930.670.100,00)	(1.629.449.250,00)	301.220.850,00	84,39	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Dinas Kesehatan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,54	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,54	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,54	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	1.084.911.900,00	142,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	230.742.107.884,00	211.570.276.171,00	(19.171.831.713,00)	91,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.519.232.190,00	71.341.687.807,00	(1.177.544.383,00)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	65.347.383.130,00	64.205.136.543,00	(1.142.246.587,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	65.247.903.130,00	64.105.656.543,00	(1.142.246.587,00)	98,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.247.903.130,00	64.105.656.543,00	(1.142.246.587,00)	98,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	65.247.903.130,00	64.105.656.543,00	(1.142.246.587,00)	98,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	99.480.000,00	99.480.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.480.000,00	99.480.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.480.000,00	99.480.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.250.000.000,00	5.234.400.000,00	(15.600.000,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.250.000.000,00	5.234.400.000,00	(15.600.000,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	5.250.000.000,00	5.234.400.000,00	(15.600.000,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.250.000.000,00	5.234.400.000,00	(15.600.000,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.817.897.160,00	1.817.091.394,00	(805.766,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	568.100,00	568.000,00	(100,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	568.100,00	568.000,00	(100,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.100,00	568.000,00	(100,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	46.000.000,00	45.896.750,00	(103.250,00)	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	45.896.750,00	(103.250,00)	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.896.750,00	(103.250,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.771.329.060,00	1.770.626.644,00	(702.416,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.771.329.060,00	1.770.626.644,00	(702.416,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.771.329.060,00	1.770.626.644,00	(702.416,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	99.490.500,00	80.598.470,00	(18.892.030,00)	81,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	99.490.500,00	80.598.470,00	(18.892.030,00)	81,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.490.500,00	80.598.470,00	(18.892.030,00)	81,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.490.500,00	80.598.470,00	(18.892.030,00)	81,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	154.551.859.894,00	137.301.564.186,00	(17.250.295.708,00)	88,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.644.027.024,00	55.086.545.569,00	(557.481.455,00)	98,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	100.000.000,00	99.457.000,00	(543.000,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.457.000,00	(543.000,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.457.000,00	(543.000,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002		PEMBANGUNAN PUSKESMAS	22.473.108.335,00	22.336.003.544,00	(137.104.791,00)	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	800.408.069,00	710.059.355,00	(90.348.714,00)	88,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.408.069,00	710.059.355,00	(90.348.714,00)	88,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	21.672.700.266,00	21.625.944.189,00	(46.756.077,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	315.584.000,00	315.584.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.357.116.266,00	21.310.360.189,00	(46.756.077,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	19.467.880.000,00	19.402.504.127,00	(65.375.873,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.017.880.000,00	984.622.250,00	(33.257.750,00)	96,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.880.000,00	984.622.250,00	(33.257.750,00)	96,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.450.000.000,00	18.417.881.877,00	(32.118.123,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000,00	831.000.000,00	(19.000.000,00)	97,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.700.000.000,00	16.687.881.877,00	(12.118.123,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	900.000.000,00	899.000.000,00	(1.000.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	1.000.000.000,00	952.520.337,00	(47.479.663,00)	95,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	952.520.337,00	(47.479.663,00)	95,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	934.000.000,00	886.520.337,00	(47.479.663,00)	94,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	414.959.550,00	410.757.002,00	(4.202.548,00)	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	147.757.002,00	(2.242.998,00)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	147.757.002,00	(2.242.998,00)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	264.959.550,00	263.000.000,00	(1.959.550,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.959.550,00	263.000.000,00	(1.959.550,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	154.042.000,00	154.042.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	154.042.000,00	154.042.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.042.000,00	154.042.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	11.904.168.139,00	11.620.075.959,00	(284.092.180,00)	97,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	11.904.168.139,00	11.620.075.959,00	(284.092.180,00)	97,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.904.168.139,00	11.620.075.959,00	(284.092.180,00)	97,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025		PENGEMBANGAN PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK (PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK, GUGUS PULAU, PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE)	129.869.000,00	111.185.600,00	(18.683.400,00)	85,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	129.869.000,00	111.185.600,00	(18.683.400,00)	85,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.869.000,00	111.185.600,00	(18.683.400,00)	85,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.759.757.359,00	82.067.197.310,00	(16.692.560.049,00)	83,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	592.023.000,00	400.437.250,00	(191.585.750,00)	67,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	592.023.000,00	400.437.250,00	(191.585.750,00)	67,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.023.000,00	400.437.250,00	(191.585.750,00)	67,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	236.316.000,00	134.592.000,00	(101.724.000,00)	56,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	236.316.000,00	134.592.000,00	(101.724.000,00)	56,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.316.000,00	134.592.000,00	(101.724.000,00)	56,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	29.336.000,00	29.336.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.336.000,00	29.336.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.336.000,00	29.336.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	195.360.000,00	56.440.000,00	(138.920.000,00)	28,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	195.360.000,00	56.440.000,00	(138.920.000,00)	28,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.360.000,00	56.440.000,00	(138.920.000,00)	28,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	20.438.000,00	20.438.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	20.438.000,00	20.438.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.438.000,00	20.438.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	406.100.000,00	343.580.000,00	(62.520.000,00)	84,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	406.100.000,00	343.580.000,00	(62.520.000,00)	84,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.100.000,00	343.580.000,00	(62.520.000,00)	84,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	260.200.000,00	190.131.000,00	(70.069.000,00)	73,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	260.200.000,00	190.131.000,00	(70.069.000,00)	73,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.200.000,00	190.131.000,00	(70.069.000,00)	73,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	1.175.865.400,00	1.139.012.050,00	(36.853.350,00)	96,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.153.115.400,00	1.116.262.050,00	(36.853.350,00)	96,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.115.400,00	1.116.262.050,00	(36.853.350,00)	96,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	51.485.615.000,00	50.926.197.617,00	(559.417.383,00)	98,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	49.087.777.533,00	49.373.973.291,00	286.195.758,00	100,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	395.000.000,00	370.607.180,00	(24.392.820,00)	93,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.692.777.533,00	49.003.366.111,00	310.588.578,00	100,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	2.397.837.467,00	1.552.224.326,00	(845.613.141,00)	64,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.257.604.967,00	1.552.224.326,00	(705.380.641,00)	68,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.232.500,00	0,00	(117.232.500,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	803.852.000,00	800.569.449,00	(3.282.551,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	803.852.000,00	800.569.449,00	(3.282.551,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	803.852.000,00	800.569.449,00	(3.282.551,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	43.170.807.759,00	27.702.158.994,00	(15.468.648.765,00)	64,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	43.170.807.759,00	27.702.158.994,00	(15.468.648.765,00)	64,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.170.807.759,00	27.702.158.994,00	(15.468.648.765,00)	64,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	383.844.200,00	324.304.950,00	(59.539.250,00)	84,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	383.844.200,00	324.304.950,00	(59.539.250,00)	84,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.844.200,00	324.304.950,00	(59.539.250,00)	84,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	148.075.511,00	147.821.307,00	(254.204,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	148.075.511,00	147.821.307,00	(254.204,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	137.075.511,00	136.821.307,00	(254.204,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.075.511,00	136.821.307,00	(254.204,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.069.460.800,00	1.723.950.127,00	(345.510.673,00)	83,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	750.937.800,00	741.037.800,00	(9.900.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	750.937.800,00	741.037.800,00	(9.900.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.937.800,00	741.037.800,00	(9.900.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.937.800,00	741.037.800,00	(9.900.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.318.523.000,00	982.912.327,00	(335.610.673,00)	74,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.318.523.000,00	982.912.327,00	(335.610.673,00)	74,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.318.523.000,00	982.912.327,00	(335.610.673,00)	74,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.523.000,00	982.912.327,00	(335.610.673,00)	74,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	233.458.000,00	229.987.562,00	(3.470.438,00)	98,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	233.458.000,00	229.987.562,00	(3.470.438,00)	98,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	233.458.000,00	229.987.562,00	(3.470.438,00)	98,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	233.458.000,00	229.987.562,00	(3.470.438,00)	98,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.458.000,00	229.987.562,00	(3.470.438,00)	98,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.368.097.000,00	973.086.489,00	(395.010.511,00)	71,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.058.026.000,00	724.759.489,00	(333.266.511,00)	68,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.058.026.000,00	724.759.489,00	(333.266.511,00)	68,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.026.000,00	724.759.489,00	(333.266.511,00)	68,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.026.000,00	724.759.489,00	(333.266.511,00)	68,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	310.071.000,00	248.327.000,00	(61.744.000,00)	80,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	310.071.000,00	248.327.000,00	(61.744.000,00)	80,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	310.071.000,00	248.327.000,00	(61.744.000,00)	80,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.071.000,00	248.327.000,00	(61.744.000,00)	80,08	
				JUMLAH BELANJA	230.742.107.884,00	211.570.276.171,00	(19.171.831.713,00)	91,69	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(228.192.107.884,00)	(207.935.364.271,00)	20.256.743.613,00	91,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(228.192.107.884,00)	(207.935.364.271,00)	20.256.743.613,00	91,12	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	4.890.454.148,90	122,84	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	4.890.454.148,90	122,84	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	26.180.125.295,00	26.180.125.295,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.411.295.992,00	121.624.845,90	(21.289.671.146,10)	0,56	
				JUMLAH PENDAPATAN	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	4.890.454.148,90	122,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	60.416.104.302,84	59.591.786.322,00	(824.317.980,84)	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.670.630.429,84	50.934.894.363,00	(735.736.066,84)	98,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	26.714.124.268,00	26.551.413.775,00	(162.710.493,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	26.714.124.268,00	26.551.413.775,00	(162.710.493,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.714.124.268,00	26.551.413.775,00	(162.710.493,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	26.714.124.268,00	26.551.413.775,00	(162.710.493,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.011.932.556,00	2.008.653.800,00	(3.278.756,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.699.151.825,00	1.695.900.200,00	(3.251.625,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.100.825,00	20.000.000,00	(100.825,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.825,00	20.000.000,00	(100.825,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	(3.150.800,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	(3.150.800,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	312.780.731,00	312.753.600,00	(27.131,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	312.780.731,00	312.753.600,00	(27.131,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.780.731,00	312.753.600,00	(27.131,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	448.936.054,00	448.897.615,00	(38.439,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	448.936.054,00	448.897.615,00	(38.439,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	448.936.054,00	448.897.615,00	(38.439,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.936.054,00	448.897.615,00	(38.439,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	22.495.637.551,84	21.925.929.173,00	(569.708.378,84)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	22.495.637.551,84	21.925.929.173,00	(569.708.378,84)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.745.637.551,84	21.327.574.553,00	(418.062.998,84)	98,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00	(192.165.183,80)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	(225.897.815,04)	97,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	750.000.000,00	598.354.620,00	(151.645.380,00)	79,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	(151.645.380,00)	79,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.745.473.873,00	8.656.891.959,00	(88.581.914,00)	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.684.788.927,00	6.663.712.513,00	(21.076.414,00)	99,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	4.727.731.450,00	4.708.235.113,00	(19.496.337,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.506.082.450,00	1.491.556.513,00	(14.525.937,00)	99,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.506.082.450,00	1.491.556.513,00	(14.525.937,00)	99,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.221.649.000,00	3.216.678.600,00	(4.970.400,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.000.000,00	1.098.000.000,00	(2.000.000,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	(2.970.400,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	1.957.057.477,00	1.955.477.400,00	(1.580.077,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	1.957.057.477,00	1.955.477.400,00	(1.580.077,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.957.057.477,00	1.955.477.400,00	(1.580.077,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.060.684.946,00	1.993.179.446,00	(67.505.500,00)	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	130.000.000,00	129.994.500,00	(5.500,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.994.500,00	(5.500,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.994.500,00	(5.500,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	1.930.684.946,00	1.863.184.946,00	(67.500.000,00)	96,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	1.930.684.946,00	1.863.184.946,00	(67.500.000,00)	96,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.684.946,00	1.863.184.946,00	(67.500.000,00)	96,50	
				JUMLAH BELANJA	60.416.104.302,84	59.591.786.322,00	(824.317.980,84)	98,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(39.004.808.310,84)	(33.290.036.181,10)	5.714.772.129,74	85,34	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(39.004.808.310,84)	(33.290.036.181,10)	5.714.772.129,74	85,34	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Organisasi : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,87	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,87	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1.01	Pajak Daerah	1.557.297.832,00	1.874.984.818,00	317.686.986,00	120,39	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	361.075.000,00	(238.925.000,00)	60,17	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	5.434.859,00	4.934.859,00	1.086,97	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,87	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	29.972.130.098,00	27.009.127.237,00	(2.963.002.861,00)	90,11	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.096.248.843,00	5.782.412.534,00	(313.836.309,00)	94,85	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.588.750,00	39.208.650,00	(380.100,00)	99,03	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.648.300,00	6.595.000,00	(53.300,00)	99,19	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.648.300,00	6.595.000,00	(53.300,00)	99,19	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.648.300,00	6.595.000,00	(53.300,00)	99,19	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.860.450,00	14.621.750,00	(238.700,00)	98,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.860.450,00	14.621.750,00	(238.700,00)	98,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.860.450,00	14.621.750,00	(238.700,00)	98,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.080.000,00	17.991.900,00	(88.100,00)	99,51	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.080.000,00	17.991.900,00	(88.100,00)	99,51	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.080.000,00	17.991.900,00	(88.100,00)	99,51	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.899.671.968,00	4.719.556.255,00	(180.115.713,00)	96,32	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	(147.690.576,00)	96,78	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	(147.690.576,00)	96,78	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	(147.690.576,00)	96,78	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	172.110.653,00	145.175.516,00	(26.935.137,00)	84,35	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	172.110.653,00	145.175.516,00	(26.935.137,00)	84,35	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.110.653,00	145.175.516,00	(26.935.137,00)	84,35	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.280.250,00	2.280.250,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.280.250,00	2.280.250,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.250,00	2.280.250,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	133.085.000,00	127.595.000,00	(5.490.000,00)	95,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	133.085.000,00	127.595.000,00	(5.490.000,00)	95,87	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.085.000,00	127.595.000,00	(5.490.000,00)	95,87	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	89.669.400,00	88.500.000,00	(1.169.400,00)	98,69	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.159.400,00	1.075.000,00	(84.400,00)	92,72	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.159.400,00	1.075.000,00	(84.400,00)	92,72	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.400,00	1.075.000,00	(84.400,00)	92,72	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	64.600.000,00	63.891.000,00	(709.000,00)	98,90	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	4.950.000,00	(650.000,00)	88,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	4.950.000,00	(650.000,00)	88,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	59.000.000,00	58.941.000,00	(59.000,00)	99,90	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.000.000,00	58.941.000,00	(59.000,00)	99,90	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.980.000,00	5.897.500,00	(82.500,00)	98,62	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.980.000,00	5.897.500,00	(82.500,00)	98,62	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	5.897.500,00	(82.500,00)	98,62	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.720.000,00	1.670.000,00	(50.000,00)	97,09	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.720.000,00	1.670.000,00	(50.000,00)	97,09	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	1.670.000,00	(50.000,00)	97,09	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	16.210.000,00	15.966.500,00	(243.500,00)	98,49	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.210.000,00	15.966.500,00	(243.500,00)	98,49	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.210.000,00	15.966.500,00	(243.500,00)	98,49	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.939.600,00	44.074.700,00	(17.864.900,00)	71,15	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.019.600,00	1.994.000,00	(25.600,00)	98,73	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.019.600,00	1.994.000,00	(25.600,00)	98,73	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.600,00	1.994.000,00	(25.600,00)	98,73	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	53.720.000,00	35.881.700,00	(17.838.300,00)	66,79	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.720.000,00	35.881.700,00	(17.838.300,00)	66,79	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.720.000,00	35.881.700,00	(17.838.300,00)	66,79	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.200.000,00	6.199.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.199.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.199.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.001.754.125,00	887.447.929,00	(114.306.196,00)	88,58	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.000.000,00	27.899.164,00	(2.100.836,00)	92,99	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.899.164,00	(2.100.836,00)	92,99	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.899.164,00	(2.100.836,00)	92,99	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	60.000.000,00	52.976.272,00	(7.023.728,00)	88,29	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	52.976.272,00	(7.023.728,00)	88,29	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	52.976.272,00	(7.023.728,00)	88,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	905.984.125,00	800.807.493,00	(105.176.632,00)	88,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	905.984.125,00	800.807.493,00	(105.176.632,00)	88,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.984.125,00	800.807.493,00	(105.176.632,00)	88,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.770.000,00	5.765.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.770.000,00	5.765.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	5.765.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.014.891.801,00	916.384.340,00	(98.507.461,00)	90,29	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.014.891.801,00	916.384.340,00	(98.507.461,00)	90,29	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0075		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	246.449.450,00	227.842.350,00	(18.607.100,00)	92,44	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0075	5.1	BELANJA OPERASI	246.449.450,00	227.842.350,00	(18.607.100,00)	92,44	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0075	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.449.450,00	227.842.350,00	(18.607.100,00)	92,44	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0089		OPERASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	100.000.000,00	48.262.000,00	(51.738.000,00)	48,26	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0089	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	48.262.000,00	(51.738.000,00)	48,26	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0089	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	48.262.000,00	(51.738.000,00)	48,26	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	486.210.696,00	469.893.990,00	(16.316.706,00)	96,64	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	486.210.696,00	469.893.990,00	(16.316.706,00)	96,64	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.210.696,00	469.893.990,00	(16.316.706,00)	96,64	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0114		REHABILITASI EMBUNG DAN PENAMPUNGAN AIR LAINNYA	182.231.655,00	170.386.000,00	(11.845.655,00)	93,49	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0114	5.1	BELANJA OPERASI	182.231.655,00	170.386.000,00	(11.845.655,00)	93,49	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0114	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.231.655,00	170.386.000,00	(11.845.655,00)	93,49	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.316.043.694,00	18.780.370.059,00	(2.535.673.635,00)	88,10	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	21.316.043.694,00	18.780.370.059,00	(2.535.673.635,00)	88,10	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	16.116.783.495,00	14.417.402.177,00	(1.699.381.318,00)	89,45	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	923.436.095,00	835.389.626,00	(88.046.469,00)	90,46	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.436.095,00	835.389.626,00	(88.046.469,00)	90,46	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	15.193.347.400,00	13.582.012.551,00	(1.611.334.849,00)	89,39	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.118.347.400,00	13.582.012.551,00	(1.536.334.849,00)	89,83	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	5.199.260.199,00	4.362.967.882,00	(836.292.317,00)	83,91	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1	BELANJA OPERASI	1.395.882.023,00	1.246.969.282,00	(148.912.741,00)	89,33	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.395.882.023,00	1.246.969.282,00	(148.912.741,00)	89,33	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	3.803.378.176,00	3.115.998.600,00	(687.379.576,00)	81,92	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.803.378.176,00	3.115.998.600,00	(687.379.576,00)	81,92	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	9.075.000,00	8.816.000,00	(259.000,00)	97,14	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11.2.02		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.075.000,00	8.816.000,00	(259.000,00)	97,14	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11.2.02.0015		OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	9.075.000,00	8.816.000,00	(259.000,00)	97,14	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	9.075.000,00	8.816.000,00	(259.000,00)	97,14	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	8.816.000,00	(259.000,00)	97,14	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.535.870.760,00	1.521.144.304,00	(14.726.456,00)	99,04	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	1.345.773.500,00	1.331.848.642,00	(13.924.858,00)	98,96	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0011		PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA	1.345.773.500,00	1.331.848.642,00	(13.924.858,00)	98,96	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.773.500,00	1.287.562.750,00	(13.210.750,00)	98,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.773.500,00	1.287.562.750,00	(13.210.750,00)	98,98	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.285.892,00	(714.108,00)	98,41	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.285.892,00	(714.108,00)	98,41	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.097.260,00	189.295.662,00	(801.598,00)	99,57	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	190.097.260,00	189.295.662,00	(801.598,00)	99,57	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	190.097.260,00	189.295.662,00	(801.598,00)	99,57	
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.097.260,00	189.295.662,00	(801.598,00)	99,57	
				JUMLAH BELANJA	29.972.130.098,00	27.009.127.237,00	(2.963.002.861,00)	90,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(27.814.332.266,00)	(24.767.632.560,00)	3.046.699.706,00	89,04	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.814.332.266,00)	(24.767.632.560,00)	3.046.699.706,00	89,04	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,87	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,87	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1.01	Pajak Daerah	1.557.297.832,00	1.874.984.818,00	317.686.986,00	120,39	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	361.075.000,00	(238.925.000,00)	60,17	
	1.03.2.11.0.00.03.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	5.434.859,00	4.934.859,00	1.086,97	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	83.696.845,00	103,87	
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,83	
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,83	
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,83	
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04.2.01.0007		PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,83	
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,83	
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,83	
				JUMLAH BELANJA	9.075.000,00	8.788.000,00	(287.000,00)	96,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	2.148.722.832,00	2.232.706.677,00	83.983.845,00	103,90	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.148.722.832,00	2.232.706.677,00	83.983.845,00	103,90	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Organisasi : **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
				JUMLAH PENDAPATAN	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000		5	BELANJA DAERAH	32.045.017.159,00	29.975.886.725,00	(2.069.130.434,00)	93,54	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.151.376.907,00	12.280.866.645,00	(1.870.510.262,00)	86,78	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.151.376.907,00	12.280.866.645,00	(1.870.510.262,00)	86,78	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	14.151.376.907,00	12.280.866.645,00	(1.870.510.262,00)	86,78	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	13.834.338.907,00	12.214.016.644,00	(1.620.322.263,00)	88,28	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.834.338.907,00	12.214.016.644,00	(1.620.322.263,00)	88,28	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	317.038.000,00	66.850.001,00	(250.187.999,00)	21,08	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.038.000,00	66.850.001,00	(187.999,00)	99,71	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	(33.331.228,00)	97,50	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04.2.01		PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	(33.331.228,00)	97,50	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04.2.01.0016		OPTIMALISASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	(33.331.228,00)	97,50	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	(33.331.228,00)	97,50	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	(33.331.228,00)	97,50	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16.046.279.824,00	15.937.287.180,00	(108.992.644,00)	99,32	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.046.279.824,00	15.937.287.180,00	(108.992.644,00)	99,32	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0036		PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)	8.563.593.800,00	8.481.244.800,00	(82.349.000,00)	99,03	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	261.597.800,00	247.361.000,00	(14.236.800,00)	94,55	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.597.800,00	247.361.000,00	(14.236.800,00)	94,55	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	(68.112.200,00)	99,17	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0036	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	(68.112.200,00)	99,17	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0039		PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	7.482.686.024,00	7.456.042.380,00	(26.643.644,00)	99,64	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	7.482.686.024,00	7.456.042.380,00	(26.643.644,00)	99,64	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.482.686.024,00	7.456.042.380,00	(26.643.644,00)	99,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	509.444.368,00	453.148.068,00	(56.296.300,00)	88,94	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	509.444.368,00	453.148.068,00	(56.296.300,00)	88,94	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0019		PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	221.321.100,00	174.573.700,00	(46.747.400,00)	78,87	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	215.071.100,00	168.373.700,00	(46.697.400,00)	78,28	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.071.100,00	168.373.700,00	(46.697.400,00)	78,28	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	6.250.000,00	6.200.000,00	(50.000,00)	99,20	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.250.000,00	6.200.000,00	(50.000,00)	99,20	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0020		BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA	131.981.250,00	131.855.500,00	(125.750,00)	99,90	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	105.731.250,00	105.675.500,00	(55.750,00)	99,94	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.731.250,00	105.675.500,00	(55.750,00)	99,94	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	26.250.000,00	26.180.000,00	(70.000,00)	99,73	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.250.000,00	26.180.000,00	(70.000,00)	99,73	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	156.142.018,00	146.718.868,00	(9.423.150,00)	93,96	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	149.892.018,00	140.518.868,00	(9.373.150,00)	93,74	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.892.018,00	140.518.868,00	(9.373.150,00)	93,74	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	6.250.000,00	6.200.000,00	(50.000,00)	99,20	
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.250.000,00	6.200.000,00	(50.000,00)	99,20	
				JUMLAH BELANJA	32.045.017.159,00	29.975.886.725,00	(2.069.130.434,00)	93,54	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(31.923.797.697,00)	(29.576.952.875,00)	2.346.844.822,00	92,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(31.923.797.697,00)	(29.576.952.875,00)	2.346.844.822,00	92,64	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
				JUMLAH PENDAPATAN	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000		5	BELANJA DAERAH	10.430.805.135,00	8.917.356.959,00	(1.513.448.176,00)	85,49	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.196.773.180,00	5.093.629.342,00	(103.143.838,00)	98,01	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	73.086.900,00	72.494.600,00	(592.300,00)	99,18	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.304.900,00	16.304.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.304.900,00	16.304.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.304.900,00	16.304.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56.782.000,00	56.189.700,00	(592.300,00)	98,95	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	56.782.000,00	56.189.700,00	(592.300,00)	98,95	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.782.000,00	56.189.700,00	(592.300,00)	98,95	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.860.932.554,00	4.763.259.608,00	(97.672.946,00)	97,99	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	(97.672.946,00)	97,87	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	(97.672.946,00)	97,87	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	(97.672.946,00)	97,87	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	274.748.356,00	274.748.356,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	274.748.356,00	274.748.356,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.748.356,00	274.748.356,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	41.123.600,00	39.601.600,00	(1.522.000,00)	96,29	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.500.000,00	22.010.000,00	(1.490.000,00)	93,65	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	22.010.000,00	(1.490.000,00)	93,65	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	22.010.000,00	(1.490.000,00)	93,65	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.623.600,00	17.591.600,00	(32.000,00)	99,81	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.123.600,00	10.091.600,00	(32.000,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.123.600,00	10.091.600,00	(32.000,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	221.630.126,00	218.273.534,00	(3.356.592,00)	98,48	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	190.000.000,00	186.740.934,00	(3.259.066,00)	98,28	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	186.740.934,00	(3.259.066,00)	98,28	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	186.740.934,00	(3.259.066,00)	98,28	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.780.126,00	30.682.600,00	(97.526,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.780.126,00	30.682.600,00	(97.526,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.780.126,00	30.682.600,00	(97.526,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	647.548.520,00	508.492.551,00	(139.055.969,00)	78,52	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	647.548.520,00	508.492.551,00	(139.055.969,00)	78,52	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	647.548.520,00	508.492.551,00	(139.055.969,00)	78,52	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	647.548.520,00	508.492.551,00	(139.055.969,00)	78,52	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.548.520,00	508.492.551,00	(139.055.969,00)	78,52	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.632.417.571,00	1.612.260.900,00	(20.156.671,00)	98,76	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.632.417.571,00	1.612.260.900,00	(20.156.671,00)	98,76	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0002		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	420.000.000,00	419.435.000,00	(565.000,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000,00	419.435.000,00	(565.000,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	419.435.000,00	(565.000,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0012		PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.212.417.571,00	1.192.825.900,00	(19.591.671,00)	98,38	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.199.417.571,00	1.179.825.900,00	(19.591.671,00)	98,36	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.199.417.571,00	1.179.825.900,00	(19.591.671,00)	98,36	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.954.065.864,00	1.702.974.166,00	(1.251.091.698,00)	57,64	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	2.954.065.864,00	1.702.974.166,00	(1.251.091.698,00)	57,64	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	2.954.065.864,00	1.702.974.166,00	(1.251.091.698,00)	57,64	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	682.544.064,00	391.939.264,00	(290.604.800,00)	57,42	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.544.064,00	391.939.264,00	(290.604.800,00)	57,42	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.271.521.800,00	1.311.034.902,00	(960.486.898,00)	57,71	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.859.238.000,00	1.029.924.762,00	(829.313.238,00)	55,39	
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	412.283.800,00	281.110.140,00	(131.173.660,00)	68,18	
				JUMLAH BELANJA	10.430.805.135,00	8.917.356.959,00	(1.513.448.176,00)	85,49	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.309.585.673,00)	(8.518.423.109,00)	1.791.162.564,00	82,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.309.585.673,00)	(8.518.423.109,00)	1.791.162.564,00	82,62	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
	1.04.2.10.1.03.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
				JUMLAH PENDAPATAN	121.219.462,00	398.933.850,00	277.714.388,00	329,10	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000		5	BELANJA DAERAH	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01		PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	154.429.912,00	154.284.812,00	(145.100,00)	99,90	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.429.912,00	154.284.812,00	(145.100,00)	99,90	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.870.000,00	(130.000,00)	99,27	
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	17.870.000,00	(130.000,00)	99,27	
				JUMLAH BELANJA	172.429.912,00	172.154.812,00	(275.100,00)	99,84	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(51.210.450,00)	226.779.038,00	277.989.488,00	(442,83)	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(51.210.450,00)	226.779.038,00	277.989.488,00	(442,83)	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.873.930.356,00	7.768.995.803,00	(104.934.563,00)	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.850.749.594,00	3.776.411.813,00	(74.337.781,00)	98,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.098.000,00	11.035.000,00	(63.000,00)	99,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.648.000,00	7.635.000,00	(13.000,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.648.000,00	7.635.000,00	(13.000,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.648.000,00	7.635.000,00	(13.000,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.450.000,00	3.400.000,00	(50.000,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	3.400.000,00	(50.000,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.400.000,00	(50.000,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.280.298.994,00	3.216.509.319,00	(63.789.675,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	(63.788.827,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	(63.788.827,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	(63.788.827,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12.831.400,00	12.830.552,00	(848,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.831.400,00	12.830.552,00	(848,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.831.400,00	12.830.552,00	(848,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	123.100.000,00	122.752.000,00	(348.000,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	123.100.000,00	122.752.000,00	(348.000,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.100.000,00	122.752.000,00	(348.000,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.100.000,00	122.752.000,00	(348.000,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	205.079.600,00	198.530.812,00	(6.548.788,00)	96,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.500.000,00	44.852.029,00	(647.971,00)	98,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	39.500.000,00	38.852.029,00	(647.971,00)	98,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.500.000,00	38.852.029,00	(647.971,00)	98,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.772.920,00	9.751.583,00	(21.337,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.772.920,00	9.751.583,00	(21.337,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.772.920,00	9.751.583,00	(21.337,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.832.280,00	1.832.000,00	(280,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.832.280,00	1.832.000,00	(280,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.832.280,00	1.832.000,00	(280,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	145.776.000,00	139.896.800,00	(5.879.200,00)	95,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	145.776.000,00	139.896.800,00	(5.879.200,00)	95,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.776.000,00	139.896.800,00	(5.879.200,00)	95,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.343.000,00	41.061.691,00	(1.281.309,00)	96,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.843.000,00	7.601.691,00	(1.241.309,00)	85,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.843.000,00	7.601.691,00	(1.241.309,00)	85,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.843.000,00	7.601.691,00	(1.241.309,00)	85,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.900.000,00	27.860.000,00	(40.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.900.000,00	27.860.000,00	(40.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	27.860.000,00	(40.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	188.830.000,00	186.522.991,00	(2.307.009,00)	98,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	182.830.000,00	180.522.991,00	(2.307.009,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	182.830.000,00	180.522.991,00	(2.307.009,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.830.000,00	180.522.991,00	(2.307.009,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.957.855.372,00	3.927.758.590,00	(30.096.782,00)	99,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.891.771.422,00	3.865.148.900,00	(26.622.522,00)	99,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.475.000.000,00	3.450.749.350,00	(24.250.650,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.475.000.000,00	3.450.749.350,00	(24.250.650,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000.000,00	3.450.749.350,00	(24.250.650,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	96.833.950,00	95.007.750,00	(1.826.200,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	96.833.950,00	95.007.750,00	(1.826.200,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.833.950,00	95.007.750,00	(1.826.200,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.145.900,00	12.143.900,00	(2.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.145.900,00	12.143.900,00	(2.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.145.900,00	12.143.900,00	(2.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008		PENYUSUNAN SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	2.591.572,00	2.588.900,00	(2.672,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.591.572,00	2.588.900,00	(2.672,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.591.572,00	2.588.900,00	(2.672,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	263.700.000,00	263.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	263.700.000,00	263.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.700.000,00	263.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0018		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.500.000,00	40.959.000,00	(541.000,00)	98,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	41.500.000,00	40.959.000,00	(541.000,00)	98,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.500.000,00	40.959.000,00	(541.000,00)	98,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	66.083.950,00	62.609.690,00	(3.474.260,00)	94,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0004		PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	5.061.000,00	5.060.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.061.000,00	5.060.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.061.000,00	5.060.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0005		PENYUSUNAN SOP PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	2.846.700,00	2.779.700,00	(67.000,00)	97,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.846.700,00	2.779.700,00	(67.000,00)	97,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.846.700,00	2.779.700,00	(67.000,00)	97,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	42.052.590,00	38.700.590,00	(3.352.000,00)	92,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	42.052.590,00	38.700.590,00	(3.352.000,00)	92,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.052.590,00	38.700.590,00	(3.352.000,00)	92,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	16.123.660,00	16.069.400,00	(54.260,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.123.660,00	16.069.400,00	(54.260,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.123.660,00	16.069.400,00	(54.260,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	65.325.400,00	64.825.400,00	(500.000,00)	99,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.805.900,00	17.305.900,00	(500.000,00)	97,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.374.200,00	5.874.200,00	(500.000,00)	92,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.374.200,00	5.874.200,00	(500.000,00)	92,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.374.200,00	5.874.200,00	(500.000,00)	92,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	11.431.700,00	11.431.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	11.431.700,00	11.431.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.431.700,00	11.431.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	7.873.930.366,00	7.768.995.803,00	(104.934.563,00)	98,66	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.873.930.366,00)	(7.768.995.803,00)	104.934.563,00	98,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.873.930.366,00)	(7.768.995.803,00)	104.934.563,00	98,66	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.233.024.199,00	2.953.776.990,00	(279.247.209,00)	91,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.916.671.135,00	1.883.955.999,00	(32.715.136,00)	98,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.690.000,00	25.560.000,00	(130.000,00)	99,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.690.000,00	25.560.000,00	(130.000,00)	99,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.690.000,00	25.560.000,00	(130.000,00)	99,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.690.000,00	25.560.000,00	(130.000,00)	99,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.636.575.817,00	1.605.676.063,00	(30.899.754,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	(30.899.554,00)	98,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	(30.899.554,00)	98,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	(30.899.554,00)	98,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	15.774.200,00	15.774.000,00	(200,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.774.200,00	15.774.000,00	(200,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.774.200,00	15.774.000,00	(200,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	64.950.956,00	64.950.956,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.950.956,00	64.950.956,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.950.956,00	64.950.956,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	94.609.754,00	94.318.806,00	(290.948,00)	99,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.104.130,00	2.103.500,00	(630,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.104.130,00	2.103.500,00	(630,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.104.130,00	2.103.500,00	(630,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.477.668,00	5.351.500,00	(126.168,00)	97,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.477.668,00	5.351.500,00	(126.168,00)	97,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.477.668,00	5.351.500,00	(126.168,00)	97,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	38.250.956,00	38.250.956,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.250.956,00	38.250.956,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.250.956,00	38.250.956,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	48.777.000,00	48.612.850,00	(164.150,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.777.000,00	48.612.850,00	(164.150,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.777.000,00	48.612.850,00	(164.150,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.830.000,00	27.786.500,00	(43.500,00)	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.780.000,00	7.745.500,00	(34.500,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.780.000,00	7.745.500,00	(34.500,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	7.745.500,00	(34.500,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.550.000,00	17.545.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.550.000,00	17.545.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	17.545.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	131.965.564,00	130.614.630,00	(1.350.934,00)	98,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	89.030.000,00	87.679.066,00	(1.350.934,00)	98,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.030.000,00	87.679.066,00	(1.350.934,00)	98,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.030.000,00	87.679.066,00	(1.350.934,00)	98,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	41.835.564,00	41.835.564,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.835.564,00	41.835.564,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.835.564,00	41.835.564,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.316.353.064,00	1.069.820.991,00	(246.532.073,00)	81,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	217.672.000,00	11.054.880,00	(206.617.120,00)	5,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003		PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	217.672.000,00	11.054.880,00	(206.617.120,00)	5,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.672.000,00	11.054.880,00	(189.617.120,00)	5,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.672.000,00	11.054.880,00	(189.617.120,00)	5,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.031.181.064,00	991.584.111,00	(39.596.953,00)	96,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	31.181.064,00	31.181.037,00	(27,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	31.181.064,00	31.181.037,00	(27,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.181.064,00	31.181.037,00	(27,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	1.000.000.000,00	960.403.074,00	(39.596.926,00)	96,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	806.200.000,00	768.190.334,00	(38.009.666,00)	95,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.200.000,00	768.190.334,00	(38.009.666,00)	95,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	193.800.000,00	192.212.740,00	(1.587.260,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.800.000,00	192.212.740,00	(1.587.260,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	67.500.000,00	67.182.000,00	(318.000,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	67.500.000,00	67.182.000,00	(318.000,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	67.182.000,00	(318.000,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	67.182.000,00	(318.000,00)	99,52	
				JUMLAH BELANJA	3.233.024.199,00	2.953.776.990,00	(279.247.209,00)	91,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.233.024.199,00)	(2.953.776.990,00)	279.247.209,00	91,36	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.233.024.199,00)	(2.953.776.990,00)	279.247.209,00	91,36	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.939.877.676,00	13.589.966.319,00	(349.911.357,00)	97,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.814.362.263,00	2.652.325.768,00	(162.036.495,00)	94,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	91.720.000,00	91.170.000,00	(550.000,00)	99,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	91.720.000,00	91.170.000,00	(550.000,00)	99,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	91.720.000,00	91.170.000,00	(550.000,00)	99,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.720.000,00	91.170.000,00	(550.000,00)	99,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.314.587.349,00	2.169.181.984,00	(145.405.365,00)	93,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	(132.215.031,00)	93,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	(132.215.031,00)	93,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	(132.215.031,00)	93,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	70.596.430,00	66.153.400,00	(4.443.030,00)	93,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.596.430,00	66.153.400,00	(4.443.030,00)	93,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.596.430,00	66.153.400,00	(4.443.030,00)	93,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	280.538.604,00	271.791.300,00	(8.747.304,00)	96,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	280.538.604,00	271.791.300,00	(8.747.304,00)	96,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.538.604,00	271.791.300,00	(8.747.304,00)	96,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	151.157.975,99	149.542.450,00	(1.615.525,99)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.139.975,99	28.139.750,00	(225,99)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.139.975,99	28.139.750,00	(225,99)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.139.975,99	28.139.750,00	(225,99)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.160.000,00	1.500.000,00	(660.000,00)	69,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	1.500.000,00	(660.000,00)	69,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	1.500.000,00	(660.000,00)	69,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	104.858.000,00	103.902.700,00	(955.300,00)	99,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	104.858.000,00	103.902.700,00	(955.300,00)	99,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.858.000,00	103.902.700,00	(955.300,00)	99,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.514.000,00	52.546.250,00	(8.967.750,00)	85,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.500.000,00	10.742.250,00	(6.757.750,00)	61,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	10.742.250,00	(6.757.750,00)	61,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	10.742.250,00	(6.757.750,00)	61,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	35.014.000,00	32.804.000,00	(2.210.000,00)	93,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	35.014.000,00	32.804.000,00	(2.210.000,00)	93,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.014.000,00	32.804.000,00	(2.210.000,00)	93,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	195.382.938,01	189.885.084,00	(5.497.854,01)	97,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	126.382.542,01	123.115.084,00	(3.267.458,01)	97,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.382.542,01	123.115.084,00	(3.267.458,01)	97,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.382.542,01	123.115.084,00	(3.267.458,01)	97,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	54.000.396,00	51.770.000,00	(2.230.396,00)	95,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.396,00	18.770.000,00	(2.230.396,00)	89,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.396,00	18.770.000,00	(2.230.396,00)	89,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.429.075.263,00	10.243.543.551,00	(185.531.712,00)	98,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01		PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	5.965.553.500,00	5.902.026.939,00	(63.526.561,00)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0001		FASILITASI PEMBERDAYAAN SOSIAL KAT	5.965.553.500,00	5.902.026.939,00	(63.526.561,00)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.965.553.500,00	5.902.026.939,00	(63.526.561,00)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.965.553.500,00	5.902.026.939,00	(63.526.561,00)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.463.521.763,00	4.341.516.612,00	(122.005.151,00)	97,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	418.135.000,00	362.155.600,00	(55.979.400,00)	86,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	418.135.000,00	362.155.600,00	(55.979.400,00)	86,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.135.000,00	362.155.600,00	(55.979.400,00)	86,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	4.045.386.763,00	3.979.361.012,00	(66.025.751,00)	98,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.045.386.763,00	3.979.361.012,00	(66.025.751,00)	98,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.045.386.763,00	3.979.361.012,00	(66.025.751,00)	98,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	308.703.900,00	308.535.000,00	(168.900,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	147.633.900,00	147.633.900,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	147.633.900,00	147.633.900,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	147.633.900,00	147.633.900,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.633.900,00	147.633.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	161.070.000,00	160.901.100,00	(168.900,00)	99,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0001		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	73.820.000,00	73.819.300,00	(700,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.820.000,00	73.819.300,00	(700,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.820.000,00	73.819.300,00	(700,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0005		PENYEDIAAN ALAT BANTU	87.250.000,00	87.081.800,00	(168.200,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	87.250.000,00	87.081.800,00	(168.200,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.250.000,00	87.081.800,00	(168.200,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	220.933.750,00	220.759.500,00	(174.250,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.933.750,00	220.759.500,00	(174.250,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.933.750,00	220.759.500,00	(174.250,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	215.933.750,00	215.759.500,00	(174.250,00)	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.933.750,00	215.759.500,00	(174.250,00)	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	166.802.500,00	164.802.500,00	(2.000.000,00)	98,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	166.802.500,00	164.802.500,00	(2.000.000,00)	98,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	166.802.500,00	164.802.500,00	(2.000.000,00)	98,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	151.802.500,00	149.802.500,00	(2.000.000,00)	98,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.802.500,00	149.802.500,00	(2.000.000,00)	98,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	13.939.877.676,00	13.589.966.319,00	(349.911.357,00)	97,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(13.939.877.676,00)	(13.589.966.319,00)	349.911.357,00	97,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.939.877.676,00)	(13.589.966.319,00)	349.911.357,00	97,48	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**
Organisasi : **Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.253.268.577,00	5.180.005.644,00	(73.262.933,00)	98,60	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.782.368.577,00	1.739.357.770,00	(43.010.807,00)	97,58	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	27.523.250,00	27.523.250,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.553.250,00	6.553.250,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.553.250,00	6.553.250,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.553.250,00	6.553.250,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.970.000,00	20.970.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.970.000,00	20.970.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.970.000,00	20.970.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.668.662.327,00	1.627.475.728,00	(41.186.599,00)	97,53	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	(41.186.599,00)	97,38	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	(41.186.599,00)	97,38	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	(41.186.599,00)	97,38	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	5.512.750,00	5.512.750,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.512.750,00	5.512.750,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.512.750,00	5.512.750,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	76.982.868,00	76.982.868,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	76.982.868,00	76.982.868,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.982.868,00	76.982.868,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	22.569.000,00	22.367.000,00	(202.000,00)	99,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	21.556.000,00	21.354.000,00	(202.000,00)	99,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.556.000,00	21.354.000,00	(202.000,00)	99,06	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.556.000,00	21.354.000,00	(202.000,00)	99,06	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59.554.000,00	57.931.792,00	(1.622.208,00)	97,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	59.554.000,00	57.931.792,00	(1.622.208,00)	97,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.554.000,00	57.931.792,00	(1.622.208,00)	97,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.554.000,00	57.931.792,00	(1.622.208,00)	97,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.506.229.500,00	2.489.678.466,00	(16.551.034,00)	99,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	2.506.229.500,00	2.489.678.466,00	(16.551.034,00)	99,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	2.506.229.500,00	2.489.678.466,00	(16.551.034,00)	99,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.471.153.500,00	2.455.268.466,00	(15.885.034,00)	99,35	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.471.153.500,00	2.455.268.466,00	(15.885.034,00)	99,35	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	35.076.000,00	34.410.000,00	(666.000,00)	98,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.076.000,00	34.410.000,00	(666.000,00)	98,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	478.253.000,00	464.888.708,00	(13.364.292,00)	97,20	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	478.253.000,00	464.888.708,00	(13.364.292,00)	97,20	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002		PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	460.013.000,00	446.793.708,00	(13.219.292,00)	97,12	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	460.013.000,00	446.793.708,00	(13.219.292,00)	97,12	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.013.000,00	446.793.708,00	(13.219.292,00)	97,12	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003		JOB FAIR/BURSA KERJA	18.240.000,00	18.095.000,00	(145.000,00)	99,20	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.240.000,00	18.095.000,00	(145.000,00)	99,20	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	18.095.000,00	(145.000,00)	99,20	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	486.417.500,00	486.080.700,00	(336.800,00)	99,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.481.500,00	34.393.900,00	(87.600,00)	99,74	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	34.481.500,00	34.393.900,00	(87.600,00)	99,74	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.481.500,00	34.393.900,00	(87.600,00)	99,74	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.481.500,00	34.393.900,00	(87.600,00)	99,74	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	451.936.000,00	451.686.800,00	(249.200,00)	99,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	451.936.000,00	451.686.800,00	(249.200,00)	99,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	451.936.000,00	451.686.800,00	(249.200,00)	99,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.936.000,00	451.686.800,00	(249.200,00)	99,94	
				JUMLAH BELANJA	5.253.268.577,00	5.180.005.644,00	(73.262.933,00)	98,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.253.268.577,00)	(5.180.005.644,00)	73.262.933,00	98,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.253.268.577,00)	(5.180.005.644,00)	73.262.933,00	98,60	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	187.829.500,00	187.418.500,00	(411.000,00)	99,78	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	187.829.500,00	187.418.500,00	(411.000,00)	99,78	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01		PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.829.500,00	187.418.500,00	(411.000,00)	99,78	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0002		PENYIAPAN LINGKUNGAN HUNIAN FISIK, SOSIAL, EKONOMI BAGI PENDUDUK SETEMPAT DAN TRANSMIGRAN	60.865.500,00	60.865.500,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.865.500,00	60.865.500,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.865.500,00	60.865.500,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0006		PELATIHAN TRANSMIGRASI	126.964.000,00	126.553.000,00	(411.000,00)	99,67	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	87.964.000,00	87.801.000,00	(163.000,00)	99,81	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.964.000,00	87.801.000,00	(163.000,00)	99,81	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	39.000.000,00	38.752.000,00	(248.000,00)	99,36	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	38.752.000,00	(248.000,00)	99,36	
				JUMLAH BELANJA	187.829.500,00	187.418.500,00	(411.000,00)	99,78	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(187.829.500,00)	(187.418.500,00)	411.000,00	99,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(187.829.500,00)	(187.418.500,00)	411.000,00	99,78	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.275.202.351,86	3.970.042.100,00	(305.160.251,86)	92,86	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.013.740.935,11	1.974.009.387,00	(39.731.548,11)	98,02	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.116.000,00	3.115.500,00	(500,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.116.000,00	3.115.500,00	(500,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.116.000,00	3.115.500,00	(500,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.116.000,00	3.115.500,00	(500,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.690.782.829,25	1.652.140.767,00	(38.642.062,25)	97,71	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	(38.642.062,25)	97,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	(38.642.062,25)	97,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	(38.642.062,25)	97,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	35.977.240,00	35.940.450,00	(36.790,00)	99,89	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.354.890,00	3.342.500,00	(12.390,00)	99,63	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.354.890,00	3.342.500,00	(12.390,00)	99,63	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.354.890,00	3.342.500,00	(12.390,00)	99,63	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.172.100,00	10.170.800,00	(1.300,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.172.100,00	10.170.800,00	(1.300,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.172.100,00	10.170.800,00	(1.300,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.536.250,00	2.527.150,00	(9.100,00)	99,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.536.250,00	2.527.150,00	(9.100,00)	99,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.536.250,00	2.527.150,00	(9.100,00)	99,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	14.614.000,00	14.600.000,00	(14.000,00)	99,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.614.000,00	14.600.000,00	(14.000,00)	99,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.614.000,00	14.600.000,00	(14.000,00)	99,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	191.191.232,00	190.841.332,00	(349.900,00)	99,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.871.500,00	5.521.600,00	(349.900,00)	94,04	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.871.500,00	5.521.600,00	(349.900,00)	94,04	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.871.500,00	5.521.600,00	(349.900,00)	94,04	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	183.819.732,00	183.819.732,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.819.732,00	183.819.732,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.819.732,00	183.819.732,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.673.633,86	91.971.338,00	(702.295,86)	99,24	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.876.107,86	44.176.338,00	(699.769,86)	98,44	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.876.107,86	44.176.338,00	(699.769,86)	98,44	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.876.107,86	44.176.338,00	(699.769,86)	98,44	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	47.797.526,00	47.795.000,00	(2.526,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	45.297.526,00	45.295.000,00	(2.526,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.297.526,00	45.295.000,00	(2.526,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	320.033.650,00	256.679.650,00	(63.354.000,00)	80,20	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	320.033.650,00	256.679.650,00	(63.354.000,00)	80,20	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	320.033.650,00	256.679.650,00	(63.354.000,00)	80,20	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	320.033.650,00	256.679.650,00	(63.354.000,00)	80,20	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.033.650,00	256.679.650,00	(63.354.000,00)	80,20	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.217.096.166,75	1.058.899.263,00	(158.196.903,75)	87,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	764.332.391,75	678.794.451,00	(85.537.940,75)	88,80	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	764.332.391,75	678.794.451,00	(85.537.940,75)	88,80	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	764.332.391,75	678.794.451,00	(85.537.940,75)	88,80	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.332.391,75	678.794.451,00	(85.537.940,75)	88,80	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	368.815.775,00	296.294.812,00	(72.520.963,00)	80,33	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	81.525.775,00	80.833.600,00	(692.175,00)	99,15	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.525.775,00	80.833.600,00	(692.175,00)	99,15	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.525.775,00	80.833.600,00	(692.175,00)	99,15	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	287.290.000,00	215.461.212,00	(71.828.788,00)	74,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	287.290.000,00	215.461.212,00	(71.828.788,00)	74,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.290.000,00	215.461.212,00	(71.828.788,00)	74,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.948.000,00	83.810.000,00	(138.000,00)	99,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	83.948.000,00	83.810.000,00	(138.000,00)	99,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.948.000,00	83.810.000,00	(138.000,00)	99,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.948.000,00	83.810.000,00	(138.000,00)	99,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	305.898.150,00	301.793.150,00	(4.105.000,00)	98,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.898.150,00	301.793.150,00	(4.105.000,00)	98,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.898.150,00	301.793.150,00	(4.105.000,00)	98,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	305.898.150,00	301.793.150,00	(4.105.000,00)	98,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.898.150,00	301.793.150,00	(4.105.000,00)	98,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	311.341.750,00	288.741.950,00	(22.599.800,00)	92,74	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	168.277.900,00	154.394.500,00	(13.883.400,00)	91,74	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	153.132.900,00	139.446.900,00	(13.686.000,00)	91,06	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	153.132.900,00	139.446.900,00	(13.686.000,00)	91,06	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.132.900,00	139.446.900,00	(13.686.000,00)	91,06	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.145.000,00	14.947.600,00	(197.400,00)	98,69	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.145.000,00	14.947.600,00	(197.400,00)	98,69	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.145.000,00	14.947.600,00	(197.400,00)	98,69	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	143.063.850,00	134.347.450,00	(8.716.400,00)	93,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	143.063.850,00	134.347.450,00	(8.716.400,00)	93,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	143.063.850,00	134.347.450,00	(8.716.400,00)	93,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.063.850,00	134.347.450,00	(8.716.400,00)	93,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	107.091.700,00	89.918.700,00	(17.173.000,00)	83,96	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.176.700,00	15.843.700,00	(16.333.000,00)	49,23	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	32.176.700,00	15.843.700,00	(16.333.000,00)	49,23	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.176.700,00	15.843.700,00	(16.333.000,00)	49,23	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.176.700,00	15.843.700,00	(16.333.000,00)	49,23	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.915.000,00	74.075.000,00	(840.000,00)	98,87	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	35.225.000,00	35.225.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.225.000,00	35.225.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.225.000,00	35.225.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0007		PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.690.000,00	38.850.000,00	(840.000,00)	97,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.690.000,00	38.850.000,00	(840.000,00)	97,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.690.000,00	38.850.000,00	(840.000,00)	97,88	
				JUMLAH BELANJA	4.275.202.351,86	3.970.042.100,00	(305.160.251,86)	92,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.275.202.351,86)	(3.970.042.100,00)	305.160.251,86	92,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.275.202.351,86)	(3.970.042.100,00)	305.160.251,86	92,86	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.731.636.140,00	5.408.483.079,00	(323.153.061,00)	94,36	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.928.015.498,00	1.869.667.253,00	(58.348.245,00)	96,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.867.500,00	13.867.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.927.500,00	8.927.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.927.500,00	8.927.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.927.500,00	8.927.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.833.122.848,00	1.774.990.703,00	(58.132.145,00)	96,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	(58.132.145,00)	96,48	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	(58.132.145,00)	96,48	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	(58.132.145,00)	96,48	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	168.484.388,00	168.484.388,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	168.484.388,00	168.484.388,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.484.388,00	168.484.388,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	16.178.250,00	15.993.950,00	(184.300,00)	98,86	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.258.250,00	4.258.250,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.258.250,00	4.258.250,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.258.250,00	4.258.250,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	2.500.000,00	2.443.700,00	(56.300,00)	97,74	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.443.700,00	(56.300,00)	97,74	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.443.700,00	(56.300,00)	97,74	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	6.920.000,00	6.802.000,00	(118.000,00)	98,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.920.000,00	6.802.000,00	(118.000,00)	98,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	6.802.000,00	(118.000,00)	98,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.529.000,00	12.511.000,00	(18.000,00)	99,85	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.500.000,00	7.491.000,00	(9.000,00)	99,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.491.000,00	(9.000,00)	99,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.491.000,00	(9.000,00)	99,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.029.000,00	5.020.000,00	(9.000,00)	99,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.029.000,00	5.020.000,00	(9.000,00)	99,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.029.000,00	5.020.000,00	(9.000,00)	99,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52.317.900,00	52.304.100,00	(13.800,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	52.067.900,00	52.054.100,00	(13.800,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.067.900,00	52.054.100,00	(13.800,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.067.900,00	52.054.100,00	(13.800,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	136.528.500,00	132.545.840,00	(3.982.660,00)	97,08	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.528.500,00	132.545.840,00	(3.982.660,00)	97,08	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	136.528.500,00	132.545.840,00	(3.982.660,00)	97,08	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	136.528.500,00	132.545.840,00	(3.982.660,00)	97,08	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.528.500,00	132.545.840,00	(3.982.660,00)	97,08	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.973.034.500,00	2.739.988.461,00	(233.046.039,00)	92,16	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	571.014.000,00	451.109.961,00	(119.904.039,00)	79,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007		PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	81.870.000,00	81.272.800,00	(597.200,00)	99,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	81.870.000,00	81.272.800,00	(597.200,00)	99,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.870.000,00	81.272.800,00	(597.200,00)	99,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010		PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA	489.144.000,00	369.837.161,00	(119.306.839,00)	75,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	470.644.000,00	351.337.161,00	(119.306.839,00)	74,65	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.644.000,00	351.337.161,00	(119.306.839,00)	74,65	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	2.402.020.500,00	2.288.878.500,00	(113.142.000,00)	95,28	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	2.402.020.500,00	2.288.878.500,00	(113.142.000,00)	95,28	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.402.020.500,00	2.288.878.500,00	(113.142.000,00)	95,28	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.402.020.500,00	2.288.878.500,00	(113.142.000,00)	95,28	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	539.903.892,00	516.262.850,00	(23.641.042,00)	95,62	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	513.542.892,00	489.901.850,00	(23.641.042,00)	95,39	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	513.542.892,00	489.901.850,00	(23.641.042,00)	95,39	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	513.542.892,00	489.901.850,00	(23.641.042,00)	95,39	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.542.892,00	489.901.850,00	(23.641.042,00)	95,39	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	154.153.750,00	150.018.675,00	(4.135.075,00)	97,31	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	154.153.750,00	150.018.675,00	(4.135.075,00)	97,31	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	154.153.750,00	150.018.675,00	(4.135.075,00)	97,31	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	79.153.750,00	75.018.750,00	(4.135.000,00)	94,77	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.153.750,00	75.018.750,00	(4.135.000,00)	94,77	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.999.925,00	(75,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	74.999.925,00	(75,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	5.731.636.140,00	5.408.483.079,00	(323.153.061,00)	94,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.731.636.140,00)	(5.408.483.079,00)	323.153.061,00	94,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.731.636.140,00)	(5.408.483.079,00)	323.153.061,00	94,36	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
Organisasi : **Dinas Lingkungan Hidup**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.1.03.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23	
	2.11.1.03.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23	
	2.11.1.03.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23	
				JUMLAH PENDAPATAN	51.964.424,00	87.940.000,00	35.975.576,00	169,23	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.584.803.659,00	3.524.223.061,00	(60.580.598,00)	98,31	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.665.150.959,00	1.626.207.902,00	(38.943.057,00)	97,66	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.465.000,00	13.290.300,00	(1.174.700,00)	91,87	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.955.000,00	6.168.000,00	(787.000,00)	88,68	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.955.000,00	6.168.000,00	(787.000,00)	88,68	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.955.000,00	6.168.000,00	(787.000,00)	88,68	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.510.000,00	7.122.300,00	(387.700,00)	94,83	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.510.000,00	7.122.300,00	(387.700,00)	94,83	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.122.300,00	(387.700,00)	94,83	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.417.998.813,00	1.389.470.009,00	(28.528.804,00)	97,98	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	(26.488.804,00)	98,08	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	(26.488.804,00)	98,08	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	(26.488.804,00)	98,08	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.501.900,00	9.501.900,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.501.900,00	9.501.900,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.501.900,00	9.501.900,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	23.870.000,00	21.830.000,00	(2.040.000,00)	91,45	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.870.000,00	21.830.000,00	(2.040.000,00)	91,45	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.870.000,00	21.830.000,00	(2.040.000,00)	91,45	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	33.719.250,00	32.225.450,00	(1.493.800,00)	95,56	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.626.500,00	9.751.500,00	(875.000,00)	91,76	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.626.500,00	9.751.500,00	(875.000,00)	91,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.626.500,00	9.751.500,00	(875.000,00)	91,76	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	18.930.000,00	18.311.200,00	(618.800,00)	96,73	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	18.930.000,00	18.311.200,00	(618.800,00)	96,73	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.930.000,00	18.311.200,00	(618.800,00)	96,73	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.556.250,00	16.354.800,00	(1.201.450,00)	93,15	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.363.250,00	9.154.800,00	(208.450,00)	97,77	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.363.250,00	9.154.800,00	(208.450,00)	97,77	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.363.250,00	9.154.800,00	(208.450,00)	97,77	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.193.000,00	5.200.000,00	(993.000,00)	83,96	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.193.000,00	5.200.000,00	(993.000,00)	83,96	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.193.000,00	5.200.000,00	(993.000,00)	83,96	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	181.411.646,00	174.867.343,00	(6.544.303,00)	96,39	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	109.983.214,00	104.513.911,00	(5.469.303,00)	95,02	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.983.214,00	104.513.911,00	(5.469.303,00)	95,02	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.983.214,00	104.513.911,00	(5.469.303,00)	95,02	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.450.000,00	375.000,00	(1.075.000,00)	25,86	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	375.000,00	(1.075.000,00)	25,86	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	375.000,00	(1.075.000,00)	25,86	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	69.978.432,00	69.978.432,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	69.978.432,00	69.978.432,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.978.432,00	69.978.432,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	806.720.900,00	805.727.600,00	(993.300,00)	99,87	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	206.721.000,00	206.478.200,00	(242.800,00)	99,88	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0005		PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	206.721.000,00	206.478.200,00	(242.800,00)	99,88	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	206.721.000,00	206.478.200,00	(242.800,00)	99,88	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.721.000,00	206.478.200,00	(242.800,00)	99,88	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	599.999.900,00	599.249.400,00	(750.500,00)	99,87	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005		PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	599.999.900,00	599.249.400,00	(750.500,00)	99,87	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	599.999.900,00	599.249.400,00	(750.500,00)	99,87	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.999.900,00	599.249.400,00	(750.500,00)	99,87	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	480.758.056,00	475.763.415,00	(4.994.641,00)	98,96	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	480.758.056,00	475.763.415,00	(4.994.641,00)	98,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	50.994.500,00	48.359.200,00	(2.635.300,00)	94,83	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.994.500,00	48.359.200,00	(2.635.300,00)	94,83	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.994.500,00	48.359.200,00	(2.635.300,00)	94,83	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	228.675.100,00	226.824.055,00	(1.851.045,00)	99,19	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	228.675.100,00	226.824.055,00	(1.851.045,00)	99,19	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.675.100,00	226.824.055,00	(1.851.045,00)	99,19	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	201.088.456,00	200.580.160,00	(508.296,00)	99,74	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	199.188.456,00	198.680.160,00	(508.296,00)	99,74	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.188.456,00	198.680.160,00	(508.296,00)	99,74	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	5.679.900,00	4.864.900,00	(815.000,00)	85,65	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.679.900,00	4.864.900,00	(815.000,00)	85,65	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	5.679.900,00	4.864.900,00	(815.000,00)	85,65	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.679.900,00	4.864.900,00	(815.000,00)	85,65	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.679.900,00	4.864.900,00	(815.000,00)	85,65	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	281.227.200,00	269.680.600,00	(11.546.600,00)	95,89	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.227.200,00	269.680.600,00	(11.546.600,00)	95,89	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	281.227.200,00	269.680.600,00	(11.546.600,00)	95,89	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	281.227.200,00	269.680.600,00	(11.546.600,00)	95,89	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.227.200,00	269.680.600,00	(11.546.600,00)	95,89	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.000.000,00	1.940.000,00	(3.060.000,00)	38,80	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09.2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	1.940.000,00	(3.060.000,00)	38,80	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	5.000.000,00	1.940.000,00	(3.060.000,00)	38,80	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.940.000,00	(3.060.000,00)	38,80	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.940.000,00	(3.060.000,00)	38,80	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.034.000,00	4.806.000,00	(228.000,00)	95,47	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	5.034.000,00	4.806.000,00	(228.000,00)	95,47	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0005		PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.034.000,00	4.806.000,00	(228.000,00)	95,47	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.034.000,00	4.806.000,00	(228.000,00)	95,47	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.034.000,00	4.806.000,00	(228.000,00)	95,47	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019		PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENDAURAN ULANG SAMPAH	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	3.584.803.659,00	3.524.223.061,00	(60.580.598,00)	98,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.532.839.235,00)	(3.436.283.061,00)	96.556.174,00	97,26	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.532.839.235,00)	(3.436.283.061,00)	96.556.174,00	97,26	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.449.172.430,00	5.045.974.501,00	(403.197.929,00)	92,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.005.727.180,00	3.658.938.992,00	(346.788.188,00)	91,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	739.500,00	739.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	359.500,00	359.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	359.500,00	359.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.500,00	359.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.944.141.430,00	2.759.144.229,00	(184.997.201,00)	93,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	(184.817.201,00)	93,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	(184.817.201,00)	93,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	(184.817.201,00)	93,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	748.700,00	718.000,00	(30.700,00)	95,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	748.700,00	718.000,00	(30.700,00)	95,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.700,00	718.000,00	(30.700,00)	95,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	73.700.000,00	73.560.000,00	(140.000,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	73.700.000,00	73.560.000,00	(140.000,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.700.000,00	73.560.000,00	(140.000,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	8.170.800,00	8.161.500,00	(9.300,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.170.800,00	8.161.500,00	(9.300,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.170.800,00	8.161.500,00	(9.300,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	66.761.954,00	66.280.850,00	(481.104,00)	99,27	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.242.704,00	13.242.000,00	(704,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.242.704,00	13.242.000,00	(704,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.242.704,00	13.242.000,00	(704,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.377.250,00	11.377.250,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.377.250,00	11.377.250,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.377.250,00	11.377.250,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	30.542.000,00	30.061.600,00	(480.400,00)	98,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.542.000,00	30.061.600,00	(480.400,00)	98,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.542.000,00	30.061.600,00	(480.400,00)	98,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	244.435.296,00	125.352.705,00	(119.082.591,00)	51,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.800.000,00	1.088.700,00	(711.300,00)	60,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.088.700,00	(711.300,00)	60,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.088.700,00	(711.300,00)	60,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.700.000,00	32.417.313,00	(282.687,00)	99,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.700.000,00	32.417.313,00	(282.687,00)	99,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	32.417.313,00	(282.687,00)	99,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	209.935.296,00	91.846.692,00	(118.088.604,00)	43,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	209.935.296,00	91.846.692,00	(118.088.604,00)	43,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.935.296,00	91.846.692,00	(118.088.604,00)	43,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	749.649.000,00	707.421.708,00	(42.227.292,00)	94,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	63.484.000,00	63.174.465,00	(309.535,00)	99,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.484.000,00	63.174.465,00	(309.535,00)	99,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.484.000,00	63.174.465,00	(309.535,00)	99,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	674.165.000,00	632.465.743,00	(41.699.257,00)	93,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	45.285.000,00	44.615.000,00	(670.000,00)	98,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.285.000,00	44.615.000,00	(670.000,00)	98,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.2	BELANJA MODAL	628.880.000,00	587.850.743,00	(41.029.257,00)	93,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	628.880.000,00	587.850.743,00	(41.029.257,00)	93,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	12.000.000,00	11.781.500,00	(218.500,00)	98,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.781.500,00	(218.500,00)	98,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.781.500,00	(218.500,00)	98,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	949.706.500,00	944.460.519,00	(5.245.981,00)	99,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	835.491.500,00	830.404.619,00	(5.086.881,00)	99,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001		PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	29.350.000,00	29.295.000,00	(55.000,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.350.000,00	29.295.000,00	(55.000,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	29.295.000,00	(55.000,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	490.640.500,00	485.638.000,00	(5.002.500,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	490.640.500,00	485.638.000,00	(5.002.500,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.640.500,00	485.638.000,00	(5.002.500,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	315.501.000,00	315.471.619,00	(29.381,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	315.501.000,00	315.471.619,00	(29.381,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.501.000,00	315.471.619,00	(29.381,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	114.215.000,00	114.055.900,00	(159.100,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001		KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	43.780.000,00	43.625.900,00	(154.100,00)	99,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.780.000,00	43.625.900,00	(154.100,00)	99,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.780.000,00	43.625.900,00	(154.100,00)	99,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	70.435.000,00	70.430.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.435.000,00	70.430.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.435.000,00	70.430.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	9.792.900,00	9.792.500,00	(400,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	9.792.900,00	9.792.500,00	(400,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001		PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN, FORMULIR, DAN BUKU UNTUK PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	9.792.900,00	9.792.500,00	(400,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.792.900,00	9.792.500,00	(400,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.792.900,00	9.792.500,00	(400,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	478.041.850,00	426.878.490,00	(51.163.360,00)	89,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	204.692.100,00	204.692.000,00	(100,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	204.692.100,00	204.692.000,00	(100,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	204.692.100,00	204.692.000,00	(100,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.692.100,00	204.692.000,00	(100,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	273.349.750,00	222.186.490,00	(51.163.260,00)	81,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	200.000.000,00	151.663.740,00	(48.336.260,00)	75,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	151.663.740,00	(48.336.260,00)	75,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	151.663.740,00	(48.336.260,00)	75,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004		PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	16.550.000,00	16.355.000,00	(195.000,00)	98,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.550.000,00	16.355.000,00	(195.000,00)	98,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	16.355.000,00	(195.000,00)	98,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005		SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	56.147.000,00	53.515.000,00	(2.632.000,00)	95,31	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	56.147.000,00	53.515.000,00	(2.632.000,00)	95,31	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.147.000,00	53.515.000,00	(2.632.000,00)	95,31	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008		PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	652.750,00	652.750,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	652.750,00	652.750,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.750,00	652.750,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	904.000,00	904.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	904.000,00	904.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.000,00	904.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	5.449.172.430,00	5.045.974.501,00	(403.197.929,00)	92,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.449.172.430,00)	(5.045.974.501,00)	403.197.929,00	92,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.449.172.430,00)	(5.045.974.501,00)	403.197.929,00	92,60	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.397.515.388,00	6.928.421.851,00	(469.093.537,00)	93,65	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.633.719.578,00	5.338.166.051,00	(295.553.527,00)	94,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.102.555.388,00	4.807.215.296,00	(295.340.092,00)	94,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.005.285.688,00	4.709.953.796,00	(295.331.892,00)	94,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.005.285.688,00	4.709.953.796,00	(295.331.892,00)	94,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.005.285.688,00	2.975.283.276,00	(30.002.412,00)	99,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	1.734.670.520,00	(265.329.480,00)	86,73	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	15.379.700,00	15.371.500,00	(8.200,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.379.700,00	15.371.500,00	(8.200,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.379.700,00	15.371.500,00	(8.200,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	72.990.000,00	72.990.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.990.000,00	72.990.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.990.000,00	72.990.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	125.488.250,00	125.487.850,00	(400,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.995.000,00	21.995.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.703.250,00	11.703.050,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.703.250,00	11.703.050,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.703.250,00	11.703.050,00	(200,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	87.185.000,00	87.184.800,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	87.185.000,00	87.184.800,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.185.000,00	87.184.800,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	99.472.000,00	99.472.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.972.000,00	70.972.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	70.972.000,00	70.972.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.972.000,00	70.972.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	203.699.340,00	203.662.640,00	(36.700,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.885.000,00	6.848.300,00	(36.700,00)	99,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.885.000,00	6.848.300,00	(36.700,00)	99,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.885.000,00	6.848.300,00	(36.700,00)	99,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	196.814.340,00	196.814.340,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	196.814.340,00	196.814.340,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.814.340,00	196.814.340,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.351.600,00	92.175.265,00	(176.335,00)	99,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	77.601.600,00	77.431.265,00	(170.335,00)	99,78	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.601.600,00	77.431.265,00	(170.335,00)	99,78	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.601.600,00	77.431.265,00	(170.335,00)	99,78	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.750.000,00	8.744.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.750.000,00	8.744.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.744.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	82.975.900,00	82.839.850,00	(136.050,00)	99,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	82.975.900,00	82.839.850,00	(136.050,00)	99,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001		PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA	51.614.000,00	51.483.600,00	(130.400,00)	99,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.614.000,00	51.483.600,00	(130.400,00)	99,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.614.000,00	51.483.600,00	(130.400,00)	99,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0002		FASILITASI TATA WILAYAH DESA	31.361.900,00	31.356.250,00	(5.650,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.361.900,00	31.356.250,00	(5.650,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.361.900,00	31.356.250,00	(5.650,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	883.627.560,00	710.245.650,00	(173.381.910,00)	80,37	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	883.627.560,00	710.245.650,00	(173.381.910,00)	80,37	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	487.521.010,00	319.956.000,00	(167.565.010,00)	65,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	487.521.010,00	319.956.000,00	(167.565.010,00)	65,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.521.010,00	319.956.000,00	(167.565.010,00)	65,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	38.814.550,00	38.810.550,00	(4.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.814.550,00	38.810.550,00	(4.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.814.550,00	38.810.550,00	(4.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	64.197.100,00	64.085.500,00	(111.600,00)	99,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.197.100,00	64.085.500,00	(111.600,00)	99,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.197.100,00	64.085.500,00	(111.600,00)	99,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	18.636.000,00	18.281.000,00	(355.000,00)	98,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.636.000,00	18.281.000,00	(355.000,00)	98,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.636.000,00	18.281.000,00	(355.000,00)	98,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0006		FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA	30.460.700,00	30.460.500,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.460.700,00	30.460.500,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.460.700,00	30.460.500,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007		EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA	91.906.900,00	90.806.300,00	(1.100.600,00)	98,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	91.906.900,00	90.806.300,00	(1.100.600,00)	98,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.906.900,00	90.806.300,00	(1.100.600,00)	98,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	55.242.500,00	55.242.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	55.242.500,00	55.242.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.242.500,00	55.242.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009		PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013		FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	50.904.000,00	46.863.500,00	(4.040.500,00)	92,06	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	50.904.000,00	46.863.500,00	(4.040.500,00)	92,06	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.904.000,00	46.863.500,00	(4.040.500,00)	92,06	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	12.714.000,00	12.584.000,00	(130.000,00)	98,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	12.714.000,00	12.584.000,00	(130.000,00)	98,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.714.000,00	12.584.000,00	(130.000,00)	98,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016		FASILITASI PEMBINAAN LAPORAN KEPALA DESA	18.940.800,00	18.865.800,00	(75.000,00)	99,60	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	18.940.800,00	18.865.800,00	(75.000,00)	99,60	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.940.800,00	18.865.800,00	(75.000,00)	99,60	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	797.192.350,00	797.170.300,00	(22.050,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	797.192.350,00	797.170.300,00	(22.050,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0001		IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT	48.475.000,00	48.475.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.475.000,00	48.475.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.475.000,00	48.475.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002		FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	37.463.750,00	37.463.750,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.463.750,00	37.463.750,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.463.750,00	37.463.750,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	48.855.600,00	48.851.100,00	(4.500,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	48.855.600,00	48.851.100,00	(4.500,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.855.600,00	48.851.100,00	(4.500,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	622.398.000,00	622.380.450,00	(17.550,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	622.398.000,00	622.380.450,00	(17.550,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.398.000,00	622.380.450,00	(17.550,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	7.397.515.388,00	6.928.421.851,00	(469.093.537,00)	93,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.397.515.388,00)	(6.928.421.851,00)	469.093.537,00	93,65	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.397.515.388,00)	(6.928.421.851,00)	469.093.537,00	93,65	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Organisasi : **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	(461.234.198,00)	95,53	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.149.366.393,00	2.128.598.017,00	(20.768.376,00)	99,03	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.031.340.436,00	2.015.908.437,00	(15.431.999,00)	99,24	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	(13.312.324,00)	99,22	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	(13.312.324,00)	99,22	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	(13.312.324,00)	99,22	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	11.705.475,00	11.702.000,00	(3.475,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.705.475,00	11.702.000,00	(3.475,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.705.475,00	11.702.000,00	(3.475,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	304.571.732,00	302.455.532,00	(2.116.200,00)	99,30	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	304.571.732,00	302.455.532,00	(2.116.200,00)	99,30	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.571.732,00	302.455.532,00	(2.116.200,00)	99,30	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	38.498.976,00	38.495.700,00	(3.276,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.118.906,00	1.118.700,00	(206,00)	99,98	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.118.906,00	1.118.700,00	(206,00)	99,98	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.906,00	1.118.700,00	(206,00)	99,98	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.810.500,00	1.810.000,00	(500,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.810.500,00	1.810.000,00	(500,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.500,00	1.810.000,00	(500,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.744.750,00	2.744.000,00	(750,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.744.750,00	2.744.000,00	(750,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.744.750,00	2.744.000,00	(750,00)	99,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	3.073.750,00	3.072.000,00	(1.750,00)	99,94	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.073.750,00	3.072.000,00	(1.750,00)	99,94	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.073.750,00	3.072.000,00	(1.750,00)	99,94	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	29.751.070,00	29.751.000,00	(70,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.751.070,00	29.751.000,00	(70,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.751.070,00	29.751.000,00	(70,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.717.619,00	13.710.400,00	(7.219,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.767.619,00	2.760.400,00	(7.219,00)	99,73	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.767.619,00	2.760.400,00	(7.219,00)	99,73	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.767.619,00	2.760.400,00	(7.219,00)	99,73	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	65.809.362,00	60.483.480,00	(5.325.882,00)	91,90	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	36.859.362,00	31.568.500,00	(5.290.862,00)	85,64	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.859.362,00	31.568.500,00	(5.290.862,00)	85,64	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.859.362,00	31.568.500,00	(5.290.862,00)	85,64	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	27.250.000,00	27.214.980,00	(35.020,00)	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.250.000,00	27.214.980,00	(35.020,00)	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	27.214.980,00	(35.020,00)	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	677.940.000,00	676.920.850,00	(1.019.150,00)	99,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	677.940.000,00	676.920.850,00	(1.019.150,00)	99,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	412.740.000,00	411.960.850,00	(779.150,00)	99,81	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	412.740.000,00	411.960.850,00	(779.150,00)	99,81	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.740.000,00	411.960.850,00	(779.150,00)	99,81	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM BANGGA KENCANA	150.000.000,00	149.760.000,00	(240.000,00)	99,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.760.000,00	(240.000,00)	99,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.760.000,00	(240.000,00)	99,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.009.594.000,00	3.651.757.596,00	(357.836.404,00)	91,07	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	2.714.150.000,00	2.368.300.700,00	(345.849.300,00)	87,25	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0003		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	100.000.000,00	80.475.000,00	(19.525.000,00)	80,47	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	80.475.000,00	(19.525.000,00)	80,47	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	80.475.000,00	(19.525.000,00)	80,47	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	898.400.000,00	779.360.000,00	(119.040.000,00)	86,74	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	898.400.000,00	779.360.000,00	(119.040.000,00)	86,74	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.400.000,00	779.360.000,00	(119.040.000,00)	86,74	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	478.750.000,00	395.624.000,00	(83.126.000,00)	82,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	478.750.000,00	395.624.000,00	(83.126.000,00)	82,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.750.000,00	395.624.000,00	(83.126.000,00)	82,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	125.000.000,00	124.841.700,00	(158.300,00)	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.841.700,00	(158.300,00)	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.841.700,00	(158.300,00)	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	1.112.000.000,00	988.000.000,00	(124.000.000,00)	88,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.112.000.000,00	988.000.000,00	(124.000.000,00)	88,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.000.000,00	988.000.000,00	(124.000.000,00)	88,84	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.165.944.000,00	1.165.370.896,00	(573.104,00)	99,95	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	323.081.000,00	322.825.170,00	(255.830,00)	99,92	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	323.081.000,00	322.825.170,00	(255.830,00)	99,92	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.081.000,00	322.825.170,00	(255.830,00)	99,92	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	842.863.000,00	842.545.726,00	(317.274,00)	99,96	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	842.863.000,00	842.545.726,00	(317.274,00)	99,96	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.863.000,00	842.545.726,00	(317.274,00)	99,96	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	129.500.000,00	118.086.000,00	(11.414.000,00)	91,18	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0005		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	129.500.000,00	118.086.000,00	(11.414.000,00)	91,18	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	129.500.000,00	118.086.000,00	(11.414.000,00)	91,18	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000,00	118.086.000,00	(11.414.000,00)	91,18	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.483.696.500,00	3.402.086.232,00	(81.610.268,00)	97,65	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	3.483.696.500,00	3.402.086.232,00	(81.610.268,00)	97,65	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	2.023.900.000,00	1.983.134.232,00	(40.765.768,00)	97,98	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.023.900.000,00	1.983.134.232,00	(40.765.768,00)	97,98	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.023.900.000,00	1.983.134.232,00	(40.765.768,00)	97,98	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019		ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	58.675.000,00	52.875.000,00	(5.800.000,00)	90,11	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	58.675.000,00	52.875.000,00	(5.800.000,00)	90,11	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.675.000,00	52.875.000,00	(5.800.000,00)	90,11	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021		ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	29.290.000,00	29.040.000,00	(250.000,00)	99,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	29.290.000,00	29.040.000,00	(250.000,00)	99,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.290.000,00	29.040.000,00	(250.000,00)	99,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024		PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	1.324.951.500,00	1.290.472.000,00	(34.479.500,00)	97,39	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.324.951.500,00	1.290.472.000,00	(34.479.500,00)	97,39	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.324.951.500,00	1.290.472.000,00	(34.479.500,00)	97,39	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0028		PEMBENTUKAN KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA KELUARGA LANSIA (BKL), USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA)	46.880.000,00	46.565.000,00	(315.000,00)	99,32	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	46.880.000,00	46.565.000,00	(315.000,00)	99,32	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.880.000,00	46.565.000,00	(315.000,00)	99,32	
				JUMLAH BELANJA	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	(461.234.198,00)	95,53	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.320.596.893,00)	(9.859.362.695,00)	461.234.198,00	95,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.320.596.893,00)	(9.859.362.695,00)	461.234.198,00	95,53	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	416.530.000,00	(133.470.000,00)	75,73	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000,00	416.530.000,00	(133.470.000,00)	75,73	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	465.000.000,00	400.530.000,00	(64.470.000,00)	86,13	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.000.000,00	16.000.000,00	(69.000.000,00)	18,82	
				JUMLAH PENDAPATAN	550.000.000,00	416.530.000,00	(133.470.000,00)	75,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	5.148.208.103,00	4.224.850.057,00	(923.358.046,00)	82,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.021.220.503,00	2.985.522.826,00	(35.697.677,00)	98,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.732.647.963,00	2.704.987.868,00	(27.660.095,00)	98,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	(27.660.095,00)	98,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	(27.660.095,00)	98,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	(27.660.095,00)	98,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	30.698.100,00	30.698.100,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.698.100,00	30.698.100,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.698.100,00	30.698.100,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	236.059.305,00	236.059.305,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	236.059.305,00	236.059.305,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.059.305,00	236.059.305,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	117.191.945,00	116.207.745,00	(984.200,00)	99,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.120.195,00	5.120.195,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.120.195,00	5.120.195,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.195,00	5.120.195,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.200.000,00	46.398.000,00	(802.000,00)	98,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	47.200.000,00	46.398.000,00	(802.000,00)	98,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.200.000,00	46.398.000,00	(802.000,00)	98,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.668.750,00	17.668.750,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.668.750,00	17.668.750,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.668.750,00	17.668.750,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	43.303.000,00	43.120.800,00	(182.200,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.303.000,00	43.120.800,00	(182.200,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.303.000,00	43.120.800,00	(182.200,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.188.700,00	53.034.393,00	(154.307,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.772.700,00	17.621.393,00	(151.307,00)	99,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.772.700,00	17.621.393,00	(151.307,00)	99,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.772.700,00	17.621.393,00	(151.307,00)	99,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	34.216.000,00	34.213.000,00	(3.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.216.000,00	34.213.000,00	(3.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.216.000,00	34.213.000,00	(3.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.691.895,00	91.837.820,00	(6.854.075,00)	93,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	57.924.900,00	51.070.826,00	(6.854.074,00)	88,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.924.900,00	51.070.826,00	(6.854.074,00)	88,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.924.900,00	51.070.826,00	(6.854.074,00)	88,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	11.371.995,00	11.371.994,00	(1,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.371.995,00	11.371.994,00	(1,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.371.995,00	11.371.994,00	(1,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.126.987.600,00	1.239.327.231,00	(887.660.369,00)	58,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.01		PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.01.0001		PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	627.810.000,00	491.225.236,00	(136.584.764,00)	78,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001		PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	505.510.000,00	379.225.236,00	(126.284.764,00)	75,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.510.000,00	95.952.900,00	(9.557.100,00)	90,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.510.000,00	95.952.900,00	(9.557.100,00)	90,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	283.272.336,00	(116.727.664,00)	70,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	283.272.336,00	(116.727.664,00)	70,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	122.300.000,00	112.000.000,00	(10.300.000,00)	91,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	112.300.000,00	102.000.000,00	(10.300.000,00)	90,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.300.000,00	102.000.000,00	(10.300.000,00)	90,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	5.865.000,00	5.862.000,00	(3.000,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)	5.865.000,00	5.862.000,00	(3.000,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.865.000,00	5.862.000,00	(3.000,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.865.000,00	5.862.000,00	(3.000,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	420.531.650,00	410.324.400,00	(10.207.250,00)	97,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0001		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	215.260.600,00	209.364.250,00	(5.896.350,00)	97,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.954.400,00	24.954.400,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.954.400,00	24.954.400,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	190.306.200,00	184.409.850,00	(5.896.350,00)	96,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.306.200,00	184.409.850,00	(5.896.350,00)	96,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0004		PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0007		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	85.000.000,00	84.915.000,00	(85.000,00)	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.915.000,00	(85.000,00)	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.915.000,00	(85.000,00)	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0008		KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	12.656.000,00	12.475.100,00	(180.900,00)	98,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.656.000,00	12.475.100,00	(180.900,00)	98,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.656.000,00	12.475.100,00	(180.900,00)	98,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010		MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	57.615.050,00	53.570.050,00	(4.045.000,00)	92,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	57.615.050,00	53.570.050,00	(4.045.000,00)	92,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.615.050,00	53.570.050,00	(4.045.000,00)	92,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	828.180.950,00	103.425.595,00	(724.755.355,00)	12,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016		PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	802.399.950,00	87.165.595,00	(715.234.355,00)	10,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	87.199.950,00	87.165.595,00	(34.355,00)	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.199.950,00	87.165.595,00	(34.355,00)	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2	BELANJA MODAL	715.200.000,00	0,00	(715.200.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	715.200.000,00	0,00	(715.200.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	25.781.000,00	16.260.000,00	(9.521.000,00)	63,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	25.781.000,00	16.260.000,00	(9.521.000,00)	63,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.781.000,00	16.260.000,00	(9.521.000,00)	63,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.000.000,00	33.755.000,00	(12.245.000,00)	73,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	46.000.000,00	33.755.000,00	(12.245.000,00)	73,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	33.755.000,00	(245.000,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	33.755.000,00	(245.000,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.12		PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.12.0002		SOSIALISASI DAN UJI COBA PELAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.16		PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.520.000,00	44.735.000,00	(1.785.000,00)	96,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.16.0003		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.520.000,00	44.735.000,00	(1.785.000,00)	96,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.520.000,00	44.735.000,00	(1.785.000,00)	96,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.520.000,00	44.735.000,00	(1.785.000,00)	96,16	
				JUMLAH BELANJA	5.148.208.103,00	4.224.850.057,00	(923.358.046,00)	82,06	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.598.208.103,00)	(3.808.320.057,00)	789.888.046,00	82,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.598.208.103,00)	(3.808.320.057,00)	789.888.046,00	82,82	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000		5	BELANJA DAERAH	3.299.784.937,00	3.263.265.532,00	(36.519.405,00)	98,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.859.002.137,00	1.833.592.272,00	(25.409.865,00)	98,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	97.313.000,00	97.214.670,00	(98.330,00)	99,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	69.253.000,00	69.154.670,00	(98.330,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.253.000,00	69.154.670,00	(98.330,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.253.000,00	69.154.670,00	(98.330,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.392.202.713,00	1.367.753.032,00	(24.449.681,00)	98,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.291.463.713,00	1.267.148.710,00	(24.315.003,00)	98,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.291.463.713,00	1.267.148.710,00	(24.315.003,00)	98,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.291.463.713,00	1.267.148.710,00	(24.315.003,00)	98,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	80.993.250,00	80.858.572,00	(134.678,00)	99,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.993.250,00	80.858.572,00	(134.678,00)	99,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.993.250,00	80.858.572,00	(134.678,00)	99,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	19.745.750,00	19.745.750,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.745.750,00	19.745.750,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.745.750,00	19.745.750,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.494.608,00	24.484.608,00	(10.000,00)	99,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	24.494.608,00	24.484.608,00	(10.000,00)	99,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.494.608,00	24.484.608,00	(10.000,00)	99,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.494.608,00	24.484.608,00	(10.000,00)	99,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	185.250.000,00	184.926.300,00	(323.700,00)	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	185.250.000,00	184.926.300,00	(323.700,00)	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	185.250.000,00	184.926.300,00	(323.700,00)	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.250.000,00	184.926.300,00	(323.700,00)	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.182.200,00	11.096.100,00	(86.100,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.182.200,00	11.096.100,00	(86.100,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.182.200,00	11.096.100,00	(86.100,00)	99,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.182.200,00	11.096.100,00	(86.100,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	148.559.616,00	148.117.562,00	(442.054,00)	99,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	131.901.616,00	131.900.716,00	(900,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	131.901.616,00	131.900.716,00	(900,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.901.616,00	131.900.716,00	(900,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.500.000,00	3.058.846,00	(441.154,00)	87,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.058.846,00	(441.154,00)	87,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.058.846,00	(441.154,00)	87,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	169.559.300,00	168.886.760,00	(672.540,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.559.300,00	168.886.760,00	(672.540,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	110.000.000,00	109.838.800,00	(161.200,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	109.838.800,00	(161.200,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	109.838.800,00	(161.200,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0015		KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	19.995.700,00	19.928.060,00	(67.640,00)	99,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	19.995.700,00	19.928.060,00	(67.640,00)	99,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.700,00	19.928.060,00	(67.640,00)	99,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0020		DISEMINASI INFORMASI	18.781.100,00	18.481.100,00	(300.000,00)	98,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	18.781.100,00	18.481.100,00	(300.000,00)	98,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.781.100,00	18.481.100,00	(300.000,00)	98,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023		PENYUSUNAN KONTEN	20.782.500,00	20.638.800,00	(143.700,00)	99,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	20.782.500,00	20.638.800,00	(143.700,00)	99,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.782.500,00	20.638.800,00	(143.700,00)	99,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.271.223.500,00	1.260.786.500,00	(10.437.000,00)	99,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.01.0004		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.242.333.500,00	1.231.896.500,00	(10.437.000,00)	99,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020		PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	23.528.500,00	23.357.900,00	(170.600,00)	99,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	23.528.500,00	23.357.900,00	(170.600,00)	99,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.528.500,00	23.357.900,00	(170.600,00)	99,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	6.730.000,00	6.708.800,00	(21.200,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.730.000,00	6.708.800,00	(21.200,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	6.708.800,00	(21.200,00)	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	1.180.900.000,00	1.170.750.800,00	(10.149.200,00)	99,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.500.000,00	1.104.350.800,00	(10.149.200,00)	99,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.500.000,00	1.104.350.800,00	(10.149.200,00)	99,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0030		PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	31.175.000,00	31.079.000,00	(96.000,00)	99,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	31.175.000,00	31.079.000,00	(96.000,00)	99,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.175.000,00	31.079.000,00	(96.000,00)	99,69	
				JUMLAH BELANJA	3.299.784.937,00	3.263.265.532,00	(36.519.405,00)	98,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.299.784.937,00)	(3.263.265.532,00)	36.519.405,00	98,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.299.784.937,00)	(3.263.265.532,00)	36.519.405,00	98,89	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000		5	BELANJA DAERAH	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009		PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	100,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(18.544.900,00)	(18.544.900,00)	0,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.544.900,00)	(18.544.900,00)	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000		5	BELANJA DAERAH	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	100,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(27.212.600,00)	(27.212.600,00)	0,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.212.600,00)	(27.212.600,00)	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
Organisasi : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	(219.065.102,00)	90,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.017.895.933,00	1.802.519.356,00	(215.376.577,00)	89,32	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.784.500,00	3.784.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.784.500,00	3.784.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.784.500,00	3.784.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.784.500,00	3.784.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.706.168.632,00	1.685.885.209,00	(20.283.423,00)	98,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	(20.283.423,00)	98,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	(20.283.423,00)	98,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	(20.283.423,00)	98,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	21.009.900,00	21.009.900,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.009.900,00	21.009.900,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.009.900,00	21.009.900,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	77.665.499,00	77.665.499,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	77.665.499,00	77.665.499,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.665.499,00	77.665.499,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	222.810.801,00	29.117.238,00	(193.693.563,00)	13,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.260.801,00	8.260.679,00	(122,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.260.801,00	8.260.679,00	(122,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.260.801,00	8.260.679,00	(122,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	211.655.000,00	17.961.559,00	(193.693.441,00)	8,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	211.655.000,00	17.961.559,00	(193.693.441,00)	8,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.655.000,00	17.961.559,00	(193.693.441,00)	8,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.316.000,00	24.045.744,00	(270.256,00)	98,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.500.000,00	15.229.744,00	(270.256,00)	98,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.229.744,00	(270.256,00)	98,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.229.744,00	(270.256,00)	98,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.816.000,00	7.816.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.816.000,00	7.816.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.816.000,00	7.816.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.816.000,00	59.686.665,00	(1.129.335,00)	98,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	57.216.000,00	56.086.665,00	(1.129.335,00)	98,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.216.000,00	56.086.665,00	(1.129.335,00)	98,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.216.000,00	56.086.665,00	(1.129.335,00)	98,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	217.674.000,00	213.985.475,00	(3.688.525,00)	98,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	217.674.000,00	213.985.475,00	(3.688.525,00)	98,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	6.714.000,00	6.609.000,00	(105.000,00)	98,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.714.000,00	6.609.000,00	(105.000,00)	98,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.714.000,00	6.609.000,00	(105.000,00)	98,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	205.799.000,00	202.215.475,00	(3.583.525,00)	98,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	205.799.000,00	202.215.475,00	(3.583.525,00)	98,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.799.000,00	202.215.475,00	(3.583.525,00)	98,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	(219.065.102,00)	90,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.318.212.933,00)	(2.099.147.831,00)	219.065.102,00	90,55	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.318.212.933,00)	(2.099.147.831,00)	219.065.102,00	90,55	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38	
				JUMLAH PENDAPATAN	200.700.000,00	235.590.000,00	34.890.000,00	117,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.608.734.370,00	7.068.258.644,00	(540.475.726,00)	92,89	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.978.116.790,00	1.911.409.461,00	(66.707.329,00)	96,62	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.002.500,00	1.260.000,00	(1.742.500,00)	41,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.002.500,00	1.260.000,00	(1.742.500,00)	41,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.002.500,00	1.260.000,00	(1.742.500,00)	41,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.002.500,00	1.260.000,00	(1.742.500,00)	41,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.783.935.967,00	1.719.643.843,00	(64.292.124,00)	96,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	(57.090.903,00)	96,50	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	(57.090.903,00)	96,50	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	(57.090.903,00)	96,50	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	14.633.000,00	14.633.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.633.000,00	14.633.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.633.000,00	14.633.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	137.087.700,00	129.886.479,00	(7.201.221,00)	94,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	137.087.700,00	129.886.479,00	(7.201.221,00)	94,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.087.700,00	129.886.479,00	(7.201.221,00)	94,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	25.486.818,00	25.275.500,00	(211.318,00)	99,17	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.450.000,00	1.449.000,00	(1.000,00)	99,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	1.449.000,00	(1.000,00)	99,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.449.000,00	(1.000,00)	99,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.080.818,00	13.075.000,00	(5.818,00)	99,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.080.818,00	13.075.000,00	(5.818,00)	99,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.080.818,00	13.075.000,00	(5.818,00)	99,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	4.140.000,00	4.137.500,00	(2.500,00)	99,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.140.000,00	4.137.500,00	(2.500,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	4.137.500,00	(2.500,00)	99,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	6.816.000,00	6.614.000,00	(202.000,00)	97,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.816.000,00	6.614.000,00	(202.000,00)	97,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.816.000,00	6.614.000,00	(202.000,00)	97,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	111.216.320,00	110.947.912,00	(268.408,00)	99,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.154.000,00	2.150.000,00	(4.000,00)	99,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.154.000,00	2.150.000,00	(4.000,00)	99,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.154.000,00	2.150.000,00	(4.000,00)	99,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	99.250.000,00	98.987.912,00	(262.088,00)	99,73	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.250.000,00	98.987.912,00	(262.088,00)	99,73	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	98.987.912,00	(262.088,00)	99,73	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.812.320,00	9.810.000,00	(2.320,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.812.320,00	9.810.000,00	(2.320,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.812.320,00	9.810.000,00	(2.320,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.475.185,00	54.282.206,00	(192.979,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	54.475.185,00	54.282.206,00	(192.979,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.475.185,00	54.282.206,00	(192.979,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.475.185,00	54.282.206,00	(192.979,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.823.262.880,00	2.674.498.994,00	(148.763.886,00)	94,73	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	1.766.032.300,00	1.684.090.849,00	(81.941.451,00)	95,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.766.032.300,00	1.684.090.849,00	(81.941.451,00)	95,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.766.032.300,00	1.684.090.849,00	(81.941.451,00)	95,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.766.032.300,00	1.684.090.849,00	(81.941.451,00)	95,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.057.230.580,00	990.408.145,00	(66.822.435,00)	93,67	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN BERBASIS PENEGUHAN KEMANDIRIAN EKONOMI PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.057.230.580,00	990.408.145,00	(66.822.435,00)	93,67	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.057.230.580,00	990.408.145,00	(66.822.435,00)	93,67	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.057.230.580,00	990.408.145,00	(66.822.435,00)	93,67	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.807.354.700,00	2.482.350.189,00	(325.004.511,00)	88,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.123.915.000,00	859.321.589,00	(264.593.411,00)	76,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.123.915.000,00	859.321.589,00	(264.593.411,00)	76,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	207.700.000,00	177.447.142,00	(30.252.858,00)	85,43	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.700.000,00	177.447.142,00	(30.252.858,00)	85,43	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	916.215.000,00	681.874.447,00	(234.340.553,00)	74,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	916.215.000,00	681.874.447,00	(234.340.553,00)	74,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.205.403.100,00	1.200.310.600,00	(5.092.500,00)	99,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.205.403.100,00	1.200.310.600,00	(5.092.500,00)	99,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.903.100,00	1.195.810.600,00	(5.092.500,00)	99,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.903.100,00	1.195.810.600,00	(5.092.500,00)	99,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	343.714.100,00	329.079.000,00	(14.635.100,00)	95,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN OLAHRAGA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	193.714.100,00	179.079.000,00	(14.635.100,00)	92,44	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	193.714.100,00	179.079.000,00	(14.635.100,00)	92,44	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.714.100,00	179.079.000,00	(14.635.100,00)	92,44	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	93.493.500,00	54.499.000,00	(38.994.500,00)	58,29	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	93.493.500,00	54.499.000,00	(38.994.500,00)	58,29	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	93.493.500,00	54.499.000,00	(38.994.500,00)	58,29	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.493.500,00	54.499.000,00	(8.994.500,00)	85,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	40.829.000,00	39.140.000,00	(1.689.000,00)	95,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010		PEMASSALAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI YANG BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN PADA TINGKAT DAERAH, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL	40.829.000,00	39.140.000,00	(1.689.000,00)	95,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.829.000,00	39.140.000,00	(1.689.000,00)	95,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.829.000,00	39.140.000,00	(1.689.000,00)	95,86	
				JUMLAH BELANJA	7.608.734.370,00	7.068.258.644,00	(540.475.726,00)	92,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.408.034.370,00)	(6.832.668.644,00)	575.365.726,00	92,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.408.034.370,00)	(6.832.668.644,00)	575.365.726,00	92,23	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.23.2.24.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
	2.23.2.24.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
	2.23.2.24.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.036.168.184,00	2.914.261.525,00	(121.906.659,00)	95,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.023.126.654,00	1.911.288.420,00	(111.838.234,00)	94,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.773.565.700,00	1.666.273.837,00	(107.291.863,00)	93,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	(107.291.863,00)	93,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	(107.291.863,00)	93,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	(107.291.863,00)	93,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	37.620.810,00	37.620.810,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.754.250,00	1.754.250,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.754.250,00	1.754.250,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.754.250,00	1.754.250,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.859.500,00	8.859.500,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.859.500,00	8.859.500,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.859.500,00	8.859.500,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	27.007.060,00	27.007.060,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.007.060,00	27.007.060,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.007.060,00	27.007.060,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	185.950.144,00	184.861.580,00	(1.088.564,00)	99,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.946.720,00	7.470.680,00	(476.040,00)	94,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.946.720,00	7.470.680,00	(476.040,00)	94,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.946.720,00	7.470.680,00	(476.040,00)	94,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	176.503.424,00	175.890.900,00	(612.524,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	176.503.424,00	175.890.900,00	(612.524,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.503.424,00	175.890.900,00	(612.524,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.920.000,00	12.462.193,00	(3.457.807,00)	78,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	7.750.000,00	4.292.193,00	(3.457.807,00)	55,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.750.000,00	4.292.193,00	(3.457.807,00)	55,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	4.292.193,00	(3.457.807,00)	55,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.013.041.530,00	1.002.973.105,00	(10.068.425,00)	99,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	323.219.725,00	322.299.275,00	(920.450,00)	99,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.202.325,00	56.752.325,00	(450.000,00)	99,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	57.202.325,00	56.752.325,00	(450.000,00)	99,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.202.325,00	56.752.325,00	(450.000,00)	99,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012		PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	45.388.800,00	45.218.200,00	(170.600,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	45.388.800,00	45.218.200,00	(170.600,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.388.800,00	45.218.200,00	(170.600,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0013		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA	78.943.500,00	78.848.750,00	(94.750,00)	99,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	78.943.500,00	78.848.750,00	(94.750,00)	99,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.943.500,00	78.848.750,00	(94.750,00)	99,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	141.685.100,00	141.480.000,00	(205.100,00)	99,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	37.685.100,00	37.680.000,00	(5.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.685.100,00	37.680.000,00	(5.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	104.000.000,00	103.800.000,00	(200.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.000.000,00	103.800.000,00	(200.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	689.821.805,00	680.673.830,00	(9.147.975,00)	98,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	399.999.755,00	395.383.900,00	(4.615.855,00)	98,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	119.743.055,00	115.476.900,00	(4.266.155,00)	96,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.743.055,00	115.476.900,00	(4.266.155,00)	96,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	280.256.700,00	279.907.000,00	(349.700,00)	99,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.500.000,00	273.237.000,00	(263.000,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.756.700,00	6.670.000,00	(86.700,00)	98,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	289.822.050,00	285.289.930,00	(4.532.120,00)	98,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	289.822.050,00	285.289.930,00	(4.532.120,00)	98,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.822.050,00	285.289.930,00	(4.532.120,00)	98,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	3.036.168.184,00	2.914.261.525,00	(121.906.659,00)	95,93	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.020.105.184,00)	(2.898.197.775,00)	121.907.409,00	95,96	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.020.105.184,00)	(2.898.197.775,00)	121.907.409,00	95,96	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**
Organisasi : **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.23.2.24.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
	2.23.2.24.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
	2.23.2.24.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	16.063.000,00	16.063.750,00	750,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	124.157.950,00	117.807.983,00	(6.349.967,00)	94,88	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	55.315.050,00	52.595.083,00	(2.719.967,00)	95,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	55.315.050,00	52.595.083,00	(2.719.967,00)	95,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.315.050,00	52.595.083,00	(2.719.967,00)	95,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.315.050,00	52.595.083,00	(2.719.967,00)	95,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.315.050,00	52.595.083,00	(2.719.967,00)	95,08	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	68.842.900,00	65.212.900,00	(3.630.000,00)	94,72	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03		PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	68.842.900,00	65.212.900,00	(3.630.000,00)	94,72	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0001		PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PENGGABUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.200.000,00	50.620.000,00	(3.580.000,00)	93,39	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.700.000,00	15.120.000,00	(3.580.000,00)	80,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	15.120.000,00	(3.580.000,00)	80,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004		PENDAMPINGAN PENYELAMATAN ARSIP BAGI PEMEKARAN DESA/KELURAHAN	14.642.900,00	14.592.900,00	(50.000,00)	99,65	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.642.900,00	14.592.900,00	(50.000,00)	99,65	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.642.900,00	14.592.900,00	(50.000,00)	99,65	
				JUMLAH BELANJA	124.157.950,00	117.807.983,00	(6.349.967,00)	94,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(108.094.950,00)	(101.744.233,00)	6.350.717,00	94,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(108.094.950,00)	(101.744.233,00)	6.350.717,00	94,12	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **Dinas Perikanan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,95	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,95	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,95	
				JUMLAH PENDAPATAN	582.450.000,00	250.220.500,00	(332.229.500,00)	42,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.417.848.198,00	5.271.376.639,00	(146.471.559,00)	97,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.786.218.040,11	2.724.193.054,00	(62.024.986,11)	97,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	59.965.152,11	59.965.000,00	(152,11)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.880.152,11	58.880.000,00	(152,11)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	58.880.152,11	58.880.000,00	(152,11)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.880.152,11	58.880.000,00	(152,11)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.449.363.420,00	2.394.305.852,00	(55.057.568,00)	97,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.041.331.566,00	1.986.273.998,00	(55.057.568,00)	97,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.041.331.566,00	1.986.273.998,00	(55.057.568,00)	97,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.041.331.566,00	1.986.273.998,00	(55.057.568,00)	97,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	11.056.100,00	11.056.100,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.056.100,00	11.056.100,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.056.100,00	11.056.100,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	392.405.754,00	392.405.754,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	392.405.754,00	392.405.754,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.405.754,00	392.405.754,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	82.391.820,00	81.409.260,00	(982.560,00)	98,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.639.820,00	2.639.500,00	(320,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.639.820,00	2.639.500,00	(320,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.639.820,00	2.639.500,00	(320,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.831.000,00	11.831.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.831.000,00	11.831.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.831.000,00	11.831.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	3.027.000,00	3.027.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.027.000,00	3.027.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.027.000,00	3.027.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	64.894.000,00	63.911.760,00	(982.240,00)	98,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	64.894.000,00	63.911.760,00	(982.240,00)	98,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.894.000,00	63.911.760,00	(982.240,00)	98,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.252.648,00	31.594.700,00	(2.657.948,00)	92,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.456.148,00	9.798.200,00	(2.657.948,00)	78,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.456.148,00	9.798.200,00	(2.657.948,00)	78,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.456.148,00	9.798.200,00	(2.657.948,00)	78,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	20.546.500,00	20.546.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.546.500,00	20.546.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.546.500,00	20.546.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	126.245.000,00	122.918.242,00	(3.326.758,00)	97,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	110.370.000,00	107.043.242,00	(3.326.758,00)	96,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.370.000,00	107.043.242,00	(3.326.758,00)	96,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.370.000,00	107.043.242,00	(3.326.758,00)	96,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	461.585.500,00	459.990.310,00	(1.595.190,00)	99,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.706.000,00	11.131.000,00	(575.000,00)	95,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN	6.706.000,00	6.481.000,00	(225.000,00)	96,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.706.000,00	6.481.000,00	(225.000,00)	96,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.706.000,00	6.481.000,00	(225.000,00)	96,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	93,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	93,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	93,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	449.879.500,00	448.859.310,00	(1.020.190,00)	99,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	56.894.500,00	56.737.000,00	(157.500,00)	99,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.894.500,00	56.737.000,00	(157.500,00)	99,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.894.500,00	56.737.000,00	(157.500,00)	99,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002		PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	22.145.000,00	21.900.000,00	(245.000,00)	98,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.145.000,00	21.900.000,00	(245.000,00)	98,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.145.000,00	21.900.000,00	(245.000,00)	98,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN SKALA KECIL	370.840.000,00	370.222.310,00	(617.690,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	370.840.000,00	370.222.310,00	(617.690,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.840.000,00	370.222.310,00	(617.690,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.080.144.657,89	1.997.678.275,00	(82.466.382,89)	96,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	599.585.000,00	566.561.500,00	(33.023.500,00)	94,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	135.926.000,00	103.100.000,00	(32.826.000,00)	75,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	135.926.000,00	103.100.000,00	(32.826.000,00)	75,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.926.000,00	103.100.000,00	(32.826.000,00)	75,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	463.659.000,00	463.461.500,00	(197.500,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	463.659.000,00	463.461.500,00	(197.500,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.659.000,00	463.461.500,00	(197.500,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.480.559.657,89	1.431.116.775,00	(49.442.882,89)	96,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	273.700.000,00	247.932.635,00	(25.767.365,00)	90,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.700.000,00	60.319.985,00	(15.380.015,00)	79,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	60.319.985,00	(15.380.015,00)	79,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	198.000.000,00	187.612.650,00	(10.387.350,00)	94,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	187.612.650,00	(10.387.350,00)	94,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003		MONITORING KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.298.000,00	26.298.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.198.000,00	11.198.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.198.000,00	11.198.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	649.730.182,89	649.047.620,00	(682.562,89)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	647.230.182,89	646.547.620,00	(682.562,89)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.230.182,89	646.547.620,00	(682.562,89)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010		PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	530.831.475,00	507.838.520,00	(22.992.955,00)	95,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	492.131.475,00	469.138.520,00	(22.992.955,00)	95,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.131.475,00	469.138.520,00	(22.992.955,00)	95,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	89.900.000,00	89.515.000,00	(385.000,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	89.900.000,00	89.515.000,00	(385.000,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.900.000,00	89.515.000,00	(385.000,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.900.000,00	89.515.000,00	(385.000,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.900.000,00	89.515.000,00	(385.000,00)	99,57	
				JUMLAH BELANJA	5.417.848.198,00	5.271.376.639,00	(146.471.559,00)	97,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.835.398.198,00)	(5.021.156.139,00)	(185.757.941,00)	103,84	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.835.398.198,00)	(5.021.156.139,00)	(185.757.941,00)	103,84	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**
Organisasi : **Dinas Pariwisata**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61	
				JUMLAH PENDAPATAN	203.132.000,00	220.625.000,00	17.493.000,00	108,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.587.197.251,00	3.411.946.121,00	(175.251.130,00)	95,11	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.219.064.051,00	2.177.427.491,00	(41.636.560,00)	98,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.200.000,00	5.140.000,00	(60.000,00)	98,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.200.000,00	5.140.000,00	(60.000,00)	98,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.140.000,00	(60.000,00)	98,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.140.000,00	(60.000,00)	98,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.011.522.853,00	1.977.711.817,00	(33.811.036,00)	98,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	(32.587.874,00)	98,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	(32.587.874,00)	98,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	(32.587.874,00)	98,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	16.155.500,00	16.155.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.155.500,00	16.155.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.155.500,00	16.155.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	342.948.250,00	341.725.088,00	(1.223.162,00)	99,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	342.948.250,00	341.725.088,00	(1.223.162,00)	99,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.948.250,00	341.725.088,00	(1.223.162,00)	99,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	8.358.588,00	8.357.000,00	(1.588,00)	99,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.100.000,00	5.099.000,00	(1.000,00)	99,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.100.000,00	5.099.000,00	(1.000,00)	99,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	5.099.000,00	(1.000,00)	99,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.258.588,00	3.258.000,00	(588,00)	99,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.258.588,00	3.258.000,00	(588,00)	99,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.258.588,00	3.258.000,00	(588,00)	99,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34.200.000,00	34.199.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.200.000,00	34.199.000,00	(1.000,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	32.700.000,00	32.699.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.700.000,00	32.699.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.286.011,00	33.450.946,00	(1.835.065,00)	94,79	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.566.011,00	18.730.946,00	(1.835.065,00)	91,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.566.011,00	18.730.946,00	(1.835.065,00)	91,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.566.011,00	18.730.946,00	(1.835.065,00)	91,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	124.496.599,00	118.568.728,00	(5.927.871,00)	95,23	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	114.496.599,00	108.568.728,00	(5.927.871,00)	94,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	114.496.599,00	108.568.728,00	(5.927.871,00)	94,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.496.599,00	108.568.728,00	(5.927.871,00)	94,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.068.329.000,00	936.652.230,00	(131.676.770,00)	87,67	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.01		PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	34.650.000,00	34.535.000,00	(115.000,00)	99,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	34.650.000,00	34.535.000,00	(115.000,00)	99,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.650.000,00	34.535.000,00	(115.000,00)	99,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	34.535.000,00	(115.000,00)	99,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	431.363.000,00	399.494.390,00	(31.868.610,00)	92,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	431.363.000,00	399.494.390,00	(31.868.610,00)	92,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	111.739.000,00	81.512.690,00	(30.226.310,00)	72,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.739.000,00	81.512.690,00	(30.226.310,00)	72,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	319.624.000,00	317.981.700,00	(1.642.300,00)	99,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.624.000,00	317.981.700,00	(1.642.300,00)	99,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	602.316.000,00	502.622.840,00	(99.693.160,00)	83,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0005		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	602.316.000,00	502.622.840,00	(99.693.160,00)	83,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	602.316.000,00	502.622.840,00	(99.693.160,00)	83,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.316.000,00	502.622.840,00	(99.693.160,00)	83,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	131.544.200,00	131.342.200,00	(202.000,00)	99,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	131.544.200,00	131.342.200,00	(202.000,00)	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	131.544.200,00	131.342.200,00	(202.000,00)	99,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	131.544.200,00	131.342.200,00	(202.000,00)	99,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.544.200,00	131.342.200,00	(202.000,00)	99,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	168.260.000,00	166.524.200,00	(1.735.800,00)	98,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	168.260.000,00	166.524.200,00	(1.735.800,00)	98,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006		FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	144.095.500,00	142.469.700,00	(1.625.800,00)	98,87	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	144.095.500,00	142.469.700,00	(1.625.800,00)	98,87	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.095.500,00	142.469.700,00	(1.625.800,00)	98,87	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011		MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	24.164.500,00	24.054.500,00	(110.000,00)	99,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	24.164.500,00	24.054.500,00	(110.000,00)	99,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.164.500,00	24.054.500,00	(110.000,00)	99,54	
				JUMLAH BELANJA	3.587.197.251,00	3.411.946.121,00	(175.251.130,00)	95,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.384.065.251,00)	(3.191.321.121,00)	192.744.130,00	94,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.384.065.251,00)	(3.191.321.121,00)	192.744.130,00	94,30	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,72	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,72	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,72	
				JUMLAH PENDAPATAN	484.400.000,00	216.660.000,00	(267.740.000,00)	44,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	22.667.259.783,00	21.593.528.387,00	(1.073.731.396,00)	95,26	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.445.143.070,00	13.087.189.417,00	(357.953.653,00)	97,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.975.216,00	58.770.200,00	(2.205.016,00)	96,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.880.316,00	24.880.300,00	(16,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.880.316,00	24.880.300,00	(16,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.316,00	24.880.300,00	(16,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.174.900,00	27.969.900,00	(2.205.000,00)	92,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.174.900,00	27.969.900,00	(2.205.000,00)	92,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.174.900,00	27.969.900,00	(2.205.000,00)	92,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.105.608.196,00	12.765.526.735,00	(340.081.461,00)	97,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	(277.158.868,00)	97,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	(277.158.868,00)	97,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	(277.158.868,00)	97,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	5.470.000,00	4.470.000,00	(1.000.000,00)	81,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.470.000,00	4.470.000,00	(1.000.000,00)	81,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	4.470.000,00	(1.000.000,00)	81,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	343.933.453,00	282.010.860,00	(61.922.593,00)	81,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	343.933.453,00	282.010.860,00	(61.922.593,00)	81,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.933.453,00	282.010.860,00	(61.922.593,00)	81,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.337.080,00	106.245.040,00	(4.092.040,00)	96,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.060.000,00	7.560.000,00	(1.500.000,00)	83,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.060.000,00	7.560.000,00	(1.500.000,00)	83,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.060.000,00	7.560.000,00	(1.500.000,00)	83,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.252.080,00	1.252.040,00	(40,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.252.080,00	1.252.040,00	(40,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.252.080,00	1.252.040,00	(40,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	93.225.000,00	90.633.000,00	(2.592.000,00)	97,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	93.225.000,00	90.633.000,00	(2.592.000,00)	97,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.225.000,00	90.633.000,00	(2.592.000,00)	97,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.301.000,00	25.555.010,00	(9.745.990,00)	72,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.125.000,00	9.379.010,00	(9.745.990,00)	49,04	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.125.000,00	9.379.010,00	(9.745.990,00)	49,04	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	9.379.010,00	(9.745.990,00)	49,04	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.111.000,00	15.111.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.111.000,00	15.111.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.111.000,00	15.111.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.921.578,00	131.092.432,00	(1.829.146,00)	98,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	67.500.000,00	67.221.132,00	(278.868,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	67.221.132,00	(278.868,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	67.221.132,00	(278.868,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	63.721.578,00	62.171.300,00	(1.550.278,00)	97,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.721.578,00	62.171.300,00	(1.550.278,00)	97,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.721.578,00	62.171.300,00	(1.550.278,00)	97,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.176.959.712,00	4.722.238.335,00	(454.721.377,00)	91,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	3.981.155.500,00	3.637.215.173,00	(343.940.327,00)	91,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	3.981.155.500,00	3.637.215.173,00	(343.940.327,00)	91,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.773.155.500,00	3.496.000.500,00	(277.155.000,00)	92,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.773.155.500,00	3.496.000.500,00	(277.155.000,00)	92,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	203.000.000,00	141.214.673,00	(66.785.327,00)	67,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.000.000,00	141.214.673,00	(66.785.327,00)	67,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	605.685.800,00	604.179.000,00	(1.506.800,00)	99,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	605.685.800,00	604.179.000,00	(1.506.800,00)	99,75	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	581.185.800,00	579.679.000,00	(1.506.800,00)	99,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.185.800,00	579.679.000,00	(1.506.800,00)	99,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03		PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	590.118.412,00	480.844.162,00	(109.274.250,00)	81,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001		PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	590.118.412,00	480.844.162,00	(109.274.250,00)	81,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	590.118.412,00	480.844.162,00	(109.274.250,00)	81,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.118.412,00	480.844.162,00	(109.274.250,00)	81,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.422.652.601,00	3.194.462.035,00	(228.190.566,00)	93,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	290.298.000,00	269.962.372,00	(20.335.628,00)	92,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005		PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN	155.298.000,00	134.992.372,00	(20.305.628,00)	86,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.798.000,00	130.492.372,00	(20.305.628,00)	86,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.798.000,00	130.492.372,00	(20.305.628,00)	86,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0006		PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN	135.000.000,00	134.970.000,00	(30.000,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.970.000,00	(30.000,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	134.970.000,00	(30.000,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	3.132.354.601,00	2.924.499.663,00	(207.854.938,00)	93,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	550.000.000,00	402.111.107,00	(147.888.893,00)	73,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	402.111.107,00	(147.888.893,00)	73,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	402.111.107,00	(147.888.893,00)	73,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	2.582.354.601,00	2.522.388.556,00	(59.966.045,00)	97,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.567.354.601,00	2.510.888.556,00	(56.466.045,00)	97,80	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.567.354.601,00	2.510.888.556,00	(56.466.045,00)	97,80	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	76,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	76,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	622.504.400,00	589.638.600,00	(32.865.800,00)	94,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	622.504.400,00	589.638.600,00	(32.865.800,00)	94,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	34.504.400,00	28.138.600,00	(6.365.800,00)	81,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.504.400,00	28.138.600,00	(6.365.800,00)	81,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.504.400,00	28.138.600,00	(6.365.800,00)	81,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	588.000.000,00	561.500.000,00	(26.500.000,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	588.000.000,00	561.500.000,00	(26.500.000,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.000.000,00	561.500.000,00	(26.500.000,00)	95,49	
				JUMLAH BELANJA	22.667.259.783,00	21.593.528.387,00	(1.073.731.396,00)	95,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(22.182.859.783,00)	(21.376.868.387,00)	805.991.396,00	96,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.182.859.783,00)	(21.376.868.387,00)	805.991.396,00	96,36	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	61.840.000,00	104,81	
	3.27.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	61.840.000,00	104,81	
	3.27.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.228.710.000,00	1.342.240.000,00	113.530.000,00	109,23	
	3.27.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.440.000,00	3.750.000,00	(51.690.000,00)	6,76	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	61.840.000,00	104,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	16.323.839.995,00	14.765.592.757,00	(1.558.247.238,00)	90,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.215.831.939,00	6.033.179.644,00	(182.652.295,00)	97,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.686.044,00	21.685.400,00	(644,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.546.044,00	11.546.000,00	(44,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.546.044,00	11.546.000,00	(44,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.546.044,00	11.546.000,00	(44,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.140.000,00	10.139.400,00	(600,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.140.000,00	10.139.400,00	(600,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	10.139.400,00	(600,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.628.648.695,00	5.544.198.429,00	(84.450.266,00)	98,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.312.047.249,00	5.241.073.729,00	(70.973.520,00)	98,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.312.047.249,00	5.241.073.729,00	(70.973.520,00)	98,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.312.047.249,00	5.241.073.729,00	(70.973.520,00)	98,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	8.975.300,00	8.970.000,00	(5.300,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.975.300,00	8.970.000,00	(5.300,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.975.300,00	8.970.000,00	(5.300,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	307.626.146,00	294.154.700,00	(13.471.446,00)	95,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	307.626.146,00	294.154.700,00	(13.471.446,00)	95,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.626.146,00	294.154.700,00	(13.471.446,00)	95,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	153.135.000,00	66.965.439,00	(86.169.561,00)	43,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	147.185.000,00	61.015.439,00	(86.169.561,00)	41,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	147.185.000,00	61.015.439,00	(86.169.561,00)	41,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.185.000,00	61.015.439,00	(86.169.561,00)	41,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	134.950.000,00	128.684.000,00	(6.266.000,00)	95,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0005		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	134.950.000,00	128.684.000,00	(6.266.000,00)	95,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	46.342.500,00	(657.500,00)	98,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	46.342.500,00	(657.500,00)	98,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	87.950.000,00	82.341.500,00	(5.608.500,00)	93,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.950.000,00	82.341.500,00	(5.608.500,00)	93,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.972.000,00	37.487.150,00	(484.850,00)	98,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.250.000,00	25.765.150,00	(484.850,00)	98,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.250.000,00	25.765.150,00	(484.850,00)	98,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	25.765.150,00	(484.850,00)	98,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.722.000,00	9.722.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.722.000,00	9.722.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.722.000,00	9.722.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	239.440.200,00	234.159.226,00	(5.280.974,00)	97,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	234.040.200,00	228.949.226,00	(5.090.974,00)	97,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	234.040.200,00	228.949.226,00	(5.090.974,00)	97,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.040.200,00	228.949.226,00	(5.090.974,00)	97,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.900.000,00	1.710.000,00	(190.000,00)	90,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.710.000,00	(190.000,00)	90,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.710.000,00	(190.000,00)	90,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.632.686.806,00	4.560.475.917,00	(1.072.210.889,00)	80,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	20.865.000,00	20.270.000,00	(595.000,00)	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	20.865.000,00	20.270.000,00	(595.000,00)	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.865.000,00	20.270.000,00	(595.000,00)	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.865.000,00	20.270.000,00	(595.000,00)	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	103.900.000,00	67.650.000,00	(36.250.000,00)	65,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	103.900.000,00	67.650.000,00	(36.250.000,00)	65,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	103.900.000,00	67.650.000,00	(36.250.000,00)	65,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.900.000,00	67.650.000,00	(36.250.000,00)	65,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	5.507.921.806,00	4.472.555.917,00	(1.035.365.889,00)	81,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0002		PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	277.413.000,00	275.122.500,00	(2.290.500,00)	99,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	277.413.000,00	275.122.500,00	(2.290.500,00)	99,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.413.000,00	275.122.500,00	(2.290.500,00)	99,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	5.230.508.806,00	4.197.433.417,00	(1.033.075.389,00)	80,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.230.508.806,00	4.197.433.417,00	(1.033.075.389,00)	80,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.230.508.806,00	4.197.433.417,00	(1.033.075.389,00)	80,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.166.000.000,00	2.937.392.326,00	(228.607.674,00)	92,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	3.166.000.000,00	2.937.392.326,00	(228.607.674,00)	92,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0014		PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI PUSKESWAN	3.166.000.000,00	2.937.392.326,00	(228.607.674,00)	92,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	2.940.750.000,00	2.789.776.576,00	(150.973.424,00)	94,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.750.000,00	2.789.776.576,00	(150.973.424,00)	94,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	225.250.000,00	147.615.750,00	(77.634.250,00)	65,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.250.000,00	147.615.750,00	(77.634.250,00)	65,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.309.321.250,00	1.234.544.870,00	(74.776.380,00)	94,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.309.321.250,00	1.234.544.870,00	(74.776.380,00)	94,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0003		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.309.321.250,00	1.234.544.870,00	(74.776.380,00)	94,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.309.321.250,00	1.234.544.870,00	(74.776.380,00)	94,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	32.103.750,00	32.000.000,00	(103.750,00)	99,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.277.217.500,00	1.202.544.870,00	(74.672.630,00)	94,15	
				JUMLAH BELANJA	16.323.839.995,00	14.765.592.757,00	(1.558.247.238,00)	90,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.039.689.995,00)	(13.419.602.757,00)	1.620.087.238,00	89,22	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.039.689.995,00)	(13.419.602.757,00)	1.620.087.238,00	89,22	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	854.049.474,00	633.229.211,00	(220.820.263,00)	74,14	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	(361.234.195,00)	92,20	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.193.408.294,00	2.946.859.144,00	(246.549.150,00)	92,27	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.556.927.988,00	2.381.741.750,00	(175.186.238,00)	93,14	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	(175.186.238,00)	93,08	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	(175.186.238,00)	93,08	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	(175.186.238,00)	93,08	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	51.844.500,00	51.828.000,00	(16.500,00)	99,96	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	37.316.500,00	37.300.000,00	(16.500,00)	99,95	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.316.500,00	37.300.000,00	(16.500,00)	99,95	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.316.500,00	37.300.000,00	(16.500,00)	99,95	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	540.381.806,00	481.282.504,00	(59.099.302,00)	89,06	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.725.000,00	4.670.000,00	(55.000,00)	98,83	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.725.000,00	4.670.000,00	(55.000,00)	98,83	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	4.670.000,00	(55.000,00)	98,83	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	535.156.806,00	476.112.504,00	(59.044.302,00)	88,96	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	535.156.806,00	476.112.504,00	(59.044.302,00)	88,96	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.156.806,00	476.112.504,00	(59.044.302,00)	88,96	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.254.000,00	32.006.890,00	(12.247.110,00)	72,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.254.000,00	32.006.890,00	(12.247.110,00)	72,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.254.000,00	32.006.890,00	(12.247.110,00)	72,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.254.000,00	32.006.890,00	(12.247.110,00)	72,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	31.669.500,00	24.469.500,00	(7.200.000,00)	77,26	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.669.500,00	24.469.500,00	(7.200.000,00)	77,26	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	31.669.500,00	24.469.500,00	(7.200.000,00)	77,26	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.669.500,00	24.469.500,00	(7.200.000,00)	77,26	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.669.500,00	24.469.500,00	(7.200.000,00)	77,26	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	173.403.500,00	160.949.000,00	(12.454.500,00)	92,81	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.403.500,00	160.949.000,00	(12.454.500,00)	92,81	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0003		PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI	108.802.500,00	99.514.000,00	(9.288.500,00)	91,46	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	108.802.500,00	99.514.000,00	(9.288.500,00)	91,46	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.802.500,00	99.514.000,00	(9.288.500,00)	91,46	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0005		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	64.601.000,00	61.435.000,00	(3.166.000,00)	95,09	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	64.601.000,00	61.435.000,00	(3.166.000,00)	95,09	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.601.000,00	61.435.000,00	(3.166.000,00)	95,09	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	(95.030.545,00)	92,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	(95.030.545,00)	92,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002		PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	(95.030.545,00)	92,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	(95.030.545,00)	92,32	
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	(95.030.545,00)	92,32	
				JUMLAH BELANJA	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	(361.234.195,00)	92,20	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.772.160.665,00)	(3.641.746.733,00)	130.413.932,00	96,54	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.772.160.665,00)	(3.641.746.733,00)	130.413.932,00	96,54	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	854.049.474,00	633.229.211,00	(220.820.263,00)	74,14	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.536.448.050,00	1.532.610.400,00	(3.837.650,00)	99,75	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	345.159.500,00	344.308.400,00	(851.100,00)	99,75	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	345.159.500,00	344.308.400,00	(851.100,00)	99,75	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	308.938.000,00	308.245.000,00	(693.000,00)	99,77	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	308.938.000,00	308.245.000,00	(693.000,00)	99,77	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.938.000,00	308.245.000,00	(693.000,00)	99,77	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	36.221.500,00	36.063.400,00	(158.100,00)	99,56	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.221.500,00	36.063.400,00	(158.100,00)	99,56	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.221.500,00	36.063.400,00	(158.100,00)	99,56	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.096.144.000,00	1.095.430.250,00	(713.750,00)	99,93	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	1.088.727.500,00	1.088.013.750,00	(713.750,00)	99,93	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	26.060.500,00	25.962.200,00	(98.300,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.060.500,00	25.962.200,00	(98.300,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.060.500,00	25.962.200,00	(98.300,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	1.062.667.000,00	1.062.051.550,00	(615.450,00)	99,94	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.667.000,00	1.062.051.550,00	(615.450,00)	99,94	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.667.000,00	1.062.051.550,00	(615.450,00)	99,94	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.03		PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.416.500,00	7.416.500,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.03.0003		PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	7.416.500,00	7.416.500,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.416.500,00	7.416.500,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.416.500,00	7.416.500,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.319.550,00	87.101.750,00	(2.217.800,00)	97,51	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	89.319.550,00	87.101.750,00	(2.217.800,00)	97,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	66.037.050,00	65.566.250,00	(470.800,00)	99,28	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.719.050,00	50.248.250,00	(470.800,00)	99,07	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.719.050,00	50.248.250,00	(470.800,00)	99,07	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	15.318.000,00	15.318.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.318.000,00	15.318.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	21.942.500,00	20.595.500,00	(1.347.000,00)	93,86	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.057.500,00	17.127.500,00	(930.000,00)	94,84	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.057.500,00	17.127.500,00	(930.000,00)	94,84	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.885.000,00	3.468.000,00	(417.000,00)	89,26	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.885.000,00	3.468.000,00	(417.000,00)	89,26	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0003		PENYIDIKAN METROLOGI LEGAL	1.340.000,00	940.000,00	(400.000,00)	70,14	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.340.000,00	940.000,00	(400.000,00)	70,14	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	940.000,00	(400.000,00)	70,14	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	5.825.000,00	5.770.000,00	(55.000,00)	99,05	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07.2.01		PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	5.825.000,00	5.770.000,00	(55.000,00)	99,05	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07.2.01.0005		PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	5.825.000,00	5.770.000,00	(55.000,00)	99,05	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.825.000,00	5.770.000,00	(55.000,00)	99,05	
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.825.000,00	5.770.000,00	(55.000,00)	99,05	
				JUMLAH BELANJA	1.536.448.050,00	1.532.610.400,00	(3.837.650,00)	99,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(672.398.576,00)	(899.381.189,00)	(226.982.613,00)	133,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(672.398.576,00)	(899.381.189,00)	(226.982.613,00)	133,75	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	854.049.474,00	633.229.211,00	(220.820.263,00)	74,14	
	3.30.3.31.2.17.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	864.049.474,00	633.229.211,00	(230.820.263,00)	73,28	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.041.297.950,00	1.993.521.360,00	(47.776.590,00)	97,65	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.005.589.450,00	1.957.859.860,00	(47.729.590,00)	97,62	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	2.005.589.450,00	1.957.859.860,00	(47.729.590,00)	97,62	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	106.907.450,00	100.606.960,00	(6.300.490,00)	94,10	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.907.450,00	100.606.960,00	(6.300.490,00)	94,10	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.907.450,00	100.606.960,00	(6.300.490,00)	94,10	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1.893.682.000,00	1.857.252.900,00	(41.429.100,00)	97,81	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.893.682.000,00	1.857.252.900,00	(36.429.100,00)	98,07	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.893.682.000,00	1.857.252.900,00	(36.429.100,00)	98,07	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	35.708.500,00	35.661.500,00	(47.000,00)	99,86	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	35.708.500,00	35.661.500,00	(47.000,00)	99,86	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	35.708.500,00	35.661.500,00	(47.000,00)	99,86	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.208.500,00	17.208.500,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.208.500,00	17.208.500,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	18.500.000,00	18.453.000,00	(47.000,00)	99,74	
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.453.000,00	(47.000,00)	99,74	
				JUMLAH BELANJA	2.041.297.950,00	1.993.521.360,00	(47.776.590,00)	97,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.177.248.476,00)	(1.360.292.149,00)	(183.043.673,00)	115,54	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.177.248.476,00)	(1.360.292.149,00)	(183.043.673,00)	115,54	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Sekretariat Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	19.018.000,00	47.732.500,00	28.714.500,00	250,98	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.018.000,00	47.732.500,00	28.714.500,00	250,98	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	19.018.000,00	47.732.500,00	28.714.500,00	250,98	
				JUMLAH PENDAPATAN	19.018.000,00	47.732.500,00	28.714.500,00	250,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	33.051.728.277,00	31.428.463.411,00	(1.623.264.866,00)	95,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.116.314.477,00	22.488.097.080,00	(628.217.397,00)	97,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	180.908.600,00	180.597.513,00	(311.087,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	180.908.600,00	180.597.513,00	(311.087,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	180.908.600,00	180.597.513,00	(311.087,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.908.600,00	180.597.513,00	(311.087,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.505.514.902,00	10.270.126.902,00	(235.388.000,00)	97,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.937.030.602,00	9.735.593.579,00	(201.437.023,00)	97,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.937.030.602,00	9.735.593.579,00	(201.437.023,00)	97,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.937.030.602,00	9.735.593.579,00	(201.437.023,00)	97,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	492.524.300,00	458.573.323,00	(33.950.977,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	492.524.300,00	458.573.323,00	(33.950.977,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.524.300,00	458.573.323,00	(33.950.977,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	75.960.000,00	75.960.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.960.000,00	75.960.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.960.000,00	75.960.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.640.423.740,00	3.583.955.430,00	(56.468.310,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	120.336.554,00	120.318.200,00	(18.354,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.336.554,00	120.318.200,00	(18.354,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.336.554,00	120.318.200,00	(18.354,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	149.601.686,00	141.383.137,00	(8.218.549,00)	94,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	149.601.686,00	141.383.137,00	(8.218.549,00)	94,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.601.686,00	141.383.137,00	(8.218.549,00)	94,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	169.280.000,00	169.134.514,00	(145.486,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	154.280.000,00	154.149.514,00	(130.486,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.280.000,00	154.149.514,00	(130.486,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.261.039.000,00	1.260.835.120,00	(203.880,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.261.039.000,00	1.260.835.120,00	(203.880,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.039.000,00	1.260.835.120,00	(203.880,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.940.166.500,00	1.892.284.459,00	(47.882.041,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.940.166.500,00	1.892.284.459,00	(47.882.041,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.940.166.500,00	1.892.284.459,00	(47.882.041,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	842.978.200,00	805.048.700,00	(37.929.500,00)	95,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	842.978.200,00	805.048.700,00	(37.929.500,00)	95,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	108.900.000,00	108.900.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.900.000,00	108.900.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	734.078.200,00	696.148.700,00	(37.929.500,00)	94,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	638.943.100,00	601.148.700,00	(37.794.400,00)	94,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.135.100,00	95.000.000,00	(135.100,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.399.474.534,00	3.332.719.635,00	(66.754.899,00)	98,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	88.614.000,00	88.595.800,00	(18.200,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.614.000,00	88.595.800,00	(18.200,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.614.000,00	88.595.800,00	(18.200,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	292.661.660,00	229.537.001,00	(63.124.659,00)	78,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	292.661.660,00	229.537.001,00	(63.124.659,00)	78,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.661.660,00	229.537.001,00	(63.124.659,00)	78,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.018.198.874,00	3.014.586.834,00	(3.612.040,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.991.198.874,00	2.987.586.834,00	(3.612.040,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.991.198.874,00	2.987.586.834,00	(3.612.040,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.731.195.880,00	1.668.838.112,00	(62.357.768,00)	96,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	158.730.600,00	157.107.519,00	(1.623.081,00)	98,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	158.730.600,00	157.107.519,00	(1.623.081,00)	98,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.730.600,00	157.107.519,00	(1.623.081,00)	98,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.467.015.280,00	1.406.914.093,00	(60.101.187,00)	95,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.467.015.280,00	1.406.914.093,00	(60.101.187,00)	95,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.467.015.280,00	1.406.914.093,00	(60.101.187,00)	95,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	105.450.000,00	104.816.500,00	(633.500,00)	99,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.2	BELANJA MODAL	91.500.000,00	90.866.500,00	(633.500,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.500.000,00	90.866.500,00	(633.500,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	797.010.046,00	642.685.015,00	(154.325.031,00)	80,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	574.565.046,00	420.240.015,00	(154.325.031,00)	73,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	574.565.046,00	420.240.015,00	(154.325.031,00)	73,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	574.565.046,00	420.240.015,00	(154.325.031,00)	73,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	172.445.000,00	172.445.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	172.445.000,00	172.445.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.445.000,00	172.445.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.625.466.325,00	1.611.599.376,00	(13.866.949,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	719.875.000,00	719.753.582,00	(121.418,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	719.875.000,00	719.753.582,00	(121.418,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.875.000,00	719.753.582,00	(121.418,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	823.391.325,00	813.725.101,00	(9.666.224,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	823.391.325,00	813.725.101,00	(9.666.224,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.391.325,00	813.725.101,00	(9.666.224,00)	98,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	82.200.000,00	78.120.693,00	(4.079.307,00)	95,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.200.000,00	78.120.693,00	(4.079.307,00)	95,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	78.120.693,00	(4.079.307,00)	95,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	311.742.250,00	310.926.397,00	(815.853,00)	99,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	311.742.250,00	310.926.397,00	(815.853,00)	99,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.742.250,00	36.567.697,00	(174.553,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.742.250,00	36.567.697,00	(174.553,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.2	BELANJA MODAL	275.000.000,00	274.358.700,00	(641.300,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.000.000,00	274.358.700,00	(641.300,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.279.423.500,00	8.334.271.476,00	(945.152.024,00)	89,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	567.543.500,00	567.127.496,00	(416.004,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	24.575.000,00	24.469.500,00	(105.500,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.575.000,00	24.469.500,00	(105.500,00)	99,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.575.000,00	24.469.500,00	(105.500,00)	99,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	58.700.000,00	58.565.400,00	(134.600,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.700.000,00	58.565.400,00	(134.600,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	58.565.400,00	(134.600,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	484.268.500,00	484.092.596,00	(175.904,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	484.268.500,00	484.092.596,00	(175.904,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.268.500,00	484.092.596,00	(175.904,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.530.113.000,00	7.587.556.500,00	(942.556.500,00)	88,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	8.511.000.000,00	7.568.500.000,00	(942.500.000,00)	88,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.511.000.000,00	7.568.500.000,00	(942.500.000,00)	88,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	(883.000.000,00)	88,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	(59.500.000,00)	91,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	19.113.000,00	19.056.500,00	(56.500,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.113.000,00	19.056.500,00	(56.500,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.113.000,00	19.056.500,00	(56.500,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	172.583.000,00	170.545.980,00	(2.037.020,00)	98,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	108.685.000,00	106.655.980,00	(2.029.020,00)	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.685.000,00	106.655.980,00	(2.029.020,00)	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.685.000,00	106.655.980,00	(2.029.020,00)	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	48.898.000,00	48.890.000,00	(8.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.898.000,00	48.890.000,00	(8.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.898.000,00	48.890.000,00	(8.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	9.184.000,00	9.041.500,00	(142.500,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	9.184.000,00	9.041.500,00	(142.500,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.184.000,00	9.041.500,00	(142.500,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.184.000,00	9.041.500,00	(142.500,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	655.990.300,00	606.094.855,00	(49.895.445,00)	92,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	116.416.400,00	85.060.500,00	(31.355.900,00)	73,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD	116.416.400,00	85.060.500,00	(31.355.900,00)	73,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	116.416.400,00	85.060.500,00	(31.355.900,00)	73,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.416.400,00	85.060.500,00	(31.355.900,00)	73,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	36.533.900,00	36.495.783,00	(38.117,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	25.496.000,00	25.458.000,00	(38.000,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.496.000,00	25.458.000,00	(38.000,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.496.000,00	25.458.000,00	(38.000,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	11.037.900,00	11.037.783,00	(117,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.037.900,00	11.037.783,00	(117,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.037.900,00	11.037.783,00	(117,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	488.054.000,00	469.552.572,00	(18.501.428,00)	96,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	198.126.900,00	180.476.900,00	(17.650.000,00)	91,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	198.126.900,00	180.476.900,00	(17.650.000,00)	91,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.126.900,00	180.476.900,00	(17.650.000,00)	91,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	71.800.000,00	71.660.000,00	(140.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.800.000,00	71.660.000,00	(140.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.800.000,00	71.660.000,00	(140.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	218.127.100,00	217.415.672,00	(711.428,00)	99,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	181.343.400,00	180.796.772,00	(546.628,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.343.400,00	180.796.772,00	(546.628,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	36.783.700,00	36.618.900,00	(164.800,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.783.700,00	36.618.900,00	(164.800,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	33.051.728.277,00	31.428.463.411,00	(1.623.264.866,00)	95,08	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(33.032.710.277,00)	(31.380.730.911,00)	1.651.979.366,00	94,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(33.032.710.277,00)	(31.380.730.911,00)	1.651.979.366,00	94,99	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	46.095.382.049,00	44.781.153.011,00	(1.314.229.038,00)	97,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.550.221.641,00	31.618.982.495,00	(931.239.146,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	22.424.132.368,00	21.859.135.612,00	(564.996.756,00)	97,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	(547.707.816,00)	97,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	(547.707.816,00)	97,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	(547.707.816,00)	97,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	300.625.552,00	295.355.412,00	(5.270.140,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.625.552,00	295.355.412,00	(5.270.140,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.625.552,00	295.355.412,00	(5.270.140,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	149.550.000,00	137.531.200,00	(12.018.800,00)	91,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	149.550.000,00	137.531.200,00	(12.018.800,00)	91,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.550.000,00	137.531.200,00	(12.018.800,00)	91,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	52.798.732,00	50.710.548,00	(2.088.184,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	52.798.732,00	50.710.548,00	(2.088.184,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	52.798.732,00	50.710.548,00	(2.088.184,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.798.732,00	50.710.548,00	(2.088.184,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.653.996.882,00	4.613.169.498,00	(40.827.384,00)	99,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	706.983.000,00	683.745.650,00	(23.237.350,00)	96,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.658.000,00	129.705.500,00	(2.952.500,00)	97,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.658.000,00	129.705.500,00	(2.952.500,00)	97,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	574.325.000,00	554.040.150,00	(20.284.850,00)	96,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	524.325.000,00	504.302.150,00	(20.022.850,00)	96,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.738.000,00	(262.000,00)	99,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	182.009.786,00	182.009.750,00	(36,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	182.009.786,00	182.009.750,00	(36,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.009.786,00	182.009.750,00	(36,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43.000.000,00	25.424.500,00	(17.575.500,00)	59,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.000.000,00	25.424.500,00	(17.575.500,00)	59,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	25.424.500,00	(17.575.500,00)	59,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.553.204.096,00	3.553.189.598,00	(14.498,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.553.204.096,00	3.553.189.598,00	(14.498,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.553.204.096,00	3.553.189.598,00	(14.498,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.042.751.659,00	2.824.515.608,00	(218.236.051,00)	92,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.200.000,00	7.192.000,00	(8.000,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.192.000,00	(8.000,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.192.000,00	(8.000,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	230.730.000,00	230.371.720,00	(358.280,00)	99,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	230.730.000,00	230.371.720,00	(358.280,00)	99,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.730.000,00	230.371.720,00	(358.280,00)	99,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.804.821.659,00	2.586.951.888,00	(217.869.771,00)	92,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.804.821.659,00	2.586.951.888,00	(217.869.771,00)	92,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.804.821.659,00	2.586.951.888,00	(217.869.771,00)	92,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.607.692.000,00	1.592.156.814,00	(15.535.186,00)	99,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.607.692.000,00	1.592.156.814,00	(15.535.186,00)	99,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.607.692.000,00	1.592.156.814,00	(15.535.186,00)	99,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.607.692.000,00	1.592.156.814,00	(15.535.186,00)	99,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	768.850.000,00	679.294.415,00	(89.555.585,00)	88,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	368.850.000,00	312.019.015,00	(56.830.985,00)	84,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	368.850.000,00	312.019.015,00	(56.830.985,00)	84,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.850.000,00	312.019.015,00	(56.830.985,00)	84,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	400.000.000,00	367.275.400,00	(32.724.600,00)	91,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	367.275.400,00	(32.724.600,00)	91,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	367.275.400,00	(32.724.600,00)	91,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.545.160.408,00	13.162.170.516,00	(382.989.892,00)	97,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	2.282.739.500,00	1.933.672.306,00	(349.067.194,00)	84,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	647.059.500,00	647.002.306,00	(57.194,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	647.059.500,00	647.002.306,00	(57.194,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.059.500,00	647.002.306,00	(57.194,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	303.600.000,00	254.000.000,00	(49.000.000,00)	83,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	303.000.000,00	254.000.000,00	(49.000.000,00)	83,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.000.000,00	254.000.000,00	(49.000.000,00)	83,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.332.680.000,00	1.032.670.000,00	(300.010.000,00)	77,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.332.680.000,00	1.032.670.000,00	(300.010.000,00)	77,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.680.000,00	1.032.670.000,00	(300.010.000,00)	77,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	84.600.000,00	84.599.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	84.600.000,00	84.599.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.600.000,00	84.599.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	84.599.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	818.499.609,00	813.197.500,00	(5.302.109,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007		PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	818.499.609,00	813.197.500,00	(5.302.109,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	818.499.609,00	813.197.500,00	(5.302.109,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.499.609,00	813.197.500,00	(5.302.109,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.139.456.499,00	2.139.320.630,00	(135.869,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	2.139.456.499,00	2.139.320.630,00	(135.869,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.139.456.499,00	2.139.320.630,00	(135.869,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.139.456.499,00	2.139.320.630,00	(135.869,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	7.917.000.000,00	7.916.810.520,00	(189.480,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	415.750.000,00	415.566.700,00	(183.300,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	415.750.000,00	415.566.700,00	(183.300,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.750.000,00	415.566.700,00	(183.300,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	7.501.250.000,00	7.501.243.820,00	(6.180,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.501.250.000,00	7.501.243.820,00	(6.180,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.501.250.000,00	7.501.243.820,00	(6.180,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	302.864.800,00	274.570.560,00	(28.294.240,00)	90,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002		PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	302.864.800,00	274.570.560,00	(28.294.240,00)	90,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	302.864.800,00	274.570.560,00	(28.294.240,00)	90,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.864.800,00	274.570.560,00	(28.294.240,00)	90,65	
				JUMLAH BELANJA	46.095.382.049,00	44.781.153.011,00	(1.314.229.038,00)	97,14	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(46.095.382.049,00)	(44.781.153.011,00)	1.314.229.038,00	97,14	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(46.095.382.049,00)	(44.781.153.011,00)	1.314.229.038,00	97,14	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.746.532.276,00	5.531.299.028,00	(215.233.248,00)	96,25	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.078.753.928,00	3.928.307.358,00	(150.446.570,00)	96,31	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	61.560.000,00	60.421.000,00	(1.139.000,00)	98,14	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	34.050.000,00	33.306.000,00	(744.000,00)	97,81	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.050.000,00	33.306.000,00	(744.000,00)	97,81	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	33.306.000,00	(744.000,00)	97,81	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	27.510.000,00	27.115.000,00	(395.000,00)	98,56	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.510.000,00	27.115.000,00	(395.000,00)	98,56	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.510.000,00	27.115.000,00	(395.000,00)	98,56	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.210.465.300,00	3.141.456.209,00	(69.009.091,00)	97,85	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	(54.563.287,00)	98,14	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	(54.563.287,00)	98,14	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	(54.563.287,00)	98,14	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	34.204.200,00	34.204.200,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.204.200,00	34.204.200,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.204.200,00	34.204.200,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	194.806.236,00	181.614.432,00	(13.191.804,00)	93,22	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	194.806.236,00	181.614.432,00	(13.191.804,00)	93,22	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.806.236,00	181.614.432,00	(13.191.804,00)	93,22	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	44.416.500,00	43.162.500,00	(1.254.000,00)	97,17	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	44.416.500,00	43.162.500,00	(1.254.000,00)	97,17	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.416.500,00	43.162.500,00	(1.254.000,00)	97,17	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	423.671.228,00	416.592.010,00	(7.079.218,00)	98,32	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.142.556,00	72.137.500,00	(5.056,00)	99,99	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	72.142.556,00	72.137.500,00	(5.056,00)	99,99	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.142.556,00	72.137.500,00	(5.056,00)	99,99	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.963.672,00	36.248.000,00	(1.715.672,00)	95,48	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.963.672,00	36.248.000,00	(1.715.672,00)	95,48	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.963.672,00	36.248.000,00	(1.715.672,00)	95,48	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.320.000,00	540.000,00	(3.780.000,00)	12,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.320.000,00	540.000,00	(3.780.000,00)	12,50	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	540.000,00	(3.780.000,00)	12,50	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	303.515.000,00	301.936.510,00	(1.578.490,00)	99,47	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	303.515.000,00	301.936.510,00	(1.578.490,00)	99,47	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.515.000,00	301.936.510,00	(1.578.490,00)	99,47	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	105.680.000,00	52.104.300,00	(53.575.700,00)	49,30	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	52.970.000,00	15.554.300,00	(37.415.700,00)	29,36	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.970.000,00	15.554.300,00	(37.415.700,00)	29,36	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.970.000,00	15.554.300,00	(37.415.700,00)	29,36	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	47.160.000,00	31.000.000,00	(16.160.000,00)	65,73	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.160.000,00	31.000.000,00	(16.160.000,00)	65,73	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.160.000,00	31.000.000,00	(16.160.000,00)	65,73	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	277.377.400,00	257.733.839,00	(19.643.561,00)	92,91	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	214.060.600,00	194.417.039,00	(19.643.561,00)	90,82	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	214.060.600,00	194.417.039,00	(19.643.561,00)	90,82	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.060.600,00	194.417.039,00	(19.643.561,00)	90,82	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	46.226.800,00	46.226.800,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.726.800,00	44.726.800,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.726.800,00	44.726.800,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.005.045.948,00	944.816.300,00	(60.229.648,00)	94,00	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	909.854.648,00	849.713.100,00	(60.141.548,00)	93,38	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	909.854.648,00	849.713.100,00	(60.141.548,00)	93,38	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	909.854.648,00	849.713.100,00	(60.141.548,00)	93,38	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.854.648,00	849.713.100,00	(60.141.548,00)	93,38	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	95.191.300,00	95.103.200,00	(88.100,00)	99,90	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	95.191.300,00	95.103.200,00	(88.100,00)	99,90	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.191.300,00	95.103.200,00	(88.100,00)	99,90	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.191.300,00	95.103.200,00	(88.100,00)	99,90	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	662.732.400,00	658.175.370,00	(4.557.030,00)	99,31	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	304.435.400,00	301.523.870,00	(2.911.530,00)	99,04	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	131.330.200,00	129.202.000,00	(2.128.200,00)	98,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	131.330.200,00	129.202.000,00	(2.128.200,00)	98,37	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.330.200,00	129.202.000,00	(2.128.200,00)	98,37	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	5.517.400,00	5.507.400,00	(10.000,00)	99,81	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.517.400,00	5.507.400,00	(10.000,00)	99,81	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.517.400,00	5.507.400,00	(10.000,00)	99,81	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	24.301.800,00	24.220.650,00	(81.150,00)	99,66	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.301.800,00	24.220.650,00	(81.150,00)	99,66	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.301.800,00	24.220.650,00	(81.150,00)	99,66	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	104.499.000,00	104.281.820,00	(217.180,00)	99,79	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	104.499.000,00	104.281.820,00	(217.180,00)	99,79	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.499.000,00	104.281.820,00	(217.180,00)	99,79	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	5.272.000,00	5.117.500,00	(154.500,00)	97,06	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.272.000,00	5.117.500,00	(154.500,00)	97,06	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.272.000,00	5.117.500,00	(154.500,00)	97,06	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	28.145.000,00	27.979.000,00	(166.000,00)	99,41	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.145.000,00	27.979.000,00	(166.000,00)	99,41	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.145.000,00	27.979.000,00	(166.000,00)	99,41	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	5.370.000,00	5.215.500,00	(154.500,00)	97,12	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.370.000,00	5.215.500,00	(154.500,00)	97,12	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	5.215.500,00	(154.500,00)	97,12	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	168.239.500,00	167.274.500,00	(965.000,00)	99,42	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	104.957.200,00	104.573.200,00	(384.000,00)	99,63	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.657.200,00	96.274.200,00	(383.000,00)	99,60	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.657.200,00	96.274.200,00	(383.000,00)	99,60	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	8.300.000,00	8.299.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.300.000,00	8.299.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	4.815.800,00	4.535.800,00	(280.000,00)	94,18	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.815.800,00	4.535.800,00	(280.000,00)	94,18	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.815.800,00	4.535.800,00	(280.000,00)	94,18	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	54.790.000,00	54.624.000,00	(166.000,00)	99,69	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.790.000,00	54.624.000,00	(166.000,00)	99,69	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.790.000,00	54.624.000,00	(166.000,00)	99,69	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	3.676.500,00	3.541.500,00	(135.000,00)	96,32	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.676.500,00	3.541.500,00	(135.000,00)	96,32	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.676.500,00	3.541.500,00	(135.000,00)	96,32	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	190.057.500,00	189.377.000,00	(680.500,00)	99,64	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	117.814.500,00	117.674.500,00	(140.000,00)	99,88	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	114.314.500,00	114.175.500,00	(139.000,00)	99,87	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.314.500,00	114.175.500,00	(139.000,00)	99,87	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.499.000,00	(1.000,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.499.000,00	(1.000,00)	99,97	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	23.183.500,00	23.083.000,00	(100.500,00)	99,56	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.183.500,00	23.083.000,00	(100.500,00)	99,56	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.183.500,00	23.083.000,00	(100.500,00)	99,56	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	49.059.500,00	48.619.500,00	(440.000,00)	99,10	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.059.500,00	48.619.500,00	(440.000,00)	99,10	
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.059.500,00	48.619.500,00	(440.000,00)	99,10	
				JUMLAH BELANJA	5.746.532.276,00	5.531.299.028,00	(215.233.248,00)	96,25	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.746.532.276,00)	(5.531.299.028,00)	215.233.248,00	96,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.746.532.276,00)	(5.531.299.028,00)	215.233.248,00	96,25	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.634.712.535.375,00	1.458.742.771.748,46	(175.969.763.626,54)	89,23	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.202.792.197,00	18.856.983.873,46	(14.345.808.323,54)	56,79	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	(2.350.171.365,00)	76,02	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.399.322.171,00	11.403.685.212,46	(11.995.636.958,54)	48,73	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	(162.446.341.133,00)	89,74	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.316.860.000,00	1.388.594.639.145,00	(157.722.220.855,00)	89,80	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	(4.724.120.278,00)	87,30	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	822.385.830,00	104,57	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	822.385.830,00	104,57	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.634.712.535.375,00	1.458.742.771.748,46	(175.969.763.626,54)	89,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	452.345.493.124,20	353.738.215.949,00	(98.607.277.175,20)	78,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	443.379.215.872,20	346.262.247.816,00	(97.116.968.056,20)	78,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.640.000,00	56.730.000,00	(1.910.000,00)	96,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.640.000,00	56.730.000,00	(1.910.000,00)	96,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	58.640.000,00	56.730.000,00	(1.910.000,00)	96,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.640.000,00	56.730.000,00	(1.910.000,00)	96,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	442.331.126.101,20	345.277.703.657,00	(97.053.422.444,20)	78,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	441.424.674.897,20	344.413.290.706,00	(97.011.384.191,20)	78,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.115.572.299,20	59.288.759.224,00	(44.826.813.075,20)	56,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	103.515.572.299,20	58.855.091.594,00	(44.660.480.705,20)	56,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	433.667.630,00	(166.332.370,00)	72,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.4	BELANJA TRANSFER	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	(52.184.571.116,00)	84,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	(6.384.800,00)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	(52.178.186.316,00)	84,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	207.304.300,00	207.218.900,00	(85.400,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	207.304.300,00	207.218.900,00	(85.400,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.304.300,00	207.218.900,00	(85.400,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	699.146.904,00	657.194.051,00	(41.952.853,00)	93,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	699.146.904,00	657.194.051,00	(41.952.853,00)	93,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.146.904,00	657.194.051,00	(41.952.853,00)	93,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	530.041.000,00	492.853.160,00	(37.187.840,00)	92,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	26.138.000,00	26.138.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.138.000,00	26.138.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.138.000,00	26.138.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	138.589.500,00	137.988.100,00	(601.400,00)	99,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	138.589.500,00	137.988.100,00	(601.400,00)	99,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.589.500,00	137.988.100,00	(601.400,00)	99,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	43.429.500,00	43.429.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.429.500,00	43.429.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.429.500,00	43.429.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	32.375.000,00	32.375.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.375.000,00	32.375.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.375.000,00	32.375.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	289.509.000,00	252.922.560,00	(36.586.440,00)	87,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	289.509.000,00	252.922.560,00	(36.586.440,00)	87,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.509.000,00	252.922.560,00	(36.586.440,00)	87,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	216.290.051,00	213.670.580,00	(2.619.471,00)	98,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	92.237.051,00	89.617.580,00	(2.619.471,00)	97,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.237.051,00	89.617.580,00	(2.619.471,00)	97,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.237.051,00	89.617.580,00	(2.619.471,00)	97,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	107.953.000,00	107.953.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	107.953.000,00	107.953.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.953.000,00	107.953.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	243.118.720,00	221.290.419,00	(21.828.301,00)	91,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	122.506.520,00	119.073.319,00	(3.433.201,00)	97,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	122.506.520,00	119.073.319,00	(3.433.201,00)	97,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.506.520,00	119.073.319,00	(3.433.201,00)	97,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	120.612.200,00	102.217.100,00	(18.395.100,00)	84,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.612.200,00	102.217.100,00	(18.395.100,00)	84,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.612.200,00	102.217.100,00	(18.395.100,00)	84,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.614.499.428,00	4.149.929.714,00	(1.464.569.714,00)	73,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.757.351.004,00	1.436.113.550,00	(321.237.454,00)	81,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	134.391.000,00	128.937.800,00	(5.453.200,00)	95,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	134.391.000,00	128.937.800,00	(5.453.200,00)	95,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.391.000,00	128.937.800,00	(5.453.200,00)	95,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.175.652.254,00	987.176.461,00	(188.475.793,00)	83,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.175.652.254,00	987.176.461,00	(188.475.793,00)	83,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.652.254,00	987.176.461,00	(188.475.793,00)	83,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	447.307.750,00	319.999.289,00	(127.308.461,00)	71,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	447.307.750,00	319.999.289,00	(127.308.461,00)	71,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.307.750,00	319.999.289,00	(127.308.461,00)	71,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	876.333.716,00	849.020.986,00	(27.312.730,00)	96,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	876.333.716,00	849.020.986,00	(27.312.730,00)	96,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	846.333.716,00	824.600.986,00	(21.732.730,00)	97,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.333.716,00	824.600.986,00	(21.732.730,00)	97,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	24.420.000,00	(5.580.000,00)	81,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	24.420.000,00	(5.580.000,00)	81,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	855.814.708,00	794.119.778,00	(61.694.930,00)	92,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	85.288.000,00	84.996.100,00	(291.900,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.288.000,00	84.996.100,00	(291.900,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.288.000,00	84.996.100,00	(291.900,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	667.854.358,00	662.241.678,00	(5.612.680,00)	99,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	660.854.358,00	655.326.378,00	(5.527.980,00)	99,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.854.358,00	655.326.378,00	(5.527.980,00)	99,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.915.300,00	(84.700,00)	98,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.915.300,00	(84.700,00)	98,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	3.514.500,00	3.514.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.514.500,00	3.514.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.514.500,00	3.514.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010		PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	99.157.850,00	43.367.500,00	(55.790.350,00)	43,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	99.157.850,00	43.367.500,00	(55.790.350,00)	43,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.157.850,00	43.367.500,00	(55.790.350,00)	43,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	(1.054.324.600,00)	50,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0003		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	(1.054.324.600,00)	50,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0003	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	(1.054.324.600,00)	50,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0003	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	(1.054.324.600,00)	50,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.351.777.824,00	3.326.038.419,00	(25.739.405,00)	99,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.351.777.824,00	3.326.038.419,00	(25.739.405,00)	99,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	176.229.500,00	176.119.500,00	(110.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	176.229.500,00	176.119.500,00	(110.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.229.500,00	176.119.500,00	(110.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	3.175.548.324,00	3.149.918.919,00	(25.629.405,00)	99,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.370.248.324,00	1.344.932.019,00	(25.316.305,00)	98,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.248.324,00	1.344.932.019,00	(25.316.305,00)	98,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	1.805.300.000,00	1.804.986.900,00	(313.100,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 607.800.000,00	1.607.800.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.500.000,00	197.186.900,00	(313.100,00)	99,84	
				JUMLAH BELANJA	452.345.493.124,20	353.738.215.949,00	(98.607.277.175,20)	78,20	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.182.367.042.250,80	1.105.004.555.799,46	(77.362.486.451,34)	93,45	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.262.522.584.143,06	1.185.160.097.691,72	(77.362.486.451,34)	93,87	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	(15.053.012.830,00)	61,50	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	(15.053.012.830,00)	61,50	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.01	Pajak Daerah	37.763.500.777,00	22.337.201.134,00	(15.426.299.643,00)	59,15	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.239.321.574,00	1.554.383.370,00	315.061.796,00	125,42	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.145.268,00	156.370.285,00	58.225.017,00	159,32	
				JUMLAH PENDAPATAN	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	(15.053.012.830,00)	61,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	7.274.955.766,00	7.087.964.676,00	(186.991.090,00)	97,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.306.402.323,00	4.165.448.654,00	(140.953.669,00)	96,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.582.500,00	9.582.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.582.500,00	9.582.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.582.500,00	9.582.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.582.500,00	9.582.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.197.663.968,00	3.086.301.063,00	(111.362.905,00)	96,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.681.431.028,00	2.585.697.628,00	(95.733.400,00)	96,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.681.431.028,00	2.585.697.628,00	(95.733.400,00)	96,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.681.431.028,00	2.585.697.628,00	(95.733.400,00)	96,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	440.412.040,00	424.795.385,00	(15.616.655,00)	96,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	440.412.040,00	424.795.385,00	(15.616.655,00)	96,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.412.040,00	424.795.385,00	(15.616.655,00)	96,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	40.866.600,00	40.854.000,00	(12.600,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.866.600,00	40.854.000,00	(12.600,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.866.600,00	40.854.000,00	(12.600,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	34.954.300,00	34.954.050,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.954.300,00	34.954.050,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.954.300,00	34.954.050,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	699.166.767,00	686.639.944,00	(12.526.823,00)	98,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.391.267,00	8.391.000,00	(267,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.391.267,00	8.391.000,00	(267,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.391.267,00	8.391.000,00	(267,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	331.197.900,00	329.679.441,00	(1.518.459,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.085.200,00	36.084.441,00	(759,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.085.200,00	36.084.441,00	(759,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	295.112.700,00	293.595.000,00	(1.517.700,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.112.700,00	293.595.000,00	(1.517.700,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.381.250,00	27.381.000,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.381.250,00	27.381.000,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.381.250,00	27.381.000,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	8.590.350,00	8.389.000,00	(201.350,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.590.350,00	8.389.000,00	(201.350,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.590.350,00	8.389.000,00	(201.350,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	321.446.000,00	310.639.503,00	(10.806.497,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	321.446.000,00	310.639.503,00	(10.806.497,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.446.000,00	310.639.503,00	(10.806.497,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	136.359.288,00	130.376.510,00	(5.982.778,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.954.400,00	4.948.500,00	(5.900,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.954.400,00	4.948.500,00	(5.900,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.954.400,00	4.948.500,00	(5.900,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	65.318.388,00	59.348.510,00	(5.969.878,00)	90,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.318.388,00	59.348.510,00	(5.969.878,00)	90,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.318.388,00	59.348.510,00	(5.969.878,00)	90,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	66.086.500,00	66.079.500,00	(7.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.086.500,00	66.079.500,00	(7.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.086.500,00	66.079.500,00	(7.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	263.629.800,00	252.548.637,00	(11.081.163,00)	95,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	210.239.800,00	199.162.137,00	(11.077.663,00)	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	210.239.800,00	199.162.137,00	(11.077.663,00)	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.239.800,00	199.162.137,00	(11.077.663,00)	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.000.000,00	39.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.968.553.443,00	2.922.516.022,00	(46.037.421,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.968.553.443,00	2.922.516.022,00	(46.037.421,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	574.857.600,00	571.718.719,00	(3.138.881,00)	99,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	559.857.600,00	556.844.719,00	(3.012.881,00)	99,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.857.600,00	556.844.719,00	(3.012.881,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.874.000,00	(126.000,00)	99,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.874.000,00	(126.000,00)	99,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	639.653.500,00	636.551.543,00	(3.101.957,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	639.653.500,00	636.551.543,00	(3.101.957,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.653.500,00	636.551.543,00	(3.101.957,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	1.754.042.343,00	1.714.245.760,00	(39.796.583,00)	97,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.754.042.343,00	1.714.245.760,00	(39.796.583,00)	97,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	380.941.993,00	380.928.000,00	(13.993,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.373.100.350,00	1.333.317.760,00	(39.782.590,00)	97,10	
				JUMLAH BELANJA	7.274.955.766,00	7.087.964.676,00	(186.991.090,00)	97,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	31.826.011.853,00	16.959.990.113,00	(14.866.021.740,00)	53,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	31.826.011.853,00	16.959.990.113,00	(14.866.021.740,00)	53,28	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEPEGAWAIAN**
Organisasi : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.571.809.035,00	4.759.024.795,00	(812.784.240,00)	85,41	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.427.433.885,00	3.383.725.959,00	(43.707.926,00)	98,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.621.400,00	18.335.400,00	(286.000,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.621.400,00	18.335.400,00	(286.000,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.621.400,00	18.335.400,00	(286.000,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.621.400,00	18.335.400,00	(286.000,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.247.691.925,00	3.206.911.455,00	(40.780.470,00)	98,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	(40.741.103,00)	98,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	(40.741.103,00)	98,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	(40.741.103,00)	98,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.721.400,00	9.721.400,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.721.400,00	9.721.400,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.721.400,00	9.721.400,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	121.068.162,00	121.028.795,00	(39.367,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	121.068.162,00	121.028.795,00	(39.367,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.068.162,00	121.028.795,00	(39.367,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	60.053.250,00	59.403.330,00	(649.920,00)	98,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.179.250,00	2.177.500,00	(1.750,00)	99,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.179.250,00	2.177.500,00	(1.750,00)	99,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.179.250,00	2.177.500,00	(1.750,00)	99,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.560.000,00	8.533.250,00	(26.750,00)	99,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.560.000,00	8.533.250,00	(26.750,00)	99,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	8.533.250,00	(26.750,00)	99,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.420.000,00	1.412.000,00	(8.000,00)	99,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	1.412.000,00	(8.000,00)	99,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.412.000,00	(8.000,00)	99,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	47.894.000,00	47.280.580,00	(613.420,00)	98,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.894.000,00	47.280.580,00	(613.420,00)	98,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.894.000,00	47.280.580,00	(613.420,00)	98,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.355.160,00	32.572.300,00	(1.782.860,00)	94,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.503.560,00	2.154.100,00	(349.460,00)	86,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.503.560,00	2.154.100,00	(349.460,00)	86,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.503.560,00	2.154.100,00	(349.460,00)	86,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.601.600,00	22.263.200,00	(1.338.400,00)	94,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.601.600,00	22.263.200,00	(1.338.400,00)	94,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.601.600,00	22.263.200,00	(1.338.400,00)	94,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.250.000,00	8.155.000,00	(95.000,00)	98,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	8.155.000,00	(95.000,00)	98,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.155.000,00	(95.000,00)	98,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.712.150,00	66.503.474,00	(208.676,00)	99,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	63.812.150,00	63.628.474,00	(183.676,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.812.150,00	63.628.474,00	(183.676,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.812.150,00	63.628.474,00	(183.676,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.900.000,00	2.875.000,00	(25.000,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	2.875.000,00	(25.000,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.875.000,00	(25.000,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.144.375.150,00	1.375.298.836,00	(769.076.314,00)	64,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	331.283.150,00	327.191.302,00	(4.091.848,00)	98,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	207.663.450,00	205.104.480,00	(2.558.970,00)	98,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	207.663.450,00	205.104.480,00	(2.558.970,00)	98,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.663.450,00	205.104.480,00	(2.558.970,00)	98,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	78.687.600,00	77.543.800,00	(1.143.800,00)	98,54	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	61.687.600,00	60.543.800,00	(1.143.800,00)	98,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.687.600,00	60.543.800,00	(1.143.800,00)	98,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	44.932.100,00	44.543.022,00	(389.078,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	44.932.100,00	44.543.022,00	(389.078,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.932.100,00	44.543.022,00	(389.078,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	290.372.800,00	232.402.600,00	(57.970.200,00)	80,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	15.708.500,00	15.693.000,00	(15.500,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.708.500,00	15.693.000,00	(15.500,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.708.500,00	15.693.000,00	(15.500,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	38.451.200,00	37.661.500,00	(789.700,00)	97,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.451.200,00	37.661.500,00	(789.700,00)	97,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.451.200,00	37.661.500,00	(789.700,00)	97,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	236.213.100,00	179.048.100,00	(57.165.000,00)	75,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	191.713.100,00	134.548.100,00	(57.165.000,00)	70,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.713.100,00	134.548.100,00	(57.165.000,00)	70,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.265.845.500,00	577.530.214,00	(688.315.286,00)	45,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	61.520.800,00	56.217.700,00	(5.303.100,00)	91,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.520.800,00	39.217.700,00	(5.303.100,00)	88,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.520.800,00	39.217.700,00	(5.303.100,00)	88,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	1.204.324.700,00	521.312.514,00	(683.012.186,00)	43,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.204.324.700,00	521.312.514,00	(683.012.186,00)	43,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.204.324.700,00	521.312.514,00	(683.012.186,00)	43,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	256.873.700,00	238.174.720,00	(18.698.980,00)	92,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	63.143.000,00	54.197.680,00	(8.945.320,00)	85,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.143.000,00	54.197.680,00	(8.945.320,00)	85,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.143.000,00	54.197.680,00	(8.945.320,00)	85,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005		PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	47.688.100,00	44.052.340,00	(3.635.760,00)	92,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.688.100,00	44.052.340,00	(3.635.760,00)	92,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.688.100,00	44.052.340,00	(3.635.760,00)	92,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	146.042.600,00	139.924.700,00	(6.117.900,00)	95,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	146.042.600,00	139.924.700,00	(6.117.900,00)	95,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.042.600,00	139.924.700,00	(6.117.900,00)	95,81	
				JUMLAH BELANJA	5.571.809.035,00	4.759.024.795,00	(812.784.240,00)	85,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.571.809.035,00)	(4.759.024.795,00)	812.784.240,00	85,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.571.809.035,00)	(4.759.024.795,00)	812.784.240,00	85,41	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
Organisasi : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	(150.356.968,00)	89,74	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	(150.356.968,00)	89,74	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	151.500.000,00	149.749.999,00	(1.750.001,00)	98,84	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.500.000,00	149.749.999,00	(1.750.001,00)	98,84	
				JUMLAH BELANJA	1.618.210.500,00	1.466.103.531,00	(152.106.969,00)	90,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.618.210.500,00)	(1.466.103.531,00)	152.106.969,00	90,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.618.210.500,00)	(1.466.103.531,00)	152.106.969,00	90,60	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Organisasi : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.028.490.029,00	2.914.326.612,00	(114.163.417,00)	96,23	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.110.812.679,00	2.007.795.652,00	(103.017.027,00)	95,11	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.010.051.875,00	1.911.291.712,00	(98.760.163,00)	95,08	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	(98.677.137,00)	94,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	(98.677.137,00)	94,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	(98.677.137,00)	94,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.996.500,00	9.996.130,00	(370,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.996.500,00	9.996.130,00	(370,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.500,00	9.996.130,00	(370,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	32.195.826,00	32.113.170,00	(82.656,00)	99,74	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.195.826,00	32.113.170,00	(82.656,00)	99,74	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.195.826,00	32.113.170,00	(82.656,00)	99,74	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	33.978.200,00	33.773.100,00	(205.100,00)	99,39	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.394.200,00	1.394.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.394.200,00	1.394.200,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.394.200,00	1.394.200,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	26.458.000,00	26.252.900,00	(205.100,00)	99,22	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.458.000,00	26.252.900,00	(205.100,00)	99,22	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.458.000,00	26.252.900,00	(205.100,00)	99,22	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.075.604,00	17.035.840,00	(4.039.764,00)	80,83	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.007.604,00	11.967.840,00	(4.039.764,00)	74,76	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.007.604,00	11.967.840,00	(4.039.764,00)	74,76	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.007.604,00	11.967.840,00	(4.039.764,00)	74,76	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	36.682.000,00	36.670.000,00	(12.000,00)	99,96	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	12.232.000,00	12.223.000,00	(9.000,00)	99,92	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.232.000,00	12.223.000,00	(9.000,00)	99,92	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.232.000,00	12.223.000,00	(9.000,00)	99,92	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	24.450.000,00	24.447.000,00	(3.000,00)	99,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.450.000,00	24.447.000,00	(3.000,00)	99,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	24.447.000,00	(3.000,00)	99,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	917.677.350,00	906.530.960,00	(11.146.390,00)	98,78	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	420.715.000,00	414.535.811,00	(6.179.189,00)	98,53	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	420.715.000,00	414.535.811,00	(6.179.189,00)	98,53	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	399.515.000,00	393.565.000,00	(5.950.000,00)	98,51	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.515.000,00	393.565.000,00	(5.950.000,00)	98,51	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	21.200.000,00	20.970.811,00	(229.189,00)	98,91	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.200.000,00	20.970.811,00	(229.189,00)	98,91	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	256.016.000,00	255.397.081,00	(618.919,00)	99,75	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0009		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM	256.016.000,00	255.397.081,00	(618.919,00)	99,75	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	245.016.000,00	244.516.000,00	(500.000,00)	99,79	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.016.000,00	244.516.000,00	(500.000,00)	99,79	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	10.881.081,00	(118.919,00)	98,91	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	10.881.081,00	(118.919,00)	98,91	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	240.946.350,00	236.598.068,00	(4.348.282,00)	98,19	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	240.946.350,00	236.598.068,00	(4.348.282,00)	98,19	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	214.946.350,00	213.338.570,00	(1.607.780,00)	99,25	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.946.350,00	213.338.570,00	(1.607.780,00)	99,25	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	26.000.000,00	23.259.498,00	(2.740.502,00)	89,45	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	23.259.498,00	(2.740.502,00)	89,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	3.028.490.029,00	2.914.326.612,00	(114.163.417,00)	96,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.028.490.029,00)	(2.914.326.612,00)	114.163.417,00	96,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.028.490.029,00)	(2.914.326.612,00)	114.163.417,00	96,23	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **INSPEKTORAT DAERAH**
Organisasi : **Inspektorat Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.338.579.971,00	7.189.319.552,00	(149.260.419,00)	97,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.267.257.021,00	4.167.458.005,00	(99.799.016,00)	97,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.258.000,00	86.544.500,00	(1.713.500,00)	98,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.258.000,00	86.544.500,00	(1.713.500,00)	98,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	88.258.000,00	86.544.500,00	(1.713.500,00)	98,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.258.000,00	86.544.500,00	(1.713.500,00)	98,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.410.697.021,00	3.359.948.437,00	(50.748.584,00)	98,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	(36.857.584,00)	98,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	(36.857.584,00)	98,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	(36.857.584,00)	98,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	120.774.780,00	111.484.780,00	(9.290.000,00)	92,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.774.780,00	111.484.780,00	(9.290.000,00)	92,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.774.780,00	111.484.780,00	(9.290.000,00)	92,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	45.399.000,00	(4.601.000,00)	90,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	45.399.000,00	(4.601.000,00)	90,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	45.399.000,00	(4.601.000,00)	90,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.472.000,00	22.546.967,00	(925.033,00)	96,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23.472.000,00	22.546.967,00	(925.033,00)	96,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.472.000,00	22.546.967,00	(925.033,00)	96,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.472.000,00	22.546.967,00	(925.033,00)	96,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	49.160.000,00	40.416.500,00	(8.743.500,00)	82,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.850.000,00	2.550.000,00	(3.300.000,00)	43,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	2.550.000,00	(3.300.000,00)	43,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	2.550.000,00	(3.300.000,00)	43,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	21.310.000,00	15.867.000,00	(5.443.000,00)	74,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.310.000,00	15.867.000,00	(5.443.000,00)	74,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00	15.867.000,00	(5.443.000,00)	74,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	550.000.000,00	523.444.000,00	(26.556.000,00)	95,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	550.000.000,00	523.444.000,00	(26.556.000,00)	95,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	523.444.000,00	(26.556.000,00)	95,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000.000,00	523.444.000,00	(26.556.000,00)	95,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.520.000,00	24.458.500,00	(7.061.500,00)	77,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.000.000,00	8.991.500,00	(7.008.500,00)	56,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	8.991.500,00	(7.008.500,00)	56,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	8.991.500,00	(7.008.500,00)	56,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	11.520.000,00	11.467.000,00	(53.000,00)	99,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	11.467.000,00	(53.000,00)	99,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.467.000,00	(53.000,00)	99,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.150.000,00	110.099.101,00	(4.050.899,00)	96,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	74.150.000,00	70.139.993,00	(4.010.007,00)	94,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.150.000,00	70.139.993,00	(4.010.007,00)	94,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.150.000,00	70.139.993,00	(4.010.007,00)	94,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.000.000,00	29.999.108,00	(892,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.999.108,00	(892,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.999.108,00	(892,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.916.920.950,00	2.906.716.547,00	(10.204.403,00)	99,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	2.894.920.950,00	2.884.719.547,00	(10.201.403,00)	99,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	624.938.000,00	616.920.000,00	(8.018.000,00)	98,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	624.938.000,00	616.920.000,00	(8.018.000,00)	98,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.938.000,00	616.920.000,00	(8.018.000,00)	98,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1.341.471.000,00	1.341.425.000,00	(46.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.341.471.000,00	1.341.425.000,00	(46.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.341.471.000,00	1.341.425.000,00	(46.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	699.701.950,00	697.616.547,00	(2.085.403,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	447.258.050,00	446.201.547,00	(1.056.503,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.258.050,00	446.201.547,00	(1.056.503,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	252.443.900,00	251.415.000,00	(1.028.900,00)	99,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.443.900,00	251.415.000,00	(1.028.900,00)	99,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	29.710.000,00	29.703.000,00	(7.000,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.710.000,00	29.703.000,00	(7.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.710.000,00	29.703.000,00	(7.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	199.100.000,00	199.055.000,00	(45.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	199.100.000,00	199.055.000,00	(45.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.100.000,00	199.055.000,00	(45.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	22.000.000,00	21.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	22.000.000,00	21.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	154.402.000,00	115.145.000,00	(39.257.000,00)	74,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	154.402.000,00	115.145.000,00	(39.257.000,00)	74,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	67.602.000,00	28.350.000,00	(39.252.000,00)	41,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.602.000,00	28.350.000,00	(39.252.000,00)	41,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.602.000,00	28.350.000,00	(39.252.000,00)	41,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	86.800.000,00	86.795.000,00	(5.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	86.800.000,00	86.795.000,00	(5.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.800.000,00	86.795.000,00	(5.000,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	7.338.579.971,00	7.189.319.552,00	(149.260.419,00)	97,96	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.338.579.971,00)	(7.189.319.552,00)	149.260.419,00	97,96	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.338.579.971,00)	(7.189.319.552,00)	149.260.419,00	97,96	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Mollo Utara**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	1.566.269.127,00	1.538.892.665,00	(27.376.462,00)	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.562.039.127,00	1.534.672.665,00	(27.366.462,00)	98,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.505.000,00	38.505.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.430.000,00	35.430.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.430.000,00	35.430.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.430.000,00	35.430.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.398.130.511,00	1.371.173.189,00	(26.957.322,00)	98,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	(26.957.322,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	(26.957.322,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	(26.957.322,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	10.440.600,00	10.440.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.440.600,00	10.440.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.600,00	10.440.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.339.133,00	39.104.133,00	(235.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.302.250,00	2.302.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.302.250,00	2.302.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.302.250,00	2.302.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.000.000,00	12.765.000,00	(235.000,00)	98,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.765.000,00	(235.000,00)	98,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	12.765.000,00	(235.000,00)	98,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.489.250,00	6.489.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.489.250,00	6.489.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.489.250,00	6.489.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	17.547.633,00	17.547.633,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.547.633,00	17.547.633,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.547.633,00	17.547.633,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.926.400,00	23.752.260,00	(174.140,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.511.400,00	10.337.260,00	(174.140,00)	98,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.511.400,00	10.337.260,00	(174.140,00)	98,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.511.400,00	10.337.260,00	(174.140,00)	98,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.915.000,00	12.915.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.915.000,00	12.915.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.915.000,00	12.915.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.138.083,00	57.138.083,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	54.738.083,00	54.738.083,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.738.083,00	54.738.083,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.738.083,00	54.738.083,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.230.000,00	4.220.000,00	(10.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.230.000,00	4.220.000,00	(10.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.230.000,00	4.220.000,00	(10.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.230.000,00	4.220.000,00	(10.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	4.220.000,00	(10.000,00)	99,76	
				JUMLAH BELANJA	1.566.269.127,00	1.538.892.665,00	(27.376.462,00)	98,25	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.566.269.127,00)	(1.538.892.665,00)	27.376.462,00	98,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.566.269.127,00)	(1.538.892.665,00)	27.376.462,00	98,25	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Fatumnasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	1.159.939.032,00	1.131.818.820,00	(28.120.212,00)	97,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.152.489.032,00	1.124.368.820,00	(28.120.212,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.615.000,00	35.598.000,00	(17.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.315.000,00	5.298.000,00	(17.000,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.315.000,00	5.298.000,00	(17.000,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	5.298.000,00	(17.000,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	982.429.902,00	954.326.781,00	(28.103.121,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	971.334.902,00	943.231.781,00	(28.103.121,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	971.334.902,00	943.231.781,00	(28.103.121,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	971.334.902,00	943.231.781,00	(28.103.121,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	50.034.218,00	50.034.127,00	(91,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	815.365,00	815.365,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	815.365,00	815.365,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.365,00	815.365,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.119.841,00	3.119.750,00	(91,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.119.841,00	3.119.750,00	(91,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.119.841,00	3.119.750,00	(91,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	27.599.012,00	27.599.012,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.599.012,00	27.599.012,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.599.012,00	27.599.012,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.193.000,00	9.193.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.093.000,00	7.093.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.093.000,00	7.093.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.093.000,00	7.093.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.216.912,00	75.216.912,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	68.116.912,00	68.116.912,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.116.912,00	68.116.912,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.116.912,00	68.116.912,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.159.939.032,00	1.131.818.820,00	(28.120.212,00)	97,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.159.939.032,00)	(1.131.818.820,00)	28.120.212,00	97,57	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.159.939.032,00)	(1.131.818.820,00)	28.120.212,00	97,57	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tobu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	1.060.839.047,00	1.007.703.771,00	(53.135.276,00)	94,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.054.089.247,00	1.000.953.971,00	(53.135.276,00)	94,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.015.000,00	41.015.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	909.857.619,00	857.086.963,00	(52.770.656,00)	94,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	894.007.619,00	841.236.963,00	(52.770.656,00)	94,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	894.007.619,00	841.236.963,00	(52.770.656,00)	94,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	894.007.619,00	841.236.963,00	(52.770.656,00)	94,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12.130.000,00	12.130.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.130.000,00	12.130.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.130.000,00	12.130.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	34.720.808,00	34.720.508,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.910.300,00	7.910.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.910.300,00	7.910.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.910.300,00	7.910.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	20.498.508,00	20.498.508,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.498.508,00	20.498.508,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.498.508,00	20.498.508,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.358.320,00	18.314.486,00	(43.834,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.408.320,00	3.364.486,00	(43.834,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.408.320,00	3.364.486,00	(43.834,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.408.320,00	3.364.486,00	(43.834,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.137.500,00	49.817.014,00	(320.486,00)	99,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.137.500,00	43.817.014,00	(320.486,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.137.500,00	43.817.014,00	(320.486,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.137.500,00	43.817.014,00	(320.486,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.060.839.047,00	1.007.703.771,00	(53.135.276,00)	94,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.060.839.047,00)	(1.007.703.771,00)	53.135.276,00	94,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.060.839.047,00)	(1.007.703.771,00)	53.135.276,00	94,99	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Nunbena

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	1.086.568.301,00	1.069.534.094,00	(17.034.207,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.070.118.301,00	1.053.084.094,00	(17.034.207,00)	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.134.895,00	25.134.800,00	(95,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.089.895,00	5.089.800,00	(95,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.089.895,00	5.089.800,00	(95,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.089.895,00	5.089.800,00	(95,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.045.000,00	20.045.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.045.000,00	20.045.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.045.000,00	20.045.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	930.057.389,00	913.292.608,00	(16.764.781,00)	98,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	910.721.389,00	893.956.608,00	(16.764.781,00)	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	910.721.389,00	893.956.608,00	(16.764.781,00)	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	910.721.389,00	893.956.608,00	(16.764.781,00)	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	43.015.172,00	43.015.172,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	26.369.172,00	26.369.172,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	26.369.172,00	26.369.172,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.369.172,00	26.369.172,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.603.000,00	9.603.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.633.000,00	4.633.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.633.000,00	4.633.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.633.000,00	4.633.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.307.845,00	62.038.514,00	(269.331,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	46.307.845,00	46.038.514,00	(269.331,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.307.845,00	46.038.514,00	(269.331,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.307.845,00	46.038.514,00	(269.331,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.086.568.301,00	1.069.534.094,00	(17.034.207,00)	98,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.086.568.301,00)	(1.069.534.094,00)	17.034.207,00	98,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.086.568.301,00)	(1.069.534.094,00)	17.034.207,00	98,43	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Mollo Selatan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	1.292.960.014,00	1.230.123.952,00	(62.836.062,00)	95,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.284.800.014,00	1.227.723.952,00	(57.076.062,00)	95,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.261.000,00	26.680.000,00	(2.581.000,00)	91,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.981.000,00	7.480.000,00	(2.501.000,00)	74,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.981.000,00	7.480.000,00	(2.501.000,00)	74,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.981.000,00	7.480.000,00	(2.501.000,00)	74,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.280.000,00	19.200.000,00	(80.000,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	19.280.000,00	19.200.000,00	(80.000,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.280.000,00	19.200.000,00	(80.000,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.102.785.059,00	1.060.188.882,00	(42.596.177,00)	96,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	(35.398.177,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	(35.398.177,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	(35.398.177,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.768.000,00	2.570.000,00	(7.198.000,00)	26,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.768.000,00	2.570.000,00	(7.198.000,00)	26,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.768.000,00	2.570.000,00	(7.198.000,00)	26,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29.739.063,00	20.948.708,00	(8.790.355,00)	70,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	426.000,00	426.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	426.000,00	426.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.000,00	426.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.373.171,00	2.372.780,00	(391,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.373.171,00	2.372.780,00	(391,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.373.171,00	2.372.780,00	(391,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	26.939.892,00	18.149.928,00	(8.789.964,00)	67,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	26.939.892,00	18.149.928,00	(8.789.964,00)	67,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.939.892,00	18.149.928,00	(8.789.964,00)	67,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.050.000,00	9.941.550,00	(3.108.450,00)	76,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	5.919.550,00	(3.080.450,00)	65,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	5.919.550,00	(3.080.450,00)	65,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.919.550,00	(3.080.450,00)	65,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.690.000,00	3.662.000,00	(28.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.690.000,00	3.662.000,00	(28.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	3.662.000,00	(28.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.964.892,00	98.964.812,00	(80,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	86.964.892,00	86.964.812,00	(80,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.964.892,00	86.964.812,00	(80,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.964.892,00	86.964.812,00	(80,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.160.000,00	2.400.000,00	(5.760.000,00)	29,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	8.160.000,00	2.400.000,00	(5.760.000,00)	29,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	8.160.000,00	2.400.000,00	(5.760.000,00)	29,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	2.400.000,00	(5.760.000,00)	29,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	2.400.000,00	(5.760.000,00)	29,41	
				JUMLAH BELANJA	1.292.960.014,00	1.230.123.952,00	(62.836.062,00)	95,14	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.292.960.014,00)	(1.230.123.952,00)	62.836.062,00	95,14	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.292.960.014,00)	(1.230.123.952,00)	62.836.062,00	95,14	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Polen

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	(77.947.962,00)	93,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	(77.947.962,00)	93,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	59.210.000,00	59.210.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	59.210.000,00	59.210.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	59.210.000,00	59.210.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.210.000,00	59.210.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	997.021.867,00	921.982.323,00	(75.039.544,00)	92,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	990.061.867,00	915.022.323,00	(75.039.544,00)	92,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	990.061.867,00	915.022.323,00	(75.039.544,00)	92,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	990.061.867,00	915.022.323,00	(75.039.544,00)	92,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	26.668.608,00	26.668.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.847.600,00	11.847.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.347.600,00	7.347.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.347.600,00	7.347.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.347.600,00	7.347.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.319.400,00	30.410.982,00	(2.908.418,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.319.400,00	30.410.982,00	(2.908.418,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.319.400,00	30.410.982,00	(2.908.418,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.319.400,00	30.410.982,00	(2.908.418,00)	91,27	
				JUMLAH BELANJA	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	(77.947.962,00)	93,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.128.067.475,00)	(1.050.119.513,00)	77.947.962,00	93,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.128.067.475,00)	(1.050.119.513,00)	77.947.962,00	93,09	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Mollo Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	(35.382.664,00)	97,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	(35.382.664,00)	97,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	61.672.000,00	61.672.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	61.672.000,00	61.672.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	61.672.000,00	61.672.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.672.000,00	61.672.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.171.952.427,00	1.136.861.631,00	(35.090.795,00)	97,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	(35.090.795,00)	96,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	(35.090.795,00)	96,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	(35.090.795,00)	96,96	-
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	6.777.100,00	6.777.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.777.100,00	6.777.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.777.100,00	6.777.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5.927.323,48	5.927.250,00	(73,48)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.376.750,00	2.376.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.376.750,00	2.376.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.376.750,00	2.376.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.550.573,48	3.550.500,00	(73,48)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.550.573,48	3.550.500,00	(73,48)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.573,48	3.550.500,00	(73,48)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.195.184,52	61.903.390,00	(291.794,52)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	62.195.184,52	61.903.390,00	(291.794,52)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.195.184,52	61.903.390,00	(291.794,52)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.195.184,52	61.903.390,00	(291.794,52)	99,53	
				JUMLAH BELANJA	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	(35.382.664,00)	97,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.311.021.935,00)	(1.275.639.271,00)	35.382.664,00	97,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.311.021.935,00)	(1.275.639.271,00)	35.382.664,00	97,30	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Mollo Tengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	1.277.387.225,00	1.269.735.058,00	(7.652.167,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.267.442.225,00	1.259.840.058,00	(7.602.167,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.708.464,00	34.628.000,00	(80.464,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.183.464,00	9.103.000,00	(80.464,00)	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.183.464,00	9.103.000,00	(80.464,00)	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.183.464,00	9.103.000,00	(80.464,00)	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.111.848.345,00	1.104.405.282,00	(7.443.063,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	(7.443.063,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	(7.443.063,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	(7.443.063,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.714.120,00	9.714.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.714.120,00	9.714.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.714.120,00	9.714.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	27.844.844,00	27.844.822,00	(22,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.733.522,00	6.733.500,00	(22,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.733.522,00	6.733.500,00	(22,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.733.522,00	6.733.500,00	(22,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	18.214.072,00	18.214.072,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.214.072,00	18.214.072,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.214.072,00	18.214.072,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.185.500,00	13.112.350,00	(73.150,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.255.500,00	2.184.350,00	(71.150,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.255.500,00	2.184.350,00	(71.150,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.255.500,00	2.184.350,00	(71.150,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.430.000,00	9.428.000,00	(2.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.430.000,00	9.428.000,00	(2.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.430.000,00	9.428.000,00	(2.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	79.855.072,00	79.849.604,00	(5.468,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	67.855.072,00	67.849.604,00	(5.468,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.855.072,00	67.849.604,00	(5.468,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.855.072,00	67.849.604,00	(5.468,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.945.000,00	9.895.000,00	(50.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	9.945.000,00	9.895.000,00	(50.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	9.945.000,00	9.895.000,00	(50.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.945.000,00	9.895.000,00	(50.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.945.000,00	9.895.000,00	(50.000,00)	99,49	
				JUMLAH BELANJA	1.277.387.225,00	1.269.735.058,00	(7.652.167,00)	99,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.277.387.225,00)	(1.269.735.058,00)	7.652.167,00	99,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.277.387.225,00)	(1.269.735.058,00)	7.652.167,00	99,40	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Kota SoE**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	10.727.205.193,00	10.568.814.154,00	(158.391.039,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.516.705.193,00	8.361.342.848,00	(155.362.345,00)	98,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.270.906.373,00	8.116.473.457,00	(154.432.916,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	(154.432.916,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	(154.432.916,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	(154.432.916,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	69.580.400,00	69.580.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.580.400,00	69.580.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.580.400,00	69.580.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95.064.242,00	94.913.272,00	(150.970,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.888.370,00	23.887.400,00	(970,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.888.370,00	23.887.400,00	(970,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.888.370,00	23.887.400,00	(970,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	28.549.872,00	28.549.872,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.549.872,00	28.549.872,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.549.872,00	28.549.872,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	42.626.000,00	42.476.000,00	(150.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.626.000,00	42.476.000,00	(150.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.626.000,00	42.476.000,00	(150.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.576.000,00	101.283.780,00	(292.220,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.250.000,00	26.965.780,00	(284.220,00)	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.250.000,00	26.965.780,00	(284.220,00)	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	26.965.780,00	(284.220,00)	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	70.426.000,00	70.426.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.426.000,00	70.426.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.426.000,00	70.426.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.158.578,00	48.672.339,00	(486.239,00)	99,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	45.158.578,00	44.672.339,00	(486.239,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.158.578,00	44.672.339,00	(486.239,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.158.578,00	44.672.339,00	(486.239,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.200.000.000,00	2.196.971.306,00	(3.028.694,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	2.200.000.000,00	2.196.971.306,00	(3.028.694,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1.694.864.000,00	1.694.835.306,00	(28.694,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	220.689.890,00	220.667.034,00	(22.856,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.689.890,00	220.667.034,00	(22.856,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.474.174.110,00	1.474.168.272,00	(5.838,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.334.174.110,00	1.334.168.272,00	(5.838,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	505.136.000,00	502.136.000,00	(3.000.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	505.136.000,00	502.136.000,00	(3.000.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.136.000,00	502.136.000,00	(3.000.000,00)	99,40	
				JUMLAH BELANJA	10.727.205.193,00	10.568.814.154,00	(158.391.039,00)	98,52	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.727.205.193,00)	(10.568.814.154,00)	158.391.039,00	98,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.727.205.193,00)	(10.568.814.154,00)	158.391.039,00	98,52	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Amanuban Barat**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	1.459.065.858,00	1.437.602.531,00	(21.463.327,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.440.585.858,00	1.419.187.531,00	(21.398.327,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.808.000,00	31.723.000,00	(85.000,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.823.000,00	9.823.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.823.000,00	9.823.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.823.000,00	9.823.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.985.000,00	21.900.000,00	(85.000,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.985.000,00	21.900.000,00	(85.000,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.985.000,00	21.900.000,00	(85.000,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.316.258.050,00	1.294.944.723,00	(21.313.327,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	(21.313.327,00)	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	(21.313.327,00)	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	(21.313.327,00)	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	13.081.800,00	13.081.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.081.800,00	13.081.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.081.800,00	13.081.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	38.535.564,00	38.535.564,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.535.564,00	38.535.564,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.535.564,00	38.535.564,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	18.282.700,00	18.282.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.702.700,00	4.702.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.702.700,00	4.702.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.702.700,00	4.702.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.104.000,00	11.104.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	63.133.108,00	63.133.108,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	61.558.108,00	61.558.108,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.558.108,00	61.558.108,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.558.108,00	61.558.108,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.480.000,00	18.415.000,00	(65.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	18.480.000,00	18.415.000,00	(65.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	18.480.000,00	18.415.000,00	(65.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.480.000,00	18.415.000,00	(65.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	18.415.000,00	(65.000,00)	99,64	
				JUMLAH BELANJA	1.439.065.858,00	1.437.602.531,00	(21.463.327,00)	98,52	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.459.065.858,00)	(1.437.602.531,00)	21.463.327,00	98,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.459.065.858,00)	(1.437.602.531,00)	21.463.327,00	98,52	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Batuputih

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000		5	BELANJA DAERAH	1.578.898.020,42	1.512.936.586,00	(65.961.434,42)	95,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.578.898.020,42	1.512.936.586,00	(65.961.434,42)	95,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.407.178.975,00	1.344.193.630,00	(62.985.345,00)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	(62.985.145,00)	95,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	(62.985.145,00)	95,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	(62.985.145,00)	95,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	7.819.200,00	7.819.000,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.819.200,00	7.819.000,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.819.200,00	7.819.000,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	57.018.656,00	57.017.156,00	(1.500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.435.500,00	1.435.000,00	(500,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.435.500,00	1.435.000,00	(500,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.435.500,00	1.435.000,00	(500,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.241.750,00	5.241.500,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.241.750,00	5.241.500,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.241.750,00	5.241.500,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	36.341.406,00	36.340.656,00	(750,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.341.406,00	36.340.656,00	(750,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.341.406,00	36.340.656,00	(750,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.666.527,92	22.666.500,00	(27,92)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.322.527,92	8.322.500,00	(27,92)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.322.527,92	8.322.500,00	(27,92)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.322.527,92	8.322.500,00	(27,92)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.563.861,50	59.589.300,00	(2.974.561,50)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	62.563.861,50	59.589.300,00	(2.974.561,50)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.563.861,50	59.589.300,00	(2.974.561,50)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.563.861,50	59.589.300,00	(2.974.561,50)	95,24	
				JUMLAH BELANJA	1.578.898.020,42	1.512.936.586,00	(65.961.434,42)	95,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.578.898.020,42)	(1.512.936.586,00)	65.961.434,42	95,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.578.898.020,42)	(1.512.936.586,00)	65.961.434,42	95,82	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Kuatnana**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	1.441.238.652,00	1.397.611.577,00	(43.627.075,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.441.238.652,00	1.397.611.577,00	(43.627.075,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.807.000,00	20.630.000,00	(177.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.857.000,00	1.715.000,00	(142.000,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.857.000,00	1.715.000,00	(142.000,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.000,00	1.715.000,00	(142.000,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.950.000,00	18.915.000,00	(35.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.950.000,00	18.915.000,00	(35.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.950.000,00	18.915.000,00	(35.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.266.447.414,00	1.223.871.511,00	(42.575.903,00)	96,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	(42.575.903,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	(42.575.903,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	(42.575.903,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	36.245.108,00	36.245.108,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	578.000,00	578.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	578.000,00	578.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.000,00	578.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.892.500,00	3.892.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.892.500,00	3.892.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.892.500,00	3.892.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	17.974.608,00	17.974.608,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.974.608,00	17.974.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.974.608,00	17.974.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.855.000,00	11.855.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	105.884.130,00	105.009.958,00	(874.172,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.600.000,00	44.418.820,00	(181.180,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.600.000,00	44.418.820,00	(181.180,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	44.418.820,00	(181.180,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	51.284.130,00	50.591.138,00	(692.992,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.284.130,00	50.591.138,00	(692.992,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.284.130,00	50.591.138,00	(692.992,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.441.238.652,00	1.397.611.577,00	(43.627.075,00)	96,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.441.238.652,00)	(1.397.611.577,00)	43.627.075,00	96,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.441.238.652,00)	(1.397.611.577,00)	43.627.075,00	96,97	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Amanuban Selatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	1.221.807.322,00	1.202.943.501,00	(18.863.821,00)	98,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.195.347.322,00	1.176.483.501,00	(18.863.821,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.048.000.356,00	1.030.200.294,00	(17.800.062,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	(17.800.062,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	(17.800.062,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	(17.800.062,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.156.900,00	9.156.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.156.900,00	9.156.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.156.900,00	9.156.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	65.436.358,00	65.436.358,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.746.750,00	6.746.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.746.750,00	6.746.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.746.750,00	6.746.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	23.189.608,00	23.189.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.189.608,00	23.189.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.189.608,00	23.189.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.485.608,00	63.421.849,00	(1.063.759,00)	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	54.485.608,00	53.421.849,00	(1.063.759,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.485.608,00	53.421.849,00	(1.063.759,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.485.608,00	53.421.849,00	(1.063.759,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.221.807.322,00	1.202.943.501,00	(18.863.821,00)	98,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.221.807.322,00)	(1.202.943.501,00)	18.863.821,00	98,45	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.221.807.322,00)	(1.202.943.501,00)	18.863.821,00	98,45	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN ADMINISTRASI**
Organisasi : **Kecamatan Amanuban Selatan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	980.250,00	980.250,00	0,00	100,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(980.250,00)	(980.250,00)	0,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(980.250,00)	(980.250,00)	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Noebeba

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000		5	BELANJA DAERAH	1.098.080.305,00	1.040.437.136,00	(57.643.169,00)	94,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.084.701.605,00	1.027.058.636,00	(57.642.969,00)	94,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.144.600,00	28.144.000,00	(600,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.984.600,00	9.984.000,00	(600,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.984.600,00	9.984.000,00	(600,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.984.600,00	9.984.000,00	(600,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	938.029.673,00	880.725.528,00	(57.304.145,00)	93,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	923.190.423,00	865.886.528,00	(57.303.895,00)	93,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	923.190.423,00	865.886.528,00	(57.303.895,00)	93,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	923.190.423,00	865.886.528,00	(57.303.895,00)	93,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	7.879.250,00	7.879.000,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.879.250,00	7.879.000,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.879.250,00	7.879.000,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	7.158.500,00	7.158.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.318.500,00	6.318.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.318.500,00	6.318.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.318.500,00	6.318.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.344.224,00	14.343.000,00	(1.224,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.144.224,00	4.143.000,00	(1.224,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.144.224,00	4.143.000,00	(1.224,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.144.224,00	4.143.000,00	(1.224,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	79.024.608,00	78.687.608,00	(337.000,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	68.919.608,00	68.582.608,00	(337.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.919.608,00	68.582.608,00	(337.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.919.608,00	68.582.608,00	(337.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.378.700,00	13.378.500,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	13.378.700,00	13.378.500,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	13.378.700,00	13.378.500,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.378.700,00	13.378.500,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.378.700,00	13.378.500,00	(200,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	1.098.080.305,00	1.040.437.136,00	(57.643.169,00)	94,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.098.080.305,00)	(1.040.437.136,00)	57.643.169,00	94,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.098.080.305,00)	(1.040.437.136,00)	57.643.169,00	94,75	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Kuanfatu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	1.394.482.853,00	1.330.452.939,00	(64.029.914,00)	95,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.394.482.853,00	1.330.452.939,00	(64.029.914,00)	95,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.239.508.439,00	1.178.513.875,00	(60.994.564,00)	95,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	(60.994.064,00)	95,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	(60.994.064,00)	95,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	(60.994.064,00)	95,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	6.310.000,00	6.309.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.310.000,00	6.309.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	6.309.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	47.481.064,00	47.481.064,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.536.456,00	6.536.456,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.536.456,00	6.536.456,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.536.456,00	6.536.456,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.144.608,00	40.144.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.144.608,00	24.144.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.144.608,00	24.144.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0007	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.524.000,00	19.502.000,00	(22.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.059.000,00	3.037.000,00	(22.000,00)	99,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.059.000,00	3.037.000,00	(22.000,00)	99,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.059.000,00	3.037.000,00	(22.000,00)	99,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	56.719.350,00	53.706.000,00	(3.013.350,00)	94,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	50.834.350,00	47.821.000,00	(3.013.350,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.834.350,00	47.821.000,00	(3.013.350,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.834.350,00	47.821.000,00	(3.013.350,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.394.482.853,00	1.330.452.939,00	(64.029.914,00)	95,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.394.482.853,00)	(1.330.452.939,00)	64.029.914,00	95,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.394.482.853,00)	(1.330.452.939,00)	64.029.914,00	95,40	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Kualin**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	1.294.689.826,00	1.276.074.579,00	(18.615.247,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.293.989.826,00	1.275.374.579,00	(18.615.247,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.129.748.609,00	1.111.983.362,00	(17.765.247,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	(17.765.247,00)	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	(17.765.247,00)	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	(17.765.247,00)	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	3.066.400,00	3.066.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.066.400,00	3.066.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.066.400,00	3.066.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	9.065.000,00	9.065.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.065.000,00	9.065.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.065.000,00	9.065.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	11.195.457,00	11.195.457,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	722.200,00	722.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	722.200,00	722.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.200,00	722.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.915.000,00	23.065.000,00	(850.000,00)	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.750.000,00	6.900.000,00	(850.000,00)	89,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.750.000,00	6.900.000,00	(850.000,00)	89,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	6.900.000,00	(850.000,00)	89,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.480.760,00	93.480.760,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	77.249.172,00	77.249.172,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.249.172,00	77.249.172,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.249.172,00	77.249.172,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	11.231.588,00	11.231.588,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.231.588,00	11.231.588,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.231.588,00	11.231.588,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.294.689.826,00	1.276.074.579,00	(18.615.247,00)	98,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.294.689.826,00)	(1.276.074.579,00)	18.615.247,00	98,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.294.689.826,00)	(1.276.074.579,00)	18.615.247,00	98,56	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Amanuban Tengah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	2.248.221.278,00	2.207.392.211,00	(40.829.067,00)	98,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.045.721.878,00	2.004.893.211,00	(40.828.667,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.923.000,00	3.900.000,00	(23.000,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.923.000,00	3.900.000,00	(23.000,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.923.000,00	3.900.000,00	(23.000,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.923.000,00	3.900.000,00	(23.000,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.869.985.300,00	1.834.153.888,00	(35.831.412,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	(35.830.487,00)	98,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	(35.830.487,00)	98,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	(35.830.487,00)	98,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	13.833.200,00	13.832.275,00	(925,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.833.200,00	13.832.275,00	(925,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.833.200,00	13.832.275,00	(925,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.209.614,00	51.022.248,00	(2.187.366,00)	95,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.455.500,00	11.455.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.455.500,00	11.455.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.455.500,00	11.455.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	20.879.114,00	18.691.748,00	(2.187.366,00)	89,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.879.114,00	18.691.748,00	(2.187.366,00)	89,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.879.114,00	18.691.748,00	(2.187.366,00)	89,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.630.069,00	34.523.675,00	(106.394,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.806.069,00	11.699.675,00	(106.394,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.806.069,00	11.699.675,00	(106.394,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.806.069,00	11.699.675,00	(106.394,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	18.274.000,00	18.274.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.274.000,00	18.274.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.274.000,00	18.274.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.973.895,00	81.293.400,00	(2.680.495,00)	96,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	79.973.895,00	77.293.400,00	(2.680.495,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.973.895,00	77.293.400,00	(2.680.495,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.973.895,00	77.293.400,00	(2.680.495,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.499.400,00	2.499.000,00	(400,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	2.499.400,00	2.499.000,00	(400,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.499.400,00	2.499.000,00	(400,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.499.400,00	2.499.000,00	(400,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.400,00	2.499.000,00	(400,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.248.221.278,00	2.207.392.211,00	(40.829.067,00)	98,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.248.221.278,00)	(2.207.392.211,00)	40.829.067,00	98,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.248.221.278,00)	(2.207.392.211,00)	40.829.067,00	98,18	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Kolbano**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	1.334.234.718,00	1.299.846.938,00	(34.387.780,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.314.234.718,00	1.279.846.938,00	(34.387.780,00)	97,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	(24.040.989,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	(24.040.989,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	(24.040.989,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	(24.040.989,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	19.856.358,00	19.856.358,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.261.750,00	2.261.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.261.750,00	2.261.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.750,00	2.261.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34.855.000,00	30.937.500,00	(3.917.500,00)	88,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.855.000,00	30.937.500,00	(3.917.500,00)	88,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	34.855.000,00	30.937.500,00	(3.917.500,00)	88,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.855.000,00	30.937.500,00	(3.917.500,00)	88,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.020.000,00	20.185.500,00	(3.834.500,00)	84,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.950.000,00	3.115.500,00	(3.834.500,00)	44,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.950.000,00	3.115.500,00	(3.834.500,00)	44,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	3.115.500,00	(3.834.500,00)	44,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.827.788,00	75.232.997,00	(2.594.791,00)	96,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	67.827.788,00	65.232.997,00	(2.594.791,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.827.788,00	65.232.997,00	(2.594.791,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.827.788,00	65.232.997,00	(2.594.791,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.334.234.718,00	1.299.846.938,00	(34.387.780,00)	97,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.334.234.718,00)	(1.299.846.938,00)	34.387.780,00	97,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.334.234.718,00)	(1.299.846.938,00)	34.387.780,00	97,42	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Oenino

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000		5	BELANJA DAERAH	1.034.295.127,00	1.066.722.745,00	(27.572.382,00)	97,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.039.845.127,00	1.062.272.745,00	(27.572.382,00)	97,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	949.934.171,00	922.363.789,00	(27.570.382,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	917.904.171,00	890.333.789,00	(27.570.382,00)	96,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	917.904.171,00	890.333.789,00	(27.570.382,00)	96,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	917.904.171,00	890.333.789,00	(27.570.382,00)	96,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.990.000,00	17.988.000,00	(2.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	350.000,00	348.000,00	(2.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	348.000,00	(2.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	348.000,00	(2.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	91.120.956,00	91.120.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	81.120.956,00	81.120.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.120.956,00	81.120.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.120.956,00	81.120.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.094.295.127,00	1.066.722.745,00	(27.572.382,00)	97,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.094.295.127,00)	(1.066.722.745,00)	27.572.382,00	97,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.094.295.127,00)	(1.066.722.745,00)	27.572.382,00	97,48	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Amanuban Timur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		5	BELANJA DAERAH	1.668.522.181,00	1.616.277.251,00	(52.244.930,00)	96,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.664.446.681,00	1.612.201.751,00	(52.244.930,00)	96,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.555.000,00	39.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.575.000,00	33.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.575.000,00	33.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.575.000,00	23.575.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.493.231.003,00	1.458.804.439,00	(34.426.564,00)	97,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	(34.116.464,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	(34.116.464,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	(34.116.464,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	10.726.600,00	10.726.500,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.726.600,00	10.726.500,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.726.600,00	10.726.500,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	9.470.000,00	9.160.000,00	(310.000,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.470.000,00	9.160.000,00	(310.000,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	9.160.000,00	(310.000,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	22.026.758,00	19.817.086,00	(2.209.672,00)	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.248.891,00	1.248.500,00	(391,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.248.891,00	1.248.500,00	(391,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.248.891,00	1.248.500,00	(391,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.459.000,00	4.459.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.459.000,00	4.459.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.459.000,00	4.459.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	16.318.867,00	14.109.586,00	(2.209.281,00)	86,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.318.867,00	14.109.586,00	(2.209.281,00)	86,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.318.867,00	14.109.586,00	(2.209.281,00)	86,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	95.933.920,00	80.325.226,00	(15.608.694,00)	83,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	85.933.920,00	70.325.226,00	(15.608.694,00)	81,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.933.920,00	70.325.226,00	(15.608.694,00)	81,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.933.920,00	70.325.226,00	(15.608.694,00)	81,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.668.522.181,00	1.616.277.251,00	(52.244.930,00)	96,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.668.522.181,00)	(1.616.277.251,00)	52.244.930,00	96,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.668.522.181,00)	(1.616.277.251,00)	52.244.930,00	96,86	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Fautmolo

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		5	BELANJA DAERAH	1.245.628.254,00	1.226.309.651,00	(19.318.603,00)	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.225.628.254,00	1.206.309.651,00	(19.318.603,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.580.000,00	23.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.077.277.297,00	1.058.311.089,00	(18.966.208,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	(18.966.208,00)	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	(18.966.208,00)	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	(18.966.208,00)	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.140.957,00	39.061.562,00	(79.395,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	27.727.957,00	27.648.562,00	(79.395,00)	99,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.727.957,00	27.648.562,00	(79.395,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.727.957,00	27.648.562,00	(79.395,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.260.000,00	29.260.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	56.370.000,00	56.097.000,00	(273.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	46.370.000,00	46.097.000,00	(273.000,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.370.000,00	46.097.000,00	(273.000,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.370.000,00	46.097.000,00	(273.000,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.245.628.254,00	1.226.309.651,00	(19.318.603,00)	98,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.245.628.254,00)	(1.226.309.651,00)	19.318.603,00	98,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.245.628.254,00)	(1.226.309.651,00)	19.318.603,00	98,44	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Fatukopa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		5	BELANJA DAERAH	1.115.863.324,00	1.093.381.727,00	(22.481.597,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.100.963.324,00	1.078.481.727,00	(22.481.597,00)	97,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.110.000,00	24.110.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	945.510.716,00	923.029.119,00	(22.481.597,00)	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	935.070.716,00	912.589.119,00	(22.481.597,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	935.070.716,00	912.589.119,00	(22.481.597,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	935.070.716,00	912.589.119,00	(22.481.597,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	44.170.108,00	44.170.108,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.302.171,00	16.302.171,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.302.171,00	16.302.171,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.302.171,00	16.302.171,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	16.095.437,00	16.095.437,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.095.437,00	16.095.437,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.095.437,00	16.095.437,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.385.500,00	21.385.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.607.500,00	7.607.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.607.500,00	7.607.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.607.500,00	7.607.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.218.000,00	12.218.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.218.000,00	12.218.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.218.000,00	12.218.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.580.000,00	62.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.115.863.324,00	1.093.381.727,00	(22.481.597,00)	97,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.115.863.324,00)	(1.093.381.727,00)	22.481.597,00	97,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.115.863.324,00)	(1.093.381.727,00)	22.481.597,00	97,98	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan KiE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		5	BELANJA DAERAH	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	(14.459.638,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	(14.459.638,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.150.843.343,00	1.136.383.705,00	(14.459.638,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	(14.459.638,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	(14.459.638,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	(14.459.638,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	14.136.900,00	14.136.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.136.900,00	14.136.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.136.900,00	14.136.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	45.802.276,00	45.802.276,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.316.276,00	2.316.276,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.316.276,00	2.316.276,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.276,00	2.316.276,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	37.910.000,00	37.910.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.910.000,00	37.910.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.910.000,00	37.910.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.630.907,00	43.630.907,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	34.480.907,00	34.480.907,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.480.907,00	34.480.907,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.480.907,00	34.480.907,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.219.096,00	74.219.096,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	64.219.096,00	64.219.096,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.219.096,00	64.219.096,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.219.096,00	64.219.096,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	(14.459.638,00)	98,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.314.495.622,00)	(1.300.035.984,00)	14.459.638,00	98,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.314.495.622,00)	(1.300.035.984,00)	14.459.638,00	98,89	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Kot''olin

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		5	BELANJA DAERAH	1.278.292.625,00	1.230.946.236,00	(47.346.389,00)	96,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.274.417.625,00	1.227.546.236,00	(46.871.389,00)	96,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.148.000,00	28.148.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.111.929.625,00	1.077.589.762,00	(34.339.863,00)	96,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.098.950.625,00	1.065.262.762,00	(33.687.863,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.098.950.625,00	1.065.262.762,00	(33.687.863,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.098.950.625,00	1.065.262.762,00	(33.687.863,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	5.079.000,00	4.527.000,00	(552.000,00)	89,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.079.000,00	4.527.000,00	(552.000,00)	89,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.079.000,00	4.527.000,00	(552.000,00)	89,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.420.000,00	53.377.000,00	(1.043.000,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.070.000,00	1.027.000,00	(1.043.000,00)	49,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.070.000,00	1.027.000,00	(1.043.000,00)	49,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	1.027.000,00	(1.043.000,00)	49,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.260.000,00	8.768.000,00	(492.000,00)	94,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.100.000,00	3.608.000,00	(492.000,00)	88,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	3.608.000,00	(492.000,00)	88,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	3.608.000,00	(492.000,00)	88,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.660.000,00	59.663.474,00	(10.996.526,00)	84,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	60.700.000,00	59.663.474,00	(1.036.526,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.700.000,00	59.663.474,00	(1.036.526,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.700.000,00	59.663.474,00	(1.036.526,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	9.960.000,00	0,00	(9.960.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.960.000,00	0,00	(9.960.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	0,00	(9.960.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.875.000,00	3.400.000,00	(475.000,00)	87,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	3.875.000,00	3.400.000,00	(475.000,00)	87,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.875.000,00	3.400.000,00	(475.000,00)	87,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.875.000,00	3.400.000,00	(475.000,00)	87,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	3.400.000,00	(475.000,00)	87,74	
				JUMLAH BELANJA	1.278.292.625,00	1.230.946.236,00	(47.346.389,00)	96,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.278.292.625,00)	(1.230.946.236,00)	47.346.389,00	96,29	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.278.292.625,00)	(1.230.946.236,00)	47.346.389,00	96,29	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Amanatun Selatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		5	BELANJA DAERAH	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	(53.805.501,00)	95,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	(53.805.501,00)	95,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	49.130.000,00	27.400.000,00	(21.730.000,00)	55,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	49.130.000,00	27.400.000,00	(21.730.000,00)	55,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.130.000,00	27.400.000,00	(21.730.000,00)	55,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.130.000,00	27.400.000,00	(21.730.000,00)	55,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.136.402.094,00	1.121.658.030,00	(14.744.064,00)	98,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	(14.743.014,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	(14.743.014,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	(14.743.014,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4.252.000,00	4.250.950,00	(1.050,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.252.000,00	4.250.950,00	(1.050,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.252.000,00	4.250.950,00	(1.050,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	16.472.456,00	16.471.706,00	(750,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	583.750,00	583.000,00	(750,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	583.750,00	583.000,00	(750,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.750,00	583.000,00	(750,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.517.750,00	2.517.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.517.750,00	2.517.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.517.750,00	2.517.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	13.370.956,00	13.370.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.370.956,00	13.370.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.370.956,00	13.370.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.611.487,00	15.234.800,00	(376.687,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	864.000,00	860.000,00	(4.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	864.000,00	860.000,00	(4.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.000,00	860.000,00	(4.000,00)	99,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.902.487,00	5.879.800,00	(22.687,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.902.487,00	5.879.800,00	(22.687,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.902.487,00	5.879.800,00	(22.687,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	850.000,00	500.000,00	(350.000,00)	58,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	850.000,00	500.000,00	(350.000,00)	58,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	500.000,00	(350.000,00)	58,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	112.229.608,00	95.275.608,00	(16.954.000,00)	84,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	92.229.608,00	75.313.608,00	(16.916.000,00)	81,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.229.608,00	75.313.608,00	(16.916.000,00)	81,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.229.608,00	75.313.608,00	(16.916.000,00)	81,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	19.962.000,00	(38.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.962.000,00	(38.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.962.000,00	(38.000,00)	99,81	
				JUMLAH BELANJA	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	(53.805.501,00)	95,95	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.329.845.645,00)	(1.276.040.144,00)	53.805.501,00	95,95	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.329.845.645,00)	(1.276.040.144,00)	53.805.501,00	95,95	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Boking

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		5	BELANJA DAERAH	1.240.737.847,00	1.227.224.160,00	(13.513.687,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.226.339.647,00	1.212.825.960,00	(13.513.687,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.677.900,00	39.677.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.437.900,00	5.437.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.437.900,00	5.437.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.437.900,00	5.437.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.240.000,00	34.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.240.000,00	34.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.240.000,00	34.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.061.021.775,00	1.049.260.689,00	(11.761.086,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.048.797.675,00	1.037.036.589,00	(11.761.086,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.048.797.675,00	1.037.036.589,00	(11.761.086,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.797.675,00	1.037.036.589,00	(11.761.086,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	35.857.981,00	34.639.829,00	(1.218.152,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.983.587,00	2.983.587,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.983.587,00	2.983.587,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.983.587,00	2.983.587,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	31.720.394,00	30.502.242,00	(1.218.152,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.720.394,00	30.502.242,00	(1.218.152,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.720.394,00	30.502.242,00	(1.218.152,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.331.063,00	14.238.750,00	(92.313,00)	99,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.906.063,00	6.813.750,00	(92.313,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.906.063,00	6.813.750,00	(92.313,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.906.063,00	6.813.750,00	(92.313,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.450.928,00	75.008.792,00	(442.136,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	65.450.928,00	65.008.792,00	(442.136,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.450.928,00	65.008.792,00	(442.136,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.450.928,00	65.008.792,00	(442.136,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.240.737.847,00	1.227.224.160,00	(13.513.687,00)	98,91	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.240.737.847,00)	(1.227.224.160,00)	13.513.687,00	98,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.240.737.847,00)	(1.227.224.160,00)	13.513.687,00	98,91	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Nunkolo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		5	BELANJA DAERAH	1.231.126.893,00	1.204.205.853,00	(26.921.040,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.231.126.893,00	1.204.205.853,00	(26.921.040,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.072.902.169,00	1.050.422.771,00	(22.479.398,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	(22.479.398,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	(22.479.398,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	(22.479.398,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	16.604.700,00	16.604.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.604.700,00	16.604.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.604.700,00	16.604.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	33.577.794,00	29.140.152,00	(4.437.642,00)	86,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.012.206,00	3.012.206,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.012.206,00	3.012.206,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.012.206,00	3.012.206,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	17.622.588,00	13.184.946,00	(4.437.642,00)	74,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.622.588,00	13.184.946,00	(4.437.642,00)	74,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.622.588,00	13.184.946,00	(4.437.642,00)	74,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.466.430,00	27.462.430,00	(4.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.326.430,00	7.322.430,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.326.430,00	7.322.430,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.326.430,00	7.322.430,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.545.500,00	77.545.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	72.045.500,00	72.045.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.045.500,00	72.045.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.045.500,00	72.045.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.231.126.893,00	1.204.205.853,00	(26.921.040,00)	97,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.231.126.893,00)	(1.204.205.853,00)	26.921.040,00	97,81	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.231.126.893,00)	(1.204.205.853,00)	26.921.040,00	97,81	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Noebana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		5	BELANJA DAERAH	1.037.915.184,50	1.001.431.444,50	(36.483.740,00)	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.017.915.184,50	987.301.444,50	(30.613.740,00)	96,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.936.000,00	20.809.000,00	(127.000,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.967.000,00	(33.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.967.000,00	(33.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.967.000,00	(33.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.936.000,00	10.842.000,00	(94.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.936.000,00	10.842.000,00	(94.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.936.000,00	10.842.000,00	(94.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	863.428.160,00	833.460.004,00	(29.968.156,00)	96,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	844.627.960,00	814.693.370,00	(29.934.590,00)	96,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	844.627.960,00	814.693.370,00	(29.934.590,00)	96,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	844.627.960,00	814.693.370,00	(29.934.590,00)	96,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	6.080.200,00	6.046.634,00	(33.566,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.080.200,00	6.046.634,00	(33.566,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.080.200,00	6.046.634,00	(33.566,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	40.542.416,50	40.490.992,50	(51.424,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.150.235,00	2.146.000,00	(4.235,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.235,00	2.146.000,00	(4.235,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.235,00	2.146.000,00	(4.235,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.716.376,00	18.700.000,00	(16.376,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	18.716.376,00	18.700.000,00	(16.376,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.219.876,00	15.203.500,00	(16.376,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.081.197,50	2.050.384,50	(30.813,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.081.197,50	2.050.384,50	(30.813,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.081.197,50	2.050.384,50	(30.813,00)	98,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.198.000,00	10.094.500,00	(103.500,00)	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.248.000,00	2.144.500,00	(103.500,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.248.000,00	2.144.500,00	(103.500,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.248.000,00	2.144.500,00	(103.500,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82.810.608,00	82.446.948,00	(363.660,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	78.060.608,00	77.696.948,00	(363.660,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.060.608,00	77.696.948,00	(363.660,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.060.608,00	77.696.948,00	(363.660,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	14.130.000,00	(5.870.000,00)	70,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	20.000.000,00	14.130.000,00	(5.870.000,00)	70,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	20.000.000,00	14.130.000,00	(5.870.000,00)	70,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	14.130.000,00	(5.870.000,00)	70,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.130.000,00	(5.870.000,00)	70,65	
				JUMLAH BELANJA	1.037.915.184,50	1.001.431.444,50	(36.483.740,00)	96,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.037.915.184,50)	(1.001.431.444,50)	36.483.740,00	96,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.037.915.184,50)	(1.001.431.444,50)	36.483.740,00	96,48	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Santian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		5	BELANJA DAERAH	1.213.025.405,00	1.186.294.242,00	(26.731.163,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.208.115.405,00	1.181.424.242,00	(26.691.163,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.130.000,00	28.025.000,00	(105.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.130.000,00	7.025.000,00	(105.000,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.130.000,00	7.025.000,00	(105.000,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.130.000,00	7.025.000,00	(105.000,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.065.750.917,00	1.040.428.401,00	(25.322.516,00)	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	(25.322.516,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	(25.322.516,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	(25.322.516,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	35.693.858,00	35.693.858,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.524.250,00	4.524.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.524.250,00	4.524.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.524.250,00	4.524.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.340.630,00	60.076.983,00	(1.263.647,00)	97,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	51.340.630,00	50.076.983,00	(1.263.647,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.340.630,00	50.076.983,00	(1.263.647,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.340.630,00	50.076.983,00	(1.263.647,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.910.000,00	4.870.000,00	(40.000,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.910.000,00	4.870.000,00	(40.000,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.910.000,00	4.870.000,00	(40.000,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.910.000,00	4.870.000,00	(40.000,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	4.870.000,00	(40.000,00)	99,18	
				JUMLAH BELANJA	1.213.025.405,00	1.186.294.242,00	(26.731.163,00)	97,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.213.025.405,00)	(1.186.294.242,00)	26.731.163,00	97,79	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.213.025.405,00)	(1.186.294.242,00)	26.731.163,00	97,79	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Amanatun Utara**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		5	BELANJA DAERAH	1.284.324.752,92	1.237.716.827,00	(46.607.925,92)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.277.244.752,92	1.230.636.827,00	(46.607.925,92)	96,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.565.000,00	34.565.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.665.000,00	29.665.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.665.000,00	29.665.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.665.000,00	29.665.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.129.533.947,00	1.086.102.341,00	(43.431.606,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	(43.431.606,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	(43.431.606,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	(43.431.606,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12.208.800,00	12.208.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.208.800,00	12.208.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.208.800,00	12.208.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	38.378.305,92	35.201.986,00	(3.176.319,92)	91,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.760.900,00	1.760.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.760.900,00	1.760.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.900,00	1.760.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.611.612,50	5.611.500,00	(112,50)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.611.612,50	5.611.500,00	(112,50)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.611.612,50	5.611.500,00	(112,50)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	18.505.793,42	15.329.586,00	(3.176.207,42)	82,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.505.793,42	15.329.586,00	(3.176.207,42)	82,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.505.793,42	15.329.586,00	(3.176.207,42)	82,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.327.500,00	14.327.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.284.324.752,92	1.237.716.827,00	(46.607.925,92)	96,37	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.284.324.752,92)	(1.237.716.827,00)	46.607.925,92	96,37	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.284.324.752,92)	(1.237.716.827,00)	46.607.925,92	96,37	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Toianas**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		5	BELANJA DAERAH	1.132.041.150,00	1.068.938.103,00	(63.103.047,00)	94,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.116.461.150,00	1.053.358.103,00	(63.103.047,00)	94,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	960.143.638,00	911.950.794,00	(48.192.844,00)	94,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	940.799.238,00	892.606.394,00	(48.192.844,00)	94,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	940.799.238,00	892.606.394,00	(48.192.844,00)	94,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	940.799.238,00	892.606.394,00	(48.192.844,00)	94,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	8.904.400,00	8.904.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.904.400,00	8.904.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.904.400,00	8.904.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.689.262,00	39.689.262,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.155.654,00	10.155.654,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.155.654,00	10.155.654,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.155.654,00	10.155.654,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	29.533.608,00	29.533.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.533.608,00	29.533.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.533.608,00	29.533.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.367.500,00	13.316.000,00	(51.500,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.467.500,00	7.416.000,00	(51.500,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.467.500,00	7.416.000,00	(51.500,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.467.500,00	7.416.000,00	(51.500,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.740.750,00	68.882.047,00	(14.858.703,00)	82,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	73.740.750,00	58.882.047,00	(14.858.703,00)	79,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.740.750,00	58.882.047,00	(14.858.703,00)	79,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.740.750,00	58.882.047,00	(14.858.703,00)	79,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.132.041.150,00	1.068.938.103,00	(63.103.047,00)	94,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.132.041.150,00)	(1.068.938.103,00)	63.103.047,00	94,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.132.041.150,00)	(1.068.938.103,00)	63.103.047,00	94,42	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Kokbaun

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		5	BELANJA DAERAH	1.172.487.035,00	1.080.800.507,00	(91.686.528,00)	92,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.150.766.135,00	1.071.215.507,00	(79.550.628,00)	93,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.587.100,00	32.266.100,00	(3.321.000,00)	90,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.736.000,00	4.415.000,00	(3.321.000,00)	57,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.736.000,00	4.415.000,00	(3.321.000,00)	57,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.736.000,00	4.415.000,00	(3.321.000,00)	57,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	27.851.100,00	27.851.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.851.100,00	27.851.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.851.100,00	27.851.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.022.430.874,42	946.215.534,00	(76.215.340,42)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	953.312.618,00	895.997.666,00	(57.314.952,00)	93,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	953.312.618,00	895.997.666,00	(57.314.952,00)	93,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	953.312.618,00	895.997.666,00	(57.314.952,00)	93,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	65.063.256,42	46.162.868,00	(18.900.388,42)	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	65.063.256,42	46.162.868,00	(18.900.388,42)	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.063.256,42	46.162.868,00	(18.900.388,42)	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	7.409.265,00	7.409.265,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.453.265,00	3.453.265,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.453.265,00	3.453.265,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.453.265,00	3.453.265,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.807.090,00	15.800.000,00	(7.090,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.797.090,00	4.790.000,00	(7.090,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.797.090,00	4.790.000,00	(7.090,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.797.090,00	4.790.000,00	(7.090,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	69.531.805,58	69.524.608,00	(7.197,58)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	62.244.608,00	62.244.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.244.608,00	62.244.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.244.608,00	62.244.608,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	7.287.197,58	7.280.000,00	(7.197,58)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.287.197,58	7.280.000,00	(7.197,58)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.287.197,58	7.280.000,00	(7.197,58)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.720.900,00	9.585.000,00	(12.135.900,00)	44,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	21.720.900,00	9.585.000,00	(12.135.900,00)	44,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	21.720.900,00	9.585.000,00	(12.135.900,00)	44,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.720.900,00	9.585.000,00	(12.135.900,00)	44,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.720.900,00	9.585.000,00	(12.135.900,00)	44,12	
				JUMLAH BELANJA	1.172.487.035,00	1.080.800.507,00	(91.686.528,00)	92,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.172.487.035,00)	(1.080.800.507,00)	91.686.528,00	92,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.172.487.035,00)	(1.080.800.507,00)	91.686.528,00	92,18	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.170.606.154,00	4.106.362.119,00	(1.064.244.035,00)	79,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.503.404,00	1.698.965.017,00	(230.538.387,00)	88,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.200.000,00	16.700.000,00	(1.500.000,00)	91,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.731.264.234,00	1.505.942.365,00	(225.321.869,00)	86,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	(219.889.244,00)	85,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	(219.889.244,00)	85,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	(219.889.244,00)	85,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	247.493.753,00	245.061.128,00	(2.432.625,00)	99,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	247.493.753,00	245.061.128,00	(2.432.625,00)	99,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.493.753,00	245.061.128,00	(2.432.625,00)	99,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	8.500.000,00	5.500.000,00	(3.000.000,00)	64,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	5.500.000,00	(3.000.000,00)	64,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	5.500.000,00	(3.000.000,00)	64,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0007		PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	35.304.250,00	35.210.950,00	(93.300,00)	99,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.032.750,00	10.032.750,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.032.750,00	10.032.750,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.032.750,00	10.032.750,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	23.029.000,00	22.935.700,00	(93.300,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.029.000,00	22.935.700,00	(93.300,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.029.000,00	22.935.700,00	(93.300,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59.095.700,00	58.676.700,00	(419.000,00)	99,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.835.000,00	14.436.000,00	(399.000,00)	97,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.835.000,00	14.436.000,00	(399.000,00)	97,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.835.000,00	14.436.000,00	(399.000,00)	97,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	42.268.700,00	42.248.700,00	(20.000,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.268.700,00	22.268.700,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.268.700,00	22.268.700,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	80.589.220,00	77.385.002,00	(3.204.218,00)	96,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	80.589.220,00	77.385.002,00	(3.204.218,00)	96,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.589.220,00	77.385.002,00	(3.204.218,00)	96,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.589.220,00	77.385.002,00	(3.204.218,00)	96,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	539.270.250,00	536.334.875,00	(2.935.375,00)	99,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	539.270.250,00	536.334.875,00	(2.935.375,00)	99,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	539.270.250,00	536.334.875,00	(2.935.375,00)	99,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	539.270.250,00	536.334.875,00	(2.935.375,00)	99,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.270.250,00	536.334.875,00	(2.935.375,00)	99,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.565.256.000,00	742.922.727,00	(822.333.273,00)	47,46	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1.565.256.000,00	742.922.727,00	(822.333.273,00)	47,46	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	1.519.781.000,00	698.352.727,00	(821.428.273,00)	45,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.519.781.000,00	698.352.727,00	(821.428.273,00)	45,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.700.000,00	93.914.800,00	(785.200,00)	99,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.425.081.000,00	604.437.927,00	(820.643.073,00)	42,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	39.937.000,00	39.387.000,00	(550.000,00)	98,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.937.000,00	39.387.000,00	(550.000,00)	98,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.937.000,00	39.387.000,00	(550.000,00)	98,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	5.538.000,00	5.183.000,00	(355.000,00)	93,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.538.000,00	5.183.000,00	(355.000,00)	93,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.538.000,00	5.183.000,00	(355.000,00)	93,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.136.576.500,00	1.128.139.500,00	(8.437.000,00)	99,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.136.576.500,00	1.128.139.500,00	(8.437.000,00)	99,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	86.076.500,00	83.652.500,00	(2.424.000,00)	97,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.076.500,00	83.652.500,00	(2.424.000,00)	97,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.076.500,00	83.652.500,00	(2.424.000,00)	97,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.050.500.000,00	1.044.487.000,00	(6.013.000,00)	99,42	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.500.000,00	1.044.487.000,00	(6.013.000,00)	99,42	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.500.000,00	1.044.487.000,00	(6.013.000,00)	99,42	
				JUMLAH BELANJA	5.170.606.154,00	4.106.362.119,00	(1.064.244.035,00)	79,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.170.606.154,00)	(4.106.362.119,00)	1.064.244.035,00	79,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.170.606.154,00)	(4.106.362.119,00)	1.064.244.035,00	79,41	

SOE, 10 AGUSTUS 2026

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	914.315.547.716,36	823.545.034.283,00	129.764.067.402,00	115.303.536.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	610.877.829.555,52	542.635.083.421,00	44.548.788.743,00	34.836.314.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	610.877.829.555,52	542.635.083.421,00	44.548.788.743,00	34.836.314.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	493.299.932.811,00	461.418.937.367,00	30.670.000,00	80.058.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.680.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.680.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	492.895.602.811,00	461.141.862.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	641.320.344,00	639.106.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	12.533.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	29.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.377.575,00	95.654.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.412.000,00	15.328.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	64.579.975,00	64.379.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.785.600,00	13.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.337.992,00	71.199.650,00	80.670.000,00	80.058.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.007.992,00	27.334.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.330.000,00	43.865.000,00	80.670.000,00	80.058.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.614.433,00	50.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.614.433,00	50.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	117.577.896.744,52	81.216.146.054,00	44.468.118.743,00	34.756.255.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.268.398.154,00	42.712.307.754,00	19.830.631.745,00	15.459.000.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	540.000.000,00	344.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	995.000.000,00	938.280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	501.011.000,00	54.504.000,00	6.428.000.000,00	5.274.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	748.813.000,00	711.827.990,00	111.500.000,00	74.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	429.160.000,00	413.200.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.996.965.854,00	39.298.310.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	573.940.000,00	393.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	449.218.700,00	427.033.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	222.040.000,00	208.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.214.617.600,00	871.304.219,00	11.008.963.745,00	8.762.659.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.132.632.000,00	333.542.000,00	130.168.000,00	63.534.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39.575.533.890,52	29.970.507.640,00	18.909.554.218,00	14.552.208.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	722.500.000,00	634.186.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	27.572.400,00	16.292.000,00	1.444.520.000,00	1.439.666.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	203.333.290,00	110.217.259,00	7.328.855.000,00	6.486.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	948.143.950,00	764.850.400,00	86.750.000,00	84.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	309.575.000,00	268.647.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	33.922.509.500,52	25.700.151.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	160.599.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.425.000,00	35.333.000,00	176.338.568,00	175.812.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	169.400.000,00	138.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	898.164.650,00	788.421.935,00	87.697.000,00	87.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	453.158.000,00	290.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	425.667.000,00	256.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.299.486.100,00	849.744.940,00	9.785.393.650,00	6.279.151.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.052.633.700,00	7.786.584.740,00	5.669.932.780,00	4.745.047.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.496.693.000,00	2.043.539.880,00	2.320.000.000,00	1.885.263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.284.520.000,00	956.979.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	733.620.000,00	549.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	995.407.000,00	859.124.800,00	350.000.000,00	341.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.350.742.000,00	307.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	441.300.000,00	352.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.459.993.700,00	961.353.180,00	749.000.000,00	388.037.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.898.174.500,00	1.512.621.985,00	888.788.780,00	820.285.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	252.183.500,00	234.483.495,00	1.352.144.000,00	1.309.580.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.681.331.000,00	746.745.920,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	785.201.000,00	746.745.920,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	896.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	236.338.264.903,84	217.491.051.344,00	54.819.947.283,00	53.670.111.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	181.572.860.601,00	163.391.098.442,00	49.169.247.283,00	48.179.177.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.269.232.190,00	66.107.287.807,00	5.250.000.000,00	5.234.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.347.383.130,00	64.205.136.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.247.903.130,00	64.105.656.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.480.000,00	99.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.250.000.000,00	5.234.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	5.250.000.000,00	5.234.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.817.897.160,00	1.817.091.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	568.100,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000,00	45.896.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.771.329.060,00	1.770.626.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.490.500,00	80.598.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.490.500,00	80.598.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.632.612.611,00	94.356.786.457,00	43.919.247.283,00	42.944.777.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.156.367.209,00	13.727.742.166,00	41.487.659.816,00	41.358.803.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00	100.000.000,00	99.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	800.408.069,00	710.059.355,00	21.672.700.266,00	21.625.944.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.017.880.000,00	984.622.250,00	18.450.000.000,00	18.417.881.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	1.000.000.000,00	952.520.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	147.757.002,00	264.959.550,00	263.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	154.042.000,00	154.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.904.168.139,00	11.620.075.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	129.869.000,00	111.185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.339.169.892,00	80.492.222.984,00	2.420.587.467,00	1.574.974.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	592.023.000,00	400.437.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	236.316.000,00	134.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.336.000,00	29.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	195.360.000,00	56.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.438.000,00	20.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	406.100.000,00	343.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	260.200.000,00	190.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.153.115.400,00	1.116.262.050,00	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	49.087.777.533,00	49.373.973.291,00	2.397.837.467,00	1.552.224.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	803.852.000,00	800.569.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	43.170.807.759,00	27.702.158.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	383.844.200,00	324.304.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	137.075.511,00	136.821.307,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	137.075.511,00	136.821.307,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.069.460.800,00	1.723.950.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	750.937.800,00	741.037.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	750.937.800,00	741.037.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.318.523.000,00	982.912.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.318.523.000,00	982.912.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	233.458.000,00	229.987.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	233.458.000,00	229.987.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	233.458.000,00	229.987.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.368.097.000,00	973.086.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.058.026.000,00	724.759.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.058.026.000,00	724.759.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.071.000,00	248.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	310.071.000,00	248.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah	54.765.404.302,84	54.100.852.902,00	5.650.700.000,00	5.490.933.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.241.579.429,84	48.660.639.543,00	2.429.051.000,00	2.274.254.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.714.124.268,00	26.551.413.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.714.124.268,00	26.551.413.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.881.556,00	332.753.600,00	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.100.825,00	20.000.000,00	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.780.731,00	312.753.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.936.054,00	448.897.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.936.054,00	448.897.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	21.745.637.551,84	21.327.574.553,00	750.000.000,00	598.354.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.745.637.551,84	21.327.574.553,00	750.000.000,00	598.354.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.523.824.873,00	5.440.213.359,00	3.221.649.000,00	3.216.678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.463.139.927,00	3.447.033.913,00	3.221.649.000,00	3.216.678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.506.082.450,00	1.491.556.513,00	3.221.649.000,00	3.216.678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.957.057.477,00	1.955.477.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.060.684.946,00	1.993.179.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	130.000.000,00	129.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.930.684.946,00	1.863.184.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.258.637.681,00	31.844.462.118,00	27.758.509.576,00	25.140.551.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.871.404.522,00	10.207.889.154,00	19.100.725.576,00	16.801.238.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.037.248.843,00	5.723.471.534,00	59.000.000,00	58.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.568.750,00	39.208.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.648.300,00	6.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.860.450,00	14.621.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.080.000,00	17.991.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.899.671.968,00	4.719.556.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.110.653,00	145.175.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.280.250,00	2.280.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	133.085.000,00	127.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.669.400,00	29.559.000,00	59.000.000,00	58.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.159.400,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.600.000,00	4.950.000,00	59.000.000,00	58.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.980.000,00	5.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.720.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.210.000,00	15.966.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.939.600,00	44.074.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.019.600,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.720.000,00	35.881.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.200.000,00	6.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.754.125,00	887.447.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	27.899.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	52.976.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	905.984.125,00	800.807.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.770.000,00	5.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.014.891.801,00	916.384.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.014.891.801,00	916.384.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	246.449.450,00	227.842.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	100.000.000,00	48.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	486.210.696,00	469.893.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	182.231.655,00	170.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.319.318.118,00	2.082.358.908,00	18.996.725.576,00	16.698.011.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.319.318.118,00	2.082.358.908,00	18.996.725.576,00	16.698.011.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	923.436.095,00	835.389.626,00	15.193.347.400,00	13.582.012.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	1.395.882.023,00	1.246.969.282,00	3.803.378.176,00	3.115.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	9.075.000,00	8.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.075.000,00	8.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	9.075.000,00	8.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.490.870.760,00	1.476.858.412,00	45.000.000,00	44.285.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.300.773.500,00	1.287.562.750,00	45.000.000,00	44.285.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.300.773.500,00	1.287.562.750,00	45.000.000,00	44.285.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.097.260,00	189.295.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.11.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.097.260,00	189.295.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.387.233.159,00	21.636.572.924,00	8.657.784.000,00	8.339.313.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.834.338.907,00	12.214.016.644,00	317.038.000,00	66.850.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	13.834.338.907,00	12.214.016.644,00	317.038.000,00	66.850.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	13.834.338.907,00	12.214.016.644,00	317.038.000,00	66.850.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.337.916.060,00	1.304.584.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.744.283.824,00	7.703.403.380,00	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.744.283.824,00	7.703.403.380,00	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	261.597.800,00	247.361.000,00	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.482.686.024,00	7.456.042.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	470.694.368,00	414.568.068,00	38.750.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	470.694.368,00	414.568.068,00	38.750.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	215.071.100,00	168.373.700,00	6.250.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	105.731.250,00	105.675.500,00	26.250.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	149.892.018,00	140.518.868,00	6.250.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.138.783.335,00	7.585.822.057,00	2.292.021.800,00	1.331.534.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.138.783.335,00	7.585.822.057,00	2.292.021.800,00	1.331.534.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.189.273.180,00	5.086.129.342,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.086.900,00	72.494.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.304.900,00	16.304.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.782.000,00	56.189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.860.932.554,00	4.763.259.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274.748.356,00	274.748.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.623.600,00	32.101.600,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.500.000,00	22.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.123.600,00	10.091.600,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.630.126,00	218.273.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000,00	186.740.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.780.126,00	30.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	647.548.520,00	508.492.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	647.548.520,00	508.492.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	647.548.520,00	508.492.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.619.417.571,00	1.599.260.900,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.619.417.571,00	1.599.260.900,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	420.000.000,00	419.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.199.417.571,00	1.179.825.900,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	682.544.064,00	391.939.264,00	2.271.521.800,00	1.311.034.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	682.544.064,00	391.939.264,00	2.271.521.800,00	1.311.034.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.1.03.04.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	682.544.064,00	391.939.264,00	2.271.521.800,00	1.311.034.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.815.154.565,00	10.450.749.024,00	291.800.000,00	272.023.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	7.792.930.366,00	7.689.184.774,00	81.000.000,00	79.811.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.811.249.594,00	3.737.559.784,00	39.500.000,00	38.852.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.098.000,00	11.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.648.000,00	7.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.280.298.994,00	3.216.509.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.831.400,00	12.830.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.100.000,00	122.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	123.100.000,00	122.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.579.600,00	159.678.783,00	39.500.000,00	38.852.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	39.500.000,00	38.852.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.772.920,00	9.751.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.832.280,00	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.776.000,00	139.896.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.343.000,00	41.061.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.843.000,00	7.601.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.900.000,00	27.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.830.000,00	186.522.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.830.000,00	180.522.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.916.355.372,00	3.886.799.590,00	41.500.000,00	40.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.850.271.422,00	3.824.189.900,00	41.500.000,00	40.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.475.000.000,00	3.450.749.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	96.833.950,00	95.007.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.145.900,00	12.143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2.591.572,00	2.588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	263.700.000,00	263.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	41.500.000,00	40.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	66.083.950,00	62.609.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.061.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.846.700,00	2.779.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42.052.590,00	38.700.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	16.123.660,00	16.069.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	65.325.400,00	64.825.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.805.900,00	17.305.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.374.200,00	5.874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	11.431.700,00	11.431.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.022.224.199,00	2.761.564.250,00	210.800.000,00	192.212.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.916.671.135,00	1.883.955.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.690.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.690.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.636.575.817,00	1.605.676.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.774.200,00	15.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.950.956,00	64.950.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.609.754,00	94.318.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.104.130,00	2.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.477.668,00	5.351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	38.250.956,00	38.250.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.777.000,00	48.612.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.830.000,00	27.786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.780.000,00	7.745.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.550.000,00	17.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.965.564,00	130.614.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.030.000,00	87.679.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	41.835.564,00	41.835.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.105.553.064,00	877.608.251,00	210.800.000,00	192.212.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200.672.000,00	11.054.880,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	200.672.000,00	11.054.880,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	837.381.064,00	799.371.371,00	193.800.000,00	192.212.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	31.181.064,00	31.181.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	806.200.000,00	768.190.334,00	193.800.000,00	192.212.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	67.500.000,00	67.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	67.500.000,00	67.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.886.877.676,00	13.536.966.319,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	13.886.877.676,00	13.536.966.319,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.781.362.263,00	2.619.325.768,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.720.000,00	91.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.720.000,00	91.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.314.587.349,00	2.169.181.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.596.430,00	66.153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280.538.604,00	271.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.157.975,99	149.542.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.139.975,99	28.139.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.858.000,00	103.902.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.514.000,00	52.546.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.500.000,00	10.742.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.014.000,00	32.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.382.938,01	156.885.084,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.382.542,01	123.115.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.396,00	18.770.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.429.075.263,00	10.243.543.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	5.965.553.500,00	5.902.026.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	5.965.553.500,00	5.902.026.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4.463.521.763,00	4.341.516.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	418.135.000,00	362.155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.045.386.763,00	3.979.361.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	308.703.900,00	308.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	147.633.900,00	147.633.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	147.633.900,00	147.633.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	161.070.000,00	160.901.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0001	Pembenan Layanan Data dan Pengaduan	73.820.000,00	73.819.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	87.250.000,00	87.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	215.933.750,00	215.759.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	215.933.750,00	215.759.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	215.933.750,00	215.759.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	151.802.500,00	149.802.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	151.802.500,00	149.802.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	151.802.500,00	149.802.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66.016.453.666,86	62.688.080.668,00	4.325.150.900,00	3.047.149.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.218.192.577,00	5.145.595.644,00	35.076.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.218.192.577,00	5.145.595.644,00	35.076.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.782.368.577,00	1.739.357.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.523.250,00	27.523.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.553.250,00	6.553.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.970.000,00	20.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.668.662.327,00	1.627.475.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.512.750,00	5.512.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.982.868,00	76.982.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.569.000,00	22.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.556.000,00	21.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah *Penunjang Urusan Pemerintahan* Daerah	59.554.000,00	57.931.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.554.000,00	57.931.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.471.153.500,00	2.455.268.466,00	35.076.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.471.153.500,00	2.455.268.466,00	35.076.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.471.153.500,00	2.455.268.466,00	35.076.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	478.253.000,00	464.888.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	478.253.000,00	464.888.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	460.013.000,00	446.793.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	18.240.000,00	18.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	486.417.500,00	486.080.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.481.500,00	34.393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	34.481.500,00	34.393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	451.936.000,00	451.686.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	451.936.000,00	451.686.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.272.702.351,86	3.967.542.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.272.702.351,86	3.967.542.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.011.240.935,11	1.971.500.387,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.116.000,00	3.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.116.000,00	3.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.690.782.829,25	1.652.140.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.977.240,00	35.940.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.354.890,00	3.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.172.100,00	10.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.536.250,00	2.527.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.614.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.191.232,00	190.841.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.871.500,00	5.521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.819.732,00	183.819.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.173.633,86	89.471.338,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.876.107,86	44.176.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.297.526,00	45.295.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	320.033.650,00	256.679.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	320.033.650,00	256.679.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	320.033.650,00	256.679.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.217.096.166,75	1.058.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	764.332.391,75	678.794.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	764.332.391,75	678.794.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	368.815.775,00	296.294.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	81.525.775,00	80.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	287.290.000,00	215.461.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.948.000,00	83.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.948.000,00	83.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	305.898.150,00	301.793.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	305.898.150,00	301.793.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305.898.150,00	301.793.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	311.341.750,00	288.741.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	168.277.900,00	154.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	153.132.900,00	139.446.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.145.000,00	14.947.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	143.063.850,00	134.347.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	143.063.850,00	134.347.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	107.091.700,00	89.918.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.176.700,00	15.843.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	32.176.700,00	15.843.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.915.000,00	74.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	35.225.000,00	35.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	39.690.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.638.136.140,00	5.314.983.154,00	93.500.000,00	93.499.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan	5.638.136.140,00	5.314.983.154,00	93.500.000,00	93.499.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.928.015.498,00	1.869.667.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.867.500,00	13.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.927.500,00	8.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.122.848,00	1.774.990.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.484.388,00	168.484.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.178.250,00	15.993.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.258.250,00	4.258.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	2.443.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.920.000,00	6.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.529.000,00	12.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000,00	7.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.029.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.317.900,00	52.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.067.900,00	52.054.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	136.528.500,00	132.545.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	136.528.500,00	132.545.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	136.528.500,00	132.545.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.954.534.500,00	2.721.488.461,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	552.514.000,00	432.609.961,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	81.870.000,00	81.272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	470.644.000,00	351.337.161,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.402.020.500,00	2.288.878.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.402.020.500,00	2.288.878.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	539.903.892,00	516.262.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	513.542.892,00	489.901.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	513.542.892,00	489.901.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	79.153.750,00	75.018.750,00	75.000.000,00	74.999.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	79.153.750,00	75.018.750,00	75.000.000,00	74.999.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	79.153.750,00	75.018.750,00	75.000.000,00	74.999.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	154.429.912,00	154.284.812,00	18.000.000,00	17.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	154.429.912,00	154.284.812,00	18.000.000,00	17.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	154.429.912,00	154.284.812,00	18.000.000,00	17.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	154.429.912,00	154.284.812,00	18.000.000,00	17.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.1.03.04.0000	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	154.429.912,00	154.284.812,00	18.000.000,00	17.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.591.978.659,00	3.531.111.061,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.075.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.075.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9.075.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.03.2.11.0.00.03.0000	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	9.075.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	3.582.903.659,00	3.522.323.061,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.665.150.959,00	1.626.207.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.465.000,00	13.290.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.955.000,00	6.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.510.000,00	7.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.417.998.813,00	1.389.470.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.501.900,00	9.501.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.870.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.719.250,00	32.225.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.626.500,00	9.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.930.000,00	18.311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.556.250,00	16.354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.363.250,00	9.154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.193.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.411.646,00	174.867.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.963.214,00	104.513.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.978.432,00	69.978.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	806.720.900,00	805.727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	206.721.000,00	206.478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	206.721.000,00	206.478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	599.999.900,00	599.249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	599.999.900,00	599.249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	478.858.056,00	473.863.415,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	478.858.056,00	473.863.415,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.994.500,00	48.359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	228.675.100,00	226.824.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	199.188.456,00	198.680.160,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	262.419.120,00	262.419.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	5.679.900,00	4.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.679.900,00	4.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5.679.900,00	4.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	281.227.200,00	269.680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	281.227.200,00	269.680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	281.227.200,00	269.680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.000.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.034.000,00	4.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.034.000,00	4.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5.034.000,00	4.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendaduran ulang sampah	72.813.524,00	72.813.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.620.292.430,00	4.306.460.018,00	828.880.000,00	739.514.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.620.292.430,00	4.306.460.018,00	828.880.000,00	739.514.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.847.180,00	3.071.088.249,00	628.880.000,00	587.850.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	739.500,00	739.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	359.500,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.944.141.430,00	2.759.144.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	748.700,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.700.000,00	73.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.170.800,00	8.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.761.954,00	66.280.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.242.704,00	13.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.377.250,00	11.377.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.542.000,00	30.061.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.435.296,00	125.352.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.088.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.700.000,00	32.417.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.935.296,00	91.846.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.769.000,00	119.570.965,00	628.880.000,00	587.850.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.484.000,00	63.174.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.285.000,00	44.615.000,00	628.880.000,00	587.850.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	11.781.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	949.706.500,00	944.460.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	835.491.500,00	830.404.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	29.350.000,00	29.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	490.640.500,00	485.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	315.501.000,00	315.471.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	114.215.000,00	114.055.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	43.780.000,00	43.625.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	70.435.000,00	70.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	9.792.900,00	9.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	9.792.900,00	9.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	9.792.900,00	9.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	278.041.850,00	275.214.750,00	200.000.000,00	151.663.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	204.692.100,00	204.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	204.692.100,00	204.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	73.349.750,00	70.522.750,00	200.000.000,00	151.663.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	200.000.000,00	151.663.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	16.550.000,00	16.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.147.000,00	53.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	652.750,00	652.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.293.048.388,00	6.823.954.851,00	104.467.000,00	104.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.293.048.388,00	6.823.954.851,00	104.467.000,00	104.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.529.252.578,00	5.233.699.051,00	104.467.000,00	104.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.102.555.388,00	4.807.215.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.005.285.688,00	4.709.953.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.379.700,00	15.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.990.000,00	72.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.493.250,00	120.492.850,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.703.250,00	11.703.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.185.000,00	87.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	99.472.000,00	99.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	70.972.000,00	70.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.699.340,00	203.662.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.885.000,00	6.848.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.814.340,00	196.814.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.351.600,00	92.175.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.601.600,00	77.431.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.750.000,00	8.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	82.975.900,00	82.839.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	82.975.900,00	82.839.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	51.614.000,00	51.483.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	31.361.900,00	31.356.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	883.627.560,00	710.245.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	883.627.560,00	710.245.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	487.521.010,00	319.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	38.814.550,00	38.810.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	64.197.100,00	64.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	18.636.000,00	18.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	30.460.700,00	30.460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	91.906.900,00	90.806.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	55.242.500,00	55.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	50.904.000,00	46.863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12.714.000,00	12.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	18.940.800,00	18.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	797.192.350,00	797.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	797.192.350,00	797.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	48.475.000,00	48.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	37.463.750,00	37.463.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	48.855.600,00	48.851.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	622.398.000,00	622.380.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.320.596.893,00	9.859.362.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.149.366.393,00	2.128.598.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.031.340.436,00	2.015.908.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.705.475,00	11.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	304.571.732,00	302.455.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.498.976,00	38.495.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.118.906,00	1.118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.810.500,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.744.750,00	2.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.073.750,00	3.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.751.070,00	29.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.717.619,00	13.710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.767.619,00	2.760.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.809.362,00	60.483.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.859.362,00	31.568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.250.000,00	27.214.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	677.940.000,00	676.920.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	677.940.000,00	676.920.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	412.740.000,00	411.960.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	150.000.000,00	149.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.009.594.000,00	3.651.757.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.714.150.000,00	2.368.300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	100.000.000,00	80.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	898.400.000,00	779.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	478.750.000,00	395.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	124.841.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1.112.000.000,00	988.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.165.944.000,00	1.165.370.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	323.081.000,00	322.825.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	842.863.000,00	842.545.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	129.500.000,00	118.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	129.500.000,00	118.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.483.696.500,00	3.402.086.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.483.696.500,00	3.402.086.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.023.900.000,00	1.983.134.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	58.675.000,00	52.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	29.290.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.324.951.500,00	1.290.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	46.880.000,00	46.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.769.001.903,00	3.696.269.871,00	1.379.206.200,00	528.580.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		Dinas Perhubungan	3.769.001.903,00	3.696.269.871,00	1.379.206.200,00	528.580.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.969.520.503,00	2.934.624.826,00	51.700.000,00	50.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.732.647.963,00	2.704.987.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.698.100,00	30.698.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236.059.305,00	236.059.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.991.945,00	69.809.745,00	47.200.000,00	46.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.120.195,00	5.120.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	47.200.000,00	46.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.668.750,00	17.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.303.000,00	43.120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.188.700,00	53.034.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.772.700,00	17.621.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.216.000,00	34.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.691.895,00	91.837.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.924.900,00	51.070.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.371.995,00	11.371.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	799.481.400,00	761.645.045,00	1.327.506.200,00	477.682.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	217.810.000,00	197.952.900,00	410.000.000,00	293.272.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	105.510.000,00	95.952.900,00	400.000.000,00	283.272.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	112.300.000,00	102.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	5.865.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5.865.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	230.225.450,00	225.914.550,00	190.306.200,00	184.409.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.954.400,00	24.954.400,00	190.306.200,00	184.409.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	85.000.000,00	84.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.656.000,00	12.475.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57.615.050,00	53.570.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	112.980.950,00	103.425.595,00	715.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	87.199.950,00	87.165.595,00	715.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25.781.000,00	16.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.000.000,00	33.755.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	34.000.000,00	33.755.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.520.000,00	44.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.520.000,00	44.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.048.134.937,00	3.011.939.232,00	251.650.000,00	251.326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	3.048.134.937,00	3.011.939.232,00	251.650.000,00	251.326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.673.752.137,00	1.648.665.972,00	185.250.000,00	184.926.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.313.000,00	97.214.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.253.000,00	69.154.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.392.202.713,00	1.367.753.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.291.453.713,00	1.267.148.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.993.250,00	80.858.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.745.750,00	19.745.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.494.608,00	24.484.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.494.608,00	24.484.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	185.250.000,00	184.926.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	185.250.000,00	184.926.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.182.200,00	11.096.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.182.200,00	11.096.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.559.616,00	148.117.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.901.616,00	131.900.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000,00	3.058.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	169.559.300,00	168.886.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	169.559.300,00	168.886.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	110.000.000,00	109.838.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	19.995.700,00	19.928.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	18.781.100,00	18.481.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	20.782.500,00	20.638.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.204.823.500,00	1.194.386.500,00	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.175.933.500,00	1.165.496.500,00	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	23.528.500,00	23.357.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	6.730.000,00	6.708.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.114.500.000,00	1.104.350.800,00	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	31.175.000,00	31.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	4.636.210.139,00	4.274.975.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.193.408.294,00	2.946.859.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.556.927.988,00	2.381.741.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.844.500,00	51.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.316.500,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.381.806,00	481.282.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.725.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535.156.806,00	476.112.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.254.000,00	32.006.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.254.000,00	32.006.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	31.669.500,00	24.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.669.500,00	24.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	31.669.500,00	24.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	173.403.500,00	160.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.403.500,00	160.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	108.802.500,00	99.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha	64.601.000,00	61.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	3.30.3.31.2.17.01.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.237.728.845,00	1.142.698.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.318.212.933,00	2.099.147.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.017.895.933,00	1.802.519.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.784.500,00	3.784.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.784.500,00	3.784.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.706.168.632,00	1.685.885.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.009.900,00	21.009.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.665.499,00	77.665.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.810.801,00	29.117.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.260.801,00	8.260.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.655.000,00	17.961.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.316.000,00	24.045.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000,00	15.229.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.816.000,00	7.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.816.000,00	59.686.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.216.000,00	56.086.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	217.674.000,00	213.985.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	217.674.000,00	213.985.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6.714.000,00	6.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	205.799.000,00	202.215.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.688.019.370,00	6.381.884.197,00	920.715.000,00	686.374.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.688.019.370,00	6.381.884.197,00	920.715.000,00	686.374.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.978.116.790,00	1.911.409.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.002.500,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.002.500,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.783.935.967,00	1.719.643.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.633.000,00	14.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.087.700,00	129.886.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.486.818,00	25.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.450.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.080.818,00	13.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	4.140.000,00	4.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.816.000,00	6.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.216.320,00	110.947.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.154.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.250.000,00	98.987.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.812.320,00	9.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.475.185,00	54.282.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.475.185,00	54.282.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.823.262.880,00	2.674.498.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.766.032.300,00	1.684.090.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	1.766.032.300,00	1.684.090.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.057.230.580,00	990.408.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	1.057.230.580,00	990.408.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.886.639.700,00	1.795.975.742,00	920.715.000,00	686.374.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	207.700.000,00	177.447.142,00	916.215.000,00	681.874.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	207.700.000,00	177.447.142,00	916.215.000,00	681.874.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.200.903.100,00	1.195.810.600,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.200.903.100,00	1.195.810.600,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	343.714.100,00	329.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/Kota	193.714.100,00	179.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	93.493.500,00	54.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	93.493.500,00	54.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	40.829.000,00	39.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	40.829.000,00	39.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	18.544.900,00	18.544.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	27.212.600,00	27.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.661.170.100,00	1.461.949.250,00	269.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.661.170.100,00	1.461.949.250,00	269.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.429.875.850,00	1.248.404.810,00	269.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	315.450.860,00	246.560.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	315.450.860,00	246.560.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.114.424.990,00	1.001.844.400,00	269.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.114.424.990,00	1.001.844.400,00	269.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	231.294.250,00	213.544.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	224.837.750,00	207.087.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	224.837.750,00	207.087.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	6.456.500,00	6.456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	6.456.500,00	6.456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.651.911.484,00	2.530.554.525,00	384.256.700,00	383.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.651.911.484,00	2.530.554.525,00	384.256.700,00	383.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.023.126.654,00	1.911.288.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.773.565.700,00	1.666.273.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.620.810,00	37.620.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.754.250,00	1.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.859.500,00	8.859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	27.007.060,00	27.007.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.950.144,00	184.861.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.946.720,00	7.470.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.503.424,00	175.890.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.920.000,00	12.462.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.750.000,00	4.292.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	628.784.830,00	619.266.105,00	384.256.700,00	383.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.219.725,00	218.499.275,00	104.000.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.202.325,00	56.752.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	45.388.800,00	45.218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	78.943.500,00	78.848.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	37.685.100,00	37.690.000,00	104.000.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	409.565.105,00	400.766.830,00	280.256.700,00	279.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	119.743.055,00	115.476.900,00	280.256.700,00	279.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	289.822.050,00	285.289.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	88.657.950,00	82.307.983,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	88.657.950,00	82.307.983,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	55.315.050,00	52.595.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	55.315.050,00	52.595.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	55.315.050,00	52.595.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	33.342.900,00	29.712.900,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dihubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	33.342.900,00	29.712.900,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	18.700.000,00	15.120.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	14.642.900,00	14.592.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	50.469.093.727,00	47.634.638.891,00	1.292.627.000,00	1.121.355.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.129.548.198,00	4.993.463.989,00	288.300.000,00	277.912.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	5.129.548.198,00	4.993.463.989,00	288.300.000,00	277.912.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.752.218.040,11	2.690.193.054,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.965.152,11	59.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.880.152,11	58.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.449.363.420,00	2.394.305.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.041.331.566,00	1.986.273.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.056.100,00	11.056.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	392.405.754,00	392.405.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.391.820,00	81.409.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.639.820,00	2.639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.831.000,00	11.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.027.000,00	3.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.894.000,00	63.911.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.252.648,00	31.594.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.456.148,00	9.798.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.546.500,00	20.546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.245.000,00	122.918.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.370.000,00	107.043.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	461.585.500,00	459.990.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	11.706.000,00	11.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	6.706.000,00	6.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.000.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	449.879.500,00	448.859.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	56.894.500,00	56.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	22.145.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	370.840.000,00	370.222.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.825.844.657,89	1.753.765.625,00	254.300.000,00	243.912.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	599.585.000,00	566.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	135.926.000,00	103.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	463.659.000,00	463.461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.226.259.657,89	1.187.204.125,00	254.300.000,00	243.912.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.700.000,00	60.319.985,00	198.000.000,00	187.612.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.198.000,00	11.198.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	647.230.182,89	646.547.620,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	492.131.475,00	469.138.520,00	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	89.900.000,00	89.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	89.900.000,00	89.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.900.000,00	89.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.229.773.251,00	3.056.166.421,00	357.424.000,00	355.779.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	3.229.773.251,00	3.056.166.421,00	357.424.000,00	355.779.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.181.264.051,00	2.139.629.491,00	37.800.000,00	37.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.011.522.853,00	1.977.711.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.155.500,00	16.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	342.948.250,00	341.725.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.258.588,00	3.258.000,00	5.100.000,00	5.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	5.100.000,00	5.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.258.588,00	3.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	32.700.000,00	32.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	32.700.000,00	32.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.286.011,00	33.450.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.566.011,00	18.730.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.496.599,00	118.568.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.496.599,00	108.568.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	748.705.000,00	618.670.530,00	319.624.000,00	317.981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	34.650.000,00	34.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	34.650.000,00	34.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	111.739.000,00	81.512.600,00	319.624.000,00	317.981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	111.739.000,00	81.512.690,00	319.624.000,00	317.861.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	602.316.000,00	502.622.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	602.316.000,00	502.622.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	131.544.200,00	131.342.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	131.544.200,00	131.342.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	131.544.200,00	131.342.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	168.260.000,00	166.524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	168.260.000,00	166.524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	144.095.500,00	142.469.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	24.164.500,00	24.054.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.425.899.778,00	35.947.449.221,00	565.200.000,00	411.671.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22.415.259.783,00	21.411.813.714,00	252.000.000,00	181.714.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.445.143.070,00	13.087.189.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.975.216,00	58.770.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.880.316,00	24.880.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.174.900,00	27.969.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.105.608.196,00	12.765.526.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	343.933.453,00	282.010.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.337.060,00	106.245.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.060.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.252.060,00	1.252.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.225.000,00	90.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.301.000,00	25.555.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.125.000,00	9.379.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.111.000,00	15.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.921.578,00	131.092.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.500.000,00	67.221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.721.578,00	62.171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.944.459.712,00	4.556.523.662,00	232.500.000,00	165.714.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.773.155.500,00	3.496.000.500,00	208.000.000,00	141.214.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.773.155.500,00	3.496.000.500,00	208.000.000,00	141.214.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	581.185.800,00	579.679.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	581.185.800,00	579.679.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	590.118.412,00	480.844.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	590.118.412,00	480.844.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.403.152.601,00	3.178.462.035,00	19.500.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	285.798.000,00	265.462.372,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	150.798.000,00	130.492.372,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	135.000.000,00	134.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.117.354.601,00	2.912.999.663,00	15.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	550.000.000,00	402.111.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.567.354.601,00	2.510.888.556,00	15.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	622.504.400,00	589.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	622.504.400,00	589.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	34.504.400,00	28.138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	588.000.000,00	561.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.010.639.995,00	14.535.635.507,00	313.200.000,00	229.957.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.127.881.939,00	5.950.838.144,00	87.950.000,00	82.341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.686.044,00	21.685.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.546.044,00	11.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.140.000,00	10.139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.628.648.695,00	5.544.198.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.312.047.249,00	5.241.073.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.975.300,00	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	307.626.146,00	294.154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.135.000,00	66.965.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.185.000,00	61.015.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.000.000,00	46.342.500,00	87.950.000,00	82.341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000,00	46.342.500,00	87.950.000,00	82.341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.972.000,00	37.487.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.250.000,00	25.765.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.722.000,00	9.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.440.200,00	234.159.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.040.200,00	228.949.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.900.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.632.686.806,00	4.560.475.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20.865.000,00	20.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20.865.000,00	20.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	103.900.000,00	67.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	103.900.000,00	67.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.507.921.806,00	4.472.555.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	277.413.000,00	275.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.230.508.806,00	4.197.433.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.940.750.000,00	2.789.776.576,00	225.250.000,00	147.615.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.940.750.000,00	2.789.776.576,00	225.250.000,00	147.615.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	2.940.750.000,00	2.789.776.576,00	225.250.000,00	147.615.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.309.321.250,00	1.234.544.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.309.321.250,00	1.234.544.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.309.321.250,00	1.234.544.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.517.245.050,00	1.513.824.400,00	19.203.000,00	18.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	1.517.245.050,00	1.513.824.400,00	19.203.000,00	18.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	345.159.500,00	344.308.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	345.159.500,00	344.308.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	308.938.000,00	308.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36.221.500,00	36.063.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.096.144.000,00	1.095.430.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.088.727.500,00	1.088.013.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	26.060.500,00	25.962.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.062.667.000,00	1.062.051.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.416.500,00	7.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7.416.500,00	7.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	70.116.550,00	68.315.750,00	19.203.000,00	18.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	70.116.550,00	68.315.750,00	19.203.000,00	18.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.719.050,00	50.248.250,00	15.318.000,00	15.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18.057.500,00	17.127.500,00	3.885.000,00	3.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	1.340.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	5.825.000,00	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5.825.000,00	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5.825.000,00	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.017.797.950,00	1.975.068.360,00	23.500.000,00	18.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.017.797.950,00	1.975.068.360,00	23.500.000,00	18.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.000.589.450,00	1.957.859.860,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.000.589.450,00	1.957.859.860,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	106.907.450,00	100.606.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.893.682.000,00	1.857.252.900,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	17.208.500,00	17.208.500,00	18.500.000,00	18.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	17.208.500,00	17.208.500,00	18.500.000,00	18.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	3.30.3.31.2.17.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	17.208.500,00	17.208.500,00	18.500.000,00	18.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	148.829.500,00	148.666.500,00	39.000.000,00	38.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	148.829.500,00	148.666.500,00	39.000.000,00	38.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	148.829.500,00	148.666.500,00	39.000.000,00	38.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	148.829.500,00	148.666.500,00	39.000.000,00	38.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	60.865.500,00	60.865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	87.964.000,00	87.801.000,00	39.000.000,00	38.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	77.393.423.426,00	74.515.598.472,00	1.753.686.900,00	1.694.017.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	31.872.366.377,00	30.288.485.611,00	1.179.361.900,00	1.139.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Umum	20.089.281.927,00	19.504.223.795,00	734.078.200,00	696.148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.089.281.927,00	19.504.223.795,00	734.078.200,00	696.148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.165.000,00	174.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.165.000,00	174.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.113.322.602,00	9.877.935.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.937.030.602,00	9.735.593.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.292.000,00	142.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.904.374.140,00	2.848.455.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.336.554,00	120.318.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.854.586,00	87.636.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000,00	149.869.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.261.039.000,00	1.260.835.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.277.144.000,00	1.229.796.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.500.000,00	100.500.000,00	734.078.200,00	696.148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.500.000,00	100.500.000,00	734.078.200,00	696.148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.132.633.784,00	3.065.888.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.500.000,00	35.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.661.660,00	229.537.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.804.472.124,00	2.800.864.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.220.410.030,00	1.161.905.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.220.410.030,00	1.161.905.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	797.010.046,00	642.685.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	574.565.046,00	420.240.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	172.445.000,00	172.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.625.466.325,00	1.611.599.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	719.875.000,00	719.753.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	823.391.325,00	813.725.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	82.200.000,00	78.120.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	298.321.000,00	298.022.564,00	288.000.000,00	287.358.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	298.321.000,00	298.022.564,00	288.000.000,00	287.358.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.011.900,00	43.011.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.011.900,00	43.011.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.534.750,00	100.519.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.530.750,00	6.530.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.004.000,00	93.988.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.932.100,00	66.823.627,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.532.100,00	64.423.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	36.742.250,00	36.567.697,00	275.000.000,00	274.358.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36.742.250,00	36.567.697,00	275.000.000,00	274.358.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	324.014.400,00	291.994.726,00	27.500.000,00	27.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.499.000,00	172.891.726,00	27.500.000,00	27.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.151.000,00	14.150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.151.000,00	14.150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.322.000,00	54.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.062.000,00	2.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.260.000,00	52.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.027.000,00	56.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.027.000,00	54.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.999.000,00	48.438.826,00	27.500.000,00	27.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.199.000,00	46.638.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	27.500.000,00	27.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.113.000,00	19.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.113.000,00	19.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	19.113.000,00	19.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	131.402.400,00	100.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	116.416.400,00	85.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	116.416.400,00	85.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		Bagian Hukum	349.325.250,00	346.292.296,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.742.250,00	175.746.316,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.995.000,00	66.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.845.000,00	8.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.150.000,00	58.108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.427.750,00	19.427.750,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.427.750,00	16.427.750,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.999.500,00	46.045.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.999.500,00	46.045.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	172.583.000,00	170.545.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	172.583.000,00	170.545.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	108.685.000,00	106.655.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	48.898.000,00	48.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		Bagian Pemerintahan	859.120.500,00	858.403.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	282.393.000,00	282.234.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.297.400,00	85.297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.537.400,00	52.537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.897.600,00	77.740.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.404.600,00	24.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.493.000,00	53.336.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.486.000,00	43.484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.486.000,00	43.484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.312.000,00	67.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.312.000,00	67.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	576.727.500,00	576.168.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	567.543.500,00	567.127.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	24.575.000,00	24.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	58.700.000,00	58.565.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	484.268.500,00	484.092.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	9.184.000,00	9.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9.184.000,00	9.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.921.424.000,00	7.978.924.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	410.424.000,00	410.424.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.040.000,00	93.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.040.000,00	93.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.802.000,00	182.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.366.000,00	180.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.842.000,00	44.842.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.142.000,00	43.142.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.740.000,00	89.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.740.000,00	89.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.511.000.000,00	7.568.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.511.000.000,00	7.568.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.511.000.000,00	7.568.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		Bagian Administrasi Pembangunan	241.567.000,00	240.982.407,00	15.000.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.033.100,00	204.486.624,00	15.000.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.743.600,00	5.742.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.743.600,00	5.742.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.640.000,00	41.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.640.000,00	41.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.467.500,00	126.403.987,00	15.000.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	15.000.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.367.500,00	124.303.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	928.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.254.000,00	29.776.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.254.000,00	29.776.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	36.533.900,00	36.495.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	36.533.900,00	36.495.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	25.496.000,00	25.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	11.037.900,00	11.037.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	451.270.300,00	432.933.672,00	36.783.700,00	36.618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	451.270.300,00	432.933.672,00	36.783.700,00	36.618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	451.270.300,00	432.933.672,00	36.783.700,00	36.618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	198.126.900,00	180.476.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	71.800.000,00	71.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0014	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	181.343.400,00	180.796.772,00	36.783.700,00	36.618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015		Bagian Organisasi	338.042.000,00	336.708.415,00	51.000.000,00	50.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	338.042.000,00	336.708.415,00	51.000.000,00	50.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.732.000,00	71.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.532.000,00	28.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.030.750,00	111.816.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.468.750,00	9.468.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.382.000,00	100.167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.049.250,00	67.930.265,00	51.000.000,00	50.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.299.250,00	58.180.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000,00	9.750.000,00	51.000.000,00	50.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0015	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	45.521.057.049,00	44.227.112.861,00	574.325.000,00	554.040.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	45.521.057.049,00	44.227.112.861,00	574.325.000,00	554.040.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.975.896.641,00	31.064.942.345,00	574.325.000,00	554.040.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.424.132.368,00	21.859.135.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.625.552,00	295.355.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	149.550.000,00	137.531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.798.732,00	50.710.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.798.732,00	50.710.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.079.671.892,00	4.069.129.348,00	574.325.000,00	554.040.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.658.000,00	129.705.500,00	574.325.000,00	554.040.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	182.009.786,00	182.009.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.000.000,00	25.424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.553.204.096,00	3.553.189.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.042.751.659,00	2.824.515.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	7.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.730.000,00	230.371.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.804.821.659,00	2.586.951.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.607.692.000,00	1.592.156.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.607.692.000,00	1.592.156.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	768.850.000,00	679.294.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	368.850.000,00	312.019.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	400.000.000,00	367.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.545.160.408,00	13.162.170.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.282.739.500,00	1.933.672.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	647.059.500,00	647.002.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	303.000.000,00	254.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.332.680.000,00	1.032.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	84.600.000,00	84.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	84.600.000,00	84.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	818.499.609,00	813.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	818.499.609,00	813.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.139.456.499,00	2.139.320.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.139.456.499,00	2.139.320.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.917.000.000,00	7.916.810.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	415.750.000,00	415.566.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	7.501.250.000,00	7.501.243.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	302.864.800,00	274.570.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	302.864.800,00	274.570.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	133.486.743.376,20	86.650.151.520,00	2.664.644.756,00	2.651.576.189,00	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00
5.01			PERENCANAAN	5.661.089.720,00	5.445.863.528,00	85.442.556,00	85.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.661.089.720,00	5.445.863.528,00	85.442.556,00	85.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.005.111.372,00	3.854.669.858,00	73.642.556,00	73.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.560.000,00	60.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.050.000,00	33.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.510.000,00	27.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.210.465.300,00	3.141.456.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.204.200,00	34.204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.806.236,00	181.614.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	44.416.500,00	43.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.528.672,00	344.454.510,00	72.142.556,00	72.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	72.142.556,00	72.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.963.672,00	36.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.515.000,00	301.936.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.680.000,00	52.104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.970.000,00	15.554.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.160.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.877.400,00	256.233.839,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.060.600,00	194.417.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.726.800,00	44.726.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.005.045.948,00	944.816.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	909.854.648,00	849.713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	909.854.648,00	849.713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.191.300,00	95.103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	95.191.300,00	95.103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	650.932.400,00	646.377.370,00	11.800.000,00	11.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	304.435.400,00	301.523.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131.330.200,00	129.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.517.400,00	5.507.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.301.800,00	24.220.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.499.000,00	104.281.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.272.000,00	5.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.145.000,00	27.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.370.000,00	5.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	159.939.500,00	158.975.500,00	8.300.000,00	8.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.657.200,00	96.274.200,00	8.300.000,00	8.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.815.800,00	4.535.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.790.000,00	54.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.676.500,00	3.541.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	186.557.500,00	185.878.000,00	3.500.000,00	3.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	114.314.500,00	114.175.500,00	3.500.000,00	3.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.183.500,00	23.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.1.03.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	49.059.500,00	48.619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	117.895.344.092,20	72.348.194.443,00	2.291.002.200,00	2.282.779.300,00	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	110.930.501.026,20	65.568.698.767,00	1.980.889.500,00	1.974.310.300,00	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.931.523.774,20	60.999.728.234,00	138.589.500,00	137.988.100,00	0,00	0,00	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.640.000,00	56.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.640.000,00	56.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.022.023.503,20	60.153.172.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.115.572,209,20	99.288.759,224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.309.102,598,00	285.124.531,482,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.304.300,00	207.218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	699.146.904,00	657.194.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.451.500,00	354.865.060,00	138.589.500,00	137.988.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.138.000,00	26.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	138.589.500,00	137.988.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.429.500,00	43.429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.375.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.509.000,00	252.922.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.290.051,00	213.670.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.237.051,00	89.617.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.953.000,00	107.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.118.720,00	221.290.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.506.520,00	119.073.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.612.200,00	102.217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.452.499.428,00	3.047.919.014,00	37.000.000,00	31.335.300,00	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.757.351.004,00	1.436.113.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	134.391.000,00	128.937.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.175.652.254,00	987.176.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	447.307.750,00	319.999.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	846.333.716,00	824.600.986,00	30.000.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	846.333.716,00	824.600.986,00	30.000.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	848.814.708,00	787.204.478,00	7.000.000,00	6.915.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85.268.000,00	84.996.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	660.854.358,00	655.326.378,00	7.000.000,00	6.915.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.514.500,00	3.514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	99.157.850,00	43.367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.546.477.824,00	1.521.051.519,00	1.805.300.000,00	1.804.986.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.546.477.824,00	1.521.051.519,00	1.805.300.000,00	1.804.986.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	176.229.500,00	176.119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.370.248.324,00	1.344.932.019,00	1.805.300.000,00	1.804.986.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pendapatan Daerah	6.964.843.066,00	6.779.495.676,00	310.112.700,00	308.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.011.289.623,00	3.871.853.654,00	295.112.700,00	293.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.582.500,00	9.582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.582.500,00	9.582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.197.663.968,00	3.086.301.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.681.431.028,00	2.585.697.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	440.412.040,00	424.795.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.866.600,00	40.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.954.300,00	34.954.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.054.067,00	393.044.944,00	295.112.700,00	293.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.391.267,00	8.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.085.200,00	36.084.441,00	295.112.700,00	293.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.381.250,00	27.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.590.350,00	8.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.446.000,00	310.639.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.359.288,00	130.376.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.954.400,00	4.948.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.318.388,00	59.348.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.086.500,00	66.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.629.800,00	252.548.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.239.800,00	199.162.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.953.553.443,00	2.907.642.022,00	15.000.000,00	14.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.953.553.443,00	2.907.642.022,00	15.000.000,00	14.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	559.857.600,00	556.844.719,00	15.000.000,00	14.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	639.653.500,00	636.551.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	1.754.042.343,00	1.714.245.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	5.493.309.035,00	4.680.524.795,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.493.309.035,00	4.680.524.795,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.427.433.885,00	3.383.725.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.621.400,00	18.335.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.621.400,00	18.335.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.247.691.925,00	3.206.911.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.721.400,00	9.721.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.068.162,00	121.028.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.053.250,00	59.403.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.179.250,00	2.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.560.000,00	8.533.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.420.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.894.000,00	47.280.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.355.160,00	32.572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.503.560,00	2.154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.601.600,00	22.263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.250.000,00	8.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.712.150,00	66.503.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.812.150,00	63.628.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.065.875.150,00	1.296.798.836,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	314.283.150,00	310.191.302,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	207.663.450,00	205.104.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	61.687.600,00	60.543.800,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	44.932.100,00	44.543.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	245.872.800,00	187.902.600,00	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	15.708.500,00	15.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	38.451.200,00	37.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	191.713.100,00	134.548.100,00	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.248.845.500,00	560.530.214,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	44.520.800,00	39.217.700,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.204.324.700,00	521.312.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	256.873.700,00	238.174.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	63.143.000,00	54.197.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	47.688.100,00	44.052.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	146.042.600,00	139.924.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	151.500.000,00	149.749.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	151.500.000,00	149.749.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	151.500.000,00	149.749.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	151.500.000,00	149.749.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.466.710.500,00	1.316.353.532,00	151.500.000,00	149.749.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.970.290.029,00	2.859.215.222,00	58.200.000,00	55.111.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.970.290.029,00	2.859.215.222,00	58.200.000,00	55.111.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.110.812.679,00	2.007.795.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.010.051.875,00	1.911.201.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.996.500,00	9.996.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.195.826,00	32.113.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.978.200,00	33.773.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.394.200,00	1.394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.458.000,00	26.252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.075.604,00	17.035.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.007.604,00	11.967.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.682.000,00	36.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.232.000,00	12.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.450.000,00	24.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	859.477.350,00	851.419.570,00	58.200.000,00	55.111.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	399.515.000,00	393.565.000,00	21.200.000,00	20.970.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	399.515.000,00	393.565.000,00	21.200.000,00	20.970.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	245.016.000,00	244.516.000,00	11.000.000,00	10.881.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	245.016.000,00	244.516.000,00	11.000.000,00	10.881.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	214.946.350,00	213.338.570,00	26.000.000,00	23.259.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	214.946.350,00	213.338.570,00	26.000.000,00	23.259.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.486.136.071,00	6.369.061.552,00	852.443.900,00	820.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	6.486.136.071,00	6.369.061.552,00	852.443.900,00	820.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Daerah	6.486.136.071,00	6.369.061.552,00	852.443.900,00	820.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.667.257.021,00	3.598.615.005,00	600.000.000,00	568.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.258.000,00	86.544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.258.000,00	86.544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.360.697.021,00	3.314.549.437,00	50.000.000,00	45.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.774.780,00	111.484.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	50.000.000,00	45.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.472.000,00	22.546.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.472.000,00	22.546.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.160.000,00	40.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.850.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.310.000,00	15.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	550.000.000,00	523.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	550.000.000,00	523.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.520.000,00	24.458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	8.991.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.520.000,00	11.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.150.000,00	110.099.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.150.000,00	70.139.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.999.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.664.477.050,00	2.655.301.547,00	252.443.900,00	251.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.642.477.050,00	2.633.304.547,00	252.443.900,00	251.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	624.938.000,00	616.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.341.471.000,00	1.341.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	447.258.050,00	446.201.547,00	252.443.900,00	251.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	29.710.000,00	29.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	199.100.000,00	199.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	22.000.000,00	21.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22.000.000,00	21.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	154.402.000,00	115.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	154.402.000,00	115.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	67.602.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	86.800.000,00	86.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	49.061.986.233,84	47.690.587.891,50	1.978.571.243,00	1.974.396.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN ADMINISTRASI	980.250,00	980.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01				49.061.005.983,84	47.689.607.641,50	1.978.571.243,00	1.974.396.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Mollo Utara	1.553.269.127,00	1.526.127.665,00	13.000.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.549.039.127,00	1.521.907.665,00	13.000.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.505.000,00	38.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.430.000,00	35.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.398.130.511,00	1.371.173.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.440.600,00	10.440.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.339.133,00	26.339.133,00	13.000.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.302.250,00	2.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	13.000.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.489.250,00	6.489.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.547.633,00	17.547.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.926.400,00	23.752.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.511.400,00	10.337.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.915.000,00	12.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.138.083,00	57.138.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.738.083,00	54.738.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.230.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.230.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.230.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Fatumnasi	1.141.439.032,00	1.113.318.820,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.133.989.032,00	1.105.868.820,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.615.000,00	35.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.315.000,00	5.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	982.429.902,00	954.326.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	971.334.902,00	943.231.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.534.218,00	31.534.127,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	815.365,00	815.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.119.841,00	3.119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	27.599.012,00	27.599.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.193.000,00	9.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.093.000,00	7.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.216.912,00	75.216.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.116.912,00	68.116.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Tobu	1.055.839.047,00	1.002.703.771,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.049.089.247,00	995.953.971,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.015.000,00	41.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	909.857.619,00	857.086.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	894.007.619,00	841.236.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.130.000,00	12.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.720.808,00	29.720.508,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.910.300,00	7.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.498.508,00	20.498.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.358.320,00	18.314.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.408.320,00	3.364.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.137.500,00	49.817.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.137.500,00	43.817.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.800,00	6.749.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Nunbena	1.082.318.301,00	1.065.284.094,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.065.868.301,00	1.048.834.094,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.134.895,00	25.134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.089.895,00	5.089.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.045.000,00	20.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	930.057.389,00	913.292.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	910.721.389,00	893.956.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.765.172,00	38.765.172,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.369.172,00	26.369.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.603.000,00	9.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.633.000,00	4.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.307.845,00	62.038.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.307.845,00	46.038.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Mollo Selatan	1.281.960.014,00	1.219.123.952,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.273.800.014,00	1.216.723.952,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.261.000,00	26.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.981.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.280.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.102.785.059,00	1.060.188.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.768.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.739.063,00	20.948.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.373.171,00	2.372.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.939.892,00	18.149.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.050.000,00	9.941.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	5.919.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.690.000,00	3.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.964.892,00	98.964.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.964.892,00	86.964.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.160.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.160.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8.160.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Polen	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.128.067.475,00	1.050.119.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.210.000,00	59.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.210.000,00	59.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	997.021.867,00	921.982.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	990.061.867,00	915.022.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.668.608,00	26.668.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.847.600,00	11.847.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.347.600,00	7.347.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.319.400,00	30.410.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.319.400,00	30.410.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		Kecamatan Mollo Barat	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.311.021.935,00	1.275.639.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.672.000,00	61.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.672.000,00	61.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.171.952.427,00	1.136.861.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.777.100,00	6.777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.927.323,48	5.927.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.376.750,00	2.376.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.550.573,48	3.550.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.195.184,52	61.903.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.195.184,52	61.903.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000		Kecamatan Mollo Tengah	1.277.387.225,00	1.269.735.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.267.442.225,00	1.259.840.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.708.464,00	34.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.183.464,00	9.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.111.848.345,00	1.104.405.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.714.120,00	9.714.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.844.844,00	27.844.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.733.522,00	6.733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.214.072,00	18.214.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.185.500,00	13.112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.255.500,00	2.184.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.430.000,00	9.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.855.072,00	79.849.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.855.072,00	67.849.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.945.000,00	9.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.945.000,00	9.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.945.000,00	9.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000		Kecamatan Kota SoE	9.253.031.083,00	9.094.645.882,00	1.474.174.110,00	1.474.168.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.516.705.193,00	8.361.342.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.270.906.373,00	8.116.473.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.580.400,00	69.580.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.064.242,00	94.913.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.888.370,00	23.887.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.549.872,00	28.549.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.626.000,00	42.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.576.000,00	101.283.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.250.000,00	26.965.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.426.000,00	70.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.158.578,00	48.672.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.158.578,00	44.672.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	725.825.890,00	722.803.034,00	1.474.174.110,00	1.474.168.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	725.825.890,00	722.803.034,00	1.474.174.110,00	1.474.168.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	220.689.890,00	220.667.034,00	1.474.174.110,00	1.474.168.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	505.136.000,00	502.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000		Kecamatan Amanuban Barat	1.448.065.858,00	1.426.602.531,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.429.585.858,00	1.408.187.531,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.808.000,00	31.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.823.000,00	9.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.985.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.316.258.050,00	1.294.944.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.081.800,00	13.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.535.564,00	38.535.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.282.700,00	7.282.700,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.702.700,00	4.702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.104.000,00	11.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.133.108,00	63.133.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.558.108,00	61.558.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.480.000,00	18.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.480.000,00	18.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	18.480.000,00	18.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000		Kecamatan Batuputih	1.564.898.020,42	1.498.936.586,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.564.898.020,42	1.498.936.586,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.407.178.975,00	1.344.193.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.819.200,00	7.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.018.656,00	43.017.156,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.435.500,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.241.750,00	5.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	36.341.406,00	36.340.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.666.527,92	22.666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.322.527,92	8.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.563.861,50	59.589.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.563.861,50	59.589.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000		Kecamatan Kuatnana	1.427.438.652,00	1.383.811.577,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.427.438.652,00	1.383.811.577,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.867.000,00	20.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.857.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.950.000,00	18.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.266.447.414,00	1.223.871.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.445.108,00	22.445.108,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.892.500,00	3.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.974.608,00	17.974.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.855.000,00	11.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.884.130,00	105.009.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.600.000,00	44.418.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.284.130,00	50.591.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		Kecamatan Amanuban Selatan	1.186.307.322,00	1.167.443.501,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000			980.250,00	980.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	980.250,00	980.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.048.000.356,00	1.030.200.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.156.900,00	9.156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.936.358,00	29.936.358,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	980.250,00	980.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.746.750,00	6.746.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.189.608,00	23.189.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.485.608,00	63.421.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.485.608,00	53.421.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000		Kecamatan Noebeba	1.085.080.305,00	1.027.437.136,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.071.701.605,00	1.014.058.636,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.144.600,00	28.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.984.600,00	9.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	938.029.673,00	880.725.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	923.190.423,00	865.886.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.879.250,00	7.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.158.500,00	7.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.318.500,00	6.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.344.224,00	14.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.144.224,00	4.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.024.608,00	78.687.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.919.608,00	68.582.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.378.700,00	13.378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.378.700,00	13.378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.378.700,00	13.378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000		Kecamatan Kuanfatu	1.378.482.853,00	1.314.452.939,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.378.482.853,00	1.314.452.939,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.239.508.439,00	1.178.513.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.310.000,00	6.309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.481.064,00	31.481.064,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.536.456,00	6.536.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.144.608,00	24.144.608,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.524.000,00	19.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.059.000,00	3.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.719.350,00	53.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.834.350,00	47.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000		Kecamatan Kualin	1.286.664.069,00	1.268.048.822,00	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.285.964.069,00	1.267.348.822,00	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.129.748.609,00	1.111.983.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.066.400,00	3.066.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.065.000,00	9.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.169.700,00	3.169.700,00	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	722.200,00	722.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.915.000,00	23.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.750.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.480.760,00	93.480.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.249.172,00	77.249.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.231.588,00	11.231.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000		Kecamatan Amanuban Tengah	2.041.721.278,00	2.000.892.211,00	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.029.221.878,00	1.988.393.211,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.923.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.923.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.869.985.300,00	1.834.153.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.633.200,00	13.632.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.709.614,00	34.522.248,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.455.500,00	11.455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.879.114,00	18.691.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.630.069,00	34.523.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.806.069,00	11.699.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.274.000,00	18.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.973.895,00	81.293.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.973.895,00	77.293.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.499.400,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.499.400,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.499.400,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000		Kecamatan Kolbano	1.299.379.718,00	1.268.909.438,00	34.855.000,00	30.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.279.379.718,00	1.248.909.438,00	34.855.000,00	30.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.856.358,00	19.856.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.261.750,00	2.261.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	34.855.000,00	30.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	34.855.000,00	30.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.020.000,00	20.185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.950.000,00	3.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.827.788,00	75.232.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.827.788,00	65.232.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000		Kecamatan Oenino	1.094.295.127,00	1.066.722.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.089.845.127,00	1.062.272.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	949.934.171,00	922.363.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	917.904.171,00	890.333.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.998.000,00	17.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.120.956,00	91.120.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.120.956,00	81.120.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.28.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		Kecamatan Amanuban Timur	1.668.522.181,00	1.616.277.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.664.446.681,00	1.612.201.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.555.000,00	39.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.575.000,00	33.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.493.231.003,00	1.458.804.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.726.600,00	10.726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.470.000,00	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.026.758,00	19.817.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.248.891,00	1.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.459.000,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.318.867,00	14.109.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.933.920,00	80.325.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.933.920,00	70.325.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.075.500,00	4.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		Kecamatan Fautmolo	1.238.128.254,00	1.218.809.651,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.218.128.254,00	1.198.809.651,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.580.000,00	23.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.077.277.297,00	1.058.311.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.640.957,00	31.561.562,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	27.727.957,00	27.648.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.260.000,00	29.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.370.000,00	56.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.370.000,00	46.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		Kecamatan Fatukopa	1.105.863.324,00	1.083.381.727,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.090.863.324,00	1.068.481.727,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.110.000,00	24.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	945.510.716,00	923.029.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	935.070.716,00	912.589.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.170.108,00	34.170.108,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.302.171,00	16.302.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.095.437,00	16.095.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.385.500,00	21.385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.607.500,00	7.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.218.000,00	12.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.580.000,00	62.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		Kecamatan KIE	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.314.495.622,00	1.300.035.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.150.843.343,00	1.136.383.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.136.900,00	14.136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.802.276,00	45.802.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.316.276,00	2.316.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.910.000,00	37.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.630.907,00	43.630.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.480.907,00	34.480.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.219.096,00	74.219.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.219.096,00	64.219.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		Kecamatan Kot"olin	1.250.342.625,00	1.202.996.236,00	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.246.467.625,00	1.199.596.236,00	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.148.000,00	28.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.111.929.625,00	1.077.589.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.098.950.625,00	1.065.262.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.079.000,00	4.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.470.000,00	25.427.000,00	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.070.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.260.000,00	8.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.100.000,00	3.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.660.000,00	59.663.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.700.000,00	59.663.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.875.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.875.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.875.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		Kecamatan Amanatun Selatan	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.329.845.645,00	1.276.040.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.130.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.130.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.136.402.094,00	1.121.658.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.252.000,00	4.250.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.472.456,00	16.471.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	583.750,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.517.750,00	2.517.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.370.956,00	13.370.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.611.487,00	15.234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	864.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.902.487,00	5.879.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.229.608,00	95.275.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.229.608,00	75.313.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		Kecamatan Boking	1.240.737.847,00	1.227.224.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.226.339.647,00	1.212.825.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.677.900,00	39.677.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.437.900,00	5.437.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.240.000,00	34.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.061.021.775,00	1.049.260.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.048.797.675,00	1.037.036.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.304.100,00	4.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.857.981,00	34.639.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.983.587,00	2.983.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	31.720.394,00	30.502.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.331.063,00	14.238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.906.063,00	6.813.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.450.928,00	75.008.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.450.928,00	65.008.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	14.398.200,00	14.398.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		Kecamatan Nunkolo	1.220.126.893,00	1.193.205.853,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.220.126.893,00	1.193.205.853,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.072.902.169,00	1.050.422.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.604.700,00	16.604.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.577.794,00	18.140.152,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.012.206,00	3.012.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.622.588,00	13.184.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.466.430,00	27.462.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.326.430,00	7.322.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.545.500,00	77.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.045.500,00	72.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		Kecamatan Noebana	1.019.198.808,50	982.731.444,50	18.716.376,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	999.198.808,50	968.601.444,50	18.716.376,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.936.000,00	20.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.936.000,00	10.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	863.428.160,00	833.460.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	844.627.960,00	814.693.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.080.200,00	6.046.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.826.040,50	21.790.992,50	18.716.376,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.150.235,00	2.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	18.716.376,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.081.197,50	2.050.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.594.608,00	17.594.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.198.000,00	10.094.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.248.000,00	2.144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.810.608,00	82.446.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.060.608,00	77.696.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		Kecamatan Santian	1.200.725.405,00	1.173.994.242,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.195.815.405,00	1.169.124.242,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.130.000,00	28.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.130.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.065.750.917,00	1.040.428.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.393.858,00	23.393.858,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.524.250,00	4.524.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.494.608,00	17.494.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.340.630,00	60.076.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.340.630,00	50.076.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.910.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.910.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.910.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		Kecamatan Amanatun Utara	1.271.824.752,92	1.225.216.827,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.264.744.752,92	1.218.136.827,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.565.000,00	34.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.665.000,00	29.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.129.533.947,00	1.086.102.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.208.800,00	12.208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.878.305,92	22.701.986,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.760.900,00	1.760.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.611.612,50	5.611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.505.793,42	15.329.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.327.500,00	14.327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		Kecamatan Tolanas	1.132.041.150,00	1.068.938.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.116.461.150,00	1.053.358.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	960.143.638,00	911.950.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	940.799.238,00	892.606.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.904.400,00	8.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.689.262,00	39.689.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.155.654,00	10.155.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.533.608,00	29.533.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.367.500,00	13.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.467.500,00	7.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.740.750,00	68.882.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.740.750,00	58.882.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		Kecamatan Kolbaun	1.172.487.035,00	1.080.800.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.150.766.135,00	1.071.215.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.587.100,00	32.266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.736.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.851.100,00	27.851.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.022.430.874,42	946.215.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	953.312.618,00	895.997.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.063.256,42	46.162.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.409.265,00	7.409.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.453.265,00	3.453.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.807.090,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.797.090,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.531.805,58	69.524.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.244.608,00	62.244.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.287.197,58	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.720.900,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.720.900,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	21.720.900,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.150.606.154,00	4.086.382.119,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.150.606.154,00	4.086.382.119,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.150.606.154,00	4.086.382.119,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.909.503.404,00	1.678.985.017,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.200.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.731.264.234,00	1.505.942.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	247.493.753,00	245.061.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.304.250,00	35.210.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.032.750,00	10.032.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.029.000,00	22.935.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.095.700,00	38.696.700,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.835.000,00	14.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.268.700,00	22.268.700,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.589.220,00	77.385.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.589.220,00	77.385.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	539.270.250,00	536.334.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	539.270.250,00	536.334.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	539.270.250,00	536.334.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.565.256.000,00	742.922.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.565.256.000,00	742.922.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1.519.781.000,00	698.352.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	39.937.000,00	39.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta, Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.538.000,00	5.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.136.576.500,00	1.128.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.136.576.500,00	1.128.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	66.076.500,00	63.652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.050.500.000,00	1.044.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.390,50	142.651.192.101,00	126.632.269.543,00	2.125.000.000,00	1.076.675.400,00	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	80.155.541.892,26	160.051.757.397,08
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	80.155.541.892,26	160.304.062.397,08
3	**Sub Total (1 - 2)**	**0,00**	**(252.305.000,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	32.986.928.332,12	80.155.541.892,26
5	**Sub Total (3 + 4)**	**32.986.928.332,12**	**79.903.236.892,26**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	252.305.000,00
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**	**32.986.928.332,12**	**80.155.541.892,26**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	24.478.726.521,00	15.420.703.922,33	9.058.022.598,67	58,74
4	Pendapatan Retribusi Daerah	33.793.836.982,00	7.488.789.311,91	26.305.047.670,09	351,26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.964.581,00	4.831.703.453,00	2.785.261.128,00	57,65
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.155.741.794,99	28.512.608.705,61	(23.356.866.910,62)	(81,92)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**71.045.269.878,99**	**56.253.805.392,85**	**14.791.464.486,14**	**26,29**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	3.853.375.538,00	4.430.403.187,00	(577.027.649,00)	(13,02)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.295.908.000,00	506.350.000,00	789.558.000,00	155,93
13	Dana Alokasi Umum	873.657.067.032,00	834.715.979.702,00	38.941.087.330,00	4,67
14	Dana Alokasi Khusus	311.439.188.891,00	221.495.560.083,00	89.943.628.808,00	40,61
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**	**1.190.245.539.461,00**	**1.061.148.292.972,00**	**129.097.246.489,00**	**12,17**
16					
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**				
18	Insentif Fiskal	7.207.988.000,00	0,00	7.207.988.000,00	100,00
19	**Jumlah Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 18)**	**7.207.988.000,00**	**0,00**	**7.207.988.000,00**	**100,00**
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (15 + 19)**	**1.197.453.527.461,00**	**1.061.148.292.972,00**	**136.305.234.489,00**	**12,85**
21					
22	**TRANSFER ANTAR DAERAH**				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.924.117.265,00	35.011.594.334,00	(87.477.069,00)	(0,25)
24	Bantuan Keuangan	0,00	1.203.134.000,00	(1.203.134.000,00)	(100,00)
25	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)**	**34.924.117.265,00**	**36.214.728.334,00**	**(1.290.611.069,00)**	**(3,56)**
26	**Jumlah Pendapatan Transfer (20 + 25)**	**1.232.377.644.726,00**	**1.097.363.021.306,00**	**135.014.623.420,00**	**12,30**
27					
28	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
29	Pendapatan Hibah	12.501.531.845,10	15.707.275,00	12.485.824.570,10	79.490,71
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.809.640.585,00	88.355.657.609,00	(69.546.017.024,00)	(78,71)
31	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (29+30)**	**31.311.172.430,10**	**88.371.364.884,00**	**-57.060.192.453,90**	**(64,57)**
32	**JUMLAH PENDAPATAN (7+26+31)**	**1.334.734.087.035,09**	**1.241.988.191.582,85**	**92.745.895.452,24**	**7,47**
33					
34	**BEBAN**				
35	Beban Pegawai	772.951.919.661,00	646.503.980.098,00	126.447.939.563,00	19,56
36	Beban Barang	135.385.310.334,32	121.894.781.038,56	13.490.529.295,76	11,07
37	Beban Jasa	183.719.845.115,98	167.444.067.980,00	16.275.777.135,98	9,72
38	Beban Pemeliharaan	3.336.785.354,00	3.248.738.146,00	88.047.208,00	2,71
39	Beban Perjalanan Dinas	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00	(12.872.252.347,00)	(26,31)
40	Beban Hibah	27.149.367.998,00	64.147.402.532,00	(36.998.034.534,00)	(57,68)
41	Beban Bantuan Sosial	655.500.000,00	530.000.000,00	125.500.000,00	23,68
42	Beban Penyisihan Piutang	195.926.918,33	939.660.605,02	(743.733.686,69)	(79,15)
43	Beban Penyusutan	160.814.962.137,92	146.782.156.258,93	14.032.805.878,99	9,56
44	Beban Transfer	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00	6.791.389.180,00	7,78
45	Beban Lain-lain	0,00	7.546.052.944,00	(7.546.052.944,00)	(100,00)
46	**JUMLAH BEBAN (35 s/d 45)**	**1.414.321.935.776,55**	**1.295.230.021.026,51**	**119.091.914.750,04**	**9,19**
47					
48	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (32-46)**	**(79.587.848.741,46)**	**(53.241.829.443,66)**	**(26.346.019.297,81)**	**49,48**

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
49					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
51	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	138.170.800,00	(138.170.800,00)	(100,00)
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	315.727.334,00	(315.727.334,00)	(100,00)
54	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERSIONAL (51 s/d 54)	0,00	(177.556.534,00)	177.556.534,00	(100,00)
56	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (48+55)	(79.587.848.741,46)	(53.419.385.977,66)	(26.168.462.763,81)	48,99
57					
58	POS LUAR BIASA				
59	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Luar Biasa	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00	42.052.692,00	4,09
61	POS LUAR BIASA (59-60)	(1.070.675.400,00)	(1.028.622.708,00)	(42.052.692,00)	4,09
62	SURPLUS/DEFISIT- LO (56+61)	(80.658.524.141,46)	(54.448.008.685,66)	(26.210.515.455,81)	48,14

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	**EKUITAS AWAL**	**2.432.885.928.524,15**	**2.223.702.565.429,83**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**(80.658.524.141,46)**	**(54.448.008.685,66)**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	**(160.781.807,85)**	**263.631.371.779,97**
4	Koreksi Ekuitas - Kas	0,00	252.305.000,00
5	Koreksi Ekuitas - Piutang	(79.026.427,00)	(177.731.100,00)
6	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	(1.682.062.673,61)	0,00
7	Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Investasi	(1,00)	(298.492.062,00)
9	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	4.220.263.952,00	12.266.058.510,01
10	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.861.692.277,24)	249.676.765.370,24
11	Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain	(1.701.566.193,00)	2.038.108.967,00
12	Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	(345.639.153,00)	71.841.440,00
13	Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	1.288.940.965,00	(197.484.345,28)
14	**EKUITAS AKHIR**	**2.352.066.622.574,84**	**2.432.885.928.524,15**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	**ASET**		
2	**ASET LANCAR**		
3	Kas dan Setara Kas	38.353.877.717,58	83.949.521.800,52
4	Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16
5	Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00
7	Kas di Bendahara BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
8	Kas di Bendahara BOSP	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52
9	Kas di Bendahara FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00
10	Kas di Bendahara BOK	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00
11	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	7.309.181.839,96	7.042.641.270,96
13	Piutang Retribusi Daerah	4.131.776.363,00	3.825.179.369,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.580.669.661,53	6.736.652.726,53
15	Piutang Transfer Antar Daerah	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00
16	Piutang Lainnya	1.650.000,40	1.650.000,40
17	Penyisihan Piutang	(9.269.897.854,29)	(7.391.908.262,35)
18	Beban Dibayar Dimuka	104.499.425,30	6.448.818.895,30
19	Persediaan	60.169.899.748,63	50.296.390.201,33
20	**JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 18)**	**110.085.653.030,11**	**153.170.333.009,69**
21			
22	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		
23	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
24	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
25	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (22 s/d 23)**	**0,00**	**0,00**
26			
27	**Investasi Permanen**	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00
29	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (27)**	**109.306.149.258,00**	**109.142.483.339,00**
30			
31	**ASET TETAP**		
32	Tanah	393.697.391.316,00	409.633.141.643,00
33	Peralatan dan Mesin	574.162.710.116,00	537.515.119.535,00

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
34	Gedung dan Bangunan	1.157.386.387.177,33	1.096.560.967.065,16
35	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.372.371.173.495,79	1.319.337.081.738,94
36	Aset Tetap Lainnya	37.928.194.457,00	37.321.406.644,00
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.337.392.467,17	38.720.009.935,70
38	Akumulasi Penyusutan	(1.450.843.610.627,93)	(1.288.667.523.503,77)
39	**JUMLAH ASET TETAP (31 s/d 37)**	**2.116.039.638.401,36**	**2.150.420.203.058,03**
40			
41	**ASET LAINNYA**		
42	Tagihan Jangka Panjang	326.600.120,00	327.600.120,00
43	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.616.555.850,00	6.729.104.028,00
44	Aset Tidak Berwujud	1.969.395.289,00	305.948.387,00
45	Aset Lain-lain	36.579.464.908,54	35.782.152.330,40
46	**JUMLAH ASET LAINNYA (45 s/d 48)**	**45.492.016.167,54**	**43.144.804.865,40**
47			
48	**JUMLAH ASET (19÷24÷28÷38÷42÷49)**	**2.380.923.456.857,01**	**2.455.877.824.272,12**
49			
50	**KEWAJIBAN**		
51	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
52	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.366.949.385,46	3.793.979.908,26
53	Pendapatan Diterima Dimuka	1.712.328,77	1.712.328,77
54	Utang Belanja	11.753.679.808,00	6.411.596.143,00
55	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.734.492.759,94	12.784.607.367,94
56	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (55 s/d 58)**	**28.856.834.282,17**	**22.991.895.747,97**
57			
58	**JUMLAH KEWAJIBAN (59)**	**28.856.834.282,17**	**22.991.895.747,97**
59			
60	**EKUITAS**	**2.352.066.622.574,84**	**2.432.885.928.524,15**
61			
62	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (61÷63)**	**2.380.923.456.857,01**	**2.455.877.824.272,12**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	*Arus Kas Masuk*		
3	Penerimaan Pajak Daerah	24.212.185.952,00	14.919.206.165,33
4	Penerimaan Retribusi Daerah	35.564.196.626,00	7.153.486.499,91
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.453.298.661,00	4.651.232.092,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	11.345.596.202,36	27.065.950.952,94
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.923.859.538,00	4.900.101.753,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.295.908.000,00	506.350.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	873.657.067.032,00	834.715.979.702,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	311.439.188.891,00	221.495.560.083,00
11	Insentif Fiskal	7.207.988.000,00	0,00
12	Dana Desa	191.070.627.684,00	238.354.154.749,00
13	Penerimaan Bagi Hasil	32.481.508.145,00	40.961.700.521,00
14	Bantuan Keuangan	0,00	1.203.134.000,00
15	Lain-lain Penerimaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.809.640.585,00	88.355.657.609,00
16	*Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 15)*	1.518.461.065.316,36	1.484.282.514.127,18
17	*Arus Kas Keluar*		
18	Pembayaran Pegawai	772.362.853.812,00	648.876.618.174,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	372.114.507.657,50	354.452.271.225,00
20	Pembayaran Hibah	8.046.673.927,00	68.167.808.928,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	655.500.000,00	530.000.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00
23	Pembayaran Bagi Hasil	2.157.963.398,00	886.875.098,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	282.966.568.084,00	324.729.794.269,00
25	*Jumlah Arus Kas Keluar (18 s/d 24)*	1.439.374.742.278,50	1.398.671.990.402,00
26	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 25)**	**79.086.323.037,86**	**85.610.523.725,18**
27	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
28	*Arus Kas Masuk*		
29	Penjualan Aset Tetap Lainnya	19.116.750,00	102.437.250,00
30	Penjualan Aset Lainnya	358.216.000,00	365.584.800,00
31	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
32	*Jumlah Arus Kas Masuk (29 s/d 31)*	377.332.750,00	468.022.050,00
33	*Arus Kas Keluar*		
34	Perolehan Tanah	0,00	198.757.000,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	43.440.314.806,00	28.284.032.581,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	61.389.821.259,00	34.295.572.710,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.888.189.763,00	103.200.934.739,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	315.588.900,00	247.769.250,00
39	Perolehan Aset Lainnya	598.354.620,00	0,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
41	*Jumlah Arus Kas Keluar (34 s/d 39)*	126.632.269.348,00	166.227.066.280,00
42	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (32 - 40)**	**(126.254.936.598,00)**	**(165.759.044.230,00)**
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	*Arus Kas Masuk*		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	119.364.252.985,00	113.490.123.542,80
46	Penerimaan dari Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
47	*Jumlah Arus Kas Masuk (44 s/d 45)*	119.364.252.985,00	113.490.123.542,80
48	*Arus Kas Keluar*		
49	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	117.791.283.507,80	110.699.659.421,00
50	*Jumlah Arus Kas Keluar (48)*	117.791.283.507,80	110.699.659.421,00
51	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (46 - 49)**	**1.572.969.477,20**	**2.790.464.121,80**

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
52			
53	Kenaikan / (Penurunan) Kas (26+41+50)	(45.595.644.082,94)	(77.358.056.383,02)
54	Saldo Awal Kas	83.949.521.800,52	161.055.273.183,54
55	Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	252.305.000,00
56	Saldo Akhir Kas (52 s/d 54)	38.353.877.717,58	83.949.521.800,52
57	Teridiri dari:		
58	Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16
59	Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00
60	Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00
61	Kas di BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
62	Kas di Bendahara BOSP	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52
63	Kas di Bendahara FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00
64	Kas di Bendahara BOK	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00
65	Kas Lainnya	0,00	0,00
66	Saldo Akhir Kas (57 s/d 64)	38.353.877.717,58	83.949.521.800,52

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*).

a. **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparan**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. **Kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

1.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

a. Informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

c. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

f. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

w. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

x. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

y. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Tahun 36 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan Keuangan

III. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Surplus/(Defisit)
5.1.5 Pembiayaan
5.1.6 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.4.1 Pendapatan
5.4.2 Beban
5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasi
5.4.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
5.4.5 Pos Luar Biasa
5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas
5.5.5 Saldo Awal Kas
5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu
5.5.7 Saldo Akhir Kas
5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan atas Informasi Non keuangan

VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemda Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu minimal:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 24,68%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,63%;
c. Gini Ratio sebesar 0,287;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,22%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,16%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 0,24%; dan
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) senilai Rp10.961,27.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan – kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin prov/kab/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Kab/Kota (%)	25,45	25,18	24,68	24,50	Turun 0,18 poin
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	120,45	119,51	117,41	116,74	Turun 670 orang
3	Provinsi (%)	20,05	19,96	19,02	18,60	Turun 0,88 poin
4	Nasional (%)	9,57	9,36	8,57	8,47	Turun 0,1 poin
5	Peringkat Provinsi	16	16	15	17	Naik 2 tingkat
6	Peringkat Nasional	480	480	480	480	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Persentase penduduk miskin Kabupaten TTS pada Tahun 2025 sebesar 24,50% mengalami penurunan dari Tahun 2024, di mana persentase penduduk miskin berhasil

ditekan sebesar 0,18 poin dan diharapkan pada Tahun 2026 terus menurun angkanya. Persentase penduduk miskin Kabupaten TTS masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan anggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab TTS	6,16	5,78	4,51	5,03	Turun 0,52 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,63	3,33	3,57	2,89	Turun 0,68 poin
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	1,36	1,29	Turun 0,07 poin
4	Peringkat Provinsi	21	18	15	17	Turun 2 tingkat
5	Peringkat Nasional	495	489	479	292	Turun 13 tingkat

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2022 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2022. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2023 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2023 dan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2024 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2024 serta Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2025 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2025

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab TTS	1,83	1,72	1,23	1,41	Naik 0,18 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,93	0,8	0,85	0,74	Turun 0,11 poin
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,32	0,30	Turun 0,02 poin
4.	Peringkat Provinsi	21	19	15	18	Turun 3 tingkat
5	Peringkat Nasional	494	490	481	493	Turun 23 Tingkat

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2022 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2022. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2023 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2023 dan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2024 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2024 serta Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2025 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2025.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS Tahun 2022 dan 2023 sebesar 1,99% dan 2,64%, sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar 2,63% sedangkan untuk Tahun 2025 sebesar 3,57%.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab TTS (%)	1,99	2,64	2,63	3,57	Naik,0,94 Poin
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	34	3,14	3,02	3,31	Naik 0,29 poin
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 poin
4	Peringkat Provinsi	4	11	12	19	Naik 7 tingkat
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

TPT di Kabupaten TTS Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,57%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 2,63% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2025. Data TPT Kabupaten Provinsi dan Nasional 2025 berdasarkan pada Pendapatan Periode Agustus Tahun 2025.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

a. Indeks Gini sama dengan 0 menunjukan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan

b. Indeks Gini sama dengan 1 memiliki arti bahwa distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS, data Indeks Gini pada Tahun 2025 sebesar 0,311% dengan rincian sebagai berikut.

No	Gini Ratio (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Kabupaten/Kota	0,3	0,284	0,284	0,311	Naik 0,027 Poin
2	Provinsi	0,334	0,325	0,316	0,322	Naik 0,006 Poin
3	Indonesia/Nasional	0,381	0,388	0,381	0,363	Turun 0,018 poin
4	Peringkat Provinsi	-	-	-		-
5	Peringkat Nasional	-	-	-		-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten TTS

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);

b. Sedang (60≤IPM<70);

c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan

d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS, realisasi pencapaian IPM Kabupaten TTS Tahun 2025 adalah sebesar 66,88 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Kabupaten/Kota	64,54	65,39	66,22	66,88	Naik 0,66 poin
2	Provinsi	67,63	68,4	69,14	69,89	Naik 0,75 poin
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 Poin
4	Peringkat Provinsi	17	17	17	17	Tetap

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
5	Peringkat Nasional	489	490	482	482	Tetap

Sumber Dokumen BPS Kabupaten TTS

Realisasi pencapaian IPM Kab TTS adalah sebesar 66,88 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 66,22 poin mengalami kenaikan sebesar 0,66 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. UHH mencapai 71,47 tahun pada Tahun 2025, lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,43 tahun dengan harapan lama sekolah 12,63 tahun. Sementara, standar hidup, PNB per kapita per tahun senilai Rp7.951.000,00 atau meningkat Rp196.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten TTS pada saat ini berada pada urutan 17 dari 22 kab/kota yang ada di Provinsi NTT dan ada pada urutan ke-482 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

No	Uraian	Kabupaten TTS				Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp)	5.035,9	5.197,44	5.372,52	5.595,81	78.044,57	12.920.281,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,11	3,21	3,37	4,16	3,73	5,03
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Selama kurun waktu Tahun 2023 perekonomian Kabupaten TTS mengalami pertumbuhan sebesar 3,21%. Pada periode Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kab. TTS sebesar 3,37% dan pada kurun waktu Tahun 2025 pertumbuhan perekonomian Kabupaten TTS sebesar 4,16%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kab TTS dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya

pun hanya kurang dari 10 persen dalam satu tahun; (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30 persen setahun; (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS Tingkat Inflasi Kabupaten TTS Tahun 2024 adalah sebesar 0,24 persen (Tahun 2024 Kabupaten TTS sudah menjadi salah satu Kota Inflasi Pedesaan dari 5 Kab/Kota yang ada di Provinsi NTT) dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	7,07	4,5	0,24	1,77	Naik 1,53 Poin
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,65	2,42	1,19	2,39	Naik 1,2 Poin
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	2,92	Naik 1,35 Poin

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Tingkat inflasi di Kabupaten TTS Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,77%. Sejak Februari 2024 Kabupaten TTS menjadi salah satu Kabupaten yang menjadi Kota Inflasi Pedesaan dari 5 Kab/Kota yang ada di Provinsi NTT.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten TTS

Struktur perekonomian Kabupaten TTS dalam menunjang PDRB dapat dilihat dirinci sebagai berikut.

Kategori	Lapangan Usaha PDRB	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.020,79	4.343,70	4.724,08	5.003,36
B	Pertambangan dan Penggalian	117,31	123,34	128,61	130,46
C	Industri Pengolahan	55,58	62,67	68,28	76,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	4,41	4,84	4,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,68	1,76	1,88	2,01
F	Konstruksi	804,09	901,96	914,18	895,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	566,45	638,65	726,68	826,30
H	Transportasi dan Pergudangan	112,10	124,91	154,50	159,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	7,75	8,67	9,48
J	Informasi dan Komunikasi	626,68	639,02	649,96	686,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	282,58	290,94	303,37	322,35
L	*Real Estate*	213,08	239,19	271,96	292,92
M,N	Jasa Perusahaan	4,44	5,02	6,12	6,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.256,76	1.312,01	1.395,43	1.592,18
P	Jasa Pendidikan	531,91	565,69	603,84	674,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,57	159,20	178,18	201,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	62,36	66,97	71,94	76,28
Produk Domestik Regional Bruto		**8.810,39**	**9.487,19**	**10.212,51**	**10.961,27**
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas		**8.810,39**	**9.487,19**	**10.212,51**	**10.961,27**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat serta taat pada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan ini berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama. Selain itu, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 s.d. 2026 juga menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan daerah yang diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatan dalam pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya. Untuk kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan manfaat Anggaran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. dengan Proporsi Belanja Operasi ditargetkan sebesar 72,98% dan Belanja Modal sebesar 7,99% dari besaran APBD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 27 Tahun 2025 Beberapa hal utama yang terkait anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

   Anggaran Pendapatan senilai Rp1.704.309.743.178,00 yang terdiri dari:

   1) Pendapatan Asli Daerah senilai Rp102.800.000.000,00;
   2) Pendapatan Transfer senilai Rp1.583.522.488.423,00; dan
   3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp17.987.254.755,00.

b. Anggaran Belanja

   Anggaran belanja senilai Rp1.784.465.285.070,26.

c. Anggaran Pembiayaan

   Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan senilai Rp80.155.541.892,26 dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp0,00. Dalam APBD Tahun 2025, pembiayaan netto senilai Rp80.155.541.892,26.

Dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2025 beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

a. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

1) Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan; dan

2) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada.

b. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

1) Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

2) Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja sesuai;

3) Tugas pokok, fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah; dan

4) Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis).

c. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;

2) Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi; dan

3) Pembiayaan diarahkan untuk penerimaan dana bergulir sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran utang yang harus diselesaikan.

Rekapitulasi Belanja untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari:

d. Alokasi fungsi pendidikan

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P	Realisasi
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	631.270.482.605,00	657.357.288.399,00	588.977.687.767,00
a	Belanja Operasi	604.297.204.405,00	612.538.999.656,00	553.973.873.365,00
1)	Belaja Pegawai	488.165.073.955,00	492.239.282.467,00	470.394.929.977,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	115.932.130.450,00	119.770.481.189,00	83.049.707.388,00
3)	Belanja Hibah	200.000.000,00	529.236.000,00	529.236.000,00
4)	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
b	Belanja Modal	26.973.278.200,00	44.818.288.743,00	35.003.814.402,00
2	Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan antara lain	4.967.775.775,00	6.767.817.060,00	6.277.630.513,00
a	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
1)	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
b	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.567.776.000,00	5.630.617.580,00	5.156.849.425,00
c	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.399.999.775,00	1.137.199.480,00	1.120.781.088,00

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P	Realisasi
3	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	636.238.258.380,00	664.125.105.459,00	595.255.318.280,00
4	Total Belanja Daerah	1.806.824.088.809,00	1.784.465.285.070,26	1.575.883.852.320,50
	Rasio Anggaran Pendidikan (3:4) x 100%	**35,21**	**37,22**	**37,77**

Belanja wajib yang dialokasikan untuk fungsi Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perudang-undangan pada APBD Induk yakni sebesar 35,21% dan Perubahan sebesar 37,22%.

e. Alokasi Belanja Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P	Realisasi
1	Belanja Operasi	434.298.392.490,91	447.031.505.223,01	380.133.314.078,50
	a Belanja Barang dan Jasa	425.477.311.490,91	437.251.188.223,01	372.086.640.151,50
	b Belanja Hibah	8.821.081.000,00	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00
2	Belanja Modal	190.822.662.773,99	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00
	a. Tanah	200.000.000,00	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	32.004.432.899,99	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00
	c. Bangunan dan Gedung	43.466.151.797,00	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	113.798.503.077,00	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00
	e. Aset tetap Lain	353.575.000,00	370.826.300,00	315.588.900,00
	f Aset Lainnya	1.000.000.000,00	750.000.000,00	598.354.620,00
3	Anggaran Infrastruktur (1+2)	625.121.055.264,90	589.682.697.324,01	506.765.583.426,50
4	Total Belanja Daerah diluar transfer	1.465.907.625.311,00	1.447.156.182.472,26	1.290.759.320.838,50
	Rasio Anggaran Infrastruktur (3:4) x 100%	42,65	40,75	39,26

Belanja wajib yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Induk sebesar 42,65% dan Perubahan sebesar 40,75%.

f. Alokasi Belanja Pegawai

No	Uraian	APBD	APBD-P	Realisasi
1	Belanja Pegawai	981.884.820.006,09	994.039.606.681,25	764.258.515.958,00
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	659.217.307.928,09	665.027.136.181,45	604.104.904.462,00
	b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	155.009.636.493,00	157.692.121.533,00	147.025.996.744,00
	c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.973.712.493,00	139.406.121.533,00	130.640.699.643,00
	d. Balanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.719.080.834,00	18.440.122.467,00	18.009.046.054,00
	e. Belanja Tambahan Penghasilan KDH/WKDH	174.563.861,00	174.565.046,00	132.880.015,00
	f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00	601.600.000,00	488.960.000,00
	g. Belanja Pegawai BLUD	12.264.518.397,00	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00
2	Total Belanja Daerah	1.806.824.088.809,00	1.784.465.285.070,26	1.575.883.852.320,50
3	Rasio Anggaran Pendidikan (1:2) x 100%	54,34	55,71	48,50

Belanja wajib yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perudang-undangan Anggaran Induk sebesar 54,34% dan Perubahan sebesar 55,71%.

Penjelasan:

1) Total pegawai pada Kabupaten TTS sebanyak 12.739 pegawai dengan rincian jumlah PNS 5.321 orang dan Jumlah PPPK sebanyak 7.418 orang yang mengakibatkan anggaran Belanja Pegawai melebihi ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Belanja Pegawai maksimal 30% dari total anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan KDH/WKDH tidak mencapai 100% disebabkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai melaksanakan tugas bulan Maret tahun 2025; dan
2) Pemerintah Daerah mengusulkan adanya tambahan pembiayaan untuk menutup celah fiskal dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

g. Alokasi Dana Desa

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten/Kota	APBD	APBD-P	Dasar Hukum
A. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dari Dana Perimbangan			
1. Pendapatan Dana Perimbangan	1.412.068.348.000,00	1.295.959.657.000,00	PMK No. 130 Tahun 2023 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan DAU dan /atau DBH terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.
2. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	454.256.235.000,00	375.314.669.000,00	
3. Total Dana Perimbangan – DAK	957.812.113.000,00	920.644.988.000,00	
4. Besaran Nilai ADD	95.781.211.300,00	92.064.498.800,00	Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Rasio Nilai ADD (4:3) x 100	10%	10%	
Alokasi ADD dalam APBD 2025:			
Alokasi Dana Desa	95.781.211.300,00	92.064.498.800,00	
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (BPKAD)	600.000.000,00	600.000.000,00	
Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4% (PMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
Besaran Alokasi ADD dalam APBD 2025	**98.381.211.300,00**	**94.664.498.800,00**	

Belanja wajib yang dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai Induk sebesar 10% dan Perubahan sebesar 10%. Adanya perubahan Nilai ADD pada APBD-P karena adanya pengurangan DAU sesuai KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

h. Alokasi Fungsi Pengawasan

Nama Komponen	APBD	APBD-P
Fungsi Pengawasan		
1. Total Belanja Daerah	1.806.824.088.809,00	1.784.465.285.070,26
2. Perhitungan 0,75% dari Total Belanja	13.551.180.666,07	13.383.489.638,03
3. Pagu Belanja Inspektorat	8.354.344.153,00	7.338.579.971,00
Rasio (%)	**0,46**	**0,41**

Belanja wajib yang dialokasikan untuk fungsi pengawasan di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mencapai Induk 0,46% dan Perubahan sebesar 0,41%.

Penjelasan:

1) Pemerintah daerah menyadari untuk belanja wajib fungsi pengawasan belum sepenuhnya sesuai ketentuan perundangan-undangan sebesar 0,75% dari total APBD disebabkan karena belanja wajib masih terfokus memenuhi Belanja Wajib pada Belanja Pegawai; dan

2) Pemerintah Daerah berusaha memenuhi belanja Wajib pada komponen Belanja Pegawai sebesar 30% dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menutup celah fiskal dan Daerah.

i. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya:

1) Opsen PKB

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P
1	Belanja Operasi	3.012.488.138,00	3.012.488.138,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.012.488.138,00	3.012.488.138,00
	b. Belanja Hibah	0,00	0,00
2	Belanja Modal	9.066.051.726,00	9.066.051.726,00
	a. Tanah	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	264.006.200,00	264.006.200,00
	c. Bangunan dan Gedung	0,00	0,00
	d. Jalan,Jaringan dan Irigasi;	8.805.045.526,00	8.805.045.526,00
	e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	f. Aset Lainnya	0,00	0,00
3	Alokasi Penggunaan Opsen PKB (1 + 2)	12.078.539.864,00	12.078.539.864,00
4	Total Nilai Opsen PKB	12.268.575.703,00	12.268.575.703,00
5	**Rasio Penggunaan Opsen PKB dalam mendanai Pembangunan (3 : 4) x 100%**	**98%**	**98%**

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan Opsen PKB dapat disajikan sebagai berikut.

No		Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
1		Kegiatan Pembangunan			
	a.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	227.810.000,00	207.952.900,00
	b	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	2.080.000,00	0,00
2		Kegiatan Pemeliharaan Jalan			
	a.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	222.921.000,00	94.185.645,00
	b.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	10.502.780.822,00	10.395.490.588,00
3		Kegiatan Peningkatan modal/sarana transportasi umum			
	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	15.000.000,00	14.955.000,00
	b.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	381.636.600,00	375.429.350,00
	c.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	46.000.000,00	33.755.000,00
	d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	90.503.000,00	89.518.800,00
	e.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	5.865.000,00	5.862.000,00
	f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	4.500.000,00	4.500.000,00

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
g.	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	46.520.000,00	44.735.000,00
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	92.466.895,00	85.612.820,00
i.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PUPR	412.830.547,00	348.805.565,00
j.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	9.266.000,00	9.266.000,00

2) PBJT atas Tenaga Listrik

No	Nama Komponen	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi		
	a. Belanja Barang dan Jasa	259.360.100,00	249.883.800,00
	b.Belanja Hibah	0,00	0,00
2	Belanja Modal		
	a. Tanah	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	c. Bangunan dan Gedung	0,00	0,00
	d. Jalan,Jaringan dan Irigasi;	2.275.051.000,00	1.675.900.200,00
	e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	f. Aset Lainnya	0,00	0,00
3	Alokasi Anggaran Belanja Menggunakan PBJT Tenaga Listrik (1 + 2)	2.508.541.100,00	1.925.784.000,00
4	Total Anggaran Pendapatan PBJT Tenaga Listrik	4.345.541.307,00	4.345.541.307,00
5	Rasio Penggunaan PBJT Tenaga Listrik (3 : 4) x 100%	58%	

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan PBJT Tenaga Listrik dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum			
	a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PRKP	482.600,00	482.600,00
	b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PRKP	2.781.700,00	2.594.200,00
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PRKP	16.250.000,00	16.185.000,00
	d. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas PRKP	239.845.800,00	230.622.000,00
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00
	f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	596.000.000,00	0,00
2	Kegiatan pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum	-	0,00	0,00

3) Bagi Hasil Pajak Rokok bagian kabupaten/kota

No	Nama Komponen	Anggaran
1	Belanja Operasi	17.187.334.256,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	17.187.334.256,00
	b. Belanja Hibah	0,00
2	Belanja Modal	6.272.700.266,00
	a. Tanah	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	0,00
	c. Bangunan dan Gedung	6.272.700.266,00
	d. Jalan,Jaringan dan Irigasi;	0,00
	e. Aset Tetap Lainnya	0,00

No	Nama Komponen	Anggaran
	f. Aset Lainnya	0,00
3	Alokasi Anggaran Belanja Menggunakan Bagi Hasil Pajak Rokok (1 + 2)	23.460.034.522,00
4	Total Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.460.034.522,00
	Rasio Penggunaan Pajak Rokok (3 : 4) x 100%	100%

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan Bagi Hasil Pajak Rokok

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran
1	Kegiatan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat		
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	8.797.512.946,00
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	14.662.521.576,00
2	Kegiatan penegakan hukum		0,00

4) Pajak Air Tanah

No	Nama Komponen	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	5.000.000,00	1.940.000,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.940.000,00
	b. Belanja Hibah	0,00	0,00
2	Belanja Modal	0,00	0,00
	a. Tanah	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	c. Bangunan dan Gedung	0,00	0,00
	d. Jalan,Jaringan dan Irigasi;	0,00	0,00
	e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	f. Aset Lainnya	0,00	0,00
3	Alokasi Anggaran Belanja Menggunakan Pajak Air Tanah (1 + 2)	5.000.000,00	1.940.000,00
4	Total Anggaran Pendapatan Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00
5	Rasio Penggunaan Pajak Air Tanah (3 : 4) x 100%	17%	

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan Pajak Air Tanah

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Kegiatan Penanaman Pohon		0,00	0,00
2	Kegiatan Pembuatan Lubang/Sumur resapan		0,00	0,00
3	Kegiatan Pelestarian Hutan atau pepohonan		5.000.000,00	1.940.000,00
	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	1.940.000,00
4	Kegiatan Pengelolaan Limbah		0,00	

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mengacu pada RPD maupun program prioritas daerah Tahun 2025 maka gambaran pencapaian kinerja berikut ini tidak menuangkan capaian semua perangkat daerah, akan tetapi yang akan disajikan adalah capaian program prioritas perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pilihan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pelaksanaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2025 didasarkan pada APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, Belanja Daerah Tahun 2025 telah dilakukan beberapa kali perubahan penjabaran berdasarkan jenis belanja dan spesifikasi kegiatannya yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dengan rincian sebagai berikut:

a. Pergeseran Anggaran I ditetapkan dengan Perbup Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Pergeseran anggaran ini dilakukan untuk penyesuaian dan penataan pada 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman; 3) Dinas Sosial; 4) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; 5) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan rincian gaji dan tunjangan ASN.

b. Pergeseran Anggaran II ditetapkan dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Pergeseran anggaran ini dilakukan untuk penyesuaian dan penataan kembali pada beberapa kegiatan di antaranya 1) Belanja Pembangunan ruang kelas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) belanja koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3) Belanja Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah 4)Penyesuaian Belanja gaji dan tunjangan ASN 5) pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pengunaan Silpa mendahului perubahan APBD pada 1)Dinas Kesehatan untuk pembangunan Puskesmas Prototype Bati sumber dana DAK 2023 2) Dinas PUPR untuk pembangunan Jembatan Gantung Desa Linamnutu sumber dana Bantuan Keuangan Prov. NTT Tahun 2024.

c. Perubahan Anggaran APBD ditetapkan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Perbup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kode	Uraian	APBD Perda Nomor 4 Tahun 2024 Perbup Nomor 40 Tahun 2024	Pergeseran I Perbup Nomor 12 Tahun 2025	Pergeseran II Perbup Nomor 13 Tahun 2025	APBD-P Perda Nomor 04 Tahun 2025 Perbup Nomor 27 Tahun 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				
4.1.01	Pajak Daerah	39.359.443.877,00	39.358.943.877,00	39.358.943.877,00	39.320.798.609,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.799.964.934,00	7.799.964.934,00	7.799.964.934,00	8.599.964.934,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.037.121.163,00	43.037.621.163,00	43.037.621.163,00	45.075.766.431,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**102.800.000.000,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.662.425.551.000,00	1.546.316.860.000,00	1.546.316.860.000,00	1.546.316.860.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	37.205.628.423,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.689.824.088.809,00**	**1.573.715.397.809,00**	**1.573.715.397.809,00**	**1.583.522.488.423,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.987.254.755,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**17.000.000.000,00**	**17.000.000.000,00**	**17.000.000.000,00**	**17.987.254.755,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.806.824.088.809,00**	**1.690.715.397.809,00**	**1.690.715.397.809,00**	**1.704.309.743.178,00**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	844.911.107.513,09	846.785.004.590,31	846.785.004.590,31	854.633.485.148,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.477.311.490,91	384.427.735.039,69	383.736.593.921,69	437.251.188.223,01
5.1.05	Belanja Hibah	8.821.081.000,00	8.906.081.000,00	8.906.081.000,00	9.780.317.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	580.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	715.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.279.789.500.004,00**	**1.240.748.820.630,00**	**1.240.057.679.512,00**	**1.302.379.990.371,26**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.159.407.689,00	32.075.970.007,00	33.872.462.625,00	47.758.072.374,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.349.640.350,00	61.642.899.000,00	65.939.822.941,00	69.536.858.941,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.889.299.268,00	15.686.229.174,00	17.732.363.174,00	24.235.434.486,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	244.778.000,00	236.728.000,00	236.728.000,00	370.826.300,00

Kode	Uraian	APBD Perda Nomor 4 Tahun 2024 Perbup Nomor 40 Tahun 2024	Pergeseran I Perbup Nomor 12 Tahun 2025	Pergeseran II Perbup Nomor 13 Tahun 2025	APBD-P Perda Nomor 04 Tahun 2025 Perbup Nomor 27 Tahun 2025
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	750.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**183.993.125.307,00**	**110.641.826.181,00**	**118.781.376.740,00**	**142.651.192.101,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.125.000.000,00**	**2.125.000.000,00**	**2.125.000.000,00**	**2.125.000.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	2.164.348.198,00	2.164.348.198,00	2.164.348.198,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	340.916.463.498,00	335.035.402.800,00	335.035.402.800,00	335.144.754.400,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**340.916.463.498,00**	**337.199.750.998,00**	**337.199.750.998,00**	**337.309.102.598,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.806.824.088.809,00**	**1.690.715.397.809,00**	**1.698.163.807.250,00**	**1.784.465.285.070,26**
	SURPLUS/DEFISIT				
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	7.448.409.441,00	80.155.541.892,26
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	**7.448.409.441,00**	**80.155.541.892,26**
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	7.448.409.441,00	80.155.541.892,26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp1.518.838.398.066,36 atau 89,12% dari anggaran Tahun 2025 yang ditargetkan senilai Rp1.704.309.743.178,00, sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp1.484.750.536.177,18 atau 90,68% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.637.281.516.806,00;

b. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2025 senilai Rp1.566.007.011.626,50 atau 87,76% dari anggaran senilai Rp1.784.465.285.070,26 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer pada Tahun 2024 senilai Rp1.564.899.056.682,00 atau 87,07% dari anggaran senilai Rp1.797.333.274.203,00; dan

c. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp80.155.541.892,26 sedangkan realisasi pembiayaan pada Tahun 2024 senilai Rp160.304.062.397,08 atau 100,16% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp160.051.757.397,00.

Gambaran realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2025 secara garis besar disajikan sebagai berikut.

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
I.	Pendapatan Daerah	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	(185.471.345.111,64)
II.	Belanja dan Transfer	1.784.465.285.070,26	1.566.007.011.626,50	(218.458.273.443,76)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
III. Surplus/ (Defisit)	(80.155.541.892,26)	(47.168.613.560,14)	(32.986.928.332,12)
IV. Pembiayaan:			
a. Penerimaan Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00
SiLPA	**0,00**	**32.986.928.332,12**	**(32.986.928.332,12)**

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	**1.704.309.743.178,00**	**1.518.838.398.066,36**	**89,11**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**102.800.000.000,00**	**78.952.610.191,36**	**76,80**
Pendapatan Pajak Daerah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,57
Pendapatan Retribusi Daerah	8.559.964.934,00	35.564.196.626,00	413,53
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.583.522.488.423,00**	**1.421.076.147.290,00**	**89,74**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.546.316.860.000,00**	**1.388.594.639.145,00**	**89,80**
Dana Perimbangan	1.296.137.968.000,00	1.190.316.023.461,00	91,83
Dana Insentif Daerah (DID)	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00
Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**37.205.628.423,00**	**32.481.508.145,00**	**87,30**
Pendapatan Bagi Hasil	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**17.987.254.755,00**	**18.809.640.585,00**	**104,57**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57

Ringkasan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 seperti di bawah ini:

1. Anggaran Pendapatan Daerah senilai Rp1.704.309.743.178,00 dapat direalisasikan senilai Rp1.528.735.803.266,36 atau sebesar 89,69% dari anggarannya, hal ini terjadi terutama akibat tidak tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat jenis Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, serta Dana Alokasi Khusus dari anggaran yang telah ditetapkan;
2. Anggaran Pendapatan Asli Daerah senilai Rp102.800.000.000,00 direalisasikan senilai Rp78.945.307.191,36 atau sebesar 76,79% dari anggaran yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena Penetapan target yang terlalu tinggi tidak didasarkan pada potensi yang akurat atau metodologi yang matang seringkali menjadi penyebab utama kesenjangan realisasi.

   kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi Pembangunan daerah dan adanya kecenderungan wajib pajak yang terdaftar untuk tidak membayar atau terlambat membayar yang kemudian menumpuk menjadi piutang;
3. Anggaran Pendapatan Transfer senilai Rp1.583.522.488.423,00 dapat direalisasikan senilai Rp1.421.076.147.290,00 atau sebesar 89,74% penurunan penerimaan pendapatan transfer

terjadi pada Transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak, Transfer Dana Alokasi Khusus dan penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak; dan

4. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp17.987.254.755,00 dapat direalisasikan senilai Rp18.809.640.585,00 atau sebesar 104,57%.

b. Belanja dan Transfer Daerah

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	**1.784.465.285.070,26**	**1.566.007.011.626,50**	**87,75**
BELANJA OPERASI	**1.302.379.990.371,26**	**1.153.179.535.396,50**	**88,54**
Belanja Pegawai	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37
Belanja Barang dan Jasa	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10
Belanja Hibah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27
Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	91,67
BELANJA MODAL	**142.651.192.101,00**	**126.632.269.348,00**	**88,77**
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10
Belanja Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78
BELANJA TAK TERDUGA	**2.125.000.000,00**	**1.070.675.400,00**	**50,38**
Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38
BELANJA TRANSFER	**337.309.102.598,00**	**285.124.531.482,00**	**84,52**
Belanja Bagi Hasil	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,70
Belanja Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43

Ringkasan Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja dan Transfer Daerah senilai Rp1.784.465.285.070,26 dapat direalisasikan senilai Rp1.566.007.011.626,50 atau sebesar 88,54% terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp1.302.379.990.371,26 atau sebesar 88,54% dari anggaran yang ditetapkan dan Belanja Modal senilai Rp142.651.192.101,00 atau sebesar 88,77% dari anggarannya, Belanja Tak Terduga senilai Rp2.125.000.000,00 atau sebesar 50,38% dari anggaran yang telah ditetapkan dan Belanja Transfer Daerah senilai Rp337.309.102.598,00 dapat direalisasikan senilai Rp285.124.531.482,00 atau sebesar 84,52% dari anggaran. Belanja Transfer Daerah senilai Rp337.309.102.598,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp2.164.348.198,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Rp335.144.754.400,00;
2) Tidak maksimalnya Realisasi/penyerapan anggaran disebabkan karena masalah kompetensi sumber daya manusia di setiap perangkat daerah lebih banyak melakukan penumpukan belanja pada Akhir Tahun Anggaran, Lemahnya perencanaan anggaran yang meliputi kesalahan penginputan dalam pemilihan akun belanja sehingga menunggu momen perubahan anggaran dan keterlambatan penyelesaian dokumen dan administrasi keuangan;
3) Kendala yang dihadapi meliputi regulasi pengelolaan anggaran yang sering berubah menjadi penghambat dalam pencairan anggaran dan revisi anggaran berulang.

c. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Surplus/(Defisit)	(80.155.541.892,26)	(47.168.613.560,14)	58,85
Pembiayaan:			
Penerimaan Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
Pembiayaan Netto	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	32.986.928.332,12	0,00

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah –Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan Entitas Pelaporan yang berdomisili di Jalan Piet A Tallo, SH Nomor 1, SoE - Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Sifat Operasi Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berorientasi pada pelayanan publik, pelayanan jasa dan pengelolaan anggaran (APBD) dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan pokok meliputi pengelolaan PAD, Belanja Daerah, Pembiayaan serta pengelolaan Aset Daerah wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebagai Referensi Pelaksanaan Tugas mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeraqh Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada pemerintah daerah adalah seluruh SKPD pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level pemerintah daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK. Dalam penetapan entitas

pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Basis Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.3 Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan umumnya Menggunakan biaya historis namun seringkali dikombinasikan dengan nilai wajar nilai kini atau nilai realisasi bersih terutama untuk asset dan kewajiban tertentu pengukuran ini bertujuan memberikan informasi paling relevan sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan

a. biaya historis (*historical cost*)

Aset dicatat berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar dari kas yang diterima.

b. Nilai wajar (*fair value*)

Aset dan Kewajiban diukur berdasarkan harga yang akan diterima saat aset dijual atau dibayar untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pengukuran.

c. Biaya operasional kini/Nilai kini (*current operational value*)

Aset dan Kewajiban diukur menggunakan informasi terkini untuk mencerminkan perubahan harga pada tanggal pelaporan yang mencakup *current operational value* dan *cost of fulfillment*.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

a. Setiap Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan, disajikan sebagai berikut.

1) Anggaran

Anggaran merupakan Rencana keuangan tertulis yang disusun secara sistematis atau kuantitatif untuk periode tertentu di masa depan mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran sebagai pedoman manajemen dalam perencanaan, pengendalian serta evaluasi kinerja organisasi atau pribadi.

Penyusunan anggaran Mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) Dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah

2) Prosentase Pencapaian

Persentase pencapaian meliputi:

a) Realisasi vs anggaran menampilkan seberapa besar target pendapatan belanja dan pembiayaan yang berhasil direalisasikan

b) Analisis kinerja menjelaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta target output dari suatu program atau kegiatan

c) Perbandingan kenaikan/penurunan menyajikan presentasi perubahan posisi keuangan tahun berjalan disbanding dengan tahun sebelumnya

3) Realisasi

Merupakan penjelasan rinci analisis dan penjabaran atas angka-angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran mencakup perbandingan antara anggaran dan actual presentasi pencapaian serta rincian factor penyebab kenaikan penurunan belanja atau pendapatan

4) Penjelasan Perbedaan antara anggaran dan Realisasi

a) Anggaran (*budget/pagu*) merupakan Rencana keuangan tertulis yang ditetapkan di awal tahun menjaga perkiraan pendapatan belanja transfer dan pembiayaan untuk satu periode tertentu yang bersifat mengikat sebagai otorisasi pemerintahan

b) Realisasi (*actual*) merupakan Kinerja keuangan actual dari pendapatan belanja dan pembiayaan yang benar-benar terjadi dalam suatu periode laporan menunjukkan hasil pelaksanaan program kerja

5) Perbandingan dengan periode yang lalu

Perbandingan dengan periode yang lalu adalah metode analisis keuangan yang membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya (bulan, kuartal atau tahun yang sama) untuk mengidentifikasi trend perubahan dan kinerja

6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Periode berjalan Adalah rentang waktu akuntansi yang sedang berlangsung saat ini di mana pencatatan transaksi masih aktif dilakukan sebaliknya periode yang lalu adalah periode akuntansi sebelumnya yang sudah ditutup dan laporannya difinalisasi digunakan sebagai pembanding kinerja arus kas dan posisi keuangan

7) Rincian lebih lanjut pendapatan LRA Menurut sumber pendapatan

Pendapatan LRA disusun berbasis kas mencakup penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan diakui saat kas terima. sumber utamanya Adalah pendapatan asli daerah (PAD) pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi organisasi dan fungsi

Belanja pemerintah diklasifikasikan berdasarkan organisasi atau siapa yang membelanjakan fungsi atau tujuan sasaran dan ekonomi atau jenis pengeluaran untuk memastikan transparansi dan efektivitas APBN atau APBD komponen utama meliputi belanja pegawai barang modal dan bantuan social yang dikelola oleh Kementerian atau lembaga atau SKPD untuk berbagai fungsi seperti pelayanan umum pertanahan Pendidikan dan kesehatan

9) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan

Pembiayaan Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan meliputi :

a) Informasi umum entitas

b) Kebijakan akuntansi

c) Penjelasan pos-pos laporan keuangan

d) Informasi non keuangan yang relevan

e) Rekonsiliasi dan analisis angka

b. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus.d.efisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/ SKPKD/ Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam pencatatannya.

2) Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, terdiri dari: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus.d.efisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus.d.efisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah, APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

e) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

f) Daftar dan *schedule*.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

c. Kebijakan Akuntansi Terkait Akun

Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1) Kas dan Setara Kas

Kas Pemerintah Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

a) Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;

b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan

c) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

a) Kas di Bendahara Pengeluaran;

b) Kas di Bendahara Penerimaan;

c) Kas di BLUD;

d) Kas Dana BOS; dan

e) Kas Dana Kapitasi

2) Piutang

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a) Piutang Jangka Pendek; dan

b) Piutang Jangka Panjang

Namun dalam bagian ini, piutang yang dibicarakan adalah Piutang Jangka Pendek, yaitu jenis piutang yang diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu jenis piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dimasukkan ke Aset Lainnya.

a) Pengakuan

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

(1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau;

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

(3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

b) Pengukuran

(1) Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.;

(2) Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi;

(3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;

(4) Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalam Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sanksi administrasi berupa denda pajak dan denda retribusi;

(5) Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi); dan

(6) Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh kehati-hatian agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

(1) Kualitas piutang lancar;
(2) Kualitas piutang kurang lancar;
(3) Kualitas piutang diragukan; dan
(4) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu:

(1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*); dan
(2) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
    (b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
    (c) Wajib pajak kooperatif;
    (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
    (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
(2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
    (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
    (b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
    (c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan
    (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
(3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
    (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
    (b) Wajib pajak tidak kooperatif;
    (c) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;dan/atau
    (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4) Kualitas macet, dengan kriteria:
    (a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
    (b) Wajib pajak tidak ditemukan;

(c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan

(d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;

(b) Wajib pajak kooperatif;

(c) Wajib pajak likuid; dan/atau

(d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;

(b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau

(c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;

(b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

(c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau

(b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

(c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(d) Wajib pajak mengalami musibah (force *majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(1) Kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;

(2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;

(3) Kualitas diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

(4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(1) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(2) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;

(3) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

(4) kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya dijelaskan dalam CaLK.

d) Penghentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Diperlukan laporan off balance sheet tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

Dalam CaLK dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.

3) Beban Dibayar Di Muka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban atau keperluan yang kemanfaatannya dirasakan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, premi asuransi, dan sebagainya. Pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan sehingga dicatat sebagai Aset Lancar.

a) Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

b) Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan dan manfaatnya belum dinikmati pada periode tahun berjalan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar. Beban Dibayar Di muka harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis beban dibayar di muka, periode manfaat, saldo awal, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

a) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:

(1) Barang habis pakai;

(2) Barang tak habis pakai; dan

(3) Barang bekas dipakai

b) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:

(1) Barang konsumsi;

(2) Amunisi;

(3) Bahan untuk pemeliharaan;

(4) Suku cadang;

(5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

(6) Pita cukai dan leges;

(7) Bahan baku;

(8) Barang dalam proses/setengah jadi; dan

(9) Semua pengadaan barang yang akan dijual/diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

a) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

(1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh

bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat dapat diverifikasi dan bersifat netral.

(2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbagan materialitas dan pengendalian pencatatan. Khusus untuk Persediaan Farmasi dan obat-obatan menggunakan metode perpetual.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian;

(2) Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan

(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode FIFO (barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar) maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan

(2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digrunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digrunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

(3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan

(4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi msak atau usang.

5) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan *royalti*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu:

a) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

(1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

(2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan

(3) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

(1) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan

(2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

b) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi 2 (dua):

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya; dan

(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen meliputi:

(a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;

(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

(c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

(d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Daerah.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan kerugian diakui pada saat pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Apabila pada saat pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya maka

perbedaan tersebut harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kemgian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO.

Piutang atas pokok dana bergulir diakui oleh entitas yang menggulirkan dana pada saat diterima oleh debitur/masyarakat. Piutang atas pendapatan bunga dana bergrulir diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga yang belum dibayarkan kepada entitas. Dana bergrulir dalam Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomik clan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

a) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20% (dua puluh persen).

b) Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai

piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah daerah. Dividen tunai yang diterima oleh pemerintah daerah akan mengurangi piutang dividen.

Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat pembahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya pembahan yangtimbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah daerah.

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas juga diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposit° dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran .

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional clan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi

pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalarn metode ekuitas, pengalcuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Jika akibat kerugian yang dialami investee, nilai investasi pemerintah daerah menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi mgi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

6) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau mempunyai maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi enam klasifikasi, yaitu:

a) Tanah

Tanah yang dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang termasuk aset tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan

jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap dalam Renovasi.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset Tetap diakui pada saat:

a) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;

b) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum; dan

c) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Berwujud;

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	**Tanah**	1,00
2	**Peralatan dan Mesin**	
2.1	Alat-alat Berat	100.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
	Alat-alat Kantor	500.000,00
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat-alat studio dan komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat kedokteran	500.000,00
2.8	Alat-alat laboratorium	500.000,00
2.9	Alat-alat keamanan	500.000,00
3	**Gedung dan Bangunan**	
3.1	Bangunan gedung	20.000.000,00
3.2	Bangunan monumen	20.000.000,00
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000,00
4.2	Bangunan Air dan Irigasi	20.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	**Aset Tetap Lainnnya**	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
5.3.1	Hewan	1.500.000,00
5.3.2	Ternak	1.500.000,00
5.3.3	Tumbuhan Pohon	500.000,00
5.3.4	Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	20.000.000,00

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.

a) Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;

b) Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;

c) Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan; dan

d) Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

1) biaya persiapan tempat;
2) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3) biaya pemasangan (*installation cost*);
4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
5) biaya konstruksi;
6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*);
7) biaya kepanitiaan;
8) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);
9) dst

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

b) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (capitalization thresholds) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi ;
2) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset
3) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;
4) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
5) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

c) Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

d) Penyusutan

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah daerah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

(1) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;

(2) mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan

(3) memberikan bentuk pendekatan yang sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau menambahkan nilai aset tetap yang sudah dimiliki.

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan (depreciable amount) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap aset yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

(1) Aset tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

(2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

e) Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

(1) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure;*

(2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);

(3) Terkena planologi kota;

(4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

(5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;

(6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;

(7) Pertimbangan teknis; dan

(8) Pertimbangan ekonomis

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat

penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan entitas pada saat dilakukan penghapusan atau ketika aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh entitas dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

f) Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

g) Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Sedangkan beban penyusutan disajikan dalam LO.

7) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

a) Pengakuan

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya selesai dalam satu tahun anggaran namun membutuhkan dana yang besar.

b) Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

c) Penyajian dan Pengungkapan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangkan diungkapkandalam CaLK.

Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

8) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Perorangan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

(1) Pejabat Daerah/mantan Pejabat Daerah, harus dibayar sekaligus; dan

(2) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke RKUD:

(1) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan

(2) Sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

(1) Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran

(2) Informasi lainnya yang penting

b) Tuntutan Ganti Rugi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

(1) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

(2) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

(3) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

Pengakuan atas Tuntutan Ganti Rugi dapat dirincikan sebagai berikut.

(1) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

(2) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

(3) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

Pengukuran atas Tuntutan Ganti Rugi dapat dirincikan sebagai berikut.

(1) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

(2) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

(3) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

9) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

b) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

c) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

d) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangung Guna Serah (BGS), diakui pada saat

pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

c) Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serag Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.

d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/ kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

10) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

a) Kriteria Aset Tak Berwujud

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Masing-masing unsur tersebut diuraikan di bawah ini.

(1) Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

(a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.

(b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

(2) Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

(3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

b) Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

(1) Jenis sumber daya

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

(a) *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk, compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software* komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

(b) Lisensi dan franchise

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan

berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

(c) Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat 1).

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

(d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

(e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.

(f) ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

(2) Cara perolehan

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

(a) Pembelian

Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

(b) Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

(c) Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

(d) Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.

(e) Donasi/hibah

ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan software kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

(f) Warisan Budaya/Sejarah *(intangible heritage assets)*

Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

(3) Masa manfaat

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(a) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

(b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena

itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

11) Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

a) Metode Amortisasi

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud dan akun diinvestasikan pada aset lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi nilai aset tidak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat diamortisasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, amortisasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Software Komputer	4
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

(1) Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dengan jumlah yang

sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

(a) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih aset tudak berwujud pada akhir masa manfaat; atau

(b) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan :

i. Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut; dan

ii. Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

(2) Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (sepert *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud terebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

12) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga diReklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

a) Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan diReklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

b) Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah diReklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari Reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak diReklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

13) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Di samping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

(1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

(2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang

(3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau

c) Pada saat kewajiban timbul

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

b) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original *face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

14) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

a) Ekuitas Awal;

b) Surplus.d.efisit LO; dan

c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

15) Pendapatan

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD dan pendapatan- LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan Akuntansi terkait Pengakuan Pendapatan disajikan sebagai berikut.

a) Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

(1) Timbulnya hak atas pendapatan;

(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan SKPD.

Berikut adalah pengakuan pendapatan-LO pada SKPKD:

(1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(a) PAD Melalui Penetapan

Pengakuan PAD melalui penetapan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan Lain-lain PAD yang sah yang dipungut dengan *official assessment*. Pendapatan Daerah yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Daerah dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber *official assessment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(b) PAD Tanpa Penetapan

Pengakuan PAD tanpa penetapan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan Lain-lain PAD yang sah yang dipungut dengan self assessment system. PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan dengan *self-assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari SKPKD.

(2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening Pemerintah Daerah pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh Pemerintah Daerah penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan Pemerintah Daerah penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari Pemerintah Daerah penyalur yang dapat berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPKD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi. Hibah dana BOS yang diterima langsung oleh SKPD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah diakui/dicatat pada LRA SKPKD (BUD).

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan pendapatan-LO pada SKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu:

(a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official* assessment *system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber official assessment system antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(b) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self-assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self-assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(c) Pendapatan Pajak diterima dimuka *Official Assessment*

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

(d) Pendapatan Retribusi *Self Assessment*

Untuk pendapatan retribusi ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasa umum. Pendapatan-pendapatan itu diakui ketika pembayaran telah diterima.

(e) Pendapatan Retribusi *Official Assessment*

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKRD terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe ini jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

(2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

(3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

(4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

(5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pendapatan Pajak Daerah–LRA, diakui pada saat:

(1) Pendapatan kas telah diterima pada RKUD;

(2) Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan; dan

(3) Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

Dalam hal Wajib Pajak terlambat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda yang umumnya dinyatakan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pengakuan penerimaan denda pajak akan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA pada saat kas denda pajak daerah tersebut diterima di Kas Daerah atau di Bendahara Penerimaan.

Kebijakan Akuntansi terkait pengukuran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

a) Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment*.

b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

b) Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Non perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi Pendapatan Non perpajakan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan

dicatat sebesar nilai brutonya tanpa dikurangi/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Koreksi dan Pengembalian Pendapatan

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (Pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Penyajian dan Pengungkapan

a) Pendapatan-LO

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.

16) Beban dan Belanja

a) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

(1) Beban Operasi, terdiri atas:

(a) Beban Pegawai

(b) Beban Barang dan Jasa

(c) Beban Bunga

(d) Beban Subsidi

(e) Beban Hibah

(f) Beban Bantuan Sosial

(2) Beban Penyisihan Piutang

(3) Beban Penyusutan dan Amortisasi

(4) Beban Transfer

(5) Beban Tak Terduga

Beban diakui pada saat:

(1) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

(2) Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

(a) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau

(b) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

(3) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

Kebijakan terkait pengukuran beban disajikan sebagai berikut.

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

(2) Beban Barang dan Jasa

(1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga.

(2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

(3) Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang

telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute/perselisihan* di kemudian hari.

(4) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

(5) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

(6) Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.

Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai dan disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(b) Biaya standar apabila diproduksi sendiri;

(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

(7) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang diakui berdasarkan hasil perhitungan melalui *aging schedule piutang* pada tanggal pelaporan.

Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur berdasarkan nilai yang ada di *aging schedule* dibandingkan dengan saldo awal penyisihan piutang tak tertagih.

(8) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengukuran dan pencatatan beban penyusutan dan amortisasi dijelaskan dalam bagian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

(9) Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(10) Beban Tak Terduga

Beban tak terduga dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Koreksi dan Penerimaan Kembali

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

b) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

(1) Belanja Operasi, terdiri atas:

(a) Belanja Pegawai

(b) Belanja Barang dan Jasa

(c) Belanja Bunga

(d) Belanja Subsidi

(e) Belanja Hibah

(f) Belanja Bantuan Sosial

(2) Belanja Modal

(3) Belanja Tak Terduga

(4) Belanja Transfer

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;

b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;

c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi; dan

d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

17) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

a) Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;

b) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;

c) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

18) SILPA/SIKPA/SAL

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non – recurring*.
2. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18
Pendapatan Transfer	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74	1.342.136.980.808,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
Jumlah	**1.704.309.743.178,00**	**1.518.838.398.066,36**	**89,12**	**1.484.750.536.177,18**

Pada TA 2025, Pendapatan Daerah direalisasikan senilai Rp1.518.838.398.066,36 atau 89,12% dari anggaran senilai Rp1.704.309.743.178,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp34.087.861.889,18 atau 2,30% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.484.750.536.177,18.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,58	14.919.206.165,33
Pendapatan Retribusi Daerah	8.599.964.934,00	35.564.196.626,00	413,54	7.153.486.499,91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,03	4.651.232.092,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,01	27.533.973.002,94
Jumlah	**102.800.000.000,00**	**78.952.610.191,36**	**76,80**	**54.257.897.760,18**

Pada TA 2025, Pendapatan Asli Daerah direalisasikan senilai Rp78.952.610.191 atau 76,80% dari yang dianggarkan senilai Rp102.800.000.000. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp24.694.712.431,18 atau 45,51% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp54.257.897.760,18.

Pendapatan Asli Daerah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Kesehatan	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	142,55	2.242.311.200,00
Rumah Sakit Umum Daerah	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	122,84	19.240.841.228,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	103,88	3.943.983.826,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	121.219.462,00	398.933.850,00	329,10	165.050.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	51.964.424,00	87.940.000,00	169,23	101.545.000,00
Dinas Perhubungan	550.000.000,00	416.530.000,00	75,73	256.982.053,91
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	200.700.000,00	235.590.000,00	117,38	355.475.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.063.000,00	16.063.750,00	100,00	19.415.250,00
Dinas Perikanan	582.450.000,00	250.220.500,00	42,96	138.595.000,00
Dinas Pariwisata	203.132.000,00	220.625.000,00	108,61	159.050.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	484.400.000,00	216.660.000,00	44,73	226.218.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	104,82	877.475.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM	864.049.474,00	633.229.211,00	73,29	175.285.452,00
Sekretariat Daerah	19.018.000,00	47.732.500,00	250,99	95.704.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.202.792.197,00	18.856.983.873,46	56,79	12.742.361.257,37
Badan Pendapatan Daerah	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	61,50	13.517.604.992,33
Jumlah	**102.800.000.000,00**	**78.952.610.191,36**	**76,80**	**54.257.897.760,18**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	227.013.299,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.190.929.188,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	503.000,00
Pajak Reklame	757.290.810,00	662.963.692,00	87,55	736.961.574,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	5.073.862.274,33
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	56.481.657,00	188,27	36.420.970,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.527.297.832,00	1.818.503.161,00	119,07	2.945.986.876,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.521.790.688,00	4.641.835.179,00	102,65	4.419.887.034,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	290.822.984,00	460.214.895,00	158,25	287.621.950,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.632.885.362,00	6.557.275.178,00	116,41	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.268.575.703,00	5.539.212.664,00	45,15	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.292.135.230,00	4.475.679.526,00	31,32	0,00
Jumlah	**39.320.798.609,00**	**24.212.185.952,00**	**61,58**	**14.919.206.165,33**

Pada TA 2025, Pendapatan Pajak Daerah direalisasikan senilai Rp24.212.185.952 atau 61,58% dari yang dianggarkan senilai Rp39.320.798.609. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp9.292.979.786,67 atau 62,29% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp14.919.206.165,53.

Pendapatan Pajak Daerah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.557.297.832,00	1.874.984.818,00	120,40	2.982.407.846,00
Badan Pendapatan Daerah	37.763.500.777,00	22.337.201.134,00	59,15	11.936.798.319,33
Jumlah	**39.320.798.609,00**	**24.212.185.952,00**	**61,58**	**14.919.206.165,33**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Menurunnya realisasi Pajak Reklame pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari reklame kain. Penurunan penerimaan reklame kain terjadi karena berkurangnya jumlah pemasangan reklame oleh pelaku usaha maupun masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan strategi promosi usaha dari wajib pajak yang mulai beralih ke media digital/media sosial, sehingga penggunaan reklame konvensional seperti reklame kain menjadi berkurang. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah menurunnya permohonan izin pemasangan reklame serta terbatasnya kegiatan promosi dan event yang menggunakan media reklame kain pada tahun 2025;
   b. Naiknya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya kesadaran para pengusaha sumur bor yang dimiliki agar dapat dikenakan Pajak Air Tanah oleh pemerintah daerah. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh bertambahnya wajib pajak yang terdata dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) pada lokasi usaha masing-masing. Selain itu, upaya pendataan, pengawasaan, dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sehingga berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2025;
   c. Menurunnya Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten TTS pada tahun 2025 dari tahun 2024 disebabkan salah satunya oleh karena menurunnya penerimaan pajak dari aktifitas pengambilan materian MBLB. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah adanya persoalan pungutan ganda (*double* pungutan) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap material MBLB yang berasal dari wilayah Kabupaten TTS. Kondisi ini menyebabkan para pengusaha angkutan MBLB atau wajib pajak lebih cenderung melakukan pembayaran pungutan di Kabupaten Kupang dibandingkan di Kabupaten TTS, agar mereka tidak membayar *dobel*, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan Pajak MBLB;
   d. Naiknya Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 dari tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya optimalisasi pengelolaan PBB-P2 melalui proses intensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang berpengaruh signifikan adalah kegiatan pemutakhiran dan perekaman data wajib pajak (WP) PBB yang dilakukan secara lebih gencar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya akurasi data objek dan subjek pajak, bertambahnya wajib pajak terdaftar, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Selaian itu, upaya pendataan dan pengawasan yang lebih optimal turut mendukung peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dibandingkan tahun sebelumnya;
   e. Naiknya realisasi penerimaan BPHTB tahun 2025 dari tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya aktivitas transaksi tersebut berdampak langsung pada bertambahnya setoran

BPHTB yang diterima pemerintah daerah, karena setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan kewajiban pembayaran BPHTB. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta optimalisasi pelayanan dan pengawasan pemungutan BPHTB oleh pemerintah daerah turut mendukung peningkatan realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024;

f. Kenaikan capaian realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dipengaruhi oleh bertambahnya kontribusi penerimaan dari PBJT makan minum yang mengalami kenaikan setoran dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pajak ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas usaha restoran, bertambahnya jumlah wajib pajak yang patuh, serta optimalisasi pengawasan dan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Selain itu, upaya digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak juga turut mendukung peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2025;

g. Bertambahnya realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penambahan jenis penerimaan pajak baru yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerimaan tersebut mulai menjadi bagian dari pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sejak tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB memberikan tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, sehingga berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penerapan kebijakan tersebut turut memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
   a. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan PAT (Pajak Air Tanah)

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.550.000.000,00	29.815.037.195,00	1.169,22	2.242.311.200,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	36.219.462,00	16.637.000,00	45,93	28.667.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	465.000.000,00	400.530.000,00	86,14	194.862.053,91
• Retribusi Pelayanan Pasar	922.793.774,00	1.080.013.411,00	117,04	1.084.863.394,00
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.307.731.800,00	963.451.459,00	73,67	1.612.773.400,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.000.000,00	40.466.000,00	161,86	33.482.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.414.000,00	21.520.000,00	116,87	27.659.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	53.132.000,00	40.725.000,00	76,65	87.550.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	1.046.720.000,00	1.208.100.000,00	115,42	844.175.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.700.000,00	415.490.000,00	118,47	426.975.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.734.253.898,00	1.176.689.711,00	67,85	433.665.452,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.000.000,00	3.240.000,00	64,80	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	120.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	85.000.000,00	382.296.850,00	449,76	136.383.000,00
Jumlah	**8.599.964.934,00**	**35.564.196.626,00**	**413,54**	**7.153.486.499,91**

Pada TA 2025, Pendapatan Retribusi Daerah direalisasikan senilai Rp35.564.196.626,00 atau 413,54% dari yang dianggarkan senilai Rp8.599.964.934,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp28.410.710.126,09 atau 397,16% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp7.153.486.499,91.

Pendapatan Retribusi Daerah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Kesehatan	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	142,55	2.242.311.200,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	26.180.125.295,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	361.075.000,00	60,17	961.200.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	121.219.462,00	398.933.850,00	329,10	165.050.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	51.964.424,00	87.940.000,00	169,23	101.545.000,00
Dinas Perhubungan	465.000.000,00	400.530.000,00	75,73	256.982.053,91
Dinas Pemuda dan Olahraga	200.700.000,00	235.590.000,00	117,38	355.475.000,00
Dinas Perikanan	582.450.000,00	250.220.500,00	42,95	138.595.000,00
Dinas Pariwisata	203.132.000,00	220.625.000,00	108,61	159.050.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	484.400.000,00	216.660.000,00	44,72	154.952.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.228.710.000,00	1.342.240.000,00	109,23	864.475.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	854.049.474,00	633.229.211,00	74,14	174.225.452,00
Sekretariat Daerah	19.018.000,00	47.732.500,00	250,98	95.704.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.239.321.574,00	1.554.383.370,00	125,42	1.483.921.294,00
Jumlah	**8.599.964.934,00**	**35.564.196.626,00**	**413,54**	**7.153.486.499,91**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Retribusi Jasa Umum
      1) Terdapat Reklasifikasi atas pencatatan Pendapatan BLUD RSUD Soe dari Lain-lain PAD Yang Sah ke Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan disajikan sebagai Pendapatan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan (PP 35 Tahun 2025 pasal 27 dan 137; Permendagri 15 2024 angka 3.3.1.1.1), hal ini mengakibatkan realisasi atas Retribusi Daerah melebihi dari target yang ditetapkan;

2) Meningkatnya Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 dibandingkan dari tahun 2024 dipengaruhi oleh bertambahnya pemanfaatan layanan Kesehatan masyarakat pada fasilitasi Kesehatan milik pemerintah daerah;
3) Adapun Realisasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 dikarenakan beberapa TPS (bak sampah) ditutup oleh masyarakat dan beberapa armada pun sering rusak sehingga pelayanan tidak maksimal yang mengakibatkan objek tidak mau membayar jasa pelayanan tersebut;
4) Kemudian Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 giat-giat hanya pada 3 (tiga) Pasar yaitu Pasar SoE, Pasar Kapan dan Pasar Niki-Niki, sedangkan tahun 2025 giat-giat dilakukan pada 7 (tujuh) pasar yaitu Pasar Inpres SoE, Pasar Kapan, Pasar Niki-Niki, Pasan Oeekam Kec. Amanuban Timur, Pasar Oinlasi Kec. Amanatun Selatan, Pasar Boking, dan Pasar Kolbano serta pemungutan parkir pada saat kegiatan Festival Musim Dingin di Kec. Fatumnasi, Kegiatan *Off Road* serta Pameran Pembangunan dan pasar malam di Lapangan Puspenmas;
5) Dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 disebabkan belum optimalnya kinerja juru pungut dalam melakukan pemungutan retribsui kepada wajib retribusi yang memanfaatkan fasilitas dan layanan yang telah disediakan pemerintah daerah. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran juga masih perlu ditingkatkan sehingga berdampak pada belum maksimal realisasi penerimaan retribusi pada sektor tersebut;

b. Retribusi Jasa Usaha
1) Kontribusi terbesar terhadap kenaikan realisasi berasal dari Retribusi Rumah Potong Hewan Daerah. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jumlah ternak sapi yang dikirim antar pulau keluar dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), sehingga memerlukan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum karena keterlambatan pembayaran maupun adanya tunggakan sewa rumah dinas yang ditempati;
2) Sementara itu, penurunan penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dipengaruhi oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada lokasi wisata yang menyediakan fasilitas villa milik pemerintah daerah, seperti di Kawasan Pantai Oetune dan Taman Rekreasi Bu'at, sehingga tingkat penggunaan vila menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya;
3) Adapun penurunan Retribusi Tempat Olahraga disebabkan karena Gedung Olahraga Raga (GOR) Nekmese yang biasanya disewakan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada beberapa bulan di tahun 2025 tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena digunakan sebagai lokasi shelter pengungsian bagi korban bencana longsor di Desa Kuatae Kecamatan Kota SoE.

c. Retribusi Perijinan Tertentu
1) Penerimaan PAD dari Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan oleh penerapan regulasi terbaru terkait dasar penenaan Retribusi tersebut. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Selain itu, Retribusi PBG telah diatur melalui Peraturan Dearah yang baru sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga mekanisme pelayanan, perhitungan tarif fan objek retribisi menjadi lebih jelas dan terstruktur. Penerapan regulasi baru tersebut berdampak pada

meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pengurusan persetujuan bangunan Gedung, serta optimalisasi pemungutan retribusi daerah, yang pada akhirnya mendorong peningkatan realisasi penerimaan retribusi PBG di Kabupaten TTS pada tahun 2025.

2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
   a. Peraturan Daerah Kabupaten TTS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,03	4.651.232.092,00
Jumlah	**9.803.470.026,00**	**7.453.298.661,00**	**76,03**	**4.651.232.092,00**

Pada TA 2025, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp7.453.298.661,00 atau 76,03% dari yang dianggarkan senilai Rp9.803.470.026,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.802.066.569,00 atau 60,24% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp4.651.232.092,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Meningkatnya realisasi penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD dikarenakan deviden dialokasikan 100% sedangkan tahun 2024 dialokasikan 50% dari PT. Bank NTT sesuai hasil RUPS Bersama Gubernur Provinsi NTT.
2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT. Bank NTT	9.803.470.026,00	7.383.282.873,00	75,00	4.551.640.300,00
PDAM Kab TTS	0,00	70.015.788,00	0,00	99.591.792,00
Jumlah	**9.803.470.026,00**	**7.453.298.661,00**	**76,02**	**4.651.232.092,00**

3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 14 Mei 2025 tentang RUPS Tahun Buku 2024; dan
4. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PDAM Kab TTS diakui berdasarkan Berita Acara Penetapan Besaran Deviden nomor Perumda.22-B/BA/13/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	660.284.834,00	377.332.750,00	57,14	468.022.050,00
Jasa Giro	18.177.211.559,78	1.107.010.552,97	6,09	1.409.370.558,85,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0,00	0,00	1.060.0000,00
Pendapatan Bunga	1.437.494.063,00	1.730.615.805,03	120,39	2.569.603.891,96
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.501.199.889,62	100,07	1.901.191.677,66
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	838.564.750,22	110.163.618,64	13,13	1.129.571.079,70
Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.179.577,00	89.298.270,00	161,83	47.775.328,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	129.028.691,00	89.203.874,00	69,13	50.730.031,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	446.091.103,00	0,00	0,00	460.266.303,00
Pendapatan dari Pengembalian	410.615.861,00	6.596.479.346,20	1.606,48	255.540.854,20
Pendapatan BLUD	21.411.295.992,00	121.624.845,90	0,56	19.240.841.228,57
Jumlah	**45.075.766.431,00**	**11.722.928.952,36**	**26,01**	**27.533.973.002,94**

Pada TA 2025, Lain-lain PAD yang Sah direalisasikan senilai Rp11.722.928.952,36 atau 26,01% dari yang dianggarkan senilai Rp45.075.766.431,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp15.811.044.050,58 atau 57,42% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp27.533.973.002,94.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Rumah Sakit Umum Daerah	21.411.295.992,00	121.624.845,90	0,56	19.240.841.228,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000,00	5.434.859,00	1.086,97	375.980,00
Dinas Perhubungan	85.000.000,00	16.000.000,00	18,82	0,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.063.000,00	16.063.750,00	100,00	19.415.250,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0.00	0,00	0,00	71.266.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	55.440.000,00	3.750.000,00	6,76	13.000.000,0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	10.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.399.322.171,00	11.403.685.212,46	48,73	8.091.129.165,37
Badan Pendapatan Daerah	98.145.268,00	156.370.285,00	159,32	96.885.379,00
Jumlah	**45.075.766.431,00**	**11.722.928.952,36**	**26,01**	**27.533.973.002,94**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

1. Menurunnya realisasi penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh masih adanya kelemahan dalam pengendalian internal, kurangnya koordinasi, keterbatasan kemampuan aparatur, serta rendahnya kesadaran dalam menyelesaikan rekomendasi hasil

pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, dan komitmen pimpinan agar seluruh rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

2. Adapun penurunan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh jumlah hasil penjualan kendaraan yang dilelang oleh KPKNL tahun 2025 lebih sedikit dari tahun 2024;
3. Serta penurunan Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun 2025 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
4. Selain itu meningkatnya Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dikarenakan ada titipan penyetoran pengembalian belanja hibah pemilihan serentak Tahun 2024 dari Bawaslu Kab. TTS dan KPU Kab. TTS;
5. Sedangkan meningkatnya Pendapatan BLUD tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh:
   - Klaim BPJS bulan Agustus s.d. Desember 2024 dibayarkan di tahun 2025;
   - Penambahan dokter spesialis; dan
   - Adanya klaim pembayaran dana Covid-19 tahun 2020 s.d. 2022 yang dibayarkan di tahun 2025.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.296.137.968.000,00	1.190.316.023.461,00	91,84	1.061.617.991.538,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	250.178.892.000,00	198.278.615.684,00	79,25	238.354.154.749,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	42.164.834.521,00
Jumlah	**1.583.522.488.423,00**	**1.421.076.147.290,00**	**89,74**	**1.342.136.980.808,00**

Pada TA 2025, Pendapatan Transfer direalisasikan senilai Rp1.421.076.147.290,00 atau 89,74% dari yang dianggarkan senilai Rp1.583.522.488.423,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp78.939.166.482,00 atau 5,88% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.342.136.980.808,00.

Pendapatan Transfer sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.546.316.860.000,00	1.388.594.639.145,00	89,80	1.299.972.146.287,00
Jumlah	**1.546.316.860.000,00**	**1.388.594.639.145,00**	**89,80**	**1.299.972.146.287,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	5.230.318.000,00	5.219.767.538,00	99,80	5.406.451.753,00
Dana Alokasi Umum	915.592.981.000,00	873.657.067.032,00	95,42	834.715.979.702,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.733.870.000,00	77.268.430.445,00	99,40	116.255.142.430,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	297.580.799.000,00	234.170.758.446,00	78,69	105.240.417.653,00
Jumlah	**1.296.137.968.000,00**	**1.190.316.023.461,00**	**91,84**	**1.061.617.991.538,00**

Pada TA 2025, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan direalisasikan senilai Rp1.190.316.023.461,00 atau 91,84% dari yang dianggarkan senilai Rp1.296.137.968.000,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp128.698.031.923,00 atau 12,12% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.061.617.991.538,00.

Penjelasan:

a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   1) Kenaikan capaian realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya Dana Alokasi Umum yang mencapai 91,84%; dan
   2) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 78,69%.

b. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.172.137.000,00	1.390.097.638,00	118,60	1.248.745.753,00
DBH PPh Pasal 21	2.602.475.000,00	2.282.425.400,00	87,70	3.434.851.800,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	65.263.500,00	0,00	18.574.200,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	178.311.000,00	186.073.000,00	104,35	197.930.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	37.387.000,00	45.753.000,00	122,38	24.454.350,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – *Landrent*	3.571.000,00	13.571.000,00	380,03	5.761.450,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	30.798.000,00	30.945.000,00	100,48	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.205.639.000,00	1.205.639.000,00	100,00	476.134.200,00
Jumlah	**5.230.318.000,00**	**5.219.767.538,00**	**99,80**	**5.406.451.753,00**

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2025 senilai Rp5.219.767.538,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

c. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	658.663.615.000,00	658.358.015.150,00	99,95	619.733.920.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	89.464.029.000,00	47.833.714.882,00	53,47	27.033.300.702,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	115.428.075.000,00	115.428.075.000,00	100,00	103.083.857.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	49.637.262.000,00	49.637.262.000,00	100,00	59.087.595.000,00
Jumlah	**915.592.981.000,00**	**873.657.067.032,00**	**95,42**	**834.715.979.702,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2025 senilai Rp873.657.067.032,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	832.144.000,00	831.589.760,00	99,93	560.691.915,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	1.113.453.000,00	0,00	0,00	8.691.893.700,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	543.855.000,00	1.613.939.000,00	296,76	3.968.752.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	18.371.026.450,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan – Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	373.125.000,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian - Penugasan – Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.035.204.100,00
DAK Fisik - Bidang Jalan – Penugasan – Jalan	0,00	0,00	0,00	16.979.107.000,00
DAK Fisik - Bidang Jalan – Penugasan – Keselamatan Jalan	0,00	0,00	0,00	40.592.454.800,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penugasan	0,00	0,00	0,00	9.022.504.000,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	15.843.776.000,00	15.742.404.800,00	99,36	10.284.951.000,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi – Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.375.432.465,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	46.242.691.000,00	44.661.200.397,00	96,58	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Keluarga Berencana	1.893.900.000,00	3.354.379.488,00	177,11	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Air Minum – Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	11.264.051.000,00	11.064.917.000,00	98,23	0,00
Jumlah	**77.733.870.000,00**	**77.268.430.445,00**	**99,40**	**116.255.142.430,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2025 senilai Rp77.268.430.445,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	83.933.694.000,00	65.103.323.740,00	77,57	0,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.892.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	111.273.746.000,00	106.515.590.400,00	95,72	45.053.096.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	5.254.758.000,00	0,00	0,00	4.602.750.000,00
DAK Non Fisik - TKG PNSD	19.959.101.000,00	10.081.533.000,00	50,51	16.469.719.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	6.350.742.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	233.458.000,00	233.458.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	29.380.715.121,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	0,00	0,00	0,00	9.056.209.129,00
DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	289.533.303,00
DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	401.875.075,00	79,47	297.191.000,00
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.996.000.000,00	10.631.412.000,00	106,36	91.204.100,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler	851.130.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota	16.715.602.000,00	13.537.340.337,00	80,99	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Puskesmas	34.167.465.000,00	23.358.362.284,00	68,36	0,00
DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.402.413.000,00	4.307.863.610,00	79,74	0,00
Jumlah	**297.580.799.000,00**	**234.170.758.446,00**	**78,69**	**105.240.417.653,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2025 senilai Rp234.170.758.446,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,64	238.354.154.749,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**250.178.892.000,00**	**198.278.615.684,00**	**79,25**	**238.354.154.749,00**

Pada TA 2025, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya direalisasikan senilai Rp198.278.615.684,00,00 atau 79,25% dari yang dianggarkan senilai Rp250.178.892.000,00,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2025 mengalami penurunan senilai (Rp40.075.539.065,00,00) atau (16,81%) jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp238.354.154.749,00,00.

Penjelasan:

1. Dana Desa yang diterima pada TA 2025 senilai Rp191.070.627.684,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025; dan
2. Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2025 senilai Rp7.207.988.000,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025.

5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	40.961.700.521,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
Jumlah	**37.205.628.423,00**	**32.481.508.145,00**	**87,30**	**42.164.834.521,00**

Pada TA 2025, Transfer antar Daerah direalisasikan senilai Rp32.481.508.145,00 atau 87,30% dari yang dianggarkan senilai Rp37.205.628.423,00. Realisasi Transfer antar Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.683.326.376,00 atau 22,97% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp42.164.834.521,00.

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.875.654.130,00	2.214.084.364,00	76,99	9.018.711.609,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.618.597.737,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.860.158.136,00	7.579.919.457,00	69,80	5.126.042.520,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	9.781.635,00	8.472.502,00	86,62	6.795.599,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.460.034.522,00	22.679.031.822,00	96,67	22.191.553.056,00
Jumlah	**37.205.628.423,00**	**32.481.508.145,00**	**87,30**	**40.961.700.521,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Realisasi pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025 senilai Rp7.579.919.457,00, lebih besar dari tahun 2024 disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat dan tingkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya.

2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.203.134.000,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Untuk tahun anggaran 2025 tidak ada penerimaan berupa Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
Jumlah	**17.987.254.755,00**	**18.809.640.585,00**	**104,57**	**88.355.657.609,00**

Pada TA 2025, Lain-Lain Pendapatan yang Sah direalisasikan senilai Rp18.809.640.585,00 atau 104,57% dari yang dianggarkan senilai Rp17.987.254.755,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp69.546.017.024,00 atau 78,71% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp88.355.657.609,00.

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan				
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	66.914.151.321,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	21.441.506.288,00
Jumlah	**17.987.254.755,00**	**18.809.640.585,00**	**104,57**	**88.355.657.609,00**

Pada TA 2025, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan senilai Rp18.809.640.585,00 atau 104,57% dari yang dianggarkan senilai Rp17.987.254.755,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp69.546.017.024,00 atau 78,71% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp88.355.657.609,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2025 senilai Rp0,00, dapat kami jelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2025 Pendapatan Dana BOS dicatat sebagai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik, sedangkan untuk tahun 2024 dicatat sebagai Pendapatan Hibah Dana BOS pada Lain-lain Pendapatan Daerah.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54	1.072.026.698.327,00
Belanja Modal	142.651.192.101,00	126.632.269348,00	88,77	166.227.066.280.00
Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
Jumlah	**1.447.156.182.472,26**	**1.280.882.480.144,50**	**88,51**	**1.239.282.387.315,00**

Pada TA 2025, Belanja Daerah direalisasikan senilai Rp1.280.882.480.144,50 atau 88,51% dari yang dianggarkan senilai Rp1.447.156.182.472,26. Realisasi Belanja Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp41.600.092.829,50 atau 3,36% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.239.282.387.315,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37	648.876.618.174,00
Belanja Barang dan Jasa	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10	354.452.271.225,00
Belanja Hibah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27	68.167.808.928,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	91,68	530.000.000,00
Jumlah	**1.302.379.990.371,26**	**1.153.179.535.396,50**	**88,54**	**1.072.026.698.327,00**

Pada TA 2025, Belanja Operasi direalisasikan senilai Rp1.153.179.535.396,50 atau 88,54% dari yang dianggarkan senilai Rp1.302.379.990.371,26. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp81.152.837.069,50 atau 7,57% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.072.026.698.327,00.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	665.027.136.181,45	604.104.904.462,00	90,84	549.399.586.183
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	157.692.121.533,00	137.121.288.544,00	86,96	2.209.200.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	67.471.653.670,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.440.122.467,00	18.009.046.054,00	97,66	15.844.500.050,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.565.046,00	132.880.015,00	76,12	24.185.711,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	488.960.000,00	81,28	231.360.000,00
Belanja Pegawai BLUD	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00	98,49	13.696.132.560,00
Jumlah	**854.633.485.148,25**	**772.362.853.812,00**	**90,37**	**648.876.618.174,00**

Pada TA 2025, Belanja Pegawai direalisasikan senilai Rp772.362.853.812,00 atau 90,37% dari yang dianggarkan senilai Rp854.633.485.148,25. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp123.486.235.638,00 atau 19,03% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp648.876.618.174,00.

Belanja Pegawai sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	93,55	386.834.659.287,00
Dinas Kesehatan	65.642.903.130,00	64.476.263.723,00	98,22	57.090.186.522,00
Rumah Sakit Umum Daerah	39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	99,10	35.163.714.202,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	96,78	4.369.759.741,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	97,87	4.155.745.092,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	98,03	3.128.881.264,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	98,01	1.591.484.241,00
Dinas Sosial	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	93,27	1.764.248.438,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	98,09	1.204.203.150,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	93,54	2.560.268.243,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.005.285.688,00	2.975.283.276,00	99,00	2.621.077.420,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	99,22	1.555.909.818,00
Dinas Perhubungan	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	98,88	2.315.010.153,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.291.463.713,00	1.267.148.710,00	98,12	1.363.868.642,00

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	98,74	1.427.935.145,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	96,50	1.497.697.843,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	93,90	1.424.392.196,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	97,38	1.511.524.555,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	97,67	1.445.751.237,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	96,48	1.609.759.445,00
Dinas Perikanan	2.041.331.566,00	1.986.273.998,00	97,30	2.008.023.081,00
Dinas Pariwisata	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	98,03	1.511.092.480,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	97,83	12.452.093.335,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.344.150.999,00	5.273.073.729,00	98,67	4.931.368.730,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	93,08	2.201.886.195,00
Sekretariat Daerah	10.561.595.648,00	10.205.833.594,00	96,63	9.289.148.963,00
Sekretariat DPRD	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	97,51	19.006.526.640,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	98,14	2.737.199.839,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.515.572.299,20	58.855.091.594,00	56,86	27.881.945.163,00
Badan Pendapatan Daerah	3.062.373.021,00	2.966.625.628,00	96,87	3.062.534.105,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	98,69	2.898.706.191,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	94,98	1.706.560.765,00
Inspektorat Daerah	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	98,86	2.806.573.235,00
Kecamatan Kokbaun	953.312.618,00	895.997.666,00	93,99	857.915.877,00
Kecamatan Amanuban Selatan	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	98,27	1.043.818.520,00
Kecamatan Tobu	894.007.619,00	841.236.963,00	94,10	864.862.664,00
Kecamatan Amanuban Tengah	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	98,06	1.848.829.380,00
Kecamatan Kuatnana	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	96,60	1.159.075.295,00
Kecamatan Fatumnasi	971.334.902,00	943.231.781,00	97,11	866.421.915,00
Kecamatan Amanuban Barat	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	98,31	1.192.157.963,00
Kecamatan Kolbano	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	97,89	1.029.781.525,00
Kecamatan Mollo Barat	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	96,96	1.036.346.508,00
Kecamatan Amanatun Selatan	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	98,69	1.080.930.045,00
Kecamatan Nunkolo	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	97,86	921.495.051,00
Kecamatan Santian	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	97,59	995.798.060,00
Kecamatan Amanatun Utara	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	96,09	1.177.704.243,00
Kecamatan Kuanfatu	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	95,03	1.194.857.317,00
Kecamatan Kualin	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	98,41	999.770.330,00
Kecamatan Noebeba	923.190.423,00	865.886.528,00	93,79	982.172.939,00
Kecamatan Mollo Utara	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	98,05	1.339.331.604,00
Kecamatan Mollo Tengah	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	99,32	976.664.582,00
Kecamatan Nunbena	910.721.389,00	893.956.608,00	98,16	821.175.575,00
Kecamatan Noebana	844.627.960,00	814.693.370,00	96,46	801.783.671,00
Kecamatan Mollo Selatan	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	96,74	847.490.510,00
Kecamatan Fatukopa	935.070.716,00	912.589.119,00	97,60	837.909.506,00
Kecamatan Amanuban Timur	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	97,68	1.376.839.736,00
Kecamatan Kot'olin	1.098.950.625,00	1.065.262.762,00	96,93	1.030.057.492,00

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kecamatan KiE	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	98,72	995.539.393,00
Kecamatan Kota SoE	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	98,12	8.150.355.085,00
Kecamatan Boking	1.048.797.675,00	1.037.036.589,00	98,88	984.835.545,00
Kecamatan Tolanas	940.799.238,00	892.606.394,00	94,88	905.232.986,00
Kecamatan Fautmollo	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	98,22	961.340.448,00
Kecamatan Batuputih	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	95,48	1.153.017.974,00
Kecamatan Polen	990.061.867,00	915.022.323,00	92,42	1.080.963.301,00
Kecamatan Oenino	917.904.171,00	890.333.789,00	97,00	882.656.224,00
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	85,09	1.349.751.554,00
Jumlah	**854.633.485.148,25**	**772.362.853.812,00**	**90,37**	**648.876.618.174,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

   Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja pegawai TA 2025 dengan tahun sebelumnya:

   a. Adanya Pergeseran dan penyesuaian anggaran disebabkan karena perubahan kenaikan pangkat dan berkala ASN;

   b. Tambahan Beban Pegawai di mana kuota PNS dan tenaga PPPK melebihi batas belanja pegawai di atas batas optimal 30%;

   c. Pembayaran gaji dan tunjangan serta honorarium / lembur yang tetap berjalan

   Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja pegawai TA 2025 dengan tahun sebelumnya:

   a. Kebijakan efisiensi anggaran, adanya pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penundaan beberapa kegiatan atau rasionalisasi anggaran rutin dan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai; dan

   b. Lemahnya perencanaan dan keterlambatan dokumen teknis diawal tahun membuat eksekusi belanja baru terpacu pada semester II.

2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1.*

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	158.147.051.137,63	129.809.764.160,52	82,08	114.227.380.674,00
Belanja Jasa	115.000.432.315,65	112.589.795.554,00	97,90	102.532.542.224,00
Belanja Pemeliharaan	6.722.849.610,58	6.169.056.908,00	91,76	5.217.405.191,00
Belana Perjalanan Dinas	40.236.451.132,11	36.286.840.010,00	90,19	49.000.746.872,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.024.140.396,00	13.129.557.207,98	93,62	7.368.439.871,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	94.072.566.000,00	65.305.694.001,00	69,42	66.099.001.895,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50	10.006.752.498,00
Jumlah	**437.251.188.223,01**	**372.114.507.657,50**	**85,10**	**354.452.271.225,00**

Pada TA 2025, Belanja Barang dan Jasa direalisasikan senilai Rp372.114.507.657,50 atau 85,10% dari yang dianggarkan senilai Rp437.251.188.223,01. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp17.662.236.432,50 atau 4,98% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp354.452.271.225,00.

Belanja Barang dan Jasa sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	119.770.481.188,52	83.077.574.894,00	69,36	79.583.946.410,00
Dinas Kesehatan	115.929.957.471,00	98.914.834.719,00	85,32	92.349.902.058,00
Rumah Sakit Umum Daerah	15.353.340.114,04	15.043.664.390,00	97,98	20.683.368.533,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.288.283.457,00	5.772.171.705,00	91,79	7.723.963.246,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.094.262.208,00	24.888.168.541,00	91,86	22.186.478.137,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.549.662.772,00	4.509.706.007,00	99,12	4.786.001.416,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.466.373.538,00	1.236.613.143,00	84,33	1.636.390.335,00
Dinas Sosial	11.923.425.361,00	11.705.729.035,00	98,17	10.970.691.520,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.198.276.746,00	2.164.184.952,00	98,45	3.031.720.649,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.758.770.500,00	1.629.755.289,00	92,66	2.497.693.517,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.287.762.700,00	3.848.671.575,00	89,76	4.502.560.106,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.605.533.664,00	8.157.611.790,00	94,79	7.873.492.273,00
Dinas Perhubungan	1.303.111.345,00	1.258.039.408,00	96,54	1.525.815.462,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.802.428.724,00	1.790.548.022,00	99,34	2.490.950.383,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	710.719.700,00	511.938.021,00	72,03	1.391.414.546,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.025.804.103,00	4.806.759.833,00	95,64	2.410.731.558,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	981.163.734,00	960.748.671,00	97,92	1.178.114.473,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.794.897.868,00	3.763.324.534,00	99,17	1.993.925.673,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.611.079.522,61	2.344.561.333,00	89,79	2.423.009.198,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.985.114.180,00	3.720.093.339,00	93,35	1.678.191.522,00
Dinas Perikanan	3.088.216.632,00	3.007.189.991,00	97,38	3.123.242.208,00
Dinas Pariwisata	1.577.354.148,00	1.436.335.192,00	91,06	1.949.272.214,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9.659.055.040,00	8.932.767.839,00	92,48	7.252.153.292,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.666.488.996,00	9.262.561.778,00	86,84	5.219.840.580,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	5.639.385.151,00	5.407.186.954,00	95,88	3.545.123.480,00

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Sekretariat Daerah	12.799.770.729,00	12.514.152.017,00	97,77	10.985.231.265,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.555.100.233,00	22.808.863.861,00	96,83	19.947.864.887,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.724.051.356,00	2.563.388.451,00	94,10	2.802.505.616,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.414.928.727,00	6.713.607.173,00	90,54	6.034.124.237,00
Badan Pendapatan Daerah	3.902.470.045,00	3.812.870.048,00	97,70	2.687.506.422,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.843.117.172,00	2.920.717.067,00	70,00	3.320.243.927,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.004.030.480,00	991.632.810,00	98,77	1.186.330.410,00
Inspektorat Daerah	3.246.213.830,00	3.165.996.895,00	97,53	2.995.851.897,00
Kecamatan Kokbaun	219.174.417,00	184.802.841,00	84,32	248.852.100,00
Kecamatan Amanuban Selatan	156.244.116,00	155.180.357,00	99,32	190.535.580,00
Kecamatan Tobu	161.831.428,00	161.466.808,00	99,77	177.772.150,00
Kecamatan Amanuban Tengah	193.489.178,00	188.490.598,00	97,42	248.118.937,00
Kecamatan Kuatnana	174.336.238,00	173.285.066,00	99,40	185.362.500,00
Kecamatan Fatumnasi	170.104.130,00	170.087.039,00	99,99	212.300.000,00
Kecamatan Amanuban Barat	183.425.172,00	183.275.172,00	99,92	224.816.281,00
Kecamatan Kolbano	160.404.146,00	153.974.855,00	95,99	214.527.300,00
Kecamatan Mollo Barat	155.806.608,00	155.514.740,00	99,81	188.153.200,00
Kecamatan Amanatun Selatan	205.615.551,00	166.553.064,00	81,00	217.352.950,00
Kecamatan Nunkolo	171.749.424,00	167.307.782,00	97,41	184.451.389,00
Kecamatan Santian	149.894.488,00	148.485.841,00	99,06	180.577.762,00
Kecamatan Amanatun Utara	161.579.605,92	158.403.286,00	98,03	189.710.550,00
Kecamatan Kuanfatu	152.244.414,00	149.208.564,00	98,01	206.188.000,00
Kecamatan Kualin	171.015.860,00	170.165.860,00	99,50	180.007.200,00
Kecamatan Noebeba	161.889.882,00	161.550.608,00	99,79	184.491.000,00
Kecamatan Mollo Utara	172.539.216,00	172.355.076,00	99,89	230.933.170,00
Kecamatan Mollo Tengah	182.213.000,00	182.003.896,00	99,89	194.615.600,00
Kecamatan Nunbena	171.596.912,00	171.327.486,00	99,84	143.566.250,00
Kecamatan Noebana	174.570.848,50	168.038.074,50	96,26	194.387.600,00
Kecamatan Mollo Selatan	195.542.955,00	168.105.070,00	85,97	204.528.150,00
Kecamatan Fatukopa	170.792.608,00	170.792.608,00	100,00	170.089.700,00
Kecamatan Amanuban Timur	195.487.778,00	177.359.312,00	90,73	209.168.470,00
Kecamatan Kot'olin	151.392.000,00	137.733.474,00	90,98	181.995.535,00
Kecamatan KiE	185.709.179,00	185.709.179,00	100,00	208.905.000,00
Kecamatan Kota SoE	1.051.705.110,00	1.047.752.825,00	99,62	1.299.260.550,00
Kecamatan Boking	191.940.172,00	190.187.571,00	99,09	225.115.000,00
Kecamatan Toianas	191.241.912,00	176.331.709,00	92,20	181.574.950,00
Kecamatan Fautmollo	170.120.957,00	169.768.562,00	99,79	199.542.900,00
Kecamatan Batuputih	172.248.245,42	169.271.956,00	98,27	205.686.700,00
Kecamatan Polen	138.005.608,00	135.097.190,00	97,89	212.513.843,00
Kecamatan Oenino	176.390.956,00	176.388.956,00	100,00	175.650.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.250.254.673,00	2.226.562.955,00	98,95	3.058.869.458,00
Jumlah	**437.251.188.223,01**	**372.114.507.657,50**	**85,10**	**354.452.271.225,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja barang dan jasa TA 2025 dengan tahun sebelumnya disebabkan karena Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Perubahan anggaran sehingga anggaran lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya; dan
   b. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja barang dan jasa TA 2025 disebabkan karena kurangnya komitmen pimpinan dalam penyerapan anggaran, penumpukan pengajuan anggaran (SPP-SPM) lebih banyak dilakukan pada akhir Tahun anggaran dalam bentuk permintaan Tambahan Uang Persediaan.
2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran* 2.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	64.207.971.024,00
Belanja Hibah kepada BUMD				
• Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	200.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	369.236.000,00	369.236.000,00	100,00	0,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	88,67	2.835.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	531.937.904,00
Jumlah	**9.780.317.000,00**	**8.046.673.927,00**	**82,27**	**68.167.808.928,00**

Pada TA 2025, Belanja Hibah direalisasikan senilai Rp8.046.673.927,00 atau 82,27% dari yang dianggarkan senilai Rp9.780.317.000,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp60.121.135.001,00 atau 88,20% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp68.167.808.928,00.

Belanja Hibah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	529.236.000,00	529.236.000,00	100,00	200.000.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00
Sekretariat Daerah	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	88,67	2.835.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	64.739.808.928,00
Jumlah	**9.780.317.000,00**	**8.046.673.927,00**	**82,27**	**68.167.808.928,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian realisasi belanja hibah disebabkan karena:
      - Ketidaksiapan dokumen administrasi penerima hibah menjadi penghambat proses pencairan dana hibah;
      - Keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum untuk pencairan dana hibah yang berdampak pada penyaluran dana hibah tidak tepat waktu;
      - Adanya perubahan regulasi dalam tahun berjalan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana hibah; dan
      - Tidak terealisasinya belanja hibah untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga disebabkan karena Belanja hibah yang dianggarkan sudah di realisasikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia sehingga anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak dapat direalisasikan.

   b. Tingginya capaian realisasi belanja hibah disebabkan karena:
      - Perencanaan anggaran yang matang yang sudah dilakukan pada awal tahun sehingga mempercepat proses pencairan dana hibah;
      - Terjalinnya koordinasi secara baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang mendukung percepatan proses persetujuan dan pencairan dana hibah; dan
      - Adanya komitmen yang tinggi dari pengguna anggaran terhadap capaian realisasi anggaran belanja hibah.

   c. Sedangkan rendahnya realisasi belanja hibah tahun 2025 dibandingkan realisasi tahun 2024 adalah pada tahun 2024 Pemenrintah Daerah mendapatkan Hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Persiden dan Wakil Presiden.

2. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 361/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024-2029 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Kebangkitan Bangsa	138.845.000,00	58.890.115,00	42,41	62.700.332,00

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Gerakan Indonesia Raya	185.738.000,00	78.779.446,00	42,41	56.642.582,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	203.714.000,00	86.403.838,00	42,41	66.824.273,00
Partai Golongan karya	194.243.000,00	82.386.781,00	42,41	64.950.834,00
Partai Nasional Demokrat	167.160.000,00	70.899.720,00	42,41	70.450.411,00
Partai Persatuan Indonesia	131.117.000,00	55.612.339,00	42,41	44.088.660,00
Partai Amanat Nasional	113.827.000,00	48.278.909,00	42,41	35.791.295,00
Partai Hati Nurani Rakyat	119.308.000,00	50.603.636,00	42,41	50.617.436,00
Partai Demokrat	121.016.000,00	51.328.072,00	42,41	39.459.989,00
Partai Keadilan Sejahtera	50.113.000,00	21.255.071,00	42,41	40.312.092,00
Jumlah	**1.425.081.000,00**	**604.437.927,00**	**42,41**	**531.837.904,00**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	665.000.000,00	620.000.000,00	93,23	475.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	35.500.000,00	71,00	25.000.000,00
Jumlah	**715.000.000,00**	**655.500.000,00**	**91,68**	**530.000.000,00**

Pada TA 2025, Belanja Bantuan Sosial direalisasikan senilai Rp655.500.000,00 atau 91,68% dari yang dianggarkan senilai Rp715.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp125.500.000,00 atau 23,68% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp530.000.000,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Tidak akuratnya data penerima Bantuan Sosial dimana data dilapangan tidak sesuai dengan nomor identitas penerima Bantuan sosial;
   b. Keterlambatan penetapan anggaran APBD/APBN menyebabkan siklus pelaksanan anggaran menjadi tertunda dan menumpuk di akhir tahun;
   c. Adanya perubahan regulasi dalam jangka waktu berjalan menyebabkan keterlambatan pencairan dana bantuan sosial.

2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 315/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima bantuan Sosial pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2025.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,96	28.284.032.581,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28	34.295.572.710,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,19	103.200.934.739,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
Jumlah	**142.651.192.101,00**	**126.632.269.348,00**	**88,77**	**166.227.066.280,00**

Pada TA 2025, Belanja Modal direalisasikan senilai Rp126.632.269.348,00 atau 88,77% dari yang dianggarkan senilai Rp142.651.192.101,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp39.594.796.932,00 atau 23,82% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp166.227.066.280,00.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00

Pada TA 2025, Belanja Tanah direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan senilai Rp0,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp198.757.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp198.757.000,00.

Penjelasan:

Untuk tahun anggaran 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk belanja modal tanah, sedangkan realisasi tahun 2024 senilai Rp198.757.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	2.194.190.000,00	2.166.136.500,00	98,72	1.347.335.900,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.258.009.000,00	7.223.476.700,00	99,52	9.640.700.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	135.772.500,00	60.594.900,00	44,63	7.000.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pertanian	85.500.000,00	84.989.925,00	99,40	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.090.664.900,00	4.628.351.070,00	90,92	2.859.056.102,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	981.569.264,00	863.217.250,00	87,94	304.941.850,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.622.283.117,00	1.835.394.326,00	113,14	6.430.172.531,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.622.544.000,00	1.139.170.081,00	70,21	561.635.000,00
Belanja Modal Komputer	20.315.043.593,00	17.055.961.954,00	83,96	5.775.541.885,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	48.186.000,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	140.000.000,00	138.639.000,00	99,03	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	99,18	389.399.550,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.000.000,00	5.999.300,00	99,99	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	920.063.763,00
Jumlah	**47.758.072.374,00**	**43.440.314.806,00**	**90,96**	**28.284.032.581,00**

Pada TA 2025, Belanja Peralatan dan Mesin direalisasikan senilai Rp43.440.314.806,00 atau 90,96% dari yang dianggarkan senilai Rp47.758.072.374,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp15.156.282.225,00 atau 53,59% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp28.284.032.581,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Peralatan dan Mesin antara lain:
      - Kebutuhan terhadap Peralatan dan mesin sifatnya mendesak atau sangat dibutuhkan untuk operasional atau pelayanan publik sehingga realisasi diprioritaskan. Kondisi peralatan lama rusak berat dan memerlukan pergantian mendesak;
      - Pagu anaggaran untuk belanja modal bertambah melalui Pergeseran anggaran dari jenis Belanja lain yang tidak terserap; dan
      - Pengadaan dilakukan melalui E-Procurement dan katalog elektronik sehingga memudahkan dan mempercepat proses pengadaan dan realisasi belanja modal menjadi lebih cepat terserap.
   b. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 lebih rendah, hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.945.454.568,00	16.594.283.502,00	87,59	4.943.611.250,00
Dinas Kesehatan	9.037.898.517,00	8.295.958.326,00	91,79	12.869.983.710,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.100.000.000,00	1.098.000.000,00	99,82	3.108.144.163,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179.000.000,00	103.226.892,00	57,67	0.00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.305.522.000,00	9.407.608.563,00	91,29	780.072.071,00

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Satuan Polisi Pamong Praja	81.000.000,00	79.811.029,00	98,53	0.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.800.000,00	192.212.740,00	91,18	227.696.070,00
Dinas Sosial	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	267.857.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	920.594.256,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	828.880.000,00	739.514.483,00	89,22	14.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	104.467.000,00	104.467.000,00	100,00	140.916.267,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	74.750.000,00
Dinas Perhubungan	264.006.200,00	245.307.850,00	92,92	72.017.175,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	251.650.000,00	251.326.300,00	99,87	229.360.040,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0.00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	5.000.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	309.000.000,00	308.737.000,00	99,91	151.745.450,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	74.076.000,00	73.162.000,00	98,77	48.186.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	17.954.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	93.500.000,00	93.499.925,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	90.300.000,00	90.300.000,00	100,00	36.000.000,00
Dinas Pariwisata	357.424.000,00	355.779.700,00	99,54	199.700.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	44.000.000,00	40.500.000,00	92,05	108.480.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	87.950.000,00	82.341.500,00	93,62	235.651.600,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	37.703.000,00	37.239.000,00	98,77	31.481.500,00
Sekretariat Daerah	1.084.226.800,00	1.044.977.800,00	96,38	423.628.450,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	524.325.000,00	504.302.150,00	96,18	268.896.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85.442.556,00	85.435.500,00	99,99	109.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.783.389.500,00	1.777.123.400,00	99,65	2.253.131.079,00
Badan Pendapatan Daerah	310.112.700,00	308.469.000,00	99,47	48.740.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	230.000.000,00	228.249.999,00	99,24	133.800.900,00
Inspektorat Daerah	852.443.900,00	820.258.000,00	96,22	240.370.500,00
Kecamatan Kokbaun	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Amanuban Selatan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	20.400.000,00
Kecamatan Tobu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	11.000.000,00
Kecamatan Amanuban Tengah	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00	19.300.000,00
Kecamatan Kuatnana	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Amanuban Barat	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00
Kecamatan Mollo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kecamatan Kolbano	34.855.000,00	30.937.500,00	88,76	0,00
Kecamatan Amanatun Selatan	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00
Kecamatan Nunkolo	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Santian	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Amanatun Utara	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	22.000.000,00
Kecamatan Kuanfatu	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Kualin	8.025.757,00	8.025.757,00	100,00	7.500.000,00
Kecamatan Noebeba	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Mollo Utara	13.000.000,00	12.765.000,00	98,19	0,00
Kecamatan Mollo Tengah	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Kecamatan Nunbena	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	26.000.000,00
Kecamatan Noebana	15.219.876,00	15.203.500,00	99,89	6.230.000,00
Kecamatan Mollo Selatan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Fatukopa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	16.000.000,00
Kecamatan Amanuban Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kotolin	27.950.000,00	27.950.000,00	100,00	22.000.000,00
Kecamatan KiE	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Kecamatan Kota SoE	0,00	0,00	0,00	42.800.000,00
Kecamatan Boking	0,00	0,00	0,00	9.085.000,00
Kecamatan Toianas	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Kecamatan Fautmollo	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	11.000.000,00
Kecamatan Batuputih	14.000.000,00	14.000.000,00	100.00	2.500.000,00
Kecamatan Polen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Oenino	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	13.000.000,00
Jumlah	**47.758.072.374,00**	**43.440.314.806,00**	**90,96**	**28.284.032.581,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	68.671.434.116,00	60.730.711.784,00	88,44	33.639.921.035,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	865.424.825,00	659.109.475,00	76,16	655.651.675,00
Jumlah	**69.536.858.941,00**	**61.389.821.259,00**	**88,28**	**34.295.572.710,00**

Pada TA 2025, Belanja Gedung dan Bangunan direalisasikan senilai Rp61.389.821.259,00 atau 88,28% dari yang dianggarkan senilai Rp69.536.858.941,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp27.094.248.549,00 atau 79,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp34.295.572.710,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Gedung dan Bangunan kendala pembebasan lahan dan penolakan dari masyarakat, keterlambatan lelang, keterbatasan bahan dan material, peralatan konstruksi yang tidak memadai, ketergantungan

pembayaran pada penyelesaian fisik pekerjaan (setelah pekerjaan fisik selesai 100% atau berdasarkan termin prestasi kerja); dan

b. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 lebih besar pada Bidang Kesehatan.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.721.896.175,00	18.313.408.500,00	71,20	20.339.265.066,00
Dinas Kesehatan	39.208.348.766,00	38.984.219.403,00	99,43	12.847.682.644,00
Rumah Sakit Umum Daerah	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86	0,00
Dinas Perhubungan	400.000.000,00	283.272.336,00	70,82	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	555.000.000,00
Dinas Perikanan	198.000.000,00	187.612.650,00	94,75	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	232.550.000,00
Sekretariat DPRD	50.000.000,00	49.738.000,00	99,48	21.275.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	916.215.000,00	681.874.447,00	74,42	99.800.000,00
BPKAD	197.500.000,00	197.186.900,00	99,84	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	208.000.000,00	141.214.673,00	67,89	0,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	225.250.000,00	147.615.750,00	65,53	0,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro kecil Menengah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Amanuban Tengah	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat DPRD	50.000.000,00	49.738.000,00	99,48	21.275.000,00
Kecamatan Kota SoE	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	200.000.000,00
Jumlah	**69.536.858.941,00**	**61.389.821.259,00**	**88,28**	**34.295.572.710,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.994.207.686,00	17.770.487.423,00	88,88	77.089.068.774,00
Belanja Modal Bangunan Air	665.000.000,00	542.802.140,00	81,62	13.970.925.525,00.
Belanja Modal Instalasi	1.615.200.000,00	899.000.000,00	55,66	5.023.299.950,00
Belanja Modal Jaringan	1.961.026.800,00	1.675.900.200,00	85,46	7.117.640.490,00
Jumlah	**24.235.434.486,00**	**20.888.189.763,00**	**86.19**	**103.200.934.739,00**

Pada TA 2025, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan direalisasikan senilai Rp20.888.189.763,00 atau 86,19% dari yang dianggarkan senilai Rp24.235.434.486,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp82.312.744.976,00 atau 79,76% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp103.200.934.739,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Jaringan dan Irigasi kendala pembebasan lahan dan penolakan dari masyarakat, keterlambatan lelang, keterbatasan bahan dan material, peralatan konstruksi yang tidak memadai, ketergantungan pembayaran pada penyelesaian fisik pekerjaan (setelah pekerjaan fisik selesai 100% atau berdasarkan termin prestasi kerja);
   b. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 lebih rendah, hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Kesehatan	923.000.000,00	899.000.000,00	97,40	12.522.825.770,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81	99.954.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.921.725.576,00	16.698.011.151,00	88,25	81.293.020.089,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	662.283.800,00	281.110.140,00	42,45	7.774.720.170,00
Dinas Perhubungan	715.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kota SoE	1.334.174.110,00	1.334.168.272,00	100,00	1.327.914.210,00
Kecamatan Amanuban Tengah	0,00	0,00	0,00	182.500.000,00
Jumlah	**24.235.434.486,00**	**20.888.189.763,00**	**86,19**	**103.200.934.739,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00
Jumlah	**370.826.300,00**	**315.588.900,00**	**85,10**	**247.769.250,00**

Pada TA 2025, Belanja Aset Tetap Lainnya direalisasikan senilai Rp315.588.900,00 atau 85,10% dari yang dianggarkan senilai Rp370.826.300,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp67.819.650,00 atau 27,37% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp247.769.250,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2025 antara lain: perencanaan kurang sesuai sehingga dilakukan revisi anggaran secara berulang, keterlambatan dalam proses lelang, dan pengadaan dilakukan pada akhir tahun anggaran;
   b. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2025 antara lain: Kebutuhan akan ketersediaan barang sifatnya penting, adanya alokasi

penambahan anggaran pengadaan dilakukan sesuai rencana anggaran kas dalam tahun anggaran berjalan.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.938.000,00	96.122.400,00	63,68	170.911.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	18.925.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	10.462.500,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	110.756.700,00	110.470.000,00	99,74	0,00
Sekretariat Daerah	95.135.100,00	95.000.000,00	99,86	29.970.000,00
Kecamatan Amanuban Selatan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Kecamatan Mollo Tengah	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Kecamatan Oenino	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Kecamatan Noebana	3.496.500,00	3.496.500,00	100,00	0,00
Jumlah	**370.826.300,00**	**315.588.900,00**	**85,10**	**247.769.250,00**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
Jumlah	**750.000.000,00**	**598.354.620,00**	**79,78**	**0,00**

Pada TA 2025, Belanja Modal Aset Lainnya direalisasikan senilai Rp598.354.620,00 atau 79,78% dari yang dianggarkan senilai Rp750.000.000,00. Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp598.354.620,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp0,00.

Penjelasan

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya adalah meliputi Pagu tidak sesuai harga pasar (RAB yang disusun tidak akurat atau terlalu rendah dibandingkan harga pasar), salah dalam klasifikasi akun seharusnya masuk belanja barang/jasa atau belanja hibah sehingga menunggu perubahan anggaran;
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
RSUD Soe	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
Jumlah	**750.000.000,00**	**598.354.620,00**	**79,78**	**0,00**

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00

Pada TA 2025, Belanja Tak Terduga direalisasikan senilai Rp1.070.675.400,00 atau 50,38% dari yang dianggarkan senilai Rp2.125.000.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp42.052.692,00 atau 4,09% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.028.622.708,00.

Belanja Tidak Terduga sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50.38	1.028.622.708,00
Jumlah	**2.125.000.000,00**	**1.070.675.400,00**	**50,38**	**1.028.622.708,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga antara lain minimnya bencana /kejadian luar biasa/bencana sosial yang signifikan selama satu tahun anggaran sehingga dana tidak perlu di realisasi, Prosedur pencairan Belanja Tidak Terduga harus memerlukan penetapan status tanggap darurat oleh Kepala Daerah, keterlambatan dalam penetapan status tanggap darurat mengakibatkan penggunaan BTT terhambat, Alokasi anggaran BTT terlalu tinggi sebagai langkah antisipasi sedangkan realisasi tidak sesuai dengan alokasi anggaran menyebabkan penyerapan anggaran rendah; dan
   b. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga antara lain Terjadinya bencana alam secara intens sehingga memaksa penggunaan dana dalam skala besar.
2. Belanja Tak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bencana/pengembalian atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya berupa pajak/retribusi.

5.1.3 Transfer Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,71	886.875.098,00
Transfer Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43	325.068.568.148,00
Jumlah	**337.309.102.598,00**	**285.124.531.482,00**	**84,53**	**325.616.669.367,00**

Pada TA 2025, Transfer Daerah direalisasikan senilai Rp285.124.531.482,00 atau 84,53% dari yang dianggarkan senilai Rp337.309.102.598,00. Realisasi Transfer Daerah TA 2025 mengalami penurunan

senilai Rp40.492.137.885,00 atau 12,44% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp325.616.669.367,00.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,71	886.875.098,00
Jumlah	**2.164.348.198,00**	**2.157.963.398,00**	**99,71**	**886.875.098,00**

Pada TA 2025, Transfer Bagi Hasil direalisasikan senilai Rp2.157.963.398,00 atau 99,71% dari yang dianggarkan senilai Rp2.164.348.198,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.271.088.300,00 atau 143,32% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp886.875.098,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Transfer Bagi Hasil tahun anggaran 2025 senilai Rp2.157.963.398,00 atau 99,71% dari anggaran senilai Rp2.164.348.198,00; dan
   b. Dibandingkan realisasi tahun 2024, pada tahun 2025 mengalami peningkatan dalam anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak.
2. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 266 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 4).

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,64	238.354.154.749,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.173.850.400,00	91.895.940.400,00	99,70	86.714.413.399,00
Jumlah	**335.144.754.400,00**	**282.966.568.084,00**	**84,43**	**325.068.568.148,00**

Pada TA 2025, Transfer Bantuan Keuangan direalisasikan senilai Rp282.966.568.084,00 atau 84,43% dari yang dianggarkan senilai Rp335.144.754.400,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp41.763.226.185,00 atau 12,86% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp324.729.794.269,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2025 antara lain keterlambatan administratif yaitu belum terpenuhinya dokumen syarat salur (Laporan penggunaan tahap sebelumnya) oleh Pemerintah Daerah; dan
   b. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2025 antara lain adanya penyesuaian kebijakan/regulasi yang mempercepat pencairan dana dari Pusat ke Daerah.

5.1.4 Surplus/Defisit

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari nilai Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja serta Transfer Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	Rp1.704.309.743.178,00	Rp1.518.838.398.066,36	89,12	Rp1.484.750.536.177,18
Belanja dan Transfer	Rp1.784.465.285.070,26	Rp1.566.007.011.626,50	87,76	Rp1.564.899.056.682,00
Jumlah	**(Rp80.155.541.892,26)**	**(Rp47.168.613.560,14)**	**58,85**	**(Rp80.148.520.504,82)**

Pada TA 2025, Surplus/Defisit direalisasikan senilai Rp47.168.613.560,14 atau 58,85% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Pembiayaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp32.979.906.944,68 atau 41,15% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp80.148.520.504,82.

5.1.5 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**80.155.541.892,26**	**80.155.541.892,26**	**100,00**	**160.304.062.397,08**

Pada TA 2025, Pembiayaan direalisasikan senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Pembiayaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 atau 50,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp160.304.062.397,08.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
Jumlah	**80.155.541.892,26**	**80.155.541.892,26**	**100,00**	**160.304.062.397,08**

Pada TA 2025, Penerimaan Pembiayaan direalisasikan senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 atau 50,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp160.304.062.397,08.

5.1.5.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.051.757.397,08
Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	252.305.000,00
Jumlah	**80.155.541.892,26**	**80.155.541.892,26**	**100,00**	**160.304.062.397,08**

Pada TA 2025, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direalisasikan senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 atau 50,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp160.304.062.397,08.

Penjelasan:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari target senilai Rp80.155.541.892,26, mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp160.304.062.397,08.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada TA 2025, Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan senilai Rp0,00. Realisasi TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp0,00.

Penjelasan:

Untuk tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal Daerah.

5.1.6 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ **Pendapatan Daerah**	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	89,12	1.484.750.536.177,18
✓ Pendapatan Asli Daerah	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18
✓ Pendapatan Transfer	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74	1.342.136.980.808,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
➢ **Belanja Daerah**	1.447.156.182.472,26	1.280.882.480.144,50	88,51	1.239.282.387.315,00
✓ Belanja Operasi	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54	1.072.026.698.327,00
✓ Belanja Modal	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00	88,77	166.227.066.260,00
✓ Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
➢ **Transfer Daerah**	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	84,53	325.616.669.367,00
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,71	548.101.219,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43	325.068.568.148,00
➢ **Pembiayaan Daerah**	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
✓ Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
✓ Pengeluaran Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.051.757.397,08
✓ BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	252.305.000,00
Jumlah	**0,00**	**32.986.928.332,12**	**0,00**	**80.155.541.892,26**

Pada TA 2025, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran direalisasikan senilai Rp32.986.928.332,12 dari yang dianggarkan senilai Rp0,00. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp47.168.613.560,14 atau 58,85% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp80.155.541.892,26.

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2025 memiliki SiLPA senilai Rp32.986.928.332,12 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➢ **Dana SiLPA Terikat**	
✓ Dana pada Kas di BLUD	5.452.876.105,94
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	2.383.657.610,52
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran yang didalamnya memuat dana:	
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Bidang Pendidikan	391.576.200,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	203.203.287,00
» DAK Fisik Bidang Air Minum	760.937.010,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» Dana Non Fisik - BOKB	346.598.074,00
» Dana Non Fisik - BOK	1.496.665.925,00
» Dana Non Fisik – P3A	176.662.488,00
» Dana Non Fisik - KPP	1.312.673.351,00
• Sisa Dana Insentif Fiskal	508.455.940,00
➢ **Dana SiLPA Non-Terikat**	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00

Uraian	Nilai
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	448.373.452,50
✓ Dana pada Kas di BLUD	
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	28.694,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	111.128,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	13.281.868.268,16
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	295.090.100,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	373.938,00
Jumlah	**32.986.928.332,12**

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50
Kas di BLUD	5.452.876.105,94
Kas Dana BOS	2.383.657.610,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(5.366.949.385,46)
Jumlah	**32.986.928.332,12**

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK, dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Angaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	65.203.230.179,16	142.492.185.166,56
Kas di Bendahara Penerimaan	826.618,00	3.863.576,99
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.059.007.568,00	146.970.809,00
Kas di BLUD	1.084.341.559,84	6.459.162.730,47
Kas Dana BOSP	2.586.027.871,52	1.770.878.445,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.012.745.245,00	4.034.241.001,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.003.342.759,00	5.625.190.954,00
Setara Kas	0,00	522.780.500,00
Utang PFK	(3.793.979.908,26)	(1.003.515.786,46)
Jumlah	**80.155.541,892.26**	**160.051.757,397.08**

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2025 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	80.155.541.892,26	160.304.062.397,08

Saldo tersebut adalah saldo SiLPA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan ***poin 5.2.4*** di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	32.986.928.332,12	80.155.541.892,26

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA

pada *poin 5.1.5*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *poin* 5.2.5 di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan pengakuan kas dana BOK di Puskesmas	0,00	252.305.000,00
Jumlah	**0,00**	**252.305.000,00**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00
Kas di BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
Kas Dana BOSP	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00
Utang PFK	(5.366.949.385,46)	(3.793.979.908,26)
Jumlah	**32.986.928.332,12**	**80.155.541.892,26**

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *poin 5.1.5*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *poin* 5.2.3 di atas.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	110.085.653.030,11	153.170.333.009,69	(43.084.679.979,58)	(28,13)
Investasi Jangka Panjang	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15
Aset Tetap	2.116.039.638.401,36	2.150.420.203.058,03	(34.380.564.656,67)	(1,60)
Aset Lainnya	45.492.016.167,54	43.144.804.865,40	2.347.211.302,14	5,44
Jumlah	**2.380.923.456.857,01**	**2.455.877.824.272,12**	**(74.954.367.415,11)**	**(3,05)**

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	38.353.877.717,58	83.949.521.800,52	(45.595.644.082,94)	(54,31)
Piutang Pajak Daerah	7.309.181.839,96	7.042.641.270,96	266.540.569,00	3,78
Piutang Retribusi Daerah	4.131.776.363,00	3.825.179.369,00	306.596.994,00	8,02
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	4.580.669.661,53	6.736.652.726,53	(2.155.983.065,00)	(32,00)
Piutang Transfer Antar Daerah	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00	2.442.609.120,00	108,01
Piutang Lainnya	1.650.000,40	1.650.000,40	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(9.269.897.854,29)	(7.391.908.262,35)	(1.877.989.591,94)	25,41
Beban Dibayar Dimuka	104.499.425,30	6.448.818.895,30	(6.344.319.470,00)	98,38
Persediaan	60.169.899.748,63	50.296.390.201,33	9.873.509.547,30	19,63
Jumlah	**110.085.653.030,11**	**153.170.333.009,69**	**(43.084.679.979,58)**	**(28,13)**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16	(41.062.036.390,54)	(62,98)
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00	22.203.500,00	2.686,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00	(610.634.115,50)	(57,66)
Kas di BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84	4.368.534.546,10	402,87
Kas Dana BOSP	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52	(202.370.261,00)	(7,83)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00	(3.767.544.652,00)	(75,16)
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00	(4.343.796.710,00)	(48,25)
Jumlah	**38.353.877.717,58**	**83.949.521.800,52**	**(45.595.644.082,94)**	**(54,31)**

Penjelasan:

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank NTT Cabang SoE dengan nomor rekening yaitu 008.01.04.000000-3. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA. Rincian saldo Kas di Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 3.*

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp23.030.118,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Pelayanan Puskesmas	23.023.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Giro FKTP	6.618,00
Jumlah	**23.030.118,00**

Saldo kas di Bendahara Penerimaan tersebut sebagian telah telah disetorkan di awal Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Disetor Tahun 2026	Sisa Kas Belum Disetor
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Pelayanan Puskesmas	23.023.500,00	23.023.500,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Giro FKTP	6.618,00	0,00	6.618,00
Jumlah	**23.030.118,00**	**23.023.500,00**	**6.618,00**

Penjelasan:

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 senilai Rp23.030.118,00 terdiri dari:

a. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp23.023.500,00; dan
b. Jasa Giro Bendahara FKTP yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp6.618,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada *Lampiran 4.*

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp448.373.452,50. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa UP	203.741.196,50
Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa TU	213.996.962,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pengembalian LS	30.635.294,00
Jumlah	**448.373.452,50**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya telah disetorkan di awal Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Disetor Tahun 2026	Sisa Kas Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa UP	203.741.196,50	203.741.196,50	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran TU	213.996.962,00	213.996.962,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pengembalian LS	30.635.294,00	30.635.294,00	0,00
Jumlah	**448.373.452,50**	**448.373.452,50**	**0,00**

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluran dapat dilihat pada *Lampiran 5.*

5.3.1.1.1.4 **Kas di BLUD**

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyajikan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Saldo pada rekening nomor 00801050001505 di Bank NTT Cabang SoE	5.452.876.105,94
Jumlah	**5.452.876.105,94**

Rincian saldo Kas di BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 6.*

5.3.1.1.1.5 **Kas Dana BOSP**

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp2.383.657.610,52 yang tersebar pada 561 sekolah negeri, yaitu SD sebanyak 396, SMP sebanyak 137 dan PAUD/TK sebanyak 28 yang tersebar di seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada *Lampiran 7.*

5.3.1.1.1.6 **Kas Dana Kapitasi pada FKTP**

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 senilai Rp1.245.200.593,00. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada *Lampiran 8.*

5.3.1.1.1.7 **Kas Dana BOK Puskesmas**

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp4.659.546.049,00. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *Lampiran 9.*

5.3.1.1.2 **Piutang Pajak Daerah**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	15.783.800,00	15.783.800,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	46.225.449,00	46.225.449,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Hiburan	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	1.026.216.719,96	1.030.196.363,96	(3.979.644,00)	(0,39)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	516.692.790,00	470.507.995,00	46.184.795,00	9,82
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.694.483.081,00	5.470.147.663,00	224.335.418,00	4,10
Jumlah	**7.309.181.839,96**	**7.042.641.270,96**	**266.540.569,00**	**3,78**

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Pajak Hotel	15.783.800,00	0,00	0,00	15.783.800,00
Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	46.225.449,00	0,00	0,00	46.225.449,00
Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.780.000,00	0,00	0,00	9.780.000,00
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	984.072.636,81	194.333.498,00	232.605.742,00	945.800.392,81
Piutang Pajak Reklame Kain	44.623.727,15	461.413.750,00	428.172.350,00	77.865.127,15
Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	950.000,00	950.000,00	1.500.000,00
Piutang Pajak Reklame Berjalan	0,00	2.306.800,00	1.255.600,00	1.051.200,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	470.507.995,00	5.036.115.565,00	4.989.930.770,00	516.692.790,00

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang PBBP2	5.470.147.663,00	4.866.170.597,00	4.641.835.179,00	5.694.483.081,00
Jumlah	**7.042.641.270,96**	**10.561.290.210,00**	**10.294.749.641,00**	**7.309.181.839,96**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:
  1. Penyebab utama penurunan Piutang Pajak Reklame Papan senilai Rp38.272.244,00 apabila dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah adanya penagihan tunggakan yang dilakukan secara intensif langsung kepada para wajib pajak yang masih memiliki kewajiban tunggakan Pajak Reklame. Upaya penagihan tersebut berdampak pada meningkatnya tingkat pembayaran tunggakan, sehingga saldo piutang Pajak Reklame Papan pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya;
  2. Penyebab utama kenaikan Piutang Pajak Reklame Kain senilai Rp33.241.400,00 apabila dibandingkan antara piutang pajak tahun 2024 dengan piutang pajak tahun 2025 yakni meskipun adanya penambahan wajib pajak baru, namun masih terdapat wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya pada periode berjalan. Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi piutang Pajak Reklame Kain pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024;
  3. Adapun penyebab utama kenaikan Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) senilai Rp46.184.795,00 jika dibandingkan antara piutang PPJ tahun 2024 dengan piutang PPJ tahun 2025 antara lain disebabkan oleh masih adanya wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya pada periode berjalan, adanya keterlambatan pembayaran dari pihak terkait, serta bertambahnya nilai tagihan pajak yang belum tertagih; dan
  4. Penyebab kenaikan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) apabila dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada tahun 2025, terutama yang berasal dari sektor PBB Perkotaan.

Rincian saldo Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 10* s.d. *15.*

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➢ Piutang Retribusi Jasa Umum	3.449.163.946,00	3.217.663.881,00	231.500.065,00	7,19
▪ Piutang Retribusi Pelayanan pasar	3.449.163.946,00	3.217.663.881,00	231.500.065,00	7,19
➢ Piutang Retribusi Jasa Usaha	682.612.417,00	607.515.488,00	75.096.929,00	12,36
▪ Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	682.612.417,00	607.515.488,00	75.096.929,00	12,36
Jumlah	**4.131.776.363,00**	**3.825.179.369,00**	**307.114.356,00**	**8,02**

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Retribusi Kios	3.217.663.881,00	989.767.476,00	758.267.411,00	3.449.163.946,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	143.879.470,00	297.839.900,00	283.432.400,00	158.286.970,00

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	371.226.018,00	189.638.888,00	128.949.459,00	431.915.447,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	92.410.000,00	0,00	0,00	92.410.000,00
Jumlah	**3.825.179.369,00**	**1.477.763.626,00**	**1.170.649.270,00**	**4.131.776.363,00**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

  1. Adapun penyebab utama kenaikan Piutang Retribusi Kios senilai Rp231.500.065,00 jika dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih terdapat sejumlah penyewa kios yang belum taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa bulanan, terutama pada kios tipe swadaya/kios darurat. Selain itu, banyak kios yang dibiarkan kosong tanpa adanya aktivitas perdagangan karena sebagian penyewa lebih memilih melakukan penjualan pada pasar mingguan di desa-desa. Kondisi tersebut menyebabkan petugas mengalami kendala dalam proses penagihan retribusi sewa kios di pasar induk, karena pada saat penagihan dilakukan, penyewa yang bersangkutan sering berada di luar kota. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan akumulasi Piutang Retribusi Kios pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
  2. Penyebab utama kenaikan Piutang Retribusi Sewa Tanah Pemda senilai Rp14.407.500,00 apabila dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih adanya penyewa tanah milik pemerintah daerah, khususnya dari kalangan perorangan maupun pelaku usaha, yang kerap menunda pemenuhan kewajiban pembayaran sewa tanah dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir jatuh tempo pembayaran, tagihan sewa yang belum dilunasi tercatat sebagai tambahan piutang Retribusi Sewa Tanah Pemda pada tahun berjalan, sehingga mengakibatkan peningkatan piutang pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024; dan
  3. Penyebab utama kenaikan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas senilai Rp61.206.791,00 jika dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih terdapat sejumlah penyewa rumah dinas yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa, yang mayoritas didominasi oleh penyewa berprofesi sebagai PNS. Pada saat dilakukan penagihan, sebagian penyewa menyampaikan berbagai alasan penundaan pembayaran, seperti keterbatasan kemampuan keuangan karena gaji yang telah dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga maupun alasan lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan tunggakan sewa rumah dinas bertambah dan tercatat sebagai peningkatan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian saldo Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 16 s.d. 19.*

5.3.1.1.4 Piutang Lain - Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain - Lain PAD yang Sah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	128.026.960,00	128.026.960,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga	319.870,00	319.870,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	31.340.612,53	109.858.677,53	(78.518.065,00)	(71,47)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	361.020.219,00	361.020.219,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	(2.077.465.000,00)	(33,85)
Jumlah	**4.580.669.661,53**	**6.736.652.726,53**	**(2.155.983.065,00)**	**(32,00)**

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	128.026.960,00	0,00	0,00	128.026.960,00
Piutang Pendapatan Bunga	319.870,00	0,00	0,00	319.870,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	109.858.677,53	0,00	78.518.065,00	31.340.612,53
Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	219.959,00	0,00	0,00	219.959,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	360.800.260,00	0,00	0,00	360.800.260,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00
Jumlah	**6.736.652.726,53**	**4.059.962.000,00**	**6.215.945.065,00**	**4.580.669.661,53**

- Penjelasan tambahan:

  Terdapat koreksi Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan senilai Rp78.518.065,00 yang telah disetorkan pada tahun 2024 yang terdiri dari:

  1. Pembangunan Puskesmas Prototype Ayotupas senilai Rp24.572.204,00; dan
  2. Pembangunan Puskesmas Prototype Lilana senilai Rp53.945.861,00.

Rincian saldo Piutang Lain - Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada ***Lampiran 20*** s.d. 25;

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00	2.442.609.120,00	108,01
Jumlah	**4.703.996.128,00**	**2.261.387.008,00**	**2.442.609.120,00**	**108,01**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

  1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp602.527.482,00, mengalami kenaikan dari saldo tahun 2024 dikarenakan saldo tahun 2024 senilai Rp0,00, sedangkan di tahun 2025 masih ada tunggakan pembayaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
  2. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok senilai Rp4.101.416.185,00, mengalami kenaikan dari saldo tahun 2024 dikarenakan saldo tahun 2024 senilai Rp0,00, sedangkan di tahun 2025 masih ada tunggakan pembayaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	602.527.482,00	0,00	602.527.482,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.259.838.383,00	0,00	2.259.838.383,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.548.625,00	52.461,00	1.548.625,00	52.461,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	4.101.416.185,00	0,00	4.101.416.185,00
Jumlah	**2.261.387.008,00**	**4.703.996.128,00**	**2.261.387.008,00**	**4.703.996.128,00**

Atas piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 didasarkan atas Surat Kepala Bapenda Provinsi NTT Nomor NIP.900.1.1.14.3/483/BPAD1.1 tentang Rekapan Daftar Utang/Kewajiban yang belum dibayar sampai dengan tahun anggaran 2025 dan belum kedaluwarsa dan berdasarkan keputusan gubernur NTT terkait alokasi bagi hasil pajak rokok dan data realisasi selama 2025. Rincian saldo Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.650.000,40	1.650.000,40	0,00	0,00
Jumlah	**1.650.000,40**	**1.650.000,40**	**0,00**	**0,00**

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	1.650.000,40	0,00	0,00	1.650.000,40
Jumlah	**1.650.000,40**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,40**

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
➢ **Penyisihan Piutang Pendapatan**				
✓ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.416.304.421,37)	(3.444.050.735,29)	(1.972.253.686,08)	57,27
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.703.600.700,36)	(3.807.947.944,00)	104.347.243,64	2,74
✓ Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(148.342.732,16)	(138.259.582,66)	(10.083.149,50)	7,29
➢ **Penyisihan Piutang Lainnya**				
✓ Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(1.650.000,40)	(1.650.000,40)	0,00	0,00
Jumlah	**(9.269.897.854,29)**	**(7.391.908.262,35)**	**(1.877.989.591,94)**	**25,41**

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Beban Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka – Aset Tetap	104.499.425,30	104.499.425,30	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka – Pengembalian Dana	0,00	6.344.319.470,00	(6.344.319.470,00)	(100,00)
Jumlah	**104.499.425,30**	**6.448.818.895,30**	**(6.344.319.470,00)**	**(98,38)**

- Rincian Mutasi Beban Dibayar Dimuka per Paket Pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
			Berkurang	Bertambah	
1	Mess/Wisma/ Bungalaw/ Tempat Peristirahatan Permanen	6.588.250,00	0,00	0,00	6.588.250,00
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
3	Bangunan Lab. Komputer	31.942.609,30	0,00	0,00	31.942.609,30
4	Bangunan Perpustakaan	13.182.413,00	0,00	0,00	13.182.413,00
5	Bangunan Mes Guru	21.786.153,00	0,00	0,00	21.786.153,00
6	Pengembalian Dana Hibah Kepada KPU	5.753.916.797,00	(5.753.916.797,00)	0,00	0,00
7	Pengembalian Dana Hibah kepada BAWASLU	590.402.673,00	(590.402.673,00)	0,00	0,00
	JUMLAH	**6.448.818.895,30**	**(6.344.319.470,00)**	**0,00**	**104.499.425,30**

Penjelasan:

- Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Beban Dibayar Dimuka dikarenakan Pengembalian KPU dan Bawaslu telah disetor pada Bulan April 2025 senilai Rp6.344.319.470,00; dan
- Saldo senilai Rp104.499.425,30 merupakan pembayaran yang dilakukan Pemerintah Daerah sebelum periode manfaatnya terjadi berupa Aset Tetap, yang mana manfaatnya akan diterima di masa depan.

5.3.1.1.9 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Persediaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➢ **Persediaan Barang Pakai Habis**	**60.169.859.748,63**	**50.296.234.601,33**	**(452.224.262,00)**	**(19,63)**
▪ Bahan	730.793.335,00	1.268.029.597,00	(537.236.262,00)	(42,37)
▪ Suku Cadang	161.232.000,00	76.220.000,00	85.012.000,00	111,54
▪ Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	603.515.525,00	750.070.938,00	(146.555.413,00)	(19,54)
▪ Obat – obatan	21.747.827.867,02	20.049.182.837,72	1.698.645.029,30	8,47
▪ Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	36.906.337.571,61	28.098.636.028,61	8.807.701.543,00	31,35
▪ Natura dan Pakan	20.153.450,00	54.095.200,00	(33.941.750,00)	(62,74)
➢ **Barang Bekas Dipakai**	**40.000,00**	**155.600,00**	**(115.600,00)**	**(74,29)**
▪ Komponen Bekas dan Pipa Bekas	40.000,00	155.600,00	(115.600,00)	(74,29)
Jumlah	**60.169.899.748,63**	**50.296.390.201,33**	**9.873.509.547,30**	**19,63**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Persediaan sebagai berikut:
  1. Penambahan persediaan dari pengadaan barang pakai habis, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai;
  2. Penambahan persediaan yang merupakan Hibah;
  3. Penambahan persediaan yang merupakan reklas dari Belanja Modal; dan
  4. Pengurangan persediaan yang telah habis digunakan.

Rincian Saldo Persesian dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

- Penjelasan tambahan terkait Persediaan:

  Dapat kami jelaskan bahwa selain persediaan obat senilai Rp21.747.827.867,02, terdapat obat dan Bahan Alat Kesehatan *Expired Date*/kadaluarsa/rusak pada Dinas Kesehatan dan RSUD senilai Rp111.577.349,57 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Obat *Expired* pada Dinas Kesehatan:

No	Nama Obat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Nilai
1	Dolutegrafir 10 mg	7.560	771,90	5.835.564,00
2	Lapinovir 100 mg + Ritonovir 25 mg	60	1.474,00	88.440,00
3	Magnesium sulfat Injeksi (MgSO4) 40%	223	5.661,00	1.262.403,00
4	Arkan Medical One Stop Anti HIV 1/2 (R2)	225	7.273,00	1.636.425,00
5	Fluconazole 150 mg	10	9.448,00	94.480,00
6	Piridoksina tab. 10 mg/B 6	1.800	285,00	513.000,00
7	Campak MR/Rubela/MR 10 Dosis	23	203.310,00	4.676.130,00
8	HBiG (Human)	6	1.325.000,00	7.950.000,00
9	Zidofudine Oral Solution USP 50 mg/ml	2	40.206,00	80.412,00
10	DHP Firmal	458	1.960,00	897.680,00
11	Primaqina 15mg	220	594,00	130.680,00
12	HPV NusaGard 1 dosis	3	174.387,00	523.161,00
13	Lapinovir 40 mg + Ritonovir 10 mg	480	3.075,00	1.476.000,00
	Jumlah			**25.164.375,00**

  2. Obat *Expired* pada RSUD Soe:

No	Nama Obat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Nilai
1	Feeding Tube No 14 Romolene	300	7.642,73	2.292.819,00
2	Feeding Tube No 12 Romolene	100	7.642,73	764.273,00
3	Isosorbid Dinitrate 5 mg	2500	110,00	275.000,00
4	Lyse Quintus	1	7.500.000,00	7.500.000,00
5	Sofnoline	1	900.000,00	900.000,00
6	Folley Cateter No 6	280	15.273,00	4.276.440,00
7	Folley Cateter No 8	60	15.055,00	903.300,00
8	Folley Cateter No 10	50	15.727,00	786.350,00
9	Silk Black 1 1/2 C 30 mm	48	19.284,58	925.659,84
10	Recofol N	70	85.500,00	5.985.000,00
11	Citicolin Injeksi	197	17.500,00	3.447.500,00
12	Chloroquin 150 mg	367	1.601,00	587.567,00
13	Cefadroxyl 500 mg	2092	825,00	1.725.900,00
14	Nasal Oxigen Anak	103	9.000,00	927.000,00
15	Allopurinol 100 mg	3220	218,00	701.960,00
16	Gram Color Stain	1	8.102.000,00	8.102.000,00
17	Mecobalamin 500 mg	1000	806,71	806.710,00
18	Pantoprazole 40 mg Injeksi	328	30.000,00	9.840.000,00
19	Amiodaron Injeksi 50 mg/ml	120	15.291,67	1.835.000,00
20	Mecobalamin 500 mg Injeksi	100	8.000,00	800.000,00

No	Nama Obat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Nilai
21	Dentorit / Ceivitron	1	210.300,00	210.300,00
22	Amoxicillin Dry Sirup	15	4.872,00	73.080,00
23	Atropin Sulfat Inj	205	3.333,00	683.265,00
24	Lisinopril 10 mg	752	292,00	219.584,00
25	Oseltamivir Phosphate 75 mg	726	7.000,00	5.082.000,00
26	Tablet Tambah Darah	3000	225,00	675.000,00
27	Sulfadiazin Silver 35 g	88	16.870,00	1.484.560,00
28	DHP Frimal	79	2.851,00	225.229,00
29	ETT No. 6,5 Balon Tanpa Kawat	26	25.568,00	664.768,00
30	ETT No. 5,5 Balon Tanpa Kawat	2	25.569,00	51.138,00
31	Chest Drainage FG No.24	8	113.500,00	908.000,00
32	Glimepirid 3 mg	627	813,36	509.976,72
33	Suction Catheter No. 6	160	6.000,00	960.000,00
34	Thoracidd Thocar Catheter No.24 FR	5	279.000,00	1.395.000,00
35	T- Vio 4-0 (V2) 76 cm 18 mm 1/2 c RB	43	90.900,00	3.908.700,00
36	Ca Gluconas Injeksi	1	28.612,00	28.612,00
37	Damaben Injeksi	1	9.450,00	9.450,00
38	Folimid	9	4.255,00	38.295,00
39	Chest Drainage Cath No. 20	2	40.376,00	80.752,00
40	Chest Drainage Cath No. 28	2	40.376,00	80.752,00
41	ETT No.4.0 Balon w/ Kawat	1	806,71	806,71
42	Artesunat Injeksi	10	69.898,00	698.980,00
43	ETT No. 4.0	1	178.500,00	178.500,00
44	Ezelin Insulin	2	89.799,00	179.598,00
45	Gitas Injeksi	31	38.739,00	1.200.909,00
46	Salbutamol Nebul	1	9.266,00	9.266,00
47	Assucryl 1 (TTT85)	7	93.852,00	656.964,00
48	Ezelin Insulin	2	89.799,00	179.598,00
49	Sevoflurane Anastesi Inhalasi	2	799.920,00	1.599.840,00
50	Isosorbid Dinitrat Inj	7	52.500,00	367.500,00
51	Ondancentron 4 mg	14	292,79	4.099,10
52	Simvastatin 20 mg	271	307,99	83.465,29
53	Dopamin 200 mg/5ml	24	4.189,18	100.540,32
54	Simarc 2 mg	89	1.530,00	136.170,00
55	Acyclovir SK	28	42.900,00	1.201.200,00
56	Kadifen 50 mg	167	475,00	79.325,00
57	Naloxon Inj	6	73.144,20	438.865,20
58	Primaquin 15 mg	58	375,00	21.750,00
59	Rocoronium Bromide Inj	1	34.459,46	34.459,46
60	Acarbose 50 mg	9	750,00	6.750,00
61	PPN 10%			8.563.447,93
	Jumlah			**86.412.974,57**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Permanen	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15
Jumlah	**109.306.149.258,00**	**109.142.483.339,00**	**163.665.919,00**	**0,15**

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➢ Penyertaan Modal	**109.306.149.258,00**	**109.142.483.339,00**	**163.665.919,00**	**0,15**
▪ Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15
Jumlah	**109.306.149.258,00**	**109.142.483.339,00**	**163.665.919,00**	**0,15**

▪ Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Uraian	Metode Pencatatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PDAM Kab TTS	Ekuitas	9.240.379.258,00	9.076.713.339,00	163.665.919,00	1,80
PT. Bank NTT	Biaya	100.065.770.000,00	100.065.770.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**109.306.149.258,00**	**109.142.483.339,00**	**163.665.919,00**	**0,15**

▪ Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen sebagai berikut:

1. Koreksi saldo awal atas nilai Investasi Jangka Panjang Permanen berupa lebih saji Investasi Jangka Panjang Permanen sesuai LAI PDAM Kab TTS Tahun 2025 senilai (Rp1,00);
2. Koreksi atas Pengakuan Laba yang Diumumkan oleh PDAM Kab TTS berdasarkan LAI PDAM Kab TTS Tahun 2025 senilai Rp233.681.708,00; dan
3. Koreksi nilai Investasi Jangka Panjang Permanen atas Pengakuan Pendapatan LO atas Deviden yang telah dibagikan karena merupakan deviden atas laba tahun 2024 yang nilainya sudah diakui tahun sebelumnya senilai (Rp70.015.788,00).

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	393.697.391.316,00	409.633.141.643,00	(15.935.750.327,00)	(3,89)
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	574.162.710.116,00	537.515.119.535,00	36.647.590.581,00	6,82
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.157.386.387.177,33	1.096.560.967.065,16	60.825.420.112,17	5,55
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.372.371.173.495,79	1.319.337.081.738,94	53.034.091.756,85	4,02
Aset Tetap Lainnya	37.928.194.457,00	37.321.406.644,00	606.787.813,00	1,63
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.337.392.467,17	38.720.009.935,70	(7.382.617.468,53)	(19,07)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.450.843.610.627,93)	(1.288.667.523.503,77)	(162.176.087.124,16)	12,58
Jumlah	**2.116.039.638.401,36**	**2.150.420.203.058,03**	**(34.380.564.656,67)**	**(1,60)**

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan baru menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Dampak dari penerapan Permendagri tersebut dalam penyusunan laporan keuangan ini menyebabkan terjadinya reklasifikasi antar jenis dan objek

klasifikasi Aset Tetap serta pengakuan aset ektrakompabel yang semula di bawah nilai kapitalisasi menjadi aset intrakompabel.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	393.697.391.316,00	409.633.141.643,00	(15.935.750.327,00)	(3,89)

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Saldo Awal		**409.633.141.643,00**
Mutasi Tambah:		
- Hibah Masuk di Tahun Berjalan	485.136.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**485.136.000,00**
Mutasi Kurang:		
- Hibah Keluar di Tahun Berjalan	(16.420.886.327,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(16.420.886.327,00)**
Saldo Akhir		**393.697.391.316,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Tanah:

1. Penambahan pada kelompok Aset Tetap Tanah senilai Rp485.136.000,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari hibah tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima hibah tanah dari pihak lain/masyarakat sebanyak 12 (dua belas) bidang tanah dengan nilai senilai Rp485.136.000,00 berdasarkan hasil penilaian sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor BPKAD.32.05.03/2558/2025 tanggal 30 Desember 2025. Tanah dimaksud diakui dan dicatat pada perangkat daerah sesuai peruntukannya untuk pembangunan sarana pendidikan yang terdiri atas 4 (empat) TK Negeri, 4 (empat) SD, dan 4 (empat) SMP. Pengakuan aset dilakukan berdasarkan dokumen hibah, hasil penilaian, dan verifikasi administrasi yang menunjukkan bahwa tanah dimaksud telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Tanah. Selain itu, hibah dilakukan dalam rangka mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi pemanfaatan aset sesuai peruntukannya. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai Aset Tetap Tanah dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, status penguasaan, dan kepemilikan aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
2. Mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Tanah dilakukan oleh Sekretariat Daerah karena penyerahan hibah tahun berjalan untuk pembangunan SMA Unggul Garuda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 84/KEP/HK/2025 tanggal 5 Mei 2025 seluas 200.175 m² dengan nilai senilai Rp16.420.886.327,00. Penyerahan hibah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta menunjang pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, hibah dilakukan sebagai bentuk pengalihan penguasaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung optimalisasi penggunaan tanah sesuai peruntukannya.

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu rincian nilai

kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Besar	535.670.605.615,00	537.515.119.535,00	(1.844.513.920,00)	(0,34)
Alat Angkutan	8.853.988.212,00	0,00	8.853.988.212,00	100,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	145.509.900,00	0,00	145.509.900,00	100,00
Alat Pertanian	87.284.925,00	0,00	87.284.925,00	100,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.462.470.626,00	0,00	12.462.470.626,00	100,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	869.887.250,00	0,00	869.887.250,00	100,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.834.407.727,00	0,00	1.834.407.727,00	100,00
Alat Laboratorium	1.139.170.081,00	0,00	1.139.170.081,00	100,00
Alat Persenjataan	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	100,00
Komputer	12.941.816.780,00	0,00	12.941.816.780,00	100,00
Alat Pengeboran	138.639.000,00	0,00	138.639.000,00	100,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	100,00
Jumlah	**574.162.710.116,00**	**537.515.119.535,00**	**36.647.590.581,00**	**6,82**

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**537.515.119.535,00**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	43.440.314.806,00	
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	9.949.217.327,00	
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	63.595.000,00	
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	11.980.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	932.805.052,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	598.354.620,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Koreksi Saldo Awal	15.040.882,00	
- Mutasi antar SKPD	1.776.580.340,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**56.787.888.027,00**
Mutasi Kurang:		
- Penghapusan Aset Tetap	(23.735.000,00)	
- Reklasifikasi ke Persediaan	(106.924.716,00)	
- Pengeluaran Hibah Tahun Berjalan	(2.521.834.744,00)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(12.819.349.002,00)	
- Pengakuan Ekstrakompabel	(2.472.396.890,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(100.640.910,00)	
- Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya	(308.752.800,00)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Koreksi Saldo Awal	(10.083.044,00)	
- Mutasi antar SKPD	(1.776.580.340,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(20.140.297.446,00)**
Saldo Akhir		**574.162.710.116,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28.*

Penjelasan:

1. Pada Tahun Anggaran berjalan, terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp9.208.557.327. Nilai perolehan aset tersebut berasal dari realisasi Belanja Barang dan Jasa bersumber dari Dana BOSP yang secara substansi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, dengan rincian:
   - Pengadaan untuk 131 SMP Negeri senilai Rp5.199.899.301,00;
   - Pengadaan untuk 165 SD Negeri senilai Rp2.004.113.716,00;
   - Pengadaan untuk 169 SD Inpres senilai Rp1.953.889.310,00; dan
   - Pengadaan untuk 15 TK Negeri senilai Rp50.655.000,00.

   Pengakuan aset tetap tersebut dilakukan karena pengadaan dimaksud pada saat penganggaran dibebankan pada akun Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan karakteristik, masa manfaat, nilai ekonomis, dan penggunaannya memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Berdasarkan hasil penelaahan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran berjalan, terdapat pengeluaran pada beberapa Perangkat Daerah yang pada saat penganggaran dan penatausahaan dicatat melalui akun Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan substansi transaksi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap dan dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan aset tetap. Pengeluaran tersebut dikapitalisasi karena merupakan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap proses pengadaan, pembangunan, dan perolehan aset tetap serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat layanan pada masa mendatang.

   Pengakuan Aset Tetap yang berasal dari Honorarium dimaksud meliputi:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp56.350.000,00;
   b. Dinas Kesehatan berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp13.650.000,00;
   c. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan senilai Rp7.600.000,00;
   d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp10.740.000,00;
   e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp42.960.000,00;
   f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPK senilai Rp12.720.000,00;
   g. Satuan Polisi Pamong Praja berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp3.800.000,00;
   h. Dinas Sosial berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp19.300.000,00;
   i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Honorarium Pengadaan ng/Jasa senilai Rp14.350.000,00;
   j. Dinas Ketahanan Pangan berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp2.295.000,00;
   k. Dinas Lingkungan Hidup berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai Rp2.550.000,00;
   l. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Honorarium PPK dan Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp1.830.000,00;
   m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen senilai Rp6.900.000,00;

n. Dinas Pariwisata berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan pengadaan Rp5.590.000;

o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp5.890.000,00;

p. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp3.660.000,00;

q. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp7.740.000,00;

r. Sekretariat Daerah berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen senilai Rp7.320.000,00;

s. Sekretariat DPRD berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan Tenaga Teknis senilai Rp24.960.000,00;

t. Inspektorat Daerah berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp5.440.000,00;

u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp2.580.000,00;

v. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp11.850.000,00; dan

w. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp680.000,00.

Pengeluaran dimaksud dikapitalisasi dan diakui sebagai Aset Tetap karena merupakan biaya yang melekat secara langsung pada proses pengadaan dan perolehan aset tetap, mendukung pelaksanaan pekerjaan sampai aset siap digunakan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari biaya perolehan aset sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Penyesuaian pengelompokan aset melalui kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp235.764.000,00 dilakukan atas biaya Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kapitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi dokumen yang menunjukkan bahwa biaya pengawasan dimaksud berkaitan langsung dengan proses perolehan dan penyelesaian aset, merupakan komponen biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap pembangunan aset, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari biaya perolehan aset. Selain itu, biaya dimaksud memberikan manfaat terhadap proses penyelesaian pekerjaan sampai dengan aset siap digunakan sehingga memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencerminkan seluruh biaya yang melekat pada proses pembangunan dan penyelesaian aset;

4. Pada Tahun Anggaran berjalan terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp185.854.000,00 yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa pada beberapa Perangkat Daerah, meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa belanja pemeliharaan sofa senilai Rp2.750.000,00 karena pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi dan memperpanjang masa manfaat aset, Satuan Polisi Pamong Praja berupa pengadaan Handy Talky senilai Rp6.000.000,00, Dinas Perhubungan berupa Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain senilai Rp56.610.000,00, Brake Band Tester senilai Rp14.152.500,00, dan Alat Uji Gas Buang senilai Rp14.152.500,00, Dinas Pariwisata berupa Hard Disk Eksternal senilai Rp1.500.000,00, pengadaan alat bengkel untuk SKB Wilayah II senilai Rp55.234.500,00, pengadaan 6 (enam) unit mesin jahit untuk SKB Wilayah I senilai Rp24.454.500,00, serta Belanja Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11.000.000,00. Pengeluaran tersebut diakui sebagai Aset

Tetap karena memenuhi kriteria kapitalisasi aset, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat layanan pada masa mendatang, serta berkaitan langsung dengan perolehan dan peningkatan kapasitas aset sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana kapitasi senilai Rp48.287.000,00, yang terdiri atas Puskesmas Fatumnasi senilai Rp14.717.000,00, Puskesmas Boking senilai Rp13.570.000,00, dan Puskesmas Hauhasi senilai Rp20.000.000,00. Pengeluaran tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Pada Sekretariat Daerah terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp11.980.000,00 yang berasal dari pengadaan 2 (dua) unit CCTV melalui mekanisme pengakuan utang. Pengakuan aset tetap tersebut dilakukan karena barang telah diterima, siap digunakan, dan dikuasai oleh pemerintah daerah pada Tahun Anggaran berkenaan, meskipun pembayaran kepada penyedia belum direalisasikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, transaksi dimaksud diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta dicatat sebagai kewajiban/utang sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
6. Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah tahun berjalan dari Partai Perindo senilai Rp63.595.000,00. Hibah tersebut diterima dalam bentuk aset peralatan dan mesin yang selanjutnya digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Aset dimaksud diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena telah diterima, dikuasai, dan siap digunakan oleh pemerintah daerah pada Tahun Anggaran berkenaan serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengakuan dan pencatatan aset dilakukan berdasarkan nilai wajar/nilai perolehan hibah sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah terdapat reklasifikasi antar golongan Aset Tetap masing-masing senilai Rp290.327.339,00 dan Rp426.938.813,00 atas pekerjaan pembangunan gedung yang dilengkapi dengan komponen meubelair. Reklasifikasi dilakukan karena pada saat penganggaran dan pencatatan awal, nilai perolehan aset dicatat dalam kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehingga belum mencerminkan klasifikasi aset sesuai jenis dan karakteristiknya. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pengelompokan antara Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin agar penyajian aset tetap sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Pada Tahun Anggaran berjalan, terdapat mutasi masuk Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Lainnya (ATL) senilai Rp215.538.900,00 dengan rincian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp99.872.400,00, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp6.670.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp95.000.000,00, Kecamatan Amanuban Selatan senilai Rp10.500.000,00, dan Kecamatan Noebana senilai Rp3.496.500,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan atas karakteristik, penggunaan, dan masa manfaat aset, dimana aset yang sebelumnya dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena digunakan dalam operasional pemerintahan serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Pada Tahun Anggaran berjalan, Rumah Sakit Umum Daerah melakukan mutasi masuk pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp598.354.620,00 yang berasal dari reklasifikasi aset dari kelompok Aset Lain-Lain. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil

inventarisasi, penelitian administrasi, dan verifikasi fisik aset yang dimiliki RSUD. Aset dimaksud sebelumnya dicatat sebagai Aset Lain-Lain karena belum dilakukan pengelompokan secara memadai pada saat pengakuan awal. Berdasarkan hasil pencocokan dokumen sumber, Kartu Inventaris Barang (KIB), dan pemeriksaan fisik aset, diketahui bahwa aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar kelompok aset dalam neraca;

10. Terjadi mutasi masuk pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp15.040.882,00, dimana senilai Rp55.882,00 berasal dari koreksi saldo awal atas kekurangan pembayaran nilai kontrak pada paket pekerjaan pengadaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Koreksi tersebut dilakukan karena nilai aset sebelumnya telah dicatat berdasarkan nilai kontrak, sedangkan realisasi pembayaran pada tahun sebelumnya masih lebih rendah dari nilai kontrak yang seharusnya dibayarkan, sehingga setelah dilakukan penyelesaian administrasi dan pembayaran atas kekurangan dimaksud dilakukan penyesuaian pencatatan aset. Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koreksi saldo awal pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp14.985.000,00 atas pengadaan printer dan laptop yang realisasi belanja modalnya telah terjadi pada Tahun 2024 namun belum tercatat sebagai aset tetap pada tahun sebelumnya. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian dokumen sumber atas belanja modal yang belum diakui dalam pencatatan aset tetap. Penyesuaian tersebut dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
11. Terjadi mutasi masuk antar SKPD senilai Rp1.776.580.340,00 pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp168.780.340,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BPBD 04/22/I/2025 dan Nomor: BPBD 04/30/II/2025 berupa 114 buah Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Selain itu, Sekretariat Daerah menerima mutasi masuk dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.607.800.000,00 berupa 2 unit kendaraan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagai pengalihan penggunaan aset antar perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mutasi antar SKPD tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah secara keseluruhan karena hanya merupakan perpindahan pencatatan aset antar perangkat daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyajian aset tetap yang sesuai dengan kondisi penguasaan aset pada masing-masing perangkat daerah;
12. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdapat penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 2 unit sepeda motor senilai Rp23.735.000,00. Penghapusan tersebut dilakukan melalui mekanisme lelang atas kendaraan yang sudah tidak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional perangkat daerah. Pelaksanaan penghapusan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan kondisi fisik aset serta didukung dokumen administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan untuk menyajikan nilai aset tetap sesuai kondisi yang sebenarnya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penghapusan tersebut mengakibatkan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp23.735.000,00;

13. Terjadi reklasifikasi keluar dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan senilai Rp106.924.716,00, yang terdiri atas senilai Rp4.500.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung kegiatan *offroad* dan senilai Rp102.424.716,00 pada Dinas Kesehatan berupa bahan dan perlengkapan pendukung kegiatan perbaikan plafon puskesmas, pekerjaan struktur tembok, dan pembuatan pagar selasar yang bersumber dari Dana Kapitasi. Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian atas jenis, karakteristik, serta penggunaan barang yang diketahui tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dan persediaan dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan kondisi penggunaan barang yang sebenarnya. Proses reklasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar akun dalam neraca;
14. Terjadi mutasi keluar hibah tahun berjalan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.521.834.744,00 kepada sekolah swasta, yang terdiri atas hibah kepada 5 SMP Swasta senilai Rp908.535.380,00, 3 SD Swasta senilai Rp839.826.000,00, 10 TK Swasta senilai Rp366.830.256,00, Barang Milik Daerah berupa Alat Permainan Edukatif (APE) kepada 15 PAUD Swasta senilai Rp372.021.500,00, serta hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada 8 Sekolah Swasta senilai Rp34.621.608,00. Hibah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan swasta di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan hibah telah didukung dengan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan untuk menyajikan nilai aset tetap sesuai kondisi penguasaan dan kepemilikan aset yang sebenarnya. Mutasi keluar hibah tersebut mengakibatkan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp2.521.834.744,00;
15. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penyesuaian klasifikasi aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Gedung dan Bangunan senilai Rp2.197.786.661,00 atas aset berupa gapura, taman, pagar, kantor, rumah, dan pos jaga pada 2 OPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Perukiman. Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik serta fungsi aset lebih sesuai diakui dalam kelompok Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan untuk menyesuaikan penyajian aset tetap sesuai kaidah pengakuan dan pengelompokan aset dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pelaksanaan penyesuaian klasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi dan hasil pemeriksaan fisik aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi nilai total aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
16. Pada beberapa perangkat daerah dilakukan penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp9.870.648.601,00. Penyesuaian dimaksud dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penyesuaian klasifikasi senilai Rp104.726.500,00 pada 8 SD Inpres, 8 SD Negeri, dan 7 SMP Negeri yang bersumber dari Dana BOS/BOP. Selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan penyesuaian klasifikasi senilai Rp7.370.507.901,00 atas aset berupa saluran drainase, tembok penahan, jalan, bak dan jaringan air, Penerangan Jalan Umum (PJU), IPLT, serta instalasi listrik dan lampu. Pada Dinas Kesehatan dilakukan penyesuaian klasifikasi

senilai Rp2.063.200.000,00 atas pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pemasangan meteran listrik pada beberapa puskesmas. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyesuaian klasifikasi senilai Rp276.584.200,00 berupa aset jaringan kabel LAN dan kabel UTP, Dinas Perhubungan senilai Rp10.000.000,00 berupa baterai warning light, serta Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp45.630.000,00 berupa jaringan internet. Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik, fungsi, dan pemanfaatan aset lebih tepat disajikan pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan koreksi pengelompokan aset tetap melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Tetap Lainnya senilai Rp617.331.900,00 atas aset berupa buku yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi data aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud lebih sesuai diakui sebagai Aset Tetap Lainnya sesuai karakteristik dan masa manfaatnya. Penyesuaian pengakuan aset dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan reklasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi dan hasil inventarisasi aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi dimaksud tidak mengubah total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
18. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp133.581.840,00 berupa belanja mebeler pada 9 Taman Kanak-Kanak (TK). Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa pekerjaan pengadaan mebeler dimaksud belum didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) sehingga belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Reklasifikasi dilakukan agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Proses penyesuaian klasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi dan hasil pemeriksaan fisik sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
19. Terjadi penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke aset ekstrakomptabel senilai Rp2.472.396.890,00 pada beberapa perangkat daerah karena nilai perolehan barang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.235.137.899,00, Sekretariat DPRD senilai Rp34.319.000,00, Kecamatan Amanuban Tengah senilai Rp7.915.000,00, Inspektorat Daerah senilai Rp20.112.508,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp19.185.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp16.588.700,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp6.000.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp29.021.400,00, Dinas Kesehatan senilai Rp89.117.383,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.500.000,00, dan Kecamatan Fautmolo senilai Rp7.500.000,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa nilai perolehan barang lebih tepat dicatat sebagai barang ekstrakomptabel. Reklasifikasi dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan penyajian aset sesuai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut tidak

mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perubahan pencatatan administratif aset;

20. Terjadi penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Lainnya senilai Rp100.640.910,00 pada beberapa perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Perikanan senilai Rp19.000.000,00, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp66.640.910,00, dan Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.000.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan fisik aset yang menunjukkan bahwa kondisi barang mengalami rusak berat sehingga tidak lagi digunakan dalam menunjang operasional perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
21. Terjadi koreksi kewajiban atas belanja modal pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun berjalan senilai Rp308.752.800,00 pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp148.957.200,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp159.795.600,00. Pengadaan barang dimaksud telah didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Tahun 2024 sehingga aset telah diakui dalam pencatatan aset tetap pada tahun sebelumnya, namun realisasi pembayaran baru dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan penyelesaian kewajiban pembayaran atas utang belanja modal dimaksud. Koreksi tersebut dilakukan agar penyajian aset dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
22. Terjadi koreksi saldo awal pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp10.083.044,00 pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.044,00 atas penyesuaian pencatatan pengadaan mebeler dan IFPD akibat adanya selisih pencatatan nilai aset pada periode sebelumnya, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp10.080.000,00 atas koreksi pencatatan Alat Hiasan/Cendera Mata Cincin sebanyak 1 buah yang sebelumnya belum tercatat secara tepat dalam daftar aset tetap. Koreksi saldo awal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, penelitian dokumen sumber, dan verifikasi data aset. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan data aset yang sebenarnya. Koreksi dimaksud merupakan penyesuaian administratif atas pencatatan aset pada periode sebelumnya;
23. Terjadi mutasi keluar antar SKPD pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.776.580.340,00 pada beberapa perangkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan mutasi keluar kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp168.780.340,00 berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BPBD 04/30/II/2025 dan Nomor: BPBD 04/22/I/2025. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan mutasi keluar kepada Sekretariat Daerah senilai Rp1.607.800.000,00 berupa kendaraan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mutasi antar SKPD tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penyesuaian penggunaan dan penguasaan aset untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah penerima. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian aset tetap pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kondisi penguasaan aset yang sebenarnya;
24. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 137 Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menerima bantuan Sarana Digitalisasi berupa Papan Digital untuk

mendukung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3458/C4/DM.00.03/2025 tanggal 10 Juli 2025. Belanja Barang sebagaimana dimaksud belum diakui dan dicatat sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun Anggaran 2025. Belum dilakukannya pengakuan aset tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta dokumen pendukung lainnya yang memuat rincian jumlah unit dan nilai perolehan aset sebagai dasar pengakuan dan pencatatan aset pada Neraca Pemerintah Daerah. Selain itu, proses verifikasi dan klaim kepemilikan aset belum dapat dilakukan karena dokumen penyerahan dimaksud masih dalam proses penyelesaian administrasi. Oleh karena itu, aset Sarana Digitalisasi berupa Papan Digital tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi untuk dilakukan pengakuan dan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah pada Tahun Anggaran 2025; dan

25. Terdapat aset yang dikuasai namun belum dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan karena dokumen pendukung penyerahan belum terpenuhi. Aset dimaksud terdiri atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk kegiatan peningkatan minat baca anak berupa bantuan Satker Taman Baca Masyarakat (TBM) Keliling Tahun 2007, yang sampai dengan saat ini belum dicatat sebagai Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan karena belum tersedia dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Selain itu, terdapat hibah Pemerintah Pusat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa 14 unit alat dan mesin pertanian (traktor), dengan kondisi 5 unit masih beroperasi, 2 unit rusak ringan, dan 7 unit rusak berat, yang juga belum dilakukan pencatatan karena dokumen hibah dan dokumen pendukung penyerahan aset belum terpenuhi. Atas kondisi tersebut, aset dimaksud belum diakui sebagai Barang Milik Daerah dan akan dilakukan pencatatan setelah kelengkapan dokumen penyerahan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah terpenuhi.

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	1.156.696.066.817,33	1.096.560.967.065,16	60.135.099.752,17	5,48
Tugu Titik Kontrol/Pasti	690.320.360,00	0,00	690.320.360,00	100
Jumlah	1.157.386.387.177,33	1.096.560.967.065,16	60.825.420.112,17	5,57

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**1.096.560.967.065,16**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	61.389.821.259,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	7.570.567.779,00
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	390.967.757,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalanan	225.000.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	12.171.112.984,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Koreksi Saldo Awal	126.285.400,00

Uraian	Nilai	
- Mutasi antar SKPD	354.736.394,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**82.228.491.573,00**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(19.948.550.660,00)	
- Pengakuan Ekstrakompabel	(111.357.645,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain/TGR	(300.021.897,83)	
- Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya	(688.404.864,00)	
- Mutasi antar SKPD	(354.736.394,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(21.403.071.460,83)**
Saldo Akhir		**1.157.386.387.177,33**

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28.*

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Terjadi kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp7.570.567.779,00 pada beberapa Perangkat Daerah atas biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap proses perencanaan, pengawasan, pengadaan, dan pelaksanaan pembangunan aset tetap sampai dengan aset siap digunakan. Kapitalisasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.870.330.889,00 yang berasal dari biaya perencanaan, pengawasan, dan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan pembangunan ruang kelas, ruang UKS, ruang kepala sekolah, toilet/jamban, area bermain, dan pagar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp103.922.626,00, Dinas Kesehatan senilai Rp1.147.901.355,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.532.846.513,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp339.151.661,00, Dinas Perhubungan senilai Rp119.188.645,00, Dinas Perikanan senilai Rp49.773.210,00, Sekretariat DPRD senilai Rp329.191.880,00, Kecamatan Kota SoE senilai Rp2.100.000,00, Kecamatan Amanuban Tengah senilai Rp2.920.000,00, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp73.241.000,00 yang berasal dari biaya perencanaan, pengawasan, honorarium pengadaan, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan pembangunan aset tetap. Kapitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran dimaksud merupakan komponen biaya perolehan aset, berkaitan langsung dengan proses pembangunan, serta memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencerminkan seluruh biaya yang melekat secara langsung sampai dengan aset siap digunakan;
2. Terjadi pengakuan kewajiban atas perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp390.967.757,00 pada beberapa perangkat daerah. Pengakuan kewajiban tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp246.233.550,00 berupa biaya pengawasan dan pembangunan ruang kelas, Dinas Kesehatan senilai Rp128.507.951,00 berupa biaya pengawasan dan pembangunan puskesmas, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp16.226.256,00 berupa retensi 5% atas pekerjaan rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Fatukopa. Pengakuan kewajiban tersebut dilakukan karena pekerjaan telah selesai dan aset telah diakui dalam laporan keuangan, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud belum dilaksanakan sampai dengan akhir periode pelaporan. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, dan hasil verifikasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis

akrual. Pengakuan kewajiban tersebut mencerminkan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;

3. Penerimaan hibah tahun berjalan pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp225.000.000,00 berupa *Container Office* diterima oleh Dinas Kesehatan dari pihak ketiga untuk mendukung peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah. Pengakuan aset hibah dilakukan berdasarkan dokumen serah terima hibah dan hasil verifikasi fisik aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status penguasaan aset yang sebenarnya. Penerimaan hibah tersebut menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp225.000.000,00;
4. Penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp2.197.786.661,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp42.072.000,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.155.714.661,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa pengadaan dan pekerjaan dimaksud sebelumnya dianggarkan serta dicatat pada akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, namun berdasarkan karakteristik, bentuk fisik, dan fungsi aset lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
5. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp9.973.326.323,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.576.889.076,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp3.396.437.247,00. Reklasifikasi antar golongan aset dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan aset telah selesai dilaksanakan, telah dimanfaatkan untuk mendukung operasional perangkat daerah, dan telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
6. Koreksi saldo awal menjadi kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp126.285.400,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp117.422.900,00 atas pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Ayotupas dan Dinas Kesehatan senilai Rp8.862.500,00 atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Batuputih (Pokir) Tahun Anggaran 2024. Koreksi saldo awal dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelitian data aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud belum dilakukan pengakuan atau belum tercatat secara memadai pada periode sebelumnya. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan data aset yang sebenarnya. Koreksi saldo awal tersebut menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp126.285.400,00;

7. Mutasi masuk antar SKPD pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp354.736.394,00 diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pembangunan lapangan. Mutasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pengalihan penggunaan dan penguasaan aset antar perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah penerima. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan hasil verifikasi aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Mutasi antar SKPD tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan aset antar perangkat daerah dalam neraca;
8. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp717.266.152,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Kesehatan senilai Rp290.327.339,00 berupa pengadaan meubelair untuk puskesmas yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Gedung dan Bangunan, namun berdasarkan karakteristik dan fungsi aset lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin, serta Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp426.938.813,00 berupa komputer, printer, UPS, sofa, kompor gas, dan perlengkapan penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang sebelumnya tercatat pada kelompok Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik dan penggunaan aset lebih sesuai diakui pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
9. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.867.418.030,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pembangunan fisik toilet/jamban. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik dan fungsi aset lebih sesuai disajikan pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai sarana sanitasi dan utilitas pendukung bangunan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Gedung dan Bangunan, namun berdasarkan substansi dan pengelompokan aset lebih tepat diakui pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan klasifikasi aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
10. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp17.363.866.478,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp15.994.328.119,00 atas pembangunan pagar, ruang kelas, area bermain, ruang kepala sekolah, ruang UKS, serta pembayaran dana luncuran pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas Tahun 2023 dan 2024, Dinas Kesehatan senilai Rp655.335.600,00 berupa pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tublopo, Dinas Perhubungan senilai Rp283.272.336,00 berupa pembangunan parkir depan Pasar Inpres SoE, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp141.214.673,00 berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Green House), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp147.615.750,00 berupa Belanja Modal

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Poskeswan Oinlasi, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp142.100.000,00 berupa pembangunan Gedung PAUD Karang Siri. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan aset dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dan kondisi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;

11. Penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke aset ekstrakomptabel senilai Rp111.357.645,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp42.072.000,00 dan Dinas Perhubungan senilai Rp69.285.645,00 berupa rambu-rambu jalan sebanyak 33 buah. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa nilai perolehan aset tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian dan pengelompokan aset dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan administratif aset;
12. Terdapat koreksi pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp300.021.897,83 berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2025, yang terdiri atas koreksi akibat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp224.569.897,83 dan koreksi atas kelebihan pembayaran jasa konsultansi pengawasan senilai Rp75.452.000,00. Koreksi kekurangan volume pekerjaan berasal dari Dinas Kesehatan senilai Rp162.389.819,63, RSUD SoE senilai Rp36.272.962,34, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp20.234.867,12, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp5.672.248,74. Pengurangan nilai aset dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pekerjaan konstruksi yang realisasi volumenya tidak sepenuhnya sesuai dengan pekerjaan yang diperjanjikan, sehingga sebagian nilai pekerjaan yang sebelumnya dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak mencerminkan kondisi fisik dan realisasi pekerjaan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi pada Dinas Kesehatan senilai Rp75.452.000,00 atas kelebihan pembayaran jasa konsultansi pengawasan pada paket pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) yang sebelumnya dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset. Atas kondisi tersebut dilakukan penyesuaian berupa pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena nilai dimaksud tidak memenuhi seluruh unsur biaya perolehan aset yang dapat diakui, sehingga penyajian nilai aset mencerminkan kondisi dan nilai perolehan yang sebenarnya;
13. Koreksi kewajiban atas belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp688.404.864,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp660.980.039,00 berupa pembayaran dana luncuran pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas Tahun 2023 dan 2024, serta Dinas Kesehatan senilai Rp27.424.825,00 atas pembangunan pagar Tahun 2024. Koreksi kewajiban dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan aset telah diakui pada periode sebelumnya, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud baru dilaksanakan pada tahun berjalan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar pengakuan aset dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual. Koreksi tersebut mencerminkan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;

14. Mutasi keluar antar SKPD pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp354.736.394,00 dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pembangunan lapangan. Mutasi antar SKPD tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pengalihan penggunaan dan penguasaan aset kepada perangkat daerah lain yang memanfaatkan dan mengelola aset dimaksud dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah penerima. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan hasil verifikasi aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Mutasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan aset antar perangkat daerah dalam neraca; dan
15. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memperoleh alokasi Dana Revitalisasi Pembangunan Gedung Sekolah yang tersebar pada beberapa satuan pendidikan. Berdasarkan hasil inventarisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, revitalisasi dimaksud terdiri atas 2 (dua) TK Negeri dengan total nilai perolehan senilai Rp755.733.000,00, 42 (empat puluh dua) Sekolah Dasar dengan total nilai perolehan senilai Rp17.693.641.767,00, dan 8 (delapan) Sekolah Menengah Pertama dengan total nilai perolehan senilai Rp9.682.000.000,00. Proses pengakuan dan pencatatan atas Gedung dan Bangunan dimaksud sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 karena progres fisik pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 belum mencapai 100% dan belum dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO), sehingga masih terdapat sisa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penyedia/pelaksana pekerjaan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga belum menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Pusat sebagai dasar pengalihan kepemilikan dan pengakuan aset. Dengan belum terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis tersebut, bangunan hasil revitalisasi dimaksud belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	1.360.664.129.830,83	1.319.337.081.738,94	41.327.048.091,89	3,13
Bangunan Air	1.044.874.324,96	0,00	1.044.874.324,96	100
Instalasi	8.422.079.048,00	0,00	8.422.079.048,00	100
Jaringan	2.240.090.292,00	0,00	2.240.090.292,00	100
Jumlah	**1.372.371.173.495,79**	**1.319.337.081.738,94**	**53.034.091.756,85**	**4,02**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**1.319.337.081.738,94**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	20.888.189.763,00	
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	1.652.392.900,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	32.760.885.098,00	

Uraian	Nilai	
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	1.208.641.304,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Koreksi Saldo Awal	4.078.940.714,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**60.589.049.779,00**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(5.062.318.474,00)	
- Pengeluaran Hibah Tahun Berjalan	(109.218.000,00)	
- Pengakuan Ekstrakompabel	(848.823.790,00)	
- Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya	(1.307.221.930,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain/TGR	(227.375.828,15)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(7.554.958.022,15)**
Saldo Akhir		**1.372.371.173.495,79**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 28***.

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1. Sesuai Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 423/KEP/HK/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 83 ruas jalan sepanjang 1.256,15 km;

   Sesuai Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 204/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Desa Strategis di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 46 ruas jalan sepanjang 337,79 km;
2. Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.652.392.900,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah atas biaya yang berkaitan langsung dan mendukung proses pembangunan serta pengadaan aset tetap hingga aset siap digunakan. Kapitalisasi tersebut terdiri atas Dinas Kesehatan senilai Rp20.500.000,00 berupa honorarium tenaga teknis, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp20.000.000,00 berupa biaya pengawasan pekerjaan daya listrik berdasarkan No. PPK.RSUD/25/Wastek-Daya Listrik/XI/2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.461.592.900,00 berupa biaya perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan, honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak/Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pada Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp10.200.000,00 berupa honorarium PPK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp19.800.000,00 berupa honorarium pengadaan barang/jasa, Dinas Perhubungan senilai Rp99.900.000,00 berupa *traffic light* dan rambu-rambu lalu lintas, serta Kecamatan Kota SoE senilai Rp20.400.000,00 berupa honorarium pengadaan barang/jasa. Kapitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa biaya dimaksud memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan aset tetap mencerminkan seluruh biaya yang melekat secara langsung sampai aset siap digunakan;
3. Pengakuan kewajiban atas perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.208.641.304,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Pengakuan kewajiban tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.029.467.647,00 atas paket

pekerjaan jalan, jembatan, pemeliharaan/rehabilitasi, dan normalisasi sungai, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp179.173.657,00 atas biaya perencanaan, pengawasan, dan pembangunan drainase. Pengakuan kewajiban tersebut dilakukan karena pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan hasil pekerjaan telah diterima, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud belum dilaksanakan 100% sampai dengan akhir periode pelaporan sehingga masih tercatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, dan hasil verifikasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pengakuan kewajiban tersebut mencerminkan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;

4. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp9.870.648.601,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp104.726.500,00, Dinas Kesehatan senilai Rp2.063.200.000,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.370.507.901,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp276.584.200,00, Dinas Perhubungan senilai Rp10.000.000,00, dan Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp45.630.000,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan karakteristik, bentuk fisik, fungsi, serta penggunaan aset lebih tepat diakui pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
5. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.867.418.030,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sebelumnya dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan karakteristik, bentuk fisik, fungsi, dan pemanfaatannya lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset dimaksud berupa pembangunan fisik toilet/jamban yang merupakan bangunan penunjang sarana dan prasarana pendidikan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
6. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp21.022.818.467,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp20.536.618.467,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp486.200.000,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian serta belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan lebih tepat disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan

dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan progres penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;

7. Koreksi saldo awal pada kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp4.078.940.714,00 dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Koreksi saldo awal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelitian data aset yang menunjukkan adanya aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari hibah Tahun 2024 namun belum dilakukan pencatatan dan pengakuan aset pada periode sebelumnya. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan data aset yang sebenarnya. Koreksi saldo awal dilakukan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Koreksi saldo awal tersebut menambah nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp4.078.940.714,00;
8. Koreksi kewajiban atas perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.307.221.930,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.268.913.930,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp38.308.000,00. Koreksi kewajiban dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan aset telah diakui pada periode sebelumnya, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud baru dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga dilakukan penyesuaian kewajiban. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar pengakuan aset dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Koreksi tersebut mencerminkan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;
9. Mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp109.218.000,00 dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan karena penyerahan hibah tahun berjalan. Penyerahan hibah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan aset untuk menunjang kegiatan dan pelayanan sesuai peruntukannya, sekaligus sebagai pengalihan penguasaan dan pemanfaatan aset kepada pihak penerima hibah dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan. Pengurangan nilai aset dilakukan berdasarkan dokumen serah terima hibah dan hasil verifikasi administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status penguasaan aset yang sebenarnya. Mutasi keluar tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp109.218.000,00;
10. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp5.062.318.474,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.867.418.030,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.570.624.647,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp432.175.797,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp192.100.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan tingkat penyelesaian

pekerjaan lebih tepat disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan progres penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;

11. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke aset ekstrakomptabel senilai Rp848.823.790,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp90.658.500,00, Dinas Kesehatan senilai Rp32.200.000,00, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp725.965.290,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa nilai perolehan aset tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sehingga lebih tepat dicatat sebagai aset ekstrakomptabel. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian dan pengelompokan aset dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan administratif aset; dan
12. Terdapat koreksi pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp227.375.828,15 yang disebabkan oleh temuan kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp14.694.577,04 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp212.681.251,11. Koreksi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang sebelumnya dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan realisasi fisik pekerjaan yang sebenarnya, sehingga nilai aset tercatat lebih tinggi dari kondisi fisik aset yang tersedia. Atas kondisi tersebut dilakukan penyesuaian berupa pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar nilai temuan kekurangan volume agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan nilai perolehan yang andal dan sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	37.928.194.457,00	37.321.406.644,00	606.787.813,00	1,63
Jumlah	**37.928.194.457,00**	**37.321.406.644,00**	**606.787.813,00**	**1,63**

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**37.321.406.644,00**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	315.588.900,00	
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	6.352.800.553,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	617.331.900,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**7.285.721.353,00**
Mutasi Kurang:		
- Pengeluaran Hibah Tahun Berjalan	(50.755.000,00)	

Uraian	Nilai	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(215.538.900,00)	
- Pengakuan Ekstrakompatabel	(3.688.566.740,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(2.724.072.900,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(6.678.933.540,00)**
Saldo Akhir		**37.928.194.457,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Lainnya:

1. Pada Tahun Anggaran berjalan, terdapat pengakuan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.352.800.553,00 yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa berupa pengadaan buku-buku bersumber dari dana BOS/BOP. Pengakuan aset tersebut dilakukan karena pada saat penganggaran dan penatausahaan, pengadaan dimaksud dibebankan pada akun Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan atas karakteristik aset, penggunaan, serta masa manfaatnya, pengadaan buku-buku tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Lainnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan klasifikasi aset yang sebenarnya;
2. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp617.331.900,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi data aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud lebih sesuai diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan karakteristik, fungsi, serta pemanfaatannya dalam mendukung kegiatan operasional. Reklasifikasi dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyajian dan pengelompokan aset tetap dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
3. Mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Lainnya senilai Rp50.755.000,00 dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penyerahan hibah tahun berjalan berupa buku-buku. Penyerahan hibah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan sarana pendidikan, menunjang proses pembelajaran, serta optimalisasi pemanfaatan aset sesuai peruntukannya kepada pihak penerima hibah. Pengurangan nilai aset dilakukan berdasarkan dokumen serah terima hibah dan hasil verifikasi administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status penguasaan aset yang sebenarnya. Mutasi keluar tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Lainnya pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp50.755.000,00;
4. Penyesuaian pengelompokan aset tetap melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp215.538.900,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp99.872.400,00, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp6.670.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp95.000.000,00, Kecamatan Amanuban Selatan senilai Rp10.500.000,00, dan Kecamatan Noebana senilai Rp3.496.500,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan adanya ketidaktepatan pengelompokan aset pada pencatatan sebelumnya, dimana aset dimaksud memiliki karakteristik, bentuk fisik, fungsi, masa manfaat, serta penggunaan yang lebih sesuai diakui pada kelompok Aset Tetap Peralatan

dan Mesin untuk mendukung operasional perangkat daerah. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;

5. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke aset ekstrakomptabel senilai Rp3.688.566.740,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.633.774.840,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp54.791.900,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sehingga lebih tepat dicatat sebagai aset ekstrakomptabel. Khusus pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, penyesuaian dilakukan karena koleksi perpustakaan dan aset sejenis memiliki nilai satuan relatif kecil namun jumlahnya banyak sehingga pengelolaannya lebih tepat dilakukan melalui pencatatan administratif sebagai aset ekstrakomptabel. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan administratif aset; dan
6. Penyesuaian pengelompokan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp2.724.072.900,00 yang terdiri atas buku, peta, aset renovasi, perencanaan fisik, pertamanan, dan aset sejenis lainnya. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Lainnya, baik karena perubahan kondisi, penggunaan, maupun karakteristik aset. Selain itu, sebagian aset merupakan aset renovasi dan hasil perencanaan fisik yang secara substansi lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain, termasuk aset yang tidak lagi digunakan dalam operasional, masih dalam proses penataan administrasi, serta aset yang menunggu tindak lanjut pengelolaan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyesuaian tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar kelompok aset dalam neraca.

5.3.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	8.519.062.144,95	37.161.588.904,95	(28.642.526.760,00)	(77,08)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	680.185.550,00	0,00	680.185.550,00	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	17.727.433.697,47	0,00	17.727.433.697,47	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.410.711.074,75	1.558.421.030,75	2.852.290.044,00	183,02
Jumlah	**31.337.392.467,17**	**38.720.009.935,70**	**(7.382.617.468,53)**	**(19,07)**

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**38.720.009.935,70**
Mutasi Tambah:		
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	293.032.910,00	
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	782.659.690,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	22.559.766.792,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**23.635.459.392,00**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(30.996.144.790,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain/TGR	(21.932.070,53)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(31.018.076.860,53)**
Saldo Akhir		**31.337.392.467,17**

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait KDP:

1. Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp293.032.910,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah atas biaya yang berkaitan langsung dan mendukung pelaksanaan pembangunan aset sampai dengan aset siap digunakan. Kapitalisasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp107.943.060,00, Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.959.266,00, Dinas Perhubungan senilai Rp63.899.900,00, Dinas Pariwisata senilai Rp24.923.940,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp38.329.600,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp49.977.144,00. Kapitalisasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa biaya dimaksud merupakan bagian dari biaya perolehan aset, timbul selama proses pelaksanaan konstruksi, serta dapat diatribusikan secara langsung terhadap pembangunan aset yang masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan. Selain itu, biaya tersebut memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat layanan yang melekat pada aset sehingga memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencerminkan seluruh biaya yang melekat sampai dengan tanggal pelaporan;
2. Pengakuan kewajiban atas Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp782.659.690,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Pengakuan kewajiban tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp438.660.650,00, Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp143.783.956,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp143.589.600,00, Dinas Perikanan senilai Rp28.382.550,00, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp28.242.934,00. Pengakuan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan konstruksi masih dalam proses penyelesaian, namun progres fisik pekerjaan telah tercapai dan nilai pekerjaan telah dapat diukur secara andal sesuai dokumen kontrak serta hasil pemeriksaan pekerjaan. Selain itu, pengakuan dilakukan karena sebagian pekerjaan telah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan, sementara realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud belum dilaksanakan sehingga timbul kewajiban kepada pihak ketiga. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dan kewajiban

dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, progres penyelesaian pekerjaan, dan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;

3. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp133.581.840,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pengadaan spon, ranjang, kursi kerja, peralatan stainless, lemari penyimpanan, meja, dan rak. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pengadaan dimaksud masih merupakan bagian dari pekerjaan yang belum selesai dan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan. Selain itu, aset dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan penataan sebagai bagian dari penyediaan sarana pendukung bangunan/fasilitas pendidikan sehingga belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan progres penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
4. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp17.363.866.478,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp15.994.328.119,00, Dinas Kesehatan senilai Rp655.335.600,00, Dinas Perhubungan senilai Rp283.272.336,00, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp141.214.673,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp147.615.750,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp142.100.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan, namun berdasarkan progres penyelesaian pekerjaan lebih tepat disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, sebagian pekerjaan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan, masih memerlukan penyelesaian fisik dan pekerjaan pendukung, serta belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memenuhi kriteria aset siap pakai. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
5. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp5.062.318.474,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.867.418.030,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.570.624.647,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp432.175.797,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp192.100.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan progres penyelesaian pekerjaan lebih tepat

disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, sebagian pekerjaan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan, masih memerlukan penyelesaian fisik dan pekerjaan pendukung, serta belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memenuhi kriteria aset siap pakai. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;

6. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp9.973.326.323,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.576.889.076,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp3.396.437.247,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud telah selesai dilaksanakan, telah memenuhi spesifikasi pekerjaan, serta telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Selain itu, hasil pekerjaan telah dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pelayanan perangkat daerah serta telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya masih disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, namun berdasarkan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan lebih tepat diakui pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
7. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp21.022.818.467,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp20.536.618.467,00 atas pekerjaan rekonstruksi ruas jalan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp486.200.000,00 atas Perencanaan Bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dimaksud telah mencapai penyelesaian fisik sesuai kontrak, berfungsi sesuai peruntukannya, dan telah memberikan manfaat layanan dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur daerah. Selain itu, aset dimaksud tidak lagi memenuhi karakteristik sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan karena status pekerjaan telah berubah menjadi aset operasional yang siap dimanfaatkan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan substansi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca; dan
8. Terdapat koreksi pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp21.932.070,53 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pekerjaan pembangunan ruang kelas baru yang disebabkan oleh temuan kekurangan volume berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2025. Koreksi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang sebelumnya dikapitalisasi ke dalam nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan realisasi fisik pekerjaan yang sebenarnya, sehingga nilai KDP tercatat lebih

tinggi dari kondisi fisik pekerjaan yang tersedia. Atas kondisi tersebut dilakukan penyesuaian berupa pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar nilai temuan kekurangan volume agar nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi fisik pekerjaan dan nilai perolehan yang sebenarnya.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(457.780.162.687,18)	(414.735.897.669,82)	(43.044.265.017,36)	10,38
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(243.868.195.982,66)	(221.840.407.310,10)	(22.027.788.672,56)	9,93
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(749.195.251.958,09)	(652.091.218.523,85)	(97.104.033.434,24)	14,89
Jumlah	**(1.450.843.610.627,93)**	**(1.288.667.523.503,77)**	**(162.176.087.124,16)**	**12,58**

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**(1.288.667.523.503,77)**
Mutasi Tambah:		
- Penyusutan Tahun 2025	(160.232.202.407,98)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Kurang Catat	(2.585.405.379,46)	
Jumlah Mutasi Tambah		**(162.817.607.787,44)**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	66.640.910,00	
- Penghapusan Aset Tetap	54.933.807,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Lebih Catat	519.945.946,28	
Jumlah Mutasi Kurang		**641.520.663,28**
Saldo Akhir		**(1.450.843.610.627,93)**

Penjelasan:

1. Mutasi bertambah Akumulasi Penyusutan dari Penyusutan Tahun 2025 atas aset tetap senilai (Rp160.448.850.756,92). Penyusutan Tahun 2025 sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(14.906.200.723,00)	(9.214.465.263,82)	(599.704.678,00)	(24.720.370.664,82)
2	Dinas Kesehatan	(18.286.431.167,00)	(6.789.147.464,13)	(1.404.912.362,00)	(26.480.490.993,13)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(3.386.214.124,00)	(324.957.228,42)	(11.789.568,00)	(3.722.960.920,42)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.380.099.657,00)	(127.162.242,00)	(85.983.380.286,37)	(87.490.642.185,37)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(591.551.502,00)	(82.479.617,02)	(4.220.097.749,55)	(4.894.128.868,57)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(16.805.546,00)	(10.095.600,00)	0,00	(26.901.146,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(145.614.466,00)	(6.170.510,00)	(815.984,00)	(152.600.960,00)
8	Dinas Sosial	(108.988.749,00)	(19.502.510,00)	0,00	(128.491.259,00)

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	(26.635.250,00)	(10.478.602,00)	(15.197.925,00)	(52.311.777,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(28.696.228,00)	(3.456.600,00)	0,00	(32.152.828,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(11.061.323,00)	(16.149.000,00)	0,00	(27.210.323,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(268.296.836,00)	(40.582.362,00)	(404.788.844,00)	(713.668.042,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(86.970.056,00)	(11.166.052,00)	(5.863.473,00)	(103.999.581,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(81.877.018,00)	(31.834.060,00)	(500.000,00)	(114.211.078,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(599.800.395,00)	(160.123.620,00)	(1.118.978,00)	(761.042.993,00)
16	Dinas Perhubungan	(136.427.415,00)	(96.895.338,00)	(148.392.601,00)	(381.715.354,00)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(109.083.269,00)	(22.694.282,00)	(295.874.527,00)	(427.652.078,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(72.423.604,00)	(64.418.944,00)	(755.700,00)	(137.598.248,00)
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(28.650.494,00)	(614.019.607,00)	(3.237.175,00)	(645.907.276,00)
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(53.603.576,00)	(136.993.289,00)	(426.250,00)	(191.023.115,00)
21	Dinas Perikanan	(26.386.659,00)	(69.606.785,00)	(323.174.671,00)	(419.168.115,00)
22	Dinas Pariwisata	(97.791.473,00)	(179.439.701,00)	(211.555.473,00)	(488.786.647,00)
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	(299.317.226,00)	(356.484.989,00)	(168.137.858,00)	(823.940.073,00)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(123.440.759,00)	(160.332.613,00)	(19.943.079,00)	(303.716.451,00)
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	(195.113.596,00)	(685.922.699,00)	(86.990.101,00)	(968.026.396,00)
26	Sekretariat Daerah	(666.982.194,00)	(840.884.864,00)	(22.910.163,00)	(1.530.777.221,00)
27	Inspektorat Daerah	(126.690.584,00)	(20.889.262,00)	0,00	(147.579.846,00)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(78.233.063,00)	(26.625.708,00)	(14.066.148,00)	(118.924.919,00)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(150.785.077,00)	(379.588.562,00)	(99.701.748,00)	(630.075.387,00)
30	Badan Pendapatan Daerah	(71.012.251,00)	(185.513.516,00)	(108.034.067,00)	(364.559.834,00)
31	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	(94.813.265,00)	(25.945.768,00)	(500.000,00)	(121.259.033,00)
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(8.777.157,00)	(12.133.010,00)	0,00	(20.910.167,00)
33	Sekretariat DPRD	(668.872.546,00)	(491.300.553,61)	(133.484.328,00)	(1.293.657.427,61)
34	Kecamatan Boking	(8.729.850,00)	(84.717.066,00)	0,00	(93.446.916,00)
35	Kecamatan Oenino	(3.650.000,00)	(30.756.366,00)	0,00	(34.406.366,00)
36	Kecamatan Toianas	(6.750.000,00)	(23.308.346,00)	0,00	(30.058.346,00)
37	Kecamatan Fatumnasi	(1.694.940,00)	(24.258.698,00)	0,00	(25.953.638,00)
38	Kecamatan Amanuban Timur	(5.783.083,00)	(31.035.325,00)	0,00	(36.818.408,00)
39	Kecamatan Nunkolo	(3.351.105,00)	(21.171.038,00)	0,00	(24.522.143,00)
40	Kecamatan Mollo Utara	(3.624.271,00)	(20.736.980,00)	0,00	(24.361.251,00)
41	Kecamatan Kie	(10.079.975,00)	(11.605.590,00)	0,00	(21.685.565,00)
42	Kecamatan Tobu	(6.706.808,00)	(26.741.315,00)	0,00	(33.448.123,00)
43	Kecamatan Noebana	(6.091.556,00)	(25.373.383,00)	0,00	(31.464.939,00)
44	Kecamatan Batuputih	(10.290.834,00)	(31.384.942,00)	0,00	(41.675.776,00)
45	Kecamatan Kot'olin	(7.268.751,00)	(20.783.092,00)	(1.600.000,00)	(29.651.843,00)
46	Kecamatan Kota Soe	(24.076.076,00)	(104.481.203,00)	(811.117.771,00)	(939.675.050,00)
47	Kecamatan Amanuban Selatan	(13.717.843,00)	(26.246.994,00)	0,00	(39.964.837,00)
48	Kecamatan Kuatnana	(3.048.034,00)	(14.729.414,00)	0,00	(17.777.448,00)
49	Kecamatan Nunbena	(14.961.461,00)	(31.221.416,00)	0,00	(46.182.877,00)
50	Kecamatan Fautmolo	(6.410.245,00)	(21.253.660,00)	0,00	(27.663.905,00)
51	Kecamatan Kualin	(14.400.367,00)	(16.597.000,00)	0,00	(30.997.367,00)
52	Kecamatan Amanuban Tengah	(13.075.992,00)	(12.445.711,00)	(37.893.800,00)	(63.415.503,00)
53	Kecamatan Noebeba	(3.395.833,00)	(20.580.910,00)	0,00	(23.976.743,00)
54	Kecamatan Kokbaun	(2.132.698,00)	(22.764.046,00)	0,00	(24.896.744,00)
55	Kecamatan Fatukopa	(7.883.334,00)	(27.960.952,00)	(333.334,00)	(36.177.620,00)
56	Kecamatan Mollo Barat	0,00	(27.799.362,00)	0,00	(27.799.362,00)
57	Kecamatan Mollo Selatan	(3.466.667,00)	(24.358.348,00)	0,00	(27.825.015,00)
58	Kecamatan Santian	(6.696.640,00)	(22.142.736,00)	0,00	(28.839.376,00)
59	Kecamatan Amanatun Utara	(8.934.166,00)	(29.003.092,00)	0,00	(37.937.258,00)

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
60	Kecamatan Amanatun Selatan	(11.471.663,00)	(27.746.752,00)	0,00	(39.218.415,00)
61	Kecamatan Polen	(3.425.000,00)	(27.221.002,00)	0,00	(30.646.002,00)
62	Kecamatan Amanuban Barat	(9.735.591,00)	(22.041.200,00)	(500.000,00)	(32.276.791,00)
63	Kecamatan Kolbano	(1.585.312,00)	(19.434.420,00)	0,00	(21.019.732,00)
64	Kecamatan Kuanfatu	(2.983.333,00)	(29.159.111,00)	0,00	(32.142.444,00)
65	Kecamatan Mollo Tengah	(7.967.811,00)	(20.294.752,00)	0,00	(28.262.563,00)
66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(8.006.650,00)	(20.194.532,00)	0,00	(28.201.182,00)
	Jumlah	**(43.175.043.137,00)**	**(22.137.008.978,00)**	**(95.136.798.641,92)**	**(160.448.850.756,92)**

2. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan senilai (Rp1.848.811.084,24). Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.758.159,00)	24.890.154,55		23.131.995,55
2	Dinas Kesehatan	0,00	(59.083,34)	(35.533.334,00)	(35.592.417,34)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	42.221,57	124.530,00	166.751,57
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	68.527.097,00	(2.103.967.811,55)	(2.035.440.714,55)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	(6,92)	268.793.975,23	268.793.968,31
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	107.191,00	0,00	107.191,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	2,00	2,00
9	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	(66.242.773,00)	(66.242.773,00)
10	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	455.075,00	455.075,00
11	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	(15.384.352,00)	0,00	(15.384.352,00)
12	Sekretariat Daerah	863.102,00	2,00	0,00	863.104,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(3.028.415,36)	0,00	0,00	(3.028.415,36)
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.873.125,00)	0,00	0,00	(1.873.125,00)
15	Sekretariat DPRD	0,00	31.097.081,58	0,00	31.097.081,58
16	Kecamatan Kota Soe	0,00	0,00	(30.864.456,00)	(30.864.456,00)
	Jumlah	**9.203.402,64**	**109.220.305,44**	**(1.967.234.792,32)**	**(1.848.811.084,24)**

3. Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan Aset Tetap senilai Rp54.933.807,00. Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan Aset Tetap sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.118.807,00	0,00	0,00	2.118.807,00
2	Dinas Perikanan	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.735.000,00	0,00	0,00	23.735.000,00
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	10.080.000,00	0,00	0,00	10.080.000,00
	Jumlah	**54.933.807,00**	**0,00**	**0,00**	**54.933.807,00**

4. Akumulasi Penyusutan dari Reklas Aset Tetap senilai Rp66.640.910,00. Akumulasi Penyusutan dari Reklas Aset Tetap sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	66.640.910,00	0,00	0,00	66.640.910,00
	Jumlah	**66.640.910,00**	**0,00**	**0,00**	**66.640.910,00**

5. Pengujian Beban Penyusutan Aset Tetap pada Laporan Operasional dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan			
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	43.175.043.137,00	22.137.008.978,00	95.136.798.641,92	160.448.850.756,92
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 (Neraca)	(457.780.162.687,18)	(243.868.195.982,66)	(749.195.251.958,09)	(1.450.843.610.627,93)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)	(414.735.897.669,82)	(221.840.407.310,10)	(652.091.218.523,85)	(1.288.667.523.503,77)
	Selisih	**130.778.119,64**	**109.220.305,44**	**(1.967.234.792,32)**	**(1.727.236.367,24)**

Penjelasan selisih:

Selisih pengujian antara Beban Penyusutan pada Laporan Operasional Tahun 2025, Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 pada Neraca senilai (Rp1.727.236.367,24) sebagai berikut:

- ✓ Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (Rp1.848.811.084,24);
- ✓ Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan Aset Tetap Rp54.933.807,00; dan
- ✓ Akumulasi Penyusutan dari Reklas Aset Tetap Rp66.640.910,00.

Penjelasan tambahan terkait Akumulasi Penyusutan:

1. Terdapat koreksi atas Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp46.199.442,61 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi lebih catat beban penyusutan sebagai dampak penyesuaian nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk koreksi atas aset yang mengalami kurang volume sehingga mempengaruhi dasar perhitungan penyusutan. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara keseluruhan senilai Rp46.199.443,52, yang terdiri atas koreksi senilai Rp0,91 dan Rp46.199.442,61, sebagai tindak lanjut penyesuaian atas akumulasi penyusutan yang sebelumnya tercatat lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, sehingga nilai buku aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat disajikan sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Terdapat koreksi atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.362.165,13 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi kurang catat beban penyusutan sebagai akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan setelah dilakukan penyesuaian data aset dan nilai buku, sehingga beban penyusutan yang diakui belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp8.650.158,69, yang terdiri atas koreksi senilai Rp7.287.993,56 dan Rp1.362.165,13, akibat sebelumnya terjadi kurang catat akumulasi penyusutan sehingga dilakukan penyesuaian untuk menyajikan nilai buku Gedung dan Bangunan secara wajar sesuai kondisi riil aset serta hasil penatausahaan dan rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
3. Terdapat penyesuaian atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada RSUD SoE senilai Rp32.778,58 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi lebih pencatatan beban penyusutan akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan setelah dilakukan penelaahan terhadap data aset dan nilai buku yang tersaji. Penyesuaian tersebut dilakukan agar beban penyusutan mencerminkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya pada periode pelaporan. Selanjutnya, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp75.000,15 yang terdiri atas koreksi senilai Rp42.221,57 dan Rp32.778,58, sebagai dampak penyesuaian nilai penyusutan yang sebelumnya tercatat

lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan dapat disajikan secara wajar sesuai kondisi riil aset;

4. Koreksi atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp35.889.083,82 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi kurang catat beban penyusutan sebagai akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan setelah dilakukan penelaahan dan penyesuaian data aset, sehingga beban penyusutan yang diakui belum mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp49.849.183,50, yang terdiri atas koreksi senilai Rp13.960.099,68 dan Rp35.889.083,82, akibat sebelumnya terjadi kurang catat akumulasi penyusutan sehingga dilakukan penyesuaian untuk menyajikan nilai buku Gedung dan Bangunan secara wajar sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah;
5. Koreksi atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) senilai Rp9.452,98 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi lebih catat beban penyusutan akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan berdasarkan hasil penelaahan data aset dan nilai penyusutan yang telah tercatat, sehingga dilakukan penyesuaian agar beban penyusutan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp9.459,90, yang terdiri atas koreksi senilai Rp6,92 dan Rp9.452,98, sebagai dampak penyesuaian atas nilai penyusutan yang sebelumnya tercatat lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan dapat disajikan secara wajar sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. Terdapat koreksi atas Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) senilai Rp261.697.307,55 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi kurang catat beban penyusutan akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah dilakukan penelaahan terhadap data aset dan masa manfaat aset yang digunakan, sehingga beban penyusutan yang diakui belum mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara keseluruhan senilai Rp572.485.503,78, yang terdiri atas koreksi senilai Rp310.788.196,23 dan Rp261.697.307,55, akibat sebelumnya terjadi kurang catat akumulasi penyusutan, sehingga dilakukan penyesuaian agar nilai buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat tersaji secara wajar sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
7. Akumulasi Penyusutan per Golongan Aset Tetap per Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 29.*

5.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	326.600.120,00	327.600.120,00	(1.000.000,00)	(0,31)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.616.555.850,00	6.729.104.028,00	(112.548.178,00)	(1,67)
Aset Tidak Berwujud	4.233.949.649,00	497.626.749,00	3.736.322.900,00	750,83
Aset Lain-Lain	96.653.633.644,54	96.029.071.586,40	624.562.058,14	0,65
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.264.554.360,00)	(191.678.362,00)	(2.072.875.998,00)	1.081,43

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(60.074.168.736,00)	(60.246.919.256,00)	172.750.520,00	(0,29)
Jumlah	**45.492.016.167,54**	**43.144.804.865,40**	**2.347.211.302,14**	**5,44**

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
▪ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	221.903.978,00	222.903.978,00	(1.000.0000,00)	(0,45)
▪ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	104.696.142,00	104.696.142,00	0,00	0,00
Jumlah	**326.600.120,00**	**327.600.120,00**	**(1.000.000,00)**	**(0,31)**

Rincian Mutasi Tagihan Jangka Panjang sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penyelesaian 2025	Saldo 31 Desember 2025
1	Tindak Lanjut Kerugian Inspektorat Kab TTS (TGR)	90.132.700,00	0,00	90.132.700,00
2	Panjar Tahun 2008 pada Bagian Umum	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3	Panjar Tahun 2009 pada Kec. Polen, dan Kec. Mollo Utara	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
4	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum	104.696.142,00	0,00	104.696.142,00
5	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum	23.501.600,00	0,00	23.501.600,00
6	UYHD Tahun 2007 pada Badan Kepegawaian Daerah	31.210.178,00	0,00	31.210.178,00
7	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pariwisata	5.859.500,00	(1.000.000,00)	4.859.500,00
8	UYHD Tahun 2007 pada Kecamatan KiE	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	Jumlah	**327.600.120,00**	**(1.000.000,00)**	**326.600.120,00**

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kerjasama Pemanfaatan	663.040.337,00	775.588.515,00	(112.548.178,00)	(14,51)
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	5.953.515.513,00	5.953.515.513,00	0,00	0,00
Jumlah	**6.616.555.850,00**	**6.729.104.028,00**	**(112.548.178,00)**	**(1,67)**

Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	
1	Dinas Perikanan	118.432.500,00	0,00	0,00	118.432.500,00
2	Sekretariat Daerah	248.508.000,00	0,00	0,00	248.508.000,00
3	Kec. Amanuban Selatan	172.800.000,00	0,00	0,00	172.800.000,00
4	Kec. Amanuban Tengah	178.820.000,00	0,00	0,00	178.820.000,00
5	Dinas Perikanan	357.788.515,00	0,00	(112.548.178,00)	245.240.337,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.652.755.013,00	0,00	0,00	5.652.755.013,00
	Jumlah	**6.729.104.028,00**	**0,00**	**(112.548.178,00)**	**6.616.555.850,00**

- Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagai berikut:
  1. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Kemitraan ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp112.548.178,00 dilakukan pada Dinas Perikanan berupa sepeda motor. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sebelumnya dicatat pada kelompok Aset Kemitraan, namun berdasarkan status penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya lebih tepat diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Selain itu, aset dimaksud telah digunakan secara langsung dalam mendukung operasional perangkat daerah dan tidak lagi memenuhi karakteristik sebagai aset kemitraan sehingga lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan status aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca; dan
  2. Bentuk aset tetap yang dikerjasamakan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	879.798.000,00	879.798.000,00
Angkutan Darat Bermotor	775.588.515,00	775.588.515,00
Bangunan Gedung Kantor	4.901.710.013,00	4.901.710.013,00
Pagar Gedung Kantor	53.575.000,00	53.575.000,00
Kolam Ikan	5.884.322,00	118.432.500,00
Jumlah	**6.616.555.850,00**	**6.729.104.028,00**

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➢ **Aset Tidak Berwujud**	**4.233.949.649,00**	**497.626.749,00**	**3.736.322.900,00**	**750,83**
▪ Software	366.662.000,00	366.662.000,00	0,00	0,00
▪ Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.867.287.649,00	130.964.749,00	3.736.322.900,00	2.852,92
➢ **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(2.264.554.360,00)**	**(191.678.362,00)**	**(2.072.875.998,00)**	1.081,43
▪ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Software	(2.264.554.360,00)	(191.678.362,00)	(2.072.875.998,00)	1.081,43
Jumlah	**1.969.395.289,00**	**305.948.387,00**	**1.663.446.902,00**	**543,70**

- Mutasi Aset Tak Berwujud sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	53.083.333,00	60.083.333,00	(7.000.000,00)	(11,65)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.717.209.576,00	0,00	1.717.209.576,00	100,00
Dinas Perhubungan	74.560.529,00	85.907.003,00	(11.346.474,00)	(13,21)
Dinas Komunikasi dan Informatika	23.666.667,00	29.666.667,00	(6.000.000,00)	(20,22)
Dinas Pariwisata	13.941.667,00	16.331.667,00	(2.390.000,00)	(14,63)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	13.437.500,00	17.187.500,00	(3.750.000,00)	(21,82)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.964.850,00	4.659.050,00	(1.694.200,00)	(36,36)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.303.750,00	21.788.750,00	(4.485.000,00)	(20,58)
Badan Pendapatan Daerah	53.227.417,00	70.324.417,00	(17.097.000,00)	(24,31)
Jumlah	**1.969.395.289,00**	**305.948.387,00**	**1.663.446.902,00**	**543,70**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:
  1. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
  2. Kapitalisasi Belanja Jasa sebagai Aset Tidak Berwujud;
  3. Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya; dan
  4. Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
- Penjelasan hal-hal penting lainnya:
  1. Penyesuaian pengelompokan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tak Berwujud senilai Rp2.724.072.900,00 yang terdiri atas buku umum, perencanaan fisik, pertamanan, buku data base, peta lokasi, aset renovasi, dan dokumen pendukung lainnya. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud lebih tepat disajikan sebagai Aset Tak Berwujud karena memiliki substansi berupa hasil kajian, dokumen perencanaan, data teknis, dan informasi yang memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, aset dimaksud tidak memiliki bentuk fisik dominan, digunakan sebagai dasar perencanaan, pengembangan, pengambilan keputusan teknis, serta menjadi basis data dan informasi pendukung pembangunan infrastruktur. Hasil inventarisasi juga menunjukkan bahwa sebagian aset berupa dokumen perencanaan dan data teknis lebih merepresentasikan informasi dan manfaat layanan dibanding aset berwujud sehingga lebih tepat diakui sebagai Aset Tak Berwujud sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar kelompok aset dalam neraca;
  2. Terjadi mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Tak Berwujud (ATB) senilai Rp598.354.620,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah yang direklasifikasi ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelaahan atas karakteristik aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud memiliki bentuk fisik, digunakan secara langsung dalam operasional dan pelayanan kesehatan, serta mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian juga dilakukan karena hasil penelaahan menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pengelompokan aset pada pencatatan sebelumnya yang mengakibatkan aset tercatat pada kelompok Aset Tetap Tak Berwujud. Oleh karena itu dilakukan reklasifikasi agar penyajian aset dalam laporan

keuangan sesuai dengan substansi ekonomi, karakteristik, dan kondisi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Terdapat pengakuan Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp1.012.250.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berasal dari kapitalisasi Belanja Jasa berupa hasil kajian/perencanaan meliputi *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). Pengakuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan atas substansi belanja, dimana dokumen hasil kajian dan perencanaan dimaksud memberikan manfaat pelayanan lebih dari satu periode pelaporan serta digunakan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud sesuai PSAP Nomor 14 paragraf 37. Sebelumnya pengeluaran tersebut tercatat sebagai Belanja Jasa, namun karena memiliki manfaat jangka panjang dan tidak habis digunakan dalam satu periode, dilakukan kapitalisasi dan pengakuan sebagai Aset Tak Berwujud agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan karakteristik dan masa manfaatnya;
4. Terdapat pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp50.612.500,00 atas hasil kajian/perencanaan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang sebelumnya diakui sebagai Aset Tak Berwujud melalui kapitalisasi Belanja Jasa. Pencatatan amortisasi dilakukan karena ATB dimaksud memiliki masa manfaat terbatas dan digunakan dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga nilai perolehannya perlu dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat aset. Atas kondisi tersebut dilakukan pencatatan amortisasi senilai Rp50.612.500,00 agar penyajian nilai Aset Tak Berwujud dalam laporan keuangan mencerminkan nilai tercatat yang sesuai dengan masa manfaatnya; dan
5. Terdapat pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp265.736.207,00 atas hasil kajian berupa Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya direklasifikasi dari Aset Lainnya (ATL) menjadi Aset Tak Berwujud (ATB). Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan atas karakteristik aset, dimana dokumen hasil kajian berupa DED memberikan manfaat pelayanan lebih dari satu periode pelaporan dan digunakan sebagai dasar perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sehingga memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tak Berwujud. Sehubungan dengan pengakuan tersebut, dilakukan pencatatan amortisasi senilai Rp265.736.207,00 karena ATB dimaksud memiliki masa manfaat terbatas sehingga nilai perolehannya perlu dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat aset agar penyajian nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Rincian SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Kesehatan	70.000.000,00	(16.916.667,00)	53.083.333,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.736.322.900,00	(2.019.113.324,00)	1.717.209.576,00
Dinas Perhubungan	93.464.749,00	(16.333.333,00)	77.131.416,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	(9.958.333,00)	30.041.667,00
Dinas Pariwisata	23.900.000,00	(24.062.500,00)	(162.500,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	37.500.000,00	(13.977.150,00)	23.522.850,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.942.000,00	(27.546.250,00)	(10.604.250,00)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	44.850.000,00	(117.742.583,00)	(72.892.583,00)
Badan Pendapatan Daerah	170.970.000,00	(18.904.220,00)	152.065.780,00
Jumlah	**4.233.949.649,00**	**(2.264.554.360,00)**	**1.969.395.289,00**

Pengujian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Laporan Operasional dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Neraca sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	366.111.381,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 (Neraca)	(2.264.554.360,00)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)	(191.678.362,00)
	Selisih	**(1.706.764.617,00)**

Penjelasan selisih:

Selisih Pengujian antara Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Laporan Operasional dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Neraca senilai (Rp1.706.764.617,00) adalah sebagai berikut:

- ✓ Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas PUPR senilai (Rp1.702.764.617,00);
- ✓ Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perhubungan senilai (Rp2.000.000,00); dan
- ✓ Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai (Rp2.000.000,00).

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-Lain per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	69.577.743.406,25	69.572.963.683,25	4.779.723,00	0,01
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	27.075.890.238,29	22.796.094.951,10	4.279.795.287,19	18,77
Aset Lainnya-Aset Lain Lain -Lain Lainnya	0,00	3.660.012.952,05	(3.660.012.952,05)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat/Usang	(60.074.168.736,00)	(60.246.919.256,00)	172.750.520,00	(0,29)
Jumlah	**36.579.464.908,54**	**35.782.152.330,40**	**797.312.578,14**	**2,23**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain sebagai berikut:
  1. Terjadi reklasifikasi dari kelompok Aset Kemitraan ke kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp112.548.178,00 pada Dinas Perikanan. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen, dan penelaahan atas status serta karakteristik aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Kemitraan. Selain itu, hasil penelaahan administrasi dan kondisi penguasaan aset menunjukkan bahwa aset tersebut tidak lagi digunakan dalam skema kemitraan atau kerja sama sebagaimana pencatatan sebelumnya sehingga lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, status penguasaan, dan klasifikasi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  2. Terdapat reklasifikasi dan pengurangan aset pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai Rp34.000.000,00 yang terdiri atas reklasifikasi sepeda motor pada

Dinas Perikanan senilai Rp19.000.000,00 dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain serta pengurangan kendaraan roda empat jenis pick up pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.000.000,00. Reklasifikasi sepeda motor ke Aset Lain-lain dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penelaahan kondisi aset karena aset dimaksud tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Lain-lain, sedangkan pengurangan atas kendaraan pick up senilai Rp19.000.000,00 telah dilakukan penghapusan melalui penjualan sesuai SK Penjualan Nomor 296/KEP/HK/2025, sehingga penyajian aset mencerminkan kondisi dan klasifikasi aset yang sebenarnya;

3. Terjadi koreksi keluar pada kelompok aset senilai Rp206.750.520,00 yang disebabkan oleh penghapusan aset pada beberapa Perangkat Daerah, terdiri atas Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp85.000.000,00, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp16.820.455,00, Sekretariat DPRD senilai Rp4.500.000,00, Kecamatan Mollo Selatan senilai Rp20.522.065,00, Kecamatan Boking senilai Rp44.460.000,00, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp35.448.000,00. Penghapusan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelaahan administrasi yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sudah tidak digunakan dalam operasional, mengalami kerusakan berat, tidak memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset. Penghapusan dilakukan sesuai dokumen dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga penyesuaian pencatatan diperlukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya;
4. Terjadi reklasifikasi keluar dari kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp281.345.728,37 pada beberapa Perangkat Daerah yang berasal dari hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan atas pengeluaran berupa perjalanan dinas dan honorarium yang sebelumnya tercatat pada kelompok aset. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Kesehatan senilai Rp185.927.221,37, Dinas Sosial senilai Rp10.692.500,00, Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp7.980.000,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp1.650.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp5.013.200,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp3.093.242,00, Dinas Perikanan senilai Rp200.000,00, Dinas Pariwisata senilai Rp2.889.600,00, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM senilai Rp1.590.000,00, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi senilai Rp1.507.200,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp51.732.941,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp8.751.600,00, serta Badan Pendapatan Daerah senilai Rp318.224,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang menunjukkan bahwa pengeluaran dimaksud tidak memenuhi kriteria pengakuan aset karena berupa biaya perjalanan dinas dan honorarium yang tidak memberikan manfaat ekonomi atau manfaat layanan di masa mendatang serta tidak memenuhi unsur kapitalisasi aset. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi transaksi dan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Terjadi koreksi saldo awal pada kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp64.982.065,00 yang terdiri atas Kecamatan Mollo Selatan senilai Rp20.522.065,00 dan Kecamatan Boking senilai Rp44.460.000,00. Koreksi saldo awal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelaahan data aset yang menunjukkan adanya penyesuaian atas pencatatan aset pada periode sebelumnya. Selain itu, hasil penertiban administrasi dan rekonsiliasi data aset menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara data pencatatan dengan kondisi dan status aset yang sebenarnya sehingga diperlukan penyesuaian nilai dan klasifikasi aset. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai

Aset Lain-Lain dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, status penguasaan, dan data aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

6. Terdapat mutasi pengurangan pada Aset Lainnya – Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah senilai Rp8.285.600,00 atas tindak lanjut penyetoran kembali ke Kas Daerah pada tahun berjalan atas temuan belanja perjalanan dinas berdasarkan LHP PDTT Belanja TA 2024, yang terdiri dari temuan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp7.980.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp305.600,00. Nilai tersebut sebelumnya dicatat dalam kelompok Aset Lainnya sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, namun pada tahun berjalan telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah oleh pihak terkait sebanyak 4 orang, sehingga dilakukan pengurangan pada akun Aset Lainnya dimaksud. Atas kondisi tersebut, nilai Aset Lain-lain disesuaikan agar penyajian aset dalam laporan keuangan mencerminkan hak pemerintah daerah yang masih dapat dipulihkan dan kondisi yang sebenarnya.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	28.856.834.282,17	22.991.895.747,97	5.864.938.534,20	25,51
Jumlah	**28.856.834.282,17**	**22.991.895.747,97**	**5.864.938.534,20**	**25,51**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.366.949.385,46	3.793.979.908,26	1.572.969.477,20	41,46
Pendapatan Diterima Dimuka	1.712.328,77	1.712.328,77	0,00	0,00
Utang Belanja	11.753.679.808,00	6.411.596.143,00	5.342.083.665,00	83,32
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.734.492.759,94	12.784.607.367,94	(1.050.114.608,00)	(8,21)
Jumlah	**28.856.834.282,17**	**22.991.895.747,97**	**5.864.938.534,20**	**25,51**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Fihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PFK Kas Daerah				
- Iuran Wajib Pegawai	959.508,00	959.508,00	0,00	0,00
- IWP 1%	270,00	270,00	0,00	0,00
- Taperum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
- Askes	215.004,00	215.004,00	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	20.858.475,00	14.661.126,00	6.197.349,00	42,27

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
- Pajak Penghasilan Ps 22	(2.840.727,00)	(2.840.727,00)	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	4.145.126,91	4.145.126,91	0,00	0,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	(17.495.368,45)	(17.495.368,45)	0,00	0,00
- Taspen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
- Beras (BULOG)	4.357.236.250,00	2.783.177.700,00	1.574.058.550,00	56,56
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	(966.253,00)	(966.253,00)	0,00	0,00
PFK Bendahara BLUD				
- Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	253.400,00	(253.400,00)	(100,00)
- Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	896.258,74	(896.258,74)	(100,00)
- Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	20.000,00	(20.000,00)	(100,00)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	6.116.763,06	(6.116.763,06)	(100,00)
PFK Lainnya (Jaminan Kesungguhan)				
- PFK Lainnya	1.004.743.300,00	1.004.743.300,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.366.949.385,46**	**3.793.979.908,26**	**1.572.969.477,20**	**41,46**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebagai berikut:
  1. Hutang PFK berupa Hutang Beras yang belum dibayarkan.
- Penjelasan hal-hal penting lainnya:
  a. Terdapat hutang PFK berupa Beras yang belum dibayarkan sampai berakhirnya tahun anggaran senilai Rp4.357.236.250,00;
  b. Terdapat Jaminan Kesungguhan Kuasa Pertambangan yang dicatat sebagai Hutang PFK senilai Rp1.004.743.300,00; dan
  c. Rincian atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➢ Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa	1.712.328,77	1.712.328,77	0,00	0,00
▪ Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Kendaraan	1.712.328,77	1.712.328,77	0,00	0,00
Jumlah	**1.712.328,77**	**1.712.328,77**	**0,00**	**0,00**

5.3.2.1.3 Utang Belanja dan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	3.721.492.858,00	2.984.100.849,00	737.392.009,00	24,71
Utang Belanja Barang dan Jasa	8.032.186.950,00	3.278.538.094,00	4.753.648.856,00	144,99
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	148.957.200,00	(148.957.200,00)	(100,00)
Jumlah	**11.753.679.808,00**	**6.411.596.143,00**	**5.342.083.665,00**	**83,32**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan Hutang Belanja Pegawai senilai Rp737.392.009,00 dari tahun 2024, yang mana hutang tersebut merupakan klaim Jasa pada BLUD RSUD SoE yang belum ditransfer oleh BPJS Kesehatan; dan
2. Terjadi peningkatan Hutang Belanja Barang senilai Rp4.753.648.856,00 dari tahun 2024, yang mana hutang tersebut merupakan Hutang Obat pada BLUD RSUD SoE;
3. Rincian atas Utang Belanja dan Transfer dapat dilihat pada *Lampiran 31*.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.734.492.759,94	12.784.607.367,94	(1.050.114.608,00)	8,21
Jumlah	**11.734.492.759,94**	**12.784.607.367,94**	**(1.050.114.608,00)**	**8,21**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:
  1. Adanya Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena kesalahan pengakuan di tahun sebelumnya, dan juga koreksi atas Hutang tahun-tahun lampau yang tidak ditagih lagi oleh pihak ketiga;
  2. Adanya pembayaran atau pelunasan Utang Jangka Pendek Lainnya oleh beberapa SKPD;
  3. Adanya penambahan pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya di beberapa SKPD karena pekerjaan fisiknya sudah selesai (sudah PHO) sedangkan pembayarannya belum 100% ke pihak ketiga;
  4. Adanya penambahan pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya di beberapa SKPD karena progres fisik melebihi realisasi keuangan; dan
  5. Rincian atas Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 32*.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	**2.352.066.622.574,84**	**2.432.885.928.524,15**	**(80.819.305.949,31)**	**(3,32)**

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan

Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah – LO	71.045.269.878,99	56.253.805.392,85
Pendapatan Transfer – LO	1.232.377.644.726,00	1.097.363.021.306,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	31.311.172.430,10	88.371.364.884,00
Jumlah	**1.334.734.087.035,09**	**1.241.988.191.582,85**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah – LO	24.478.726.521,00	15.420.703.922,33
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	33.793.836.982,00	7.488.789.311,91
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.616.964.581,00	4.831.703.453,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	5.155.741.794,99	28.512.608.705,61
Jumlah	**71.045.269.878,99**	**56.253.805.392,85**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Hotel – LO	0,00	226.963.299,00
Pajak Restoran – LO	0,00	1.190.105.588,00
Pajak Hiburan – LO	0,00	503.000,00
Pajak Reklame – LO	659.004.048,00	810.075.200,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	5.115.497.192,33
Pajak Parkir – LO	0,00	0,00
Pajak Air Tanah – LO	56.481.657,00	36.420.970,00
Pajak Mineral	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.818.503.161,00	2.945.986.876,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.866.170.597,00	4.807.529.847,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	460.214.895,00	287.621.950,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	6.603.459.973,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	5.539.212.664,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	4.475.679.526,00	0,00
Jumlah	**24.478.726.521,00**	**15.420.703.922,33**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya peningkatan penetapan terhadap jumlah nilai objek pajak pada item PBB-P2 dan Pajak Reklame; dan
   b. Bertambahnya Penetapan Opsen PKB dan BBNKB sebagai pendapatan asli daerah.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 senilai Rp266.540.569,00 (Rp24.478.726.521,00 - Rp24.212.185.952,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**266.540.569,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain	33.241.400,00	
✓ Mutasi Piutang Pajak Reklame Berjalan	1.051.200,00	
✓ Mutasi Piutang PBBP2	224.335.418,00	
✓ Mutasi Piutang PBJT - Tenaga Listrik	46.184.795,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Mutasi Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	(38.272.244,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**266.540.569,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Jasa Umum – LO		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	27.737.572.195,00	2.242.311.200,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	16.637.000,00	28.667.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	400.530.000,00	194.862.053,91
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.311.513.476,00	1.378.129.956,00
Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.039.056.750,00	1.654.809.650,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	40.466.000,00	33.482.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	21.520.000,00	27.659.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO	40.725.000,00	87.550.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	1.208.100.000,00	844.175.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	415.490.000,00	426.975.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	1.176.689.711,00	433.665.452,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	3.240.000,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	0,00	120.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	382.296.850,00	136.383.000,00
Jumlah	**33.793.836.982,00**	**7.488.789.311,91**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Meningkatnya Retribusi Jasa Umum di antaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan meningkatnya Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten TTS;
   b. Meningkatnya Retribusi Jasa Usaha di antaranya pada Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
   c. Meningkatnya Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
   d. Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD SoE yang bersumber dari Klaim BPJS Kesehatan tahun 2024 dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun 2025 dicatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 senilai (Rp1.770.359.644,00) (Rp33.793.836.982,00 - Rp35.564.196.626,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(1.770.359.644,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Mutasi Piutang Retribusi Kios	231.500.065,00	
✓ Mutasi Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	14.407.500,00	
✓ Mutasi Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	61.197.791,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Mutasi Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(2.077.465.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(1.770.359.644,00)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO	7.616.964.581,00	4.831.703.453,00
Jumlah	**7.616.964.581,00**	**4.831.703.453,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD yaitu pada Bank NTT dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini ***tidak sama*** dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2025 senilai Rp163.665.920,00 (Rp7.616.964.581,00 - Rp7.453.298.661,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**163.665.920,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum tahun 2025	233.681.708,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Mengoreksi Pendapatan LO atas Dividen Tahun 2024 yang telah diakui sebelumnya	(70.015.788,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**163.665.920,00**

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	19.116.750,00	102.437.250,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain - LO	358.216.000,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	944.345.650,97	1.204.538.670,85
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP - LO	162.664.902,00	204.831.888,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	0,00	1.060.000,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	1.730.615.805,03	2.569.603.891,96
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	1.278.332.202,25	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	0,00	954.095.553,80
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	110.163.618,64	1.049.724.106,23
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	2.716.284,00	1.719.962,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	12.522.790,00	12.584.127,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	1.701.764,00	1.773.651,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	68.366,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	5.366.493,00	375.980,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) - LO	37.552.934,00	31.321.608,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	23.746.639,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	5.623.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO	59.647.252,00	48.620.705,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO	29.556.622,00	2.109.326,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LO	0,00	460.266.303,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	59.879.464,20	76.208.273,20
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO	192.280.412,00	179.332.581,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO	121.624.845,90	21.612.004.828,57
Jumlah	**5.155.741.794,99**	**28.512.608.705,61**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Meningkatnya Pendapatan dari Pengembalian dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   b. Pencatatan Jasa Pelayanan BLUD yang bersumber dari Klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2024 dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun 2025 dicatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan;

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2025 senilai (Rp6.567.187.157,37) (Rp5.155.741.794,99 - Rp11.722.928.952,36). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(6.567.187.157,37)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Pengurangan Pendapatan LO terhadap LRA:		
✓ Pengembalian Kurvol dan DTT Belanja sebelumnya sebagai Aset Lainnya	(222.867.687,37)	
✓ Pengembalian Hibah KPU dan Bawaslu sebelumnya tercatat sebagai Beban Dibayar Dimuka	(6.344.319.470,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(6.567.187.157,37)**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	1.190.245.539.461,00	1.061.148.292.972,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	7.207.988.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	34.924.117.265,00	36.214.728.334,00
Jumlah	**1.232.377.644.726,00**	**1.097.363.021.306,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Perimbangan – LO		
• Dana Transfer Bagi Hasil - DBH Pajak – LO	3.853.375.538,00	4.430.403.187,00
• Dana Transfer Bagi Hasil - DBH Sumber Daya Alam (SDA) - LO	1.295.908.000,00	506.350.000,00
• Dana Transfer Umum - DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya - LO	658.358.015.150,00	619.733.920.000,00
• Dana Transfer Umum - DAU yang Ditentukan Penggunaannya - LO	215.299.051.882,00	214.982.059.702,00
• Dana Transfer Khusus - DAK Fisik - LO	77.268.430.445,00	116.255.142.430,00
• Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - LO	234.170.758.446,00	105.240.417.653,00
Jumlah	**1.190.245.539.461,00**	**1.061.148.292.972,00**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Insentif Fiskal – LO		
• Insentif Fiskal – LO	7.207.988.000,00	0,00
Jumlah	**7.207.988.000,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Meningkatnya Pendapatan Dana Alokasi Umum pada Bidang Pendidikan;
   b. Pencatatan Pendapatan Dana BOS sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang mana tahun 2024 dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2025 dicatat sebagai Pendapatan Tranfer DAK Non Fisik; dan
   c. Pemberian tambahan dana tahun 2025 oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Insentif Fiskal tahun 2025.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 senilai (Rp191.141.111.684,00) (Rp1.197.453.527.461,00 - Rp1.388.594.639.145,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(191.141.111.684,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Pengurangan Pendapatan LO terhadap LRA:		
✓ Dana Desa yang tidak dicatat di Laporan Operasional	(191.070.627.684,00)	
✓ Penerimaan TDF Tahun 2024 Sebelumnya Dicatat Sebagai Aset-Lainya	(70.484.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(191.141.111.684,00)**

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	2.816.611.846,00	6.078.445.274,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	2.578.047.724,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	5.320.081.074,00	4.157.741.296,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	6.976.338,00	5.806.984,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	26.780.448.007,00	22.191.553.056,00
Bantuan Keuangan – LO		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.203.134.000,00
Jumlah	**34.924.117.265,00**	**36.214.728.334,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Meningkatnya Pendapatan Bagu Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
   b. Meningkatnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;

2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2025 senilai Rp2.442.609.120,00 (Rp34.924.117.265,00 – Rp32.481.508.145,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**2.442.609.120,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	602.527.482,00	
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	4.101.416.185,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(2.259.838.383,00)	
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(1.496.164,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**2.442.609.120,00**

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah – LO	12.501.531.845,10	15.707.275,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	18.809.640.585,00	88.355.657.609,00
Jumlah	**31.311.172.430,10**	**88.371.364.884,00**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	4.181.235.312,03	15.707.275,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	485.136.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - LO	7.835.160.533,07	0,00
Jumlah	**12.501.531.845,10**	**15.707.275,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Hibah Masuk Aset Lancar Tahun 2025 berupa Obat; dan
   b. Hibah Masuk Aset Tetap Tahun 2025 berupa Tanah Peralatan dan Mesin.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2025 senilai Rp12.501.531.845,10 (Rp12.501.531.845,10 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**12.501.531.845,10**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LO terhadap LRA:		
✓ Hibah Masuk Aset Lancar - Obat	11.727.800.845,10	
✓ Hibah Masuk Aset Tetap - Tanah	485.136.000,00	
✓ Hibah Masuk Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	288.595.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**12.501.531.845,10**

5.4.1.3.2 **Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	66.914.151.321,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.809.640.585,00	21.441.506.288,00
Jumlah	**18.809.640.585,00**	**88.355.657.609,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pencatatan Pendapatan Dana BOS tahun 2024 sebagai Lain-lain Pendapatan, pada tahun 2025 dicatat sebagai Pendapatan Transfer;
   b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2025 mengalami penurunan dari saldo tahun 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2025 *sama* dengan saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2025 senilai Rp18.809.640.585,00.

5.4.2 **Beban**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	772.951.919.661,00	646.503.980.098,00
Beban Barang	135.385.310.334,32	121.894.781.038,56
Beban Jasa	183.719.845.115,98	167.444.067.980,00
Beban Pemeliharaan	3.336.785.354,00	3.248.738.146,00
Beban Perjalanan Dinas	36.058.414.459,00	48.930.666.606,00
Beban Hibah	27.149.367.998,00	64.147.402.532,00
Beban Bantuan Sosial	655.500.000,00	530.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	195.926.918,33	939.660.605,02
Beban Penyusutan dan Amortisasi	160.814.962.137,92	146.782.156.258,93
Beban Transfer	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Lain-lain	0,00	7.546.052.944,00
Jumlah	**1.414.321.935.776,55**	**1.295.230.021.026,51**

5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	604.005.468.302,00	549.319.555.929,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	137.121.288.544,00	2.209.200.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	66.627.934.838,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.009.046.054,00	15.844.500.050,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	132.880.015,00	24.185.711,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488.960.000,00	231.360.000,00
Belanja Pegawai BLUD	13.194.276.746,00	12.247.243.570,00
Jumlah	**772.951.919.661,00**	**646.503.980.098,00**

Beban Pegawai menurut Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	460.490.221.777,00	386.344.842.509,00	74.145.379.268,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.575.124.364,00	1.497.697.843,00	77.426.521,00
Dinas Kesehatan	64.476.263.723,00	56.981.663.522,00	7.494.600.201,00
Rumah Sakit Umum Daerah	39.646.254.361,00	33.700.025.212,00	5.946.229.149,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.444.505.489,00	4.312.099.741,00	132.405.748,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.488.511.252,00	4.075.765.092,00	412.746.160,00
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	1.255.381.237,00	1.343.121.554,00	(87.740.317,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	3.179.478.767,00	3.128.881.264,00	50.597.503,00
Dinas Sosial	1.831.237.284,00	1.750.068.438,00	81.168.846,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.524.951.107,00	1.583.124.241,00	(58.173.134,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.622.980.767,00	1.443.616.929,00	179.363.838,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.594.889.815,00	1.609.759.445,00	(14.869.630,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.358.138.109,00	1.198.773.150,00	159.364.959,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.676.704.729,00	2.560.268.243,00	116.436.486,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.975.283.276,00	2.621.077.420,00	354.205.856,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.701.750.905,00	1.553.109.818,00	148.641.087,00
Dinas Perhubungan	2.438.230.463,00	2.297.300.153,00	140.930.310,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.267.148.710,00	1.361.758.642,00	(94.609.932,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.652.113.837,00	1.420.642.196,00	231.471.641,00
Dinas Perikanan	1.986.273.998,00	1.993.503.081,00	(7.229.083,00)
Dinas Pariwisata	1.619.831.229,00	1.511.092.480,00	108.738.749,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.479.045.875,00	12.444.363.335,00	34.682.540,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.273.073.729,00	4.915.978.730,00	357.094.999,00

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.356.681.750,00	2.196.716.195,00	159.965.555,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.530.937.610,00	1.504.114.555,00	26.823.055,00
Sekretariat Daerah	10.205.833.594,00	9.289.148.963,00	916.684.631,00
Sekretariat DPRD	21.418.249.000,00	18.967.046.640,00	2.451.202.360,00
Kecamatan Boking	1.037.036.589,00	984.835.545,00	52.201.044,00
Kecamatan Oenino	890.333.789,00	882.656.224,00	7.677.565,00
Kecamatan Toianas	892.606.394,00	905.232.986,00	(12.626.592,00)
Kecamatan Fatumnasi	943.231.781,00	866.421.915,00	76.809.866,00
Kecamatan Amanuban Timur	1.438.917.939,00	1.376.839.736,00	62.078.203,00
Kecamatan Nunkolo	1.025.898.071,00	921.495.051,00	104.403.020,00
Kecamatan Mollo Utara	1.353.772.589,00	1.339.331.604,00	14.440.985,00
Kecamatan KiE	1.114.326.805,00	995.539.393,00	118.787.412,00
Kecamatan Tobu	841.236.963,00	864.862.664,00	(23.625.701,00)
Kecamatan Noebana	814.693.370,00	801.783.671,00	12.909.699,00
Kecamatan Batuputih	1.329.664.630,00	1.153.017.974,00	176.646.656,00
Kecamatan Kot'olin	1.065.262.762,00	1.030.057.492,00	35.205.270,00
Kecamatan Kota SoE	8.046.893.057,00	8.150.355.085,00	(103.462.028,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	1.013.243.394,00	1.043.818.520,00	(30.575.126,00)
Kecamatan Kuatnana	1.210.526.511,00	1.159.075.295,00	51.451.216,00
Kecamatan Nunbena	893.956.608,00	821.175.575,00	72.781.033,00
Kecamatan Fautmollo	1.049.041.089,00	961.340.448,00	87.700.641,00
Kecamatan Kualin	1.097.882.962,00	999.770.330,00	98.112.632,00
Kecamatan Amanuban Tengah	1.812.401.613,00	1.844.029.380,00	(31.627.767,00)
Kecamatan Noebeba	865.886.528,00	982.172.939,00	(116.286.411,00)
Kecamatan Kokbaun	895.997.666,00	857.915.877,00	38.081.789,00
Kecamatan Fatukopa	912.589.119,00	837.909.506,00	74.679.613,00
Kecamatan Mollo Barat	1.120.124.531,00	1.036.346.508,00	83.778.023,00
Kecamatan Mollo Selatan	1.051.018.882,00	847.490.510,00	203.528.372,00
Kecamatan Santian	1.025.508.401,00	995.798.060,00	29.710.341,00
Kecamatan Amanatun Utara	1.066.813.541,00	1.177.704.243,00	(110.890.702,00)
Kecamatan Amanatun Selatan	1.109.487.080,00	1.080.930.045,00	28.557.035,00
Kecamatan Polen	915.022.323,00	1.080.963.301,00	(165.940.978,00)
Kecamatan Amanuban Barat	1.243.327.359,00	1.192.157.963,00	51.169.396,00
Kecamatan Kolbano	1.114.934.583,00	1.029.781.525,00	85.153.058,00
Kecamatan Kuanfatu	1.165.244.375,00	1.194.857.317,00	(29.612.942,00)
Kecamatan Mollo Tengah	1.087.731.162,00	976.664.582,00	111.066.580,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.587.209.810,00	1.427.935.145,00	159.274.665,00
Inspektorat Daerah	3.203.064.657,00	2.806.573.235,00	396.491.422,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.882.475.077,00	2.732.889.839,00	149.585.238,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	58.855.091.594,00	27.878.145.163,00	30.976.946.431,00
Badan Pendapatan Daerah	2.966.625.628,00	3.062.534.105,00	(95.908.477,00)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.076.161.260,00	2.891.451.191,00	184.710.069,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.867.582.412,00	1.706.560.765,00	161.021.647,00
Jumlah	**772.951.919.661,00**	**646.503.980.098,00**	**126.447.939.563,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pengangkatan CPNS dan PPPK;
   b. Beban Tambahan Penghasilan ASN mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pengangkatan CPNS dan PPPK;
   c. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pada Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
   d. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pada Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
   e. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pada Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH; dan
   f. Beban Pegawai BLUD mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan belanja pegawai BLUD.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA Tahun Anggaran 2025 senilai Rp589.065.849,00 (Rp772.951.919.661,00 – Rp772.362.853.812,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**589.065.849,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO terhadap LRA:		
✓ Pengakuan Hutang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025	2.949.403.513,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Realisasi Pembayaran Htang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024	(2.212.011.504,00)	
✓ Kapitalisasi Belanja Pegawai BLUD sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(7.600.000,00)	
✓ Kapitalisasi Belanja Pegawai BLUD sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(41.290.000,00)	
✓ Koreksi Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	(99.436.160,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**589.065.849,00**

5.4.2.2 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang Pakai Habis	125.814.173.312,32	120.251.334.201,56
Beban Barang Tak Habis Pakai	1.709.617.774,00	544.318.380,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.861.519.248,00	1.099.128.457,00
Jumlah	**135.385.310.334,32**	**121.894.781.038,56**

Beban Barang menurut Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.134.325.087,00	6.098.359.045,00	5.035.966.042,00

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.783.018.344,02	696.374.250,00	2.086.644.094,02
Dinas Kesehatan	49.117.994.705,09	42.975.982.697,69	6.142.012.007,40
Rumah Sakit Umum Daerah	2.806.709.913,71	5.857.419.771,57	(3.050.709.857,86)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.054.535.135,00	870.334.104,00	184.201.031,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.909.762.170,00	19.806.190.165,30	(6.896.427.995,30)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	552.057.305,00	773.456.650,00	(221.399.345,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	878.957.908,00	504.891.450,00	374.066.458,00
Dinas Sosial	10.144.366.446,00	7.973.572.185,00	2.170.794.261,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	604.843.904,00	694.076.313,00	(89.232.409,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	833.436.601,00	677.346.720,00	156.089.881,00
Dinas Ketahanan Pangan	575.370.865,00	664.576.100,00	(89.205.235,00)
Dinas Lingkungan Hidup	640.398.722,00	777.364.791,00	(136.966.069,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	865.577.181,00	1.247.823.251,00	(382.246.070,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	949.241.000,00	864.898.372,00	84.342.628,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.705.279.525,00	1.984.289.146,00	1.720.990.379,00
Dinas Perhubungan	340.653.284,00	472.853.514,00	(132.200.230,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	188.792.350,00	305.654.950,00	(116.862.600,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	352.204.415,00	313.684.325,00	38.520.090,00
Dinas Perikanan	1.933.239.075,00	1.746.357.933,00	186.881.142,00
Dinas Pariwisata	249.907.700,00	365.761.490,00	(115.853.790,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4.882.301.666,00	5.026.116.789,00	(143.815.123,00)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.312.270.011,00	2.708.922.918,00	2.603.347.093,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	3.790.281.700,00	1.687.393.900,00	2.102.887.800,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.104.091.250,00	534.364.400,00	1.569.726.850,00
Sekretariat Daerah	4.855.266.528,00	3.895.264.067,00	960.002.461,00
Sekretariat DPRD	3.658.673.548,00	4.278.891.250,00	(620.217.702,00)
Kecamatan Boking	64.571.787,00	68.598.572,00	(4.026.785,00)
Kecamatan Oenino	101.898.000,00	85.068.800,00	16.829.200,00
Kecamatan Toianas	101.310.054,00	85.730.700,00	15.579.354,00
Kecamatan Fatumnasi	61.577.215,00	82.282.000,00	(20.704.785,00)
Kecamatan Amanuban Timur	94.758.500,00	105.792.000,00	(11.033.500,00)
Kecamatan Nunkolo	112.145.406,00	103.189.234,00	8.956.172,00
Kecamatan Molio Utara	77.081.390,00	90.445.160,00	(13.363.770,00)
Kecamatan KiE	78.468.344,00	120.809.750,00	(42.341.406,00)
Kecamatan Tobu	82.436.300,00	73.682.450,00	8.753.850,00
Kecamatan Noebana	84.826.010,50	102.338.508,00	(17.512.497,50)
Kecamatan Batuputih	82.644.000,00	87.348.750,00	(4.704.750,00)
Kecamatan Kot'olin	71.543.900,00	71.633.300,00	(89.400,00)
Kecamatan Kota SoE	727.777.100,00	785.253.293,00	(57.476.193,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	57.708.800,00	63.378.875,00	(5.670.075,00)
Kecamatan Kuatnana	93.255.500,00	104.313.000,00	(11.057.500,00)
Kecamatan Nunbena	80.130.800,00	66.896.000,00	13.234.800,00
Kecamatan Fautmollo	96.966.000,00	85.680.000,00	11.286.000,00
Kecamatan Kualin	90.994.900,00	101.324.500,00	(10.329.600,00)
Kecamatan Amanuban Tengah	127.650.775,00	118.397.535,00	9.253.240,00
Kecamatan Noebeba	102.944.486,00	113.258.563,00	(10.314.077,00)
Kecamatan Kokbaun	81.274.265,00	64.355.850,00	16.918.415,00
Kecamatan Fatukopa	99.617.671,00	100.245.450,00	(627.779,00)

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Kecamatan Mollo Barat	64.179.350,00	93.514.450,00	(29.335.100,00)
Kecamatan Mollo Selatan	70.185.780,00	100.866.700,00	(30.680.920,00)
Kecamatan Santian	72.530.880,00	84.345.100,00	(11.814.220,00)
Kecamatan Amanatun Utara	86.810.600,00	81.585.700,00	5.224.900,00
Kecamatan Amanatun Selatan	72.213.700,00	83.802.750,00	(11.589.050,00)
Kecamatan Polen	47.488.100,00	67.700.000,00	(20.211.900,00)
Kecamatan Amanuban Barat	85.111.000,00	54.005.538,00	31.105.462,00
Kecamatan Kolbano	73.213.430,00	96.749.000,00	(23.535.570,00)
Kecamatan Kuanfatu	81.051.956,00	89.796.000,00	(8.744.044,00)
Kecamatan Mollo Tengah	87.690.870,00	62.659.500,00	25.031.370,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	145.158.054,00	291.817.000,00	(146.658.946,00)
Inspektorat Daerah	344.074.123,00	292.432.530,00	51.641.593,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	903.874.840,00	868.305.000,00	35.569.840,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.905.017.483,00	1.568.068.241,00	336.949.242,00
Badan Pendapatan Daerah	918.125.876,00	689.667.625,00	228.458.251,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	366.763.050,00	511.470.267,00	(144.707.217,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	266.683.700,00	375.752.800,00	(109.069.100,00)
Jumlah	**135.385.310.334,32**	**121.894.781.038,56**	**13.490.529.295,76**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang Tahun 2025 dari Tahun 2024 mengalami peningkatan disebabkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penggunaan Sisa Persediaan Obat tahun 2024 yang menambah nilai Beban Barang tahun 2025;
   b. Besarnya nilai Beban Barang dari Aset Ekstrakomptabel tahun 2025;
2. Pengakuan Beban Barang dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dalam LRA TA 2025 senilai Rp5.575.546.173,80 (Rp135.385.310.334,32 – Rp129.809.764.160,52). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Barang dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**5.575.546.173,80**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Mengisi Persediaan 2025 yang tidak mempengaruhi Beban Barang (Persediaan Hibah)	7.923.394.926,07	
✓ Mengisi Persediaan 2025 yang tidak mempengaruhi Beban Barang (Reklas Belanja Modal ke Persediaan)	107.229.516,00	
✓ Aset Ekstrakompatabel Tahun 2025	7.114.843.865,00	
✓ Persediaan Barang Tahun 2024	54.477.625.513,36	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap	(2.776.188.789,00)	
✓ Realisasi Hutang Belanja Barang Tahun 2024	(661.925.137,00)	
✓ Persediaan Barang Tahun 2025	(60.546.732.741,63)	
✓ Koreksi Beban Barang atas Kelebihan Pembayaran BBM	(62.700.979,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**5.575.546.173,80**

5.4.2.3 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Pemerintah

Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Jasa Kantor	70.463.838.182,00	66.828.702.654,00
Beban iuran Jaminan/Asuransi	27.661.829.369,00	25.302.244.805,00
Beban Sewa Tanah	19.500.000,00	26.400.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.923.945.112,00	1.657.182.112,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	625.618.500,00	349.954.000,00
Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	0,00	34.000.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	139.475.000,00	18.335.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.123.280.292,00	2.063.558.211,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	437.800.000,00	365.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.470.734.373,00	2.346.838.757,00
Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pungutan Retribusi	88.920.000,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.228.101.599,98	676.447.500,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.984.415.608,00	4.811.992.371,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	49.743.612.424,00	51.882.583.817,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	13.808.774.656,00	11.080.828.753,00
Jumlah	**183.719.845.115,98**	**167.444.067.980,00**

Beban Jasa menurut Organisasi Perngkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.416.572.806,00	56.543.314.692,00	(2.126.741.886,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.662.601.846,98	886.351.338,00	776.250.508,98
Dinas Kesehatan	54.613.192.641,00	45.581.011.234,00	9.032.181.407,00
Rumah Sakit Umum Daerah	16.433.610.817,00	14.679.111.431,00	1.754.499.386,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.388.245.979,00	2.008.435.799,00	(620.189.820,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.442.635.443,00	3.202.742.717,00	(760.107.274,00)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	1.408.196.650,00	1.221.092.400,00	187.104.250,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.457.913.199,00	3.941.576.916,00	(483.663.717,00)
Dinas Sosial	773.048.634,00	1.641.342.540,00	(868.293.906,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	277.486.379,00	333.090.400,00	(55.604.021,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	921.760.132,00	951.644.155,00	(29.884.023,00)
Dinas Ketahanan Pangan	2.147.055.938,00	397.393.380,00	1.749.662.558,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.215.016.175,00	1.448.485.957,00	(233.469.782,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.767.170,00	538.005.859,00	(214.238.689,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.227.991.175,00	2.343.460.055,00	(115.468.880,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.867.768.072,00	6.059.266.091,00	(1.191.498.019,00)
Dinas Perhubungan	417.403.124,00	390.328.790,00	27.074.334,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.311.725.370,00	1.473.343.887,00	(161.618.517,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	341.763.773,00	323.313.428,00	18.450.345,00
Dinas Perikanan	720.376.000,00	875.940.046,00	(155.564.046,00)
Dinas Pariwisata	536.326.862,00	786.739.224,00	(250.412.362,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1.260.359.763,00	845.150.353,00	415.209.410,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.110.588.876,00	1.365.357.365,00	1.745.231.511,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	970.775.494,00	885.041.420,00	85.734.074,00

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	555.458.660,00	344.817.073,00	210.641.587,00
Sekretariat Daerah	4.036.113.451,00	3.757.727.073,00	278.386.378,00
Sekretariat DPRD	11.394.200.618,00	6.114.326.745,00	5.279.873.873,00
Kecamatan Boking	63.224.784,00	80.257.540,00	(17.032.756,00)
Kecamatan Oenino	42.300.956,00	28.268.700,00	14.032.256,00
Kecamatan Toianas	48.021.655,00	55.174.250,00	(7.152.595,00)
Kecamatan Fatumnasi	62.833.824,00	48.900.000,00	13.933.824,00
Kecamatan Amanuban Timur	38.995.812,00	53.061.470,00	(14.065.658,00)
Kecamatan Nunkolo	31.177.376,00	32.312.155,00	(1.134.779,00)
Kecamatan Mollo Utara	55.392.526,00	61.938.170,00	(6.545.644,00)
Kecamatan KiE	49.829.856,00	53.355.250,00	(3.525.394,00)
Kecamatan Tobu	27.962.708,00	28.962.500,00	(999.792,00)
Kecamatan Noebana	51.582.056,00	51.176.000,00	406.056,00
Kecamatan Batuputih	52.955.456,00	56.550.450,00	(3.594.994,00)
Kecamatan Kot'olin	39.313.474,00	55.985.535,00	(16.672.061,00)
Kecamatan Kota SoE	192.363.031,00	199.649.157,00	(7.286.126,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	56.287.957,00	61.035.505,00	(4.747.548,00)
Kecamatan Kuatnana	40.014.566,00	51.144.500,00	(11.129.934,00)
Kecamatan Nunbena	41.277.686,00	14.369.250,00	26.908.436,00
Kecamatan Fautmollo	36.857.562,00	53.742.900,00	(16.885.338,00)
Kecamatan Kualin	42.728.560,00	32.110.200,00	10.618.360,00
Kecamatan Amanuban Tengah	59.053.723,00	74.473.802,00	(15.420.079,00)
Kecamatan Noebeba	31.011.122,00	28.627.437,00	2.383.685,00
Kecamatan Kokbaun	68.447.476,00	100.656.250,00	(32.208.774,00)
Kecamatan Fatukopa	35.679.937,00	31.789.250,00	3.890.687,00
Kecamatan Mollo Barat	29.663.390,00	29.703.250,00	(39.860,00)
Kecamatan Mollo Selatan	58.969.290,00	51.826.450,00	7.142.840,00
Kecamatan Santian	35.150.961,00	33.066.662,00	2.084.299,00
Kecamatan Amanatun Utara	28.182.086,00	31.278.050,00	(3.095.964,00)
Kecamatan Amanatun Selatan	46.705.364,00	54.628.450,00	(7.923.086,00)
Kecamatan Polen	28.595.590,00	31.513.843,00	(2.918.253,00)
Kecamatan Amanuban Barat	61.184.172,00	75.480.743,00	(14.296.571,00)
Kecamatan Kolbano	50.241.425,00	54.558.300,00	(4.316.875,00)
Kecamatan Kuanfatu	30.256.608,00	37.372.000,00	(7.115.392,00)
Kecamatan Mollo Tengah	48.318.026,00	77.051.100,00	(28.733.074,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.165.908,00	251.718.246,00	(140.552.338,00)
Inspektorat Daerah	1.033.543.267,00	743.768.628,00	289.774.639,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	726.331.971,00	605.372.213,00	120.959.758,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.132.014.606,00	2.267.975.066,00	864.039.540,00
Badan Pendapatan Daerah	1.658.474.822,00	1.301.196.345,00	357.278.477,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.820.305.469,00	1.361.290.905,00	376.054.564,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	421.475.010,00	244.317.090,00	177.157.920,00
Jumlah	**183.719.845.115,98**	**167.444.067.980,00**	**16.275.777.135,98**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

- ✓ Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan pelaksanaan kegiatan turnamen olahraga Bola Voli Bupati CUP TTS antar Pelajar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang didasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 75/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Tim Wasit serta Ball Boys Turnamen Bola Voli Bupati Cup antar Sekolah Menegah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025, kegiatan Perlombaan Bercerita Tingkat Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 122/KEP/HK/2025, dan pelaksanaan Kegiatan Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Obyek Kemajuan Tradisi Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 yang didasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 198/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Sekretariat, Tim Juri dan Pendamping Peserta Kegiatan Festival Budaya Daerah se- Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025;
- ✓ Pemberian penghargaan atas prestasi untuk atlet perorangan dan beregu berprestasi dan berjasa asal kabupaten TTS pada event olahraga provinsi, nasional dan internasional senilai Rp150.000.000,00 yang didasarkan atas SK Bupati TTS Nomor: 344/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Atlet Perorangan dan Beregu Berprestasi dan Berjasa Asal Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Event Olahraga Provinsi, Nasional dan Internasional Tahun Anggaran 2025; dan
- ✓ Pemberian bantuan uang kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1.725.000.000,00 yang didasarkan atas Peraturan Badan Pangan (Perbadan) Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor: DKP.II.d.04.1/65/2025 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tahun 2025.

b. Beban Barang dan Jasa BOSP mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena pembayaran honor bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan non ASN hanya sebesar 20% pada satuan pendidikan negeri yang didasarkan pada Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, sedangkan di tahun 2024 realisasi pembayaran honor sebesar 50% yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

c. Beban Barang dan Jasa BLUD mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Pengakuan Beban Jasa dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Jasa dalam LRA TA 2025 senilai (Rp16.127.001.463,00) (Rp183.719.845.115,98 – Rp199.846.846.578,98). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(16.127.001.463,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Pengakuan Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025	7.602.815.250,00	
✓ Koreksi Pengakuan Beban Atas Utang Belanja Beasiswa	82.960.000,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Kapitalisasi Belanja Jasa sebagai Aset Tetap	(5.624.480.246,00)	
✓ Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebagai Aset Tetap	(15.542.430.880,00)	
✓ Realisasi Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024	(2.615.840.410,00)	
✓ Koreksi Beban atas Kelebihan Pembayaran Jasa Kantor	(10.374.480,00)	
✓ Koreksi Beban atas Temuan Belanja Barang dan Jasa BOS	(19.650.697,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(16.127.001.463,00)**

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	896.626.979,00	1.274.144.358,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.340.156.375,00	1.964.593.788,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.002.000,00	10.000.000,00
Jumlah	**3.336.785.354,00**	**3.248.738.146,00**

Beban Pemeliharaan berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	904.392.900,00	671.973.000,00	232.419.900,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	171.552.500,00	(164.552.500,00)
Dinas Kesehatan	2.500.000,00	18.014.850,00	(15.514.850,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	545.749.550,00	(545.749.550,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.538.350,00	17.020.000,00	45.518.350,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	131.357.000,00	134.719.000,00	(3.362.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	5.050.000,00	19.675.000,00	(14.625.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	10.600.000,00	9.920.200,00	679.800,00
Dinas Sosial	20.570.000,00	29.750.000,00	(9.180.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.000,00	5.750.000,00	(4.650.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.050.000,00	35.515.000,00	(30.465.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	250.000,00	11.625.000,00	(11.375.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	4.110.000,00	6.065.000,00	(1.955.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.281.500,00	30.376.820,00	24.904.680,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9.000.000,00	7.927.500,00	1.072.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.700.000,00	17.820.000,00	(9.120.000,00)
Dinas Perhubungan	6.225.000,00	25.500.000,00	(19.275.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	35.908.000,00	25.889.000,00	10.019.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.875.000,00	15.317.000,00	(6.442.000,00)
Dinas Perikanan	24.783.096,00	16.849.000,00	7.934.096,00
Dinas Pariwisata	31.000.000,00	99.366.000,00	(68.366.000,00)

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	44.100.000,00	8.225.000,00	35.875.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.500.000,00	13.600.000,00	(10.100.000,00)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	12.657.700,00	(12.657.700,00)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	8.150.000,00	15.880.000,00	(7.730.000,00)
Sekretariat Daerah	987.727.847,00	410.886.185,00	576.841.662,00
Sekretariat DPRD	468.026.053,00	530.996.600,00	(62.970.547,00)
Kecamatan Boking	13.980.000,00	4.249.688,00	9.730.312,00
Kecamatan Oenino	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Toianas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Fatumnasi	7.100.000,00	900.000,00	6.200.000,00
Kecamatan Amanuban Timur	10.000.000,00	700.000,00	9.300.000,00
Kecamatan Nunkolo	4.350.000,00	9.000.000,00	(4.650.000,00)
Kecamatan Mollo Utara	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Kecamatan KiE	3.150.000,00	4.400.000,00	(1.250.000,00)
Kecamatan Tobu	9.650.000,00	3.000.000,00	6.650.000,00
Kecamatan Noebana	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)
Kecamatan Batuputih	4.250.000,00	2.945.000,00	1.305.000,00
Kecamatan Kot'olin	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
Kecamatan Kota SoE	6.400.000,00	55.348.500,00	(48.948.500,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Kuatnana	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Kecamatan Nunbena	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Kecamatan Fautmollo	13.200.000,00	1.885.000,00	11.315.000,00
Kecamatan Kualin	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Kecamatan Amanuban Tengah	7.000.000,00	6.802.500,00	197.500,00
Kecamatan Noebeba	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kokbaun	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00
Kecamatan Fatukopa	10.000.000,00	1.165.000,00	8.835.000,00
Kecamatan Mollo Barat	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mollo Selatan	12.000.000,00	300.000,00	11.700.000,00
Kecamatan Santian	11.050.000,00	1.200.000,00	9.850.000,00
Kecamatan Amanatun Utara	11.700.000,00	2.550.000,00	9.150.000,00
Kecamatan Amanatun Selatan	20.462.000,00	600.000,00	19.862.000,00
Kecamatan Polen	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)
Kecamatan Amanuban Barat	1.575.000,00	1.800.000,00	(225.000,00)
Kecamatan Kolbano	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Kuanfatu	6.650.000,00	3.750.000,00	2.900.000,00
Kecamatan Mollo Tengah	13.800.000,00	2.400.000,00	11.400.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.633.000,00	5.200.000,00	1.433.000,00
Inspektorat Daerah	34.959.108,00	23.199.903,00	11.759.205,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.900.000,00	34.385.000,00	1.515.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	73.925.000,00	94.600.000,00	(20.675.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	75.296.500,00	55.464.150,00	19.832.350,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.280.000,00	12.608.500,00	(6.328.500,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	4.515.000,00	(4.515.000,00)
Jumlah	**3.336.785.354,00**	**3.248.738.146,00**	**88.047.208,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dari Tahun 2024 mengalami peningkatan disebabkan karena bertambahnya volume aset yang banyak mengalami kerusakan berat sehingga perlu adanya biaya pemeliharaan atas aset tersebut agar aset tetap berfungsi optimal dan mencegah terjadinya kerusakan yang fatal.
2. Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2025 senilai (Rp2.832.271.554,00) (Rp3.336.785.354,00 – Rp6.169.056.908,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(2.832.271.554,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Pengurangan Beban LO terhadap LRA:		
✓ Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagai Aset Tetap	(2.750.000,00)	
✓ Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagai Aset Tetap	(1.990.193.554,00)	
✓ Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai Aset Tetap	(839.328.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(2.832.271.554,00)**

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00
Jumlah	**36.058.414.459,00**	**48.930.666.806,00**

Beban Perjalanan Dinas berdasarlan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.931.214.939,00	3.677.666.078,00	(746.451.139,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	297.898.500,00	493.840.220,00	(195.941.720,00)
Dinas Kesehatan	2.019.520.651,00	4.176.496.426,00	(2.156.975.775,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	513.110.080,00	(513.110.080,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.718.466,00	2.075.985.048,00	(1.161.266.582,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	987.316.583,00	1.432.137.020,00	(444.820.437,00)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	257.054.400,00	1.032.975.008,00	(775.920.608,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	158.583.300,00	329.605.800,00	(171.022.500,00)
Dinas Sosial	768.049.450,00	1.058.505.800,00	(290.456.350,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	349.537.110,00	672.988.520,00	(323.451.410,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	570.343.900,00	739.469.323,00	(169.125.423,00)
Dinas Ketahanan Pangan	1.027.317.328,00	604.952.750,00	422.364.578,00
Dinas Lingkungan Hidup	321.892.655,00	753.991.175,00	(432.098.520,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	417.165.119,00	540.524.501,00	(123.359.382,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	670.444.400,00	1.255.805.979,00	(585.361.579,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	320.043.700,00	378.260.080,00	(58.216.380,00)
Dinas Perhubungan	205.575.900,00	441.799.158,00	(236.223.258,00)

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Komunikasi dan Informatika	248.643.852,00	649.344.046,00	(400.700.194,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	305.204.383,00	525.043.720,00	(219.839.337,00)
Dinas Perikanan	289.420.260,00	295.911.000,00	(6.490.740,00)
Dinas Pariwisata	581.026.690,00	672.401.100,00	(91.374.410,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	2.703.003.510,00	1.174.494.950,00	1.528.508.560,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	860.111.056,00	1.087.234.060,00	(227.123.004,00)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	644.255.760,00	957.559.960,00	(313.304.200,00)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.087.354.624,00	1.138.397.900,00	(51.043.276,00)
Sekretariat Daerah	2.648.648.291,00	2.950.583.340,00	(301.935.049,00)
Sekretariat DPRD	6.964.212.282,00	8.850.944.192,00	(1.886.731.910,00)
Kecamatan Boking	48.720.000,00	71.290.000,00	(22.570.000,00)
Kecamatan Oenino	21.730.000,00	62.240.000,00	(40.510.000,00)
Kecamatan Toianas	17.000.000,00	40.670.000,00	(23.670.000,00)
Kecamatan Fatumnasi	38.740.000,00	79.700.000,00	(40.960.000,00)
Kecamatan Amanuban Timur	33.575.000,00	49.850.000,00	(16.275.000,00)
Kecamatan Nunkolo	19.635.000,00	39.950.000,00	(20.315.000,00)
Kecamatan Mollo Utara	37.470.000,00	77.520.000,00	(40.050.000,00)
Kecamatan KiE	37.910.000,00	30.090.000,00	7.820.000,00
Kecamatan Tobu	41.820.000,00	71.760.000,00	(29.940.000,00)
Kecamatan Noebana	28.702.000,00	37.970.000,00	(9.268.000,00)
Kecamatan Batuputih	29.470.000,00	58.815.000,00	(29.345.000,00)
Kecamatan Kot'olin	27.540.000,00	52.520.000,00	(24.980.000,00)
Kecamatan Kota SoE	48.476.000,00	235.077.600,00	(186.601.600,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	31.705.000,00	65.960.000,00	(34.255.000,00)
Kecamatan Kuatnana	19.130.000,00	21.660.000,00	(2.530.000,00)
Kecamatan Nunbena	32.395.000,00	51.510.000,00	(19.115.000,00)
Kecamatan Fautmollo	30.620.000,00	54.970.000,00	(24.350.000,00)
Kecamatan Kualin	29.200.000,00	46.350.000,00	(17.150.000,00)
Kecamatan Amanuban Tengah	0,00	48.620.000,00	(48.620.000,00)
Kecamatan Noebeba	27.520.000,00	42.300.000,00	(14.780.000,00)
Kecamatan Kokbaun	27.851.100,00	83.890.000,00	(56.038.900,00)
Kecamatan Fatukopa	23.460.000,00	36.890.000,00	(13.430.000,00)
Kecamatan Mollo Barat	61.672.000,00	64.830.000,00	(3.158.000,00)
Kecamatan Mollo Selatan	26.680.000,00	50.970.000,00	(24.290.000,00)
Kecamatan Santian	30.095.000,00	61.200.000,00	(31.105.000,00)
Kecamatan Amanatun Utara	32.045.000,00	73.780.000,00	(41.735.000,00)
Kecamatan Amanatun Selatan	27.400.000,00	78.480.000,00	(51.080.000,00)
Kecamatan Polen	59.210.000,00	109.950.000,00	(50.740.000,00)
Kecamatan Amanuban Barat	35.535.000,00	93.420.000,00	(57.885.000,00)
Kecamatan Kolbano	21.040.000,00	62.960.000,00	(41.920.000,00)
Kecamatan Kuanfatu	31.250.000,00	74.900.000,00	(43.650.000,00)
Kecamatan Mollo Tengah	32.025.000,00	52.450.000,00	(20.425.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	248.872.559,00	840.246.100,00	(591.373.541,00)
Inspektorat Daerah	1.759.792.505,00	1.923.455.936,00	(163.663.431,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	928.951.130,00	1.294.067.653,00	(365.116.523,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.323.510.833,00	1.727.420.780,00	(403.909.947,00)
Badan Pendapatan Daerah	1.135.964.075,00	613.675.228,00	522.288.847,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	799.555.048,00	1.416.879.755,00	(617.324.707,00)

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	303.590.100,00	552.351.520,00	(248.761.420,00)
Jumlah	**36.058.414.459,00**	**48.930.666.806,00**	**(12.872.252.347,00)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dari Tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2025 senilai (Rp230.425.551,00) (Rp36.058.414.459,00 – Rp36.288.840.010,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(230.425.551,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Pengurangan Beban LO terhadap LRA:		
✓ Koreksi Beban Perjalanan Dinas atas temuan belanja	(230.425.551,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(230.425.551,00)**

5.4.2.6 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.420.886.327,00	57.863.651.554,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.323.913.074,00
Beban Hibah kepada BUMD	0,00	373.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.124.043.744,00	3.055.000.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	604.437.927,00	531.837.904,00
Jumlah	**27.149.367.998,00**	**64.147.402.532,00**

Beban Hibah berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.067.204.136,00	550.913.074,00	2.516.291.062,00
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	604.437.927,00	58.395.489.458,00	(57.791.051.531,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.621.608,00	0,00	34.621.608,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	380.000.000,00	(380.000.000,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
Dinas Perhubungan	0,00	373.000.000,00	(373.000.000,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	109.218.000,00	0,00	109.218.000,00
Sekretariat Daerah	23.333.886.327,00	2.835.000.000,00	20.498.886.327,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.593.000.000,00	(1.593.000.000,00)
Jumlah	**27.149.367.998,00**	**64.147.402.532,00**	**(36.998.034.534,00)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Hibah tahun 2025 senilai Rp16.420.886.327,00 merupakan Hibah Aset Tetap Tanah dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk Pembangunan SMA Garuda dengan luas 200.175m2 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 91/KEP/HK/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

b. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp10.124.043.744,00, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pemberian hibah dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada organisasi bidang pemuda dan olahraga, bidang pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan keagamaan lainnya yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 118/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Tahun Anggaran 2025; dan

c. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik senilai Rp604.437.927,00, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pemberian besaran hibah kepada partai politik yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 361/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024-2029.

2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 senilai Rp19.102.694.071,00 (Rp27.149.367.998,00 – Rp8.046.673.927,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**19.102.694.071,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO terhadap LRA		
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Tanah	16.420.886.327,00	
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.521.834.744,00	
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.218.000,00	
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Lainnya	50.755.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**19.102.694.071,00**

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	620.000.000,00	475.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	30.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	35.500.000,00	25.000.000,00
Jumlah	**655.500.000,00**	**530.000.000,00**

Beban Bantuan Sosail berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Sekretariat Daerah	655.500.000,00	530.000.000,00	125.500.000,00

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Jumlah	**655.500.000,00**	**530.000.000,00**	**125.500.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Bantuan Sosial kepada Individu mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya pemberian Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dalam daerah sebanyak 86 mahasiswa senilai Rp430.000.000,00 dan pendidikan di luar daerah sebanyak 38 mahasiswa senilai Rp190.000.000,00 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 315/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
   b. Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan berupa bantuan hewan kurban kepada 3 masjid senilai Rp35.500.000,00 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 315/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025.

5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	164.355.125,47	425.321.527,95
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	21.488.643,36	504.106.454,41
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	10.083.149,50	10.232.622,67
Jumlah	**195.926.918,33**	**939.660.605,02**

Beban Penyisihan Piutang berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	3.962,65	(3.962,66)
Rumah Sakit Umum Daerah SoE	10.083.149,50	10.216.660,50	(133.511,00)
Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman	0,00	11.999,51	(11.999.51)
Dinas Perhubungan	0,00	51.595.890,41	(51.595.890,41)
Badan Pendapatan Daerah	185.843.768,83	877.832.091,95	(691.988.323,12)
Jumlah	**195.926.918,33**	**939.660.605,02**	**(743.733.686,69)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena kualitas piutang (lancar, kurang lancar, diragukan atau macet);
2. Koreksi saldo awal akibat Kurang Saji atas Penyisihan Piutang Tahun 2024 yang belum memperhitungkan penyisihan atas nilai piutang tahun di bawah 2017 senilai Rp1.807.898.560,61;
3. Koreksi berupa pembebanan penyisihan piutang PBB tahun berjalan tahun 2025 senilai Rp218.590.755,50; dan
4. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per

31 Desember 2025 senilai (Rp1.682.062.673,61). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca		**(1.682.062.673,61)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Penyisihan Piutang:		
✓ Koreksi Saldo Awal akibat kurang saji Penyisihan Piutang 2024	(1.807.898.560,61)	
➢ Pengurangan Penyisihan Piutang:		
✓ Koreksi Saldo Awal akibat lebih saji Penyisihan Piutang 2024	125.835.887,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(1.682.062.673,61)**

5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.175.043.137,00	44.393.312.188,64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.137.008.978,00	20.871.206.492,96
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	95.136.798.641,92	81.476.330.298,33
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	366.111.381,00	41.307.279,00
Jumlah	**160.814.962.137,92**	**146.782.156.258,93**

Beban Benyusutan dan Amortisasi berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.720.370.664,82	25.695.521.686,71	(975.151.021,89)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	645.907.276,00	642.711.921,00	3.195.355,00
Dinas Kesehatan	26.487.490.993,13	25.429.998.703,08	1.057.492.290,05
Rumah Sakit Umum Daerah	3.722.960.920,42	3.666.370.290,00	56.590.630,42
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.806.990.892,37	73.995.204.770,50	13.811.786.121,87
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.894.128.868,57	4.822.435.197,00	71.693.671,57
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	28.201.182,00	29.504.890,00	(1.303.708,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	26.901.146,00	17.932.023,00	8.969.123,00
Dinas Sosial	128.491.259,00	78.432.708,00	50.058.551,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	152.600.960,00	148.174.144,00	4.426.816,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.152.828,00	60.381.128,00	(28.228.300,00)
Dinas Ketahanan Pangan	27.210.323,00	27.059.208,00	151.115,00
Dinas Lingkungan Hidup	713.668.042,00	699.195.447,00	14.472.595,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103.999.581,00	101.204.314,00	2.795.267,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	114.211.078,00	96.989.985,00	17.221.093,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	761.042.993,00	813.352.217,00	(52.309.224,00)
Dinas Perhubungan	391.061.828,00	398.657.120,00	(7.595.292,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	431.652.078,00	869.291.675,00	(437.639.597,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	191.023.115,00	167.077.064,00	23.946.051,00
Dinas Perikanan	419.168.115,00	413.200.538,00	5.967.577,00
Dinas Pariwisata	491.176.647,00	473.928.692,00	17.247.955,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	827.690.073,00	843.207.404,00	(15.517.331,00)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	305.410.651,00	288.306.608,00	17.104.043,00

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	968.026.396,00	1.208.468.902,00	(240.442.506,00)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	52.311.777,00	57.906.110,00	(5.594.333,00)
Sekretariat Daerah	1.530.777.221,00	1.284.028.822,00	246.748.399,00
Sekretariat DPRD	1.293.657.427,61	1.116.407.158,00	177.250.269,61
Kecamatan Boking	93.446.916,00	95.454.012,00	(2.007.096,00)
Kecamatan Oenino	34.406.368,00	33.956.368,00	450.000,00
Kecamatan Toianas	30.058.346,00	27.100.012,00	2.958.334,00
Kecamatan Fatumnasi	25.953.638,00	28.034.887,00	(2.081.249,00)
Kecamatan Amanuban Timur	36.818.408,00	37.778.158,00	(959.750,00)
Kecamatan Nunkolo	24.522.143,00	29.137.830,00	(4.615.687,00)
Kecamatan Mollo Utara	24.361.251,00	24.136.980,00	224.271,00
Kecamatan KiE	21.685.565,00	16.396.624,00	5.288.941,00
Kecamatan Tobu	33.448.123,00	34.368.955,00	(920.832,00)
Kecamatan Noebana	31.464.939,00	31.085.009,00	379.930,00
Kecamatan Batuputih	41.675.776,00	43.105.358,00	(1.429.582,00)
Kecamatan Kot'olin	29.651.843,00	24.793.093,00	4.858.750,00
Kecamatan Kota SoE	939.675.050,00	817.014.012,00	122.661.038,00
Kecamatan Amanuban Selatan	39.964.837,00	40.533.593,00	(568.756,00)
Kecamatan Kuatnana	17.777.448,00	21.827.447,00	(4.049.999,00)
Kecamatan Nunbena	46.182.877,00	46.275.582,00	(92.705,00)
Kecamatan Fautmollo	27.663.905,00	26.734.739,00	929.166,00
Kecamatan Kualin	30.997.367,00	31.142.127,00	(144.760,00)
Kecamatan Amanuban Tengah	63.415.503,00	45.424.012,00	17.991.491,00
Kecamatan Noebeba	23.976.743,00	24.897.578,00	(920.835,00)
Kecamatan Kokbaun	24.896.744,00	28.986.329,00	(4.089.585,00)
Kecamatan Fatukopa	36.177.620,00	38.191.784,00	(2.014.164,00)
Kecamatan Mollo Barat	27.799.362,00	29.882.695,00	(2.083.333,00)
Kecamatan Mollo Selatan	27.825.015,00	30.097.932,00	(2.272.917,00)
Kecamatan Santian	28.839.376,00	32.161.044,00	(3.321.668,00)
Kecamatan Amanatun Utara	37.937.258,00	36.191.433,00	1.745.825,00
Kecamatan Amanatun Selatan	39.218.415,00	40.915.921,00	(1.697.506,00)
Kecamatan Polen	30.646.002,00	31.335.585,00	(689.583,00)
Kecamatan Amanuban Barat	32.276.791,00	30.581.910,00	1.694.881,00
Kecamatan Kolbano	21.019.732,00	21.402.649,00	(382.917,00)
Kecamatan Kuanfatu	32.142.444,00	23.129.075,00	9.013.369,00
Kecamatan Mollo Tengah	28.262.563,00	27.132.668,00	1.129.895,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.598.248,00	162.879.497,00	(25.281.249,00)
Inspektorat Daerah	147.579.846,00	81.426.921,00	66.152.925,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	123.409.919,00	122.068.078,00	1.341.841,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	630.075.387,00	434.249.147,64	195.826.239,36
Badan Pendapatan Daerah	381.656.834,00	581.295.000,00	(199.638.166,00)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	121.259.033,00	89.668.394,00	31.590.639,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.910.167,00	16.415.095,00	4.495.072,00
Jumlah	**160.814.962.137,92**	**146.782.156.258,93**	**14.032.805.878,99**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan oleh sisa masa manfaat Aset Tetap yang semakin berkurang setiap tahunnya;
b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025 dan adanya reklasifikasi aset tetap;
c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025 dan adanya reklasifikasi aset tetap; dan
d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud mengalami peningkatan di tahun 2025 disebabkan oleh adanya penambahan atas Aset Tidak Berwujud di tahun 2025.

2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

5.4.2.10 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.157.963.398,00	886.875.098,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	91.895.940.400,00	86.375.639.520,00
Jumlah	**94.053.903.798,00**	**87.262.514.618,00**

Beban Transfer sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00	6.791.389.180,00
Jumlah	**94.053.903.798,00**	**87.262.514.618,00**	**6.791.389.180,00**

5.4.2.10.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.157.963.398,00	886.875.098,00
Jumlah	**2.157.963.398,00**	**886.875.098,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 karena penerimaan Pajak Daerah lebih tinggi; dan
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2025.

5.4.2.10.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.895.940.400,00	86.375.639.520,00
Jumlah	**91.895.940.400,00**	**86.375.639.520,00**

Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 senilai (Rp191.070.627.684,00) (Rp91.895.940.400,00 – Rp282.966.568.084,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuagan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca		**(191.070.627.684,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan LO terhadap LRA:		
✓ Dana Desa tidak dicatat dalam Laporan Operasional	(191.070.627.684,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(191.070.627.684,00)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dari Tahun 2024 berdasarkan persentase Alokasi Dana Desa yang diterima sebesar 10% dari DAU dan Dana Bagi Hasil yang didasarkan pada Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini ***tidak sama*** dengan saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025; dan
3. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.2.11 Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-Lain Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Lain-Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Lain-Lain	0,00	7.546.052.944,00
Jumlah	**0,00**	**7.546.052.944,00**

Beban Lain-lain berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.284.251.369,00	(4.284.251.369,00)
Dinas Kesehatan	0,00	173.372.339,00	(173.372.339,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	5.061.452,00	(5.061.452,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	785.737.367,00	(785.737.367,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	218.350.000,00	(218.350.000,00)

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.544.910,00	(4.544.910,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	16.242.512,00	(16.242.512,00)
Dinas Pariwisata	0,00	5.970.000,00	(5.970.000,00)
Sekretariat DPRD	0,00	42.138.100,00	(42.138.100,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.010.384.895,00	(2.010.384.895,00)
Jumlah	**0,00**	**7.546.052.944,00**	**(7.546.052.944,00)**

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 tidak terdapat saldo Beban Lain-lain, sedangkan di Tahun 2024 adanya pengakuan atas beban lain-lain yang merupakan Beban Non Operasional Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap seperti Belanja Modal yang menjadi Aset Ekstrakompatebel senilai Rp7.546.052.944,00.

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	138.170.800,00
Jumlah	**0,00**	**138.170.800,00**

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 tidak ada pengakuan nilai Surplus Non-Operasional maupun Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan di Tahun 2024 adanya pengakuan atas Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap) senilai Rp138.170.800,00.

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	315.727.334,00
Jumlah	**0,00**	**315.727.334,00**

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 tidak ada pengakuan nilai Defisit Non-Operasional maupun Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan di Tahun 2024 adanya pengakuan atas Defisit Penjualan Aset Non Lancar yang merupakan penjualan Aset Lainnya berupa Aset Rusak Berat senilai Rp315.727.334,00.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00
Jumlah	**1.070.675.400,00**	**1.028.622.708,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban Tidak Terduga mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 karena adanya penambahan jumlah lokasi terjadinya bencana di Tahun 2025 berupa bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan pada ruas jalan desa sebanyak 17 titik dan tanah longsor pada Desa Kuatae yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 239/KEP/HK/2025 tentang Perpanjangan Keempat Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 , sedangkan di Tahun 2024 adanya penurunan jumlah lokasi terjadinya bencana berupa bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan pada jalan desa sebanyak 5 titik yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 55/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024; dan

2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2025.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
➢ **Pendapatan Daerah – LO**		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	71.045.269.878,99	56.253.805.392,85
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.232.377.644.726,00	1.097.363.021.306,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	31.311.172.430,10	88.371.364.884,00
➢ **Beban Operasional**		
✓ Beban Pegawai	772.951.919.661,00	646.503.980.098,00
✓ Beban Barang	135.385.310.334,32	121.894.781.038,56
✓ Beban Jasa	183.719.845.115,98	167.444.067.980,00
✓ Beban Pemeliharaan	3.336.785.354,00	3.248.738.146,00
✓ Beban Perjalanan Dinas	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00
✓ Beban Hibah	27.149.367.998,00	64.147.402.532,00
✓ Beban Bantuan Sosial	655.500.000,00	530.000.000,00
✓ Beban Penyisihan Piutang	195.926.918,33	939.660.605,02
✓ Beban Penyusutan	160.814.962.137,92	146.782.156.258,93
✓ Beban Transfer	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00
✓ Beban Lain-lain	0,00	7.546.052.944,00
Kegiatan Non-Operasional		

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	138.170.800,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	(315.727.334,00)
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00
Jumlah	**(80.658.524.141,46)**	**(54.448.008.685,66)**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.2.*

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.518.461.065.316,36	1.484.282.514.127,18
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.439.374.742.278,50	1.398.671.990.402,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**79.086.323.037,86**	**85.610.523.725,18,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Penerimaan Pajak Daerah**		
✓ Pajak Hotel	0,00	227.013.299,00
✓ Pajak Restoran	0,00	1.190.929.188,00
✓ Pajak Hiburan	0,00	503.000,00
✓ Pajak Reklame	662.983.692,00	736.981.574,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	0,00	5.073.862.274,33
✓ Pajak Parkir	0,00	0,00
✓ Pajak Air Tanah	56.481.657,00	36.420.970,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.818.503.161,00	2.945.986.876,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.641.835.179,00	4.419.887.034,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	460.214.895,00	287.621.950,00
✓ Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.557.275.178,00	0,00
✓ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.539.212.664,00	0,00
✓ Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.475.679.526,00	0,00
➢ **Penerimaan Retribusi Daerah**		
✓ **Retribusi Jasa Umum**		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.815.037.195,00	2.242.311.200,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.637.000,00	28.667.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.530.000,00	194.862.053,91,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
• Retribusi Pelayanan Pasar	1.080.013.411,00	1.084.863.394,00
✓ **Retribusi Jasa Usaha**		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	963.451.459,00	1.612.773.400,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	40.466.000,00	33.482.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.520.000,00	27.659.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	40.725.000,00	87.550.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	1.208.100.000,00	844.175.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	415.490.000,00	426.975.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.176.689.711,00	433.665.452,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.240.000,00	0,00
✓ **Retribusi Perizinan Tertentu**		
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	120.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	382.296.850,00	136.383.000,00
➢ **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.453.298.661,00	4.651.232.092,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**		
✓ Jasa Giro	1.107.010.552,97	1.409.370.558,85,,00
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.060.000,00
✓ Pendapatan Bunga	1.730.615.805,03,00	2.569.603.891,96
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.501.199.889,62	1.901.191.677,66
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.163.618,64	1.129.571.079,00
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	89.298.270,00	47.775.328,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	89.203.874,00	50.730.031,00
✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	460.266.303,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	6.596.479.346,20	255.540.854,20,00
✓ Pendapatan BLUD	121.624.845,90	19.240.841.228,57
➢ **Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat**		
✓ Dana Perimbangan	1.190.316.023.461,00	1.061.617.991.538,00
✓ Dana Desa	191.070.627.684,00	238.354.154.749,00
✓ Insentif Fiskal	7.207.988.000,00	0,00
➢ **Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah**		
✓ **Pendapatan Bagi Hasil**		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.214.084.364,00	9.018.711.609,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	4.618.597.737,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.579.919.457,00	5.126.042.520,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.472.502,00	6.795.599,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.679.031.822,00	22.191.553.056,00
✓ **Bantuan Keuangan**		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.203.134.000,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**		
✓ **Lain-Lain Pendapatan**		
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	66.914.151.321,00
✓ **Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**		

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.809.640.585,00	21.441.506.288,00
Jumlah	**1.518.461.065.316,36**	**1.484.282.514.127,18**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Pembayaran Belanja Pegawai**		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	604.104.904.462,00	549.399.586.183,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	137.121.288.544,00	2.209.200.000,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	67.471.653.670,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.009.046.054,00	15.844.500.050,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	132.880.015,00	24.185.711,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488.960.000,00	231.360.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	12.505.774.737,00	13.696.132.560,00
➢ **Pembayaran Belanja Barang dan Jasa**		
✓ Belanja Barang	129.809.764.160,52	114.227.380.674,00
✓ Belanja Jasa	112.589.795.554,00	102.532.542.224,00
✓ Belanja Pemeliharaan	6.169.056.908,00	5.217.405.191,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	36.288.840.010,00	49.000.748.872,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.129.557.207,98	7.368.439.871,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	65.305.694.001,00	66.099.001.895,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.821.799.816,00	10.006.752.498,00
➢ **Pembayaran Belanja Hibah**		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	64.207.971.024,00
✓ Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	373.000.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.442.236.000,00	3.055.000.000,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	604.437.927,00	531.837.904,00
➢ **Pembayaran Belanja Bantuan Sosial**		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	620.000.000,00	475.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	30.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	35.500.000,00	25.000.000,00
➢ **Pembayaran Belanja Tak Terduga**		
✓ Belanja Tak Terduga	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil**		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.157.963.398,00	548.101.219,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan**		
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	191.070.627.684,00	238.354.154.749,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.895.940.400,00	86.714.413.399,00
Jumlah	**1.439.374.742.278,50**	**1.398.671.990.402,00**

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk

meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Timorr Tengah Selatan selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	377.332.750,00	468.022.050,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	126.632.269.348,00	166.227.066.280,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(126.254.936.598,00)**	**(165.759.044.230,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Pencairan Dana Cadangan**		
✓ Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
➢ **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**		
✓ Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	15.366.750,00	18.171.250,00
✓ Hasil Penjualan Ternak Potong	0,00	13.000.000,00
✓ Hasil Penjualan Ternak Lainnya	3.750.000,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Tanaman	0,00	71.266.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	358.216.000,00	365.584.800,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lain - Lain	0,00	0,00
➢ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**		
✓ Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**377.332.750,00**	**468.022.050,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Perolehan Tanah**		
✓ Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	198.757.000,00
➢ **Perolehan Peralatan dan Mesin**		
✓ Belanja Modal Alat Besar	2.166.136.500,00	1.347.335.900,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	7.223.476.700,00	9.640.700.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	60.594.900,00	7.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	84.989.925,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.628.351.070,00	2.859.056.102,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	863.217.250,00	304.941.850,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.835.394.326,00	6.430.172.531,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	1.139.170.081,00	561.635.000,00
✓ Belanja Modal Komputer	17.055.961.954,00	5.775.541.885,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	48.186.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pengeboran	138.639.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.233.883.800,00	389.399.550,00
✓ Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.999.300,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	920.063.763,00
➢ **Perolehan Gedung dan Bangunan**		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	60.730.711.784,00	33.639.921.035,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	659.109.475,00	655.651.675,00
➢ **Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.770.487.423,00	77.089.068.774,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	542.802.140,00	13.970.925.525,00
✓ Belanja Modal Instalasi	899.000.000,00	5.023.299.950,00
✓ Belanja Modal Jaringan	1.675.900.200,00	7.117.640.490,00
➢ **Perolehan Aset Tetap Lainnya**		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	315.588.900,00	247.769.250,00
➢ **Perolehan Aset Lainnya**		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	598.354.620,00	0,00
Jumlah	**126.632.269.348,00**	**166.227.066.280,00**

5.5.3 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	119.364.252.985,00	113.490.123.542,80
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	117.791.283.507,80	110.699.659.421,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**1.572.969.477,20**	**2.790.464.121,80**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**		
✓ Iuran Wajib Pegawai	30.731.079.379,00	29.587.509.309,00
✓ Pajak Penghasilan	10.106.809.755,00	11.259.329.845,74
✓ Pajak Pertambahan Nilai	18.112.659.739,00	19.675.004.803,06
✓ Asuransi Kesehatan	18.702.440.930,00	18.286.783.707,00
✓ Bulog	37.865.224.600,00	31.242.944.380,00
✓ Iuran Jaminaa Kecelakaan Kerja	961.572.014,00	859.664.068,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Iuran Jaminan Kematian	2.884.466.568,00	2.578.887.430,00
Jumlah	**119.364.252.985,00**	**113.490.123.542,80**

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD SoE.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**		
✓ Iuran Wajib Pegawai	30.731.079.379,00	29.587.509.309,00
✓ Pajak Penghasilan	10.101.782.064,74	11.258.160.187,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	18.118.776.502,06	19.668.888.040,00
✓ Asuransi Kesehatan	18.702.440.930,00	18.286.783.707,00
✓ Bulog	36.291.166.050,00	28.459.766.680,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	961.572.014,00	859.664.068,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	2.884.466.568,00	2.578.887.430,00
Jumlah	**117.791.283.507,80**	**110.699.659.421,00**

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD SoE.

5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	79.086.323.037,86	85.610.523.725,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(126.254.936.598,00)	(165.759.044.230,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.572.969.477,20	2.790.464.121,80
Jumlah	**(45.595.644.082,94)**	**(77.358.056.383,02)**

5.5.5 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	65.203.230.179,16	142.492.185.166,56
Kas di Bendahara Penerimaan	826.618,00	3.863.576,99
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.059.007.568,00	146.970.809,00
Kas di BLUD	1.084.341.559,84	6.459.162.730,47
Kas Dana BOSP	2.586.027.871,52	1.770.878.445,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.012.745.245,00	4.034.241.001,00
Kas Lainnya	0,00	522.780.500,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.003.342.759,00	5.625.190.954,00
Jumlah	**83.949.521.800,52**	**161.055.273.183,54**

5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dari Kas BOK Puskesmas	0,00	252.305.000,00
Jumlah	**0,00**	**252.305.000,00**

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00
Kas di BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
Kas Dana BOS	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52
Kas Dana Kapitasi di FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00
Jumlah	**38.353.877.717,58**	**83.949.521.800,52**

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.5*** di atas.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	2.432.885.928.524,15	2.223.702.565.429,83

Saldo Ekuitas Awal senilai Rp2.432.885.928.524,15 adalah nilai awal ekuitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 yang merupakan nilai ekuitas akhir tahun sebelumnya dan ekuitas awal Tahun 2024 senilai Rp2.223.702.565.429,83 merupakan nilai ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai ekuitas akhir tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan senilai Rp209.183.363.094,32 atau 9,41% dari nilai ekuitas awal per 31 Desember 2024. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) -LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) – LO	(80.658.524.141,46)	(54.448.008.685,66)

Penurunan nilai ekuitas pada tahun 2025 disebabkan nilai Defisit LO senilai Rp80.658.524.141,46. Nilai Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 yang diakui senilai Rp80.658.524.141,46 mengalami peningkatan senilai Rp26.210.515.455,80 atau 48,14% jika dibandingkan dengan nilai Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 yang diakui senilai Rp54.448.008.685,66. Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Timor Tegah Selatan Tahun 2025 Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *poin 5.4.6*.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas atas Kas	0,00	252.305.000,00
Koreksi Ekuitas atas Piutang	(79.026.427,00)	(177.731.100,00)
Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang	(1.682.062.673,61)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Investasi	(1,00)	(298.492.062,00)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	4.220.263.952,00	12.266.058.510,01
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.861.692.277,24)	249.676.765.370,24
Koreksi Ekuitas atas Aset Lain-lain	(1.701.566.193,00)	2.038.108.967,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja	(345.639.153,00)	71.841.440,00
Koreksi Ekuitas atas Utang Jangka Pendek Lainnya	1.288.940.965,00	(197.484.345,28)
Jumlah Dampak Kumulatif	**(160.781.807,85)**	**263.631.371.779,97**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar yang siginifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban di antaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas Piutang Lain-Lain PAD senilai (Rp79.026.427,00) merupakan koreksi atas Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Sewa Rumah Dinas senilai (Rp508.362,00) dan koreksi Piutang Pendapatan denda atas keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan senilai (Rp78.518.065,00);
2. Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang senilai (Rp1.682.062.673,61) merupakan Koreksi saldo awal akibat lebih saji penyisihan piutang 2024 karena adanya perbedaan cara perhitungan penyisihan piutang senilai Rp125.835.887,00 dan Koreksi saldo awal akibat Kurang Saji atas Penyisihan Piutang Tahun 2024 yang belum memperhitungkan penyisihan atas nilai piutang tahun di bawah 2017 senilai (Rp1.807.898.560,61);
3. Koreksi Ekuitas atas Investasi senilai (Rp1,00) merupakan koreksi saldo awal akibat perbedaan nilai Investasi pada PDAM Kab TTS yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Auditor Independen PDAM Kab TTS Tahun 2025;
4. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap senilai Rp4.220.263.952,00 merupakan koreksi ekuitas dari mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang berakibat pada pengurangan dan penambahan nilai Ekuitas;

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Tanah	0,00	1.369.688.120,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	15.037.838,00	2.528.015.534,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Gedung dan Bangunan	126.285.400,00	5.243.127.286,01
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.078.940.714,00	3.134.547.070,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	0,00	(9.319.500,00)
Jumlah	**4.220.263.952,00**	**12.266.058.510,01**

5. Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai (Rp1.861.692.277,24) merupakan koreksi ekuitas dari mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang berakibat pada pengurangan dan penambahan nilai Ekuitas;
6. Koreksi Ekuitas atas Aset Lain-lain senilai (Rp1.701.566.193,00) merupakan koreksi atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang baru dicatat, dan Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan Penyusutan Aset Rusak Berat;
7. Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja senilai (Rp345.639.153,00) merupakan koreksi atas pengakuan utang belanja beasiswa terkait kerjasama pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Politeknik Keuangan Negara STAN yang belum dibayar; dan
8. Koreksi Ekuitas atas Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp1.288.940.965,00 merupakan koreksi penghapusan Utang Jangka Pendek Lainnya yang sudah dibayarkan di tahun yang lalu namun belum dilakukan penghapusan/ koreksi.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Uraian	Tahun2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	2.352.066.622.574,84	2.432.885.928.524,15

Saldo Ekuitas Akhir senilai Rp2.352.066.622.574,84 adalah total ekuitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan ekuitas akhir Tahun 2024 senilai Rp2.432.885.928.524,15 merupakan nilai total ekuitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2024. Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.819.305.949,31 atau 3,32% dari nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024. Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *poin 5.3.3.*

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, bagian Selatan berbatas dengan laut Timor, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu dan di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 3.947 KM^2 atau 394.700 Ha.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lain. Demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Secara administratif Kabupaten Timor Tengah Selatan dibagi menjadi 32 Kecamatan yang terdiri dari 266 Desa dan 12 Kelurahan.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain:

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tantang Keuangan Negara;
e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
f. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
l. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
m. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Tahun 36 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

o. Perda Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Perbup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6.4 Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja

Unit Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari: 22 (Dua Puluh Dua) Dinas, 2 (Dua) Sekretariat, 7 (Tujuh) Badan, 9 (Sembilan) Bagian, 1 (Satu) Kepala Daerah/Wakil, 1 (Satu) DPRD, BLUD RSUD, Inspektorat, Satuan Pol PP dan 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan.

BLUD RSUD SoE telah menyajikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor Independen atas BLUD RSUD SoE dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

6.5 Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan pengalihan status dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 4 tahun 2022 penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

PDAM Kab TTS telah menyajikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sujarno dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan pada Suatu Hal pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk pertama kalinya oleh PDAM Kab TTS pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Laporan Auditor Independen atas PDAM Kab TTS dapat dilihat pada *Lampiran 34*.

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 yang telah disajikan sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan demi terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, Pemerintah menyampaikan terima kasih.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

REK	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2025
	PIUTANG PAJAK DAERAH				
1 . 1 . 3 . 06 . 01 . 0001	Piutang Pajak Hotel	15.783.800,00	0,00	0,00	15.783.800,00
1 . 1 . 3 . 07 . 05 . 0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	46.225.449,00	0,00	0,00	46.225.449,00
1 . 1 . 3 . 08 . 07 . 0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.780.000,00	0,00	0,00	9.780.000,00
1 . 1 . 3 . 09 . 01 . 0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	984.072.636,81	194.333.498,00	232.605.742,00	945.800.392,81
1 . 1 . 3 . 09 . 02 . 0001	Piutang Pajak Reklame Kain	44.623.727,15	461.413.750,00	428.172.350,00	77.865.127,15
1 . 1 . 3 . 09 . 03 . 0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	950.000,00	950.000,00	1.500.000,00
1 . 1 . 3 . 09 . 05 . 0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan	0,00	2.306.800,00	1.255.600,00	1.051.200,00
1 . 1 . 3 . 10 . 02 . 0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	470.507.995,00	5.036.115.565,00	4.989.930.770,00	516.692.790,00
1 . 1 . 3 . 15 . 01 . 0001	Piutang PBBP2	5.470.147.663,00	4.866.170.597,00	4.641.835.179,00	5.694.483.081,00
	Jumlah	**7.042.641.270,96**	**10.561.290.210,00**	**10.294.749.641,00**	**7.309.181.839,96**
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH				
1 . 1 . 4 . 01 . 05 . 0003	Piutang Retribusi Kios	3.217.663.881,00	989.767.476,00	758.267.411,00	3.449.163.946,00
1 . 1 . 4 . 02 . 01 . 0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	143.879.470,00	297.839.900,00	283.432.400,00	158.286.970,00
1 . 1 . 4 . 02 . 01 . 0003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	371.226.018,00	189.638.888,00	128.949.459,00	431.915.447,00
1 . 1 . 4 . 02 . 01 . 0006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	92.410.000,00	0,00	0,00	92.410.000,00
	Jumlah	**3.825.179.369,00**	**1.477.246.264,00**	**1.170.649.270,00**	**4.131.776.363,00**
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
1 . 1 . 6 . 01 . 06 . 0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	128.026.960,00	0,00	0,00	128.026.960,00
1 . 1 . 6 . 07 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Bunga	319.870,00	0,00	0,00	319.870,00
1 . 1 . 6 . 11 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	109.858.677,53	0,00	78.518.065,00	31.340.612,53
1 . 1 . 6 . 15 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	219.959,00	0,00	0,00	219.959,00
1 . 1 . 6 . 15 . 03 . 0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	360.800.260,00	0,00	0,00	360.800.260,00
1 . 1 . 6 . 18 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00

REK	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2025
	Jumlah	**6.736.652.726,53**	**4.059.962.000,00**	**6.215.945.065,00**	**4.580.669.661,53**
	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH				
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	602.527.482,00	0,00	602.527.482,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.259.838.383,00	0,00	2.259.838.383,00	0,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.548.625,00	52.461,00	1.548.625,00	52.461,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	4.101.416.185,00	0,00	4.101.416.185,00
	Jumlah	**2.261.387.008,00**	**4.703.996.128,00**	**2.261.387.008,00**	**4.703.996.128,00**
	PIUTANG LAINNYA				
1 . 1 . 9 . 03 . 01 . 0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	1.650.000,40	0,00	0,00	1.650.000,40
1 . 1 . 9 . 03 . 02 . 0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.650.000,40**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,40**
	TOTAL PIUTANG	**19.867.510.374,89**	**20.802.494.602,00**	**19.942.730.984,00**	**20.727.273.992,89**

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2025

REK	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2025	PENYISIHAN PIUTANG 2025	NILAI BUKU
	PIUTANG PAJAK DAERAH			
1 . 1 . 3 . 06 . 01 . 0001	Piutang Pajak Hotel	15.783.800,00	15.783.800,00	0,00
1 . 1 . 3 . 07 . 05 . 0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	46.225.449,00	46.225.449,00	0,00
1 . 1 . 3 . 08 . 07 . 0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00
1 . 1 . 3 . 09 . 01 . 0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	945.800.392,81	928.340.519,81	17.459.873,00
1 . 1 . 3 . 09 . 02 . 0001	Piutang Pajak Reklame Kain	77.865.127,15	44.789.934,15	33.075.193,00
1 . 1 . 3 . 09 . 03 . 0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
1 . 1 . 3 . 09 . 05 . 0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan	1.051.200,00	5.256,00	1.045.944,00
1 . 1 . 3 . 10 . 02 . 0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	516.692.790,00	2.583.463,95	514.109.326,05
1 . 1 . 3 . 15 . 01 . 0001	Piutang PBBP2	5.694.483.081,00	4.368.045.998,46	1.326.437.082,54
	Jumlah	**7.309.181.839,96**	**5.416.304.421,37**	**1.892.877.418,59**
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH			
1 . 1 . 4 . 01 . 05 . 0003	Piutang Retribusi Kios	3.449.163.946,00	3.215.579.267,36	233.584.678,64
1 . 1 . 4 . 02 . 01 . 0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	158.286.970,00	136.301.507,50	21.985.462,50
1 . 1 . 4 . 02 . 01 . 0003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	431.915.447,00	259.309.925,50	172.605.521,50
1 . 1 . 4 . 02 . 01 . 0006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	92.410.000,00	92.410.000,00	0,00
	Jumlah	**4.131.776.363,00**	**3.703.600.700,36**	**428.175.662,64**
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
1 . 1 . 6 . 01 . 06 . 0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	128.026.960,00	128.026.960,00	0,00
1 . 1 . 6 . 07 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Bunga	319.870,00	0,00	319.870,00
1 . 1 . 6 . 11 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	31.340.612,53	15.962,16	31.324.650,37
1 . 1 . 6 . 15 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	219.959,00	0,00	219.959,00
1 . 1 . 6 . 15 . 03 . 0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	360.800.260,00	0,00	360.800.260,00
1 . 1 . 6 . 18 . 01 . 0001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.059.962.000,00	20.299.810,00	4.039.662.190,00

REK	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2025	PENYISIHAN PIUTANG 2025	NILAI BUKU
	Jumlah	**4.580.669.661,53**	**148.342.732,16**	**4.432.326.929,37**
	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH			
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	602.527.482,00	0,00	602.527.482,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	52.461,00	0,00	52.461,00
1 . 1 . 8 . 01 . 01 . 0005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	4.101.416.185,00	0,00	4.101.416.185,00
	Jumlah	**4.703.996.128,00**	**0,00**	**4.703.996.128,00**
	PIUTANG LAINNYA			
1 . 1 . 9 . 03 . 01 . 0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	1.650.000,40	1.650.000,40	0,00
1 . 1 . 9 . 03 . 02 . 0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.650.000,40**	**1.650.000,40**	**0,00**
	TOTAL PIUTANG	**20.727.273.992,89**	**9.269.897.854,29**	**11.457.376.138,60**

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO INVESTASI DANA BERGULIR 31 DESEMBER 2024	MUTASI TAHUN 2025		SALDO INVESTASI DANA BERGULIR 31 DESEMBER 2025	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV 2025
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		LANCAR (0,5%)	KURANG LANCAR (10%)	DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)		
1		-			-					-	-
2		-			-					-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	1995	PD MUTIS JAYA	Perda No.4 Tahun 1999	-	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00				20.000.000,00
	1996		Tagl 30 Juni 1999			20.000.000,00	-	20.000.000,00				20.000.000,00
	1997					20.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00				35.000.000,00
	1998					35.000.000,00	60.000.000,00	95.000.000,00				95.000.000,00
	1999					95.000.000,00	40.000.000,00	135.000.000,00				135.000.000,00
	2000					135.000.000,00	50.000.000,00	185.000.000,00				185.000.000,00
	2001					185.000.000,00	250.000.000,00	435.000.000,00				435.000.000,00
	2002					4.350.000.000,00	150.000.000,00	4.500.000.000,00				4.500.000.000,00
	2003					585.000.000,00	300.000.000,00	885.000.000,00				885.000.000,00
	2004					885.000.000,00	250.000.000,00	1.135.000.000,00				1.135.000.000,00
	2005					1.135.000.000,00	200.000.000,00	1.335.000.000,00				1.335.000.000,00
	2006					1.335.000.000,00	100.000.000,00	1.435.000.000,00				1.435.000.000,00
	2011		Perda No.50 Tahun 2011			1.435.000.000,00	500.000.000,00	1.935.000.000,00				1.935.000.000,00
	2012					1.935.000.000,00	700.000.000,00	2.635.000.000,00		(1.553.089.119,17)		1.081.910.880,83
	2013					1.081.910.880,83	-	1.081.910.880,83		-		1.081.910.880,83
	2014					1.081.910.880,83	-	1.081.910.880,83				1.081.910.880,83
	2015					1.081.910.880,83	-	1.081.910.880,83				1.081.910.880,83
	2016					1.081.910.880,83	-	1.081.910.880,83				1.081.910.880,83
	2017					1.081.910.880,83	-	1.081.910.880,83				1.081.910.880,83
	2018					1.081.910.880,83	-	1.081.910.880,83				**1.081.910.880,83**
	2020					1.081.910.880,83	-	1.081.910.880,83		(1.081.910.880,83)		-
2	2001	PDAM SOE	Perda No.7 Tahun 2004	-	3.525.494.910,00	3.525.494.910,00	386.925.510,00	3.912.420.420,00	-	(328.911.923,00)	-	3.583.508.497,00
	2002		Tagl 30 Juni 2004			3.583.508.497,00	-	3.583.508.497,00	-	(374.783.820,00)	-	3.208.724.677,00
	2003					3.208.724.677,00	200.000.000,00	3.408.724.677,00	-	(431.615.286,00)	-	2.977.109.391,00
	2004					2.977.109.391,00	500.000.000,00	3.477.109.391,00	-	(625.888.649,00)	31.000.000,00	2.820.220.742,00
	2005					2.820.220.742,00	300.000.000,00	3.120.220.742,00	-	(188.439.619,00)	69.000.000,00	2.862.781.123,00
	2006					2.862.781.123,00	200.000.000,00	3.062.781.123,00	-	(12.896.841,00)	6.000.000,00	3.043.884.282,00
	2007					2.989.884.282,00	300.000.000,00	3.289.884.282,00	-	(286.021.357,00)	35.000.000,00	2.968.862.925,00
	2008					2.968.862.925,00	1.000.000.000,00	3.968.862.925,00	-	(133.747.244,00)	70.000.000,00	3.765.115.681,00
	2009					3.765.115.681,00	-	3.765.115.681,00	-	(113.520.484,00)	70.000.000,00	3.581.595.197,00
	2010					3.581.595.197,00	-	3.581.595.197,00	-	(51.545.209,00)	30.000.000,00	3.500.049.988,00
	2011		Perda No.50 Tahun 2011			3.500.049.988,00	200.000.000,00	3.700.049.988,00		(410.045.144,00)	-	3.290.004.844,00
	2012					3.290.004.844,00	600.000.000,00	3.890.004.844,00		24.994.922,00		3.914.999.766,00
	2013					3.914.999.766,00	200.000.000,00	4.114.999.766,00		55.210.096,00		4.170.209.862,00
	2014					4.170.209.862,00	-	4.170.209.862,00		62.496.411,00		4.232.706.273,00
	2015					4.232.706.273,00	-	4.232.706.273,00		(324.305.099,00)		3.908.401.174,00
	2016					3.908.401.174,00	-	3.908.401.174,00		6.294.948,00		3.914.696.122,00
	2017					3.914.696.122,00	-	3.914.696.122,00		(827.940.413,00)		3.086.755.709,00
	2019					3.086.755.709,00	-	3.086.755.709,00		(167.684.619,00)		2.919.071.090,00
	2020					2.919.071.090,00	-	2.919.071.090,00		6.813.539.382,00		9.732.610.472,00
	2021					9.732.610.472,00	-	9.732.610.472,00		(722.801.092,00)		9.009.809.380,00
	2022					9.732.610.472,00	-	9.732.610.472,00		(722.801.092,00)		9.009.809.380,00
	2023					9.009.809.380,00	-	9.009.809.380,00		184.924.660,00		9.194.734.040,00
	2024					9.194.734.040,00	-	9.194.734.040,00		(398.083.854,00)	280.063.153,00	9.076.713.339,00
	2025					9.076.713.339,00	-	9.076.713.339,00		(70.015.789,00)	233.681.708,00	**9.240.379.258,00**
3	2002	PT BPD NTT	-	-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00				150.000.000,00

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2004					150.000.000,00	400.000.000,00	550.000.000,00				550.000.000,00
	2004					550.000.000,00	696.290.000,00	1.246.290.000,00			-	1.246.290.000,00
	2005					1.246.290.000,00	790.850.000,00	2.037.140.000,00				2.037.140.000,00
	2006					2.037.140.000,00	303.700.000,00	2.340.840.000,00				2.340.840.000,00
	2006					2.340.840.000,00	500.000.000,00	2.840.840.000,00				2.840.840.000,00
	2006					2.840.840.000,00	1.500.000.000,00	4.340.840.000,00				4.340.840.000,00
	2006					4.340.840.000,00	1.500.000.000,00	5.840.840.000,00				5.840.840.000,00
	2007					5.840.840.000,00	1.000.000.000,00	6.840.840.000,00				6.840.840.000,00
	2011		Perda No.50 Tahun 2011			6.840.840.000,00	3.000.000.000,00	9.840.840.000,00				9.840.840.000,00
	2012					9.840.840.000,00	5.000.000.000,00	14.840.840.000,00				14.840.840.000,00
	2013					14.840.840.000,00	2.000.000.000,00	16.840.840.000,00				16.840.840.000,00
	2014					16.840.840.000,00	-	16.840.840.000,00				16.840.840.000,00
	2015		Perda No.4 Tahun 2015			16.840.840.000,00	30.000.000.000,00	46.840.840.000,00				46.840.840.000,00
	2016					46.840.840.000,00	15.000.000.000,00	61.840.840.000,00				61.840.840.000,00
	2017					61.840.840.000,00	15.000.000.000,00	76.840.840.000,00				76.840.840.000,00
	2020					76.840.840.000,00	5.224.930.000,00	82.065.770.000,00				82.065.770.000,00
						82.065.770.000,00	12.000.000.000,00	94.065.770.000,00				94.065.770.000,00
	2023					94.065.770.000,00	6.000.000.000,00	100.065.770.000,00				100.065.770.000,00
	2024					100.065.770.000,00	-	100.065.770.000,00				100.065.770.000,00
	2025					100.065.770.000,00	-	100.065.770.000,00				100.065.770.000,00
JUMLAH					3.545.494.910,00	109.142.483.339,00	-	109.142.483.339,00	-	(70.015.789,00)	233.681.708,00	109.306.149.258,00

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2025
1	2	3	4	5	6
1	Aset Tetap Tanah	409.633.141.643,00	485.136.000,00	16.420.886.327,00	393.697.391.316,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	537.515.119.535,00	56.787.888.027,00	20.140.297.446,00	574.162.710.116,00
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.096.560.967.065,16	82.228.491.573,00	21.403.071.460,83	1.157.386.387.177,33
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.319.337.081.738,94	60.589.049.779,00	7.554.958.022,15	1.372.371.173.495,79
5	Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	37.321.406.644,00	7.285.721.353,00	6.678.933.540,00	37.928.194.457,00
6	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan	38.720.009.935,70	23.635.459.392,00	31.018.076.860,53	31.337.392.467,17
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.288.667.523.503,77)	(162.817.607.787,44)	641.520.663,28	(1.450.843.610.627,93)
	JUMLAH ASET TETAP	**2.150.420.203.058,03**	**68.194.138.336,56**	**103.857.744.319,79**	**2.116.039.638.401,36**

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5
1	Aset Tetap Tanah	393.697.391.316,00	-	393.697.391.316,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	574.162.710.116,00	(457.780.162.687,18)	116.382.547.428,82
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.157.386.387.177,33	(243.868.195.982,66)	913.518.191.194,67
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.372.371.173.495,79	(749.195.251.958,09)	623.175.921.537,70
5	Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	37.928.194.457,00	-	37.928.194.457,00
6	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan	31.337.392.467,17	-	31.337.392.467,17
	JUMLAH	**3.566.883.249.029,29**	**(1.450.843.610.627,93)**	**2.116.039.638.401,36**

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2025
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.883.844.691,48	18.541.931.699,00	6.598.821.146,53	20.826.955.243,95
2	Dinas Kesehatan	5.628.767.400,00	655.335.600,00	3.396.437.247,00	2.887.665.753,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.341.689.659,47	2.570.624.647,00	20.536.618.467,00	3.375.695.839,47
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.380.971.030,75	575.765.397,00	486.200.000,00	1.470.536.427,75
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	151.743.222,00	-	151.743.222,00
6	Dinas Perhubungan	-	347.172.236,00	-	347.172.236,00
7	Dinas Perikanan	424.390.204,00	28.382.550,00	-	452.772.754,00
8	Dinas Pariwisata	485.722.090,00	24.923.940,00	-	510.646.030,00
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	177.450.000,00	169.457.607,00	-	346.907.607,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	185.945.350,00	-	185.945.350,00
11	Sekretariat DPRD	272.800.000,00	-	-	272.800.000,00
12	Kec. Kota SoE	73.750.000,00	384.177.144,00	-	457.927.144,00
13	Badan Pendapatan Daerah	50.624.860,00	-	-	50.624.860,00
	JUMLAH	38.720.009.935,70	23.635.459.392,00	31.018.076.860,53	31.337.392.467,17

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XV Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN ASET LAINNYA	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Jangka Panjang	327.600.120,00	-	1.000.000,00	326.600.120,00
2	Kemitraan dengan pihak ketiga	6.729.104.028,00	-	112.548.178,00	6.616.555.850,00
3	Aset Tidak Berwujud	305.948.387,00	1.663.446.902,00	-	1.969.395.289,00
4	Aset Lain-lain	35.782.152.330,40	1.084.465.841,51	287.153.263,37	36.579.464.908,54
	TOTAL	43.144.804.865,40	2.747.912.743,51	400.701.441,37	45.492.016.167,54

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XVI Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DAFTAR DANA CADANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUMLAH	-	-	-	-	-	-

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XVII Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN ASET LAINNYA	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.793.979.908,26	119.364.252.985,00	117.791.283.507,80	5.366.949.385,46
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.712.328,77	-	-	1.712.328,77
3	Utang Belanja	6.411.596.143,00	10.980.818.763,00	5.638.735.098,00	11.753.679.808,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.784.607.367,94	2.403.111.253,00	3.453.225.861,00	11.734.492.759,94
	TOTAL	22.991.895.747,97	132.748.183.001,00	126.883.244.466,80	28.856.834.282,17

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XVIII Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TANGGAL /TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN /NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp /Valas)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (Tahun)	PRESENTASE BUNGA PINJAMAN	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	
						%	POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)	BUNGA (Rp)	DAERAH	BUNGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XIX Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN (UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	FISIK Bak Penampung Dinas PK	5.490.000,00				5.490.000,00
	SD INPRES SALBAIT	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES SIKAM	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES SISO	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES PANITE 2	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES OINLASI	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES TOBU	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES USAPIKOM	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES TAEHUE	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES TANAH MERAH	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES AJAOBTOMAS	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES MAULEUM	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES NIFUBOKO	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES NAIMETAN	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES BESAKOLKA	385.500,00				385.500,00
	SD INPRES SOE	385.500,00				385.500,00
	SD NEGERI OEBEKO	385.500,00				385.500,00
	SD NEGERI OENINO	385.500,00				385.500,00
2	Konstrusi Konstruksi Pagar SD Inpres Oelet	4.235.000,00				4.235.000,00
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SMP Negeri Noemuke	224.420.000,00				224.420.000,00
4	Konstruksi Pagar					
	SD Inpres Nunumeu	4.990.000,00				4.990.000,00
5	Bangunan Gedung Perpustakaan (Paket Ta. 2021)					
	SD Negeri Popnae	35.000,00				35.000,00
6	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	76.772.941,80				76.772.941,80
7	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	21.206.157,40				21.206.157,40
	2023					
8	Bangunan Lab. Komputer SD Inpres Naptoen	14.897.567,00		14.897.567,00		-
9	Bangunan Perpustakaan SD Inpres Naptoen	14.897.567,00		14.897.567,00		-
10	Bangunan UKS SD Inpres Naptoen	14.897.566,00		14.397.566,00		500.000,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
11	KDP Bangunan UKS SD I. Oinlasi	12.590.903,00		12.590.903,00		-
12	KDP Banguan Jamban SD Negeri Patal	9.843.521,00		9.843.521,00		-
13	KDP Bangunan UKS SD Negeri Patal	43.688.346,40		43.688.346,00		0,40
	2024					
	SD Inpre Oinlasi:					
13	Bangunan Lab. Komputer	12.910.775,00		12.910.775,00		-
14	Bangunan UKS	319.872,00		276.772,00		43.100,00
15	Bangunan Mess Guru	12.910.775,00		12.910.775,00		-
16	SD Inpres Oinlasi	12.910.775,00		12.910.775,00		-
	SMP N Kiubaat:					
15	Pagar	17.970.000,00		17.970.000,00		-
	SD NEGERI OEMOL:					
16	PEMBANGUNAN 1 RUANG GURU	1.234.354,00		1.234.354,00		-
17	PEMBANGUNAN 6 RUANG KELAS	7.491.171,00		7.491.171,00		-
18	PEMBANGUNAN 1 RUANG LAB. KOMPUTER	1.240.438,00		1.240.438,00		-
19	PEMBANGUNAN 1 RUANG PERPUSTAKAAN	1.150.952,00		1.150.952,00		-
20	PEMBANGUNAN 1 RUANG UKS	1.089.460,00		1.089.460,00		-
	SD INPRES SOE UN					
22	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	2.122.820,00		2.122.820,00		-
	SD NEGERI BANLI					
23	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	73.399.106,00		73.399.106,00		-
	SD NEGERI FATUNAKE					
24	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	981.653,00		981.653,00		-
	SD NEGERI SAUBALAN					
25	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	7.916.500,00		7.916.500,00		-
	SMP NEGERI TLIU					
26	PEMBANGUNAN 2 RKB	4.149.880,00		4.149.880,00		-
27	PEMBANGUNAN 1 RUANG LAB IPA	6.805.104,00		6.805.104,00		-
28	PEMBANGUNAN RUANG PERPUST	7.765.000,00		7.765.000,00		-
29	PEMBANGUNAN RUANG LAB KOMPUTER	6.413.280,00		6.413.280,00		-
30	PEMBANGUNANRUANG TATA USAHA	9.189.904,00		9.189.904,00		-
31	PEMBANGUNANRUMAH DINAS GURU	13.430.304,00		13.430.304,00		-
	SMP SATU ATAP FOTILO					
31	PEMBANGUNAN RUANGLAB KOMPUTER	120.096.150,00		120.096.150,00		-
32	PEMBANGUNANRUANG UKS	85.071.400,00		85.071.400,00		-
33	PEMBANGUNANRUMAH DINAS GURU	95.381.300,00		95.381.300,00		-
	SMP NEGERI FAUTMOLO					

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
34	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	14.717.459,00		14.717.459,00		-
	SMP NEGERI SUTUAL					
35	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	235.680,00		235.680,00		-
	SMP NEGERI SONAPOLEN					
36	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	4.641.700,00		4.641.700,00		-
	SMP NEGERI OEMAMAN					
37	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU	13.651.200,00		13.651.200,00		-
	TK Negeri Boking					
38	Pembangunan 1 RKB	15.510.657,00		15.510.657,00		-
	2025 (Gedung dan Bangunan)					
39	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SD Negeri Usapi Kec. Polen				19.967.050,00	19.967.050,00
40	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SD Negeri Kokfeu Kec. Mollo Utara				19.972.250,00	19.972.250,00
41	Pembangunan 3 Ruang Kelas SMP Negeri Noeliu, Kec. Oenino				41.175.000,00	41.175.000,00
42	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP Negeri Satap Hautimu, Kec. Amanuban Selatan				60.332.250,00	60.332.250,00
43	Pengawasan Pembangunan 2 Ruang Kelas SMP Negeri Kaeneno, Kec. Fautmolo				27.333.000,00	27.333.000,00
44	Pengawasan Pembangunan 3 Ruang Kelas SMP Negeri Noeliu, Kec. Oenino				32.360.000,00	32.360.000,00
45	Pengawasan Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP Negeri Satap Hautimu, Kec. Amanuban Selatan				27.251.000,00	27.251.000,00
46	Perencanaan Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP Negeri Satap Hautimu				17.843.000,00	17.843.000,00
	2025 (Konstruksi Dalam Pengerjaan)					
	Laboratorium Fisika Ipa Smp					
	Smp Negeri 1 Soe					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Smp Negeri 2 Soe					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Smp Negeri 3 Soe					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Smp Negeri Batu Putih					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Smp Negeri Satap Oebelo					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Smp Negeri 1 Amanuban Timur					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Smp Negeri Tunua					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Smp Negeri Oobibi					
	1. Kit Mekanika				5.171.900,00	5.171.900,00
	2. Kit Hidrostatika & Panas				2.750.430,00	2.750.430,00
	3. Kit Optika				2.592.750,00	2.592.750,00
	4. Kit Listrik & Magnet				4.815.520,00	4.815.520,00
	5. Alat Umum Fisika				8.794.400,00	8.794.400,00
	Laboratorium Biologi Ipa Smp					
	Smp Negeri 1 Soe					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00
	Smp Negeri 2 Soe					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
	Smp Negeri 3 Soe					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00
	Smp Negeri Batu Putih					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00
	Smp Negeri Satap Oebelo					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00
	Smp Negeri 1 Amanuban Timur					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00
	Smp Negeri Tunua					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00
	Smp Negeri Oobibi					
	1. Alat Bedah				16.830.740,00	16.830.740,00
	2. Preparat Kering				482.300,00	482.300,00
	3. Model				640.850,00	640.850,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
	4. Carta				5.167.860,00	5.167.860,00
	5. Kit Biologi.				1.419.250,00	1.419.250,00
	6. Kit Pencernaan :				1.477.250,00	1.477.250,00
	7. Awetan Spesimen				1.856.750,00	1.856.750,00
	Meubeler Uks Tk					
	Tk Negeri Nekmese Eno Napi					
	Ranjang Uks				1.431.900,00	1.431.900,00
	Meja Kerja Guru 1/2 Biro				1.942.500,00	1.942.500,00
	Kursi Kerja Stainless				1.498.500,00	1.498.500,00
	Lemari Obat				1.209.900,00	1.209.900,00
	Spon + Bantal				1.470.750,00	1.470.750,00
	Tk Negeri Nununamat					
	Ranjang Uks				1.431.900,00	1.431.900,00
	Meja Kerja Guru 1/2 Biro				1.942.500,00	1.942.500,00
	Kursi Kerja Stainless				1.498.500,00	1.498.500,00
	Lemari Obat				1.209.900,00	1.209.900,00
	Spon + Bantal				1.470.750,00	1.470.750,00
	Tk Negeri Oetnana					
	Ranjang Uks				1.431.900,00	1.431.900,00
	Meja Kerja Guru 1/2 Biro				1.942.500,00	1.942.500,00
	Kursi Kerja Stainless				1.498.500,00	1.498.500,00
	Lemari Obat				1.209.900,00	1.209.900,00
	Spon + Bantal				1.470.750,00	1.470.750,00
	JUMLAH	**1.005.225.738,60**	**-**	**660.980.039,00**	**684.894.200,00**	**1.029.139.899,60**
DINAS KESEHATAN						
1	Rehabilitasi Pagar Instalasi Farmasi	4.975.000,00				4.975.000,00
2	Rehabilitasi Instalasi Farmasi	9.970.000,00				9.970.000,00
3	Penambahan Ruangan Puskesmas Binaus	189.000,00				189.000,00
4	Rehabilitasi Gedung Puskesmas Hauhasi	13.000,00				13.000,00
5	Pembangunan Tembok Penahan Puskesmas Tetaf	7.915.000,00				7.915.000,00
6	Pengawasan Tembok Penahan Pus Noebana, Tetaf dan Pelataran Niki-niki	8.905.000,00				8.905.000,00
7	Pembukaan Lahan Baru/ Jalan Masuk ke RSP Boking	9.500.000,00				9.500.000,00
8	Rehab Rumah Paramedis Lotas	2.700.000,00				2.700.000,00
9	Pembangunan Ruang Perawatan Puskesmas Lotas	209.650.010,00				209.650.010,00
10	Pembanguan Pelataran dan Tembok Penahan Lotas	22.394.400,00				22.394.400,00
11	Pembangunan Rumah Paramedis Ayotupas	42.700.000,00		42.700.000,00		-
12	Perencanaan Rumah Sakit Pratama Boking	292.651.920,00				292.651.920,00
13	Pembangunan Rumah Dokter Oinlasi	12.810.000,00		12.810.000,00		-
14	Rehab Berat Rumah Paramedis Oinlasi	660.000,00		660.000,00		-
15	Pengawasan Rrehab Berat Rumah Dokter Polen	2.226.870,00				2.226.870,00
16	Pengawasan Pagar Puskesmas Polen	6.185.750,00				6.185.750,00
17	Pengawasan Prototype Puskesmas Panite	17.610.399,00				17.610.399,00
18	Pengawasan Rumarh Paramedis Panite	17.610.399,00				17.610.399,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
19	Pengawasan Ruang Ponek dan Selasar Kolbano	17.610.399,00				17.610.399,00
20	Pengawasan Rumah Paramedis Kolbano	17.610.399,00				17.610.399,00
21	Pengawasan Rumah Dokter Oinlasi	17.610.399,00				17.610.399,00
22	Pengawasan Ponek Puskesmas Oinlasi	17.610.399,00				17.610.399,00
23	Pengawasan Rumah Paramedis Oinlasi	17.610.399,00				17.610.399,00
24	Pengawasan Pagar Puskesmas Nunkolo	17.610.399,00				17.610.399,00
25	Pengawasan Rumah Paramedis Nunkolo	17.610.399,00				17.610.399,00
26	Pengawasan Ponek Nunkolo	17.610.399,00				17.610.399,00
27	Pengawasan Rumah Paramedis Kuanfatu	17.610.399,00				17.610.399,00
28	Pengawasan Ruang Perawatan Kuanfatu	17.610.399,00				17.610.399,00
29	Pengawasan Pagar Puskesmas Kuanfatu	17.610.399,00				17.610.399,00
30	Pengawasan Ruang Ponek Puaskesmas Kuanfatu	17.610.399,00				17.610.399,00
31	Pengadaan Alkes Sanitarian KITUntuk 5 Puskesmas	70.000,00				70.000,00
32	Pengadaan Pagar Puskesmas Boking	17.893.000,00				17.893.000,00
33	Pengadaan IPAL Puskesmas Hoibeti	1.936.900,00				1.936.900,00
34	Penyediaan IPAL Puskesmas Manufui	23.144.903,00				23.144.903,00
35	Penyediaan IPAL Puskesmas Hauhasi	23.261.269,00				23.261.269,00
36	Penyediaan Prasarana Air Bersih/ Sumur Bor Pusk. Manufui	9.923.780,00				9.923.780,00
37	Penyediaan Prasarana Air Bersih/ Sumur Bor Pusk. Hauhasi	9.943.939,00				9.943.939,00
38	Konstruksi Pagar Pus Sei	13.256.150,00				13.256.150,00
39	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen Pus Siso	25.080.000,00				25.080.000,00
40	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen Pus Nunuhkniti	23.154.050,00				23.154.050,00
41	Lanjutan Rumah Paramedis Pkm Kota Soe	2.458.600,00				2.458.600,00
42	Lanjutan Rumah Dokter Puskesmas Fatumnutu	938.000,00				938.000,00
43	Lanjutan Rumah Paramedis Puskesmas Fatumnutu	2.045.000,00				2.045.000,00
44	Lanjutan Rumah Dokter Puskesmas Kapan	306.000,00				306.000,00
45	Lanjutan Rumah Paramedis Puskesmas Kapan	3.714.000,00				3.714.000,00
46	Pemb. Rumah Bidan Puskesmas hauhasi	25.502.930,00				25.502.930,00
47	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pus Oenino	179.075.000,00				179.075.000,00
48	Renofasi Gudang Farmasi	3.948.450,00				3.948.450,00
49	Site Plan Kota SoE	3.949.800,00				3.949.800,00
		-				-
	Pengawasan	-				-
50	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pus Noemuke	109.063.333,00		109.063.333,00		-
51	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pus Boking	30.030.000,00				30.030.000,00
52	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pus Tobu	12.600.000,00		12.600.000,00		-
53	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pus Batuputih	5.453.167,00		5.453.167,00		-
54	Sideplan Puskesmas Oenino	3.966.700,00				3.966.700,00
55	Gedung Perawar Taneotob	51.850.000,00				51.850.000,00
56	Lanjutan Pembangunan Pagar Puskesmas Kolbano	9.729.312,00				9.729.312,00
57	Tembok Penahan IPAL Puskesmas Kuanfatu	5.735.000,00		5.735.000,00		-
58	IPAL Kuanfatu	337.751.585,00				337.751.585,00
59	Bangunan Pintu Gerbang Dinas Kesehatan	14.872.000,00				14.872.000,00
60	Bangunan Rumah Perawat Puskesmas Oinlasi	16.785.910,00				16.785.910,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
61	Bangunan Pagar Puskesmas Niki-niki	6.695.000,00				6.695.000,00
		-				-
	Perencanaan/ Pengawasan	-				-
62	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Lab PKM Kualin	24.631.200,00		24.631.200,00		-
63	Rehab Gedung Puskesmas Bati	1.778.634,00				1.778.634,00
64	Pengawasan Gedung Ptototipe Puskesmas Oinlasi	9.990.000,00				9.990.000,00
65	Pengadaan Sumur dengan Pompa Desa Tuafanu Kec. Kualin	15.912.082,84				15.912.082,84
		-				-
	2023	-				-
66	Pembangunan Rumah Bidan, Dokter dan Perawat Puskesmas Ayotupas (DAK)	1,00	(1,00)			-
67	TAMBAHAN RUANG SAMPAH MEDIS PUSKESMAS BATI (DAK)	4.158.850,00				4.158.850,00
68	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Lilo, Tauanas dan Desa Oeleu	(1,00)	1,00			-
69	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Sebot dan Desa Taiftob	1,00	(1,00)			-
70	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Pisan dan Desa Nifukiu	30.171.314,00				30.171.314,00
71	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Kampung baru dan Desa Kota Baru	41.426.586,00				41.426.586,00
72	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Tunbes, Nunbena dan Fetomone	(1,00)	1,00			-
73	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Tomanat dan Desa Tofen	37.482.981,00				37.482.981,00
74	Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Oni dan Desa Oemaman	(1,00)	1,00			-
75	Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Saubalan dan Desa Huetalan	(1,00)	1,00			-
76	Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Bena dan Desa Linamnutu	1,00	(1,00)			-
77	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Kokoi dan Desa Fat	(1,00)	1,00			-
78	Fisik Bangunan RS Pratama Kualin	(0,00)				(0,00)
79	Pengawasan Bangunan RS Pratama Kualin	138.039.600,00		138.039.600,00		-
80	DESAIN PERENCANAAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 5	277.100,00				277.100,00
81	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 1	19.828.325,00		19.828.325,00		-
82	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 2	19.592.925,00		19.592.925,00		-
83	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 3	14.906.537,00		14.906.537,00		-
84	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 4	9.937.692,00		9.937.692,00		-
85	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 5	9.200.401,00				9.200.401,00
86	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 6	2.510.773,00				2.510.773,00
87	PENGAWASAN SUMUR BOR (DAK) RSP KUALIN	25.026.703,00				25.026.703,00
88	PEMBANGUNAN PRASARANA PUSKESMAS LILANA (DAK) / IPAL	609.950.000,00		609.950.000,00		-
		-				-
	2024	-				-
89	Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Noemuke (Pokir) TA. 2024	9.705.000,00		9.705.000,00		-
90	Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Kolbano (Pokir) TA. 2024	8.857.325,00		8.857.325,00		-
91	Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Batuputih (Pokir) TA. 2024		8.862.500,00	8.862.500,00		-
	2025	-				-
92	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Prototype Lotas				53.800.035,00	53.800.035,00
93	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tuplopo				1.882.950,00	1.882.950,00
94	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tuplopo				26.166.000,00	26.166.000,00
95	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lotas				46.658.966,00	46.658.966,00
	JUMLAH	**2.887.509.340,84**	**8.862.502,00**	**1.053.332.604,00**	**128.507.951,00**	**1.971.547.189,84**

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
DINAS PUPR						
1	Peningkatan Ruas Jalan Oe'oh-Ayutupas	1,00				1,00
2	Rehab Saluran Got dan Deuker Kampung Mollo	4.707.435,00				4.707.435,00
3	Peningkatan Ruas Jalan Oehan-Oebaki	320.925,00				320.925,00
4	Perbaikan Sumber Mata Air Serdadu Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah	4.920.550,00				4.920.550,00
5	Pembetulan Alur Sungai Desa Noenoni	4.910.000,00				4.910.000,00
6	Pembentulan Alur Sungai Desa Tupan	4.922.500,00				4.922.500,00
7	Peningkatan Ruas jalan Bikium-Fatukoko	10.291.650,00				10.291.650,00
8	Peningkatan Ruas Jalan Sanbet-Oepuah	4.961.150,00				4.961.150,00
9	Peningkatan Ruas Jalan dalam Kota Panite (Arah SMA Negeri Panite)	16.379.000,00				16.379.000,00
10	Peningkatan Ruas Jalan Boebnoe-Fatutae (Desa Sunu Kecamatan Amanatun Selatan)	47.943.650,00				47.943.650,00
11	Peningkatan Ruas jalan Oehala	600,00				600,00
12	Pemeliharaan Ruas Jalan Oinlasi-Kot'olin	36.917.850,00				36.917.850,00
13	Peningkatan Ruas Jalan Pope-Kuanfatu	24.823.950,00				24.823.950,00
14	Peningkatan Ruas Jalan Bolaplelo-Noenoni	25.215.200,00				25.215.200,00
15	Peningkatan Ruas Jalan Ajaopenu-Nunbena	21.086.650,00				21.086.650,00
16	Peningkatan Ruas Jalan Sono-Sanbet	17.263.600,00				17.263.600,00
17	Peningkatan Ruas Jalan Ofu-Sei	4.918.200,00				4.918.200,00
18	Peningkatan Ruas Jalan Desa Tetaf RT Nifulina	9.864.800,00				9.864.800,00
19	Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Kuanfatu	9.644.900,00				9.644.900,00
20	Peningkatan Ruas Jalan Oebaha-Lino (desa baus)	14.759.000,00				14.759.000,00
21	Peningkatan Ruas Jalan Tumu-Noe'Okan	9.858.350,00				9.858.350,00
22	Peningkatan Ruas Jalan Lilo-Fotilo	12.311.800,00				12.311.800,00
23	Peningkatan Ruas Jalan Desa Nenas	22.359.150,00				22.359.150,00
24	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ekanaek	11.696.900,00				11.696.900,00
25	Peningkatan Ruas Jalan Desa Bijeli	14.073.850,00				14.073.850,00
26	Peningkatan Ruas Jalan Oinlasi-Menu (DAK)	58.455.700,00				58.455.700,00
27	Peningkatan Ruas Jalan Nasi-Santian (DAK)	41.642.750,00				41.642.750,00
28	Peningkatan Ruas Jalan Sunu-Ayotupas (DAK)	37.799.995,00				37.799.995,00
29	Peningkatan Ruas Jalan Oinlasi-Kot'olin(Titik Binenok)	39.600,00				39.600,00
30	Pekerjaan Saluran Permanen Ruas Jalan Kiufatu-Nunusunu	23.400.000,00				23.400.000,00
31	Peningk.Ruas Jalan Titik Kuele'u(Amanatun)-Oesusu Ds.Kualeu	24.321.000,00				24.321.000,00
32	Peningk.Ruas Jalan Haunobenak-Babuin Tamaneo-Oe'oh	18.355.000,00				18.355.000,00
33	Peningk.Ruas Jalan Hauboen-Fautbena-Muken	14.569.550,00				14.569.550,00
34	Peningkatan Ruas Jalan Desa Taneotop ke Dusun Maunana/Asbup	13.303.497,00				13.303.497,00
35	Rehabilitasi Daerah Irigasi Bangkono	28.716.089,00				28.716.089,00
36	Rehabilitasi Daerah Irigasi Tune	31.875.550,00				31.875.550,00
37	Operasional dan pemeliharaan Irigasi (OP) tersebar di 5 lokasi(Paket I)	9.629.028,00				9.629.028,00
38	Operasional dan pemeliharaan Irigasi (OP) tersebar di 5 lokasi(Paket II)	7.689.673,00				7.689.673,00
39	Peningkatan Ruas Jalan Kompleks SMP Kristen 1 Nunumeu	8.164.650,00				8.164.650,00
40	Pemeliharaan D. I Ekanaek	9.304.620,00				9.304.620,00
41	Peningkatan Ruas Jalan Fatukopa - Billa	15.456.250,00				15.456.250,00
42	Rehap Jembatan Merah 1 dan 2	16.835.750,00				16.835.750,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
43	Peningkatan D.I Faelubu	24.992.000,00				24.992.000,00
44	Pembangunan Embung Desa Mnelalete	37.820.800,00				37.820.800,00
45	Peningkatan RJ Oelet-Abi	20.715.250,00				20.715.250,00
46	Peningkatan RJ Bolaplelo-Noenoni	59.722.250,00				59.722.250,00
47	Peningkatan RJ Taebesa-Ofu	22.139.650,00				22.139.650,00
48	Peningkatan RJ Fatuoni-Lotas	45.492.350,00				45.492.350,00
49	Peningkatan RJ Desa Bileon Menuju Oeleon	53.251.095,00				53.251.095,00
50	Peningkatan RJ Desa Oinlasi	25.872.900,00				25.872.900,00
51	Peningkatan RJ Tubulopo Kusi	15.199.450,00				15.199.450,00
52	Pembangunan Jembatan Kayu Masuk SDI Eonana	7.311.595,00				7.311.595,00
53	Rehap RJ Oe'OH Ayotupas	96.817.000,00				96.817.000,00
54	Pembangunan Tembok Penahan RJ Mnelalete Teas Desa Pusu/Oelnino	9.208.790,00				9.208.790,00
55	Peningkatan RJ Sunu-ayotupas	31.324.750,00				31.324.750,00
56	Rehab D.I Noelniti	16.666.650,00				16.666.650,00
57	Pembangunan Pengendalian Sungai Noeleke Paket II	38.067.150,00				38.067.150,00
58	Pembangunan Sarana Ddan Prasarana Sungai Noemuke	146.563.900,00				146.563.900,00
59	Pemeliharaan Jembatan Oenasi	29.500.000,00				29.500.000,00
60	Rehab Jembatan Merah 1 dan 2 Kota Soe`	29.500.000,00				29.500.000,00
61	Rehab D.I Noenoni I	12.714.280,00				12.714.280,00
62	Rehab D.I Oetuke	12.714.280,00				12.714.280,00
63	Rehab D.I Banli	12.714.280,00				12.714.280,00
64	Rehab D.I Oefonu	12.714.320,00				12.714.320,00
65	Rehab D.I Oebelo	12.714.280,00				12.714.280,00
66	Rehab D.I Nulle	12.714.280,00				12.714.280,00
67	Pembetulan Alur Sungai Boking	24.695.000,00				24.695.000,00
68	Pembangunan Pengendalian Sungai Noeleke Paket II	24.695.000,00				24.695.000,00
69	Peningkatan D.I Faelubu	4.321.428,00				4.321.428,00
70	Peningkatan RJ Sunu-Ayotupas	4.810.800,00				4.810.800,00
71	Peningkatan RJ Desa Ajaobaki	11.745.000,00				11.745.000,00
72	Peningkatan RJ Desa Bileon Menuju Oeleon	11.740.000,00				11.740.000,00
73	Peningkatan RJ Desa Haumembaki	11.740.000,00				11.740.000,00
74	Peningkatan RJ Desa Oinlasi	11.740.000,00				11.740.000,00
75	Peningkatan RJ Taetua-KisanDesa Sei	7.748.000,00				7.748.000,00
76	Peningkatan RJ Masuk Kompleks Kota Kec, Kolbano	7.748.000,00				7.748.000,00
77	Peningkatan RJ Tubulopo Kusi	7.748.000,00				7.748.000,00
78	Peningkatan RJ dalam Kompleks Desa Supul	7.748.000,00				7.748.000,00
79	Peningkatan RJ Desa Pene Selatan	7.748.000,00				7.748.000,00
80	Peningkatan RJ Punuf	7.748.000,00				7.748.000,00
81	Peningkatan RJ SMA N 1 Kapan	7.748.000,00				7.748.000,00
82	Peningkatan RJ Kompleks Kantor Camat Kuatnana	7.748.000,00				7.748.000,00
83	Peningkatan RJ Dalam Kota Kec, Aban Tengah	7.749.000,00				7.749.000,00
84	Pembangunan jJalan dilingkungan air besi	7.748.000,00				7.748.000,00
85	Rehab D I Oehala II	8.285.750,00				8.285.750,00
86	Rehab D.I Siafu	8.285.750,00				8.285.750,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
87	Rehab D.I Noelniti	8.285.750,00				8.285.750,00
88	Pemeliharaan D.I Oebiloe	8.285.750,00				8.285.750,00
89	Rehab D.I Kaekoli	8.285.750,00				8.285.750,00
90	Pemeliharaan Jembatan Oenasi	24.725.000,00				24.725.000,00
91	Rehab Jembatan Merah 1 dan 2 Kota Soe`	24.725.000,00				24.725.000,00
92	Rehab D.I Noenoni I	10.650.000,00				10.650.000,00
93	Rehab D.I Oetuke	10.650.000,00				10.650.000,00
94	Rehab D.I Banli	10.650.000,00				10.650.000,00
95	Rehab D.I Oefonu	10.650.000,00				10.650.000,00
96	Rehab D.I Oebelo	10.650.000,00				10.650.000,00
97	Rehab D.I Nulle	10.650.000,00				10.650.000,00
98	Pembetulan Alur Sungai Boking	24.533.500,00				24.533.500,00
99	Pembangunan Pengendalian Sungai Noeleke Paket II	24.533.500,00				24.533.500,00
100	Peningkatan Daerah Irigasi Oeusapi	18.030.250,00				18.030.250,00
101	Peningkatan ruas jalan kelurahan oekefan	234.460.310,00				234.460.310,00
102	Rehap/Pemeliharaan RJ Panaf-Besleu-Oetfo	12.327.000,00				12.327.000,00
103	Rehap Pemeliharaan Jembatan kampung Baru Niki-niki	9.783.450,00				9.783.450,00
104	Peningkatan Daerah Irigasi babys	28.249.400,00				28.249.400,00
105	Peningkatan Daerah Irigasi Oefonu	12.562.613,00				12.562.613,00
106	Peningkatan RJ Kota Kec. Amanuban Timur	21.184.400,00				21.184.400,00
107	Peningkatan RJ Menuju Pekuburan Oenali	20.348.650,00				20.348.650,00
108	Peningkatan RJ Nutakiaf - To'nene	20.270.250,00				20.270.250,00
109	Peningkatan RJ Sabkiki - Mnelafau	28.726.850,00				28.726.850,00
110	Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Kapan	121.362.050,00				121.362.050,00
111	Peningkatan R. J Fatuoni - Lotas (Sertu) (Konstruksi Lotas)	107.386.750,00				107.386.750,00
112	Pembukaan Jalan Sirtu di Kecamatan Kualnana, Desa Oeue, Dusun Nifulina	9.601.500,00				9.601.500,00
113	Rehab./Pemel. Ruas Jalan Desa Tomanat menuju Desa Lelobatan	44.540.250,00				44.540.250,00
114	Pembangunan Deuker Noemeto Kecamatan Amanuban Barat	4.925.000,00				4.925.000,00
115	Rehablitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tunis - Mella	89.676.200,00				89.676.200,00
116	Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Sirtu Samping Gereja Musafir	9.645.000,00				9.645.000,00
117	Tembok Penahan Ruas Jalan Nasi - Santian	11.977.650,00				11.977.650,00
118	Pembangunan Embung Kele Desa Kele Kec. Kuanfatu	30.303.350,00				30.303.350,00
119	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Napi - Boti	9.733.650,00				9.733.650,00
120	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Sirtu Desa Falas	9.770.700,00				9.770.700,00
121	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Teslayofanu - Fatuulan	9.779.600,00				9.779.600,00
122	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Bolaplelo - Noenoni	22.592.360,00				22.592.360,00
123	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Bikekneno - Nekemunifeto (DAK Afirmasi)	41.251.900,00				41.251.900,00
124	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Baus - Manufui (DAK Afirmasi)	13.771.250,00				13.771.250,00
125	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Baus - Manufui (DAU)	42.444.350,00				42.444.350,00
126	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Sunu - Ayotupas	41.277.800,00				41.277.800,00
127	Pengawasan teknisRehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Sunu - Ayotupas	2.978.800,00				2.978.800,00
128	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan SP.Besnam - Lotas	63.698.800,00				63.698.800,00
129	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Kualeu - Kobeop	354.443.600,00				354.443.600,00
130	Pengawasan RJ Besnam - Lotas	14.896.000,00				14.896.000,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
131	Pengawasan RJ Kualeu - Kobeop	14.896.000,00				14.896.000,00
132	Pemeliharaan Embung Nunfutu	9.942.850,00				9.942.850,00
133	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Oehan - Lasi - Pana	13.446.250,00				13.446.250,00
134	Pemeliharaan RJ samping Polsek Niki - niki	28.503.900,00				28.503.900,00
135	Pemeliharaan paket IV DI Oemanas Kuamnasi	9.880.000,00				9.880.000,00
138	Pembangunan Irigasi Banli	400,00				400,00
139	Peningkatan Ruas Jalan Polen-Bijeli (Titik Fatujak)	732.500,00				732.500,00
140	Peningkatan Ruas Jalan Naususu - Liliana 3,377 KM Kec. Mollo Utara	873.666.000,00				873.666.000,00
141	Pelebaran Jalan Lokasi Sepen Desa Besana	6.310.900,00				6.310.900,00
142	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	31.552.350,00				31.552.350,00
143	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	45.924.400,00				45.924.400,00
144	Embung/Cekdam	589.617.500,00				589.617.500,00
145	Embung/Cekdam	34.800.000,00				34.800.000,00
146	Embung/Cekdam	16.233.450,00				16.233.450,00
147	Embung/Cekdam	7.424.300,00				7.424.300,00
148	Embung/Cekdam	38.885.388,00				38.885.388,00
149	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lain-lain	222.031.300,00				222.031.300,00
150	Jalan Kabupaten Lokal	89.583.920,00				89.583.920,00
151	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	26.840.950,00				26.840.950,00
152	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	43.950.000,00				43.950.000,00
157	Jalan Desa	191.971.386,00				191.971.386,00
	2023					
158	Pengawasan Teknis TA 2022 (DAU)	28.437.200,00				28.437.200,00
	2024					
159	Pengawasan Teknis Jalan TA. 2024 (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)	23.188.801,00				23.188.801,00
160	Pengawasan Teknis Jalan Jembatan TA. 2024 (Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Seb	15.859.680,00				15.859.680,00
161	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Sunu Desa Lanu	197.690.000,00		197.690.000,00		-
162	Pembangunan Ruas Jalan Noeleke (Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.842.650,00		62.842.650,00		-
163	Rekonstruksi Ruas Jalan Mauleum - Besnam (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)	1.008.381.280,00		1.008.381.280,00		-
	2025					
164	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Linamnutu,				170.870.099,00	170.870.099,00
165	Rekonstruksi Ruas Jalan Fafinisin - Oenali (SILPA)				218.261.086,00	218.261.086,00
166	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Alternatif Enonapi (PAD)				70.941.400,00	70.941.400,00
167	Pekerjaan Box Culvert Di Kecamatan Noebeba, (Sumber Pendapatan Asli Daerah)				36.715.125,00	36.715.125,00
168	Pekerjaan Box Culvert pada Ruas Jalan Kuanfatu - Toineke				22.669.165,00	22.669.165,00
169	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Hane - Boentuka				44.282.598,00	44.282.598,00
170	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Dusun C Desa Oebobo				35.886.533,00	35.886.533,00
171	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Dusun B dan D Desa Oebobo				62.409.080,00	62.409.080,00
172	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tunis - Mela				235.876.686,00	235.876.686,00
173	Perencanaan Normalisasi Sungai Noenoma dan Embung Kiufatu				44.857.875,00	44.857.875,00
174	Pengawasan Jembatan Gantung TA.2025 (Bantuan Keuangan Propinsi)				17.860.000,00	17.860.000,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
175	Pengawasan Ruas Jalan Fafinisin - Oenali TA.2025				29.544.000,00	29.544.000,00
176	Pengawasan Rehabilitasi Jalan TA 2025				39.294.000,00	39.294.000,00
	JUMLAH	**6.961.568.729,00**	**-**	**1.268.913.930,00**	**1.029.467.647,00**	**6.722.122.446,00**
DINAS PRKP						
1	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Toianas	24.643.650,00				24.643.650,00
2	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Noesiu	17.418.450,00				17.418.450,00
3	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Oe'Uban	21.656.350,00				21.656.350,00
4	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Nulle	16.459.650,00				16.459.650,00
5	Air Minum Kemasan	6.242.950,00				6.242.950,00
6	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Meusin Kec. Boking	40.063.500,00				40.063.500,00
7	Pembangunan MCK di Desa Nekemunifeto Kecamatan Mollo Tengah	8.728.200,00				8.728.200,00
8	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK KiE	18.596.915,00				18.596.915,00
9	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Bikekneno	11.057.750,00				11.057.750,00
10	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Fotilo	6.405.650,00				6.405.650,00
11	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Nununamat	17.441.300,00				17.441.300,00
12	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Oeleu	6.150.000,00				6.150.000,00
13	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tubmonas	16.291.550,00				16.291.550,00
14	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tuasene	9.333.200,00				9.333.200,00
15	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kualeu	9.333.200,00				9.333.200,00
16	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK KiE	9.333.200,00				9.333.200,00
17	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Bikekneno	9.333.200,00				9.333.200,00
18	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kuanoel	9.333.200,00				9.333.200,00
19	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Fotilo	9.333.200,00				9.333.200,00
20	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Haunobenak	9.333.200,00				9.333.200,00
21	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Nununamat	9.334.200,00				9.334.200,00
22	Pembangunan Jalan Desa Teluk	11.740.000,00				11.740.000,00
23	Peningkatan RJ Desa Snok	7.748.000,00				7.748.000,00
24	Peningkatan RJ dalam Desa Fotilo	7.748.000,00				7.748.000,00
25	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tuasene	13.967.000,00				13.967.000,00
26	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kualeu	13.853.000,00				13.853.000,00
27	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK KiE	13.853.000,00				13.853.000,00
28	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Bikekneno	13.853.000,00				13.853.000,00
29	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kuanoel	13.853.000,00				13.853.000,00
30	Konstruksi Gedung Aula Kantor Camat Amanatun Selatan.	14.718.000,00				14.718.000,00
31	Pembangunan Rumah Jabatan Camat Fatukopa	31.300.000,00				31.300.000,00
32	Jaringan Air Bersih Desa Toianas	120.649.000,00				120.649.000,00
33	Jaringan Air Bersih Desa Sei-Desa Pene Selatan	34.116.150,00				34.116.150,00
34	MCK Plus Desa Kesetnana TA. 2016	13.230.100,00				13.230.100,00
35	MCK Plus Kelurahan SoE. Kecamatan Kota SoE	13.113.100,00				13.113.100,00
37	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kota SoE (L)	78.800.000,00				78.800.000,00
38	Pengembangan Jaringan Air Bersih Desa Noemeto	15.367.550,00				15.367.550,00
40	Perenca Air Bersih (Santian,Kuanfatu,Nunkolo dan Kie)	37.125.000,00				37.125.000,00
41	Pengawasan Drainase Kota Niki - niki	16.060.000,00				16.060.000,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
42	Taman Batas Kecamatan Batu Putih	3.735.000,00				3.735.000,00
43	Drainase Dalam Kota Kecamatan Amanuban Tengah	7.495.000,00				7.495.000,00
44	Jaringan Air Bersih Desa Oeleu Kecamatan Kolbano	9.950.000,00				9.950.000,00
45	Pekerjaan Pembangunan BAK Air dan Jaringan Perpipaan di Desa Benlutu Kec. Batu Putih	3.655.500,00				3.655.500,00
46	Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Air Bersih di Desa Kuanfatu Kec. Kuanfatu	9.915.350,00				9.915.350,00
47	Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Oelbubuk Kec. Mollo Tengah	9.953.650,00				9.953.650,00
48	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Dalam Kota SoE	4.995.000,00				4.995.000,00
49	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor bagi Masyarakat Desa Nulle Kec. Amanuban Barat	7.475.000,00				7.475.000,00
50	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor bagi Masyarakat Desa Mnelalete Kec. Amanuban Barat	11.833.700,00				11.833.700,00
51	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di Desa Pusu Kec. Amanuban Barat	7.475.000,00				7.475.000,00
52	Sumur dengan Pompa	0,50				0,50
	2023					
53	Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Binaus	36.629.210,00				36.629.210,00
54	Lampu Hias pada Taman Dalam Kota Soe Paket 2	8.975.800,00				8.975.800,00
55	Pengawasan Teknis Air Bersih (DAK Penugasan)	71.791.200,00				71.791.200,00
56	Trotoar Paket 2 Paket 2 Kawasan Kantor Bupati Lama dan Depan SMP N 1 SoE	38.308.000,00		38.308.000,00		-
57	Sumur Bor Desa Toianas	44.713.995,00				44.713.995,00
	2024					
58	Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa	66.868.375,00				66.868.375,00
59	Pengadaan dan Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Bijeli Kecamatan Polen	11.513.000,00				11.513.000,00
60	Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Di Kelurahan Cendana	14.355.000,00				14.355.000,00
61	Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana	115.162.398,00				115.162.398,00
62	Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Fatuat Kecamatan Kotolin	37.070.228,00				37.070.228,00
63	Pengawasan Teknis Air Bersih	74.814.000,00				74.814.000,00
	2025					
64	Pengadaan dan pemasangan lampu dekoratif PJU sepanjang jalan basuki rahmat 1				143.589.600,00	143.589.600,00
65	Pembangunan Drainase 2025				81.661.600,00	81.661.600,00
66	Perencanaan Drainase 2025				66.808.125,00	66.808.125,00
67	Pengawasan Drainase 2025				30.703.932,00	30.703.932,00
	JUMLAH	**1.353.600.821,50**	**-**	**38.308.000,00**	**322.763.257,00**	**1.638.056.078,50**
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						
1	Pembangunan Lapangan Multi Fungsi	5.140.000,00				5.140.000,00
2	Pemeliharaan Lapangan Puspenmas SoE				139.217.956,00	139.217.956,00
3	Pengawasan Lapangan Puspenmas SoE				4.566.000,00	4.566.000,00
	JUMLAH	**5.140.000,00**	**-**	**-**	**143.783.956,00**	**148.923.956,00**
DINAS PENANAMAN MODAL						
1	Pengawasan Bangunan Gedung Kantor Permanen	10.100.000,00		-	-	10.100.000,00
	JUMLAH	**10.100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.100.000,00**

No	Uraian	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		
				Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025
DINAS PARIWISATA						
1	Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Lampu Taman Bu'at	4.993.333,00		4.993.333,00		-
	JUMLAH	4.993.333,00	-	4.993.333,00	-	-
DINAS TPHP						
1	Pekerjaan Embung Fotilo	96.489.000,00		-		96.489.000,00
2	Pengawasan Embung Fotilo	5.176.000,00		-		5.176.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Screen House)				28.242.934,00	28.242.934,00
		101.665.000,00	-	-	28.242.934,00	129.907.934,00
SEKRETARIAT DAERAH						
1	Personal Computer	159.795.600,00		159.795.600,00		-
2	CCTV				11.980.000,00	11.980.000,00
	JUMLAH	159.795.600,00	-	159.795.600,00	11.980.000,00	11.980.000,00
SEKRETARIAT DPRD						
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	266.902.355,00		266.902.355,00		-
	JUMLAH	266.902.355,00	-	266.902.355,00	-	-
KECAMATAN KOTA SOE						
1	Pengadaan Rabat Jalan Lingkungan	28.106.450,00		-	-	28.106.450,00
	JUMLAH	28.106.450,00	-	-	-	28.106.450,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Fatukopa	-		-	16.226.256,00	16.226.256,00
	JUMLAH	-	-	-	16.226.256,00	16.226.256,00
DINAS PERIKANAN						
1	Balai Benih Ikan Kaetupa	-		-	28.382.550,00	28.382.550,00
	JUMLAH	-	-	-	28.382.550,00	28.382.550,00
JUMLAH TOTAL		12.784.607.367,94	8.862.502,00	3.403.226.861,00	2.394.248.761,00	11.734.492.759,94

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

EDUARD MARKUS LIOE

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala BPKAD	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran XX Peraturan Daerah Kabupaten TTS
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
IKHRISIAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Jl. Boungenvile No. 7 SoE, Telp. 0388-21005, 21239

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	3
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	6
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	7
3. Laporan Neraca	8
4. Laporan Operasional	9
5. Laporan Arus Kas	10
6. Laporan Perubahan Ekuitas	12
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum	13
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap PSAP BLU	20
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	21
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	33
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	40
6. Penjelasan Pos-Pos Neraca	41
7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	48
8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	53
9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	55
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	56

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
Jl. Bougenvile No. 7 SoE, Telp. 0388-21005, 21239
SOE 85551-85519

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Erwin Leo, M.Kes.
   Alamat Kantor : Jl. Boungenvile No. 7 SoE
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Niki-Niki, RT/RW: 003/001, Niki-Niki, Amanuban Tengah
   Jabatan : Pemimpin BLUD/Direktur
   NIP : 19790131 200804 1 002

2. Nama : Frederik Liu, SE
   Alamat Kantor : Jl. Boungenvile No. 7 SoE
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Mnelalete, RT/RW: 001/001, Mnelalete, Amanuban Barat
   Jabatan : Pejabat Keuangan/Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
   NIP : 19730516 199303 1 011

3. Nama : Yurlis Mirelda Bell, SE
   Alamat Kantor : Jl. Boungenvile No. 7 SoE
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Kusa Nope, RT/RW: 013/005, Karang Siri, Kota SoE
   Jabatan : Pejabat Teknis/Kasubag Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan
   NIP : 19840615 201503 2 003

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Direktur RSUD SoE
selaku Pemimpin BLUD,

dr. Persin Leo, M.Kes.
NIP. 19790131 200804 1 002

Pejabat Keuangan,

Frederik Liu, SE
NIP. 19750516 199303 1 011

Pejabat Teknis,

Yurlis Mirelda Bell, SE
NIP. 19840615 201503 2 003

SoE, 30 Maret 2026

Laporan No.: 00056/2.1516/AU.5/11/0463-5/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah, yang terdiri dari Laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami

didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00056/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 dan tanggal 30 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Rekan,

00056

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 30 Maret 2026

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	21.411.295.992,00	26.180.125.295,00	122,27%	19.143.346.621,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.c*	-	92.750.000,00	-	65.325.000,00
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan Lain-lain	*4.1.e*	-	28.874.845,90	-	32.169.607,57
7	**Jumlah Pendapatan**		**21.411.295.992,00**	**26.301.750.140,90**	**122,84%**	**19.240.841.228,57**
8	**Belanja**					
9	**Belanja Operasi**					
10	Belanja Pegawai	*4.2.a*	39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	99,10%	35.163.714.202,00
11	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	15.353.340.114,04	15.043.664.390,00	97,98%	20.638.368.533,00
12	Bunga	*4.2.c*	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	*4.2.d*	-	-	-	-
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**54.765.404.302,84**	**54.100.852.902,00**	**98,79%**	**55.802.082.735,00**
15	**Belanja Modal**	*4.3*				
16	Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	1.850.000.000,00	1.696.354.620,00	91,69%	3.108.144.163,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	*4.3.d*	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-	-	-	-
21	Belanja Aset Lainnya	*4.3.f*	-	-	-	-
22	**Jumlah Belanja Modal**		**5.650.700.000,00**	**5.490.933.420,00**	**97,17%**	**3.208.098.663,00**
23	**Jumlah Belanja**		**60.416.104.302,84**	**59.591.786.322,00**	**98,64%**	**59.010.181.398,00**
24	**Surplus (Defisit)**		**(39.004.808.310,84)**	**(33.290.036.181,10)**	**85,35%**	**(39.769.340.169,43)**
25	**Pembiayaan**					
26	**Penerimaan Pembiayaan**					
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
29	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
30	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
31	**Pengeluaran Pembiayaan**					
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
33	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-	-	-
34	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
35	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
36	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
37	**Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran**		**(39.004.808.310,84)**	**(33.290.036.181,10)**	**85,35%**	**(39.769.340.169,43)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN RSUD SOE

dr. Erwin Leo, M.Kes.
NIP. 19790131 200804 1 002

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.a*	**1.077.055.138,04**	**6.459.162.730,47**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.b*	-	-
3	**Sub Total**		**1.077.055.138,04**	**6.459.162.730,47**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	*5.c*	(33.290.036.181,10)	(39.769.340.169,43)
5	**Sub Total**		**(32.212.981.043,06)**	**(33.310.177.438,96)**
6	Pendapatan APBD	*5.d*	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
7	Setoran ke Kas Daerah	*5.e*	-	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.f*	**5.452.876.105,94**	**1.077.055.138,04**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN RSUD SOE

dr. Erwin Leo. M.Kes.
NIP. 197[illegible]1 200804 1 002

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	(20.299.810,00)	(966.934.375,00)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	3.842.861.004,40	4.535.077.618,11
8	**Jumlah Aset Lancar**		**13.335.399.300,34**	**10.789.911.802,95**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah		6.082.450.000,00	6.082.450.000,00
11	Peralatan dan Mesin		62.190.900.403,00	60.237.985.570,00
12	Gedung dan Bangunan		19.626.317.699,00	16.401.731.399,00
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.435.988.916,00	1.740.088.716,00
14	Aset Tetap Lainnya		45.000.000,00	45.000.000,00
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	**Jumlah Harga Perolehan**		**91.380.657.018,00**	**84.507.255.685,00**
17	Akumulasi Penyusutan		(60.242.801.927,00)	(56.519.932.758,00)
18	**Jumlah Aset Tetap**		**31.137.855.091,00**	**27.987.322.927,00**
19	**Aset Lainnya**	*6.6*		
20	Aset Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lain-lain		837.481.496,00	837.481.496,00
22	**Akumulasi Penyusutan/Amortisasi**		(685.676.496,00)	(685.676.496,00)
23	**Jumlah Aset Lainnya**		**151.805.000,00**	**151.805.000,00**
24	**Jumlah Aset**		**44.625.059.391,34**	**38.929.039.729,95**
25	**Kewajiban**			
26	**Kewajiban Jangka Pendek**			
27	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	*6.7*	-	7.286.421,80
28	Utang Belanja	*6.8*	10.929.371.263,00	5.353.962.459,00
29	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
30	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**10.929.371.263,00**	**5.361.248.880,80**
31	**Kewajiban Jangka Panjang**			
32	Utang Jangka Panjang		-	-
33	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		-	-
34	**Jumlah Kewajiban**		**10.929.371.263,00**	**5.361.248.880,80**
35	**Ekuitas**	*6.9*		
36	Ekuitas		33.695.688.128,34	33.567.790.849,15
37	**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas**		**44.625.059.391,34**	**38.929.039.729,95**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN RSUD SOE

dr. Erwin Leo, M.Kes.
NIP 19790121 200804 1 002

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*7.1.a*	24.102.660.295,00	21.514.510.221,00	2.588.150.074,00	10,74%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1.b*	92.750.000,00	65.325.000,00	27.425.000,00	29,57%
6	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
7	Pendapatan Lain-Lain	*7.1.c*	28.874.845,90	32.169.607,57	(3.294.761,67)	-11,41%
8	Pendapatan APBD	*7.1.d*	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00	3.278.624.572,00	8,70%
9	**Jumlah Pendapatan**		**61.890.142.289,90**	**55.999.237.405,57**	**5.890.904.884,33**	**9,52%**
10	**Beban**					
11	Beban Pegawai	*7.2.a*	39.745.690.521,00	33.700.025.212,00	6.045.665.309,00	15,21%
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	19.240.320.730,71	21.600.452.284,57	(2.360.131.553,86)	-12,27%
13	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.c*	20.299.810,00	962.229.615,00	(941.929.805,00)	-4640,09%
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	*7.2.d*	3.722.993.699,00	3.666.370.290,00	56.623.409,00	1,52%
15	Beban Lain-lain		-	-	-	-
16	**Jumlah Beban**		**62.729.304.760,71**	**59.929.077.401,57**	**2.800.227.359,14**	**4,46%**
17	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(839.162.470,81)**	**(3.929.839.996,00)**	**3.090.677.525,19**	**-368,31%**
18	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		966.934.375,00	15.015.212,50	951.919.162,50	98,45%
22	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op.**		**966.934.375,00**	**15.015.212,50**	**951.919.162,50**	**98,45%**
23	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**127.771.904,19**	**(3.914.824.783,50)**	**4.042.596.687,69**	**3163,92%**
24	**Pos Luar Biasa**	*7.4*				
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-	-	-
28	**Surplus (Defisit)-LO**		**127.771.904,19**	**(3.914.824.783,50)**	**4.042.596.687,69**	**3163,92%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN RSUD SOE

dr. Erwin Leo. M.Kes.
NIP 19790131 200804 1 002

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	*8.1*		
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1a*		
3	Pendapatan APBD		37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat		26.180.125.295,00	19.143.346.621,00
5	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		92.750.000,00	65.325.000,00
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Lain-Lain		28.874.845,90	32.169.607,57
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**63.967.607.289,90**	**53.628.073.805,57**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1b*		
11	Pembayaran Pegawai		39.057.188.512,00	35.163.714.202,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		15.043.664.390,00	20.638.368.533,00
13	**Jumlah Arus Masuk Keluar**		**54.100.852.902,00**	**55.802.082.735,00**
14	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**9.866.754.387,90**	**(2.174.008.929,43)**
15	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	*8.2*		
16	**Arus Masuk Kas**	*8.2.a*		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
24	**Arus Keluar Kas**	*8.2.b*		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		1.696.354.620,00	3.108.144.163,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		2.118.678.600,00	-
28	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.675.900.200,00	99.954.500,00
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**5.490.933.420,00**	**3.208.098.663,00**
32	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	*8.3*	**(5.490.933.420,00)**	**(3.208.098.663,00)**
33	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	*8.3.a*		
34	**Arus Masuk Kas**			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
38	**Arus Keluar Kas**	*8.3.b*		
39	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
40	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
41	Pemberian Pinjaman		-	-
42	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
43	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		-	-

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
44	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	*8.4*		
45	**Arus Kas Masuk**	*8.4.a*		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.092.363.890,20	1.743.759.411,80
47	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**2.092.363.890,20**	**1.743.759.411,80**
48	**Arus Kas Keluar**	*8.4.b*		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.099.650.312,00	1.736.472.990,00
50	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**2.099.650.312,00**	**1.736.472.990,00**
51	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**(7.286.421,80)**	**7.286.421,80**
52	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**		**4.368.534.546,10**	**(5.374.821.170,63)**
53	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**1.084.341.559,84**	**6.459.162.730,47**
54	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**5.452.876.105,94**	**1.084.341.559,84**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN RSUD SOE

dr. Erwin Leo. M.Kes.
NIP 19790121 200804 1 002

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.a*	**33.567.790.849,15**	**35.949.157.741,65**
2	**Surplus/(Defisit) LO**	*9.b*	**127.771.904,19**	**(3.914.824.783,50)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.c*	**125.375,00**	**1.533.457.891,00**
	Koreksi Saldo Awal Piutang BPJS		-	(177.731.100,00)
	Koreksi Saldo Awal Persediaan Benda Pos		-	1.000.000,00
	Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		-	1.636.991.450,00
	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin		-	1.356.101,00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		124.530,00	-
	Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Pegawai		-	71.841.440,00
	Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		845,00	-
4	**Ekuitas Akhir**	*9.d*	**33.695.688.128,34**	**33.567.790.849,15**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN RSUD SOE

dr. Evelin Leo, M.Kes.
NIP. 19790121 200804 1 002

1. Gambaran Umum

a. Sejarah dan Perkembangan RSUD SoE Kabupaten Timur Tengah Selatan

Sejarah singkat RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut RSUD SoE didirikan Tahun 1941 dengan Direktur pertama dr. Lie Sen Tong. Pada tahun-tahun berikutnya, jabatan direktur RSUD SoE lebih banyak dibantu oleh Misionaris Zending dari Belanda sampai Tahun 1961, bahkan beberapa kali RSUD SoE dipimpin oleh perawat (suster) karena mengalami kekosongan sehubungan tidak ada dokter. Pergantian direktur berjalan lancar, dengan nama-nama direktur sebagai berikut:

No.	Tahun	Nama Direktur
1	1941-1945	dr. Lie Sen Tong
2	1948-1951	Dr. Johana Hornecker dibantu Zr. Tenkath dari Misionaris Zending Belanda
3	1952-1953	Dr. J. Knope (Misionaris Zending, Belanda)
4	1954-1955	Dr. H.J. Middel Kope (Misionaris Zending)
5	1956-1957	Dr. W.H. Vrind (Misionaris Zending, Belanda)
6	1958	Dr. P.J. Graham (Misionaris Zending, Belanda)
7	1959-1960	Chr. Liufeto, dkk (tidak ada dokter)
8	1961-1963	Dr. S.L. Stover (Misionaris Zending, Belanda)
9	1964-1966	Dr. Tam Hin Lok
10	1967	Dr. Sri Hardi
11	1968-1971	J. Mandonza (tidak ada dokter)
12	1972-1977	Dr. Humar Atmadja Jjoyodiprodjo
13	1977-1979	Dr. Herman C. Theodorus
14	1979-1981	Dr. I Made Nurata
15	1981-1982	Dr. Herman C. Theodorus
16	1982-1983	Dr. Iksan Karto Sudiro
17	1983-1986	Dr. Sammy W. Nalley
18	1986-1988	Dr. Halim Teng
19	1988	Piet A. Tallo, SH (dirangkap Bupati TTS)
20	September 1988	Dr. Frankie H.J. Hartanto
21	1989	Dr. Erwin Candrawinata (Plt Direktur menggantikan sementara dr. Frankie H.J. sedang S2 di Australia)
22	1991-1994	Dr. Frankie H.J. Hartanto
23	1994-1996	Dr. Benyy Agustin Himawati, Sp.OG
24	1996-1997	Dr. Erison Banureah
25	1997-2003	Dr. Joice M.M. Manek
26	2003-2006	Dr. Soleman D. Poety, M.Kes
27	2006-2009	Dr. Jeanne Wondal, Sp.PD.
28	2009-2013	Dr. Musa Salurante (s.d. Feb 2013)
29	2013-2021	Dr. Ria Adriani Karolina Tahun
30	17 Juli 2021-sekarang	Dr. Erwin Leo, M.Kes.

Sejak Tahun 1982, kelembagaan RSUD SoE sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya, berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 21 Tahun 2011, RSUD SoE berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah setara SKPD yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 226/KEP/HK/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah SoE Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang mana menerapkan pelayanan kesehatan berdasarkan pola layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. RSUD SoE adalah satu-satunya unit pelayanan kesehatan masyarakat milik pemerintah Kabupaten TTS, dengan tujuan utama RSUD SoE adalah memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten TTS.

b. Tempat dan Kedudukan

RSUD SoE Kabupaten TTS berlokasi di Jl. Bougenvile No. 7 SoE, Telp. 0388-21005, 21239 Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Dasar Hukum

Untuk mendukung penerapan PPK BLUD, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
17) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan;
18) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLUD RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan;
19) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 34);
20) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan Medis dengan Sistem Remunerasi pada RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 51);
21) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 9);

22) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
23) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 29); dan
24) Keputusan Bupati TTS Nomor 266/KEP/HK/2015 tentang Penetapan RSUD SoE untuk melaksanakan PPK BLUD, tanggal 26 Juni 2015.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 76 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka tugas pokok dan fungsi RSUD SoE, adalah:

1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna, berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang sesuai mutu standar pelayanan rumah sakit.
2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit mempunyai tugas:
   a) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang ketatausahaan Rumah Sakit.
   b) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang pelayanan dan penunjang medis.
   c) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang perawatan.
   d) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang rekam medis.

e. Struktur Organisasi dan Pengelola Rumah Sakit

1) Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2011, Struktur organisasi RSUD SoE sebagai berikut:

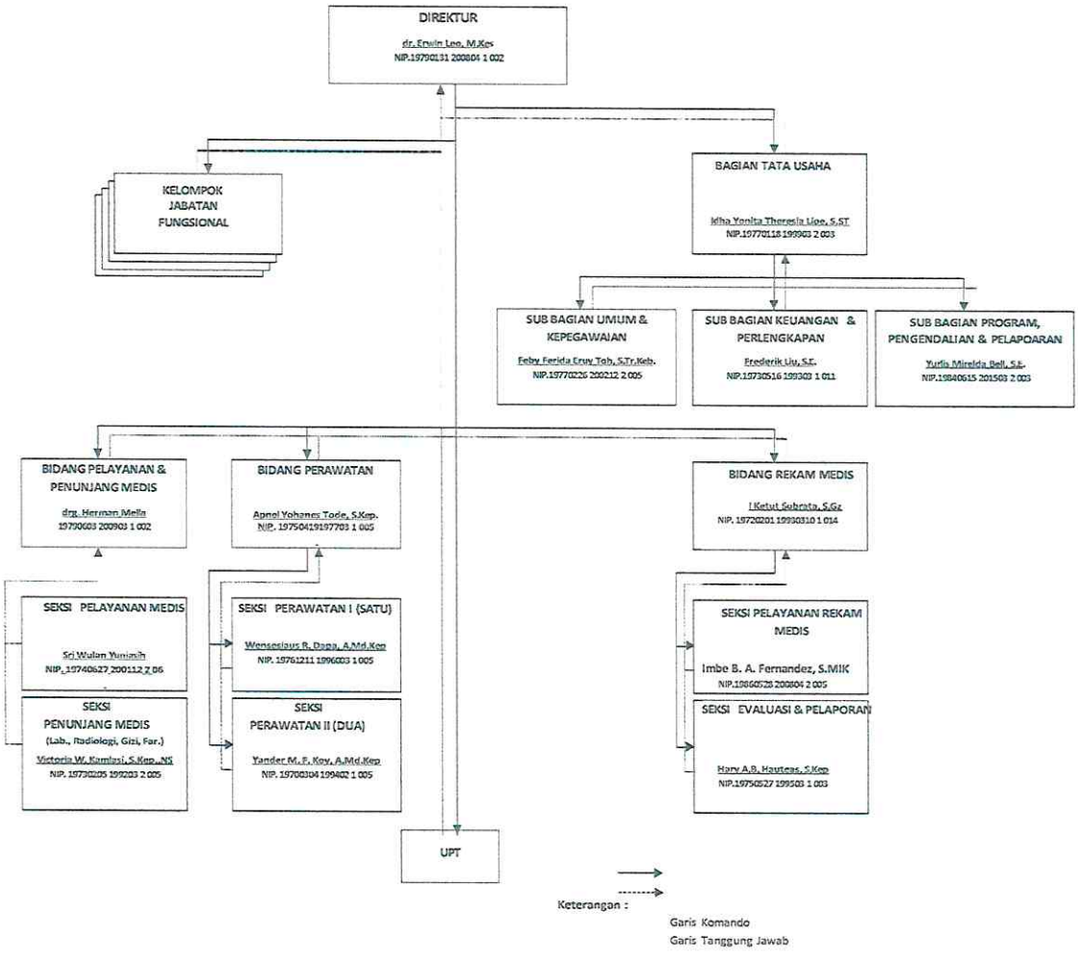

2) Pemilik dan Pejabat Pengelola RSUD SoE

Susunan Pemilik dan Pejabat Pengelola berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 157/KEP/HK/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

a) Komposisi Pemilik dan Jajaran Pejabat Daerah Selaku Pejabat Pengelola BLUD:

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan BLUD
1.	Bupati Timor Tengah Selatan	Pemilik RSUD SoE
2.	Wakil Bupati Timor Tengah Selatan	Wakil Pemilik RSUD SoE
3.	Sekretaris Daerah Kab TTS	Penanggungjawab Umum
4.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator Umum
5.	Kepala BPKAD Kab. TTS	Penanggungjawab Teknis Keuangan Daerah
6.	Kepala BAPENDA Kab. TTS	Penanggungjawab Teknis

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan BLUD
		Pengelolaan Pendapatan Daerah
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTS	Penanggungjawab Teknis Kesehatan

b) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD dan Pejabat Lainnya:

No	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan BLUD
1.	Direktur RSUD SoE	Pimpinan BLUD
2.	Kabag Tata Usaha RSUD SoE	Koordinator Keuangan dan Teknis BLUD
3.	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan RSUD SoE	Pejabat Keuangan BLUD
4.	Kasubag Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan RSUD SoE	Pejabat Teknis BLUD
5.	Imanuel Salem	Bendahara Penerimaan
6.	Lidia J.J. Sunbanu, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
7.	Murniyati Tari, S.Psi.	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8.	Elisabeth Y.M. Pao, S.Akun	Akuntan I
9.	Bianca C. Muni, S.Ak	Akuntan II
10.	Alfred Tkikhau	Administrator
9.	Dorciana Kalendonu, S.E.	Verifikator

3) Kepegawaian

a) Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	
		2025	2024
1.	Laki-Laki	201	182
2.	Perempuan	310	250
Jumlah Pegawai		**511**	**432**

b) Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2025	2024
1.	SD	-	-
2.	SMP	7	8
3.	SMA	98	75
4.	D1	1	5
5.	D3	177	165
6.	S1	211	163
7.	S2	17	16
Jumlah Pegawai		**511**	**432**

c) Jumlah pegawai berdasarkan profesi Tahun 2025 dan 2024.

No.	Jenis	2025	2024
1.	Dokter Struktural	2	2
2.	Dokter Fungsional	18	30
3.	Perawat Struktural	6	4

No.	Jenis	2025	2024
4.	Perawat Fungsional	171	125
5.	Tenaga Medis Fungsional Selain Dokter dan Perawat	178	158
6.	Tenaga Non Medis	124	103
7.	Pejabat Struktural Lainnya	6	6
8.	Pegawai dalam Masa Tugas Belajar	6	4
Total Pegawai		**511**	**432**

f. Indikator Pelayanan Kesehatan

1) Standar Pelayanan Minimal

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1.	UGD	Kemampuan penyelamatan jiwa	Waktu tanggap pemeriksaan dokter (*response time*)	6 menit	Pelatihan dan penambahan dokter yang telah terlatih
2.	Rawat Jalan	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu di rawat jalan	30 menit	Penegakan kedisiplinan dan pelatihan tenaga medis
3.	Rawat Inap	Meningkatnya mutu pelayanan	Pelayanan oleh dokter spesialis	100%	Penambahan dokter spesialis dan alat medis yang memadai
4.	Bedah Sentral	Meningkatkan ketepatan waktu operasi	Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	Pelatihan dokter spesialis bedah dan penambahan tenaga dokter anestesi
5.	Persalinan, KIA, Perinatologi dan KB	Meningkatkan keselamatan pasien	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan 1% Pre-eklampsia 10% Sepsis 0.5%	Pelatihan tenaga medis kebidanan
			Kemampuan menangani BBLR 1.500gr-2.500gr	80%	Pelatihan tenaga medis kebidanan
6.	Radiologi	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	1 Jam	Pemenuhan peralatan medis dan penambahan dokter spesialis radiologi
7.	Laboratorium	Meningkatkan penegakan diagnosa	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	90%	Pelatihan tenaga laboratorium dan pemenuhan peralatan medis
8.	Rehab Medik	Meningkatnya mutu pelayanan	Kejadian *Drop Out* pasien terhadap pelayanan Rehab Medik yang direncanakan	30%	Pelatihan tenaga medis

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
9.	Farmasi	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan		Pelatihan tenaga farmasi dan ketepatan pengadaan obat
			a. obat jadi	15 menit	
			b. racikan	40 menit	
10.	Gizi	Meningkatnya mutu pelayanan	Jumlah konsultasi gizi rawat inap yang terlayani	100%	Pelatihan tenaga ahli gizi
11.	Rekam Medik	Meningkatkan keakuratan data rekam medis	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	Pelatihan Tenaga Rekam Medik dan pengembangan SIRS
12.	*Ambulance*	Meningkatnya mutu pelayanan	Kecepatan memberikan pelayanan *ambulance*/kereta jenazah di rumah sakit	1,5 jam	Penyediaan sarana dan tenaga medis maupun non medis
13.	Laundry	Meningkatnya mutu pelayanan	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	90%	Pelatihan tenaga laundry dan pengadaan alat yang memadai

2) Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2024

Indikator Pelayanan Kesehatan	2025	2024	Satuan
BOR	78.17	62,31	%
LOS	4,03	4,00	hari
TOL	36,496	3,65	hari
BTO	67,43	51.86	Kali/tahun
NDR	12,309	19,668	%
GDR	19,724	24,682	%
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	18.445	15.292	Orang
Jumlah Kunjungan Rawat Inap	6.528	5.186	Orang
Jumlah Kunjungan IGD	6489	10.373	Orang

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan RSUD SoE telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi RSUD SoE ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Periode akuntansi Rumah Sakit adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan setara kas;
   b) Investasi jangka pendek;
   c) Piutang dari kegiatan BLUD;
   d) Persediaan;
   e) Investasi jangka panjang;
   f) Aset tetap;
   g) Aset lainnya;
   h) Kewajiban jangka pendek;
   i) Kewajiban jangka panjang; dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/defisit-LO.

3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas dan barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan ***metode langsung***, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

   Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

   Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga; dan
   d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,
2) Aktivitas Investasi

   Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

   Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

   Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
   a) Penjualan Aset Tetap;
   b) Penjualan Aset Lainnya;
   c) Penerimaan dari Divestasi; dari

d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;
   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
      2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
      3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
   d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.

10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:
    a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) jasa giro;
    c) pendapatan bunga;
    d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah RSUD yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari Jamkesda yang didanai dari Perangkat Daerah.

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

a) Piutang RSUD SoE terdiri dari Piutang Pasien dan Piutang Pasien Program BPJS.

b) Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

c) Penggolongan kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

d) Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;

(3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
(4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

e) Saldo piutang yang dibuat penyisihan dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah lebih dari 12 bulan.

f) Pengungkapan
(1) Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum diterima pembayaran dari penyerahan tersebut.
(2) Pengakuan piutang pendapatan terjadi pada akhir periode ketika akan disusun laporan posisi keuangan dan diakui sebesar piutang yang belum dilunasi, atau pada saat surat ketetapan piutang.
(3) Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

g) Pengukuran
Piutang dicatat sebesar nilai nominal, sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi.

h) Penyajian dan Pengungkapan
(1) Piutang disajikan pada kelompok aset lancar dalam laporan posisi keuangan.
(2) Piutang disajikan sebesar jumlah seluruh tagihan.
(3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di BLUD atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dilaporkan kepada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3) Persediaan

a) Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD SoE, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kedaluwarsa dan rusak. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname)*. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.

c) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, pajak dan biaya lainnya yang secara langsung didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh RSUD SoE yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan/operasional dan pelayanan. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

b) Kriteria Pengakuan Aset Tetap:
(1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual dan/atau tidak diberikan kepada masyarakat.
(3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

5) Aset Tidak Berwujud
   a) Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik secara nyata.
   b) Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
      (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
      (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
   c) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, sedangkan metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat aset tak berwujud selama 5 (lima) tahun.
6) Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
   a) Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
   b) Dalam entitas rumah sakit, liabilitas muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan dan entitas pemerintah.
   c) Liabilitas dikelompokkan ke dalam liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan kelompok liabilitas yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Liabilitas jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
7) Ekuitas
   a) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban atau utang.
   b) Ekuitas rumah sakit meliputi:
      (1) Ekuitas Awal
      Merupakan hak residual awal rumah sakit yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali rumah sakit ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
      (2) Koreksi Saldo Awal
      Merupakan koreksi atas ekuitas/saldo awal periode sebelumnya.
      (3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan
      Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
      (4) Ekuitas Donasi
      Merupakan sumber daya yang diperoleh dari pemda namun tidak melalui DPA/RBA rumah sakit.

j. Pos-pos Laporan Operasional

1) Pendapatan
   a) Klasifikasi
   Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:
      (1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
      Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya

dirinci antara lain, terdiri dari:

(a) Pendapatan usaha rawat jalan.

(b) Pendapatan usaha rawat darurat.

(c) Pendapatan usaha rawat inap.

(2) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD rumah sakit untuk menyerahkan barang/jasa.

(3) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA BLUD rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLUD rumah sakit.

(4) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD rumah sakit.

(5) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

b) Pengakuan

(1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan.

(2) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(3) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

(4) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD.

c) Pengukuran

(1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

(2) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(3) Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.

(4) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

d) Pengungkapan

(1) Pendapatan disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

(2) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2) Beban

a) Klasifikasi

Beban rumah sakit diklasifikasikan ke dalam:

(1) Beban Layanan

Merupakan seluruh beban yang terkait langsung dalam pelayanan kepada

masyarakat antara lain meliputi beban pegawai, beban pemakaian persediaan farmasi/gizi, beban jasa layanan, beban pemeliharaan, beban daya dan jasa, beban penyusutan dan beban lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh rumah sakit.

(2) Beban Umum dan Administrasi

Merupakan beban-beban yang diperlukan untuk administrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit. Beban ini antara lain meliputi beban pegawai, beban administrasi perkantoran, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban promosi, beban premi asuransi, beban penyisihan kerugian piutang dan beban umum dan administrasi lainnya.

(3) Beban Lainnya

Merupakan beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban layanan serta beban umum dan administrasi. Beban ini antara meliputi beban bunga dan administrasi bank.

(4) Rugi Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual.

(5) Kerugian Penurunan Nilai

Merupakan rugi atas penurunan nilai aset tetap sebagaimana diatur pada kebijakan "pengakuan dan pengukuran" aset tetap.

(6) Kerugian Lainnya

Merupakan rugi yang terjadi diluar kegiatan normal rumah sakit.

b) Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan rumah sakit, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan rumah sakit.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

c) Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

(1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

(2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

(3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

(4) Jumlah kerugian yang terjadi.

d) Pengungkapan

(1) Beban disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis dan rincian beban.

(2) Jenis dan rincian beban diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

k. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi RSUD SoE yang merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. RSUD SoE terdaftar sebagai wajib pungut perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.331.708.8-925.000 atas nama BLU RSUD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan alamat Jl. Bougenvile No. 7 RT. 007 RW. 003 SoE, Kota SoE Kab. Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.301.750.140,90 atau 122,84% dari anggaran sebesar Rp21.411.295.992,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.240.841.228,57, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	21.411.295.992,00	26.180.125.295,00	122,27%	19.143.346.621,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas	-	-	-	-
c.	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	92.750.000,00	-	65.325.000,00
d.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
e.	Pendapatan Lain-lain	-	28.874.845,90	-	32.169.607,57
Jumlah		**21.411.295.992,00**	**26.301.750.140,90**	**122,84%**	**19.240.841.228,57**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.180.125.295,00 atau 122,27% dari anggaran sebesar Rp21.411.295.992,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.143.346.621,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		**21.411.295.992,00**			
1)	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum				
	- Laboratorium	-	915.074.331,00	-	578.437.878,00
	- *Ambulance*	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	- Konsultasi Medik	-	78.182.800,00	-	64.393.800,00
	- Persalinan	-	16.843.205,00	-	49.758.391,00
	- OK	-	1.211.500,00	-	11.451.235,00
	- Mata	-	-	-	34.000,00
	- Gigi	-	22.637.000,00	-	51.380.604,00
	- Rontgen	-	31.131.000,00	-	29.488.000,00
	- UGD	-	121.102.605,00	-	157.819.913,00
	- Oksigen	-	2.875.000,00	-	500.000,00
	- Rawat Inap Umum	-	220.301.229,00	-	252.878.418,00
	- Obat-Obatan	-	371.595.238,00	-	300.994.323,00
	- Pelayanan Mobil Jenazah	-	17.336.220,00	-	10.343.400,00
	- Peyetoran uang KB ke RSUD SoE	-	13.665.750,00	-	16.255.000,00
	- Klaim Covid	-	940.952.000,00	-	-
	- Jasa Raharja	-	152.147.165,00	-	39.149.059,00
2)	Pendapatan Jasa Layanan Pasien dengan Penjamin	-	23.273.270.252,00	-	17.578.662.600,00
Jumlah		**21.411.295.992,00**	**26.180.125.295,00**	**122,27%**	**19.143.346.621,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp92.750.000,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.325.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hasil Kerjasama					
1)	Sewa Lahan Bank	-	60.000.000,00	-	38.000.000,00
2)	Kontribusi Sewa Lahan Praktek	-	32.750.000,00	-	27.325.000,00
Jumlah		-	**92.750.000,00**	-	**65.325.000,00**

d. Pendapatan Hibah

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

e. Pendapatan Lain-lain

Jumlah realisasi Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.874.845,90 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.169.607,57, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Pendapatan Lain-lain				
	1) Jasa Giro	-	28.874.845,90	-	32.169.607,57
	2) Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**28.874.845,90**	**-**	**32.169.607,57**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp52.784.310.089,00 atau 98,78% dari anggaran sebesar Rp53.435.404.302,84 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.802.082.735,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	99,10%	35.163.714.202,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	14.023.340.114,04	13.727.121.577,00	97,89%	20.638.368.533,00
c.	Bunga	-	-	-	-
d.	Belanja Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	**53.435.404.302,84**	**52.784.310.089,00**	**98,78%**	**55.802.082.735,00**

Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.057.188.512,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp39.412.064.188,80 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.163.714.202,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
Sumber Dana APBD		**26.714.124.268,00**	**26.551.413.775,00**	**99,39%**	**21.467.581.642,00**
1)	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
	- Belanja Gaji Pokok ASN	16.598.628.886,00	16.595.290.759,00	99,98%	14.615.762.125,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.252.128.683,00	1.248.140.128,00	99,68%	1.113.128.274,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	115.780.000,00	114.800.000,00	99,15%	116.759.900,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.420.580.000,00	1.418.234.650,00	99,83%	1.373.255.650,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	225.338.196,00	217.607.902,00	96,57%	146.775.000,00
	- Belanja Tunjangan Beras ASN	1.436.266.644,00	1.419.363.450,00	98,82%	1.149.563.140,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	149.763.112,00	149.757.210,00	100,00%	27.392.935,00
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	727.370,00	232.213,00	31,93%	220.874,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	712.336.009,00	674.392.976,00	94,67%	601.265.102,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	41.043.687,00	34.260.969,00	83,47%	30.339.507,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	114.131.681,00	102.783.518,00	90,06%	91.019.135,00
2)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.359.400.000,00	1.296.050.000,00	95,34%	-
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.288.000.000,00	3.280.500.000,00	99,77%	2.130.000.000,00

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
3)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN				
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	-	-	-	64.500.000,00
	- Belanja Honorarium Pengadaan	-	-	-	7.600.000,00
Sumber Dana BLUD		**12.697.939.920,80**	**12.505.774.737,00**	**98,49%**	**13.696.132.560,00**
	- Jasa Pelayanan Medis	8.947.939.920,80	8.940.772.108,00	99,92%	10.042.423.079,00
	- Jasa/Honor/Insentif Pegawai/	3.750.000.000,00	3.565.002.629,00	95,07%	3.379.872.306,00
Jumlah		**39.412.064.188,80**	**39.057.188.512,00**	**99,10%**	**35.163.714.202,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.727.121.577,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp14.023.340.114,04 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.638.368.533,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Barang	9.230.189.750,04	9.149.778.544,00	99,13%	14.909.152.853,00
2.	Belanja Jasa	3.611.289.306,00	3.540.342.265,00	98,04%	3.947.090.514,00
3.	Belanja Pemeliharaan	991.876.058,00	871.520.471,00	87,87%	1.104.416.170,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	189.985.000,00	165.480.297,00	87,10%	677.708.996,00
5.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	-
Jumlah		**14.023.340.114,04**	**13.727.121.577,00**	**97,89%**	**20.638.368.533,00**

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sumber Dana APBD	4.975.642.483,00	4.905.321.761,00	98,59%	10.631.616.035,00
2.	Sumber Dana BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50%	10.006.752.498,00
Jumlah		14.023.340.114,04	13.727.121.577,00	**97,89%**	20.638.368.533,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	**Sumber Dana APBD**	**4.975.642.483,00**	**4.905.321.761,00**	**98,59%**	**10.631.616.035,00**
1)	**Belanja Barang**	**2.087.057.477,00**	**2.085.471.900,00**	**99,92%**	**5.872.975.327,00**
	Belanja Barang Pakai Habis				
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.000.000,00	129.994.500,00	100,00%	49.990.000,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	878.179.993,00	877.328.700,00	99,90%	1.497.012.800,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	393.096.650,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	108.862.787,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	62.720.685,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	5.000.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-	50.171.445,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat	654.877.484,00	654.160.400,00	99,89%	2.561.269.108,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	99.195.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	424.000.000,00	423.988.300,00	100,00%	730.453.000,00

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				
	- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-	100.240.770,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*	-	-	-	72.167.000,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	142.796.082,00
2)	**Belanja Jasa**	**2.888.585.006,00**	**2.819.849.861,00**	**97,62%**	**3.598.282.678,00**
	Belanja Jasa Kantor				
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	-	-	-	66.800.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	100,00%	1.519.450.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.120.956,00	13.120.956,00	100,00%	23.700.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	312.780.731,00	312.753.600,00	99,99%	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	607.500.000,00	540.000.000,00	88,89%	595.350.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	315.407.500,00
	- Belanja Jasa Kalibrasi	-	-	-	107.629.343,00
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	-	-	-	399.989.610,00
	- Belanja Tagihan Air	244.468.439,00	244.430.000,00	99,98%	249.940.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	204.467.615,00	204.467.615,00	100,00%	249.384.900,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	-	-	-	35.338.007,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-	13.655.375,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.440,00	28.440,00	100,00%	1.049.760,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	35.550,00	35.550,00	100,00%	839.840,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	123.257.715,00	122.672.000,00	99,52%	9.879.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.925.560,00	72.341.700,00	99,20%	9.869.343,00
3)	**Belanja Pemeliharaan**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**647.247.950,00**
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	292.862.400,00
	- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	29.995.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	
	- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	324.390.550,00

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.330.000.000,00	1.316.542.813,00	98,99%	-
4)	**Belanja Perjalanan Dinas**	-	-	-	**513.110.080,00**
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	513.110.080,00
5)	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	-	-	-	-
II	**Sumber Dana BLUD**	**9.047.697.631,04**	**8.821.799.816,00**	**97,50%**	**10.006.752.498,00**
1)	**Belanja Barang**	**7.143.132.273,04**	**7.064.306.644,00**	**98,90%**	**9.036.177.526,00**
	Belanja Barang Pakai Habis				
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.078.145.000,00	1.078.137.450,00	100,00%	1.056.905.700,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	842.601.473,04	798.783.992,00	94,80%	1.470.594.056,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	261.130.000,00	260.886.750,00	99,91%	99.630.707,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.000.000,00	189.331.680,00	99,65%	109.308.930,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak -	51.684.600,00	51.178.078,00	99,02%	60.710.494,00
	- Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.500.000,00	7.450.000,00	99,33%	3.396.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	73.193.198,00	67.109.033,00	91,69%	79.669.223,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	19.108.175,00
	- Belanja Obat - Obatan	1.394.097.501,00	1.369.428.113,00	98,23%	1.951.047.884,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.650.207.501,00	2.649.022.248,00	99,96%	3.875.617.457,00
	- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	105.000.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	115.005.000,00	113.425.000,00	98,63%	67.154.500,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	329.568.000,00	329.554.300,00	100,00%	138.034.400,00
2)	**Belanja Jasa**	**722.704.300,00**	**720.492.404,00**	**99,69%**	**348.807.836,00**
	Belanja Jasa Kantor				
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	5.000.000,00	4.950.945,00	99,02%	1.066.060,00
	- Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	72.705.000,00	72.705.000,00	100,00%	63.825.000,00
	- Belanja Pemeliharaan dan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan	76.970.000,00	76.969.886,00	100,00%	-
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	84.500.000,00	84.475.440,00	99,97%	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	-	5.540.000,00
	- Belanja Tagihan Telepon	41.500.000,00	39.952.135,00	96,27%	2.576.100,00
	- Belanja Tagihan Air	112.875.000,00	112.875.000,00	100,00%	51.750.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	95.475.300,00	95.461.885,00	99,99%	36.956.800,00
	- Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00	2.193.000,00	97,47%	954.000,00
	- Belanja Registrasi/Keanggotaan	-	-	-	500.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan				
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	90.429.000,00	90.286.113,00	99,84%	185.639.876,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja Arsitektur lainnya	95.000.000,00	94.623.000,00	99,60%	-

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
3)	**Belanja Pemeliharaan**	**991.876.058,00**	**871.520.471,00**	**87,87%**	**457.168.220,00**
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	17.410.000,00	87,05%	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	961.876.058,00	854.110.471,00	88,80%	457.168.220,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.000.000,00	-	-	-
4)	**Belanja Perjalanan Dinas**	**189.985.000,00**	**165.480.297,00**	**87,10%**	**164.598.916,00**
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189.985.000,00	165.480.297,00	87,10%	164.598.916,00
5)	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**14.023.340.114,04**	**13.727.121.577,00**	**97,89%**	**20.638.368.533,00**

c. Bunga

Tidak terdapat realisasi untuk belanja bunga untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

d. Belanja Lain-lain

Tidak terdapat realisasi untuk belanja lain-lain untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

4.3 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.490.933.420,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp5.650.700.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.208.098.663,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.000.000,00	1.696.354.620,00	91,69%	3.108.144.163,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**5.650.700.000,00**	**5.490.933.420,00**	**97,17%**	**3.208.098.663,00**

Rincian Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024 dilihat dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sumber Dana APBD	4.900.700.000,00	4.892.578.800,00	99,83%	2.288.034.900,00
2.	Sumber Dana BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78%	920.063.763,00
	Jumlah	**5.650.700.000,00**	**5.490.933.420,00**	**97,17%**	**3.208.098.663,00**

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.696.354.620,00 atau 91,69% dari anggaran sebesar Rp1.850.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.108.144.163,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	**Sumber Dana APBD**	**1.100.000.000,00**	**1.098.000.000,00**	**99,82%**	**2.188.080.400,00**
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer	-	-	-	223.783.000,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	950.297.400,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	974.000.000,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-	1.100.000.000,00	1.098.000.000,00	99,82%	40.000.000,00
II	**Sumber Dana BLUD**	**750.000.000,00**	**598.354.620,00**	**79,78%**	**920.063.763,00**
	- Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	135.697.000,00
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	87.144.420,00	62.679.420,00	71,93%	35.926.146,00
	- Belanja Modal Meubeleur	81.426.500,00	54.223.500,00	66,59%	87.345.900,00
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	324.826.000,00	243.599.800,00	74,99%	224.508.650,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Lainnya	256.603.080,00	237.851.900,00	92,69%	436.586.067,00
	Jumlah	**1.850.000.000,00**	**1.696.354.620,00**	**91,69%**	**3.108.144.163,00**

c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.118.678.600,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp2.121.649.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	**Sumber Dana APBD**	**2.121.649.000,00**	**2.118.678.600,00**	**99,86%**	**-**
	- Belanja Modal Bangunan dan Gedung-Bangunan Gedung-Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-
II	**Sumber Dana BLUD**	-	-	-	-
	Jumlah	**2.121.649.000,00**	**2.118.678.600,00**	**99,86%**	**-**

d. **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.675.900.200,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp1.679.051.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.954.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	**Sumber Dana APBD**	**1.679.051.000,00**	**1.675.900.200,00**	**99,81%**	**99.954.500,00**
	- Belanja Modal Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00
II	**Sumber Dana BLUD**	-	-	-	-
	Jumlah	**1.679.051.000,00**	**1.675.900.200,00**	**99,81%**	**99.954.500,00**

e. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

f. **Belanja Modal Aset Lainnya**

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.077.055.138,04 dan Rp6.459.162.730,47.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah SiKPA masing-masing sebesar Rp33.290.036.181,10 dan Rp39.769.340.169,43, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025	2024
1)	Realisasi Pendapatan LRA	26.301.750.140,90	19.240.841.228,57
2)	Realisasi Belanja	(59.591.786.322,00)	(59.010.181.398,00)
	Jumlah	**(33.290.036.181,10)**	**(39.769.340.169,43)**

d. Pendapatan APBD

Jumlah Pendapatan APBD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.665.857.149,00 dan Rp34.387.232.577,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025	2024
A.	**Pendapatan APBD**		
1)	Pendapatan Operasional		
	- Belanja Pegawai	26.551.413.775,00	21.467.581.642,00
	- Belanja Barang dan Jasa	4.905.321.761,00	10.631.616.035,00
2)	Pendapatan Investasi		
	- Belanja Modal	4.892.578.800,00	2.288.034.900,00
	Jumlah	**36.349.314.336,00**	**34.387.232.577,00**

e. Setoran ke Kas Daerah

Jumlah Setoran ke Kas Daerah Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.452.876.105,94 dan Rp1.077.055.138,04.

6. Penjelasan Pos-Pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara Pengeluaran-APBD

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran APBD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.2 Kas pada BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, dan Rekening Bank BLUD. Rincian Kas dan Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.452.876.105,94 dan Rp1.084.341.559,84, dengan

	2025	2024
1) Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD		
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
2) Kas di Bendahara Pengeluaran-BLUD		
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	488.153.531,80
3) Kas di Bank BLUD		
- BPD Cab. SoE a.n RSUD SoE No. Rek. 008.01.05.000150-5	5.452.876.105,94	596.188.028,04
Jumlah Kas dan Setara Kas	**5.452.876.105,94**	**1.084.341.559,84**

Dari jumlah Kas pada BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.084.341.559,84, sebagian diantaranya sebesar Rp7.286.421,80 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sehingga jumlah Kas BLUD yang merupakan bagian SiLPA adalah sebesar Rp1.077.055.138,04 = Rp1.084.341.559,84 - Rp7.286.421,80.

6.3 Piutang Operasional BLUD

Piutang Operasional BLUD merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD SoE. Jumlah Piutang Pelayanan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.039.662.190,00 dan Rp5.170.492.625,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Piutang Bruto	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00
- Dikurangi: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(20.299.810,00)	(966.934.375,00)
Jumlah Piutang Neto	**4.039.662.190,00**	**5.170.492.625,00**

Rincian mutasi Piutang Operasional BLUD Tahun 2025, sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31-12-2024	Mutasi 2025		Saldo 31-12-2025
		Tambah	Kurang	
Piutang BPJS	5.196.475.000,00	4.059.962.000,00	5.196.475.000,00	4.059.962.000,00
Piutang Dana Covid	940.952.000,00	-	940.952.000,00	-
Jumlah Piutang (Bruto)	**6.137.427.000,00**	**4.059.962.000,00**	**6.137.427.000,00**	**4.059.962.000,00**

Rincian Mutasi Piutang Operasional BLUD Tahun 2024, sebagai berikut:

Uraian	Saldo 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo 31-12-2024
		Tambah	Kurang	
Piutang BPJS	2.825.311.400,00	19.949.826.200,00	17.578.662.600,00	5.196.475.000,00
Piutang Dana Covid	940.952.000,00	-	-	940.952.000,00
Jumlah Piutang (Bruto)	**3.766.263.400,00**	**19.949.826.200,00**	**17.578.662.600,00**	**6.137.427.000,00**

Penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang 2024				Jumlah Piutang Per 31-12-2025
	< Jatuh Tempo Lancar 0,5%	1 Bulan-P1 Kurang Lancar 10%	1 Bulan-PII Diragukan 50%	1 Bulan-PIII Macet 100%	
1	3	4	5	6	2
Piutang BPJS	4.059.962.000,00	-	-	-	4.059.962.000,00
Piutang Dana Covid	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang (Bruto)	**4.059.962.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.059.962.000,00**
Jumlah Penyisihan	(20.299.810,00)	-	-	-	(20.299.810,00)
Jumlah Piutang Netto	**4.039.662.190,00**	**-**	**-**	**-**	**4.039.662.190,00**

Penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang 2024				Jumlah Piutang Per 31-12-2024
	< Jatuh Tempo Lancar 0,5%	1 Bulan-P1 Kurang Lancar 10%	1 Bulan-PII Diragukan 50%	1 Bulan-PIII Macet 100%	
1	3	4	5	6	2
Piutang BPJS	5.196.475.000,00	-	-	-	5.196.475.000,00
Piutang Dana Covid	-	-	-	940.952.000,00	940.952.000,00
Jumlah Piutang (Bruto)	**5.196.475.000,00**	-	-	**940.952.000,00**	**6.137.427.000,00**
Jumlah Penyisihan	(25.982.375,00)	-	-	(940.952.000,00)	(966.934.375,00)
Jumlah Piutang Netto	**5.170.492.625,00**	-	-	-	**5.170.492.625,00**

Perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut:

	2025	2024
1) Saldo Awal	966.934.375,00	19.719.972,50
2) Pembentukan/beban Penyisihan	20.299.810,00	962.229.615,00
3) Pemulihan Penyisihan	(966.934.375,00)	(15.015.212,50)
4) Saldo Akhir	**20.299.810,00**	**966.934.375,00**

6.4 Persediaan BLUD

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis RSUD SoE per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.842.861.004,40 dan Rp4.535.077.618,11, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Bahan Bakar dan Pelumas	38.890.000,00	26.070.000,00
b. Suku Cadang Alat Angkut	35.765.000,00	60.750.000,00
c. Alat Tulis Kantor	24.801.000,00	64.273.500,00
d. Alat Listrik	14.078.000,00	22.898.500,00
e. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	17.710.000,00	43.956.000,00
f. Obat-Obatan	3.692.492.504,40	4.162.703.216,11
g. Makan Minum Pasien	19.124.500,00	151.766.402,00
h. Benda Pos	-	2.660.000,00
Jumlah	**3.842.861.004,40**	**4.535.077.618,11**

Rincian mutasi persediaan Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01-01-2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-12-2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	Persediaan Bahan				
	- Bahan Bakar dan Pelumas	26.070.000	48.555.000	35.735.000	38.890.000,00
2	Persediaan Suku Cadang				
	- Suku Cadang	60.750.000	77.965.000	102.950.000	35.765.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	- Alat Tulis Kantor	64.273.500	72.601.500	112.074.000	24.801.000,00
	- Alat Listrik	22.898.500	23.951.000	32.771.500	14.078.000,00
	- Bahan Kebersihan	43.956.000	56.172.000	82.418.000	17.710.000,00
4	Obat-Obatan	4.162.703.216	4.454.137.756	4.924.348.467	3.692.492.504,40
5	Makan Minum Pasien	151.766.402	129.530.910	262.172.812	19.124.500,00
6	Benda Pos	2.660.000	110.000	2.770.000	-
	Jumlah	**4.535.077.618,11**	**4.863.023.165,55**	**5.555.239.779,26**	**3.842.861.004,40**

Rincian mutasi persediaan Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31-12-2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Persediaan Bahan				
	- Bahan Bakar dan Pelumas	63.350.000,00	26.070.000,00	63.350.000,00	26.070.000,00
2	Persediaan Suku Cadang				
	- Suku Cadang	57.750.000,00	60.750.000,00	57.750.000,00	60.750.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	- Alat Tulis Kantor	22.985.500,00	64.273.500,00	22.985.500,00	64.273.500,00
	- Alat Listrik	11.117.000,00	22.898.500,00	11.117.000,00	22.898.500,00
	- Bahan Kebersihan	12.145.000,00	43.956.000,00	12.145.000,00	43.956.000,00
4	Obat-Obatan	4.007.622.532,68	4.162.703.216,11	4.007.622.532,68	4.162.703.216,11
5	Makan Minum Pasien	343.552.030,00	151.766.402,00	343.552.030,00	151.766.402,00
6	Benda Pos	1.000.000	2.760.000,00	1.100.000,00	2.660.000,00
	Jumlah	**4.518.522.062,68**	**4.535.177.618,11**	**4.519.622.062,68**	**4.535.077.618,11**

6.5 Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap RSUD SoE per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.137.855.091,00 dan Rp27.987.322.927,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	6.082.450.000,00	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	62.190.900.403,00	60.237.985.570,00
3) Gedung dan Bangunan	19.626.317.699,00	16.401.731.399,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.435.988.916,00	1.740.088.716,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Harga Perolehan	**91.380.657.018,00**	**84.507.255.685,00**
Akumulasi Penyusutan	(60.242.801.927,00)	(56.519.932.758,00)
Nilai Buku	**31.137.855.091,00**	**27.987.322.927,00**

Rincian Aset Tetap Tahun 2025 lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-12-2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	6.082.450.000,00	-	-	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	60.237.985.570,00	2.130.893.433,00	177.978.600,00	62.190.900.403,00
3) Gedung dan Bangunan	16.401.731.399,00	3.651.525.113,00	426.938.813,00	19.626.317.699,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.740.088.716,00	1.695.900.200,00	-	3.435.988.916,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**84.507.255.685,00**	**7.478.318.746,00**	**604.917.413,00**	**91.380.657.018,00**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	49.905.136.515,00	3.386.214.124,00	-	53.291.350.639,00
3) Gedung dan Bangunan	5.113.847.800,00	324.990.007,00	-	5.438.837.807,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.500.823.913,00	11.789.568,00	-	1.512.613.481,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**56.519.808.228,00**	**3.722.993.699,00**	**-**	**60.242.801.927,00**
Nilai Buku				
1) Tanah	6.082.450.000,00			6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	10.332.849.055,00			8.899.549.764,00
3) Gedung dan Bangunan	11.287.883.599,00			14.187.479.892,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	239.264.803,00			1.923.375.435,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00			45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**27.987.447.457,00**			**31.137.855.091,00**

Terdapat Koreksi Saldo Awal tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Saldo Awal 31-12-2024	Koreksi Saldo Awal		Saldo Akhir 01-01-2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	6.082.450.000,00	-	-	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	60.237.985.570,00	-	-	60.237.985.570,00
3) Gedung dan Bangunan	16.401.731.399,00	-	-	16.401.731.399,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.740.088.716,00	-	-	1.740.088.716,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**84.507.255.685,00**	**-**	**-**	**84.507.255.685,00**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	49.905.136.515,00	-	-	49.905.136.515,00
3) Gedung dan Bangunan	5.113.847.800,00	-	-	5.113.847.800,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.500.948.443,00	-	124.530,00	1.500.823.913,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**56.519.932.758,00**	**-**	**124.530,00**	**56.519.808.228,00**
Nilai Buku				
1) Tanah	6.082.450.000,00			6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	10.332.849.055,00			10.332.849.055,00
3) Gedung dan Bangunan	11.287.883.599,00			11.287.883.599,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	239.140.273,00			239.264.803,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00			45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**27.987.322.927,00**			**27.987.447.457,00**

Rincian Aset Tetap Tahun 2024 lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31-12-2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	6.082.450.000,00	-	-	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	55.688.597.907,00	5.051.016.435,00	501.628.772,00	60.237.985.570,00
3) Gedung dan Bangunan	16.401.731.399,00	-	-	16.401.731.399,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.642.359.438,00	102.479.278,00	4.750.000,00	1.740.088.716,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**79.860.138.744,00**	**5.153.495.713,00**	**506.378.772,00**	**84.507.255.685,00**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	46.672.079.389,00	3.234.413.227,00	1.356.101,00	49.905.136.515,00
3) Gedung dan Bangunan	4.795.134.612,00	318.713.188,00	-	5.113.847.800,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.387.704.568,00	113.243.875,00	-	1.500.948.443,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**52.854.918.569,00**	**3.666.370.290,00**	**1.356.101,00**	**56.519.932.758,00**
Nilai Buku				
1) Tanah	6.082.450.000,00			6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	9.016.518.518,00			10.332.849.055,00
3) Gedung dan Bangunan	11.606.596.787,00			11.287.883.599,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	254.654.870,00			239.140.273,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00			45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**27.005.220.175,00**			**27.987.322.927,00**

Tanah lokasi RSUD SoE per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.082.450.000,00, terdiri dari:

No.	Uraian	Lokasi	Luas (M^2)	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Jl. Bougenvil - Kelurahan SoE, Kab. TTS	28.020	6.063.700.000,00
2	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Desa Noinbila, Kec. Mollo Selatan	3.750	18.750.000,00
	Jumlah			**6.082.450.000,00**

Ikhtisar perubahan harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
1) Tanah		
Harga Perolehan		
Saldo Awal	**6.082.450.000,00**	**6.082.450.000,00**
Penambahan:		
- Belanja Modal	-	-
Pengurangan:		
- Pengurangan Tanah	-	
Saldo Akhir Nilai Perolehan	**6.082.450.000,00**	**6.082.450.000,00**

2) Peralatan dan Mesin	**2025**	**2024**
Harga Perolehan		
Saldo Awal	**60.237.985.570,00**	**55.688.597.907,00**
Penambahan:		
- Belanja Modal APBD	1.098.000.000,00	2.188.080.400,00
- Belanja Modal BLUD	-	920.063.763,00
- Kapitalisasi honor-honor dari Barang dan Jasa menjadi aset Peralatan dan Mesin	7.600.000,00	50.675.222,00
- Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	-	101.498.400,00
- Hutang Jangka Pendek (HJP)	-	148.957.200,00
- Reklas dari Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	4.750.000,00
- Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	426.938.813,00	-
Reklas dari Aset Lainnya	598.354.620,00	-
- Mutasi Masuk (Antar OPD)	-	1.636.991.450,00
Jumlah Penambahan	**2.130.893.433,00**	**5.051.016.435,00**
Pengurangan:		
- Koreksi Keluar Hutang Jangka Pendek	148.957.200,00	496.567.320,00
- Reklasifikasi Aset Ekstrakompatable	29.021.400,00	5.061.452,00
Jumlah Pengurangan	**177.978.600,00**	**501.628.772,00**
Saldo Akhir Nilai Perolehan	**62.190.900.403,00**	**60.237.985.570,00**
Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal	**49.905.136.515,00**	**46.672.079.389,00**
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	3.386.214.124	3.234.413.227,00
Jumlah Penambahan	**3.386.214.124,00**	**3.234.413.227,00**
Pengurangan:		
- Koreksi Saldo Awal	-	1.356.101,00
Jumlah Pengurangan	**-**	**1.356.101,00**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**53.291.350.639,00**	**49.905.136.515,00**
Nilai Buku Peralatan dan Mesin	**8.899.549.764,00**	**10.332.849.055,00**

3) Gedung dan Bangunan	**2025**	**2024**
Harga Perolehan		
Saldo Awal	**16.401.731.399,00**	**16.401.731.399,00**
Penambahan:		
- Belanja Modal	2.118.678.600,00	-
- Kapitalisasi Non Belanja Modal	216.303.700,00	-
- Reklas AT dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunaan	1.316.542.813,00	-
Jumlah Penambahan	**3.651.525.113,00**	**-**
Pengurangan:		
- Reklas Aset Tetap ke Peralatan dan Mesin	426.938.813,00	-
Jumlah Pengurangan	**426.938.813,00**	**-**
Saldo Akhir Nilai Perolehan	**19.626.317.699,00**	**16.401.731.399,00**

	2025	2024
Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal	**5.113.847.800,00**	**4.795.134.612,00**
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	324.990.007,00	318.713.188,00
Jumlah Penambahan	**324.990.007,00**	**318.713.188,00**
Pengurangan:		
- Reklas/Pelepasan Aset	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**5.438.837.807,00**	**5.113.847.800,00**
Nilai Buku	**14.187.479.892,00**	**11.287.883.599,00**

4) **Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

	2025	2024
Harga Perolehan		
Saldo Awal	**1.740.088.716,00**	**1.642.359.438,00**
Penambahan:		
- Belanja Modal	1.675.900.200,00	99.954.500,00
- Kapitalisasi honor-honor dari Barang dan Jasa menjadi aset Peralatan dan Mesin	-	2.524.778,00
- Kapitasi Non Belanja Modal	20.000.000,00	-
Jumlah Penambahan	**1.695.900.200,00**	**102.479.278,00**
Pengurangan:		
- Reklas AT ke Peralatan dan Mesin	-	4.750.000,00
Jumlah Pengurangan	-	**4.750.000,00**
Saldo Akhir Harga Perolehan	**3.435.988.916,00**	**1.740.088.716,00**

Akumulasi Penyusutan	2025	2024
Saldo Awal	**1.500.948.443,00**	**1.387.704.568,00**
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	11.789.568,00	113.243.875,00
Jumlah Penambahan	**11.789.568,00**	**113.243.875,00**
Pengurangan:		
- Koreksi Saldo Awal	124.530,00	-
Jumlah Pengurangan	**124.530,00**	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**1.512.613.481,00**	**1.500.948.443,00**
Nilai Buku	**1.923.375.435,00**	**239.140.273,00**

Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.722.993.699,00 dan Rp3.666.370.290,00, dapat dilihat pada catatan 7.2.d.

Ikhtisar perubahan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal Periode	**56.519.932.758,00**	**52.854.918.569,00**
1) Penghapusan Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
2) Koreksi Saldo Awal	(124.530,00)	(1.356.101,00)
3) Beban Penyusutan Tahun Berjalan	3.722.993.699,00	3.666.370.290,00
Jumlah	**60.242.801.927,00**	**56.519.932.758,00**

6.6 Aset Lainnya

Nilai buku Aset Lainnya RSUD SoE per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp151.805.000,00 dan Rp151.805.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	-	-
2) Aset Lain-lain	837.481.496,00	837.481.496,00
Jumlah Harga Perolehan	**837.481.496,00**	**837.481.496,00**
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(685.676.496,00)	(685.676.496,00)
Nilai Buku	**151.805.000,00**	**151.805.000,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2025, sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2025	Mutasi 2025 Penambahan	Mutasi 2025 Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2025
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	837.481.496,00	-	-	837.481.496,00
Jumlah	**837.481.496,00**	**-**	**-**	**837.481.496,00**
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	685.676.496,00	-	-	685.676.496,00
Jumlah	**685.676.496,00**	**-**	**-**	**685.676.496,00**
Nilai Buku	**151.805.000,00**	**-**	**-**	**151.805.000,00**

Rincian Aset Lain-lain Tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2024	Mutasi 2024 Penambahan	Mutasi 2024 Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2024
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	837.481.496,00	-	-	837.481.496,00
Jumlah	**837.481.496,00**	**-**	**-**	**837.481.496,00**
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	685.676.496,00	-	-	685.676.496,00
Jumlah	**685.676.496,00**	**-**	**-**	**685.676.496,00**
Nilai Buku	**151.805.000,00**	**-**	**-**	**151.805.000,00**

6.7 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.286.421,80, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	7.286.421,80
Jumlah	**-**	**7.286.421,80**

dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Bendahara Pengeluaran BLUD		
- PPN	-	6.116.763,06
- PPh 21	-	253.400,00
- PPh 22	-	896.258,74
- PPH 23	-	20.000,00
- Pajak Restoran	-	-
Jumlah	**-**	**7.286.421,80**

6.8 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.929.371.263,00 dan Rp5.353.962.459,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Utang Belanja Pegawai	3.325.784.313,00	2.588.392.304,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	7.603.586.950,00	2.616.612.955,00
3) Utang Belanja Modal	-	148.957.200,00
Jumlah Utang Belanja	**10.929.371.263,00**	**5.353.962.459,00**

Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2025		Saldo Akhir
	01-01-2025	Penambahan	Pengurangan	31-12-2025
1) Utang Belanja Pegawai	2.588.392.304,00	2.949.403.513,00	2.212.011.504,00	3.325.784.313,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	2.616.612.110,00	7.602.815.250,00	2.615.840.410,00	7.603.586.950,00
3) Utang Belanja Modal	148.957.200,00	-	148.957.200,00	-
Jumlah	**5.353.961.614,00**	**10.552.218.763,00**	**4.976.809.114,00**	**10.929.371.263,00**

Pada Tahun 2025 terdapat koreksi saldo awal Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal		Saldo Akhir
	31-12-2024	Penambahan	Pengurangan	01-01-2025
1) Utang Belanja Pegawai	2.588.392.304,00			2.588.392.304,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	2.616.612.955,00	144,00	989,00	2.616.612.110,00
3) Utang Belanja Modal	148.957.200,00			148.957.200,00
Jumlah	**5.353.962.459,00**	**144,00**	**989,00**	**5.353.961.614,00**

Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
	01-01-2024	Penambahan	Pengurangan	31-12-2024
1) Utang Belanja Pegawai	3.998.881.294,00	2.212.011.504,00	3.622.500.494,00	2.588.392.304,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	1.542.536.700,00	2.616.612.955,00	1.542.536.700,00	2.616.612.955,00
3) Utang Belanja Modal	478.484.817,00	148.957.200,00	478.484.817,00	148.957.200,00
Jumlah	**6.019.902.811,00**	**4.977.581.659,00**	**5.643.522.011,00**	**5.353.962.459,00**

6.9 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2024	2024
1) Ekuitas Awal	33.567.790.849,15	35.949.157.741,65
2) Surplus/(Defisit) LO	127.771.904,19	(3.914.824.783,50)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	125.375,00	1.533.457.891,00
Jumlah Ekuitas	**33.695.688.128,34**	**33.567.790.849,15**

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dan 2024 disajikan secara rinci pada catatan no. 9.3.

7. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan

Total Pendapatan RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp61.890.142.289,90 dan Rp55.999.237.405,57, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	24.102.660.295,00	21.514.510.221,00
b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
c. Pendapatan Hasil Kerjasama	92.750.000,00	65.325.000,00
d. Pendapatan Hibah	-	-
e. Pendapatan Lain-Lain	28.874.845,90	32.169.607,57
f. Pendapatan APBD	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
Jumlah Pendapatan	**61.890.142.289,90**	**55.999.237.405,57**

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.102.660.295,00 dan Rp21.514.510.221,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pasien Umum		
- Laboratorium	915.074.331,00	578.437.878,00
- *Ambulance*	1.800.000,00	1.800.000,00
- Konsultasi Medik	78.182.800,00	64.393.800,00
- Persalinan	16.843.205,00	49.758.391,00
- OK	1.211.500,00	11.451.235,00
Jumlah Dipindahkan	***1.013.111.836,00***	***705.841.304,00***

	2025	2024
Jumlah Pindahan	***1.013.111.836,00***	***705.841.304,00***
- Mata	-	34.000,00
- Gigi	22.637.000,00	51.380.604,00
- Rontgen	31.131.000,00	29.488.000,00
- UGD	121.102.605,00	157.819.913,00
- Oksigen	2.875.000,00	500.000,00
- Rawat Inap Umum	220.301.229,00	252.878.418,00
- Obat-Obatan	371.595.238,00	300.994.323,00
- Pelayanan Mobil Jenazah	17.336.220,00	10.343.400,00
- Pelayanan KB	13.665.750,00	16.255.000,00
- Klaim Covid	940.952.000,00	-
2) Pasien Jaminan		
- Jasa Raharja	152.147.165,00	39.149.059,00
- BPJS Kesehatan	21.195.805.252,00	19.949.826.200,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	**24.102.660.295,00**	**21.514.510.221,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp92.750.000,00 dan Rp65.325.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Sewa Lahan Bank	60.000.000,00	30.000.000,00
2) Kontribusi Sewa Lahan Praktek	32.750.000,00	35.325.000,00
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	**92.750.000,00**	**65.325.000,00**

d. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Lain-Lain

Jumlah Pendapatan Lain-lain RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp28.874.845,90 dan Rp32.169.607,57, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Jasa Giro	28.874.845,90	32.169.607,57
2) Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	**28.874.845,90**	**32.169.607,57**

f. Pendapatan APBD

Jumlah Pendapatan APBD RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.665.857.149,00 dan Rp34.387.232.577,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pendapatan Operasional		
a) Beban Pegawai	26.551.413.775,00	21.467.581.642,00
b) Beban Barang dan Jasa	6.221.864.574,00	10.631.616.035,00
Jumlah Pendapatan Operasional	**32.773.278.349,00**	**32.099.197.677,00**
2) Pendapatan Investasi		
a) Beban Modal-Peralatan dan Mesin	1.098.000.000,00	2.288.034.900,00
b) Beban Modal-Gedung dan Bangunan	2.118.678.600,00	-
c) Beban Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.675.900.200,00	-
Jumlah Pendapatan Investasi	**4.892.578.800,00**	**2.288.034.900,00**
Total Pendapatan APBD	**37.665.857.149,00**	**34.387.232.577,00**

7.2 Beban

Total Beban RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp62.729.304.760,71 dan Rp59.929.077.401,57, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	39.745.690.521,00	33.700.025.212,00
b. Beban Barang dan Jasa	19.240.320.730,71	21.600.452.284,57
c. Beban Penyisihan Piutang	20.299.810,00	962.229.615,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.722.993.699,00	3.666.370.290,00
e. Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban	**62.729.304.760,71**	**59.929.077.401,57**

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp39.745.690.521,00 dan Rp33.700.025.212,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Gaji dan Tunjangan	21.974.863.775,00	19.265.481.642,00
2) Beban Tambahan Penghasilan PNS	4.576.550.000,00	2.130.000.000,00
3) Tambahan Penghasilan berdasakan Petimbangan Obyektif Lainnya	-	57.300.000,00
4) Beban Pegawai BLUD	13.194.276.746,00	12.247.243.570,00
Jumlah Beban Pegawai	**39.745.690.521,00**	**33.700.025.212,00**

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN		
- Beban Gaji Pokok ASN	16.595.290.759,00	14.615.762.125,00
- Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.248.140.128,00	1.113.128.274,00
- Beban Tunjangan Jabatan ASN	114.800.000,00	116.759.900,00
- Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.418.234.650,00	1.373.255.650,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	217.607.902,00	146.775.000,00
- Beban Tunjangan Beras ASN	1.419.363.450,00	1.149.563.140,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	149.757.210,00	27.392.935,00
- Beban Pembulatan Gaji ASN	232.213,00	220.874,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	674.392.976,00	601.265.102,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	34.260.969,00	30.339.507,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	102.783.518,00	91.019.135,00
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**21.974.863.775,00**	**19.265.481.642,00**
2) Beban Tambahan Penghasilan PNS		
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.296.050.000,00	-
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.280.500.000,00	2.130.000.000,00
Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS	**4.576.550.000,00**	**2.130.000.000,00**
3) Tambahan Penghasilan berdasakan Petimbangan Obyektif Lainnya		
- Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	57.300.000,00
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasakan Petimbangan Obyektif Lainnya	**-**	**57.300.000,00**
4) Beban Pegawai BLUD		
- Jasa Pelayanan Medis	9.678.164.117,00	8.631.934.089,00
- Jasa/Honor/Insentif Pegawai/ Tenaga Kontrak	3.516.112.629,00	3.341.472.306,00
- Iuran BPJS Kesehatan	-	96.290.072,00
- Iuran Ketenagakerjaan	-	2.149.225,00
- Iuran BPJS 4%	-	175.397.878,00
Jumlah Beban Pegawai BLUD	**13.194.276.746,00**	**12.247.243.570,00**
Jumlah Beban Pegawai	**39.745.690.521,00**	**33.700.025.212,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.240.320.730,71 dan Rp21.600.452.284,57 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Barang	14.694.092.583,71	16.009.948.518,57
2) Beban Jasa	3.468.888.765,00	4.005.735.514,00
3) Beban Pemeliharaan	911.859.085,00	907.059.256,00
4) Beban Perjalanan Dinas	165.480.297,00	677.708.996,00
5) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**19.240.320.730,71**	**21.600.452.284,57**

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025, sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Barang		
a) Beban Barang Pakai Habis		
- Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.078.137.450,00	1.055.943.000,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.635.214.436,00	2.256.722.984,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	324.318.500,00	489.727.357,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	228.804.180,00	176.590.717,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Penggandaan	51.178.078,00	123.431.179,00
- Beban Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.110.000,00	6.736.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	81.079.933,00	118.059.168,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	19.108.175,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	235.558.700,00	31.811.000,00
- Beban Obat - Obatan	4.336.615.317,81	4.065.560.008,57
- Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.097.424.821,90	5.743.382.870,00
- Beban Bahan Bakar dan Pelumas	267.174.500,00	192.270.000,00
- Beban Seragam Kerja	44.344.500,00	-
- Beban Bahan Baku Bangungan	96.633.825,00	-
- Beban Perlengkapan Rumah Tangga	71.713.440,00	-
- Beban Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	113.425.000,00	166.349.500,00
- Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	993.338.502,00	1.243.991.256,00
Jumlah Beban Barang Pakai Habis	**14.665.071.183,71**	**15.689.683.214,57**
b) Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.469.200,00	-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	100.240.770,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	72.167.000,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	25.552.200,00	-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan	-	147.857.534,00
Jumlah Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	**29.021.400,00**	**320.265.304,00**
Jumlah Beban Barang	**14.694.092.583,71**	**16.009.948.518,57**

2) Beban Jasa	2025	2024
a) Beban Jasa Kantor		
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	66.800.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.310.000.000,00	1.519.450.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	13.120.956,00	23.700.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	312.753.600,00	-
- Beban Jasa Tenaga Ahli	540.000.000,00	595.350.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	315.407.500,00
- Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	72.705.000,00	63.825.000,00
- Beban Jasa Kalibrasi	200.530.086,00	166.274.343,00
- Beban Jasa Pengolahan Sampah	84.475.440,00	399.989.610,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	5.540.000,00
- Beban Tagihan Telepon	39.952.135,00	2.576.100,00
- Beban Tagihan Air	357.305.000,00	301.690.000,00
- Beban Tagihan Listrik	299.929.500,00	286.341.700,00
- Beban Paket/Pengiriman	2.193.000,00	954.000,00
- Beban Registrasi/Keanggotaan	-	500.000,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	35.338.007,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.950.945,00	14.721.435,00
Jumlah Beban Jasa Kantor	**3.237.915.662,00**	**3.798.457.695,00**

b) Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2025	2024
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.440,00	1.049.760,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	35.550,00	839.840,00
Jumlah Beban Iuran Jaminan/Asuransi	**63.990,00**	**1.889.600,00**
c) Beban Kursus/Pelatihan		
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	90.286.113,00	185.639.876,00
Jumlah Beban Kursus/Pelatihan	**90.286.113,00**	**185.639.876,00**
d) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi		
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	46.000.000,00	-
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	-	9.879.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	9.869.343,00
- Beban Arsitektur lainnya	94.623.000,00	-
Jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	**140.623.000,00**	**19.748.343,00**
Jumlah Beban Jasa	**3.468.888.765,00**	**4.005.735.514,00**

3) Beban Pemeliharaan	2025	2024
a) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	17.410.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	-	29.995.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	95.505.486,00
- Beban Pemeliharaan Alkes	40.338.614,00	-
Jumlah Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**57.748.614,00**	**125.500.486,00**
b) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	854.110.471,00	781.558.770,00
Jumlah Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**854.110.471,00**	**781.558.770,00**
Jumlah Beban Pemeliharaan	**911.859.085,00**	**907.059.256,00**

4) Beban Perjalanan Dinas	2025	2024
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	165.480.297,00	677.708.996,00
Jumlah Perjalanan Dinas	**165.480.297,00**	**677.708.996,00**

5) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2025	2024
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-
Jumlah Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**-**	**-**
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**19.240.320.730,71**	**21.600.452.284,57**

c. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.299.810,00 dan Rp962.229.615,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	20.299.810,00	962.229.615,00
Jumlah Beban Penyisihan	**20.299.810,00**	**962.229.615,00**

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.722.993.699,00 dan Rp3.666.370.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Peralatan dan Mesin	3.386.214.124,00	3.234.413.227,00
2) Gedung dan Bangunan	324.990.007,00	318.713.188,00
3) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.789.568,00	113.243.875,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**3.722.993.699,00**	**3.666.370.290,00**

e. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.3 Surplus Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp966.934.375,00 dan Rp15.015.212,50 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	-	-
2) (Kerugian) Penurunan Nilai Aset	-	-
3) Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	966.934.375,00	15.015.212,50
Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional	**966.934.375,00**	**15.015.212,50**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 merupakan surplus/(defisit) dari pembalikan penyisihan piutang tidak tertagih.

7.4 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

8. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2025	2024
a. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari:		
1) Pendapatan APBD	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
2) Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	26.180.125.295,00	19.143.346.621,00
3) Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
4) Pendapatan Hasil Kerjasama	92.750.000,00	65.325.000,00
5) Pendapatan Hibah	-	-
6) Pendapatan Lain-Lain	28.874.845,90	32.169.607,57
Jumlah Arus Masuk Kas	**63.967.607.289,90**	**53.628.073.805,57**
b. Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari:		
1) Pembayaran Pegawai	39.057.188.512,00	35.163.714.202,00
2) Pembayaran Barang dan Jasa	15.043.664.390,00	20.638.368.533,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**54.100.852.902,00**	**55.802.082.735,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**9.866.754.387,90**	**(2.174.008.929,43)**

8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2025	2024
a. Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Penerimaan Penjualan atas Tanah	-	-
2) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
3) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
4) Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-	-
6) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
b. Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Perolehan Tanah	-	-
2) Perolehan Peralatan dan Mesin	1.696.354.620,00	3.108.144.163,00
3) Perolehan Gedung dan Bangunan	2.118.678.600,00	-
4) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.675.900.200,00	99.954.500,00
5) Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
6) Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**5.490.933.420,00**	**3.208.098.663,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(5.490.933.420,00)**	**(3.208.098.663,00)**

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2025	2024
a. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
1) Penerimaan Pinjaman	-	-
2) Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
b. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
1) Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
2) Pemberian Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2025	2024
a. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.092.363.890,20	1.743.759.411,80
Jumlah Arus Masuk Kas	**2.092.363.890,20**	**1.743.759.411,80**
b. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.099.650.312,00	1.736.472.990,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**2.099.650.312,00**	**1.736.472.990,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(7.286.421,80)**	**7.286.421,80**

Rincian pemungutan dan penyetoran Pajak Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Tahun 2025

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	730.537.653,94	586.667.755,00	1.317.205.408,94
PPh 21	483.191.417,00	72.180.271,00	555.371.688,00
PPh 22	80.443.569,26	26.106.857,00	106.550.426,26
PPH 23	11.066.934,00	41.866.744,00	52.933.678,00
PPh Ps 4 ayat (2)	11.019.664,00	38.106.715,00	49.126.379,00
Pajak Daerah	11.176.310,00	-	11.176.310,00
Jumlah	**1.327.435.548,20**	**764.928.342,00**	**2.092.363.890,20**

b. Penyetoran Pajak Tahun 2025

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	735.484.758,00	586.667.755,00	1.322.152.513,00
PPh 21	483.464.817,00	72.180.271,00	555.645.088,00
PPh 22	81.593.228,00	26.106.857,00	107.700.085,00
PPH 23	11.983.193,00	41.866.744,00	53.849.937,00
PPh Ps 4 ayat (2)	11.019.664,00	38.106.715,00	49.126.379,00
Pajak Daerah	11.176.310,00	-	11.176.310,00
Jumlah	**1.334.721.970,00**	**764.928.342,00**	**2.099.650.312,00**

Rincian pemungutan dan penyetoran Pajak Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Tahun 2024

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	940.150.407,06	3.620.200,00	943.770.607,06
PPh 21	123.549.744,00	-	123.549.744,00
PPh 22	7.414.136,74	1.733.250,00	9.147.386,74
PPH 23	654.732.675,00	3.792.449,00	658.525.124,00
Pajak Restoran	8.766.550,00	-	8.766.550,00
Jumlah	**1.734.613.512,80**	**9.145.899,00**	**1.743.759.411,80**

b. Penyetoran Pajak Tahun 2024

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	934.033.644,00	3.620.200,00	937.653.844,00
PPh 21	123.296.344,00	-	123.296.344,00
PPh 22	6.517.878,00	1.733.250,00	8.251.128,00
PPH 23	654.712.675,00	3.792.449,00	658.505.124,00
Pajak Restoran	8.766.550,00	-	8.766.550,00
Jumlah	**1.727.327.091,00**	**9.145.899,00**	**1.736.472.990,00**

8.5 Saldo Kas	2025	2024
1) Saldo Awal Kas	1.084.341.559,84	6.459.162.730,47
2) Kenaikan/Penurunan kas Per 31 Desember	4.368.534.546,10	(5.374.821.170,63)
3) Saldo Akhir Kas	**5.452.876.105,94**	**1.084.341.559,84**

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33.567.790.849,15 dan Rp35.949.157.741,65.

9.2 Surplus/(Defisit)-LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing surplus sebesar Rp127.771.904,19 dan defisit Rp3.914.824.783,50, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pendapatan	61.890.142.289,90	55.999.237.405,57
2) Beban	(62.729.304.760,71)	(59.929.077.401,57)
3) Kegiatan Non Operasional	966.934.375,00	15.015.212,50
4) Pos Luar Biasa	-	-
Jumlah	**127.771.904,19**	**(3.914.824.783,50)**

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp125.375,00 dan Rp1.533.457.891, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Koreksi Saldo Awal Piutang BPJS	-	(177.731.100,00)
2) Koreksi Saldo Awal Persediaan Benda Pos	-	1.000.000,00
3) Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah	-	1.636.991.450,00
4) Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	-	1.356.101,00
5) Koreksi Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	124.530,00	-
6) Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Pegawai	-	71.841.440,00
7) Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	845,00	-
Jumlah	**125.375,00**	**1.533.457.891,00**

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33.695.688.128,34 dan Rp33.567.790.849,15.

10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 30 Maret 2026.

Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan/atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Laporan No.: 00056/ML/KAP.IGOR/1/III/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00056/2.1516/AU.5/11/0463-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Pelaksanaan anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) belum dilakukan tepat waktu setiap bulan.
2. Pencatatan/penatausahaan persediaan logistik belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib.
3. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp77.773.353,64 dan persediaan rusak sebesar Rp76.173,00 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan.
4. Pencatatan/penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib.
5. Terdapat aset lain-lain senilai Rp837.481.496,00 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan.
6. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
7. RSUD SoE belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463

Badung, 30 Maret 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) belum dilakukan tepat waktu setiap bulan**

   Pelaksanaan penatausahaan anggaran berupa penyusunan laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD RSUD SoE belum dilakukan secara tepat waktu, dengan mekanisme sebagai berikut:

   a. Penatausahaan pendapatan dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Penerimaan setiap bulan dan Register Penutupan Kas.
   b. Penatausahaan belanja dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Pengeluaran setiap bulan dan Register Penutupan Kas.

   Setiap bulan Pejabat Keuangan menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD untuk ditandatangani oleh Direktur, selanjutnya disampaikan kepada BUD selaku PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD. Pada Tahun 2025 SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang diterbitkan sebagai berikut:

No.	Uraian	SP3B			
		Nomor	Tanggal	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Januari	RSUD/01/SP3B/2025	21/07/2025	1.478.603.723,71	-
2	Februari	RSUD/02/SP3B/2025	28/07/2025	1.904.272.513,31	477.110.839,00
3	Maret	RSUD/03/SP3B/2025	08/08/2025	1.877.437.842,98	430.249.371,00
4	April	RSUD/04/SP3B/2025	26/08/2025	395.363.052,27	2.251.584.544,00
5	Mei	RSUD/05/SP3B/2025	29/09/2025	1.860.743.158,94	1.564.622.085,00
6	Juni	RSUD/06/SP3B/2025	06/10/2025	1.778.606.405,51	734.092.216,00
7	Juli	RSUD/07/SP3B/2025	30/10/2025	3.435.106.637,64	1.823.577.327,00
8	Agustus	RSUD/08/SP3B/2025	12/11/2025	3.128.308.196,44	2.894.079.617,00
9	September	RSUD/09/SP3B/2025	24/11/2025	3.598.573.455,21	884.486.755,00
10	Oktober	RSUD/10/SP3B/2025	09/12/2025	2.954.413.255,62	1.201.733.598,00
11	November	RSUD/11/SP3B/2025	23/12/2025	1.061.000.684,59	3.763.355.609,00
12	Desember	RSUD/12/SP3B/2025	31/12/2025	2.829.321.214,88	5.901.037.212,00
	Total			**26.301.750.141,10**	**21.925.929.173,00**

Sedangkan SP2B sebagai berikut:

No.	Uraian	SP2B			
		Nomor	Tanggal	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Januari	001/SP2B/TTS	22/07/2025	1.478.603.723,71	-
2	Februari	002/SP2B/TTS	05/08/2025	1.904.272.513,31	477.110.839,00
3	Maret	003/SP2B/TTS	15/08/2025	1.877.437.842,98	430.249.371,00
4	April	004/SP2B/TTS	03/09/2025	395.363.052,27	2.251.584.544,00
5	Mei	005/SP2B/TTS	01/10/2025	1.860.743.158,94	1.564.622.085,00
6	Juni	006/SP2B/TTS	15/10/2025	1.778.606.405,51	734.092.216,00
7	Juli	007/SP2B/TTS	06/11/2025	3.435.106.637,64	1.823.577.327,00
8	Agustus	008/SP2B/TTS	19/11/2025	3.128.308.196,44	2.894.079.617,00
9	September	009/SP2B/TTS	03/12/2025	3.598.573.455,21	884.486.755,00
10	Oktober	010/SP2B/TTS	18/12/2025	2.954.413.255,62	1.201.733.598,00
11	November	011/SP2B/TTS	30/12/2025	1.061.000.684,59	3.763.355.609,00
12	Desember	012/SP2B/TTS	31/12/2025	2.829.321.214,88	5.901.037.212,00
	Total			**26.301.750.141,10**	**21.925.929.173,00**

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa pengajuan SP3B dan pengesahan SP2B tidak dilakukan secara tepat waktu setiap akhir bulan.

Permasalahan tersebut tidak sejalan dengan substansi tata kelola PPK BLUD yang antara lain memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam pelaporan pendapatan dan belanja yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 69 menyebutkan bahwa:

a. Ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
b. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
c. Ayat (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
d. Ayat (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Penyampaian pelaksanaan anggaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) harus dimaknai setiap bulan agar laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang juga memuat laporan realisasi anggaran BLUD dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan tidak dapat disajikan tepat waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE untuk dapat mengajukan SP3B tepat waktu sehingga kemudian dapat mendapatkan pengesahan berupa SP2B setiap bulan secara tepat waktu.

2. Pencatatan/penatausahaan persediaan logistik belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap persediaan RSUD SoE tanggal 9 s/d 11 Maret 2026 ditemukan beberapa kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan persediaan sebagai berikut:

a. Persediaan Medis

1) Apotek

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan obat dan BMHP terhadap apotek pada tanggal 9 Maret 2026, diketahui bahwa pihak farmasi RSUD Soe sudah tidak menggunkan kartu stok manual melainkan telah menerapkan sistem akuntansi persediaan. Namun saat dilakukan pemeriksaan fisik diketahui terdapat perbedaan jumlah persediaan antara fisik dan catatan sebagai berikut:

No	Nama Persediaan	Kartu Stock	Fisik	Selisih		Keterangan
				Lebih	Kurang	
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (3-4)	7
1	Ephendrine HCL Injeksi	39	40	1	-	
2	Acetylcysteine/Resfar 25 ml Infus	15	17	2	-	
3	IV Cateter 18 G	88	107	19	-	
4	Extrak Ikan Gabus/Shanna Striata Kapsul	341	360	19	-	
5	Trifed/Tremenza	226	216	-	10	
6	Bupivacaine/Bucain Spinal 0,5	36	37	1	-	
7	Citicoin Sodium Injeksi 250 mg/2 ml	133	132	-	1	
8	Midazolam Injeksi 5mg/ml @3ml/ Sedacum	6	7	1	-	
9	Tetagam P. Prefilled Syiring 1 ml	5	4	-	1	
10	B-Fluid 500ml	24	34	10		
11	Kidmin 200ml	50	29	-	21	
12	Spinocain G 25 x 3 1/2	36	45	9	-	
13	T-Vio 1 (90 cm RB ½ C 35 mm) (V13)	29	28	-	1	
Jumlah		**1.028**	**1.056**	**62**	**34**	

Permasalahan tersebut disebabkan oleh staf apotek melakukan penyelarasan antara stok fisik dengan sistem diakhir bulan tidak langsung dilakukan secara *real time* sehingga pencatatan mutasi persediaan tidak akurat sesuai dengan aliran masuk dan keluar barang dan kurangnya personil pada bagian apotek untuk membantu pencatatan mutasi barang masuk dan barang keluar ke dalam sistem persediaan secara *real time*.

Permasalahan ini mengakibatkan penatausahaan dan pengendalian mutasi persediaan pada bagian unit instalasi farmasi RSUD SoE kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada RSUD SoE untuk memperbaiki penatausahaan persediaan dan meningkatkan pengendalian persediaan.

b. Persediaan Non Medis

Berdasarkan pemeriksaan persediaan barang umum pada gudang logistik pada tanggal 9 Maret 2026, diketahui terdapat kelemahan berupa persediaan suku cadang kendaraan dan materai tidak memiliki kartu stok, sehingga tidak ada dokumen pendukung catatan yang dapat digunakan sebagai kontrol saat dilakukan pengecekan fisik secara real time.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE memperbaiki tata kelola persediaan logistik dengan membuat dan mengisi kartu persediaan sehingga daftar persediaan dan mutasi persediaan dapat diketahui secara *real time*. Selain itu kami merekomendasikan untuk merancang aplikasi pengelolaan persediaan logistik sehingga dapat memudahkan pengelolaan persediaan logistik dan memudahkan pembuatan laporan mutasi secara *real time*.

3. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp77.773.353,64 dan persediaan rusak sebesar Rp76.173,00 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan, terdapat persediaan kedaluwarsa dan persediaan rusak berupa persediaan Obat dan Persediaan Habis Pakai dan Alat Kesehatan yang belum dimusnahkan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Kedaluwarsa

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Dana APBD II						
1	Feeding Tube No 14 Romolene	Pcs	300	Jan 2025	7.642,73	2.292.819,00
2	Feeding Tube No 12 Romolene	Pcs	100	Jan 2025	7.642,73	764.273,00
3	Sofnoline	Jrg	1	Jan 2025	900.000,00	900.000,00
4	Citicolin Injeksi	Ampul	197	Feb 2025	17.500,00	3.447.500,00
5	Nasal Oxigen Anak	Pcs	103	Feb 2025	9.000,00	927.000,00
6	Mecobalamin 500 mg Injeksi	Ampul	100	Jun 2025	8.000,00	800.000,00
7	Sulfadiazin Silver 35 g	Tube	88	Sep 2025	16.870,00	1.484.560,00
8	ETT No. 4.0	Pcs	1	Mei 2025	178.500,00	178.500,00
9	Sevoflurane Anastesi Inhalasi	Botol	2	Jun 2025	799.920,00	1.599.840,00
10	Isosorbid Dinitrat Inj	Ampul	7	Jul 202	52.500,00	367.500,00
11	Simarc 2 mg	Tablet	89	Sep 2025	1.530,00	136.170,00
12	Kadifen 50 mg	Tablet	167	Okt 2025	475,00	79.325,00
Jumlah			**1.155**			**12.977.487,00**
Sumber Dana BLUD						
1	Isosorbid Dinitrate 5 mg	Tablet	2.500	Jan 2025	110,00	275.000,00
2	Lyse Quintus	Galon	1	Jan 2025	7.500.000,00	7.500.000,00
3	Folley Cateter No 6	Pcs	280	Nov 2024	15.273,00	4.276.440,00
4	Folley Cateter No 8	Pcs	60	Nov 2024	15.055,00	903.300,00

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
5	Folley Cateter No 10	Pcs	50	Nov 2024	15.727,00	786.350,00
6	Silk Black 1 1/2 C 30 mm	Pcs	48	Agu 2024	19.284,58	925.659,84
7	Recofol N	Pcs	70	Des 2024	85.500,00	5.985.000,00
8	Allopurinol 100 mg	Tablet	3.220	Mar 2025	218,00	701.960,00
9	Gram Color Stain	Box	1	Mar 2025	8.102.000,00	8.102.000,00
10	Mecobalamin 500 mg	Tablet	1.000	April 2025	806,71	806.710,00
11	Pantoprazole 40 mg Injeksi	Vial	328	Mei 2025	30.000,00	9.840.000,00
12	Amiodaron Injeksi 50 mg/ml	Ampul	120	Jun 2025	15.291,67	1.835.000,00
13	Dentorit / Ceivitron	Pot	1	Jun 2025	210.300,00	210.300,00
14	Atropin Sulfat Inj	Ampul	205	Jul 2025	3.333,00	683.265,00
15	Cresodent	Box	1	Jul 2025	-	-
16	Lisinopril 10 mg	Tablet	752	Jul 2025	292,00	219.584,00
17	ETT No. 6,5 Balon Tanpa Kawat	Pcs	26	Okt 2025	25.568,00	664.768,00
18	ETT No. 5,5 Balon Tanpa Kawat	Pcs	2	Okt 2025	25.569,00	51.138,00
19	Chest Drainage FG No.24	Pcs	8	Nov 2025	113.500,00	908.000,00
20	Glimepirid 3 mg	Tablet	627	Nov 2025	813,36	509.976,72
21	Suction Catheter No. 6	Pcs	160	Nov 2025	6.000,00	960.000,00
22	Thoracidd Thocar Catheter No.24 FR	Pcs	5	Nov 2025	279.000,00	1.395.000,00
23	T- Vio 4-0 (V2) 76 cm 18 mm 1/2 c RB	Pcs	43	Des 2025	90.900,00	3.908.700,00
24	Damaben Injeksi	Ampul	1	Mar 2025	9.450,00	9.450,00
25	Chest Drainage Cath No. 20	Pcs	2	April 2025	40.376,00	80.752,00
26	Chest Drainage Cath No. 28	Pcs	2	April 2025	40.376,00	80.752,00
27	ETT No.4.0 Balon w/ Kawat	Pcs	1	April 2025	806,71	806,71
28	Ezelin Insulin	Pen	2	Mei 2025	89.799,00	179.598,00
29	Gitas Injeksi	Ampul	31	Mei 2025	38.739,00	1.200.909,00
30	Assucryl 1 (TTT85)	Pcs	7	Jun 2025	93.852,00	656.964,00
31	Ezelin Insulin	Pen	2	Mei 2025	89.799,00	179.598,00
32	Seretide Discus	Box	1	Jul 2025	-	-
33	Ondancentron 4 mg	Tablet	14	Agu 2025	292,79	4.099,10
34	Simvastatin 20 mg	Tablet	271	Agu 2025	307,99	83.465,29
35	Dopamin 200 mg/5ml	Ampul	24	Sep 2025	4.189,18	100.540,32
36	Acyclovir SK	Tube	28	Okt 2025	42.900,00	1.201.200,00
37	Naloxon Inj	Ampul	6	Okt 2025	73.144,20	438.865,20
38	Rocoronium Bromide Inj	Ampul	1	Okt 2025	34.459,46	34.459,46
39	Acarbose 50 mg	Tablet	9	Des 2025	750,00	6.750,00
Jumlah			**9.910**			**55.706.360,64**
Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan						
1	Chloroquin 150 mg	Tablet	100	Feb 2025	-	-
2	Chloroquin 150 mg	Tablet	367	Feb 2025	1.601,00	587.567,00
3	Cefadroxyl 500 mg	Kapsul	2.092	Feb 2025	825,00	1.725.900,00

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
4	Amoxicillin Dry Sirup	Botol	15	Jul 2025	4.872,00	73.080,00
5	Oseltamivir Phosphate 75 mg	Tablet	726	Jul 2025	7.000,00	5.082.000,00
6	Tablet Tambah Darah	Tablet	3.000	Jul 2025	225,00	675.000,00
7	DHP Frimal	Tablet	79	Okt 2025	2.851,00	225.229,00
8	Detector Anti HBs	Pcs	90	Nov 2025	-	-
9	Artesunat Injeksi	Ampul	10	Mei 2025	69.898,00	698.980,00
10	OAT Kategori Anak	Tablet	305	Jul 2025	-	-
11	Primaquin 15 mg	Tablet	58	Okt 2025	375,00	21.750,00
Jumlah			**6.842**			**9.089.506,00**
Total Persediaan Kedaluwarsa			**17.907**			**77.773.353,64**

b. Persediaan Rusak

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Dana APBD						
1	Salbutamol Nebul	Ampul	1		9.266,00	9.266,00
Jumlah			**1**			**9.266,00**
Sumber Dana BLUD						
1	Ca Gluconas Injeksi	Ampul	1	Nov 2026	28.612,00	28.612,00
2	Folimid	Kapsul	9	Agu 2026	4.255,00	38.295,00
Jumlah			**10**			**66.907,00**
Total			**11**			**76.173,00**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

1) Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
2) Pasal 422 Ayat (1): pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
3) Pasal 422 Ayat (3): pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
4) Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
6) Pasal 432 Ayat (1): Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

7) Pasal 433

Ayat (1) : Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

a. penyerahan Barang Milik Daerah;
b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pemusnahan; atau
g. sebab lain.

Ayat (2): Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

8) Pasal 434: Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan wawancara terhadap pengurus obat, persediaan kedaluwarsa Obat dan BMHP pada RSUD SoE, pemusnahan obat dilakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur RSUD SoE melakukan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan kedaluwarsa kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan pengusulan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan.

4. Pencatatan/penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap di lingkungan RSUD SoE pada tanggal 10 Maret 2026 ditemukan beberapa kelemahan dalam penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib yakni sebagai berikut:

a. Kartu Inventaris Ruangan yang terbaru belum terpasang pada masing-masing ruangan

Terdapat beberapa ruangan yang belum memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan ditemukan beberapa Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang terpadang di ruangan belum diperbaharui.

b. Tidak semua aset tetap terdapat nomor registrasi

Terdapat beberapa aset/inventaris belum diberikan nomor/kode yang tertera pada aset tetap/inventaris.

Hal ini mengakibatkan kesulitan mengetahui/mengontrol jenis aset/inventaris yang terdapat pada masing-masing ruangan di lingkungan RSUD SoE.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE memperbaiki tata kelola aset tetap terutama kartu inventaris ruangan.

5. **Terdapat aset lain-lain senilai Rp837.481.496,00 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil laporan keuangan RSUD SoE per 31 Desember 2025, diketahui terdapat aset lain-lain sebanyak 38 item dengan kondisi "Rusak Berat" senilai total Rp837.481.496,00 yang masih tercatat dalam Laporan Neraca, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Sisa Nilai Buku (Rp)
A	**Kelompok Aset Belum Disusutkan**			
1	Mesin foto rontgen	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2	Mesin cuci	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Printer HP Deskjet	600.000,00	-	600.000,00
4	Printer Epson	600.000,00	-	600.000,00
5	Kulkas	2.500.000,00	-	2.500.000,00
6	Lemari kayu	530.000,00	-	530.000,00
7	Rak Kayu	1.350.000,00	-	1.350.000,00
8	Vacum pump	5.000.000,00	-	5.000.000,00
9	Timbangan bayi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
10	Kursi roda	1.900.000,00	-	1.900.000,00
11	Mesin ketik	525.000,00	-	525.000,00
12	Vacum pump	5.000.000,00	-	5.000.000,00
13	Tensi meter	250.000,00	-	250.000,00
14	Lemari kecil	600.000,00	-	600.000,00
15	Pesawat Alpon	437.500,00	-	437.500,00
16	Floow meter	450.000,00	-	450.000,00
17	Vacum pump	5.000.000,00	-	5.000.000,00
18	Nebuliser	1.500.000,00	-	1.500.000,00
19	Rice cooker	250.000,00	-	250.000,00
20	Dispenser	275.000,00	-	275.000,00
21	Pesawat telpon	137.500,00	-	137.500,00
	Sub Total (A)	**151.805.000,00**	**-**	**151.805.000,00**
B	**Kelompok Aset Disusutkan Penuh**			
22	Alat Angkutan Darat Bermotor	48.500.000,00	48.500.000,00	-
23	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.100.000,00	7.100.000,00	-
24	Alat Bengkel Bermesin	910.000,00	910.000,00	-
25	Alat Bengkel Tak Bermesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-
26	Alat Ukur	19.915.000,00	19.915.000,00	-
27	Alat Pengolahan	910.000,00	910.000,00	-
28	Alat Pemeliharaan Tanaman	8.400.000,00	8.400.000,00	-
29	Alat Kantor	15.725.000,00	15.725.000,00	-
30	Alat Rumah Tangga	132.244.500,00	132.244.500,00	-
31	Komputer	57.508.000,00	57.508.000,00	-
32	Meja Dan Kursi Kerja Pejabat	1.820.000,00	1.820.000,00	-
33	Alat Studio	840.000,00	840.000,00	-
34	Alat Komunikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-
35	Alat Kedokteran	290.686.496,00	290.686.496,00	-

No	Uraian Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Sisa Nilai Buku (Rp)
36	Alat Kesehatan	13.240.000,00	13.240.000,00	-
37	Unit-Unit Laboratorium	77.340.000,00	77.340.000,00	-
38	Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.037.500,00	3.037.500,00	-
Sub Total (B)		**685.676.496,00**	**685.676.496,00**	-
Total Keseluruhan (A+B)		**837.481.496,00**	**685.676.496,00**	**151.805.000,00**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:
   a. Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
   b. Pasal 422:
      (1) Ayat (1) pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
      (2) Ayat (3) pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
   c. Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
   e. Pasal 432 Ayat (1): Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
   f. Pasal 433
      (1) Ayat (1) : Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
         a. penyerahan Barang Milik Daerah;
         b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
         c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
         d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
         e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
         f. Pemusnahan; atau
         g. sebab lain.
      (2) Ayat (2): Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi..
2) PSAP 07 Paragraf 77 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

3) PSAP 07 Paragraf 78 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Paragraf 31 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE membuat Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah dan meminta pengelola barang untuk segera menindaklanjuti dengan membuat usulan Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah agar segera diterbitkan keputusan penghapusan.

6. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 224/KEP/HK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 RSUD SoE ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Sebagai BLUD RSUD SoE diberikan fleksibilitas untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan terhadap dokumen rumah sakit, diketahui bahwa RSUD SoE belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 4	Sudah ada dalam Raperbup tentang Pola Tata Kelola BLUD
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Perbup No. 51 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan Medis
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Sudah ada Raperbup
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Sudah ada Raperbup
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Sudah ada Raperbup
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Sudah ada Raperbup
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Perbup No. 24 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Perbup No. 29 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

a) Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b) Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c) Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d) Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e) Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f) Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g) Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

h) Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i) Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j) Pasal 83 ayat (6), Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
k) Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l) Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
m) Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
n) Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
o) Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
p) Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE segera mengajukan Raperbup terkait penerapan PPK BLUD kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7. RSUD SoE belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum Daerah adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan layanan. Hasil pemeriksaan pada RSUD SoE diketahui belum memiliki Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

a. Pasal 61 ayat (2) Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah.
b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/BLUD.

Terhadap permasalahan tersebut sudah ada rancangan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan RSUD SoE melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Direktur.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif Lainnya	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 – 23

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. Tien Soeharto No. 56 Telp (0388) 21243 - 21897
TIRTA DHARMA
PERUMDA TTS - NTT

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	FRANS STEVEN TAFUI,SP
Alamat Kantor	:	Jl.Tien Soeharto No.56
Alamat Rumah	:	Niki-Niki RT 017/RW 006 Kel.Niki-Niki Kec.Amanuban Barat
Nomor Telepon	:	081322153738
Jabatan	:	Direksi Perumda Air Minum Kab.TTS

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan;

2. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia;

3. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Soe, 26 Maret 2026
Atas nama dan mewakili Direksi

10000
METERAI TEMPEL
ECD3CANX180590128

FRANS STEVEN TAFUI,SP
Direksi

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00076/3.0410/AU.8/11/2042-2/1/III/2026

Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi

Perumda Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Timor Tengah Selatan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perumda Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Timor Tengah Selatan** ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan tersebut, laporan keuangan tidak terdapat dampak yang material.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan

00076

Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042

26 Maret 2026

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024*	2023
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	2b,4	1.030.279.432	1.572.892.367	1.289.079.035
Piutang usaha – bersih	2c,5	4.725.151.320	3.944.062.501	3.037.408.351
Persediaan	2d,6	583.343.470	547.911.270	649.332.720
Pajak dibayar di muka	11a	142.306.851	151.967.292	151.967.292
Jumlah aset lancar		**6.481.081.073**	**6.216.833.430**	**5.127.787.398**
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	2f,7	3.736.766.640	3.899.433.275	4.277.526.412
Aset lain-lain – bersih	8	147.201.770	147.201.770	147.201.771
Pembayaran dimuka kepada pemerintah daerah	9	365.000.001	365.000.001	365.000.000
Jumlah aset tidak lancar		**4.248.968.410**	**4.411.635.046**	**4.789.728.183**
Jumlah aset		**10.730.049.484**	**10.628.468.476**	**9.917.515.581**
Kewajiban dan Ekuitas				
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang usaha	2g,10	552.075.444	701.836.412	348.439.611
Utang pajak	11b	69.879.451	87.313.799	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		**621.954.895**	**789.150.211**	**348.439.611**
Kewajiban Jangka Panjang				
Kewajiban imbalan pasca kerja	2j,12	867.715.331	762.604.927	374.341.930
Jumlah kewajiban jangka panjang		**867.715.331**	**762.604.927**	**374.341.930**
Jumlah kewajiban		**1.489.670.226**	**1.551.755.138**	**722.781.541**
Ekuitas				
Modal pemerintah daerah	2l,m,n,13	10.391.191.551	10.391.191.551	10.391.191.551
Deviden		(70.015.788)	(99.591.792)	-
Saldo laba (rugi)	14	(1.080.796.505)	(1.214.886.421)	(1.196.457.511)
Jumlah ekuitas		**9.240.379.258**	**9.076.713.338**	**9.194.734.040**
Jumlah kewajiban dan ekuitas		**10.730.049.484**	**10.628.468.476**	**9.917.515.581**

*Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024*
Pendapatan			
Pendapatan penjualan air	2k,15	8.122.557.900	8.506.525.600
Pendapatan penjualan non-air	2k,16	428.461.981	439.824.071
Jumlah pendapatan usaha		**8.551.019.881**	**8.946.349.671**
Beban Usaha			
Beban pegawai	2k,17	(4.751.450.536)	(5.134.967.967)
Beban kantor	2k,18	(2.292.488.683)	(2.203.545.802)
Beban pemeliharaan	2k,19	(673.799.901)	(635.299.480)
Beban penyusutan	2k,20	(622.023.742)	(609.811.437)
Jumlah beban usaha		**(8.339.762.862)**	**(8.583.624.686)**
Laba (Rugi) Usaha		**211.257.019**	**362.724.985**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	2k,21		
Pendapatan lain-lain		93.028.763	6.451.464
Beban lain-lain		(724.623)	(1.799.499)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih		**92.304.140**	**4.651.965**
Laba (rugi) sebelum pajak		**303.561.159**	**367.376.950**
Taksiran beban pajak penghasilan	2h,11c	(69.879.451)	(87.313.798)
Laba (rugi) setelah pajak		**233.681.708**	**280.063.152**
Pendapatan (Beban) komprehensif			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		-	-
Pajak penghasilan terkait		-	-
Laba (Rugi) bersih komprehensif		**233.681.708**	**280.063.152**

*Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Pemerintah Daerah	Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan Statusnya	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah
Saldo 1 Januari 2024	**7.412.420.420**	**2.978.771.131**	**(1.196.457.511)**	**9.194.734.040**
Koreksi saldo laba	-	-	(298.492.062)	(298.492.062)
Deviden	-	-	(99.591.792)	(99.591.792)
Laba tahun 2024	-	-	280.063.152	280.063.152
Saldo 31 Desember 2024*	**7.412.420.420**	**2.978.771.131**	**(1.314.478.213)**	**9.076.713.338**
Deviden	-	-	(70.015.788)	(70.015.788)
Laba tahun 2025	-	-	233.681.708	233.681.708
Saldo 31 Desember 2025	**7.412.420.420**	**2.978.771.131**	**(1.150.812.293)**	**9.240.379.258**

*Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2025	2024*
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi		
Laba (rugi) bersih	**233.681.708**	**280.063.152**
Penyesuaian terhadap laba (rugi) bersih :		
Koreksi aset tetap	622.023.742	609.811.438
Penyusutan aset tetap	-	-
Penyesuaian akumulasi penyusutan	-	(298.492.062)
Laba (rugi) sebelum perubahan modal kerja	**855.705.450**	**591.382.528**
Perubahan atas aset dan kewajiban operasional:		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	(781.088.819)	(906.654.150)
Penurunan (kenaikan) persediaan	(35.432.200)	101.421.450
Penurunan (kenaikan) utang usaha	(149.760.968)	440.710.599
Kenaikan (penurunan) pajak dibayar dimuka	9.660.441	-
Kenaikan (penurunan) utang pajak	(17.434.347)	-
Kenaikan (penurunan) kewajiban imbalan pasca kerja	105.110.403	388.262.997
Jumlah perubahan modal kerja	(868.945.490)	(23.740.896)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**(13.240.040)**	**615.123.424**
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(459.357.107)	(231.718.300)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	**(459.357.107)**	**(231.718.300)**
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan		
Pembagian deviden	(70.015.788)	(99.591.792)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(70.015.788)**	**(99.591.792)**
Kenaikan kas dan bank	**(542.612.935)**	**283.813.332**
Kas dan bank awal periode	**1.572.892.367**	**1.289.079.035**
Kas dan bank akhir periode	**1.030.279.432**	**1.572.892.367**

*Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan pengalihan status dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 4 tahun 2022 penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan air yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat baik rumah tangga, Instansi pemerintah, sosial, niaga dan lainnya serta melaksanakan fungsinya sebagai perusahaan yang efisien serta mampu memperoleh keuntungan untuk pengembangan pelayanan tanpa mengabaikan fungsi sosial kemasyarakatan.

Perusahaan berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 56, Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai beberapa unit Instalasi Saluran Air yang berlokasi di :

1. Pusat/Kota SoE
2. IKK Niki-Niki
3. IKK Kapan
4. IKK Siso
5. IKK Panite
6. IKK Oinlasi/Kie
7. IKK Oe'nino
8. IKK Oe'ekam
9. IKK Kualin
10. IKK Boking

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Dewan Pengawas, Direktur, dan Personalia

1. Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Perusahaan sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76/KEP/HK/2025 Tanggal 25 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengangkat Apris A. Manafe, SE, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Direktur

Direktur Perusahaam Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai diterbitkannya laporan ini sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 85/KEP/HK/2025 Tanggal 8 Mei 2025, tentang Pengangkatan Plt.Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 8 Mei 2025 – 18 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

Plt.Direktur : Susy A.E.Nitbani, S.H

3. Personalia

Jumlah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Pegawai tetap	53 orang	57 orang
Pegawai kontrak	11 orang	9 orang
	64 orang	**66 orang**

4. Pelanggan

Data pelanggan sampai dengan 2025 tercatat sejumlah 8.253 pelanggan dan 2024 tercatat sejumlah 8.152 pelanggan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2025 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Pagu/cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di Perusahaan dan kas di bank, serta investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

Kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai bukan kas dan dicatat dalam akun "Aset yang dibatasi penggunaannya".

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun, yaitu jumlah keseluruhan setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih yang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan individual masing-masing saldo piutang pada akhir periode.

d. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Pencatatan persediaan dilakukan dengan *phsycal inventory method.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli Aset tatap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa Aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran Aset tetap, biaya pemindahan, dan biaya restorasi relokasi, pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskonto dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi Aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat Aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika Aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika Aset tetap tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu Aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

	Masa Manfaat	Persentase (%)
Bangunan permanen	20 Tahun	5%
Instalasi sumber air	20 Tahun	5%
Instalasi pompa, transmisi dan distribusi	16 Tahun	6%
Inventaris kantor dan peralatan produksi	4 Tahun	25%
Kendaraan bermotor	4 Tahun	25%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

Perolehan tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas hak tanah akan ditangguhkan dan disajikan sebagai perkiraan biaya tangguhan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Aset Tetap (Lanjutan)

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya.

g. Utang Usaha

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai beban pada tahun berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan atau banding, jumlah tambahan pokok dan denda pajak tersebut ditangguhkan pembebanannya sampai keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

i. Pendapatan Tangguhan

Pendapatan tangguhan merupakan jumlah yang belum diakui sebagai pendapatan karena belum memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan.

Uang muka yang diterima dari pelanggan-pihak ketiga merupakan penerimaan pembayaran atas penjualan yang belum diakui penjualannya, Perusahaan akan mengakui Uang muka diterima sebagai penjualan di tahun berikutnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah melaksanakan SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.
Pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah diterima / digunakan oleh pelanggan.
Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atas dasar akrual.
Pendapatan dan beban selama tahun berjalan diakui pada laporan penghasilan komprehensif lainnya tahun bersangkutan dengan metode akrual. Pendapatan terjadi diluar usaha dimasukkan kedalam pendapatan lain-lain, sedangkan beban diluar kegiatan usaha operasional dimasukkan kedalam beban lain-lain.

l. Penyertaan Pemerintah

Penyertaan Pemerintah merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berupa uang, aset tetap, barang, peralatan, dan biaya-biaya yang dibayar oleh Pemerintah dan bentuk lainnya yang ditetapkan sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan.

m. Modal Hibah

Penerimaan barang-barang, peralatan dan dana yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterkaitan apapun dibukukan sebagai Modal Hibah. Apabila barang dan peralatan (pipa dan aksesoris) yang diterima tidak dilengkapi dengan harga, maka barang dan peralatan tersebut akan dinilai berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

n. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan pembiayaan untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan atau pinjaman yang harus dikembalikan.

o. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi penjualan, beban pokok penjualan, biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa serta mata uang dari negara yang kekuatan persaingannya dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan penentuan mata uang fungsional adalah mata uang yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan dan penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah dalam Rupiah.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (LANJUTAN)

Penyisihan Atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi pelanggan tertentu yang menurut informasi pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang guna untuk menurunkan piutang Perusahaan ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.
Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan. Perusahaan tidak menerapkan penyisihan atas piutang ragu-ragu.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (LANJUTAN)

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan biaya imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 - 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Kas		
Kas kecil	4.244.150	3.039.750
Kas besar	1.555.700	-
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	1.024.479.582	1.569.852.617
Jumlah kas dan bank	**1.030.279.432**	**1.572.892.367**

5. PIUTANG USAHA

	2025	2024
Piutang rekening air	6.384.346.087	5.603.257.268
Piutang rekening non air	49.468.667	49.468.667
Akumulasi penyisihan piutang usaha	(1.708.663.434)	(1.708.663.434)
Jumlah piutang usaha	**4.725.151.320**	**3.944.062.501**

6. PERSEDIAAN

	2025	2024
Persediaan aksesoris	260.112.746	239.665.796
Persediaan *water meter*	162.035.150	155.266.400
Persediaan pipa	148.678.387	145.474.387
Rupa-rupa persediaan (ATK & lainnya)	12.517.187	7.504.687
Jumlah persediaan	**583.343.470**	**547.911.270**

7. ASET TETAP

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Instalasi sumber air	864.251.163	-	-	864.251.163
Instalasi perpompaan	2.222.624.578	319.120.000	-	2.541.744.578
Instalasi transdis	13.757.159.060	112.067.200	-	13.869.226.260
Bangunan dan gedung	449.214.543	-	-	449.214.543
Alat dan perlengkapan	262.790.030	21.953.907	-	284.743.937
Kendaraan/alat pengangkutan	1.123.266.601	-	-	1.123.266.601
Inventaris/perabot kantor	912.581.943	6.216.000	-	918.797.943
Jumlah	**19.591.887.918**	**459.357.107**	**-**	**20.051.245.025**
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(687.993.998)	(11.696.430)	-	(699.690.428)
Instalasi perpompaan	(1.645.296.636)	(85.423.361)	-	(1.730.719.997)
Instalasi transdis	(11.157.003.527)	(405.102.487)	-	(11.562.106.014)
Bangunan dan gedung	(372.193.774)	(12.390.248)	-	(384.584.022)
Alat dan perlengkapan	(255.182.551)	(2.097.482)	-	(257.280.033)
Kendaraan/alat pengangkutan	(746.310.692)	(57.259.122)	-	(803.569.814)
Inventaris/perabot kantor	(828.473.464)	(48.054.612)	-	(876.528.076)
Jumlah	**(15.692.454.643)**	**(622.023.742)**	**-**	**(16.314.478.385)**
Nilai buku bersih	**3.899.433.275**			**3.736.766.640**

7. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Instalasi sumber air	864.251.163	-	-	864.251.163
Instalasi perpompaan	2.222.624.578	-	-	2.222.624.578
Instalasi transdis	13.558.781.260	198.377.800	-	13.757.159.060
Bangunan dan gedung	449.214.543	-	-	449.214.543
Alat dan perlengkapan	262.790.030	-	-	262.790.030
Kendaraan/alat pengangkutan	1.123.266.601	-	-	1.123.266.601
Inventaris/perabot kantor	879.241.443	33.340.500	-	912.581.943
Jumlah	**19.360.169.618**	**231.718.300**	-	**19.591.887.918**
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber Air	(676.297.567)	(11.696.431)	-	(687.993.998)
Instalasi perpompaan	(1.554.209.604)	(91.087.032)	-	(1.645.296.636)
Instalasi transdis	(10.762.001.902)	(395.001.625)	-	(11.157.003.527)
Bangunan dan gedung	(359.803.527)	(12.390.247)	-	(372.193.774)
Alat dan perlengkapan	(254.175.598)	(1.006.954)	-	(255.182.552)
Kendaraan/alat pengangkutan	(689.051.570)	(57.259.122)	-	(746.310.692)
Inventaris/perabot kantor	(787.103.438)	(41.370.026)	-	(828.473.464)
Jumlah	**(15.082.643.206)**	**(609.811.437)**	-	**(15.692.454.643)**
Nilai buku bersih	**4.277.526.412**			**3.899.433.275**

8. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
a. Aset Tetap Tidak Produktif		
Nilai perolehan aset tetap tidak produktif	81.661.626	81.661.626
Penurunan nilai aset tetap tidak produktif	(81.661.626)	(81.661.626)
Jumlah aset tetap tidak produktif	-	-
b. Piutang Uang Muka Kepada Rekanan		
Nilai nominal piutang uang muka	147.201.770	147.201.770
Jumlah pengembalian uang muka	-	-
Jumlah piutang uang muka	**147.201.770**	**147.201.770**
Jumlah aset lain-lain - bersih	**147.201.770**	**147.201.770**

9. PEMBAYARAN DIMUKA KEPADA PEMDA

	2025	2024
Pembayaran di muka kepada pemda	365.000.001	365.000.001
Jumlah pembayaran dimuka kepada pemda	**365.000.001**	**365.000.001**

10. UTANG USAHA

	2025	2024
Pembelian pipa dan aksesoris lainnya	552.075.444	701.836.412
Jumlah utang usaha	**552.075.444**	**701.836.412**

11. PERPAJAKAN

	2025	2024
a. Pajak Dibayar Dimuka		
PPN	142.306.851	142.306.851
PPh pasal 23	-	9.660.441
Jumlah pajak dibayar dimuka	**142.306.851**	**151.967.292**

11. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

	2025	2024
b. Utang Pajak		
Utang PPh Pasal 29	69.879.451	87.313.799
Jumlah utang pajak	**69.879.451**	**87.313.799**
c. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan		
Laba Komersil	**303.561.159**	**367.376.950**
Koreksi Fiskal		
Beban umum dan administrasi-representatif direktur	192.899.850	144.449.000
Beban kantor-jamuan tamu	38.135.000	30.558.000
Pendapatan jasa giro	(5.714.965)	-
Pendapatan lain-lain	(87.313.798)	
Laba fiskal	**441.567.246**	**542.383.950**
Pembulatan	**441.568.000**	**542.384.000**
Beban pajak		
Dengan fasilitas – 11%	27.265.508	32.010.682
Tanpa fasilitas – 22%	42.613.943	55.303.116
Estimasi beban pajak	**69.879.451**	**87.313.798**
Pajak Penghasilan	**69.879.451**	**87.313.798**

12. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

	2025	2024
Kewajiban imbalan pasca kerja	(867.715.331)	762.604.927
Jumlah kewajiban imbalan pasca kerja	**(867.715.331)**	**762.604.927**

13. MODAL PEMERINTAH DAERAH

	2025	2024
Modal Pemerintah Pusat belum ditetapkan statusnya	2.978.771.131	2.978.771.131
Modal Pemerintah Daerah	7.412.420.420	7.412.420.420
Jumlah modal pemerintah daerah	**10.391.191.551**	**10.391.191.551**

14. SALDO LABA (RUGI)

	2025	2024
Saldo awal	(1.314.478.213)	(1.196.457.511)
Koreksi saldo awal	-	(298.492.062)
Jumlah saldo awal	(1.314.478.213)	(1.494.949.573)
Deviden	(70.015.788)	(99.591.792)
Laba tahun berjalan	233.681.708	280.063.152
Jumlah saldo laba (rugi)	**(1.150.812.293)**	**(1.314.478.213)**

15. PENDAPATAN AIR

	2025	2024
Pendapatan harga air	5.677.887.900	6.015.685.600
Pendapatan jasa administrasi dan dana meter	2.444.670.000	2.490.840.000
Jumlah pendapatan air	**8.122.557.900**	**8.506.525.600**

16. PENDAPATAN NON AIR

	2025	2024
Pemasangan sambungan baru	221.120.950	160.961.893
Pendapatan denda	172.155.000	170.535.000
Penyambungan kembali	11.250.000	11.475.000
Pendapatan non air lainnya	2.262.550	11.702.350
Balik nama	3.750.000	3.000.000
Pindah jaringan	1.350.000	3.600.000
Penggantian meter	770.000	-
Rupa-rupa pendapatan lainnya	15.803.481	78.549.828
Jumlah pendapatan non air	**428.461.981**	**439.824.071**

17. BEBAN PEGAWAI

	2025	2024
Gaji transmisi dan distribusi	842.850.950	887.789.083
Gaji dan honor umum dan administrasi	699.999.098	704.740.035
Tunjangan - tunjangan	366.104.512	376.879.895
Tunjangan transmisi dan distribusi	362.073.042	346.604.509
Gaji hubungan langganan	310.040.280	309.099.990
Gaji kabag. Admin/ keuangan	303.077.969	299.377.968
THR dan gaji XIII	288.339.969	601.067.737
Gaji dan honor Sumber air	255.580.213	188.541.507
Jamsostek	241.611.495	217.919.899
Iuran dana pensiun	212.237.183	210.651.724
Gaji kabag. Teknik	151.338.984	126.440.151
Rupa - rupa biaya pegawai (BPJS)	126.077.195	126.182.806
Tunjangan hubungan langganan	122.788.938	112.122.412
Kesejahteraan direksi/ representatif direksi	119.393.837	121.339.284
Beban imbalan pasca kerja	105.110.405	89.770.935
Tunjangan sumber	91.360.154	57.137.882
Gaji dan honor direktur	56.384.812	155.418.600
Beban penagihan rekening air	31.500.000	51.000.000
Pendidikan dan latihan	30.092.500	52.137.300
Bantuan dan sumbangan	20.914.000	36.975.000
Kesejahteraan pegawai/ insentif	9.200.000	7.800.000
Biaya lembur	3.375.000	-
Biaya pembinaan pegawai dan pakaian dinas	2.000.000	54.771.250
Rupa - rupa biaya pegawai	-	1.200.000
Jumlah beban pegawai	**4.751.450.536**	**5.134.967.967**

18. BEBAN KANTOR

	2025	2024
Beban umum	711.071.126	476.083.601
Beban listrik	681.484.045	699.311.492
Beban BBM	361.552.500	269.616.000
Beban perjalanan dinas	184.997.500	379.309.200
Beban keuangan	117.741.041	111.592.566
Beban ATK dan cetakan	49.692.763	44.502.913
Beban kantor lainnya	185.949.708	223.130.030
Jumlah beban kantor	**2.292.488.683**	**2.203.545.802**

19. BEBAN PEMELIHARAAN

	2025	2024
Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi	406.776.550	378.775.000
Pemeliharaan pipa dinas	153.417.500	100.563.650
Pemeliharaan kendaraan	34.468.601	25.993.042
Pemeliharaan mata air dan sumber	30.272.500	29.075.000
Pemeliharaan bangunan	20.133.750	9.568.950
Pemeliharaan instalasi sumber lainnya	15.466.000	23.279.150
Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi lainnya	6.025.000	57.449.688
Pemeliharaan bangunan pengumpulan & reservoir	5.090.000	7.345.000
Pemeliharaan inventaris kantor	1.650.000	2.750.000
Pemeliharaan taman dan lapangan	500.000	500.000
Jumlah beban pemeliharaan	**673.799.901**	**635.299.480**

20. BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI

	2025	2024
Beban penyusutan instalasi transdis	405.102.485	395.001.625
Beban penyusutan instalasi pompa	85.423.361	91.087.032
Beban penyusutan kendaraan/ alat angkut	57.259.122	57.259.122
Beban penyusutan inventaris kantor	48.054.612	41.370.026
Beban penyusutan bangunan/ gedung	12.390.247	12.390.247
Beban penyusutan instalasi sumber	11.696.431	11.696.431
Beban penyusutan peralatan/ perlengkapan	2.097.481	1.006.954
Jumlah beban penyusutan	**622.023.742**	**609.811.437**

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan bunga/jasa giro	5.714.965	6.451.464
Pendapatan lain-lain	87.313.798	-
Pendapatan imbalan pasca kerja	-	-
Jumlah pendapatan lain-lain	**93.028.763**	**6.451.464**

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (LANJUTAN)

	2025	2024
Beban Lain-lain		
Beban admin bank	(720.000)	(720.000)
Beban lain-lain	(4.623)	(1.079.499)
Jumlah beban lain-lain	**(724.623)**	**(1.799.499)**
Total pendapatan (beban) lain-lain - bersih	**92.304.140**	**4.651.965**

22. PENYAJIAN KEMBALI

	31 Desember 2024		
	Sebelum disajikan kembali	Dampak disajikan kembali	Setelah disajikan kembali
Laporan Posisi Keuangan			
Aset tidak lancar			
Pembayaran di muka kepada pemerintah daerah	464.591.793	(99.591.792)	365.000.001
Ekuitas			
Deviden	-	(99.591.792)	(99.591.792)

23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Perusahaan sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7/KEP/HK/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengangkat Yohanis Naat, SH sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Direktur

Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai diterbitkannya laporan ini sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8/KEP/HK/2026 Tanggal 19 Januari 2026, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

Direktur : Frans Steven Tafui, S.P

24. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diuraikan dan diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2026.